

Kumpulan**Makalah**

Kongres Kebudayaan V

Buku 2

Kumpulan**Makalah**

Kongres Kebudayaan V

BUKU 2

Kumpulan Makalah Kongres Kebudayaan V

Rancang Grafis: Pelita 12

Penerbit: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2003

ISBN: 979-96755-8-8

PENGANTAR

Buku ini merupakan buku II yang berisi kumpulan makalah, setelah buku I yang berisi laporan penyelenggaraan kongres serta buku III yang menyajikan kumpulan tulisan tentang Kongres Kebudayaan 2003 yang termuat di media massa.

Kami menyadari kumpulan makalah ini kurang lengkap. Hal tersebut disebabkan beberapa kesulitan, antara lain karena ketidak hadiran pemakalah yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan spontanitas peserta yang memang diberikan wadah tersendiri untuk menyampaikan makalah atau menjadi pembahas mengenai topik masalah kebudayaan yang aktual. Sayangnya sejumlah pembicara tidak menyerahkan makalahnya kepada panitia.

Harapan kami dengan terbitnya buku kumpulan makalah ini agar mereka yang tidak sempat hadir dalam kongres tersebut juga dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang dibicarakan selama kongres kebudayaan. Di samping itu kumpulan makalah ini juga dapat dijadikan bahan dokumentasi dan informasi dalam penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan selanjutnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam proses penerbitan buku ini

Jakarta, Medio Desember 2003
Panitia Pelaksana

PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

1. **MORDERNISASI KESENIAN DI KALTENG**
Oleh: Prof. H. KMA M. Usop, MA 1

2. **PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA**
Oleh: Prof. Dr. H. Nani Tuloli 4

3. **DIALOG MODAL MODAL BUDAYA KITA**
Oleh: Rahman Arge 20

4. **REPOSISI DAN REINTERPRETASI AGAMA**
Oleh: Salahudin Wahid 26

5. **PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA KRISTEN DALAM PENGEMBANGAN 'KEBUDAYAAN' (KONTEKS NTT)**
Oleh: Rm. Leo Mali 41

6. **PERJALANAN BANGSA INDONESIA MERUPAKAN GERAKAN BUDAYA MENUJU PERADABAN BARU**
Oleh: Roch Basoeki Mangoenpoerojo 51

7. **PENGEMASAN SENI TRADISI BAGI PASAR PARIWISATA GLOBAL**
Oleh: Saini K.M. 70

8. **SENI SEBAGAI FOKUS BUDAYA**
Oleh: Soediro Satoto 76

9. **DIMENSI BUDAYA DALAM SITUASI KONFLIK**
Oleh: Drs. H. Sofyan I.H 81

10. **MUATAN LOKAL DALAM PENYELENGARAAN PENDIDIKAN**
Oleh: Suminto A. Sayuti 84

11. **PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PREPESKTIF BUDAYA**
Oleh Syamsuni Arman 95

12. **MEMPERTIMBANGKAN PUSAKA INDONESIA (BACA PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA)**
Oleh: Taufik Rahzen 105

13. **BILAKAH BERDAUN RIMBA JATI YANG BIBITNYA KITA ULANG TANAM KINI (REFLEKSI ENAM GERAKAN SASTRA HORISON, 1996- 2004)**
Oleh: Taufiq Ismail 108

14. **REINTERPRETASI DAN REPOSISI TERHADAP ADAT DAN TRADISI KASUS MELAYU ISLAM BERAJA DI SERDANG**
Oleh: Tuanku Luckman Sinar Basarsyah-II, SH 121

15. **MULTIKULTURAL DAN REKONSILIASI MENGHINDARI KONFLIK GENERASI KETIGA**
Oleh : Usman Pelly 136

16. **PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL**
Oleh: Sawit Sarwono, Alcara Zamora dan Drs Firmansyah 146

17. **PELAKSANAAN PENGAJARAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI DJAMBI**
Oleh: Utusan Provinsi Jambi 156

18. **DIMENSI BUDAYA DALAM SITUASI KONFLIK**
Oleh: DR. Piet Tanamal (Utusan Maluku) 162

19. **DIMENSI BUDAYA DALAM KONFLIK DI ACEH**
Oleh: Abdul Djunaidi (Utusan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) 176

20. **BUDAYA MELAYU SEBAGAI FAKTOR INTEGRATIF**
Oleh: Utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat 189

21. **KEBUDAYAAN MELAYU SEBAGAI FAKTOR INTERGRASI BANGSA**
Tim Provinsi Riau 195

22. **"LAWATAN SEJARAH" DAN INTEGRASI**
Oleh: Susanto Zuhdi 210

23. **KEMANDIRIAN EKONOMI : MENGHAPUS SISTEM EKONOMI SUBORDINASI**
Oleh: Sri-Edi Swasono 221

24. **RUMITNYA PENCARIAN "DIRI" KULTURAL KETIKA MAKIN SULIT MENEMUKAN GURU BANGSA**
Oleh : Mudji Sutrisno SJ 253

25. **FILANTROPI SENI, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN KESENIAN**
Oleh : Eka Budianta 259

26. **NEGARA, BANGSA DAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN KEBUDAYAAN**
Oleh: Taufik Abdullah 269

27. **BUDAYA DALAM OTONOMI DAERAH**
Oleh: HS. Dillon Sapta Dwikardana 298

28. **ANAK DAN MINAT BUDAYA DIMANAKAH USAHA DAN TANGGUNG JAWAB KITA?**
Oleh: Murti Bunanta 306

29. KONFLIK KEKERASAN DAN REDEFINISI IDENTITAS MENUJU "AJEG BALI"
Oleh: I Nyoman Darmaputra 316

30. ETNOSAINS DAN ETNOTEKNOLOGI/WAWASAN BUDAYA UNTUK PEMBERDAYAAN PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI/LOKAL
Oleh: Heddy Shri Ahimsa 340

31. ORANG AWAM, NEGARA DAN MARTABAT (NYAWA) MANUSIA INDONESIA
Oleh: Mestika Zed 357

32. KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA: PENATAAN POLA PIKIR
Oleh: Meutia Farida Hatta Swasono 359

33. HOROR CULTURE: KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN SIMBOLIK DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA
Oleh: Yasraf Amir Piliang 381

MODERNISASI KESENIAN DI KALTENG

Oleh: **Prof. H. KMA M. Usop, MA**

Potensi

- Berbagai bentuk kesenian (tari, rupa, suara, tari, musik, sastra, beladiri, dsb) lokal sudah ada. Bahkan di kota Kuala Lumpur Kapuas yang K.L. 30 km dari Banjarmasin, sudah masuk wayang berbahasa Banjar/Jawa, madihin dan pergelaran teater. Masuknya agama-agama besar banyak menggusur seni budaya, tetapi kemudian ada upaya untuk memanfaatkan seni budaya untuk acara-acara ritual dan penyebaran keagamaan Kristen. Sebagian besar seni budaya terkait dengan kepercayaan dinamisme dan dengan agama leluhur Kaharingan.

- 1957 : Kalteng provinsi berdasarkan hasrat masyarakat, adat kesukuan dan keagamaan (di kota-kota pesisir Melayu). Komposisi penduduk sekarang : 65% Muslim (separoh Dayak tidak menyebut dirinya Melayu separoh Melayu/pendatang), 25% Kristen Katolik, 10% Kaharingan/Hindu Kaharingan). Palangka Raya mulai dibangun, kota pertama yang dibangun di zaman republik.

- 1970 : Dengan berdirinya provinsi dan kota/ibukota baru, Kalteng mencari identitasnya. Di Palangka Raya sudah mulai dipentaskan seni tari lokal pada kesempatan-kesempatan pertemuan umum tertentu. 1971 di Universitas Palangka Raya berdiri **Lembaga Bahasa dan Seni Budaya dan mulailah upaya dilakukan penggalian (reproduksi) khasanah seni,** terutama seni rupa, seni tari, seni suara termasuk adat istirahat, sejarah dan bahasa. Lembaga ini kemudian terintegrasi dengan kegiatan seni budaya yang digariskan berbeda dengan kegiatan keagamaan (Kaharingan) di Universitas Palangka Raya yang menggariskan, selain melakukan berbagai studi dan penelitian, universitas juga memanfaatkan narasumber local seorang Damang Kepala Adat. Damang Sasilah (budayawan, seniman local) dan memanfaatkan kegiatan kesenian ke dalam program ekstrakurikuler mahasiswa.

- 1981-1988 : UNPAR dapat merekrut beberapa sarjana seni rupa dan seni tari serta sarjana-sarjana bahasa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peneliti-peneliti bahasa dan budaya.

Proses Ekspresif

Terpadu/simultan karena keterkaitan Seni dan Budaya :

- **Penggalian (reproduksi)—pemaknaan.** Dengan memahami sejarah local/tradisional, maka memungkinkan perelevansiannya dengan kehidupan kesenian modern.

- **Relevansi/ refungsionalisasi** harus dilakukan agar relevan dengan zaman, sesuai dengan selera generasi dan pasar sehingga tidak terancam punah dan tak bermakna lagi.

- **Modernisasi : revitalisasi, reinterpretasi, redesain, kreasi baru: pemberdayaan -> identitas seni budaya, terbuka menyerap masukan** daerah-daerah lain dan nasional dan terbuka pada dunia global sehingga terintegrasdi dengan kesenian/kebudayaan nasional dan global, dan tidak terpinggirkan. Seni Budaya suku-suku di Kalteng sekaligus diberdayakan melalui pemberdayaan salah satu suku dominan yaitu **Dayak Ngaju** yang bahasanya secara alami/informal telah menjadi bahasa penghubung (lingua franca). Dengan demikian, seni budaya suku-suku kecil yang terancam punah dapat direvitalisasi dan diintegrasikan dengan seni budaya Dayak Ngaju yang dominan dan telah mampu mempersatukan Kalteng dalam kerangka "Budaya Betang" (budaya rumah panjang, berbeda-beda di bawah satu atap) = Bhineka Tunggal Ika.
- Pola pembinaan dan pengembangan ini dimungkinkan berjalan dengan **partisipasi kampus UNPAR dan organisasi masyarakat** seperti Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalteng **(LMMDD-KT)** dan (Badan Pekerja) Kongres Rakyat Kalteng **(BP-KRKT)**, Musyawarah Besar Damang Kepala Adat Kalteng **(MB-DKA-KT),** serta LSM/sanggar lainnya. Proses Ekspresif tersebut telah menjadi bagian dari pembangunan Kalteng (yang didukung oleh Pemda dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat umumnya).

Produk/Hasil

- Kini kuat kecenderungan memperkaya budaya keagamaan (MTQ dan Pesparanwi) dengan mengintegrasikan seni-budaya local dengan nuansa keagamaan. Dengan demikian, seni budaya Dayak telah menjadi milik bersama masyarakat yang majemuk : multi-kultur, multi-etnik, multi-agama, malah sudah mulai dikomersialkan melalui paket-paket pariwisata.

Jakarta (dalam perjalanan tugas Palangka Raya – Bukit Tinggi), 17 Oktober 2003

PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA*

Oleh: **Prof. Dr. H. Nani Tutoli**

1. Pendahuluan

Masyarakat bersama-sama pemerintah mempunyai misi yang sama dalam pembangunan. Aspek yang sangat penting untuk dibangun dan dikembangkan adalah budaya. Budaya selain menjadi sumber jatidiri bangsa, juga menjadi arah dan motifasi untuk pembangunan. Dalam hal ini, pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa (Djojonegoro, 1998:362)

Di daerah-daerah terdapat juga kebudayaan lokal, yang tentu saja perlu dikembangkan dan diberdayakan guna menunjang pembangunan di daerah. Terutama dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, maka kebudayaan daerah menjadi salah satu sumber daya yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Guna memberdayakan budaya nasional dan daerah, maka perlu proses pengembangannya. Salah satu wahana yang sangat menentukan adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam pengembangan budaya, baik dalam upaya pelestarian nilai-nilai luhur yang sesuai dengan perkembangan masa kini, maupun dalam proses perubahan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini. Pengembangan kebudayaan melalui pendidikan terkait erat pula dengan pembinaan mental moral generasi muda, serta penciptaan suasana kultural yang baik dalam proses belajar mengajar. Agar contoh-contoh yang dikembangkan menjadi konstektual, maka dalam makalah ini dikemukakan beberapa hal yang langsung dikembangkan di lembaga pendidikan swasta di provinsi Gorontalo.

---

*Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V Bukit Tinggi Oktober 2003

**Guru Besar IKIPGorontalo

2. Lembaga Pendidikan Swasta

Peran lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, pada hakikatnya sama dalam pengembangan budaya. Titik temu kedua lembaga itu adalah sama-sama mengembangkan tugas mencapai tujuan pendidikan nasional, dan terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam beberapa hal memang terdapat peran yang khusus pada lembaga pendidikan swasta. Hal itu antara lain karena lembaga pendidikan swasta mempunyai sumber pembiayaan dan asal-usul pendirian yang berbeda dengan lembaga pendidikan negeri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menunjuk pada pengertian yang beragam, di antaranya : (Jalan, 2001:175)

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
(2) Pengambilan keputusan berbasis sekolah;
(3) Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta dan yayasan;
(4) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta;
(5) Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah;
(6) Pusat kegiatan belajar masyarakat;
(7) Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh akar rumput (*grassroot organization*) seperti LSM dan pesantren.

Lembaga pendidikan swasta mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan kebudayaan nasional dan daerah, ditinjau dari beberapa segi :

(1) Lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat karena pendirian dan sumber biayanya berasal dari masyarakat langsung, organisasi sosial (LMS), dan yayasan milik masyarakat atau kelompok orang.
(2) Walaupun kurikulum dan evaluasinya serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, dalam hal-hal khusus terutama yang berhubungan dengan suasana, busana, dan kulturalnya bisa diatur oleh yayasan

atau kelompok masyarakat pendiri sekolah itu.

(3) Penyebaran lembaga pendidikan swasta meliputi wilayah perkotaan sampai ke desa-desa.
(4) Jenjang pendidikan swasta sudah mencakup sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi
(5) Peminat sekolah dan perguruan tinggi swasta sangat banyak, bahkan pada tingkat perguruan tinggi melelebihi mahasiswa perguruan tinggi negeri.

3. Lembaga Pendidikan Swasta di Gorontalo

Di provinsi Gorontalo terdapat lembaga-lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh kelompok-kelompok tertentu.

(1) Kelompok masyarakat dan pemerintah Gorontalo, yaitu Universitas Gorontalo;
(2) Kelompok keluarga seperti pesantren Hubulo oleh keluarga Gobel, pesantren Wira Bhakti oleh keluarga Wiranto, STIA Bina Taruna oleh keluarga Ralunah, Universitas Ichsan Komputer oleh keluarga Gafar;
(3) Kelompok organisasi sosial seperti sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Syarikat Islam;
(4) Kelompok masyarakat keturunan Arab seperti pesantren Al Khairat, pesantren Al Huda, Al Irsyad;
(5) Kelompok masyarakat lain seperti pesantren Al Amin Hidayatullah;
(6) Ada juga sekolah yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat nelayan, petani, dan pedagang.

Beberapa dari lembaga pendidikan swasta itu telah mempunyai jaringan yang luas sehingga telah membuka cabangnya di setiap wilayah seperti Al Khairat. Ada pula yang mempunyai dukungan yang kuat dari perusahaan seperti pesantren Hubulo. Para pengajar di pesantren Al Huda dan juga di Hubulo ada yang berasal dari luar negeri , seperti dari Mesir atau Arab Saudi. Beberapa lembaga masih sangat lemah dalam fasilitasnya sehingga memerlukan bantuan guna pengembangannya. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, tentu saja mereka mempunyai aturan-aturan khusus yang berorientasi pada nilai-nilai budaya dan agama.

Masyarakat Gorontalo adalah mayoritas beragama Islam dan budayanya pun sudah bernuansa Islam. Oleh Menteri Agama telah dibentuk satu organisasi pengembangan kebudayaan Islam di Gorontalo, yaitu Badan Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia (BPKI-KTI). Dalam seminar nasional tanggal 20 dan 21 September 2003 yang lalu, telah diputuskan bahwa kebudayaan Islam akan dikembangkan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus di provinsi Gorontalo, baik yang negeri maupun yang swasta. Ini berarti sekolah-sekolah di Gorontalo akan menerapkan nilai-nilai budaya nasional sekaligus nilai-nilai budaya lokal yang bernuansa Islam, dalam interaksi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Di samping itu, kebudayaan Islam akan dapat diajarkan sebagai bagian dari muatan lokal dan ekstrakurikuler.

Peranan lembaga pendidikan swasta dan negeri di Gorontalo dalam pengembangan budaya adalah : (1) mengembangkan nilai-nilai budaya itu dalam kehidupan sekolah dan kampus, (2) mewariskan nilai-nilai budaya kepada siswa dan mahasiswa, (3) mengadakan pengkajian secara ilmiah nilai-nilai budaya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendokumentasian, (4) menciptakan para budayawan yang ilmuwan sebagai kader-kader pemimpin. Hal itu telah dirumuskan sebagai hasil keputusan seminar Nasional Pengembangan Islam Kawasan Timur Indonesia di Gorontalo, 20 dan 21 September 2003.

4. Arah Pengembangan Budaya

Perubahan-perubahan akhir-akhir ini memperlihatkan hal-hal yang menggembirakan, tetapi juga mengkhawatirkan apabila dipandang dari sisi perkembangan budaya. Banyak upaya untuk mengembangkan aspek-aspek dan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan perkembangan iptek dan arus globalisasi. Tuntutan reformasi sekarang mengarah pada dua tujuan yang strategis, yaitu: (1) merehabilitasi dan mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik negara kita, dan (2) memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai persiapan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang adil dan terbuka, pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (Buchari, 2001:87)

Di tengah-tengah perubahan yang sesuai dengan harapan

masyarakat terjadi pula kondisi yang tidak menguntungkan. Semua itu perlu diperhitungkan dan diantisipasi dalam upaya pengembangan budaya. Hal itu meliputi hampir semua bidang aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan keamanan, agama, dan ekologi (lihat: Azra,2002:210-221)

Akhir-akhir ini konflik sosial terjadi di mana-mana, yang ditandai dengan tindakan melampaui batas kemanusiaan. Tindakan kekerasan, saling membunuh, saling bakar, saling merusak, bahkan ada tindakan penggusuran tanpa mempertimbangkan aspek-aspek moral dan kemanusiaan. Konflik-konflik sosial itu dapat kita simak melalui berita televisi, radio,surat kabar, dan majalah tiap hari. Mungkin semua ini menjadi tanda munculnya kekecewaan, ketidakadilan, ketidakjujuran, persaingan hidup yang ketat, kecemburuan sosial, emosi kedaerahan dan kesukuan, dan lain-lain. Selain itu, kepentingan individu saling berbenturan seperti ambisi, arogansi, kelakuan kurang sopan, keinginan cepat maraih kemewahan, mempertahankan kekuasaan pribadi, yang semuanya bermuara pada pertentangan, perpecahan, ketidakselarasan, dan kontradiksi (Mulder, dalam Sumjati, 2001:13)

Berbagai kondisi yang digambarkan di atas memerlukan upaya pengembangan budaya yang dapat menjawab dan mengarahkannya. Pengembangan itu menjadi dasar penyusunan konsep dan kebijakan yang strategis untuk menata kebudayaan kita ke masa depan. Arah pengembangan kebudayaan meliputi budaya nasional dan budaya lokal. Ragam kebudayaan yang dikembangkan terdiri atas dua kelompok, yaitu: (1) hasil budaya yang dapat dijamah dan disentuh secara fisik (tangible) yang lazim disebut sebagai material culture, misalnya benda-benda purbakala, rumah adat, istana, benteng kuno, candi, kuil, mesjid, gereja, batu ukir, arca, kerajinan tangan; (2) hasil budaya yang tidak bisa di jamah atau disentuh secara fisik (intangible) yang sebagian besar cakupannya merupakan spritual/intelectual culture, misalnya adat istiadat, ilmu pengetahuan, kesenian, sastra, teknologi, hukum, pendidikan, perilaku kolektif, gagasan, ide bersama (Azra,2002:222)

Pengembangan kebudayaan terarah pula pada upaya menunjang pembangunan. Kebudayaan bukanlah unsur

eksternal dalam pembangunan. Dengan kata lain, budaya adalah suatu strategi bagaimana merencanakan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan (Djojonegoro, 1998:364). Ini berarti perlu dikaji warisan budaya yang mempunyai potensi mendukung pembangunan. Selain itu, ada pula konsep-konsep dan gagasan budaya yang perlu diperjuangkan. Sehubungan dengan itu, perlu secara sadar kita menyerap nilai-nilai positif yang menunjang pembangunan dan menepis nilai-nilai negatif tanpa kehilangan jatidiri yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa kita. Semua ini membawa pda perubahan dalam nilai, sikap, perilaku, dan wawasan masyarakat.

Pada prinsipnya ada tiga arah pengembangan kebudayaan, yaitu sebagai berikut (1) Pengembangan kebudayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manuasia dan masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik yang bersifat materi,etis, maupun estetis; (2) Pengembangan kebudayan merupakan bagian dari upaya bangsa dalam menghadapi globalisasi dan mengantisipasi masa depan, dengan segala masalah dan tantangannya. Warisan budaya masa lalu tetap penting dan bermakna, namun harus ditambah dengan nilai-nilai baru, serta diadakan interpretasi baru secara kreatif; (3) Pengembangan kebudayaan mengarah pada keutuhan pandangan guna membendung munculnya perpecahan dan kontradiksi di kalangan masyarakat yang pluralistik ini (Djojonegoro, 1998:377)

5. Nilai-nilai Budaya yang Perlu Dikembangkan

Siswa,mahasiswa, dan staf pengajar di lembaga pendidikan swasta hendaklah memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya yang bermanfaat. Koentjaraningrat (1993:32-36), secara ringkas mengemukakan nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut

(1) Nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, seperti hidup hemat, berhati-hati, bersih, bersemangat;
(2) Nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan dan kekuasaan alam, misalnya inovasi teknologi sesuai dengan lingkungan dan potensi alam;
(3) Nilai budaya yang memandang tinggi hasil karya manusia, yaitu motivasi untuk berbudaya kreatif dan produktif, serta berkarya sendiri;

(4) Nilai budaya yang mendorong pada kemandirian, percaya diri, untuk mencapai sesuatu keberhasilan yang tinggi;
(5) Nilai budaya yang mengembangkan tanggung jawab bersama sehingga mau berpartisipasi, bergotong royong, toleransi, dan mau hidup berdampingan.

Selanjutnya, H.A.R. Tilaar (1998:231-236) menyebut nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan di sekolah dan di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut
(1) Nilai-nilai yang menitik beratkan pada perjuangan kelayakan hidup, yaitu pengembangan nilai-nilai ekonomi agar terlepas dari kemiskinan;
(2) Nilai mepertahankan jati diri atau mempertahankan keberadaan, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang makmur dan adil;
(3) Nilai yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, terutama dalam menghiadapi dunia yang semakin terbuka, budaya inovatif, kreatif, produktif;
(4) Nilai yang melindungi kehidupan yang bersama yang prural, yaitu solidaritas, keadilan, dan pemerataan;
(5) Nilai otonomi yang menghimbau terjadinya persaingan yang sehat dalam dunia global, inovatif, menciptakan nilai-nilai baru;
(6) Nilai aman, dami, tentram, yang menciptakan kondisi membangun yang cepat dan terkenal kembali;
(7) Nilai berinteraksi dengan lingkungan, demi kelestarian potensi alam sehingga ada rasa bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Dalam menghadapi gejolak perubahan nilai budaya yang menuju le budaya kekerasan, maka nilai budaya kemanusiaan perlu dikembangkan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam interaksi siswa dengan siswa, mahasiswa dengan mahasiswa, siswa dengan guru, mahasiwa dengan dosen. Pada masa sekarang nilai-nilai itu makin terlupakan, yang antara lain :
(1) Sikap sopan santun yang dilandasi oleh norma dan normal dari nilai budaya;
(2) Keselarasan hidup bersama dan berdampingan;
(3) Kerukunan hidup yang terwujud dalam tolong-menolong dan kedamaian;

(4) Kasih sayang dan kekeluargaan di antara sesama teman, tetangga, dan anggota kelompok;
(5) Rasa malu untuk berbuat sesuatu yang tidak senonoh, tidak wajar, atau yang bertentangan dengan norma budaya.

Nilai-nilai budaya yang diungkapkan di atas sebenarnya tercakup dalam budaya nasional dan budaya lokal. Pertemuan dengan budaya lain, menimbulkan proses adaptasi dan penyelarasan nilai-nilai sehingga muncul nilai-nilai baru yang dinamis. Penerapan nilai-nilai itu di sekolah dan perguruan tinggi memerlukan strategi yang khusus.

6. Strategi Pengembangan Budaya di Lembaga Pendidikan Swasta

Bagaimana cara agar lembaga pendidikan swasta bisa berperan dalam pengembangan budaya, memerlukan berbagai strategi. Strategi itu merupakan siasat atau mungkin pendekatan yang bisa dijalankan oleh lembaga sehinga pengembangan budaya bisa berproses. Dalam lembaga pendidikan hasil keluarnya ditentukan oleh tiga aspek yang penting, yaitu pengajar, proses belajar mengajar, dan sarana dan prasarana. Kualitas ketiga aspek itu turut menentukan kualitas hasil atau keluaran lembaga pendidikan. Berikut ini, dikemukakan beberapa strategi yang dikembangan dalam lembaga pendidikan swasta yang mampu menunjang pengembangan pendidikan.

a. Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya

Siswa dan guru termasuk elemen sumberdaya manusia secara mikro. Di sekolah siswa dan guru berinteraksi dalam rangka menciptakan masyarakat demokrasi yang cerdas. Manusia cerdas tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan etika serta kecerdayan estetika. Ini berarti SDM yang dikebangkan adalah manusia yang terdidik, pintar, dan berbudaya. Budaya dalam hal ini bermanfaat untuk pembentukan kepribadian yang luhur, dengan emosi terkendali, memiliki mental dan moral seperti yang telah dikembangkan sebelumnya (nilai-nilai budaya), serta peka terhadap nilai-nilai estetika budaya nasional dan lokal (Tilar, 2000:209)

Nilai-nilai budaya itu sangat bermanfaat untuk

mengembangkan pola hidup mereka dalam masyarakat. Pendidikan pada prinsipnya adalah mempersiapkan siswa dan mahasiswa untuk menghadapi kehidupan, yang meliputi:

(1) Untuk dapat hidup layak
(2) Mengembangkan kehidupan yang bermakna
(3) Menghargai hidup ini.

(Buchori, 2001:Kanisius)

Budaya yang perlu dikembangkan untuk membina siswa dan mahasiswa adalah yang bernuansa global, nasional, dan lokal. SDM yang kita harapkan adalah SDM yang berakar pada budaya daerah dan nasional, tetapi yang mampu bersaing dan berinteraksi secara global. Simbol-simbol budaya lokal perlu juga dimanfaatkan untuk membina SDM. Contoh praktis dalam budaya lokal Gorontalo terdapat simbul : *popoh* , bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku, berbuat, dan berbicara. Orang bukan dilihat dari harta dan pangkatnya, tetapi tingkah lakunya, *ayuwa* bagaimana orang yang perangai emosionalnya dalam pergaulan. Masyarakat Gorontalo sangat menghargai penampilan ramah tamah, rendah hati, suka menyalami, dan bersahabat (Tuloli, 2002;14)

(1) Berdasarkan pandangan di atas, maka lembaga pendidikan mempunyai tugas mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada peserta didik;
(2) Menciptakan suasana interaksi antara komponen dalam lembaga itu yang sesuai dengan nilai-nilai budaya;
(3) Mengembangkan penghayatan dan pemahaman siswa dan mahasiswa terhadap nilai-nilai budaya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka secara perorangan maupun bersama-sama;
(4) Mengembangkan kehidupan berbudaya yang menjadi pengikat antarsiswa yang berasal dari latar belakang yang beragam.

b. Pengajaran Nilai Budaya

Melalui pendidikan dan pengajaran dapat dibentuk dan dikembangkan pola-pola kepribadian manusia, dan sekaligus diwariskan dan dikembangkan nilai-nilai kebudayaan. Strategi pengembangan kebudayaan dapat dilaksanakan kalau nilai-nilai budaya itu dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar.

Kebudayaan dapat dijadikan dasar untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi sebaliknya kebudayaan itu dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui penerapan nilai-nilainya dalam proses interaksi di kelas (Soelaiman, dalam Nasution, 1994;143).

Ada beberapa alternatif untuk mengembangkan kebudayaan dalam pengajaran yaitu sebagai berikut;

(1) Kebudayaan dijadikan salah satu bagian dari kurikulum lokal yang dapat diberikan pada kelas-kelas semester tertentu.
(2) Kebudayaan diajarkan secara terintegritasi dengan mata pelajaran lainnya, misalnya dalam pembinaan budi pekerti atau yang berhubungan dengan pelajaran kemanusiaan.
(3) Di perguruan tinggi telah ada Ilmu Budaya Dasar, namun perlu dilengkapi nilai-nilai budaya yang lain yang sesuai dengan perkembangan baru, termasuk nilai-nilai budaya lokal;
(4) Kebudayaan dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler, terutama dalam kepramukaan, kesenian dan olah raga, karya wisata, lomba-lomba, dan lain-lain.

Pengajaran sastra daerah dan sejarah daerah yang dikaitkan dengan adat-istiadat perlu dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler. Di Gorontalo sering ada lomba membacakan dan menciptakan sastra daerah, juga pagelaran peradaban Gorontalo. Lomba itu cukup mendapat perhatian besar dari kalangan siswa dan mahasiswa. Ini berarti bahwa unsur-unsur budaya lokal relevan untuk dikembangkan di sekolah dan perguruan tinggi.

c. Pembiasaan Hidup Berbudaya

Pembiasaan adalah suatu cara pengembangan kebudayaan yang memungkinkan siswa atau mahasiswa bertingkah laku secara wajar sesuai nilai dan norma budaya itu. Dengan pendekatan pembiasaan, siswa atau mahasiswa diberi kesempatan untuk mengamalkan dan melaksanakan norma-norma budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari (Ramayulis, 2002;151).

Berawal dari pembiasaan seorang siswa akan secara terus-menerus mengikuti norma atau aturan yang diarahkan. Pembiasaan hidup berbudaya memerlukan waktu yang lama. Namun, apabila nilai budaya itu telah terbiasa pada seseorang,

maka hal itu menjadi suatu pola hidupnya sepanjang hayat.

Untuk mengembangkan budaya melalui pembiasaan, maka perlu diadakan upaya sebagai berikut, (1) Menjabarkan nilai-nilai budaya itu dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku yang dapat ditiru. Misalnya dijabarkan dalam bentuk busana muslim, tindakan yang adil dan jujur, suka menolong orang dalam kerja atau kesulitan belajar, saling kerja sama dalam memecahkan suatu masalah, dan membiasakan memberi salam atau hormat, (2) Mengembangkan contoh-contoh yang baik dan menghargai pelakunya, baik guru maupun siswa. Misalnya, guru yang suka bergaul dengan ramah dan sopan antara sesama guru dan dengan siswa, memberikan penghargaan kepada siswa yang selalu sopan dan bertingkah laku baik yang sesuai dengan norma budaya , dll; (3) Membuat aturan-aturan yang harus ditaati yang dikembangkan dari nilai-nilai budaya. Misalnya disiplin masuk kelas, disiplin belajar, aturan yang menyangkut nilai etika dan moral; (4) Mengembangkan kebiasaan budaya produktif dan berkarya. Misalnya penciptaan karya seni, kegiatan yang mengembangkan keterampilan dan prakarsa.

Di beberapa sekolah swasta dan pesantren pelaksanaan simbol-simbol budaya telah berlangsung seperti busana muslim, keramahan menerima tamu, memberi salam dan menghormati orang, cara memulai dan mengakhiri kerja, cara makan, bekerja sama, dll. Hal ini berlaku bagi siswa, guru, dan pegawai tata usaha.

Pembiasaan dapat juga dilaksanakan dengan metode-metode latihan, pemberian tugas, demonstrasi, dan eksperimentasi. Nilai-nilai budaya inovatif dan produktif dapat dikembangkan melalui metode-metode tersebut. Dengan pembiasaan, suasana di sekolah akan teratur aman, damai, toleran, dan dinamis. Nilai-nilai budaya ini kelak akan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan diri dan kehidupan yang demokratis serta bertanggung jawab. Siswa juga dapat dibina melalui kebiasaan untuk hidup sehat, bersih, dan indah.

d. Mencintai Budaya

Mencintai budaya hendaklah diawali dengan penghargaan atau apresiasi terhadap nilai budaya. Di sekolah perlu ada upaya untuk pengkajian, pemahaman, dan pengumpulan, serta

pemeliharaan karya-karya budaya. Karya budaya dapat diadakan interpretasi baru yang bisa menunjang dan memotivasi pembangunan. Penginterpretasian itu dapat dikatakan pemberian makna baru yang sesuai dengan perkembangan masa kini dan yang akan datang. Melalui pemaknaan baru, akan dapat pula diciptakan karya-karya budaya baru. Sehubungan dengan upaya mencintai budaya itu, maka perlu didekatkan siswa dengan aspek-aspek budaya itu.

Untuk upaya mendekatkan unsur budaya kapada siswa dan mahasiswa, maka yayasan perlu membangun sarana-sarana penunjang :

(1) membangun perpustakaan dan taman bacaan yang berisi karya-karya budaya yang bermutu (novel, puisi,drama, dan lain-lain);
(2) mengumpulkan benda-benda dan model-model karya budaya nasional dan lokal; dan
(3) membangun bengkel-bengkel seni/budaya yang menjadi tempat berlatih dan berkarya seni bagi siswa dan mahasiswa.

Selain itu perlu pula diadakan berbagai kegiatan yang merangsang siswa dan mahasiswa untuk mencintai budaya, antara lain :

(1) membuat lomba dengan penghargaan yang lumayan dalam cipta karya budaya;
(2) mengadakan penelitian dan pengkajian karya budaya yang berhubungan dengan sastra, sejarah, lukisan, rumah adat, tempat ibadah, senjata, alat-alat musik, dan lain-lain;
(3) mengadakan diskusi, seminar, demonstrasi, pameran, dan pertunjukan yang berhubungan dengan karya budaya; dan
(4) mengembangkan kegiatan menulis, menerjemahkan, dan menyadar karya-karya sastra lokal agar dapat dicetak dan disebarluaskan.

Dengan menerapkan empat strategi di atas, yaitu sumber daya manusia yang berbudaya, pengajaran nilai budaya, pembiasaan hidup berbudaya, dan mencintai budaya, maka pada hakikatnya kita telah menerapkan empat pilar proses belajar, yaitu (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together* (Soedijarto, 2000:69). Siswa dan mahasiswa dapat memahami dan menghayati apa dan

bagaimana nilai budaya. Mereka dapat melakukan dan mengamalkan secara aktif, baik intelektual, motorik, maupun emosional semua kegiatan dan praktik budaya baik dalam diri mereka maupun secara bersama-sama. Selain itu, siswa dan mahasiswa dapat mengenal dirinya, mengembangkan kemandiriannya, serta percaya pada dirinya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dibiasakan padanya. Terakhir siswa dan mahasiswa dapat menghayati dan memahami bagaimana hubungannya dengan orang lain atau sesama mereka tanpa melihat perbedaan latar belakang ras, agama, suku, keyakinan politik, dan tingkat kemampuan ekonomi. Mereka dapat hidup bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai toleransi, nilai kemanusiaan, moral, dan agama, tolong-menolong, dan saling menghargai sesama mereka.

7. Penutup

Lembaga pendidikan swasta, sama dengan lembaga pendidikan negeri, mempunyai potensi yang besar untuk turut dalam pengembengan budaya nasional dan lokal. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan budaya itu adalah :

(1) tenaga pengajar yang benar-benar menguasai dan memahami budaya
(2) sarana dan prasarana penunjang, yang menjadi pusat belajar dan pengkajian budaya, terutama di SMTA dan Perguruan Tinggi
(3) aspek-aspek proses belajar, kondisi, dan aturan yang memungkinkan terjadinya pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda
(4) keteladanan dari para pimpinan sekolah, guru-guru, dan pengurus yayasan yang memperlihatkan penerapan nilai-nilai budaya dlam kehidupan mereka; dan
(5) pengembangan sistem terpadu antara orang tua, pendidik, pemerintah, dan lingkungan yang menciptakan kondisi yang tepat dalam pengembangan budaya itu.

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian makalah ini dapat disimpulkan peranan lembaga pendidikan swasta sebagai berikut

(1) mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dengan mengembangkan SDM yang berbudaya, yang memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai tersebut;

(2) memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui pengajaran, pengkajian, penelitian, pendokumentasian, pembiasaan, seminar, dan lain-lain;
(3) mengarahkan nilai-nilai budaya agar dapat mendukung pembangunan
(4) mempertahankan nilai-nilai budaya yang luhur dari budaya nasional dan lokal dan memperjuangkan nilai-nilai budaya yang baru; dan
(5) mengembangkan nilai-nilai budaya itu dalam pola hidup dan kepribadian generasi muda (siswa dan mahasiswa), agar mereka mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumadi
2002 *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekontruksi dan Demokratis*. Jakarta : Penerbit buku Kompas

Buchori, Mochtar
2001 *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta :Penerbit Kanisius

Darma, Budi
1995 *Harmonium*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Departemen Agama
2003 *Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Proyek Sinkronisasi Dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Djojonegoro, Wardiman
1998 *Lama Tahun Mengemban Tugas Pengembangan*

SDM. Jakarta: Depdikbud
1998 *Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kebudayaan*, Jakarta: Depdikbud
Jalal, Fasli Dan Dedi Supriadi
2001 *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita

Koentjoroningrat
1993 *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia

Nasution, Muslimin (Ed)
1994 *Kumpulan Makalah Penunjang Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI* Jakarta: ICMI

Ramayulis, H
2002 *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia

Soedijiarto, H
1998 *Pendidikan sebagai Sarana Informasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka
2000 *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Negara Bangsa*. Jakarta : CIPNAS.

Sumjati
2001 *Manusia dan Dinamika Budaya, dari Kekerasan Sampai Baratayuda*. Yogyakarta : BIGRAF.

Tilaar, H.A.R.
1998 *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Tera

2002 *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta :

Rineka Cipta
2002 *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Grasindo

Tuloli, nani
2001 *Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan*

Budaya. Gorontalo : IKIP
2002 *Pengembangan Pendidikan, Sumberdaya Manusia, Budaya Agama, Ilmu Pengetahuan*. Gorontalo : IKIP

DIALOG MODAL-MODAL BUDAYA KITA

Oleh: **Rahman Arge**

Sebuah bangsa sedang berada ditepi jurang; yang tragisnya bahwa bangsa tersebut tahu dan sadar akan realitas-berbahaya itu, namun tak nampak ada niat dan kemauan untuk menghindar dari bahaya tersebut. Itulah kita, Indonesia, yang nampak sedang justru asyik menikmati kesakitannya; ibarat rama-rama yang sedang kesmaran pada bunga-bunga api.

Fenomena jurang yang sedang mengancam bangsa ini sesungguhnya bukan semata urusan politik dan ekonomi, melainkan "kebudayaan" yang teraniaya sebagai biangnya. Jika kebudayaan diyakini sebagai hasil dari daya dan upaya masyarakat untuk menghayati dan menjawab tantangan yang dihadapi, maka realitas kita sebagai bangsa yang terancam bahaya jurang ini, mengindentifikasikan tak bermutunya kebudayaan kita.

Ada yang terputus, kira-kira begitu, dalam rentang waktu antara momentum Sumpah Pemuda 1928 dengan suasana berkebudayaan pada pasca-Proklamasi. Momentum 1928 sebagai peristiwa kebudayaan (dan tak hanya peristiwa politik) yang mempersatukan tekad bangsa ini (baca: kekuatan-kekuatan lokal) untuk menjadi sebuah bangsa merdeka, menjadi tonggak sejarah yang penting, bagaimana sebuah "dialog budaya" dapat dilaksanakan dengan mulus. "Dialog" inilah yang terputus dan mengalami kemacetan pada kehidupan bangsa pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Modal-modal kebudayaan kita yang kekuatannya bersumber pada budaya-budaya-lokal mengalami kemacetan untuk bertumbuh, berekspresi, berbuka diri, menyatakan bahwa "aku ada", lantaran matinya "dialog". Maka, impian untuk membangun sosok kebudayaan nasional sebagai daya dan upaya bersama berdasar modal-modal budaya lokal tadi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi, mengalami kelumpuhan.

Kekuasaan demi kekuasaan jatuh bangun, tapi yang berganti hanya "kostum", substansi kebudayaan sebagai modal dan kekuatan bangsa tetap berada dalam perangkap kemacetan dialogis. Modal-modal lokal yang di luar kelemahan-kelemahannya terdapat saripati-saripati "kearifan" seperti

ketulusan, toleransi, rasa senasib sepenanggungan, empati (keterbukaan menerima orang lain), "tepo-seliro" (Jawa) atau "Sipakatau" (Bugis-Makassar, dan lain-lain), ikut-ikutan terbunuh.

Akibatnya, kekuasaan demi kekuasaan yang silih-berganti justru mengacu kepada "sampah" dari sisa-sisa budaya feodal-kolonial, yang mempersonifikasikan diri pribadi sebagai "menyatu" dengan kekuasaan. Sentralisme dan otoriterianisme tampil dominan; dan kebudayaan nasional yang "dibayangkan" justru terejawantah sebagai "budaya pembenaran" terhadap eksistensi kekuasaan yang sedang memerintah, sambil melaksanakan politik-kebudayaan dalam jiwa dan format "penyeragaman".

Hal inilah yang terus berlangsung selama sejarah bangsa merdeka ini; sampai pada saat reformasi dicanangkan yang melahirkan kebijakan politik baru dalam format kebebasan dan demokrasi. Kalau tadinya kekuasaan politik sentralistik membungkam modal-modal budaya lokal, maka era reformasi yang desentralistik melahirkan "budaya kekuasaan" yang menafsirkan "otonomi" secara mekanistik-reduksionis-yang melaksanakan otonomi semata berdasar pembagian kekuasaan yang melahirkan "fasis-fasis lokal". Akibatnya, terjerumus lagi "modal-modal budaya lokal" kita dalam ketakberdayaan-baru akibat tekanan-tekanan para fasis dengan kebijakan-kebijakan politik lokal yang memacetkan daya-daya kreativitas.

Yang terjadi pada akhirnya adalah hidupnya kembali fragmatisme politik antara elit-elit lokal yang orientasinya pada urusan kepentingan-kepentingan sempit, golongan dan kelompok. Masyarakat akar-rumput lagi-lagi mengalami rasa "tak terbela", sehingga mereka terperangkap dalam tekanan psikologis dan rasa tak punya "tetua" atau pemimpin yang mengayomi. Akumulasi dari tekanan-tekanan menimbulkan sikap mudah curiga, dan karena itu mudah terpancing (dengan atau tanpa pemicu dari provokator) untuk terjun ke gelanggang kekerasan.

Kebudayaan disini lagi-lagi terlontar ke posisi sebagai "pecundang" yang tak mendapat tempat yang pas dan leluasa dalam proses pengelolaan negara dan bangsa. Kebudayaan lalu menjadi urusan "dan lain-lain" dalam skala-skala-prioritas kebijakan negara dalam pengelolaan pembangunan. Kebudayaan lalu hanya diidentifikasikan dengan kesenian-

kesenian "klenengan" yang berbau barang jualan.

Padahal pasal 32 UUD 1945 mengandung perintah substansial, yaitu "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Karena dasarnya, memang kebudayaan hanya dinilai sebagai "pencundang", maka kata "memajukan" dalam perintah UU itu diterima dan dilaksanakan ibarat mendorong-dorong-maju sebuah benda mati. Padahal, kebudayaan seperti disebutkan di atas, adalah daya-daya dan upaya suatu masyarakat untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi.

Krisis Indonesia yang dengan berbusa-busa, orang bilang sebagai krisis multi dimensi, pada hakekatnya adalah krisis kebudayaan. Artinya kebudayaan sebagai kekuatan dalam menjawab tantangan inilah yang mengalami krisis mendasar dan ketakberdayaan. Artinya lagi para jagoan politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain boleh muntah-darah mencari solusi bagaiman bangsa ini jangan sampai "masuk-jurang", tapi kalau daya-daya- kebudayaan tak diberi peran sebagaimana kodratnya (sebagai daya- masyarakat dalam menjawab tantangan), maka tidak tahulah kita kapan saat jurang itu menelan kita.

Pemberdayaan kebudayaan, karena itu, perlu segera ditata, direinterpretasi direposisi, untuk menemukan kembali saripati kerarifan dan kreativitasnya, yang bertebaran dalam modal-modal budaya lokal kita.

Keberagaman modal-modal budaya-lokal kita yang pernah begitu sentral peranannya dalam menelorkan karya-besar bangsa ditahun 1928 perlu kembali ditemukan "benang-merah-semangatnya" yang tak lain adalah: "sikap dan perilaku tulus, jujur, toleran, rasa-senasib-sepenanggungan, kesiapan berkorban, tepo-seliro (Jawa) dan Sipakatau (Bugis-Makassar), serta kearifan-kearifan lokal lainnya yang senada".

Setiap satu sosok budaya-lokal yang mencapai tingkat "pengondisian" untuk menggapai keparipurnaan jati-dirinya adalah sosok budaya yang tak berhenti di dalam dan demi dirinya melainkan budaya yang "berjati diri" paripurna inilah yang diharapkan mampu membuka diri bagi budaya-budaya lokal lainnya. Hanya budaya yang matang-jati-dirinya, mampu membuka "dialog" dalam arti "kontak-budaya" dalam kesederajatan yang kreatif. Dari sinilah, kebudayaan nasional terbangun dalam posisi percaya diri untuk berdialog dengan

budaya-budaya global.

Karena itu, Otonomi Daerah bukan semata hasil dari suatu kebijakan politik dan ekonomi, melainkan Otonomi Daerah tersebut harus ditempatkan dalam posisi sebagai "proyek-kebudayaan". Sumber-sumber kearifan dari budaya-budaya lama (sebagai modal-modal budaya kita) menjadi salah satu sumber terpenting dari inspirasi bangsa ini untuk "menemukan yang baru dalam yang tua" (*Discover the New in the Old*).

Kebudayaan baru Indonesia yang bertransformasi dari budaya feodal- kolonial ke arah suatu "kebudayaan baru" yang mampu berdialog dengan budaya-global, ditandai oleh kemampuan kita membangun budaya baru sebagai hasil inspirasi dan pergulatan kreatif dengan kearifan-kearifan lama. Ambil misalnya, salah satu contoh kearifan-lama budaya lokal Bugis-Makassar, yang berkaitan dengan proses mengolah "orang" menjadi "manusia". Di dalam khasanah "Lontara" Bugis-Makassar disebutkan adanya "empat tahap" dalam proses menjadi "manusia", yaitu:

(1) se'da atau bunyi
(2) ada atau kata
(3) gau atau tindakan
(4) tau atau manusia

Pada tingkat pertama adalah "alam" atau prabudaya, yang pada tingkat berikutnya manusia mulai mengolah kebudayaannya. Selanjutnya, manusia dinilai dari sikap-perilakunya sebagai pengejewantahan dari kebudayaannya. Proses tiga tingkat inilah yang mengondisikan seseorang dalam suatu keparipurnaan jati-diri sebagai "manusia".

Dalam tahapan "proses" di mana seseorang atau kelompok orang melaksanakan hak dan kewajibannya ditandai berlakunya aturan "Siri" dan "Pacce", yaitu di satu sisi penegakan harkat, kehormatan, dan harga-diri, sementera disisi lain, adalah penegakan sikap toleran, kasih dan cinta. Jadi langkah ke arah menjadi "Manusia paripurna", tidak dikenal adanya "penghalalan cara" dalam proses demi mencapai tujuan. Proses itu sendiri substantif sifatnya sebagaimana substantifnya tujuan menjadi "Manusia".

Dari tahapan-tahapan untuk menjadi berstatus "Manusia" inilah, dikaji dan dinilai, apakah seseorang pantas atau tidak untuk menjadi "pemimpin". Hanya pemimpin yang matang seperti inilah

yang diyakini bisa memimpin dan mengolah kekuasaan secara "jujur" ("Lempu", Bugis), "Cerdas" ("Acca", Bugis), "Tegas" ("Getteng", Bugis), "Berani tapi bijak" ("Warami", Bugis).

Kearifan-kearifan Bugis-Makassar masa-lalu inilah yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani, cerdas, jujur sehingga mampu membuka-diri bagi tumbuhnya "dialog" dengan dunia luar. Lahirlah dari budaya terbuka yang dialogis ini pelaut-pelaut ulung yang tidak saja mampu menciptakan perahu-perahu Pinisi yang melanglang buana dalam perdagangan antar benua, tapi juga tumbuh dalam ilmu-perang-laut (bertahun-tahun perang laut pecah antara pasukan Hasanuddin melawan Laksamana Belanda, Speelman).

Jati diri "Tau" atau "Manusia" dikembangkan menjadi budaya-menerima-orang-lain atau "Sipakatau" (Saling memanusiakan), sehingga manusia Bugis-Makassar diterima di Afrika-Selatan untuk mengembangkan komunitasnya. Lalu beranak-pinak dengan penduduk setempat, di sepanjang pesisir tanah Malaysia, bahkan ada di antara mereka yang oleh penduduk setempat diterima sebagai punggawa atau pemimpin.

Catatan sekilas tentang kearifan-kearifan lokal orang Bugis-Makassar masa-lalu tersebut sekedar sebagai contoh, di antara begitu banyak modal-modal budaya kita di seluruh pelosok Nusantara "Discover the New in the Old", dalam arti dari dalam hasanah budaya lama kita dapat secara kreatif menemukan yang baru, dalam upaya kita membangun kebudayaan nasional demi menjawab tantangan-tantangan zaman.

Sekedar catatan kecil dari penuturan ala kadarnya ini adalah sebagai berikut:

(1) Keragaman budaya kita perlu diangkat kembali melalui re-interpretasi, reposisi, dan penemuan kembali kearifan-kearifan kreatif lokal dalam menunjang sosok kebudayaan nasional.

(2) Pemberdayaan modal-modal budaya lokal ke arah pencapaian kondisi jati diri, menimbulkan kepercayaan diri untuk membuka dialog atau kontak budaya dalam keragaman sehingga dapat dicapai saling pengertian, saling menghargai, tidak saja untuk menghindari konflik dan kekerasan, tapi juga memotivasi diri bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

(3) Atas perintah UUD 1945 pasal 32, yaitu "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", maka perlu adanya politik (atau kebijakan) kebudayaan yang menempatkan kebudayaan dalam kodratnya sebagai upaya masyarakat dalam menjawab tantangan hidup yang dihadapinya.

(4) Supaya kebudayaan Indonesia bisa tampil berperan secara strategis dalam upaya membebaskan bangsa ini dari kemelut krisis yang multi-dimensi, maka perlu ada kemauan politik pemerintah serta komitmen seluruh masyarakat untuk menjadikan kebudayaan sebagai gerakan nasional.

Bukittinggi, 20 Oktober 2003

REPOSISI DAN REINTERPRETASI AGAMA[1]

Oleh: **Salahudin Wahid**[2]

Abstraksi

Agama adalah seperangkat nilai yang mengatur kehidupan manusia secara individu dan sosial. Hal ini menghasilkan dimensi-dimensi keagamaan dalam kehidupan manusia yang ditampakkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Maka kebudayaan sebagai dimensi kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah bersumberkan pada nilai-nilai agama. Setiap perkembangan dan perubahan membutuhkan reposisi dan reinterpretasi sesuai dengan kenyataan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Agar perkembangan dan perubahan tersebut berjalan sesuai dengan heterogenitas, maka kebudayaan harus sepenuhnya menjadi wilayah masyarakat."

1. Kebudayaan, Agama,dan Negara

Kebudayaan meliputi segenap proses dan produk yang dihasilkan manusia baiksecara individu maupun sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan. Kebudayaan adalah seni hidup*(the art of living)* atau kehidupan sosial manusiawi*(human social life)* yang terbangun atas interaksi sosial baik sesama manusia mupun kelompok di kawasan tertentu.[3] Kebudayaan meliputi proses berpikir, merasakan, dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang merepresentasikan citra kemanusiaan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, kebudayaan memiliki spektrum yang sangat luas, selalu berubah, dan terikat pada kawasan masyarakat tertentu. Kebudayaan meliputi semua wilayah kehidupan manusia, sehingga selalu terdapat pertautan antara

---

[1] Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, di Bukit Tinggi, 20 Oktober 2003.
[2] Ketua PB NU
[3] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Cetakan II,(Depok; Desantara, 2001), hal. vi.

kebudayaan dengan kehidupan manusia yang lain. Dalam kehidupan politik dikenal budaya politik, dalam bidang hukum ada budaya hukum, kehidupan ekonomi mengenal budaya ekonomi, bahkan ada budaya lalu lintas dan segala macam bentuk budaya lain yang diasosiasikan sebagai cara berfikir, tindakan, dan watak kolektif masyarakat. Setiap bidang kehidupan, bahkan suatu kebijakan pemerintah, keberhasilannya selalu terkait erat dengan budaya masyarakat, mendukung atau tidak.

Kebudayaan bukan merupakan sesuatu yang tetap atau mati. Kebudayaan selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan interaksi masyarakat. Dalam kebudayaan selaluada unsur-unsur yang tetap dan unsur-unsur yang berubah. Memaksakan kebudayaan lama tetap menjadi budaya di masa kemudian tanpa adanya perubahan dengan sendirinya merupakan proses yang tidak berbudaya. Karena dasar kebudayaan adalah proses interaksi sosial dan individual, maka kebudayaan terikat pada suatu kawasan tertentu. Kebudayaan, disamping memiliki unsur universal juga selalu memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan kawasan lain.

Walaupun memiliki spektrum yang luas, harus tetap ditentukan batasan antara kebudayaan dengan wilayah kehidupan manusia yang lain. Kebudayaan yang selalu berubah dan memiliki ciri tersendiri pada kawasan tertentu, tentunya harus dibedakan dengan kehidupan agama yang bersifat tetap dan sama disetiap penjuru dunia. Pembedaan ini bukan berarti pemisahan, karena kehidupan agama juga dipenuhi dengan unsur-unsur budaya yang selalu berubah. Agama adalah seperangkat nilai yang mengatur kehidupan manusia secara individu dan sosial. Hal ini menghasilkan dimensi-dimensi keagamaan dalam kehidupan manusia yang ditampakkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebudayaan.[4]

Karena selalu berubah menurut waktu sesuai dengan perubahan masyarakat untuk mencapai perkembangan dan peningkatan kemanusiaan, maka harus selalu tersedia ruang yang cukup bagi setiap anggota masyarakat untuk berpikir dan bertindak secara kreatif dan bertanggungjawab. Agar selalu

---

[4] *Ibid*, hal. 143.

tersedia ruang terbuka bagiperkembangan kebudayaan, maka kebudayaan harus selalu menjadi hak masyarakat. Inilah yang menjadi akar keberadaan masyarakat sipil yang otonom dan plural. Suatu masyarakat mandiri yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai landasan kehidupan demokrasi.

Negara jangan sampai mengambil alih wilayah ini baik berupa birokratisasi maupun memaksakan budaya tertentu sebagai budaya bangsa. Pemaksaan budaya oleh aparatur negara adalah proses yang tidak berbudaya. Kecenderungan ini sangat terlihat dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang membatasi ruang budaya masyarakat. Berbagai perangkat hukum yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat dapat terjerumus pada "pengangkangan" wilayah budaya masyarakat oleh negara. Negara memasuki wilayah-wilayah privat dan sosial yang sebenarnya dan seharusnya bukan urusan negara.

Maraknya tuntutan adanya Undang-undang pornografi yang bertujuan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan pornografi yang sudah cukup mengkhawatirkan, jika tidak disusun secara hati-hati akan mengakibatkan sempitnya ruang kebudayaan masyarakat. Demikan pula dengan munculnya rancangan KUHP yang mengkriminalisasi beberapa urusan privat, harus dikritisi agar tidak menjadi penghalang bagi relasisosial dan perkembangan kebudayaan.

Peran negara dalam kebudayaan seharusnya adalah berupa penyediaan fasilitas dan kebijakan yang memberikan ruang dan kondisi yang memungkinkan perkembangan kebudayaan secara alami. Jika pornografi dilihat sebagai hal yang negatif, maka yang utama dilakukan adalah merangsang dan memfasilitasi perkembangan kebudayaan yang lebih luhur sebagai penyeimbang. Selanjutnya adalah proses dalam masyarakat yang akan menentukan di mana titik keseimbangannya. Masyarakat yang menentukan batasan eksplotasi sensual yang masih bisa diterima, dan dengan sendirinya akan menyisihkan sensualitas yang tidak bisa diterima.

Konsep budaya bangsa tidak dapat diartikan sebagai budaya negara atau budaya pemerintah. Budaya negara atau pemerintah selalu berarti kebijakan kebudayaan yang satu dan seragam. Sedangkan budaya bangsa dapat merupakan keseluruhan

kebudayaan masyarakat dari seluruh komunitas-komunitas yang ada dilndonesia. Pancasila merupakan perekat dan pemersatu berbagai kebudayaan yang ada dilndonesia. "Pemersatu" tidak berarti harus ada "satu" kebudayaan Indonesia yang dipaksakan dengan kebijakan "kebudayaan nasional" oleh negara. Proses kebudayaan dalam masyarakatlah yang akan menentukan isi-isi danwarna-warna kebudayaan bangsa. Masyarakat yang menentukan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan dalam kebudayaannya.

2. Peran Agama DalamKehidupan Berbangsa

Sejarah dunia berjalan seiring dengan perkembangan agama-agama. Berbagai perubahan besar dalam budaya peradaban manusia melibatkan agama-agama sebagai faktor signifikan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan struktur dan sistem masyarakan yang mendasar terjadi di seluruh belahan bumi seiring dengan diterimanya sistem kepercayaan baru menggantikan sistem kepercayaan lama.

Agama-agama telah membawa perubahan sejak kelahirannya dan berlanjut bersamaan dengan perubahan cara pandang manusia terhadap ajaran agama. Agama Kristen lahir membawa pesan kasihsayang Tuhan, mengikis kekerasan dan kekuasaan kuno. Islam lahir dan berkembang membentuk struktur masyarakat baru, menggantikan struktur dan budaya jahiliyah.

Karl Mark memang pernah berpendapat bahwa sejarah perkembangan dunia ditentukan oleh ekonomi penguasaan aset sebagai faktor determinan, dan Agama hanyalah alat semata yang melegitimasi kelas borjuis untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, dari arah yang berlawanan kita bisa melihatnya sebagai sejarah kemunduran agama karena interpretasi yang dimonopoli kelas atas. Dan sejarah juga membuktikan bahwa banyak gerakan-gerakan kemerdekaan dan perjuangan rakyat yang berbasis pada spirit agama. Penafsiran baruterhadap ajaran-ajaran agama telah melahirkan teologi pembebasan sebagai basis pemikiran berbagai perjuangan masyarakat tertindas.

Agama menempati ruang utama dalam kehidupan manusia. Hal ini pertama-tama adalah karena kecenderungan asali (fitrah) manusia untuk mengagungkan dan menundukkan diri pada kekuatan di luar kekuasaannya. Hal ini juga sering

menggelincirkan manusia pada sikap fatalistik, memposisikan agama sebagai sandaran karena ketidak berdayaan. Faktor kedua, adalah karena agama merupakan seperangkat norma yang memberikan panduan manusia baik sebagai individu maupun sosial, mikrokosmos dan makrokosmos. Agama adalah tata nilai sebagai sumber rujukan, legitimasi, bahkan justifikasi individu yang terpintal menjadi budaya masyarakat.

Setiap fenomena sosial dan individual selalu bisa dilacak dari sisi keberagamaan. Demikian pula setiap perubahan dapat dimulai dengan melakukan perubahan pemahaman dan cara beragama, baik secara individu maupun masyarakat. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Berbagai organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan berbasis agama merupakan embrio organisasi nasional yang mengusung kemerdekaan sebagai cita-citanya.

Bersamaan dengan gerakan antikolonialisme, berbagai organisasi agama di awal abadke-20 telah menunjukkan geliat gerakan kemerdekaan. KH. Hasyim Asy'ari, KH.Wahab Hasbullan dan kawan-kawan membentuk kelompok yang diberi nama Tashwirul Afkar dan Nahdlatut Tujjar untuk pengembangan ekonomi, dan Nahdlatul Wathan untuk pembaharuan pendidikan.[5]

Bagi kalangan pesantren, Hindia Belanda adalah dar al-Islam, maka harus dibebaskan dari penjajahan. Spririt inilah yang menjadi dasar Ro'is Akbar NU,KH. Hasyim Asy'ari, pada tanggal 22 Otober 1945 dan bulan Maret 1946 mengeluarkan resolusi Jihad kepada umat Islam untuk mempertahankan negara Indonesia melawan kembalinya penjajahBelanda.[6]

Dalam dunia sastra, kita mengenal angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru yang sarat dengan karya-karya religius. Membaca puisi, roman, ataupun novel pada masa ini tak ubahnya seperti membaca teks-teks kitab suci yang telah "dibumikan". Berbagai karya sastra juga sekaligus merupakan "buku pelajaran" membangun semangat kemerdekaan sebagai

---

[5] Ahmad Suaedy, Islam dan Transformasi Sosial; Pengalaman Pesantren, dalam "Agama dan Transformasi Sosial", *Jurnal Katalis Indonesia*, Vol. I, No. I,Th. 2000, hal. 16.

[6] *Ibid*, hal. 19.

amalan keyakinan beragama.

Agama menjadi sumber nilai-nilai yang membentuk budaya masyarakat Indonesia. Berbagai organisasi keagamaan mengembangkan dan "membumikan" ajaran agama dalam berbagai bidang. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang berada pada garis depan pengembangan pendidikan bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan Katolik. Hal ini diikuti oleh organisasi-organisasi keagamaan lain, seperti Nahdlatul Ulama, Kristen, Hindu dan Budha, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang perekonomian, dan bidang-bidang yang lain.

Pada sisi yang lain, harus diakui pula bahwa agama-agama telah ikut andil atas kelestarian kekuasaan otoritarian Orde Baru. Orde baru dengan aparaturnya telah menundukkan agama-agama, dan menjadikannya sebagai pembenar dari berbagai kebijakan dan tindakan. Agama terhegemoni dan "terhaluskan" seiring dengan kebijakan politik "belah bambu" dan hegemoni penafsiran cendekiawan agama.[7] Sembari menolak konsepsi negara sekuler, aparatur kekuasaan saat itu membatasi ruang gerak agama hanya pada ritual-ritual semata. Kemiskinan dan kebodohan dijatuhkan padafaktor individual dan kehendak Tuhan disertai dalil-dalil kesabaran dan do'a. Agama menjadi sarana pembodohan dan penaklukan yang efektif.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, persentuhan pemahaman dan cara beragama dengan sisi dunia yang lain melahirkan sikap kritis terhadap interpresi dominan atasnash-nash agama. Berbagai metode penafsiran dan pemahaman agama yang baru ikut melegitimasi dan menyemaikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan otoritarian. Tahun 1990-an adalah tahun-tahun di mana kalangan muda "ketagihan" pemikiran kiri, sehingga Islam Kiri menjadi "mode" baru yang memberikan spirit keprihatinan dan basis perjuangan kalangan muda baik di Perguruan Tinggi,Organisasi Kepemudaan, maupun di Pesantren. Dan lahirlah reformasi menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Mahasiswa memberikan pelajaran

---

[7] Relasi antara agama-agama, cendekiawan agama, dan Orde Baru dapat dilihat dalam bukuDaniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* , (Jakarta;PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 513 – 737.

berharga pada bangsanya, bagaimana membangun menemukan "kalimatun sawa", membangun solidaritas, dan menghilangkan sekat-sekat ideologi dan agama demi tercapainya cita-cita mulia.

3. Reformasi; ProblemDehumanisasi dan Alienasi

Berbagai perubahan telah terjadi dalam kurun waktu lima tahun perjalanan reformasi. Perubahan utama terjadi pada ranah sistem mekanisme politik dan kebebasan berkespresi yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Namun perubahan tersebut tentubukan berarti telah selesainya berbagai masalah masa lalu dan munculnya berbagai masalah baru. Masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih menjadi hantu yang mewujud dalam perilaku bangsa ini. Masalah ini menjadi semakin akut bersamaan dengan praktek politik yang keras dan meminggirkan rakyat kecil. Semua orang melihat bagaimana di setiap pemilihan Kepala Daerah, triliun-an rupiah harus ddikucurkan, padahal pada waktu yang sama ada anak SD yang bunuh diri karena tidak mampu membayar biaya sekolah, ada pengungsi di Aceh, ada masyarakat yang terlantar karena penggusuran, dan ada rakyat yang makan "*tiwul*" karena harga beras yang tidak terjangkau. Politik tidak berhati nurani. Lalu di manakah posisi agama-agama yang juga diyakini oleh parapolitisi?

Kebebasan berekspresi yang menyemai berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, menjadi lahan subur munculnya berbagai budaya dari belahan dunia. Namun media saat ini ternyata didominasi oleh budaya konsumerisme yang instan. Ekspresi budaya terlihat tidak lagi mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur bersumberkan pada religiusitas. Berbagai karya budaya lebih melayani kebutuhan sesaat yang secara cepat dapat dinikmati dan memasarkan produk barang dan jasa yang mendanainya.

Pendangkalan karya budaya bisa dilihat dari dunia perfilman dan sinema elektronik yang dipenuhi dengan tema-tema yang menyuguhkan pola hidup materialitis dan instan dengan konflik-konflik tidak bermutu yang memperumit kesederhaan hidup. Terlihat dengan jelas bagaimana cerita menjadi bertele-tele untuk memanjangkan episode.

Nuansa instan juga dijumpai pada dunia periklanan dan pola pemberitaan berbagai media. Demi meningkatkan penjualan produk dan mencapai rating, eksploitasi seksualitas dan

kekerasan adalah citra utama yang disajikan untuk dengan mudah menarik perhatian masyarakat. Setiap detik bangsa ini disuguhi iklanproduk yang mengabaikan nilai agama, bahkan tanpa menginformasikan produk tersebut dengan benar. Setiap hari media massa menyajikan berita kriminalitas yang sarat dengan kekerasan dan seksualitas secara vulgar.

Saat ini kita sudah cukup sulit menjumpai orang membaca karya-karya sastrareligius. Berapa banyak orang yang tahu dan mengapresiasi puisi-puisi karya TaufiqIsmail, Mochtar Pabotinggi, Sutardji Calzoum Bachri, dan puisi-puisi bermutu lainnya? Berapa banyak orang yang menikmati cerpen, roman, atau novel karya Romo Mangun, Ahmad Tohari, Seno Gumira Ajidarma, Korie Layun Rampan, dan cerita bermutu lainnya? Sekarang yang lebih populer adalah kisah-kisah kartun Jepang yanglucu, penuh cerita perkelahian, bahkan kadang seronok.

Bangsa Indonesia juga telah dikejutkan dengan terorisme yang mengorbankan ratusan orang dalam tragedi Bali dan JW Marriot, serta beberapa kasus pengeboman lainnya. Kejutan ini cukup menyengat karena melibatkan agama sebagai legitimasi kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat kita. Citra keramahan orang Indonesia dan agenda perdamaian yang didengungkan organisasi Islam di Indonesia menjadi dipertanyakan kembali oleh dunia luar, dan tentu oleh diri kita sendiri.

Lima tahun masa reformasi telah memberikan kemampuan untuk membaca diri sendiri, dan menelisik berbagai permasalahan bangsa. Namun kemampuan mengenali permasalahan dan kelemahan bangsa ini tidak dibarengi dengan kemampuan dan komitmen untuk menyelesaikannya. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme semakin tergelar jelas tanpa ada kesanggupan untuk memberantasnya. Tiadanya kemampuan ini mengakibatkan semakin surutnya niatan, bahkan banyak yang kemudian berperilaku sama dengan kekuasaan lama.

Media massa dan karya budaya telah membentuk masyarakat kita menjadi terasing akan identitas diri sendiri sehingga sangat mudah larut dalam kekerasan dan seksualitas serta paranoid terhadap lingkungan luar yang belum dikenal. Konsumerisme yang instant telah mematahkan ikatan solidaritas sosial sehingga jangan heran jika penguasa negeri ini tidak tergerak selangkah pun ketika ditemukan belasan TKI terlantar

di BandaraSoekarno Hatta dengan gaji yang tak pernah dibayar dan kekerasan yang dialaminya. Pejabat-pejabat lebih mementingkan kebutuhan para pemodal dan pengusaha besar dari pada kebutuhan rakyat miskin, sehingga dengan mudahnya melakukan penggusuran untuk menyediakan lahan bagi pengusaha besar.

Menghadapi isu terorime kita masih dibingungkan antara ketidak setujuan terhadap cara-cara kekerasan di satu sisi, dan ketidaksetujuan terhadap perilaku Amerika dan intervensi asing di sisi lain. Lalu di manakah posisi agama-agama?

Fenomena di atas adalah wujud dari dehumanisasi dan alienasi manusia. Manusia dalam relasi sosial diposisikan bukan sebagai manusia yang utuh, tetapi hanya menjadi bagian mesin sosial yang besar.[8] Politik tidak boleh melibatkan perasaan dan hati nurani, karya budaya kering akan makna kemanusiaan karena hanya merupakan alat dari modal. Akibatnya, banyak manusia menjadi kehilangan makna hidup, mengalir menuruti laju produksi dan kekuasaan. Diri pun menjadi terasing dan hampa, manusia teralienasi dari kemanusiaannya.

Keterasingan ini bermuara pada upaya pencarian identitas diri dengan penyerahan diri secara total pada hal-hal yang dirasakan membuat jiwa-jiwa yang resah menjadi damai. Ada yang menceburkan diri pada pemuasan kekuasaan dan seksualitas, sehingga jangan heran jika seksualitas saat ini sudah bukan sekedar hubungan intercource, tetapi juga imajinasi yang liar. Ada pula yang lari pada agama, namun sekedar mengedepankan ketentraman hati yang tunduk pada sang pemimpin dan menceburkan diri dalam kesamaan identitas fisik seperti gamis dan jenggot. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang terkait dengan banyaknya aktivis Islam di Indonesia dalam berbagai gerakan Islam yang menggunakan cara-cara kekerasan.

Proses dehumanisasi dan alienasi sesungguhnya adalah anak kandung dari peradaban modern yang berbasiskan pada paham materialisme. Manusia diukur dengan materi dan mengesampingkan jiwa dan perasaan. Manusia menjadi

---

[8] Danah Zohar dan Ia Marshall, SQ;
Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, Cetakan III, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 18 dan 28.

terkungkung dan hanya menjadi partikel-partikel peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan paradigma Cartesian dan Newtonian telah memenjarakan manusia dalam pola pikir parsial yang kering seiring dengan pentuhanan materi dan rasionalitas.[9]

4. Reposisi dan Reinterpretasi Agama

Kembali pada asumsi awal bahwa setiap fenomena sosial dan individual bisa dilacak akarnya dari sisi agama, maka memang patut kita mempertanyakan kembali posisi agama-agama dalam kehidupan bangsa ini. Jika agama telah menjadi sumber pandangan hidup pemeluknya,tetapi mengapa fenomena sosial dan individual yang dijumpai saat ini tidak mencerminkan religiusitas? Ataukah fenomena sosial dan individual tersebut memang merupakan pencerminan religiusitas masyarakat kita. Jika demikian maka titik persoalannya adalahpada konstruksi religiusitas, yaitu pada interpretasi agama. Bahkan antara posisi dan interpretasi memang saling terkait, interpretasi nilai dan ajaran agama mempengaruhi posisi umat beragama dalam kehidupan sosial.

Persoalan-persoalan tersebut diatas merupakan masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari perkembangan masyarakat modern yang tidak diimbangi dengan kesanggupan agama-agama untuk menyelesaikannya dengan baik. Ketidaksanggupan ini berpangkal dari cara pandang dan pembacaan terhadap agama-agama yang masih menggunakan kaca mata waktu saat agama-agama tersebut diturunkan. Hal ini karena dominasi pemikiran Islam formal, yang memang paling mudah dan menyejukkan bagi manusia-manusia terasing di jaman modern. Di sisi lain, arus perubahan tetap berjalandan agama-agama hanya menjadi tempat pelarian yang dalam perkembangannya kemudian memposisikan diri berhadapan dengan perkembangan kebudayaan.

Kondisi tersebut tidak mungkin terus dibiarkan berlangsung karena akan mengakibatkan kerugian kemanusiaan, dalam agama maupun budaya. Tanpa adanya perubahan, agama akan semakin mengasingkan manusiadari kenyataan hidup manusia.

---

[9] *Ibid*, hal. 27-28.

Jika agama sudah terasing dan tidak berakar pada kenyataan, lalu apa makna agama (Islam) sebagai *rahmatan lil alamin*? di mana arti tugas manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi?

Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka kebudayaan juga akan mengalami kemerosotan. Kebudayaan tidak lagi ditentukan oleh emansipasi kemanusiaan yang hakiki, tetapi ditentukan oleh kebutuhan perkembangan modal dankekuasaan yang tentu saja tidak memiliki rasa kemanusiaan. Pada akhirnya kebudayaan tidak bergerak pada aspek kemanusiaan yang lebih tinggi, tetapi melorot melayanihasrat kemanusiaan yang paling primitif.

Maka titik pertemuan harus dicari dan dielaborasi. Pencarian dan elaborasi hanya mungkin dilakukan jika agama "dibaca" dengan memberi ruang akomodasi dan rekonsiliasi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memposisikan agama sebagai seperangkat nilai yang merupakan prinsip dan sumber inspirasi masyarakat. Sebagai tata nilai meliputi tidak hanya doktrin yang mati,tetapi juga prinsip-prinsip yang bisa dibaca dan dilaksanakan secara kontekstual.Harus dibedakan antara urusan Ibadah yang bersifat tetap dalam agama, dan urusan kemasyarakat yang dinamis.

Dalam Islam misalnya, ada kaidah fiqh di bidang ibadah; *al-aslu fil ibadah tahrimuha, illa idza dalla addalilu 'ala tajwiziha* (asal aturan dalam masalah ibadah adalah pelarangan atasnya kecuali kalau ada petunjuk yang memperkenankan), dan di luar masalah ibadah; *al-aslu filmu'amalah tajwizuha, illa idza dalla addalilu 'ala tahrimiha* (semua hal diperkenankan kecuali kalau ada petunjuk yang melarangnya).

Jadi, sepanjang menyangkut masalah ibadah *(worship)*,ketentuan-ketentuan dalam agama bersifat tetap dan universal. Kalaupun ada perbedaan, adalah perbedaan dalam hal yang bersifat teknis dan detail *(furu')*. Sedangkan dalam hal selain ibadah, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan alam yang biasa juga disebut dengan urusan *mu'a'alah*, bersifat sangat dinamis bergantung pada perkembangan masyarakat. Namun demikian,karena agama-agama adalah tata nilai yang menjadi pedoman hidup manusia, maka perkembangan mu'amalah pun harus berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Pendasaran pada nilai-nilai ini tidak berarti bersifat tetap, tetapi dinamis. Nilai-nilai keagamaan bisa berkembang dan ditafsirkan sesuai dengan realitas yang dihadapi.

Tata cara kehidupan sosial yang disebutkan dan diceritakan dalam kitab-kitab suci dan sumber ajaran agama yang lain sesungguhnya merujuk pada realitas sosial saat itu. Tentu gambaran dan penafsiran yang dilakukan saat itu tidak bisa diterapkan lagi untuk kondisi sosial saat ini yangberbeda dan jauh lebih kompleks karena perkembangan masyarakat. Maka proses reinterpretasi adalah sebuah keharusan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai fundamental. Sebuah teks bukan"subyek" yang mati[10], tetapi dinamis dan dapat diinterpretasi terus menerus tanpa kehilangan maknanya yang konstan. Tanpa reinterpretasi, agama akan menempati posisi yang samadan selali terlibat ketegangan dengan perkembangan jaman, baik positif maupunnegatif.

Dalam melakukan reinterpretasi al-Qur'an dan hadits misalnya, menurut Masdar Mas'udi, paling penting adalah bagaimana menangkap pesan teks dalammakna etika, bukan sebagai ideologi. Etika keagamaan dengan basis transendental tak harus sama dengan etika rasional modern yang cenderung bersifat resiprokal.[11]

Sisi transendental adalah ciri utama dari pola pikir agama-agama. Bahwa segala pemikiran dan tindakan harus berorientasi kepada Tuhan sebagai wujud kesalehan seseorang. Namun, harus dihindari penafsiran yang bersifat *teosentris* semata. Penafsiran teosentris adalah penafsiran yang hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat ke-Tuhan-an tanpa memperhatikan aspek sosial. Pada komunitas sosial, penafsiran yang melulu teosentris sering mengorbankan manfaat kemanusiaan dan melupakan bawa sesungguhnya agama itu diturunkan adalah untuk manusia, serta Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Lebih parah lagi *teosentris* mutlak bisa menjebak penganutnya pada pemikiran dan sikap yang mengatasnamakanTuhan, seperti peperangan dan kekerasan atas nama Tuhan yang dari dulu hingga kini banyak terjadi.

Maka penafsiran ulang harus memperhatikan kepentingan kemanusiaan (*anthroposentris*). Bahwa sesungguhnya agama diturunkan adalah sebagai rahmat bagi alam, termasuk manusia

---

[10] Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; InsistPress, 2002), hal.11.

[11] Islam Liberal dan Etika Transendental, *Kompas* 14 Oktober2003.

yang juga dibebani tugas sebagai pemimpin alam. Agama harus berguna bagi kehidupan manusia dan perkembangan sosial sesuai dengan realitas yang dihadapi. Pendekatan anthroposentris juga merupakan legitimasi religius terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia dalamkonsep beragama akan memperkuat semangat inklusivitas dan toleransi antar umat beragama, serta penolakan cara-cara kekerasan dalam beragama.

Akhirnya semua kembali kepada manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan mulia untuk mengemban kewajibannya sebagai wakil Tuhan yang telah dibekali nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan dalam ajaran agama-agama. Salah satu kekurangan masyarakat saat ini yang dirasakan oleh Mohammad Khatami adalah kekurangan atau kelemahan intelektualisme religius. Intelektual yang hidup dalam masanya sendiri, memahami dan mewartakan kejadian dan masalahyang menghadang kemanusiaan pada masa itu serta bagaimana menyelesaikannya.[12] Tentunya budayawan kita juga harus berperan sebagai intelektual seperti yang digambarkan oleh Mohammad Khatami tersebut demi kemanusiaan dan perkembangan bangsa Indonesia.

Jakarta, 17 Oktober 2003

---

[12] Mohammad Khatami,
Membangun Dialog Antar Peradaban, Penerjemah: Tim CIMM,Cetakan I, (Bandung; Mizan, 1998), hal. 82.

KEPUSTAKAAN

Amaladoss, Michae

2001 *Teologi Pembebasan Asia*. Judul Asli: *Life in Freedom: Liberation Teologies from Asia*. Penerjemah: A. Widyamartaya dan CINDELARAS. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dhakidae, Daniel

2003 *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara OrdeBaru*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Hadi W.M., Abdul.

2000 *Islam, cakrawala estetik dan budaya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Khatami, Mohammad.

1998 *Membangun Dialog Antarperadaban*.Penerjemah: Tim CIMM. Cetaka I. Bandung: Mizan,.

Kung, Hans.

2002 *Etika Ekonomi-Politik Global*. Judul Asli:*A Global Ethics for Global Politics and Economics*. Penerjemah: AliNoer Zaman. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Qalam,.

Prasetyo, Eko.

2002 *Membela Agama Tuhan; Potret Gerakan Dalam PusaranKonflik Global*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press,.
Islam Kiri; Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

Soedjamoko.

1984 *Etika Pembebasan*. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES,.

Wahid, Abdurrahman.
2001 *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan.*Cetakan II. Depok: Desantara,.

Wahid, Salahudin.
2002 *Menggagas Peran Politik NU.* Cetakan Kedua.Jakarta: Pustaka Indonesia Satu,.

Zohar, Danah, dan Ian Marshall. *SQ,*
2001 *Memanfaatkan Kecerdasan Spiritualdalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan.* JudulAsli: *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*. Penerjemah: Rahmani Astuti, Ahmad nadjib Burhani, Ahmad Baiquni. Cetakan III.Bandung: Mizan,.

Jurnal dan Koran

Agama danTransformasi Sosial. Jurnal *KATALIS* Indonesia. Vol. I, No. I, Th. 2000.

Islam Liberal dan Etika Transendental, *Kompas* 14Oktober 2003

Proyek-ProyekDemokrasi. *Wacana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. No. II, 1999.

PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA KRISTEN DALAM PENGEMBANGAN 'KEBUDAYAAN' (KONTEKS NTT)[1]

Oleh: **Rm. Leo Mali**[2]

Saya akan merefleksikan Peranan *lembaga Pendidikan Kristiani bagi pengembangan Kebudayaan di NTT.* Ada dua alasan penting menyangkut latar belakang pembatasan tema. Pertama, kami ingin berterimakasih kepada lembaga-lembaga pendidikan Kristen(Katolik-Protestan) yang telah ikut, membentuk masyarakat NTT. Sejak abad ke 17. Gereja melalui lembaga-lembaga pendidikan Kristen telah mengambil tempat secara merata di seluruh NTT sebagai pusat-pusat pengembangan kebudayaan. Peranan itu masih terasa sangat kuat hingga kini .Kedua, kami ingin mengingatkan kembali sumbangsih lembaga-lembaga Pendidikan Kristiani bagi bangsa ini. Pada hemat kami perdebatan seputar Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional ; UU no. 20 tahun 2003, baru-baru ini yang secara substansial ternyata kurang memberi perhatian pada lembaga pendidikan swasta boleh jadi merupakan fenomena yang mewakili sebuah kecenderungan pada mainstream politik untuk mengabaikan atau bahkan melupakan faktum sejarah ini.

Pertanyaan pokok dalam refleksi ini ialah bagaimanakah peran lembaga-lembaga pendidikan Kristiani dalam pengembangan kebudayaan masyarakat dalam konteks NTT. Untuk itu, ada beberapa hal akan dibicarakan. Pertama, dasar keterlibatan Gereja dalam dunia pendidikan. Kedua, sejarah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Kristen serta sumbangannya bagi pengembangan budaya NTT. Oleh karena pelbagai keterbatasan, saya membatasi diri pada lembaga pendidikan formal. Ketiga, kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik dan tempat lembaga pendidikan berhadapan dengan tanda-tanda kemandegan budaya dalam masyarakat kita saat ini. Beberapa harapan akan menutup refleksi ini.

---

[1] Makalah ini disampaikan pada kongres kebudayaan nasional ke V tanggal 20 -23 Oktobcr tahun ,2003 di Bukit Tingg

[2] Rohaniwan Katolik, tinggal di Kupang

1. Dasar Keterlibatan Gereja dan Arah pelayanan Pendidikan Kristen

Apakah yang memanggil Gereja untuk terlibat dalam dunia pendidikan ? Hal utama harus diketahui bahwa Gereja dipanggil untuk mengalami damai sejahtera dalam Allah dan kembali diutus untuk menghadirkan syalom Allah bagi dunia. Hal ini nyata dalam kata-kata Kristus sendiri; "Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna" (Mat. 5: 48). Undangan ini dilanjutkan oleh janji perutusan Yesus sendiri : "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah (Yoh.15.16) atau dalam versi Injil Mateus perutusan itu dirumuskan sebagai perintah untuk menjadikan segenap bangsa sebagai satu kawanan keluarga Allah di dunia (bdk. Mat. 28; 1 9) Panggilan dan perutusan ini dimeterai oleh Yesus dalam ajarannya yang utama mengenai cintakasih;. Mengasihi Allah dengan seluruh daya dan mengasihi sesama manusia sebagai ungkapan kasih pada Allah. (Mat. 5.43,Mark.12.31,Luk.10;27,) .Panggilan menjadi sempurna atau panggilan menjadi Kudus dengan begitu pada hakekatnya adalah panggilan untuk mencintai.

Dalam konteks perintah cintakasih pendidikan dipahami sebagai ungkapan cintakasih pada kehidupan manusia dan Allah sang pemberi kehidupan. Gereja memandang kerasulan di bidang pendidikan sebagai aplikasi iman yang membebaskan seperti diungkapkan secara programatis oleh Yesus Sang Guru Ilahi : " Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab la telah mengurapi Aku untuk menyampaikan khabar baik kepada orang-orang miskin; dan la telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,dan penglihatan bagi, orang- orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang...(Luk.4.18-19) Pendidikan merupakan jalan yang ditempuh untuk mengembangkan potensi-potensi manusia menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan bebas dari segala belenggu serta terbuka dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang terbuka bagi undangan Tuhan sebagai tujuan terakhir hidup manusia. Inilah alasannya sejak awal mula Gereja-Gereja melihat pendidikan sebagai bagian dari kegiatan perutusannya di tengah dunia.

Pada mulanya sekolah-sekolah dibuka dalam rangka pelajaran agama dan pendidikan moral. Namun sekolah-sekolah itu kemudian berkembang menjadi tempat pengembangan kecerdasan manusia secara utuh baik *kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. D*i sekolah-sekolah Kristen anak-anak tidak saja diajarkan pelajaran agama melainkan juga pengetahuan-pengetahuan umum serta keterampilan-keterampilan praktis. Yang diperlukan untuk hidup di tengah masyarakat kelak.

Karena mendasarkan dirinya pada ajaran kasih kepada Allah dan manusia sebagai nilai yang universal, maka ada dua ciri utama pendidikan Kristiani pertama, *bersifat terbuka. D*asar dari keterbukaan itu adalah pengakuan bahwa semua orang dicintai oleh Allah. Karena itu, tiap orang harus saling memandang sebagai kembaran dirinya satu sarana lain yang sarna-sarna bermartabat dan harus dihargai. (Bdk. Gs. Art. 27) .Lagipula setiap orang terlahir untuk bahagia serta diundang untuk mengalami kebahagiaan yang sempurna dalam Allah. Hal prinsip ini menjadi dasar solidaritas antarmanusia yang mengatasi pelbagai perbedaan dalam membangun kehidupan bersama yang ditandai sikap saling melindungi dan saling menghormati .

Kedua, ciri berikut dari lembaga pendidikan Kristiani adalah solider dengan *yang kecil* .Solidaritas antar manusia sebagai wujud kasih harus diungkapkan secara tegas dengan melayani yang kecil. Hal ini sesuai dengan semangat Yesus Sang Guru Ilahi yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Mat. 25; 40). Praktisnya sekolah-sekolah harus memberi perhatian bagi mereka yang kecil, memberi prioritas bagi korban-korban ketidakadilan struktural entah struktur nasional maupun interbnasional. Selain itu sekolah-sekolah juga harus mengembangkan nilai penghargaan terhadap nasib orang-orang kecil dengan mengembangkan nilai serta budaya tandingan bagi pelbagai kenyataan ketidakadilan yang menimpa mereka yang kecil. Dengan sifatnya yang terbuka dan solider dengan yang kecil pendidikan Kristiani diarahkan bagi pengembangan manusia-manusia utuh dalam kesejahteraan anak-anak Allah.

2. Peranan Lembaga pendidikan Kristiani dalam Sejarah

Pendidikan Kristiani di NTT (Katolik maupun Protestan) memiliki sejarah yang panjang. Keberadaannya malah jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Umumya perkembangan pendidikan di NTT berjalan bersama proses pertemuan antara misionaris dari Eropa yang melakukan evangelisasi dengan masyarakat asli. Sekolah-sekolah dibuka pada awalnya dalam rangka pendidikan agama. Namun dalam perkembangan kemudian menjadi wadah pencerdasan anak-anak. Para siswa belajar membaca dan menulis melatih sejumlah keterampilan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Kendatipun penyelenggaraan sekolah- sekolah ini pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan Kompeni, tapi dalam sejarah hal ini kemudian menjadi investasi bagi NTT di kemudian hari.

Sejarah Pendidikan di kalangan Gereja Kristen jauh lebih awal. Sekolah pertama dimulai di Kupang-Timor oleh *Paulus Kupang* dengan 22 orang murid. pada Tahun 1701. Kemudian menyusul di Fiulain-Thie- Rote, kira-kira tahun 1730. Sekltar tahun 1766 sekolah dimulai di Sabu. Pada masa pendudukan VOC 1614-1819 pengembangan pendidikan kurang berjalan baik. Baru pada masa Nederlandsce Genootschaps Zending/ NZG 1814-1860 dan kemudian diteruskan masa Indishe Kerk (1860-1942) karya pendidikan berkembang semakin baik. Sekolah-sekolah yang sudah ada diperbaiki dan dibuka sekolah-sekolah baru di Rote di Alor dan Timor serta Sumba. Tahun 1947 Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sebagai induk Gereja-gereja Kristen Protestan di Timor dibentuk. GMIT lalu membentuk (Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (YUPENKRIS) pada tahun 1966. Dengan berbagai keterbatasan pengelolaan pendidikan berjalan terus hingga saat ini.

Di kalangan Gereja Katolik pendidikan melalui sekolah baru terjadi pada pertengahan abad 19. Di Flores karya pendidikan Katolik dimulai oleh para misionaris Jesuit dengan membuka sekolah serta kursus-kursus keterampilan. Bulan April Tahun 1863 P. Georgius Metz Sj tiba di Larantuka dan mulai karya pendidikan di Larantuka. Sementara itu, tahun 1879 Pertama kali para Suster Fransiskanes tiba di Larantuka dan juga memulai karya pendidikan keputrian. (Sekolah ini bersama dengan semua sekolah di Maumere kemudian dipindahkan ke Lela-Sikka tahun 1898)

Sejak tahun 1913 seluruh pendidikan di Flores diserahkan oleh Belanda ke tangan misi Katolik. Tahun 1914 di Flores telah dimulai pendidikan sekolah guru. Sekitar tahun-tahun ini sekolah-sekolah mulai dibuka di Flores; di Ndona-Ende, Paga-Sika, Ende. Reo, Labuan Bajo, Manggarai dan beberapa tempat lainnya di Flores .

Perkembangan pendjdikan di Timor, Sumba dan sekitarnya juga berjalan bersama-sarna dengan kegiatan evangelisasi para misionaris 1898 sudah ada sekolah di Lahurus dan Atapupu di perbatasan Timor Leste sekarang. Tahun 1911 pemerintah Kolonial menyerahkan sebuah sekolah di Besikama untuk dikelola oleh misi. Dalam sekolah-sekolah tersebut selain pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum, diajarkan juga keterampilan-keterampilan seperti pertukangan dan pertanian maupun keterampilan-keterampilan keputrian seperti menjahit dan, menenun sebagai bagian dari upaya pemberdayaan umat/ masyarakat setempat.

Deskripsi *Grondijs*; seorang Guru Sekolah Pemerintah di Kupang Dalam Soerabajasche Handelsblad, 21 Juni 1883 memberi kesaksian bahwa pendidikan yang dijalankan para Jesuit di Flores benar-benar diarahkan untuk transformasi masyarakat setempat tanpa tercerabut dari akar kebudayaan mereka sendiri. Setelah sekolah mereka akan kembali menjadi petani, peternak atau tukang yang baik. Sementara untuk yang perempuan agar setelah menyelesaikan sekolah menjadi semakin trampil menjahit dan menenun.

Demikianlah lukisan yang amat singkat dari perkembangan pendidikan di NTT. Saat ini GMIT melalui Yupenkris bersama dengan sejumlah lembaga pendidikan Kristiani lainnya yang ada di bawah pengawasan langsung Sinode atau Gereja yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mengelola sejumlah besar Lembaga Pendidikan Dasar dan dan Menengah di NTT. Begitu pula Gereja Katolik melalui Tarekat religius atau Keuskupan maupun yayasan Katolik yang dikelola oleh kaum awam Katolik mengelola sejumlah besar lembaga pendidikan. Ada banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi namun dalam segala keterbatasan karakter pendidikan Kristen seperti terlukis di atas tidak mengalami perubahan.

Jumlah sekolah swasta Kristen (Katolik maupun Protestan) saat ini melampaui jumlah sekolah-sekotah negeri yang dikelola

oleh pihak Pemerintah. Data berikut yang kami perolah dari Diknas NTT menggambarkan jumlah sekolah yang ada di NTT tahun 2002 menurut klasifikasi pihak pengelolanya.

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta/Termasuk Katolik/Protestan	Jumlah
1	TK	6	589	595
2	SD	2.347	1.705	4.052
3	SLTP	258	317	575
4	SMU	52	105	157
5	SMK	18	42	60
6	PT	1	18	19
7	Akademi	3	8	11

Catatan; 90% Lembaga-lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan Kristen(Katolik -Protestan) .Sumber data; Diknas Propini NTT, tahun 2002. dengan perbandingan angka-angka di atas tampak sangat jelas besarnya peranan swasta dalam dunia pendidikan. Selain itu ada beberapa hal berkaitan dengan peranan lembaga pendidikan kristiani sebagai kekuatan dinamik pengembangan budaya masyarakat NTT yang harus dicatat. *Perlama,* sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga kursus nonformal yang diselenggarakan oleh Gereja telah melakukan pencerdasan anak-anak bangsa. Pencerdasan itu tidak cuma meliputi kecerdasan spiritual melainkan juga kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Juga pencerdasan itu tidak cuma bagi orang-orang Katolik atau Protestan melainkan semua orang dari semua lapisan golongan ras,agama maupun etnis yang menjadi output. Sekolah-sekolah Katolik atau Kristen. Saat ini mereka tersebar di seluruh pelosok wilayah NTT dan praktis menjadi kader-kader pembangunan bangsa di wilayah NTT. Pencerdasan yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan Kristiani merupakan sumbangan yang sangat berarti .Karena itu eksistensi lembaga-lembaga Pendidikan- Kristiani juga harus dilihat sebagai satu "daya sejarah" untuk pembentukan bangsa ini.

Kedua, transformasi kebudayaan satu masyarakat sebenarnya merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Transformasi itu bergerak selalu dalam ketegangan antara tradisi dan modernisasi, antara kebudayaan dengan nilai-nilai serta kearifan lokal, dan tantangan global. Transformasi itu

tidak berlangsung secara alamiah semata-mata melainkan melalui proses belajar. Melalui sekolah-sekolah Gereja mendorong peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku serta memperkenalkan kebiasaan -kebiasaan baru bagi pribadi-pribadi terdidik dalam masyarakat NTT. Dengan mendidik masyarakat NTT lembaga-lembaga pendidikan kristiani menata aspek bathin kebudayaan NTT berhadapan dengan tantangan perkembangan zaman.

Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Misi atau Zending (di masa lalu) sebenarnya telah menjadi sebuah pusat pengembangan dan penumbuhan nasionalisme dan integrasi masyarakat NTT yang majemuk. NTT merupakan sebuah wilayah yang sangat majemuk. Kemajemukan itu, antara lain tampak dalam bahasa. Secara keseluruhan NTT terdiri dari 15 kelompok etnik utama, 75 kesatuan etnik dan 500 sub etnik .Kelompok-kelompok etnik ini mempergunakan 10 kelompok bahasa yang terdiri dari 36 bahasa dan 29 dialek, yang seringkali tidak saling memahami. Maka komunikasi antaretnik merupakan sebuah problem tersendiri. Sebagai contoh di pedalaman Kab. Alor sebuah wilayah kepulauan NTT hingga ke desa paling pelosok masyarakat desa bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mereka memiliki dialek masing-masing yang seringkali tidak saling dimengerti, sehingga bahasa Indonesia menjadi sarana yang mempertemukan mereka. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang melakukan investasi budaya dengan memajukan bahasa Melayu pada fajar kelahiran bangsa ini. Investasi budaya itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah (selain bahasa daerah dan sedikit bahasa Belanda). Selain itu, sampai saat ini lembaga-lembaga pendidikan Kristiani juga mendorong terjadinya perjumpaan dan pembauran antara generasi dari latar belakang budaya, etnis, bahasa dan agama yang berbeda. Pembauran itu mendorong tumbuhnya pengenalan serta pemahaman bersama akan pelbagai perbedaan sebagai prasyarat utama bagi toleransi dan integrasi masyarakat NTT yang majemuk.

3. Kebudayaan sebagai Sesuatu yang Dinamis

Kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan proses daya cipta manusia serta hasilnya yang nyata dalam masyarakat; sebuah realita dinamis yang terus berkembang. Artinya, kebudayaan dipahami sebagai dialektika manusia dengan pelbagai pertanyaan yang muncul dalam interaksinya dengan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan alamnya, lingkungan sosialnya serta dengan Tuhan sang Pencipta. Dialektika itu terjadi pada tiap titik garis waktu yang mengandung kelampauan, kekinian dan masa depan. Dengan demikian, isi kebudayaan seperti sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian dan lain-lain bukanlah sesuatu yang sudah final melainkan masih akan terus berkembang dan menjadi karena manusia sebagai subyek kebudayaan senantiasa terus menjadi dalam sebuah proses aktualisasi diri tanpa henti.

Dengan mengacu kepada manusia sebagai makhluk terbuka , kebudayaan memiliki kemungkinan untuk menjadi "lebih baik atau mengalami kemandegan". Kemajuan tercipta melalui proses kreatif manusia merumuskan jawaban-jawaban kreatif atas tantangan-tantangan baru, karena setiap jaman memiliki pertanyaannya dan jawabannya sendiri. Sementara kebudayaan akan mandeg ketika proses kreatif dan daya cipta terhenti. Untuk itu, pengembangan budaya harus menjadi satu upaya humanisasi yang berjalan terus. Pada titik inilah lembaga pendidikan harus hadir sebagai variabel penentu. Lembaga-lembaga pendidikan termasuk sekolah-sekolah kristen telah menjalankan proses humanisasi manusia (sebagaimana dikatakan sebelumnya). Dengan mengembangkan potensi-potensi manusia agar semakin menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan manusiawi di tengah tata dunia. Lembaga pendidikan Kristiani di NTT sebenarnya menjadi kekuatan dinamik bagi perkembangan kebudayaan masyarakat NTT.

Dalam masyarakat Indonesia -termasuk masyarakat NTT saat ini ada semacam kemandegan budaya. Tanda-tanda kemandegan budaya itu, antara lain tampak dalam rendahnya respons masyarakat terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana. Kekerasan terjadi di mana-mana. Sifat kenegarawanan di kalangan para pemimpin sangat lemah, kerap lebih mendahulukan kepentingan kelompok

daripada kepentingan bersama dan kurang menaruh minat atau kesungguhan pada perubahan dan perbaikan nasib rakyat. Korupsi meRajalela hingga ke daerah-daerah. Radikalisme dan perilaku sektarian merebak di mana-mana.

Situasi di atas menggambarkan kesenjangan amat jauh antara nilai-nilai kebaikan dengan tampilan pola perilaku masyarakat . Aktualisasi diri masyarakat saat ini ada dalam ketegangan yang mengarah pada kemunduran. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi .Situasi saat ini tidak akan berubah sendiri. Begitu pula kebudayaan tidak akan berkembang sendiri secara genetis melainkan melalui proses belajar, lembaga-lembaga pendidikan harus kembali menjadi pusat pengembangan manusia secara menyeluruh pusat humanisasi holistik.

Bagi lembaga pendidikan Kristiani kemandegan yang terjadi saat ini merupakan panggilan untuk bermetanoia dengan menegaskan kembali keberadaan,arah serta perannya- bagi pengembangan manusia - manusia baru sebagai subyek kebudayaan. Hal itu dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan kembali nilai-nilai kepelayanannya ke dalam praksis. Upaya humanisasi holistik melalui pendidikan diperjuangkan dalam rangka menyiapkan manusia-manusia baru Indonesia menjawabi tanda-tanda kemandegan budaya yang ada dalam masyarakat kita saat ini.

6. Beberapa Harapan

Selama hampir 300 tahun lembaga-lembaga pendidikan Kristen "jatuh bangun" berkiprah di NTT. Sejauh itu lembaga-lembaga pendidikan Kristen telah menyumbang pada terbentuknya kebudayaan masyarakat NTT. Memang sulit merumuskan apa yang dimaksud dengan kebudayaan NTT. Namun, yang jelas bahwa sekolah-sekolah Kristen telah menjadi pusat-pusat penting pengembangan budaya masyarakat NTT. Utamanya lembaga-lembaga Pendidikan Kristen terbukti setia menyiapkan manusia - manusia NTT sebagai subyek kebudayaan masyarakat NTT yang merupakan bagian utuh negara bangsa ini.

Karena itu, untuk mengakhiri refieksi ini saya ingin menitipkan beberapa harapan: Pertama, berhentilah membuat dikotomi antara swasta dan negeri dalam kebijakan

pembangunan di bidang pendidikan. Dikotomi ini tidak relevan dan mengingkari sejarah. Lembaga-lembaga pendidikan swasta maupun negeri adalah mitra dalam pengembangan manusia Indonesia. Kedua, konsekwensinya ialah pelayanan publik yang diberikan negara harus merata. Di beberapa wilayah kami mengalami bagaimana sekolah-sekolah swasta Kristen dipersulit tanpa alasan yang jelas. Ketiga, tugas menyelenggarakan pendidikan adalah tugas negara yang sering tidak terlepas dari pelbagai hitungan-hitungan politik. Namun tetap diharapkan pendidikan tidak menjadi sekedar ladang politik apalagi dengan justifikasi agama. Dunia pendidikan harus menjadi ranah persemaian manusia-manusia baru Indonesia.

Apa yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan Kristen di NTT adalah berkat yang harus disyukuri. Hingga kini kita mengakui NTT sebagai bagian utuh bangsa ini. Semoga hal ini tidak dilupakan.

***

PERJALANAN BANGSA INDONESIA MERUPAKAN GERAKAN BUDAYA MENUJU PERADABAN BARU[1]

Oleh: **Roch Basoeki Mangoenpoerojo**[2]

Keadaan bangsa di akhir 2003, ibarat orang berputar-putar pada satu titik yang sama, tanpa tahu arah dan harus berbuat apa. Orang cenderung menyalahkan dan pandai mengolok-olok, memperburuk wajah (bangsa) sendiri. Tak jelas siapa bertanggungjawab atas itu semua. **Itulah wajah sebenarnya** dari masyarakat berbangsa yang tak punya ukuran baik-buruk, maupun benar dan salah. Semua persoalan mau diselesaikan dengan kekuatan dan kekuasaan. Jelas bukan wajah begini yang dimaksud dengan tata-tentrem karto-raharjo. Di sini bukan untuk mengolok, tapi untuk introspeksi total.

Introspeksi itu berguna untuk mendudukkan masing-masing subyek pada fungsi yang tepat. Adalah salah bila menggunakan lipstick untuk penghias mata, tapi belum tentu tepat bila masyarakat Indonesia menggunakannya seperti peradaban yang telah maju. Misalnya, "salah prosedur"-nya TNI berpotensi untuk terus terjadi bila menganut profesionalisme Barat.

Bangsa ini belum memiliki kebudayaan nasional, masih rawan terhadap **"ancaman budaya"** untuk terjajah kembali sejak dari memilih materi ilmu pengetahuan. Maka, tak seorang pun bisa disalahkan sepenuhnya terhadap kerancuan sekarang ini. Juga terhadap kelompok penguasa untuk masa waktu tertentu. Itulah proses perjalanan panjang perjuangan bangsa yang sarat dengan "ketidak-sadaran" dalam kesadaran manusia. Oleh sebab itu, harus selalu mencari tahu, apa dan mengapa ketidak-sadaran itu terjadi, melalui "jendela kebudayaan" dengan tujuh unsur-unsurnya secara lengkap, yaitu[3] :

1. sistem religi atau upacara keagamaan
2. sistem dan organisasi kemasyarakatan

---

[1] Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, di Bukittinggi, tanggal 19 – 22 Oktober 2003.

[2] Mantan Perajurit TNI yang tertarik dalam soal Kebudayaan, kolumnis, penulis buku "Bangsaku".

[3] Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan", Gramedia, Cetakan pertama, 1974.

3. sistem pengetahuan
4. bahasa
5. kesenian
6. sistem mata pencarian hidup
7. sistem teknologi dan peralatan

(berurutan, sesuai tingkat kesulitannya untuk terjadi perubahan).

Keadaan bangsa bisa dilihat dari "pola pikir pemimpinnya" (mindset)[4] dan "arus utama pola tindak masyarakat" (mainstream)[5], dari zaman ke zaman. Semua kesalahan ternyata ada alasannya mengapa orang "terpaksa" berbuat salah. Bangsa juga belum membuat strategi Nation and Character Building, yang berfungsi mengubah **struktur** dan **perilaku** masyarakat dari sifat terjajah menjadi merdeka. Dalam konteks budaya, maka tidak perlu saling menyalahkan mengapa negeri ini terpuruk berat. Justru dengan introspeksi kita akan memperkaya pembentukan kebudayaan nasional.

Kecemerlangan "Indonesia".

Bicara soal "Bangsa Indonesia" baru dimulai pada tahun 1908, dan tidak sebelum generasi Kebangkitan Nasional. Namun, mereka tentu diilhami oleh masa sebelum itu. Masa lalu manakah kiranya yang dipilih oleh mereka yang kemudian bisa membangkitkan semangat para pendiri Negara hingga berhasil memerdekakan bangsa ini? Karena, masa lalu "Indonesia" bila diukur dengan skala dunia, ternyata ada kurun waktu yang gelap dan yang cemerlang.

Yang cemerlang adalah sebelum tahun 1200 Masehi. Sebelum Jenghis Khan meRajai dunia, masyarakat wilayah "Indonesia" ini sudah mampu menjelajahi lautan sampai ke Afrika Barat. Banyak peninggalan di sana, mulai dari Madagaskar. Di satu liteRatur, disebutkan bahwa pembuatan peta dunia (laut) pertama dilakukan oleh orang "Indonesia" di tahun 600an. Peta itu tersimpan baik di museum Yunani[6]. Prestasi keseluruhannya, bisa dilihat sampai kini di Candi Borobudur yang mampu

---

[4] Istilah yang digunakan dalam pasar pergaulan masyarakat budayawan dan politisi

[5] idem ditto

[6] Penulis membaca di salah satu buku di rumah senior di tahun 1974, tidak tersimpan datanya.

menggerakkan nurani kesejarahan dari seorang Robert (warganegara Inggris) untuk menapaktilas perjalanan **nenek-moyang manusia** itu (yang kebetulan masyarakat "Indonesia"). Ekspedisi itu berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa 15 Agustus 2003, dengan menggunakan perahu tradisional bikinan kawan-kawan kita dari Flores. [7]

Waktu itu peradaban di belahan lain dunia belum menjelajahi lautan. Para Raja sampai ke nabi tidak sampai melintas laut dalam upaya memperluas kekuasaan wilayahnya. Sampai kemudian munculnya Mongolia dengan Jenghis Khannya yang meRajalela menguasai dunia. Termasuk masuk ke "Indonesia" di tahun 1292, yang disambut dengan pisau untuk memotong telinga utusannya. Dengan kata lain, di tahun 1292 itu, wilayah "Indonesia" telah diinfiltrasi oleh kekuatan asing, dan laut-laut di sekitarnya sudah pula dikuasai. Mungkin sejak inilah kejayaan "Indonesia" dalam skala dunia sudah mulai surut.

Dari masa cemerlang tersebut, ada yang bisa ditarik pelajaran/warisan yang berguna bagi Kebangkitan Nasional dan masa depan bangsa. Deskripsi di bawah ini bukanlah kebenaran sejarah (yang layak diperdebatkan) tapi intepretasi sejarah untuk kepentingan nasional jangka panjang. Konteksnya mencari jati diri. Dari berbagai bacaan yang sangat langka, saya melihat beberapa perilaku dan produk menarik yang bisa dicatat :

1. mengarungi samudera sarat dengan **jiwa pelopor/ entrepreneurship**, sanggup melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh manusia lain. Itu berguna bagi Kebangkitan Nasional dan masa depan bangsa. Lagu "nenekmoyangku seorang pelaut" adalah simbol kebanggaan generasi berikut.
2. mampu mencipta sesuatu yang belum pernah ada (**tehnologi**, peta sebagian dunia, kapal, Borobudur dst)
3. **tidak** berkeinginan untuk **menguasai** wilayah yang pernah disinggahi (yang menetap di sana, tetap bersahabat dengan lingkungannya)[8].

---

[7] Kompas, 12 Agustus 2003.

[8] Ceritera rekan sepulang dari Afrika. Itu bukan kesimpulan mereka, namun menjawab pertanyaan dan sesuai wawancara dengan warga Melayu di Afsel, yang saya yakini kebenarannya. Juga kunjungan Nelson Mandela ke makam "Syaikh Madura" (Farid Esack "Membebaskan Yang Tertindas". Mizan, 2000).

Tanpa melebih-lebihkan, tidak terlalu sulit rasanya untuk menyepakati bahwa ketiga faktor tersebut adalah obyektif, setidaknya dilihat oleh kepentingan nasional Indonesia, yang diakui oleh Robert (Inggris).

Masa kecemerlangan dengan ketiga faktor obyektif itulah yang mampu menggerakkan para pemuka masyarakat (1908), untuk memanfaatkan momentum kemenangan Jepang melawan Rusia 1905 di Vladivostok dan politik etisnya Belanda. **Itu mungkin**[9], di samping faktor lain tentunya.

"Indonesia" di zaman Artificial

"Ingin berkuasa", entah budaya dari mana yang menjangkiti "Indonesia" di melinium II, tiba-tiba sejarah Indonesia dipenuhi dengan bunuh-membunuh untuk kekuasaan, dan menginginkan kekuasaan itu bertambah luas. Sejarah Indonesia dari masa ke masa, lebih bercerita tentang kemenangan (siapa pun) terhadap lawan-lawannya. Sebenarnya tradisi menang-menangan itu tidak terdukung (sinkron dengan) hasil sastranya yang selalu mengedepankan moral seperti nglurug tanpo bala, menang tanpo ngasorake, sugih tanpo bondo, dan masih banyak petatah-petitih lain di seluruh wilayah "Indonesia". Periode ini sangat munafik, yang bisa diartikan dengan sejuta makna.

Secara umum, ciri-ciri masyarakat "Indonesia" di masa ini (1200-1908), yang kontradiktif dengan perjuangan pergerakan kebangsaan, adalah :

1. Para pemimpin puas dengan kekuasaan, sekalipun kekuasaan yang dimilikinya/diperebutkan itu cuma wilayah yang sangat kecil dan terbatas
2. Untuk mendapatkan/mempertahankan kekuasaan, dilakukan dengan kekuatan noniptek/prestasi (hal bersifat magis, atau rekayasa/trick)[10]

---

[9] Penggunaan kata "mungkin" adalah suatu **kepastian** bahwa mencari kebenaran akan hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin, padahal bangsa ini membutuhkan sesuatu acuan yang bisa digunakan bersama untuk membangun pola pikir berbangsa dan bernegara. Kalau nenek moyang berani mengarungi samudera yang "mungkin" berbahaya, mengapa penerusnya "lebih suka berdebat" untuk hal-hal yang tidak prinsip, tanpa menyentuh asinnya sejarah. Marilah kita berbuat untuk sejarah – yang bukan KKN-.

[10] Baca legenda-legenda yang beredar dalam masyarakat, seperti mas Karebet, Aryo Penangsang dll.

3. Kalau perlu berkolaborasi dengan pihak lain untuk membantunya, dengan janji-janji hadiah berupa wilayah tertentu.

Hektar-hektar pun terlepas menjadi milik orang lain, dan kekuasaan yang ia miliki tidak solid karena harus berterima kasih terhadap sang pembantu yang kemudian disebut sebagai penjajah. Ketika memberontak digunakan ketiga pola itu, dan dihadapi dengan *devide et impera* yang selalu mengalahkannya. Kemegahan kekuasaan itu hanya artificial belaka, semu sifatnya. Akhirnya terjajahlah negeri ini Ratusan tahun. Dan terbangunlah "jiwa keterjajahan" dalam struktur masyarakat, yang kemudian mengakar sangat kuat atas kepiawaian para antropolog/sosiolog Belanda. "Struktur terjajah" itu berlapis-lapis tingkatan, menjadi satu nilai kebenaran tersendiri (berjalan sampai kini).

Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah bangsa ini. Artinya dialah "pemenang" untuk jangka waktu yang lebih lama dan lebih luas wilayahnya dari yang lain. Prestasi Majapahit apabila diukur dengan skala dunia seperti Generasi Borobudur bukanlah bandingan. Bahkan dibandingkan dengan Generasi Kebangkitan Nasional pun tidak sebanding. Lihatlah Sumpah Palapanya Gajahmada hanya menggetarkan seluruh wilayah Nusantara. Padahal wilayah getaran Sumpah Pemuda sampai ke daratan Eropa. Membuat negeri Belanda alergi berat terhadap sebutan Indonesia yang berakibat dibangunnya tempat-tempat pembuangan buat para pemimpin Indonesia. Getaran itu akan tetap terasa sepanjang masa, meski tak satupun patung yang menggelorakannya. Lain lagi, pengaruh gadis jelita yang harum namanya (Kartini) pun bisa memporak-perandakan Kabinet Pemerintahan Juliana di Belanda[11]. (Lewat forum ini diusulkan agar Ra. Kartini yang muda dan selalu berpikir keras untuk lingkungannya itu, dijadikan simbol kebangkitan kebangsaan).

KEBANGKITAN KEBANGSAAN.

20 Mei di kawasan Kwini Batavia di tahun 1908, menampilkan beberapa tokoh omong-omong belaka dan tidak ada kaitannya

---

[11] Sutrisno Sulastin, "Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan Untuk Bangsanya", Penerbit Djambatan, Cetakan kelima, 1979 (terjemahan atas kerjasama dengan Pemerintah KeRajaan Belanda).

dengan kekuasaan. Tetapi ketika diteropong dengan skala zaman dan dunia, ternyata luar biasa artinya. **Dari sinilah Kebudayaan Nasional berawal.**

Itu awal **Gerakan Budaya I**[12], tonggak berubahnya prilaku masyarakat Indonesia secara signifikan. Ditinggalkan sama sekali habitat pandahulu yang selalu ingin berkuasa. Para pemimpin saat itu merubah habitat diri menjadi lain. Menjadi, yang dibutuhkan oleh **"masyarakat terjajah yang maju"**, yaitu yang berkemampuan untuk menolak penjajahan :

1. Dari berorientasi pada kekuasaan menjadi orientasi ke masyarakat
2. kebiasaan melawan (penjajah/penguasa) menjadi meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui pembentukan organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan perdagangan (embrio profesionalisme Indonesia).

Dari tren ini Sumpah Pemuda terlahir di tahun 1928, masyarakat sudah menggeliat menunjukkan kemampuannya membuat penjajah menjadi waswas (bukan terhadap pemimpin tetapi terhadap **gerakrakyat** karena deklarator sumpah itu bukanlah orang-orang ternama di saat itu). Demikian juga, lagu "Indonesia Raya" terlahir karena tren tersebut (1926).

Tren tersebut bukan by design, bukan rekayasa sosial, karena tak ada satu kekuatan pun di alam penjajahan saat itu yang akan mampu merekayasa. Tren tersebut lebih layak disebut sebagai **gerakan budaya**, karena setiap ide terhadap perubahan (dari siapa pun, bukan hanya dari pemimpin) dengan cepat dapat diserap oleh pihak lain dan kemudian diperluas dan diwujudkan menjadi pernyataan bahkan kenyataan. Itulah yang terjadi dengan "Indonesia Raya" maupun Sumpah Pemuda sebagai awal tonggak **Gerakan Budaya II**, yang dilakukan oleh generasi lebih muda dari Generasi Kebangkitan Nasional, seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, St. Syarir, dan masih banyak lagi. Gerakan budaya ini meningkat, apa yang mereka lakukan ?

---

[12] Yang dimaksud dengan Gerakan Budaya di sini adalah "upaya masyarakat untuk merubah 'keadaan diri' yang tersebut dalam tujuh unsur kebudayaan" (lihat halaman 1).. Bagi masyarakat terjajah, semua sistem dalam ketujuh unsur tersebut telah tersumbat rapat. Hal ini menjadi tuntutan bagi para ilmuwan sosial Indo-nesia untuk mengembangkan ilmu guna melayani masyarakat terjajah lainnya di seluruh dunia.

1. pendidikan politik, khususnya penyadaran terhadap masyarakat akan arti penjajahan di satu sisi, kemerdekaan di sisi lain, dan di mana kita?
2. organisasi politik pun bertebar, dibentuk oleh mereka
3. diakhiri dengan pembuatan konsepsi politik di BPUPKI, Mei-Juni 1945 dan dilanjutkan dengan di PPKI yang melahirkan UUD 1945.

Upaya-upaya di atas adalah gerakan budaya dan tak bisa dikategorikan sebagai gerakan politik, karena belum ada gerakan nyata secara fisik yang berkaitan dengan kekuasaan, apalagi perebutan kekuasaan. Hal itu dibuktikan oleh Jepang dengan mengorganisir penyelenggaraan Sidang BPUPKI. Diakuinya keberadaan gerakan budaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Sidang itu sama sekali bukan kooptasi atau kolaborasi, tapi hubungan suka sama suka, kepentingan berbeda. Inilah wajah **"masyarakat terjajah yang maju"**.

Tonggak **Gerakan Budaya III** berkait dengan hari Proklamasi, di bulan Agustus 1945, diawali dengan penculikan Soekarno-Hatta oleh pemuda, yang memaksa "merdeka sekarang juga", diikuti dengan bangkitnya pemuda di segala bidang untuk merealisasikan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Tokoh generasi ketiga ini sebut saja Adam Malik, Maladi, Sudirman, dan lain seterusnya. Gerakannya, antara lain bisa dicatat :

1. Lahirnya Pemerintahan RI
2. Lahirnya Bala Keselamatan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi TNI
3. Lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI) di Gunung Lawu
4. dan masih banyak lagi organisasi profesi yang terlahir untuk mengantisipasi kemerdekaan itu, yang masih harus dikonfirmasikan datanya

Cirinya sama yaitu tanpa komando, spontanitas[13]. Tidak satu perintahpun yang membuat pemuda menerobos benteng DaiNippon untuk merebut senjata, dan kemudian digunakan untuk menyerang markas Sekutu. Demikian juga terhadap penyiaran proklamasi ke seluruh dunia oleh RRI. Gerakan yang

[13] Mungkin saja ada politisi yang mengklaim sebagai yang memberi perintah atas terbentuknya RRI dan TNI, situasi di kala itu tidak memungkinkannya. Yang ada justru suasana politisi yang saling mengklaim, seperti yang juga terjadi pada "Serangan 1 Maret 1949, di Jogya".

tampil secara fisik ini merupakan implementasi dari pendidikan (budaya) politik yang diwujudkan di lapangan menghadapi penjajah. Sebagai buah dari gerakan budaya yang terbangun secara perlahan, hal itu mereka lakukan "tanpa sadar" (dalam pengertian seperti anak muda sekarang yang tanpa sadar berbondong mengunjungi Mall. Kalau dulu, berbondong melawan penjajah). Seluruh perilaku masyarakat yang terseret oleh mainstream, yang buruk maupun berguna, dilakukan oleh pelakunya secara tidak sadar sepenuhnya.

Bagaimana seharusnya melihat gerakan tahun 1945-1950 ? Dari pihak **Belanda** yang mengaku sebagai penjajah, layak menyebut sebagai gerakan politik, sebab kekuasaannya direbutpaksa, sedangkan **bangsa Indonesia** boleh melihat secara lain, yaitu sebagai gerakan budaya yang menunjukkan bahwa upaya bangsa untuk menemukan kembali barangnya yang hilang. **Jepang** yang mengaku sebagai saudara tua, yang tidak merasa kehilangan apa pun telah bersikap netral (artinya sah-sah saja). **Kejelasan perbedaan cara melihat**, menjadi sangat mutlak ketika bangsa ini harus bicara soal politik yang sebenarnya, yaitu pada saat kedaulatan Negara harus dipertaruhkan demi kemaslahatan seluruh warga bangsa Indonesia.

Selama masih ada penjajahan di muka bumi (Pembukaan UUD '45), dan penjajahan terus mengancam kedaulatan negara, mari bersepakat untuk tetap menggunakan konteks budaya yang salah satu aspeknya adalah politik[14]. Bangsa Indonesia harus membangun budaya politik sendiri yang berasal dari perjalanan sejak 1908, sampai dengan Negara ini benar-benar berdaulat seperti Negara-negara lain di dunia yang terbebas dari ancaman penjajahan. Inilah materi yang teramat penting dalam *Nation and Character Building*, sebab bagaimanapun juga, penjajah akan terus mengancam kekayaan Indonesia yang melimpah ruah (Negara ini rawan penjajahan). Untuk sementara politik bangsa adalah politik pembebasan dari penjajahan.

---

[14] Usul kepada para ilmuwan sosial agar memasukkan sistem politik sebagai unsur kebudayaan yang ke-8.

MINDSET[15] BANGSA.

Dari Gerakan Budaya I, II dan III di atas, bisa didiskripsi **mindset bangsa** atau setting pola pikir bagaimanakah yang akhirnya mampu memerdekakan bangsa ini. Deskripsi tawaran saya adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengembalikan kejayaan Borobudur (tehnologi dan kelautan), serta meninggalkan tradisi "gairah kekuasaan" yang mengantar bangsa ke alam penjajahan Ratusan tahun.
2. Menghindari kelalaian bangsa sebab penjajahan itu hanya terjadi oleh kelalaian bangsa sendiri yang tak mampu menghadapi kepiawaian pihak-pihak kuat yang (secara manusiawi selalu) ingin menjajah.
3. Musyawarah mufakat adalah kata kunci untuk melaksanakan niat nomer 1 dan 2 tersebut.
4. Acuan harus konsisten yaitu peradaban dunia di masa depan[16] yang sarat persahabatan tanpa eksploitasi manusia/ bangsa terhadap lainnya.

Nomor 1, 2 dan 3, itulah yang dimaksud dengan "suasana batin" dalam UUD 1945 yang tidak sempat dideskripsi (atau malu hati/rendah hati untuk terbuka ?). Sebenarnya, UUD 1945 memang tidak didesain untuk "kekuasaan". UUD 1945 adalah dokumen budaya yang hanya berfungsi untuk mengantar ke pembentukan sistem kekuasaan yang didasarkan pada budaya yang terbangun dari Gerakan Budaya I dan II (dan yang telah dibuktikan kebenaran-lapangannya di Gerakan Budaya III, selama perang kemerdekaan[17]).

Perwujudan mindset di tengah masyarakat, terlihat pada arus utama perilaku masyarakat (*mainstream*). Para pemimpin saat itu melakukan tindakan budaya seperti tersebut di depan. Dan terjadilah perebutan arus dalam masyarakat, antara yang ingin terbebas dari penjajahan dan yang menganggapnya mustahil.

---

[15] Usul kepada para ilmuwan sosial untuk memasukkan istilah-istilah "mindset" dan "mainstream" sebagai istilah baku yang diilmiahkan, karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terjajah.

[16] To Build The World A New, Ir. Soekarno, Pidato di PBB, 1960.

[17] Tidak pernah ada studi empirik tentang keberhasilan Perang Kemerdekaan, berakibat mudahnya orang untuk mendiskreditkan pada suatu saat nantinya (kini telah banyak terlihat, antara lain dalam rubrik Fokus, Kompas 17 Agustus 2003 ; "kesalahan bangsa ini adalah anggapan bahwa kemerdekaannya direbut dengan perang" kata rubrik itu). Mana yang benar ? Kasihan Generasi Muda yang dibingungkan oleh sejarah.

Arena perebutan arus berjalan 37 tahun, dari 1908 sampai dengan 1945. Siapakah pemenangnya ?

Perang Dunia II secara alami menyeleksi dan memilah arus yang kuat dan lemah. Mainstream di lapangan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 **ternyata** dikuasai oleh mereka yang ingin terbebas dari penjajahan, sedangkan mereka yang beranggapan mustahil (yaitu para penerima roti Belanda[18]) menjadi arus pinggiran di kala itu. Para pejuang dengan mudahnya mendiskreditkannya dengan stigma "mata-mata" atau "antirepublik". *Mainstream* manuver rakyat siap menghadapi apa pun yang dilakukan Sekutu/Belanda. Pengakuan Negara Sekutu (termasuk Belanda) terhadap kedaulatan Negara, **lebih** disebabkan oleh kenyataan mainstream yang berasal dari Gerakan Budaya I dan II, bukan para politisi maupun TNI (yang memimpin).

Berubahnya Mainstream.

Perebutan mainstream ternyata terus berlanjut. Sejak kedaulatan diakui, ada yang berubah dalam diri bangsa, yaitu merasa sudah merdeka. Perasaan ini menjadi entrypoint buat kaum kolonialis untuk merebut kembali mainstream. Terbukti di tahun 2003, mainstream bangsa ini telah mengikuti apa maunya mereka, dari tingkat pembuat kebijakan bernegara sampai dengan *grassroot* yang ingin serba instant, sedangkan apa yang dikenal sebagai arus bawah menjadi arus pinggir yang sama sekali tidak perlu diperhitungkan. Masa penjajahan 350 tahun pun telah berulang kembali.

Mengapa hal itu terjadi ? Hanya karena "kelalaian diri", begitu kata mindset di depan. Benarlah kata Syahrir, bahwa bangsa ini belum siap merdeka. Selama 58 tahun bertrial and error membangun bangsa, dan usaha mengelola kekuasaan bagi negerinya sendiri, ternyata bangsa ini tidak mampu mempertahankan mainstream yang sudah direbutnya, karena :

1. sudah merasa merdeka dalam arti segala-galanya. Negara ini merdeka dan berdaulat, tapi belum berarti bangsanya juga merdeka, apalagi rakyatnya

[18] Penulis dalam usia lima tahun, pernah bersama kawan-kawan ikut antrean pengambilan roti dari Belanda di SD Badran, Solo, tapi juga mondar-mandir ikut orang tua mengungsi ke Gunung Lawu (1946-1949).

2. membiarkan Gerakan Budaya I, II, III dianggap usang dan diganti dengan profesionalisme sesuai nilai-nilai "dunia maju". Semua nilai disirnakan, lalu bangsa ini menjadi asing terhadap budaya sendiri karena harus mengikuti budaya mereka yang pada hakikatnya adalah budaya penjajah 350 tahun. (Kaum politisi mulai dari Maklumat X, TNI sejak 1970-an, professional lain mengikuti, lalu jadi tiangnya mainstream kolonialis).
3. salah satu nilai profesionalisme yang dikembangkan adalah "keuangan yang maha kuasa", di mana sebagai bangsa kita belum memiliki tradisi mengelola uang secara baik (secara individu maupun organinasi, apalagi negara) merupakan makanan empuk buat para pemilik uang untuk mengkooptasi.

Kini bangsa telah terperosok dalam mainstream kapitalisme yang menguasai dunia, sehingga berada dalam pinggiran arus global dan suka tidak suka harus siap menerima kenyataan neokolonialisme.

Bila di tahun 1949 Indonesia mendominasi mainstream masyarakat dan menempatkan arus penjajah ke feri-feri, beda dalam situasi mainstream kapitalisme,kekuatan Indonesia berada di feri-feri. Bila hal ini berjalan terus, maka cepat atau lambat mindset pun pasti akan tergusur. Dan, kemudian terbukti, klimaks itu telah jatuh tempo di tahun 2002 kemarin. Yaitu diobrak-abriknya dokumen Kebudayaan UUD 1945 oleh diri sendiri atas bantuan pihak kolonialis[19]. Kalau benar dokumen itu, ini bukan hanya ironi tetapi malapetaka luar biasa dalam kesejarahan budaya bangsa, tergusurnya mindset bangsa.

GERAKAN BUDAYA IV.

Setelah kaya dengan pengalaman jatuh bangun di alam "kemerdekaan" yang semu, di tengah keterpurukan yang tak terkirakan, kini saatnya bangkit kembali meneruskan Gerakan Budaya I, II dan III. Gerakan budaya yang jelas-jelas membuahkan hasil nyata harus diteruskan. Secara budaya, masa trial & error biarkan lewat dan tak perlu disesali. Yang

---

[19] Dokumen dari luar termasuk data jumlah anggaran yang diperbantukan tersebar luas dalam masyarakat (tidak jelas kebenarannya). Tidak perlu disampaikan tersurat dalam makalah, namun harus dicatat.

penting justru memilih pengalaman atau produk mana yang layak dilanjutkan. Ukuran untuk memilih adalah, harus kembali ke mindset di atas terlebih dahulu. Lalu siapa yang berhak memilih, jelas oleh semua pihak secara **musyawarah mufakat**.

Sebelum pembicaraan tentang siapa (ini terpenting), harus ada kesepakatan bahwa antisipasi untuk menyelamatkan bangsa adalah dengan budaya politik, dan bukan dengan politik kekuasaan. Konsekuensi dari kesepakatan adalah, semua dan seluruh institusi baik Negara maupun swasta, harus menempatkan dirinya menjadi alat budaya (bukan perangkat). Artinya menjadi alat/agen pembaharuan budaya, dari budaya terjajah menjadi merdeka. Alat budaya inilah yang akan merumuskan strategi kebudayaan yang materinya akan dimusyawarahkan agar mendapat kemufakatan.

Siapa itu yang berhak masuk dalam kriteria ikut serta bermusyawarah mufakat? Dengan bahasa budaya, adalah seluruh organisasi masyarakat (berbadan hukum ataupun tidak) dan institusi pemerintahan yang telah memperlihatkan kemandiriannya dalam menyantuni masyarakatnya. Bagi para pragmatis tentu sulit untuk mengapresiasi siapa mereka. Lebih simple dengan bahasa hukum, harus menggunakan yang termuat dalam UUD 1945 asli. Yaitu parpol yang anggotanya di DPR, Utusan Golongan yang terdiri dari organisasi profesi yang benar-benar professional (tidak membebek ke Departemen Fungsional), dan Utusan Daerah yang diisi oleh kaum Adat (banyak organisasi Adat yang hidup di tengah masyarakat sampai hari ini seperti perayaan "Seren Tahun"[20] misalnya, apalagi di Kalimantan dan Irian Jaya. Mereka tidak pernah didengar aspirasinya, kecuali didekati menjelang setiap pemilu).

Strategi Kebudayaan

Strategi Kebudayaan untuk mengubah **struktur** dan **perilaku** masyarakat terjajah menjadi merdeka, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. impian (Indonesian Dream)
2. kenyataan lapangan yang dimiliki bangsa ini, baik berupa kekayaan maupun kemiskinan/minusnya, termasuk dalam

[20] Di Kuningan, pada bulan Februari/Maret setiap tahun, yang biasanya dihadiri oleh ketua-ketua adat atau utusannya dari seluruh Indonesia.

geopolitik

3. kecenderungan peradaban dunia di masa depan (bukannya peradaban yang sedang berlangsung).

Yang jelas, **tidak satupun norma yang membatasi gerak kebudayaan**, iptek sekalipun. Ingat pembuat "norma universal" itu belum pernah terjajah. Bangsa ini memiliki pengalaman terbanyak di dunia dalam hal dijajah, tidaklah pantas mendengar dongeng mereka seperti selama 350 tahun plus 58 tahun "merdeka semu". Pernyataan atas kenyataan ini bukan kebanggaan, tetapi juga tidak memalukan. Inilah wajah **kaum terjajah yang maju**.

Yang membanggakan justru bila bangsa ini mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan di dalam segala bentuknya. Misalnya bangsa ini pernah bangga menjadi satu-satunya negara yang mampu memerdekakan diri dan juga membasmi kekuatan komunis dengan tangan sendiri. Dan, bangsa ini pernah mengarungi samudera ketika orang lain masih ketakutan melihat laut. "Nenek moyang seorang pelaut" perlu diabadikan oleh para budayawan, melalui patung "Sumpah Pemuda" yang dibangun di tengah laut (di perairan Bali ?).

Strategi Kebudayaan adalah lengkap bila mengandung tiga komponen yang bertautan erat secara sistemik, yaitu :

1. **brainware**, bahasa manajemen untuk istilah "mindset", yang sepenuhnya berasal dari UUD 1945 secara lengkap.
2. **software**, yaitu tata laksana penyelenggaraan Negara
3. **hardware**, adalah seluruh struktur bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik infra maupun supra.

Brainware selama ini tak pernah disentuh, apalagi dibicarakan, bahkan mungkin belum ada liteRaturnya, namun sangat dibutuhkan oleh negara bekas jajahan yang separah Indonesia ini. Hal ini tidak akan pernah bisa ditanyakan kepada siapa pun yang belum pernah dijajah. Mereka bukan tak mau atau tidak bisa, tetapi karena brainware yang mereka miliki adalah menjawab pertanyaan "bagaimana bentuk penjajahan yang bermoral ?" Mereka kesulitan berempati terhadap kesulitan bangsa terjajah. Orang tidak kerja dikatai malas, padahal tidak tahu harus kerja apa, atau untuk apa kerja kalau begini saja cukup, dan seterusnya. Hal begini adalah upaya budaya dari masyarakat terjajah, yang harus memberikan Nation and character building, di samping proteksi. Sekali lagi, menghadapi

kenyataan yang begini, bangsa ini tidak bisa bertanya kepada siapa pun kecuali berempirik, melihat ke dalam dan ke bawah.

Di bawah sana[21], begitu banyak "success story"[22] yang terhambat pengembangannya oleh gaya penjajahan yang berlapis-lapis yang ada di atasnya (entah birokrasi, parpol, pengusaha dan seterusnya). Contoh yang besar ialah, usaha jamu dan rokok kretek. Mereka besar di mata kaum inlander, tapi kecil di mata dunia, padahal sebenarnya mereka adalah kekuatan raksasa yang jadi sapi perahan di negeri sendiri. Jamu sulit masuk rumah sakit, dan sulit masuk ke kurikulum, maka mereka harus bergerilya untuk tumbuh dan berkembang. Mereka adalah entrepreneur, pasar New York pun mereka bisa kuasai.

Contoh yang kecil, satu saja. Di wilayah Blitar dan sekitarnya terdapat kendaraan bernama LEDOK, yaitu mobil buatan masyarakat itu sendiri. Mobil itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat karena bisa nyelep padi, menggergaji dan lain-lain. Cuma di mata aparat, mobil itu tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas, maka tak mungkin mendapatkan hak operasi di jalan-jalan. Fisik mobil, berupa sembarang kasis bekas, diberi diesel, dilengkapi roda, stir, rem dan seterusnya sehingga laik jalan. Ribuan pemiliknya menyanggupi untuk ikut keur yang akan diadakan oleh Pemda, namun tidak pernah terjadi. Ketika akan diadakan lomba ledok atas nama Silaturahmi Kebangsaan 2003[23], Pemda dan polisi bergairah menyetujui. Ini memberikan harapan kepada masyarakat, tapi di hari H-nya perizinan untuk lomba tersebut tidak keluar. Itulah salah satu sisi success story yang benar-benar tidak sukses, dalam struktur keterjajahan.

Brainware

Itu semua tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada aparat karena kita belum punya "Kebudayaan Nasional", belum taat

---

[21] Pengalaman "belajar menjadi rakyat" dari tahun 1980 sampai kini, di seluruh wilayah negeri, di hampir seluruh lapisan/strata masyarakat.

[22] Yang dimaksud dengan "success story " di sini adalah, sukses warganegara Indonesia dalam upayanya (apapun) yang bermanfaat bagi perubahan budaya terjajah menjadi budaya merdeka (7 unsur kebudayaan dalam konteks keindonesiaan). Tak termasuk pengusaha yang buka fried-chicken atau minuman asing.

[23] Tanggal 1 Juni s/d 21 Juni di Blitar, diselenggarakan oleh sebuah Panitia Independen yang diketuai oleh penulis, meliputi kegiatan : Sarasehan Kebangsaan 12 hari, hiburan rakyat, lomba dan pameran 21 hari.

mindset, dan itu semua belum bisa terujud selama belum ada brainware atau "piranti pikir kebudayaan nasional". Jangan salahkan mereka, ini kesalahan semua warga bangsa yang dalam proses merdeka (bagaimana sikap bangsa kalau ada di antara warganya yang ingin menjajah, jadi comprador asing baik langsung maupun tak langsung ?).

Saya mencoba mendefinisikan brainware. Yaitu "mindset yang distrukturkan secara sistemik meliputi seluruh aspek kehidupan, agar bisa dioperasikan dengan hardware dan software tertentu dengan output terwujudnya kebudayaan nasional". Mengapa begitu panjang dan sulit? Karena permasalahan Indonesia yang terjajah ini begitu kompleks, sangat luas, sangat kaya, sangat banyak penduduk, tapi juga sangat banyak kemauan, sangat sarat sikap inlansder, sehingga sangat banyak ancaman dari luar.

Karena permasalahan bangsa kelewat kompleks, maka harus cerdas dan berani memilih bidang strategis untuk menyederhanakan persoalan tanpa meninggalkan pentingnya semua substansi. Di bawah ini sekedar masukan untuk para cendekiawan yang ingin mengembangkan konsep brainware ini.

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebenarnya apakah kebutuhan rakyat post-kolonialism yang paling hakiki? Tentu berbagai segi yang berkaitan dengan ekonomi primer (karena terlalu lama miskin ; populasinya pun terbesar).
2. Ekonomi Primer, pola pemenuhan sembako yang mendasarkan pada perilaku ekonomi yang dikenal oleh atau familier dengan rakyat itu sendiri.
3. Karena pola tersebut harus merupakan bagian kegiatan ekonomi makro, yang terkait dengan kegiatan ekonomi global, dan berkorelasi dengan sektor/bidang lain dalam totalitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka haruslah distrukturkan begitu rupa dalam suatu **Sistem Ekonomi Kebangsaan** (sistemik dan taat pada asas).
4. Sistem ekonomi tersebut agar mampu tegak-operasional harus didukung **sistem lain guna mengamankannya dari rongrongan neokolonialism,** yaitu sistem politik (kekuasaan, diplomasi, kebanggaan, dst) dan hankam (intelejen, penyelundupan, percaya diri, dst).

5. Ketiga sistem tersebut, **ekonomi**, **politik** dan **hankam**, masing-masing otonom tapi berkorelasi secara sistemik (lihat skema) ; tak ada yang terpenting di antara ketiganya, namun sistem ekonomi langsung menyentuh kepentingan rakyat (primer lagi), oleh karenanya sistem ekonomi menjadi primadonanya.
6. Pertemuan antara ketiga sistem tersebut membentuk "Wilayah 1" yang mewadahi kiprahnya pemikiran disiplin lain, maupun kepentingan sektor lain (pembangunan), dan di sinilah, dari pembahasan interkorelasi-interdependensi ini akan ditemukan materi pokok dan prioritas dari **mindset** yang harus dijabarkan untuk segera dioperasikan agar terbangun **mainstrem** dalam upaya membumikan Pancasila.
7. Perembugan di "wilayah 1" ini masing-masing disiplin/ kepentingan tidak otonom. Setiap disiplin/kepentingan harus mensinkronkan dirinya dengan ketiga sistem terdahulu, dan (harus) mendukungnya.
8. Point 7 di atas akan melahirkan **Strategi Kebudayaan Menuju Indonesia** yang mandiri. Dalam strategi meliputi preoritas, kebutuhan waktu sampai dengan modus-operandi untuk setiap bidang/sektor beserta ukuran-ukurannya (ukuran inilah yang akan mengkomprehensifkan kebijakan serta mengharmonikan gerak dan perilaku setiap insan, bukan perintah).
9. Ukuran yang disepakati harus terjelma di lapangan dan bisa dirasakan oleh setiap insan. Untuk itu, ukuran dengan segala aspeknya disusun menjadi produk hukum positif (wilayah 5) yang sesuai dengan mindset.
10. Aparat (wilayah 6) melaksanakan mindset yang sudah diterjemahkan menjadi produk hukum positif tersebut, dan membudayakannya di lapangan menjadi **mainstream** yang dijaga melalui **lawenforcement** (yang harus ditaati oleh seluruh warga dan aparat).

Jadi: hanya oleh mainstream yang berakar dari nilai sendiri, yang bisa merusak mainstream Orba/kapitalis-kolonialis (begitu kuat mencengkeram mental anak bangsa). Bila konsisten, ia akan membasmi sikap mental yang serba instan, ujung-ujungnya duit, KKN dari bumi pertiwi. **Kuncinya, kesepakatan yang berkekuatan, bukannya kekuasaan yang berkekuatan.**

REKOMENDASI.

1. Perjalanan Bangsa sejak 1908 bukan gerakan politik seperti berbagai pemberontakan di "Zaman Gelap". Tapi Gerakan Budaya (GB) yang terdiri dari GB-I (1908-1928), GB-II (1928-1945) dan GB-III (1945-1950) yang nyata-nyata telah berbuah bukti, yaitu rasa keindonesiaan yang bertahan sampai hari ini dan kedaulatan Negara yang tidak disyukuri.
2. Karena tidak mensyukuri, negeri ini kembali ke zaman gelap yang mengantar bangsa menjadi terjajah Ratusan tahun. Yaitu para pemimpin terlalu bergairah melihat kekuasaan dan berpikir kerdil, lalu menghentikan GB, menganggapnya sebagai usang/kuno/konservatif/ortodox.
3. Satu-satunya penyelamat bangsa dan NKRI adalah "Kebudayaan Nasional" yang terbangun dari ketiga GB di atas. Harus segera dilakukan Gerakan Budaya IV menuju "Kebudayaan Nasional", yang merupakan kelanjutan dari GB I, II dan III, plus yang baik-baik dari masa trial and error (1950-2003). Kesalahan di masa trial and error tidak perlu disesali.
4. Sebelum melancarkan GB IV diperlukan *brainware* yang komprehensif, agar bisa diukur hasilnya dan dijamin akan terjadinya *mainstream* yang berpihak kepada *mindset* Pancasila (masyarakat merdeka dari keterjajahan). Yang menangani GB-IV selayaknya DPA, Dewan Pertimbangan Agung[24].
5. Dunia Keilmuan Indonesia harus melakukan "improvisasi berat" untuk mendukung terwujudnya iklim yang favourable untuk mendobrak kemandegan berpikir kaum terjajah oleh dominasi "norma universal" yang pasti mewajarkan adanya upaya exploitation de lhome par lhome. (Perlu dipikirkan, perubahan kurikulum maupun seleksi textbook untuk disesuaikan dengan kemauan bangsa yang ingin melepaskan dari budaya keterjajahan).
6. "Nenekmoyangku seorang pelaut" dan "Sumpah Pemuda"

---

[24] Pertanyaan Koentjaraningrat dalam "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan", Cetakan ke-20, kalau arti kebudayaan begitu luas siapa yang menangani ? Di "Bangsaku" saya sudah menstrukturkan tugas DPA yang harus "menjawab semua pertanyaan" (UUD 1945), tentu termasuk kebudayaan nasional.

hendaknya dimonumenkan oleh para budayawan. Usulnya adalah, berbentuk patung abstrak (menggambarkan persatuan Indonesia) yang dibangun di "tengah laut".

7. Mengusulkan agar RA. Kartini yang menggetarkan pemerintahan Belanda di negaranya dan (salah satu) yang menggerakkan **budaya akal sehat bangsa** sehingga melahirkan ide Kebangkitan Nasional, dijadikan simbol Kebangkitan Kebangsaan Indonesia.
8. Pekerjaan yang paling konkret yang sebaiknya dilakukan oleh semua politisi dan cendikiawan adalah **bersikap rendah hati dan bangga menjadi "kaum terjajah yang maju"**. Rakyat banyak akan melihat "Alangkah indahnya kehidupan di negeri ini", katanya.

Riwayat Hidup Penulis

N a m a : **Roch Basoeki Mangoenpoerojo**
Kelahiran : Cimahi, 16 Maret 1943
Tinggal : Jl. Ampera Raya No. 3 Cilandak
Jakarta Selatan 12560
Telepon 021.7815205 ; 0817793727 ;
Fax 021.7802558.

Riwayat Hidup :

1962	:	Lulus SMA-B, di SMAN-II Padang, langsung masuk AMN.
1978	:	Mendirikan LSM di bidang ketransmigrasian (LKTI)
1980	:	Mengundurkan diri dari dinas aktif TNI-AD
1981-1990	:	Menjadi transmigran aktif di Batumarta, Sumatera Selatan, menghasilkan 52 KUB, dan Sekolah Farming Menengah Atas.

1985-1987 : Membantu Perusahaan Consultant Engineering, menjadi Principal dari perusahaan Inggris (Hallcrow Fox and Ass)

1991-1996 : pengusaha konsultan engineering, wartel warung di Jakarta

1991-1997 : Ketua Asosiasi Pengusaha Wartel Seluruh Indonesia (APWI)

1993-1996 : Pendiri dan Anggota Presidium Masyarakat Telekomunikasi Ind

1993-1998 : Atas permintaan Megawati, menjadi Sekretaris Balitbang PDI

1998-KINI :- Wakil Sekjen Gerakan Reformasi Nasional (GRN)
- Anggota Presidium Barisan Nasional (Barnas)

Hasil Penulisan :

Artikel : Lebih dari 260 artikel di berbagai media massa

Makalah : 47 makalah untuk berbagai tingkat dan profesi

Buku :
- Operasi Lintas Udara (kalangan terbatas, 1973)
- Kepemimpinan Efektif di Daerah Transmigrasi (1977)
- Perwira, Sumber Daya Gerak Organisasi (TNI, 1978)
- Perubahan Tanpa Gejolak (1997)
- 100 Hari Pemerintahan Habibie (1998)
- Bangsaku, Penta Politica (1998)
- Partai Modern (2001)
- Bangsaku-II, Pembukaan UUD 1945 (sedang proses)

PENGEMASAN SENI TRADISI
(Bagi Pasar Pariwisata Global)

Oleh: **Saini K.M**

Karena perubahan adalah sifat hakiki kehidupan, maka menolak perubahan berarti bunuh diri secara budaya. Perubahan itu dapat terjadi karena (bencana) alam, tetapi juga dan lebih sering karena manusia. Manusia mengolah kehidupan agar lebih cocok demi keselamatan dan kesejahteraannya. Namun, perubahan itu menimbulkan reaksi dari kehidupan dan manusia harus melakukan pengolahan kembali. Demikianlah terus-menerus terjadi, seperti digambarkan dengan jelas dan simbolis oleh orang Yunani Purba dalam mitos Odysseus. Adapun pengolahan yang pertama-tama dilaksanakan manusia itu dilakukannya pada tataran sistem, yaitu *sistem gagasan. sistem perilaku,* dan *sistem peralatannya,* Dengan sistem yang sudah diubahnya, manusia menghadapi dan mengolah kehidupan yang diharapkannya akan berubah ke arah yang lebih sesuai bagi keselamatan dan kesejahteraannya. Kiranya jelas bahwa manusia tidak dapat mengolah kehidupan tanpa mengolah sistem-sistem yang sudah diciptakannya. Sementara sistem-sistem itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai *kebudayaan.* Kiranya jelas pula, tanpa siap untuk berubah sesuai dengan sifat hakiki kehidupan berarti tidak siap untuk berubah secara budaya. Masyarakat yang tidak mau berubah akan mandek dan bahkan hancur karena secara budaya sikap seperti itu dapat dibandingkan dengan perbuatan bunuh diri.

Namun, menerima perubahan atau siap untuk berubah dan mengubah tidak berarti merupakan kegiatan yang alamiah. Perubahan dilakukan secara sadar demi keselamatan dan kesejahteraaan, kalau mungkin kesejahteraan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan demikian, perubahan itu harus dilakukan secara kreatif. Perubahan harus dilakukan dengan pertama-tama mengidentifikasi masalah-masalah secara tepat dan kemudian memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah itu secara tepat pula.

Dewasa ini dengan prihatin kita menghadapi kenyataan bahwa berbagai jenis seni tradisional bermutu sedang merosot

bahkan musnah. Kemerosotan ditandai dengan menjadi rendahnya mutu dan berkurangnya pendukung, baik sebagai seniman maupun penonton. Akhirnya, jenis-jenis kesenian itu tidak disajikan lagi, maka pada saat itulah kita menderita kehilangan salah satu di antara kekayaan budaya kita. Mengapa hal itu terjadi ? Karena kita, khususnya merasa yang bergerak dan bertanggung-jawab di bidang kesenian, belum dapat menjawab tantangan perubahan secara kreatif pengemasan kembali terhadap berbagai jenis seni tradisional itu, baik di bidang artistik-estetikanya maupun di bidang pengelolahan (managerial) belum dapat dilakukan secara tepat.

Tulisan ini akan berupaya meletakkan dasar-dasar pengemasan terhadap berbagai jenis kesenian tradisional dalam rangka menghadapi pasar global. Untuk itu berturut.turut tulisan ini akan membahas *(l)perubahan masyarakat*, (2) *asas.asas pengemasan*, dan (3) *sumber daya manusia* yang diperlukan.

Masyarakat Kota-Industri

Berbagai jenis seni tradisional diciptakan ketika masyarakat kita masih bertani dan atau menjadi nelayan secara tradisional. Artinya, di dalam cara bertani dan menangkap ikan belum dipergunakan ilmu-pengetahuan dan teknologi yang tujuannya untuk mencapai hasil setinggi-setingginya; sementara itu, tujuan bertani dan jadi nelayan bukan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, melainkan untuk keperluan hidup semata-mata.

Di samping itu, tujuan berkarya dan melakukan kegiatan berkesenian ketika itu adalah dalam rangka melaksanakan upacara dan adat. Pada gilirannya, adat dan acara itu berakar pada. kepercayaan animistik-dinamistik dalam bentuk pemujaan terhadap *Dewi Sri* sebagai Dewi Padi atau *Ratu Kidul* sebagai penguasa Samudra Indonesia. Misalnya, ketika kepercayaan itu aus dan lenyap, maka sebagian (besar) makna kesenian itu pun hilang. Seni tinggallah menjadi hiburan, kalaupun tidak lenyap sama, sekali. Inilah di antaranya masalah yang kita hadapi dan harus kita selesaikan secara kreatif.

Asas-asas

Jelas kita harus melakukan perubahan, baik di tataran artistik-estetik maupun di tataran pengelolalaan (managerial). Namun, di dalam perubahan itu harus ada asas-asas yang menjadi

pedoman. Pada dasarnya asas-asas itu sebagai berikut, yaitu bahwa *perubahan inl harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang terdapat di dalam jenis-jenis kesenian itu, seraya memelihara* dan *meningkatkan daya-komunikatif dan daya-tarik jenis-jenis kesenian itu kepada masyarakat yang sudah berubah, yaitu yang telah menjadi masyarakat kota-industrial dan atau kepada orang asing.*

Nilai suatu jenis kesenian tradisional dapat terletak pada makna dan atau bentuknya, pada nilai moral atau kearifan dan atau nilai artisitik-estetiknya. Nilai itu dapat berkomunikasi langsung kepada masyarakat tradisional sebagai pemiliknya, yaitu masyarakat petani dan nelayan yang menikmatinya sebagai bagian dari adat dan upacara mereka. Bagaimana dengan masyarakat baru? Dapatkah mereka menikmatinya ? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab, sehingga pengemasan yang cocok dapat dilaksanakan demi para anggota masyarakat baru dan atau para wisatawan.

Pengemasan

Asas pertama pengemasan adalah tersedianya *wacana* (discourse) mengenai jenis seni yang disajikan kepada wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Wacana itu berisi informasi-informasi yang diperlukan penonton/pengunjung tentang seni yang bersangkutan. Wacana itu harus meliputi *lingkungan tempat* dan *waktu* ketika seni itul diciptakan, *masyarakat yang menciptakannya* dan *makna* seni itu bagi masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, harus disiapkan *konteks* bagi karya *seni itu sebagai teks.*

Di samping itu, harus diberikan pula informasi tentang (para) seniman yang terlibat dalam penyajian karya itu, baik biografi mereka maupun prestasi mereka sebelumnya, di samping kritik-kritik yang mereka terima bagi karya mereka. Wacana itu disusun dalam bentuk yang baku di dalam buku *acara* untuk pertunjukan atau *katalog* untuk pameran.

Namun tidak semua karya seni tradisional dapat disajikan secara utuh tanpa membosankan atau memakan waktu yang terlalu lama bagi para wisatawan dengan waktu yang biasanya terbatas. Apa yang harus dilakukan terhadap jenis seni yang demikian ? Upaya pertama adalah rekomposisi. Jenis seni ritual yang sering tidak dibatasi waktunya di dalam rekomposisi

disingkat tanpa menghilangkan makna baik moral-spiritual maupun artistik-estetiknya. Rekomposisi itu tetap harus dilengkapi wacana, di antaranya yang menginformasikan tentang bentuk asli sebelum direkomposisi guna makna asal seni itu. Karya seni tradisional yang terlalu panjang dan tak mungkin direkomposisi dapat diambil *petikannya* saja. Dalam hubungan ini kita mengenal beberapa contoh, misalnya *Tari Cakil lawan Arjuna* dari Mahabharata versi Jawa, *Tari Klana* dari Topeng Cirebon yang sebenarnya merupakan bagian dari pertunjukan yang panjang dan lama dsb. Dalam seni rupa. misalnya. kita tidak mungkin memamerkan semua jenis dan gaya batik Indonesia.' Maka kita pun terpaksa memetik beberapa jenis dan gaya yang paling khas dan menonjol, baik dari segi makna simbolis maupun makna artisitk~estetik. Dernikian pula halnya: kalau kita bermaksud memamerkan berbagai jenis topeng. Akan halnya musik atau karawitan. kita pun biasanya hanya dapat menyajikan beberapa jenis dan gaya atau petikan dari khazanah musik/karawitan kita yang sangat kaya itu. Untuk menutupi kelemahan karena terlalu banyak yang tidak dapat disajikan, maka wacana mengemban tugas yang berat umuk memberikan kesan yang benar tentang mutu dan kekayaan khazanah seni tradisional kita itu.

Catatan khusus perlu diberikan tentang penyajian dan pengemasan pertunjukan *aneka ragam* (variety show). Di dalam pertunjukan seperti itu urutan penyajian perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Sudah ada semacam *pola baku* yang biasa diikuti oleh para pengemas yang berpengalaman, yaitu sajian pertama biasanya rnerupakan sajian yang kuat disusul oleh yang lemah yang secara beturut-turut diikuti oleh nomor-nomor : yang makin lama makin kuat hingga akhirnya sampai pada sajian yang sangat kuat, yaitu sajian sebelum waktu istirahat. Setelah waktu istirahat sajian pertama yang relatif kuat ditampilkan. diikuti yang lemah tetapi berturut-turut diikuti oleh yang makin lama makin kuat, hingga akhirnya sampai pada yang paling kuat dari seluruh pertunjukan itu, yaitu sajian yang dianggap *klimaks* dari seluruh varietv show itu.

Pameran seni rupa dapat dikemas seperti variety show itu, atau dikemas secara lain. Kalau seni rupa tradisional itu karya seniman perseorangan, maka dapat diambil di kerangka gagasan pameran. Pertama *Pameran Tematik*, yaitu yang

dipamerkan hanya karya.karya seni rupa dengan objek tertentu saja, misalnya bunga, atau pemandanga atau binatang tertentu. Namun, dapat juga dilaksanakan *Pameran Retrospektif;* yaitu kalau sang seniman sudah berkarya dalam jangka waktu yang lama dan karyanya sudah berlimpah. Dalam hubungan ini, karya-karya dalam pameran itu disusun menurut urutan waktu penciptaan. Susunan dan urutan karya itu disesuaikan dengan arus hadirin dalam pameran yang diarahkan sebelumnya.

Dalarn bentuk apa pun suatu pameran disusun, wacana yang baku, yang dapat memberikan informasi kontekstual terhadap karya seni sebagai teks adalah mutlak diperlukan. Hanya dengan bantuan wacana itulah hadirin akan dapat menangkap rnakna isi dan bentuk karya seni itu. Dengan kata lain, halnya dengan bantuan wacana itulah publik Nusantara dan publik asing dapat memahami, menikmati, dan menghargai karya seni tradisional itu

Sumber Daya Manusia

Masyarakat industri-modern menuntut apa yang disebut *spesialisasi.* Spesialisasi berarti penguasaan seseorang terhadap bidang kerja khusus hingga dapat mencapai keterampilan atau keakhlian yang tinggi. Tuntutan ini merupakan akibat dari sudah begitu luas dan beragamnya ilmu, teknologi, dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat industri modern hingga menguasai semuanya merupakan hal yang mustahil.

Di masyarakat kota-industrial di mana seni sudah menjadi bagian dari industri mengemasnya untuk kepentingan publik dan wisatawan sudah merupakan spesialisasi Spesialis di bidang pengemasan seni rupa adaJah *kuralor,* sedang di bidang seni pertunjukan adalah *dramaturg.* Seorang kurator merencanakan, mempersiapkan, mengemas, dan mempromosikan pameran. Untuk itu, ia menulis katalog, menulis artikel di koran ,atau majalah dan mengadakan konferensi pers. Kalau senimannya masih hidup, semua itu ia diskusikan dan ia lakukan dengan sang seniman. Kalau senimannya sudah meninggal, atau karya seni itu bukan ciptaan perseorangan, ia hanya mengandalkan hasil risetnya, baik riset perpustakaan maupun lapangan. Tugas seorang dramaturg dalam seni pertunjukan hampir sarna dan sebangun dengan tugas seorang kurator dalam seni rupa, Semua

yang dilakukan kurator dilakukannya, Terdapat perbedaan, misalnya, seorang dramaturg juga mendampingi seniman, atau para seniman ketika mereka mengadakan latihan, dan ia memberikan saran-saran kepada mereka dalam kedudukan sebagai *penonton ideal*. Namun, tugas utama yang tidak boleh dikesampingkannya adalah menulis buku acara, yang seperti katalog, disusun sesuai dengan asas-asas yang telah dibahas terdahulu.

Di negeri-negeri yang maju di dalam keseniannya dan juga pariwisata seninya kurator dan dramaturg adalah dua kelompok profesional yang sangat besar peranannya. Indonesia harus segera menghasilkannya, yaitu melalui perguruan-perguruan tinggi seni dan pelatihan-pelatihan. Dalam bidang ini kita berlomba dengan waktu karena begitu banyak : jenis seni tradisional yang merosot dan atau musnah, sedang yang masih hidup tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada pemiliknya.

Bandung, 11 Oktober 2003

SENI SEBAGAI FOKUS BUDAYA [1]

Oleh: **Soediro Satoto** [2]

1

Judul makalah ini merupakan topik yang telah ditentukan oleh Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan V Tahun 2003 untuk utusan provinsi (dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah).

Menurut Koentjaraningrat (1974) ada tujuh unsur universal yang penting, sekaligus juga merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia yaitu: (1) sistem religi dan upacara keagamaan; (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) sistem mata pencaharian hidup; (5) sistem teknologi dan peralatan; (6) seni; dan (7) bahasa. Artinya, tujuh unsur universal dan isi kebudayaan tersebut merupakan unsur-unsur yang pasti terdapat di semua kebudayaan mana pun di dunia ini (termasuk Indonesia), baik yang hidup dalam masyarakat terpencil, daerah pedesaan, maupun masyarakat kota metropolitan yang semakin kompleks.

Penempatan unsur *seni* sebagai fokus budaya bisa dipahami, baik dalam pengertian negatif maupun positif. Dalam pengertian negatif, *seni* memang merupakan unsur penting, sekaligus isi kebudayaan, tetapi bukan harus diartikan yang paling penting di antara ketujuh unsur penting lainnya seperti telah disebut di atas. Anggapan sebagian banyak orang yang memandang bahwa *seni* adalah sama dengan *budaya*, atau *kesenian* adalah sama dengan *kebudayaan*, baik sadar maupun tidak sadar mereka telah mereduksi atau mengecilkan makna kebudayaan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa jika orang telah 'tahu' atau berprofesi sebagai salah satu jenis kesenian tertentu, serta merta orang tersebut lalu disebut 'budayawan'. Ironinya media massa sering ikut melegitimasikan demikian

---

[1] Makalah dipersiapkan untuk disajikan dalam Kongres Kebudayaan V Tahun 2003 di Bukit Tinggi Sumatra Barat.

[2] Guru Besar Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ilmu-ilmu Susastra pada Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Peserta dari Provinsi Jawa Tengah.

terhadap seniman-seniman tertentu yang dipandang telah kondang. Ini jelas merugikan, baik orang yang bersangkutan maupun eksistensi kebudayaan.

Pengertian positif, baik Ernst Cassirer, salah seorang filsuf kebudayaan terbesar abad ke-20, maupun Difford Geertz, salah seorang antropolog kenamaan, keduanya, mempermasalahkan hubungan antara manusia dan kebudayaan. Keduanya memandang manusia merupakan esensi dalam kebudayaan. Cassirer meletakkan kebudayaan sebagai usaha manusiawi untuk memahami diri sendiri dan mengatasi persoalan-persoalan melalui kreasi akal-budi dan penggunaan simbol-simbol. Bentuk-bentuk simbolis yang penting dari kehidupan manusia mendapat tekanan utama, salah satu di antaranya yang dianggap penting ialah *seni*. Sedangkan menurut Geertz, untuk mendekati peristiwa sosial, perlulah seorang ilmuwan tidak sekadar mencari hubungan sebab-akibat, melainkan berupaya memahami makna yang dihayati dalam sebuah kebudayaan. Kebudayaan, masih menurut Geertz, adalah anyaman makna-makna, dan manusia adalah binatang yang terperangkap dalam jerat-jerat makna itu. Maka, kebudayaan bersifat semiotik dan kontekstual. Pendek kata, manusia, kemanusiaan, memanusiakan manusia secara manusiawi, humanitas, merupakan tema-tema yang biasa dijadikan fokus garapan dalam berkesenian.

2

Dalam kesempatan ini, saya memilih *Seni Teater sebagai Seni Pertunjukan*, salah satu jenis kesenian, untuk dijadikan fokus bahasan dalam perspektif sosial budaya.

Seni teater (terdapat hampir di seluruh daerah wilayah Indonesia) merupakan jenis seni pertunjukan yang bersifat kolektif, kompleks, rumit, dan sangat akrab dengan publiknya, yaitu 'masyarakat seni teater' sebagai seni pertunjukan. Termasuk di dalamnya: pencipta seni, para pekerja seni, karya seninya itu sendiri, manager, kelompok (*group*) seni, pengayom atau maesenas seni (lembaga pemerintah atau nonpemerintah), alam semesta dan lingkungan seni (poleksosbud hankam, iptek, seni, dan pariwisata) yang bisa dijadikan bahan atau sumber inspirasi bagi para seniman untuk melakukan proses kreatif seni, lembaga sekolah atau kampus (baik formal maupun nonformal), sanggar, kelompok,

paguyuban, penikmat, pemerhati, kritikus seni atau peneliti seni, pelatih atau pengajar seni, baik guru, dosen, maupun empu seni, dan jangan lupa para penonton karya seni (baik para pecandu seni maupun yang awam seni sekali pun). Baik menggunakan sarana visual, auditif, audiovisual, dan sebagainya, baik melalui media panggung pementasan atau pergelaran, media cetak, elektronik, audiovisual atau teve, maupun komputer. Khusus *penonton*, menurut hemat saya bukan sekadar berkedudukan sebagai *faktor* penunjang, melainkan merupakan *komponen* atau *unsur* bagi setiap seni pertunjukan. Tanpa *penonton* penyebutan istilah *'seni pertunjukan'* menjadi aneh, sebab lalu dipertunjukkan atau dipertontonkan kepada siapa? Itulah sebabnya, pengkajian atau penelitian terhadap motivasi, psikologi, sikap atau perilaku para penonton menjadi penting artinya. Juga buat para pejabat atau penguasa yang sering kurang ramah, bahkan mengecilkan arti terhadap tontonan dan penonton sehingga mengambil 'jalan pintas' sebaiknya melarang saja suatu seni pertunjukan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan 'anarkis'.

Seni teater sebagai seni pertunjukan merupakan lembaga sosial, dokumentasi sosial, cermin sosial, moral sosial, eksperimen sosial, sistem, sosial, sistem semiotik, baik semiotik sosial maupun semiotik budaya yang amat kaya akan nuansa makna yang terkandung dalam tanda-tanda yang terbangun oleh seni pertunjukan, baik tanda-tanda ikonik, indeksikal, maupun tanda-tanda simbolis.

Dalam proses dramaturgi, sebagai sebuah proses teater, seni teater sebagai seni pertunjukan merupakan tempat pertemuan, kolaborasi hampir seluruh cabang seni dan seniman di dalamnya (bahkan termasuk nonseni dan nonseniman sekali pun), untuk mewujudkan sebuah karya seni yang bulat utuh, ansambel, dan harmonis. Dalam kondisi demikian, seni teater sebagai seni kolektif, bisa memupuk sikap kerja sama, gotong royong, solidaritas, toleransi atau tenggang rasa, dan demokrasi. Maka, proses penciptaan dan proses pengkajian seni teater sebagai seni pertunjukan untuk bisa menghayati dan memahami kandungan maknanya bersifat herarkis, berkesinambungan, berkelanjutan secara timbal-balik (formula dramaturgi). Untuk itu, diperlukan kecermatan, kehati-hatian, dan nyali yang tinggi, bersifat multi-dan atau interdisipliner, lintas dan silang budaya – budaya lokal, nasional, regional–global, dan begitu sebaliknya.

III

Dalam kaitannya dengan konteks budaya, karya seni termasuk *seni teater*, sejak awal kehadirannya tidak dalam keadaan kosong. Artinya, kondisi sosial budaya sangat berpengaruh terhadap karakteristik seni. Sosial budaya Indonesia yang multi etnik, multi kultur, multi dimensi, menjadikan *seni teater* di Indonesia tidak steril dari pengaruh kondisi lokal – global.

Seperti halnya terhadap bidang-bidang ilmu dan cabang-cabang seni lainnya, seni sastra jenis *seni drama* dan atau *teater* sering dipertanyakan sebagai ilmu atau sebagai seni? Jawabnya tentu kedua-duanya, yaitu sebagai ilmu dan sebagai seni. Sebagai ilmu, seni teater dapat dikaji dan diteliti seperti ilmu-ilmu lainnya dengan menggunakan metode dan konvensi, kaidah, atau teori tertentu yang relevan dengan objek kajiannya. Sebagai seni, seni teater bisa dihayati dan dipahami seperti seni-seni yang lain yang bersifat *verstehen*, artinya lebih menekankan pada pemahaman daripada pengertian. Ada tiga konvensi yang harus digunakan untuk memahami setiap karya seni, termasuk seni teater, yaitu konvensi 'bahasa' (gramatika seni), konvensi seninya itu sendiri, dan konvensi budaya yang melingkupinya di mana karya seni itu berada.

Karena budaya Indonesia adalah multietnik, multikultur, dan pluralis, maka seni teater di Indonesia juga bersifat demikian. Betapa pun setiap daerah di Indonesia ada jenis seni teaternya sendiri (*teater daerah* atau *teater tradisional*), misalnya *lenong* di Betawi – Jakarta, *kethoprak* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *wayang* di Jawa dan Bali, *ludruk* di Jawa Timur, *randai* di Padang, *makyong* di Riau; bahkan *seni pewayangan* atau *seni pedalangan* di beberapa daerah di Indonesia dan di luar Indonesia misalnya Kelantan, India, Thailand, atau Cina, memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dengan budaya tempat *seni pewayangan* atau *seni pedalangan* itu berada, tumbuh dan berkembang. Hegemoni konvensi Barat terhadap seni tidak bisa dimungkiri, hal yang juga berlaku atau terjadi buat bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain di Indonesia. Namun, dalam proses penjadian, tumbuh, dan perkembangannya, seni (dalam hal ini *seni teater*), warna lokal telah 'bercampur' atau 'lebur' dengan warna lokal yang lain dan warna global, dengan berbagai teknik garap dan gaya masing-masing telah mewarnai karya-karya seni di Indonesia, tidak terkecuali *seni teater*. Bahkan, menurut hemat

saya, karena sifatnya yang kolektif, kolaboratif, kompleks, tetapi ansambel dan harmonis, menjadikan *seni teater* di Indonesia sangat potensial punya warna lokal – global. Dengan kata lain, *seni teater* sangat potensial untuk dijadikan wahana pemersatu budaya bangsa dan budaya antarbangsa. Yang pada gilirannya sangat berpotensi sebagai wahana pemersatu bangsa dan antarbangsa. Melalui pergelaran bersama kesenian yang kolaboratif seperti *seni teater*, diharapkan kita, bangsa Indonesia, bisa terhindar dari konflik antaretnik, antarkultural, antarsuku, antardaerah, dan ujung-ujungnya diharapkan bisa terhindar dari potensi timbulnya disintegrasi antardaerah di seluruh wilayah Indonesia. Terhindar dari disintegrasi bangsa Indonesia.

IV

Dalam pandangan Sosiologi Seni dan Psikologi Seni, karya seni (dalam hal ini *seni teater*), diyakini banyak bergantung atau berkolerasi dengan faktor-faktor psikososial dan kultural yang melingkupinya. Faktor-faktor psikososiokultural yang melingkupi tersebut meliputi psikososiokultural pencipta seni (psikososiokultural seni), psikososiokultural karya seninya itu sendiri (psikososiokultural seniman), dan psikososiokultural *audience* atau publiknya (psikososiokultural *audience* atau publik), termasuk para pejabat pemerintahan, para politisi, para penyelenggara kesenian (baik lembaga, kelompok, sanggar, atau perorangan).

Begitu kompleks dan kolaboratifnya *seni teater*, sejak masih dalam ide, gagasan atau angan-angan, proses penciptaan, garapan, dan proses penjadian dan penyajiannya, *seni* bukan hanya merupakan fokus sosiologi seni dan psikologi seni, tetapi juga fokus budaya dalam pengertian tidak sempit. Melihat realita demikian, dengan mengambil contoh proses teater sebagai seni pertunjukan yang bersifat kolektif, kolaboratif, dan komunikatif dengan publiknya, kita bisa menyusun paradigma baru sebagai alternatif dalam menyusun konsep dan strategi kebudayaan (di) Indonesia yang multietnik, multikultur, dan pluralis ini sehingga terhindar dari potensi disintegrasi bangsa.

DIMENSI BUDAYA DALAM SITUASI KONFLIK

Oleh: **Drs.H. Sofyan I.H**
Utusan Dari Sulawesi Tengah

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk social yang dilahirkan dalam pangkuan budaya yang pada awalnya merupakan unsur pembentuk kepribadiannya. Umumnya manusia sangat peka terhadap budaya yang dipangkunya karena budaya merupakan landasan filosofis yang mendasari setiap perilaku manusia itu. Dengan demikian, seringkali manusia secara tidak sadar bersikap tertutup terhadap kemungkinan perubahan dalam nilai–nilai budaya yang dipangkunya. Mereka juga sering merasa bahwa nilai–nilai yang selama ini dimilikinya merupakan yang terbaik dan karenanya harus dipertahankan.

Di dalam kehidupan manusia di masyarakat terdapat dua potensi yang saling bertolak belakang antara satu dan lainnya yaitu potensi *"konflik"* dan potensi *"damai/konsensus"*. Kedua potensi itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi potensi konflik dan damai menyatu dalam kehidupan masyarakat yang sewaktu – waktu dapat muncul silih berganti. Potensi konflik akan muncul lebih kuat apabila manusia terlalu mengutamakan kepentingan individu sehingga terjadi persaingan untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, potensi damai akan lebih dominan bilamana manusia lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang dilandasi oleh nilai dan norma sosial yang pada gilirannya akan menciptakan suatu kedamaian.

Rumah tangga sebagai bagian terkecil dari suatu masyarakat merupakan lingkungan sosial yang sangat menentukan tumbuhnya potensi konflik dan damai bagi semua anggota keluarga. Apabila dalam sebuah rumah tangga menerapkan sistem pendidikan otoriter maka akan terbentuk manusia – manusia yang memiliki kepribadian labil yang diwujudkan melalui berbagai perilaku yang berpotensi konflik seperti mengutamakan kepentingan pribadi, saling meremehkan, bersaing secara tidak sehat, dan saling membenci

antara satu dengan yang lain.

Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan sistem pemerintahan yang otoriter menyebabkan warga masyarakatnya senantiasa mengalami ketidakpuasan sehingga terbentuk kepribadian labil yang diwujudkan melalui perilaku yang penuh dengan potensi konflik. Sebaliknya jika suatu masyarakat yang diwarnai dengan sistem pemerintahan demokrasi, maka warga masyarakatnya akan senantiasa memiliki peluang untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga akan memiliki kepribadian yang diwujudkan dengan perilaku dan interaksi yang dilandasi oleh nilai – nilai dan norma yang dapat menciptakan perdamaian.

2. KERANGKA TEORITIS

Menurut penjelasan pasal 32 UUD 1945 disebutkan bahwa kebudayaan Indonesia atau yang dikenal dengan kebudayaan nasional memiliki tiga komponen yaitu : Pertama, "Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya", Kedua, "Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak – puncak kebudayaan di daerah – daerah di seluruh Indonesia", Ketiga, "Bahan – bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Secara singkat dapat dikatakan Kebudayaan Nasional kita terdiri dari kebudayaan suku – suku bangsa, tanpa menutup diri terhadap pengaruh unsur – unsur kebudayaan asing yang positif.

Dari dasar pemahaman tersebut di atas, dapat dikatakan kebudayaan dan unsur – unsur serta nilai – nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sangat penting dan besar sekali peranannya dalam menjalin kebersamaan dan persatuan menuju pada suatu tingkat integritas bangsa yang berwibawa, rukun, damai antara kelompok etnis yang satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara etimologis integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Karena itu integrasi bias terwujud bilamana seluruh warga negara mempunyai kesadaran nasional yang tinggi yaitu bagaimana persatuan dan kesatuan di antara suku – suku bangsa yang berbeda bahasa dan adat

istiadatnya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana memenuhi tuntutan hidup rakyat dengan latar belakang dan kondisi yang berlainan itu. Hal ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua yang telah diamanatkan oleh rakyat, meskipun hal ini adalah tugas yang amat sangat berat.

MUATAN LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN[1]

Oleh: **Suminto A. Sayuti**[2]
(Daerah Istimewa Yogyakarta)

1/.

Ibarat sekeping mata uang logam, relasi antara kebudayaan dan masyarakat begitu eratnya karena kebudayaan tidak akan pernah lahir tanpa adanya suatu masyarakat, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan komponen yang penting dalam struktur sosial[3]. Dalam konteks ini, kebudayaan merupakan bagian yang utama mengenai apa yang diwariskan kepada individu di dalam proses sosialisasi, baik yang berupa gagasan/nilai, norma-norma, tindakan-tindakan maupun yang berujud benda-benda.

Di antara banyak yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang terutama tetrdiri atas aspek-aspek simbolik, ideeasional, dan *intangible* masyarakat manusia. Artinya, esensi kebudayaan bukan hanya terletak pada artefak, alat-alat, atau elemen-elemen kultural lainnya yang *tangible*, melainkan bagaimana anggota masyarakat menafsirkan, menggunakan, dan menerima hal-hal tersebut. Dinyatakan demikian karena hal-hal tersebut merupakan nilai, simbol, penafsiran, dan perspektif yang pada akhirnya membedakan suatu masyarakat

---

[1] Makalah untuk Kongres Kebudayaan, Bukittinggi Sumatera Barat, 19-23 Oktober 2003

[2] Prof. Dr. Suminto A. Sayuti adalah Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

[3] Karena kebudayaan dijadikan pedoman atau kerangka untuk mengatur kehidupan individu-individu secara bersama sebagai kelompok sosial, sebagai konsekuensinya, kebudayaan akan mengingat manusia-manusia yang terlibat di dalamnya ke dalam aturan-aturan yang disepakati dan ditetapkan secara bersama. Itulah sebabnya kebudayaan juga dapat dipandang sebagai cara hidup secara berama-sama, cara hidup yang dipelajari, dan akhirnya diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Kondisi inilah yang melatari adanya kenyataan bahwa sebuah kelompok sosial merupakan kelompok yang unik. Masing-masing kelompok memiliki budaya yang unik, yang disebabkan oleh aturan-aturan spesifik yang dimilikinya. (selanjutnya lihat: Alvin L. Bertrand, *Kerangka Acuan Metode Penelitian, Teori tentang Sosiologi, Kepribadian dan Kebudayaan*, diterjemeahkan oleh Sanapiah S. Faisal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

dari masyarakat lainnya. Dengan kata lain, kebudayaan tidak bisa hanya dibatasi pada objek-objek material dan aspek-aspek *tangible* dari masyarakat. Kelaziman anggota masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu menafsirkan makna simbol, artefak, dan perilaku dalam sejumlah cara yang mirip atau sama juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, secara garis besar kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu yang meliputi hasil-hasil dari usaha yang dapat diindera dan yang meliputi cara-cara berpikir dan segala perbuatan yang dianggap benar oleh suatu masyarakat[4], yang dapat pula diartikan, pada sisi lain, sebagai kerja perencanaan berikut upaya mewujudkannya agar manusia tetap survival, termasuk prosesnya dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Perspektif di atas juga berlaku bagi kebudayaan kita. Sebagai suatu bangsa yang secara kultural terdiri atas rangkaian budaya lokal yang berbeda-beda, rangkaian tersebut akan menjadi nilai-nilai hakiki yang bersifat translokal (untuk tidak menyebut nasional) jika terdapat upaya penjembatanan keberagaman, tanpa harus melalui proses penyeragaman. Hal ini penting dilakukan karena sebuah fenomena sering ditafsirkan secara berbeda-beda. Kadang-kadang, nilai budaya lokal tertentu akan menjadi sesuatu yang asing juga dalam budaya lokal tertentu, atau mungkin diterima dan dimaknai secara berbeda.

Posisi dan situasi bahwa setiap budaya mempunyai pola dan karakteristik penataan daya-daya komponennya sendiri, akan menjadikan suatu budaya tertentu juga cenderung untuk mempertahankan diri sendiri. Terlebih lagi ketika budaya tersebut berupa sekumpulan adat istiadat yang rumit, yang dalam sejumlah hal hanya dapat menjelmakan dirinya sendiri kembali dengan jalan mempengaruhi perubahan khas tertentu dalam bangunan awal dan asli dari para pendukungnya. Hanya dengan kekuatan eksistensinya sendiri dan juga karena pendukungnya. Hanya dengan kekuatan eksistensinya sendiri dan juga karena metode-metode yang dianut secara sengaja yang dilakukan dengan sistematis budaya tertentu akan melestarikan diri melalui transformasi atas watak manusia yang masih asli dan mentah[5].

---

[4] Alvin L. Bertrand, *Kerangka Acuan Metode Penelitian, Teori tentang Sosiologi,Kepribadian dan Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Sanapiah S.Faisal,Surabaya: Bina Ilmu, 1980. hlm. 117

[5] J. Dewey, *Budaya dan Kebebasan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Perpesktif ini juga penting bagi peneapan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan budaya.

2/.

Dalam situasi kejamakan budaya kita, saat ini terdapat tiga fenomena budaya yang perlu mendapat perhatian, yakni yang bersifat etniklokal, yang baru tapi berakar etniklokal, dan yang baru sebagai hasil perjumpaan dengan budaya asing.

Budaya etniklokal adalah tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan konsepsi serta simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat etnik etrtentu[6]. Dalam kaitan ini, sebagai bangsa kita telah memiliki pengalaman cukup panjang. Termasuk pengalaman ketika nilai budaya lokal menjadi cahaya hayati yang menjadi aura kehidupan dalam kemajemukan, misalnya saja dalam wujud bahasa ataupun tradisinya. Berbarengan dengannya hidup bersama yang saling menghormati tanpa harus kehilangan dinamika tetap berlangsung. Di dalamnya terbayang pula nilai kerukunan dan harmoni, walaupun di tengah berbagai perbedaan, tanpa harus melakukan penyeragaman.

Dalam sejarah pula, kita telah mengalami berbagai dan berulang kali proses asimilasi dan adaptasi. Proses yang terjadi pada masa lampau tersebut membuktikan bahwa kita sebagai bangsa mampu menyaring dan menyesuaikan unsur "lain" itu ke dalam tata kehidupan dengan cara sedemikian rupa sehingga terasa layak dan cocok serta tidak terpaksakan. Itu semua bisa dilakukan karena kita memiliki identitas budaya yang kuat, dengan cara memposisikan diri dalam situasi sadar budaya.

Akan tetapi, kenapa akhir-akhir ini kita harus menyaksikan dan masuk dalam situasi ini: situasi ketika histeria sosial selalu terjadi di mana-mana. Situasi "kesurupan budaya", ketika sebagian masyarakat kita kini menjadi manusia-manusia yang berwajah garang. Wataknya keras. Perilakunya keras, brutal, dan agresif. Saling bermusuhan satu sama lain, yang satu ingin menguasai dan menindas orang lain. Situasi ketika harkat

---

[6] Budaya Jawa misalnya saja, adalah tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan konsepsi serta simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa.

kemanusiaan dinafikan karena hak-hak asasi dinistakan dan manusia-manusia telah menjadi pendusta bagi hati nurani diri mereka sendiri. Situasi ketika nilai-nilai budaya tidak lagi dihayati esensinya karena mengalami distorsi berbarengan dengan situasi ketika pandangan hidup hanya menjadi sebuah slogan.

Kita harus segera berupaya untuk mengembalikan saudara-saudara kita dari "tanah buangan" semacam itu untuk kembali pada situasi sadar budaya, situasi hidup dengan pandangan dan penghayatan nilai yang bermakna, dengan identitas budaya yang kuat. Pendidikan adalah jalan pertama dan utama. Pendidikan harus diposisikan sebagai usaha komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi konflik dan konfrontasi yang menjerumuskan. Melaluinya, program stratgeis dan konkret penguatan identitas budaya bangsa dalam bentuk penginternalisasian nilai-nilai budaya yang fundamental diharapkan segera diwujudkan. Untuk itu, sekali lagi, pendidikan hendaknya menjadi proses pembudayaan, dan bukannya "pembuayaan"[7]. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang secara strategis dapat dilakukan: pemberdayaan budaya lokal dan pemberdayaan budaya yang berakar pada budaya lokal.

Jika upaya itu dilakukan dengan baik, kita bisa menghargai budaya kita sendiri. Pemberdayaan itu sendiri harus lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Karenanya, aktivittas pemberdayaan itu tidak harus secara langsung memposisikan budaya sebagai fokus utama,

---

[7] Pinjam istilah Romo Muji Sutrisno

[8] Termasuk juga adalah situasi dan posisi bagaimana budaya etnik lokal mampu mempertahankan kekhasannya ketika bersemuka dan berhadapan dengan budaya "lain", bahkan diterpa oleh gelombang-gelombang budaya yang datang dari luar, bagaimana ia menemukan diri dan mengembangkan kekhasannya bukan dalam isolasi, melainkan dalam pencernaan masukan-masukan kultural dari luar. Sebut saja sebagai misal bagaimana budaya Jawa merangkul Hindu dan Budha, dan akhirnya dijawakan. Demikian pula halnya tatkala bersemuka dengan Islam, kebudayaan Jawa justru makin menemukan identitasnya. (selanjutnya periksa: Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 19863). Untuk itu, penting juga untuk selalu diingat bahwa ketika dua budaya bersemuka dan saling berhadapan, terdapat tiga macam proses yang berpeluang muncul: (a) konfrontasi, yang satu melawan yang lainnya; (b) asimilasi, keduanya saling menyapa dan menyerap hingga muncul sintesis budaya baru demi keberlangsungan hidupl; dan (c) adaptasi, penyesuaian jika salah satu diantara dua budaya itu lebih kuat daya-suainya.

tetapi diorientasikan agar budaya menjadi sumber semangat pemberdayaan yang dilakukan situasi sadar budaya[5].

3/.

Pendidikan sebagai proses pembudayaan, seperti sudah dikemukakan, akan berarti bahwa tatkala kebudayaan diartikan sebagai kerja perencanaan berikut upaya mewujudkannya agar manusia tetap survival, maka melalui sejumlah penalaran, peserta didik secara bertahap memasuki proses penyiapan diri untuk hidup itu, termasuk peserta didik secara bertahap memasuki proses penyiapan diri untuk hidup itu, termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses pencerahan nilai-nilai dalam diri berlangsung. Di samping itu, juga berlangsungnya proses beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai bentuk pembudayaan, dengan demikian substansi-substansi kependidikan yang manifest dalam bentuk pelajaran tidak hanya mencakupi aspek pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai yang *shared* di kalangan anggota kelompok melalui sistem komunikasi, tetapi juga keyakinan, simbol, dan penafsiran-penafsiran yang telah *shared* dalam komunitas tertentu. Implikasinya, prinsip "dekatkan anak didik dengan lingkungan, dan jangan mengasingkannya" menjadi penting, dan pemilihan serta penentuan porsi bahan pelajaran yang bersifat "lokal" menjadi imperatif yang sudah selayaknya diupayakan. Persoalan: (a) Apakah yang dimaksud dengan pelajaran muatan lokal itu? (b) Dapatkah kita mengenali muatan lokal sebagai sesuatu yang bermakna dalam kehidupan translokal, atau karena yang lokal cenderung dipahami sebagai sesuatu yang telah lampau, dapatkah dijadikan sumber inspirasi bagi kehidupan masa kini? (c) Bagaimanakah caranya kita memperkenalkan warisan kolektif ini berikut perubahannya dalam masyarakatt modern, yang dalam sejumlah hal warisan tersebut dibelokkan atau ditafsir kembali, serta diposisikan dalam perspektif yang bukan lokal? (d) Bagaimana caranya mempertahankan agar generasi muda memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang bernilai lokal? (e) Bagaimana caranya memetakan dinamika yang bersifat lokal tanpa terjebak dalam semangat nostalgik berlebihan, karena suatu tradisi yang bersifat lokal akan menjadi langgeng apabila terbuka pada perubahan (transformasi, hibridisasi, dan inovasi terus-menerus)?

Terdapat semacam konteks penting yang harus

diperhitungkan tatkala kita mencoba mencar iawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Konteks itu merupakan keniscayaan bahwa kita harus memiliki kesadaran terhadap keserbanekaan, bahwa kita sebagai bangsa tidak pernah selalu bersifat singular, tetapi plural. Dengan demikian, muatan lokal menjadi suatu yang tak menjadi niscaya juga. Hal ini akan menjadi lebih jelas tatkala kita menyadari bahwa budaya post-kolonial, seperti kita arungi dalam waktu yang cukup lama sebagai bangsa terjajah di masa lalu, pada dasarnya merupakan persilangan dialektik antara ontooogi/epestimologi yang "lain" dan dorongan untuk mencipta dan mencipta ulang identitas lokal yang independen. Ini juga menjadi sebuah keniscayaan. Jika benar bahwa kita kini sedang melakukan demokratisasi, maka demokrasi harusnya diluruskan dengan cara, antara lain, menanamkan ke dalam dirinya prinsip-prinsip etika dan kebenaran moral yang berasal dari cita-cira peradaban dan warisan intelektual yang benar-benar berakar pada kebudayaan sendiri, yang hakikatnya selalu bersifat plural.

Pelajaran muatan lokal dalam kaitan ini harus diartikan sebagai materi-materi pembelajaran yang diderivasikan dari kebudayaan etnik lokal dalam keseluruhannya. Jadi, ia tidak harus menjadi eksklusif hanya berupa seni lokal saja, atau bahasa lokal saja. Yang jelas, yang harus menjadi orientasi utama haruslah tetap berupa nilai-nilainya karena bagian hakiki kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Dalam konstelasi keseluruhannya nilai-nilai tersebut akan terkait dengan masalah pengembangan dan penguatan identias bangsa. Hal ini juga penting jika dikaitkan dan dimasukkan dalam perspektif pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kaitan ini kita dapat mengambil contoh nilai tenggang rasa (toleransi). Nilai ini hakikatnya merupakan sikap kewargaan yang aktif. Ia tidak bersifat spontan. Karenanya, sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya. Toleransi harus didiikkan, tidak cukup hanya diwacanakan.

Sangkan paran mengkristalnya syakwasangka sebagai pemicu utama konflik adalah karena pendidikan selama ini terlampau doktriner dan kognitif. Wawasan kultural diabaikan. Peserta didik cenderung dijejali pengetahuan tanpa pemahaman

dan penghayatan. Kedudukan guru dan dosen selalu diangggap superior, sementara peserta didik dianggap tidak tahu apa-apa dan harus "diisi" sekehendak hati oleh para pengajar, yang seringkali pengetahuan dan wawasannya sudah tidak relevan lagi. Peserta didik terperangkap dalam situasi *disinherited-masses*, yakni manusia yang terasing dari ralitas dirinya, yang "menjadi ada" dalam pengertian "menjadi seperti (orang lain) dan bukannya dirinya sendiri". Oleh karena itu, pelajaran muatan lokal dalam pendidikan harus selalu dimaknai dalam konteks pemerdekaan dalam rangka lebih megenal diri dan lingkungan, dan bukannya sebagai domestikasi atau penjinakkan sosial budaya. "Dekatkan para peserta didik dengan lingkungannya, dan jangan mengasingkannya", hendaknya menjadi prinsip pembelajaran muatan lokal dalam pelaksanaan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, nilai-nilai lokal yang dididikkan yang sesungguhnya diderivikasikan dari nilai-nilai budaya lama yang terdapat dalam berbagai sistem budaya etnik lokal tertentu hendaknya selalu dipandu dengan nilai etnik lokal lain sehingga bercitra translokal. Berbagai hal yang terdapat dalam budaya etnik lokal hendaknya dipandang sebagai landasan bagi pembentukan identitas budaya bangsa, melalui berbagai proses kultural yang dimungkinkan. Dengan cara menguatnya identitas budaya bangsa tetap memiliki akar. Budaya etnik lokal difungsikan sebagai sumber inspirasi atau acuan bagi penciptaan-penciptaan baru, misalnya dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi, dan sebagainya, yang kemudian ditampilkan dalam perikehidupan translokal.

Jika nilai-nilai budaya tersebut berhasil ditanamkan lewat pelajaran muatan lokal dalam pelaksanaan pendidikan yang berfungsi mencerdaskan bangsa, akan dihasilkan pula manusia-manusia yang berdaya guna dalam kehidupan manusia: manusia yang kreatif dan berbudaya. Berbudaya dalam kaitan ini hendaknya diartikan sebagai memiliki nilai-nilai budaya translokal dan bersifat menyongsong masa depan, serta mampu pula menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya lokalnya. Dengan identitas budaya yang kuat, kita tidak akan jatuh dalam posisi epigonis bangsa lain atau terhindar dari posisi yang subordinatif.

Tujuan ideal tersebut nicaya tidak akan tercapai jika pemahaman terhadap kejamakan budaya dalam dan melalui

pendidikan dilaksnaakan hanya melalui suatu cara yang doktriner (sehingga menjadi sangat kognitif). Oleh karena itu prosesnya tidak sekedar *meaning getting*, tetapi lebih berupa proses *meaning making*. Dengan cara demikian, diharapkan terjadi pula internalisasi nilai, termasuk penghayatan terhadap nilai keberagaman[9].

4/.

Pelaksanaan pendidikan muatan lokal hendaknya selalu menekankan pluralitas dan multikulturalitas karena aspek-aspek itu merupakan modal sosial-budaya kita yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dengan pendidikan semacam itu, pada akhirnya diharapkan agar peserta didik mampu menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling curiga. Jika tidak ada keterbukaan, apa pun yang berbeda akan selalu dicurigai dan dianggap musuh.

Pendidikan multi kultural tidak mengandaikan peserta didik untuk dengan seenaknya sendiri mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya. Nilai tanggung jawab dan keikhlasan ditanamkan dalam prosesnya. *"Pinter"*-nya peserta didik tidak diharapkan menjadi modal sosial baginya untuk "*minteri*" orang lain di kelak kemudian hari.

Fokus utama pendidikan multikultural tetrletak pada pemahaman dan upaya untuk hidup dalam konteks perbedaan, baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus terperangkap oleh nilai primordialis budaya lokalnya yang sempit. Dengan demikian, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai bersama diharapkan mampu membuahkan sikap dan upaya sinergi-kolaboratif dalam mengatasi berbagai persoalan bersama. Pendeknya, memahami keragaman budaya, tetapi

---

[9] Pemahaman terhadap keberagaman yang menyebabkan permusuhan justru menandakan keberagaman baru pada kulit, belum sampai pada rohnya. Marilah kita ambil contoh slogan *Bhinneka Tunggal Ika*. Selama inbi pemaknaan lebih berat ke *Tunggal Ika* dari pada *Bhinneka*. Etos yang terkandung dalam *Bhinneka Tunggal Ika* sesungguhnya masih relevan, dan karenaya, dengan memperhitungkan aspek progresif budaya, ia harus dikembangkan dalam konsteks kekinian. Caranya, kita perlu mengedepankan makna pluralitas dan multikulturaliras daripada sentralitas, eksklusivitas, dan monokulturaliras. Jika hal itu diabaikan kita pun bisa menuai akibatnya. Misalnya saja, makna dan nilai toleransi cenderung dipahami secara semu. Kita tidak bisa banyak berharap perwujudannya yang hakiki, bahkan oleh kalangan yang mengaku dirinya sebagai humanitas sekalipun.

sekaligus menghantarkan mereka untuk menghayati nilai-nilai bersama yang bisa di *sharing* sebagai dasar dan pandangan hidup bersama. Melaluinya, beragam keyakinan, tradisi, adat, dan budaya akan memperoleh tempat dan posisinya secara wajar. Sikap simpati, apresiasi, dan empati terhadap budaya yang berbeda akan tertanam. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan multikultural memang menolak dominasi-hegemoni budaya yang berujung pada terbangunnya kultur monolitik.

Motivasi pendidikan yang menempatkan pelajaran muatan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk mencari dan akhirnya, jika dikehendaki, menetapkan identitas budaya bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis seperti dikemukakan di atas, atau karena persemukaan dengan budaya asing yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Bagi kita, upaya menemukan dan menguatkan identias budaya bangsa yang baru atas dasar identitas lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah. Jadi, orientasi pada tumbuh-kembangnya kesadaran budaya hendaknya dimaknai sebagai situai *biophily*, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang maknawiah yang berjiwa kehidupan, bukannya situasi *necrophily*, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang bendawi/wujudiyah yang tidak berjiwa kehidupan[10]. Dengan demikian, pelajaran muatan lokal dalam pendidikan akan menjadi *subversive-force*, yang mengubah dan memperbaharui keadaan, sekaligus menyadarkan dan membebaskan manusia.

Keinginan untuk membangun kembali identias budaya bangsa, pada hakikatnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sarana yang penting untuk menyeleksi, dan bukannya melawan, pengaruh budaya asing. Gerakan nativisme bisa saja menjadi sesuatu yang naif jika terjebak dalam situasi nostalgik berlebihan, akan tetapi ia merupakan suatu reaksi logis apabila diletakkan dalam perspektif budaya yang berubah sangat cepat.

Menggali dan menanamkan kembali muatan lokal lewat pendidikan budaya dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya

---

[10] Erich Fromm, 1966.

membangun identitas bangsa, dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. Nilai-nilai muatan lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identias bangsa. Pendidikan yang menaruh peduli terhadapnya akan bermuara pada, seperti sudah disinggung di atas, munculnya sikap yang mandiri, penuh inisiatif, dan kreatif.

Muatan lokal yang berupa seluruh budaya etnik yang sudah lama hidup dan berkembang adalah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara keseluruhan. Kasus bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dijunjung tinggi adalah misal yang cukup jelas. Bahasa yang hingga kini kita sebut sebagai bahasa nasional sebagai salah satu wujud, karena perkembangannya, budaya nasional, sebenarnya berasal dari sesuatu yang lokal, yakni bahasa Melayu yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Riau dan sekitarnya. Sebagai bahasa nasional, ia telah diterima oleh etnik-etnik lain dan memperoleh pengayaan dari bahasa-bahasa lokal yang lain. Bahasa Jawa, misalnya, yang begitu kaya dengan ekspresi suasana emosi dan seringkali penuh dengan perasaan, telah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia "pop" yang banyak dipakai di kalangan generasi muda kota-kota besar, para selebritis, dan para artis, terasa benar adanya dialek bahasa Betawi (Jakarta) maupun dialek bahasa Jawa, atau bahasa daerah lainnya. Bahasa Indonesia dalam karya-karya sastra kira juga demikian. Kebutuhan para sastrawan untuk merepresentasikan sesuatu yang bernuansa lokal menyebabkan pilihan bahasa ekspresi mereka juga penuh dengan diglosia dan interferensi.

Apa yang disebut sebagai muatan lokal, meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu. Ini dapat juga berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Dengan cara demikian, kesadaran budaya dapat ditumbuhkan. Dengan cara demikian pula, kesadaran masyarakat terhadap sejarah pembentukan bangsa dapat ditumbuhkan. Anggapan bahwa yang relevan dengan kehidupan hanyalah "masa kini dan di sini" juga dapat dihindari. Muatan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa sekarang, antara

generasi nenek moyang dan generasi sekarang, ia pun dapat dijadikan semacam simpai perekat dan pemersatu antargenerasi.

Pengembangan muatan-muatan lokal dalam pendidikan memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas etnik lokal itu sendiri. Koreografi, musik, dan sastra yang menempatkan nilai-nilai lokalnya sebagai sumber inspirasi kreatif, bagi daerah yang bersangkutan akan mendorong rasa kebanggaan akan budayanya, dan sekaligus bangga terhadap daerahnya karena telah berperan serta dalam menyumbang pembangunan budaya bangsa. Karya-karya seni budaya yang digali dari sumber-sumber lokal, jika ditampilkan dalam wajah atau wacana translokal niscaya memiliki sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya identitas budaya bangsa.

Balong-Pakembinangun: September 2003

PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

Oleh: **Syamsuni Arman***

Intisari

Pluralitas budaya merupakan realitas kehidupan yang perlu disikapi secara tepat. Sebagai asset nasional yang tidak ternilai harganya ia perlu dibina agar tidak berkembang menjadi sikap arogan dan etnosentrisme. Pembinaan itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* yaitu melibatkan unsur-unsur di daerah dalam suatu Forum Komunikasi Kebudayaan yang berkedudukan di ibu kota Negara

1. Pengantar

Pluralitas sebagai suatu konsep dapat dipakai dalamberbagai konteks, ada pluralitas politik, pluraritas ekeonomi, dan ada pula pluralitas sosial dan budaya. Menurut hemat saya pengertian kependudukan dalam perspektif budaya lebih dengan pengertian *people* dalam pandangan antropologi dari pada pengertian *citizen* dalam antropologi menunjuk kepada manusia sebagai pemangku budaya dalam segala aspek kehidupan (pendekatan holistik). Dalam proses perkembangannya ia melahirkan ciri-ciri yang spesifik yang kemudian berlanjut dengan munculnya pengelompokan-pengelompokan yang disebut pluralittas (*plurality*). Ciri-ciri spesifik yang dimiliki suatu kelompok penduduk menempatkannya ke dalam ragam budaya tertentu.

Mengapa pembahasan mengenai pluralitas kependudukan. menjadi penting? Pertama, pluralitas merupakan ciri dari semua kelompok dengan tingkat kompleksitas dan problem yang berbeda-beda. Kedua perbedaan yang terlalu tajam bisa melahirkan sikap arogan dan etnosentrisme yang berpotensi untuk memicu timbulnya konflik antarkelompok. Selain itu, kita

---

* Penulis adalah Guru Besar Ilmu Administrasi UNTAN dan pemegang gelar Ph.D. Antropologi dari Rutgers State University of New Jersey USA.

ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kelompok-kelompok penduduk itu agar jika memang terjadi konflik kita dapat mencari jalan yang paling efektif untuk mengatasinya.

2. Faktor Geografis dalam Pluralitas Kependudukan

Pluralitas yang kita saksikan pada setiap bangsa yang besar muncul karena sejumlah faktor. Menurut Isei (1) pluralitas budaya dan masyarakat Jepang bertalian erat dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya seperti bentuk geografis, keadaan etnis, kelas sosial, tradisi, ras dan kebangsaan. Keadaan itu, untuk sebagian, berlaku juga bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Dari aspek geografis Indonesia jauh lebih plural dan kompleks dibandingkan dengan Jepang. Bayangkan saja, Jepang hanya mempunyai beberapa buah pulau berukuran sedang, sedangkan Indonesia memiliki 5 pulau besar dan 17 ribu pulau termasuk pulau-pulau kecil. Suatu penelitian yang digagas oleh LP3ES mencatat tidak kurang dari 666 suku menurut urutan abjad ternyata memenuhi hampir semua huruf kecuali huruf Q, V, X dan Z (2). Saya yakin bahwa masih banyak kelompok etnis yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang masih belum terekam oleh kajian tersebut, meskipun demikian kajian ini menggugah kesadaran kita bahwa kita berhadapan dengan suatu realita yang perlu kita pelajari dengan sikap terbuka dan serius.

Jika kita perhatikan penduduk asli yang menempati pulau-pulau di Nusantara ini, yakni orang Ambon, orang Dayak, dan lain-lain, masing-masing memperlihatkan sifat-sifat fisik dan ragam budaya yang spesifik sehingga nama orang berasal. Apalagi, jika kita mendengarkan mereka berbicara dengan teman seasal, kita dapat menetapkan dengan lebih pasti lagi mengenai tempat asal dan etnisitas seseorang. Dengan mengetahui dari mana seorang individu atau kelompok berasal, kita dapat menjalin hubungan yang lebih akrab dan harmonis.

3. Faktor Kebijaksanaan dalam Pluralitas Kependudukan

Pemerintah kita dalam masa Orde Baru pernah menerapkan kebijakan untuk tidak mengangkat isu etnisitas kepermukaan karena dikhawatirkan dapat memicu persaingan tidak sehat

antaretnis yang dapat merugikan keutuhan masyarakat. Kebijakan itu diwujudkan dengan dihapuskannya etnisitas penduduk dari statistik kependudukan.

Pada masa reformasi sekarang orang tidak lagi berusaha menutupi identitas etnisnya, bahkan sebaliknya isu etnisitas kadang-kadang dimanfaatkan secara negatif untuk mempersempit persaingan di bidang politik dalam lingkup daerah. Saya berharap pandangan yang demikian tidak lebih dari strategi untuk menang, dan bukan prinsip yang perlu dipertahankan terus menerus. Karena jika demikian, dampaknya akan merugikan etnik yang bersangkutan dalam lingkup yang lebih luas. Lebih berbahaya lagi, jika hal itu diyakini dan dipraktikan oleh seorang orang maka lambat laun bisa menyebabkan lunturnya rasa persatuan diantara sesama anak bangsa.

4. Aspek Positif Pluralitas Penduduk

Sebenarnya pluralitas tidak selamanya menimbulkan dampak yang negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi setiap individu kehaliran dalam suatu etnis bukanlah pilihan, melainkan sesuatu yang terjadi di luar kemampuannya, dan setiap etnis mengajarkan berbagai prinsip yang mulia kepada anggotanya. Prinsip-prinsip itu tetap akan dibawanya ke mana pun dia pergi, dan prinsip itu pulalah yang merupakan pembimbing dan pengarah tindak-tanduk dan perilakunya dalam pergaulan dengan etnis-etnis lain.

Pergaulan hidup akan menjadi riskan seandainya anggota suatu etnis melupakan sama sekali akar budayanya dan mencoba menerima dan mengadopsi sembarang prinsip hidup yang lain sambil berjalan sepanjang hidupnya. Orang yang seperti itu akan mudah kehilangan pegangan dan tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif ketika mendapat kesulitan. Bukankan prinsip *siri* seperti yang dianut orang Bugis telah mencegah mereka melakukan hal-hal yang tercela? Namun sudah barang tentu terdapat pula orang-orang dari setiap etnis yang berperilaku buruk, tetapi perilaku yang demikian pasti ditolak pula oleh etnis dari mana mereka terlahir. Jadi, adalah cukup positif jika orang-orang yang pergi merantau lalu membentuk perkumpulan kedaerahan, entah perkumpulan arisan, perkumpulan kematian, yayasan pendidikan atau apa pun

namanya, untuk membantu warga yang terlantar atau sekedar untuk melepaskan rindu terhadap kampung halaman serta mengkaji ulang adat istiadat sambil menyantap makanan khas daerah dari mana mereka berasal. Kegiatan semacam itu akan mengukuhkan kembali nilai-nilai dan norma kehidupan sosial yang menjadi dasar bagi kehidupan yang harmonis.

5. Transmigrasi dan Pluralitas

Salah satu mekanisme yang besar bepengaruh terhadap pluralitas kependudukan adalah perpindahan penduduk secara internal yaitu transmigrasi. Sebenarnya pluralitas kependudukan juga terdapat pada penduduk asli yang mendiami suatu daerah, tetapi hal itu jarang sekali menimbulkan masalah dan konflik. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa suku-suku asli telah mengalami proses akulturasi yang panjang, sehingga perbedaan di antara mereka sudah mencapai titik penyesuaian yang relatif stabil dan tidak lagi menimbulkan masalah yang berat. Akan tetapi proses penyesuaian antara transmigran dan penduduk asli baru berjalan dalam kurun waktu yang relatif singkat sehingga masih dalam proses mencari bentuk-bentuk penyesuaian yang tepat.

Kebijakan transmigrasi pada masa Orde Baru menerapkan pendekatan *top-down*, di mana baik jumlah transmigran, metode rekruitmen, pengiriman ke daerah tujuan, dan pengelolaan di unit-unit transmigrasi, semuanya diatur dari atas dengan mengeluarkan dana yang sangat besar dan melibatkan petugas pelaksana yang cukup banyak. Ternyata pola lama tersebut di sebagian besar daerah tujuan pengalami kegagalan. Di antara masalah yang menonjol adalah tidak berhasilnya program produksi pertanian, gagalnya pemasaran hasil produksi, dan timbulnya kecemburuan dari masyarakat lokal yang merasa dianak-tirikan oleh pemerintah.

Kini program transmigrasi sudah memasuki paradigma baru yang bercirikan pendekatan bottom-up 3). Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pendekatan yang dipakai tidak lagi bersifat *project oriented*, melainkan *demand side approach*, dan secara operasional tidak

lagi berorientasi pada *push factors* melainkan lebih mengutamakan *pull factors*. Dengan pendekatan baru ini, kegiatan transmigrasi tidak lagi berorientasi kepada upaya mengurangi tekanan kependudukan di daerah padat, tetapi secara aplikatif diintegrasikan dengan keperluan daerah tujuan yang memerlukan tenaga kerja yang terampil.

Di Kalimantan Barat transmigrasi dengan pola baru ini sedang dipersiapkan di beberapa Kabupaten. Di Teluk Melanau, Kabupaten Ketapang pada bulan Desember 2003 akan ditempatkan sebanyak 100 KK transmigran berasal dari Kabupaten Temanggung, di Kabupaten Kapuas Hulu akan ditempatkan 255 KK, dan di Kota Singkawang akan ditempatkan sebanyak 87 KK. Pada saat ini masih terlalu dini untuk membuat prediksi mengenai keberhasilan program gaya baru ini, namun tampaknya pendekatan yang menjadi pilihan cukup menjadi alasan untuk bersikap optimistis.

Sikap masyarakat berkenaan dengan program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah bermacam-macam. Berdasarkan pengamatan lapangan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, terungkap bahwa masih ada keraguan pada sebagian tokoh masyarakat tentang manfaat program transmigrasi di daerah mereka. Pertama, ada kekhawatiran bahwa dengan datangnya penduduk baru dari luar daerah penduduk asli akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Penduduk setempat secara tradisional memanfaatkan sumber daya hutan secara langsung, padahal kini sumber daya hutan yang ada sudah semakin menipis. Dengan datangnya transmigran, persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas akan menambah beban bagi penduduk setempat yang memang sudah tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberatan yang kedua, bertalian dengan kegagalan produksi dan pemasaran hasil produksi yang dialami oleh para transmigran sendiri sehingga sebagian terpaksa mencari profesi baru yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip moral masyarakat seperti menjadi pengemis dan prostitusi. Penduduk lokal merasa khawatir bahwa masalah sosial seperti itu akan merambat kepada anak-anak dan putera puteri mereka. Jika transmigrasi memang merupakan pilihan, seyogyanya dilakukan pendekatan dan sosialisasi secara bertahap untuk

menghilangkan semua keragu-raguan tersebut.

Akhir-akhir ini keinginan untuk mendatangkan penduduk dari luar daerah menunjukkan prospek yang cerah. Keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran (pembentukan kabupaten baru) kadang-kadang terhalang oleh kecilnya jumlah penduduk yang tersedia. Untuk mengatasinya, telah muncul gagasan-gagasan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah berpenduduk padat dalam rangka mendatangkan transmigran dengan pola baru seperti saya utarakan di atas.

Program perkebunan baik sawit maupun karet yang dijadikan primadona oleh beberapa kabupaten akan mengalami hambatan jika tidak didukung oleh penambahan penduduk melalui program transmigrasi. Mungkin program transmigrasi yang paling rasional adalah dengan pola PIR, karena permodalan, penyiapan lahan, perumahan, dan pemasaran hasil ditangani langsung oleh perusahaan bersama pemerintah. Meskipun demikian, masih sering terdengar kekecewaan masyarakat berkenaan dengan pembagian lahan dan harga jual hasil produksi yang mereka anggap terlalu rendah. Oleh sebab itu, masih perlu dicari pola operasional yang lebih tepat agar masalah-masalah klasik tersebut dapat diatasi.

6. Pluralitas dan Identitas

Pluralisme adalah istilah yang paling netral ketika berbicara mengenai masyarakat majemuk. Kendatipun teori-teori mengenai masyarakat majemuk biasanya dibangun dengan istilah-istilah yang lain seperti "*ethnic diversity*", *multi-culturalis*", dan *ethnic identity*. Teori-teori tersebut cukup relevan dipakai untuk memahami secara lebih mendalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini.

Jika berbicara mengenai diversitas etnis, ada suatu pendapat ekstrim yang mengatakan bahwa "diversitas etnis menimbulkan instabilittas politik dan kemungkinan juga kekerasan". John Bowen 4) dengan gigih menentang pendapat itu seraya berbicara mengenai perlunya menciptakan bentuk-bentuk harmonis dari diversitas etnis. Lebih lanjut Fred W. Riggs 5) menyatakan bahwa hubungan silang budaya (*cross cultural*) sudah ada sejak lahirnya kebudayaan. Perbedaan etnis dan interaksi antarkelompok yang memiliki norma kebudayaan yang berbeda (bahasa, agama, adat istiadat, dan leluhur) berlangsung

terus sampai sekarang dengan pola yang hampir tidak berubah. Namun, dalam negara modern (termasuk Indonesia) poli-etnisitas bertumpang tindih dengan nasionalisme, demokrasi, dan industrialisasi, masing-masing dengan tantangan dan solusinya sendiri-sendiri. Saya pikir bagi Indonesia di mana diversitas etnis itu merupakan faktor yang "*given*" (dalam tanda kutip), kita harus menerimanya sebagai suatu realita dan mencoba menonjolkan segi-segi positip dan menekan sebanyak mungkin segi-segi negatifnya.

Sebagian orang lebih menyukai konsep *multi-culturalism* dengan alasan bahwa istilah itu menunjuk kepada "... *a generic condition that prevail whenever communities with different cultural heritages co-exist and interact with each other* 6). Menurut pendapat saya definisi ini lebih sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Etnis-etnis yang ada di Nusantara ini memang harus menerima kenyataan bahwa coeksistensi merupakan suatu landasan atau arena untuk berinteraksi secara wajar dan saling menguntungkan. Kita (dalam arti etnis) bisa saling belajar dari sejumlah kelebihan dan keunikan yang dimiliki berbagai etnis yang ada. Misalnya, etnis peladang di luar Jawa bisa banyak belajar dari etnis pesawah untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih efisien dan berkesinambungan. Orang Bali dengan kemahirannya dalam bidang ukir-mengukir meskipun masih dalam bentuk yang kasar. Jadi, ruang untuk bekerja sama dan saling memberi dan menerima masih terbuka lebar.

Sebagian orang menganggap bahwa terdapat kontradiksi antara *ethnic identity* dan *national identity*, seolah-olah yang satu cenderung melemahkan yang lain. Sebagai contoh, makin menonjolnya kesadaran etnis akhir-akhir ini, lebih-lebih jika dihubungkan dengan era otonomi daerah yang seolah-olah memberi angin terhadap berkembangnya etnocentrisme, dipandang sebagai suatu proses yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Saya kira kemungkinan itu memang ada, namun sampai saat ini masih dalam skala yang tidak menghawatirkan. Namun demikian, hal itu perlu kita cari solusinya agar tidak meluas dan mendalam sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional kita.

7. Pluralitas dan Upaya Menggalang Persatuan

Apakah yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam menghilangkan dampak negatif pluralisme dan menggalang persatuan yang harmonis? Upaya yang seperti itu harus dilakukan dalam berbagai front baik kognisi, afeksi, ataupun tindakan. Pada tataran kognisi kita perlu menyadarkan diri kita maupun generasi penerus yang bakal menggantikan kita akan pentingnya mempelajari sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita perlu memberikan gambaran yang jelas betapa pahitnya kehidupan nenek moyang kita ketika mereka masih berada di bawah kekuasaan kaum penjajah, dan betapa semua etnis pada waktu itu berjuang bersama-sama untuk memperoleh kemerdekaan. Dengan menyadari dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar biasanya orang bersedia mengabaikan perbedaan kecil-kecil yang bersifat kontroversial. Kita perlu meyakinkan diri kita bahwa pluralitas etnis, sosial dan budaya tidak perlu menimbulkan perpecahan apalagi permusuhan. Kita boleh bangga dengan keunikan dan keunggulan adat istiadat masyarakat di mana kita dilahirkan, tetapi kebanggaan itu tidak menyebabkan kita memandang rendah terhadap adat istiadat masyarakat yang lain, apalagi jika masyarakat yang lain itu hidup berdampingan dengan kita dalam suatu kawasan yang sama.

Pada tataran afeksi kita perlu memberikan appresiasi yang jujur terhadap keindahan seni budaya etnis yang lain. Apresiasi itu tumbuh dengan sendirinya terhadap seni budaya etnis kita sendiri karena berkembang seiring dengan proses alamiah sejak kita masih bayi sampai menjadi dewasa dan tua. Tetapi, untuk menghargai seni budaya lain perlu suatu proses yang direkayasa. Apresiasi itu akan lahir dan tumbuh jika kita sering turut menyaksikan pergelaran-pergelaran seni budaya dari etnis yang lain. Program seni budaya dalam bentuk pentas bersama merupakan cara yang ampuh untuk menggalang kerja sama dan saling menghargai di antara berbagai etnis yang ada. Dari pergelaran bersama ini akan tumbuh semangat untuk mengembangkan seni budaya sendiri agar tidak kurang menariknya dari seni budaya orang lain. Pendekatan afeksi ini jika berhasil akan menambah gairah kehidupan dan meningkatkan etos kerja.

Kemudian tataran yang paling sulit adalah memelihara

perilaku atau tindakan agar tidak melangar norma kebudayaan yang berlaku, terutama norma budaya yang dianut oleh etnis lain yang hidup di sekeliling kita. Upaya ini harus kita lakukan secara terus-menerus baik di dalam rumah tangga maupun melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Upaya penyelarasan tindakan ini perlu dilakukan pada semua tingkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan lokal. Jadi hendaknya dibangun suatu program yang terarah dan berkesinambungan untuk memperkuat aspek-aspek kehidupan yang dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan antar etnis. Pada tingkat nasional hendaknya dapat dibentuk suatu Forum Komunikasi Kebudayaan di mana bergabung para intelektual dan tokoh-tokoh seni budaya dari seluruh Indonesia. Pemerintah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana untuk forum tersebut bertemu setahun sekali untuk memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya menumbuhkan sikap saling menghargai dan saling mencintai di antara berbagai elemen bangsa yang plural tersebut. Kongres Kebudayaan V ini perlu kita jadikan momentum untuk memulai langkah maju secara terarah dan terencana menuju pergaulan yang harmonis dan produktif. Untuk merealisasikan hal itu saya menyarankan agar dalam Kongres Kebudayaan V ini dibentuk panitia kecil dengan melibatkan unsur-unsur dari daerah-daerah. Panitia ini diberi tugas, dalam batas waktu yang tidak terlalu lama, untuk merancang struktur, misi, dan fungsi Forum Komunikasi Kebudayaan tersebut.

Daftar Pustaka

Ito Abito
1997 *Aspects of Japanese Culture and Society*,. International Society for Educational Information, Inc. (http//www.isei.or.jp/books/75/plurality.htttml, 10/16/03)

Hidayah, Zulyani
1997 *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. The Toyota Foundation dan LP3ES, Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
2002 *Konsep Mekanisme dan Prosedur Pembangunan Transmigrasi*.

Riggs, Fred W.,
10/17/2003 *Modernity of Ethic Identity, Part II*, http//www2.hawaii.edu/-fredr/7-isa lb.htm,

Riggs, Fred W.,
10/17/2003 *Modernity of Ethic Identity And Conflict, Part I*, http//www2.hawaii.edu/-fredr/7-isa la.htm,

MEMPERTIMBANGKAN PUSAKA INDONESIA
(BACA PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA)

Oleh: **Taufik Rahzen**

Pusat Kebudayaan atau Culture Centre atau Culture Institute merupakan lembaga yang meletakkan persoalan kebudayaan sebagai pusat perhatian publik dan negara. Berbagai negara memiliki pusat kebudayaan sebagai upaya menghimpun berbagai kebijakan, strategi dan menyelenggarakan program kebudayaan secara sinergis dan berkelanjutan. *Japan Foundation, France Institute, Jahawaral Nehru Cultural Centre, British Council, Goethe Institute, Erasmus Huis dan American Cultural Centre* — untuk memberikan contoh, memanfaatkan lembaga budaya ini sebagai sarana pertukaran dan diplomasi budaya. Ke dalam negeri pusat kebudayaan, biasanya berfungsi untuk merangsang perhatian publik pada persoalan kebudayaan, menerapkan kebijakan budaya, resource-centre dan sebagai etalase produksi budaya.

Gagasan untuk mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia, sebenarnya, pernah terlontar pada Kongres Kebudayaan awal. Setelah mengalami berbagai macam modifikasi dan kehilangan bentuk, akhirnya gagal terealisir hingga saat ini. Masalah-masalah politik dan ekonomi yang menyertai republik, rupanya meminggirkan perhatian untuk membangun pusat kebudayaan. Trauma dari banyak aktivis budaya dan seniman terhadap berbagai bentuk organisasi, baik karena alas an-alasan idiologis (manipol dan Pancasila), maupun alas an praktis (memasung kebebasan, sum,ber konflik dan birokratisan) – masih menahan mereka untuk membicarakan lembaga budaya. Sementara, pada masa transisi demokrasi dan semangat otonomi daerah, istilah "pusat kebudayaan" , kemudian mengalami makna negatif (pejoratif), karena dianggap bertentangan dengan semangat desentralisasi dan kedaulatan budaya.

Namun perkembangan cepat yang terjadi pada tataran social, politik dan budaya dalam era reformasi, menimbulkan berbagai masalah baru. Setidak-tidaknya dua persoalan utama yang dirasakan mendesak : Pertama, ditengah semangat desetralisasi dan otonomi daerah yang menguat, ternyata ktia tidak memiliki lembaga kebudayaan independen berskala

nasional, yang dapat memayungi dan mempetarai (sebagai lembaga mediasi) persoalan kebudayaan bangsa. Kedua, ambruknya citra Indonesia dalam ingatan dunia interbasional, membutuhkan upaya sistematis dan pro-aktif dalam diplomasi kebudayaan di mancanegara.

Karena itu, gagasan untuk mempertimbangkan kembali keberadaan PUSAKA INDONESIA (Baca : Pusat Kebudayaan Indonesia), atau apa pun namanya, perlu direnungkan bersama – karena berada dalam konteks yang baru dan kebutuhan mendesak.

1. Modal

Pembentukan Pusat Kebudayaan Indsonesia, diharapkan tidaklah dari titik nol. Sejak masa awal republik, **Soekarno** memimpikan kawasan Monas sebagai ruang publik yang dapat mencerminkan identitas bangsa. Museum Nasional, Galeri Nasional dan Wisma Seni – yang sekarang menjadi kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ingin dijadikan komplek kebudayaan. Sementara **Hatta**, mengangankan Perpustakaan Nasional yang berada didekat gedung Wakil Presiden sekarang, diharapkan menjadi resource-centre, perpustakaan yang menjadi sumber, rujukan dan persemaian tradisi intelektual Indonesia. Rencana Pemerintah untuk mensinergiskan pengelolaan ketiga institusi kebudayaan diatas, mungkin ditambah dengan gedung kementerian Sapta Pesona – dapat menjadi modal awal baik untuk tempat maupun jaringan kerja.

2. Bentuk

Lembaga Kebudayaan ini berbentuk *quasi-goverement* (semi pemerintah) non departemen, bersifat independen, memiliki akuntabilitas publik yang kuat. Berada dibawah presiden (Lihat Lipi, Perpunas atau Lapan) tetapi anggotanya dipilih dan dipertimbangkan melalui mekanisme publik (bandingkan dengan Komnas HAM, KPU atau Komisi Konstitusi).

Untuk dalam negeri, lembaga ini berfungsi sebagai pusat data dan informasi budaya serta sebagai mediasi (perantara) jaringan lembaga-lembaga kebudayaan yang ada, baik pemerintah maupun swasta, khususnya dalam diseminasi informasi dan

kerjasama budaya. Secara structural, lembaga berfungsi untuk mempertimbangkan dan mengawal kebijakan budaya yang berorientasi publik dan negara.

Untuk keluar negeri, lembaga ini berfungsi sebagai sarana diplomasi budaya *(cultural diplomacy)* yang aktif, dan menata strtegi *presentasi dan re-presentasi* kebudayaan Indonesia pada tataran global. Merangsang dan memfasilitasi kajian Indonesia, mendorong kerjasama budaya antar negara (global *partnership*),

pencitraan kembali bangsa dan tumbuhnya saling pengertian melalui bahasa budaya.

Pendanaan bersal dari pemerintah dan lembaga swasta dan dana masyarakat yang dikelola dengan akuntabilitas yang kuat.

Berkedudukan di Jakarta dan memiliki simpul jaringan di enam kawasan : Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali/ Nusa Tenggara serta kawasan Maluku-Papua. Berorientasi program yang sinergis antar kawasan, dengan mendukung program-program yang telah ada pada masyarakat.

Menyelenggaran konvensi, pertemuan dan kajian budaya yang bersifat nasional, semacam kongres kebudayaan, penyusunan ensiklopedi kebudayaan, kebijakan perbukuan dan Festival Nasional, dll.

BILAKAH BERDAUN RIMBA JATI, YANG BIBITNYA KITA ULANG TANAM KINI*

(REFLEKSI ENAM GERAKAN SASTRA HORISON, 1996-2004)

Oleh: **Taufiq Ismail**

Ahsan, Siswa SLTP Sumbawa Ingin Jadi Sastrawan, Batalkan Cita-Cita Jadi Dokter

Suasana ruang aula sekolah itu riuh-rendah, ketika Ahsan, 13 tahun, bercelana pendek, maju sebagai penanya terakhir dalam acara *Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya* di Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, pertengahan tahun 2002.

Cuaca Sumbawa panas terik dan lembab mencekam. Angin tak bermurah hati memindahkan udara agak sejuk lereng Gunung Daria dari arah timur. Di seberang selat Sape, kawanan komodo pun berteduh di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, menelungkup tidur-tiduran memicingkan mata. Empat belas siswa telah mengajukan pertanyaan mereka kepada para sastrawan yang datang ke sekolah mereka sejak jam 9 pagi tadi. Mereka telah baca puisi dan cerita pendek, kini tiba waktu tanya jawab dan diskusi dengan siswa.

Acara ini untuk siswa Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Pesantren yang sederajat. Ahsan anak SMP, menyelip di antara peserta. Dia maju bertanya sebagai penanya terakhir, berseragam SMP dan bercelana pendek. Aula yang dipenuhi siswa SMU bercelana panjang, riuh-rendah. Tapi mereka terdiam ketika siswa 13 tahun yang rasa percaya dirinya kuat itu, menyampaikan kalimat-kalimatnya yang teratur.

"Saya sudah mendengar bapak-bapak para sastrawan membicarakan karya sastra. Saya sudah mendengar cerita para sastrawan mengarang, dan apa faedahnya untuk kita semua.

Saya sangat tertarik. Cita-cita saya adalah menjadi dokter. Di sini, sekarang, saya mengganti cita-cita saya. Saya ingin menjadi sastrawan seperti bapak-bapak, kalau sudah besar nanti."

---

*Makalah untuk Kongres Kebudayaan 2003. Bukittinggi, 20-23 Oktober 2003

Hadirin bertepuk tangan, dan terdengar ada yang bersuit-suit. Inilah adegan di salah satu dari 162 sekolah di 22 provinsi yang didatangi acara SBSB, dalam masa 4 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2003. Empat ratus siswa yang memenuhi aula sekolah di Bima ini, adalah sebagian dari 73.000 siswa dan guru di 109 kota Indonesia yang menikmati program sastra masuk sekolah ini. Program SBSB ini didanai oleh The Ford Foundation.

Para sastrawan tamu menjawab pertanyaan 14 siswa tersebut. Umumnya pertanyaan berkisar sekitar karya yang dibacakan tadi, bagaimana dan kaham ilham datang, apakah sekali tulis karangan bisa selesai, apa sebab dan bagaimana cara mereka menjadi sastrawan, suka duka menjadi novelis, apakah nafkah penulis cerita pendek dapat memenuhi belanja rumah tangga, apa yang dimaksud dengan puisi kontemporer, apakah penyair dulu waktu di SMU mengirim puisi cinta kepada sang pacar, dan seterusnya.

Dokter Tapi Juga Sastrawan

Sesudah secara berurutan pertanyaan di jawab tibalah giliran jawaban untuk penanya penghabisan. Giliran menjawab diberikan kepada saya. Saya panggil Ahsan ke panggung. Maik saya dekatkan ke mulutnya.

"Betulkah engkau ingin jadi sastrawan kelak?"

"Ya, pak."

"Kenapa?"

"Kedengarannya menarik, pak. Asyik kalau pandai mengarang buku. Bisa jadi orang terkenal, masuk tivi."

"Kamu suka baca?"

"Suka, pak. Saya suka baca."

"Kamu bilang tadi, sebenarnya cita-citamu ingin jadi dokter."

"Ya, pak."

"Bagaimana angka rapormu?"

"Lumayan baik, pak."

"Kamu suka matematika?"

"Suka, pak. Angka saya bagus."

"Orangtuamu bekerja di mana?"

"Ayah saya guru di SMP."

"Ibumu bekerja atau di rumah?"

"Ibu saya guru juga. Guru SD."

"San," kata saya. "Nah, ini bapak kasi nasihat, ya."

"Ya, pak."

"Begini. Cita-citamu jadi dokter itu bagus. Teruskan. Baik itu. Tapi jangan digagalkan. Kamu anak guru. Angka matematikamu bagus. Kamu suka baca sastra. Teruskan. Baik itu. Tapi kalau kamu sudah bercita-cita jadi dokter, jangan digagalkan karena kamu ingin jadi pengarang. Kedua-duanya itu bisa digabung, lho."

"Bisa, pak?" tanyanya, kelihatan heran, menengadah memandang saya.

"Iya, bisa," Jawab saya meyakinkan dia. "Kenapa tidak. Bapak yang sudah melakukannya. Kamu jadilah dokter, tapi juga menulis. Teruslah berlatih. Mungkin kamu bisa menulis sastra, tapi kalau tidak, kamu juga bisa menulis buku tentang penyakit, atau tentang mengobati orang sakit. Malah lebih hebat. Dokter, tapi juga penulis, bayangkanlah itu."

"Ya, pak."

"Nah, bagaimana?" tanya saya. "Masuk akal, kan? Jadi, jangan ganti cita-citamu. Tapi tambahkan jadi sastrawan sebagai cita-citamu nomor dua."

"Ya, pak. Terima kasih, pak."

Kami bersalaman, berpotret dan hadirin bertepuk tangan.

Pengalaman SBSB ini bagi siswa semua itu, tinggal di sebuah pulau jauh dari pusat sastra, akan diingatnya dan berkesan seumur hidup. Dia mendapat kesemepatan emas bertemu muka dengan penyair, cerpenis, novelis, penulis drama yang selama ini cuma dikenalnya lewat mulut gurunya. Dia ikut bertanya-jawab, bahkan dengan sedikit berebut dengan teman-temannya, dapat autograf, yang akan dibanggakan dan dikenangnya. Sastra akan menjadi sesuatu yang ada makna dalam hidupnya. Dia akan lebih tertarik membaca, dan akan suka pelajaran mengarang.

Membaca Nol Buku, Mendengkur Lebih Setengah Abad

SBSB adalah satu di antara enam gerakan sastra dengan tujuan serupa, dengan sasaran dunia pendidikan Indonesia yang dilaksanakan Yayasan Indonesia, penerbit majalah sastra *Horison*, 1999-2004. Gerakan sastra ini bertujuan meningkatkan *minat baca buku, kemampuan menulis dan apresiasi sastra* di kalangan siswa SMU.

NO	KEGIATAN	SASARAN	PENDANAAN
1	Sisipan *Kakilangit*	Siswa dan Guru	Majalah Sastra Horison
2	Pelatihan MMAS	Guru	Depdiknas
3	Kegiatan SBSB	Siswa dan Guru	The Ford Foundation
4	Kegiatan SBMM	Mahasiswa	The Ford Foundation
5	LMKS dan LMCP	Guru	Depdiknas
6	SSSI	Siswa	The Ford Foundation

Mengapa gerakan sastra? Sebab yang memicu gerakan ini adalah kenyataan bahwa sudah 60 tahun lamanya di SMU Indonesia siswa membaca nol buku (sejak 1943 sampai ahun tulisan ini, 2003) dan dibimbing mengarang di kelas cuma 16,6% dibanding dengan SMU Malaysia dan Amerika Serikat, bahkan mungkin di bawah ini.[1[1]]

Padahal sebelum Perang Dunia II di SMU Hindia Belanda, waktu itu AMS (*Algemeene Middelbare School*), wajib baca buku sastra 25 judul dalam waktu tiga tahun, dan bimbingan mengarang satu judul seminggu, 36 judul setahun. Dalam dua subyek ini AMS masa itu, setaraf dengan SMU Eropa dan Amerika hari ini.[2[2]]

Sepanjang 60 tahun itu pengunggulan jurusan eksakta telah memangkas jumlah buku wajib baca di SMU. Dan lebih dari setengah abad *kita semua tidur mendengkur*. Baru ada yang terbangun ketika tahu bahwa di negara sebelah rumah kita, di seberang Selat Malaka, siswa SMU wajib membaca 12 novel, 18 cerpen, 8 drama, 18 puisi modern, 18 puisi tradisional dan 12 puisi tradisional[3[3]]. Di seberang Lautan Teduh siswa SMU Amerika Seikat, ketika tamat, sudah membaca 4284 halaman

---

1[1]

Taufiq Ismail, *Agar Anak Bangsa Tak Rabun Membaca Tak Pincang Mengarang*, Pidato Penganugerahan Gelar Kehormattan Doktor Honoris di Bidang Pendidikan Sastra, Universitas Negeri Yogyakarta, 8 Februari 2003.

2[2]

Taifiq Ismail, *Benarkah Kini Bangsa Kita Telah Rabun Membaca dan Lumpuh Menulis?* Jakarta, 1998.

3[3]

Dr. Sharifah Maimunah Syed Zin, *Komponen Sastra dalam Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah di Malaysia*, makalah dalam "Seminar Internasional Bahasa dan Sasttra Indonesia/Melayu", Universittas Pakuan, Bogor, 14-16 September 2002.

karya sastra. *Empat ribu dua ratus delapan puluh empat halaman*[4][4]. Karena penasaran ingin mengejar ketertinggalan inilah, enam gerakan sastra ini diluncurkan.

Enam Gerakan Sastra

Enam gerakan sastra itu ialah pertama *Kakilangit*, sisipan *Horison* yang siap digunakan di kelas sastra, dan jadi wadah tempat tsiswa dan guru SMU menulis. Tiras 12.000 eksemplar, 9.000 dilanggankan Depdiknas sejak 1996 untuk 4.500 SMU se-Indonesia. Dalam 74 edisi *Kakilangit* 72 sekolah telah berpartisipasi mengirimkan karya siswa mereka, 72 guru menulis pengalaman mereka mengajar sastra, dan 556 puisi sertta 2 cerpen siswa dimuat di sisipan itu, sampai dengan akhir 2002.

Kedua, pelatihan *Membaca, Menulis dan Apresiasi Sastra* (MMAS) untuk guru. Sejak 1999 pelatihan guru 7 hari dalam ketiga hal itu telah dilangsungkan di 11 kota Indonesia, sebanyak 30 angkatan, diikuti sekitar 1.200 guru bahasa dan sastra. Konsep dan materi pelatihan disusun oleh *Horison*, dibantu tim pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, diselenggarakan oleh PPPG dan Dikdasmen, dengan pembiayaan Depdiknas.

Ketiga, *Sastrawan Bicara Siswa Bertanya*, atau SBSB yang merupakan acara sastra masuk sekolah yang paling populer dan sangat ditunggu-tunggu siswa dan guru. Ketika makalah ini ditulis, seluruh pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi sudah dijalani SBSB, sejak tahun 2000 sampai dengan 2003. Sebanyak 73 sastrawan dengan gembira dan bersemangat ikut baca karya mereka di 162 sekolah, 109 kota, serta berintetraksi dengan 73.000 siswa dan guru. Pada tahun 2003 ini SBSB menyisir Sulawesi dan di tahun 2004 akan menjalani Kalimantan. The Ford Foundation mendanani kegiatan fantastik ini.

Keempat, *Sastrawan Bicara Mahasiswa Membaca* (SBMM) adalah acara sastrawan masuk kampus. Sembilan universitas

---

4[4]

Arthut Applebee, *Literature in the Secondary Schools Studies of Curriculum and Instruction in the United States*,National Council of Teachers of English, Urbana, Illionis, 1993.

dimasuki sastrawan, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung), Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Mataram dan Universitas Negeri Surabaya.

Keunikan acara ini adalah bahwa kepada 25 mahasiswa yang dipilih oleh Ketua Jurusan, sebulan sebelum sastrawan datang, dibagikan buku karya sastrawan tersebut untuk dibaca dan ditelaah sebaik mungkin. Dengan persiapan tersebut, mereka diwajibkan hadir dan aktif berdiskusi dengan sastrawan, sehingga mereka memetik manfaat optimum dari bacaan tersebut. Program ini ditaja The Ford Foundation, 2000-2002.

Kelima, untuk meningkatka kemampuan guru menulis, diselenggarakan *Lomba Mengulas Karya Sastra* (LMKS) dan *Lomba Menulis Cerita Pendek* (LMCP) untuk guru bahasa dan sastra SMU, 2000-2003. Karya sastra yang diulas adalah satu dari pilihan 50 novel, drama, kumpulan cerpen dan kumpulan puisi.

LMKS dan LMCP yang diselenggarakan tiga tahun berturut-turut ini, ternyata menjadi semacam bengkel kerja sinambung bagi guru-guru yang gemar menulis. Lapis ini, yang setiap lomba diikuti sekitar 400 guru, diharapkan makin menebal dari tahun ke tahun. Kedua lomba ini dibiayai Depdiknas.

Keenam, *Sanggar Sastra Siswa Indonesia* atau SSSI. Dampak 3 tahun berturut-turut kegiatan SBSB terasa dalam arus deras naskah siswa yang dikirim ke *Kakilangit*. Energi menggebu dari sebagian siswa yang memang gemar sastra, harus ditampung di luar kelas. Mereka perlu diberi perhatian, yang dihimpun dalam semacam sanggar kerja.

Tahun 2002 adalah tahun dimulainya SSSI ini, di 12 kota, yaitu Tabanan, Sumenep, Bandar Lampung, Palembang, Padang, Serang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Semarang, Gresik dan Yogyakarta. Pengasuh SSSI ini adalah alumni MMAS yang sastrawan, atau sastrawan yang memang gemar membimbing siswa. Mereka diberi kesempatan membaca buku sastra (di setiap cabang SSSI disediakan 60 judul buku berikut lemari), dibimbing mengarang dan dikembangkan apresiasi mereka melalui berbagai kegiatan sastra dan lomba, seperti baca puisi dan musikalisasinya. Penaja SSSI adalah The Ford Foundation.

Antologi Sastra di Perpustakaan Sekolah

Entusiasme siswa dan guru selepas SBSB, harus ditunjang dengan tetrsedianya buku sastra di perpustakaan sekolah. Ini kelemahan besar di sekolah kita, yang juga harus diatasi. Sebagai bagian dari enam gerakan sastra *Horison*, disusun dan diterbitkanlan antologi berikut ini.

Pertama, sejilid antologi melingkupi karya sastra selama 4 abad, berjudul *dari Fansuri ke Handayani*, 668 halaman, tiras 1.000 eksemplar, terbit Maret 2001, memuat karya 147 sastrawan (79 penyair, 41 cerpenis, 21 novelis dan 6 penulis naskah drama). Antologi ini dihadiahkan kepada perpustakaan sekolah yang menjadi tuan rumah SBSB, masing-masing 5 eksemplar, juga kepada guru-guru peserta pelatihan MMAS.

Kedua, *dFKH* diperluas menjadi *Horison Sastra Indonesia*, yaitu antologi terdiri dari 4 jilid, meliputi karya 249 sastrawan (110 penyair, 71 cerpenis, 41 novelis, 27 penulis drama), tebal 2.560 halaman, tiras 20.000 eksemplar, terbit Januari 2002 yakni *1 Kitab Puisi, 2 Kitab Cerpen, 3 Kitab Nukilan Novel,* dan *4 Kitab Drama.* Antologi ini, sampai saat ini, merupakan antologi karya sasttra Indonesia terbesar dan terlengkap yang pernah diterbitkan.

Kreativitas sastra siswa sendiri, yang 5 tahun lamanya mendapat peluang muncul di sisipan *Kakilangit*, sepanjang 2000-2001 dihimpun terbaik dalam *Kakilangit Sastra Pelajar.* Antologi karya siswa 310 halaman, tiras 5.000 eksemplar ini memuat 174 puisi, 10 cerpen dan 2 esai, karya siswa dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, NTTT sampai ke Merauke di Papua.

Kelima jilid antologi ini, tiras totalnya 25.000 eksemplar, merupakan persembahan *Horison / Kakilangit* bagi sekitar 4.500 perpustakaan SMU dan sekolah sederajat untuk peningkatan budaya baca buku sastra di sekolah. Penerbitan yang ditaja The Ford Foundation ini tidak diperjual-belikan untuk umum.

Keenam gerakan sastra ini mendapat respons positif dari Pusat Kurikulum, sehingga dapatlah diharapkan berlangsung perbaikan secara bertahap dalam ketiga hal di atas di masa dihadapan di dunia pendidikan kita.

Terima Kasih Kami

Kami berterima kasih kepada Departemen Pendidikan Nasional, Ford Foundation, kawan-kawan sastrawan peduli

pendidikan sastra yang dengan respons dan semangat tinggi bertungkus-lumus membantu *Enam Gerakan Sastra* ini. Terima kasih, terima kasih.

Rimba Jati, Luas Ranahnya, Rimbun Daunnya

Berinteraksi dengan 1000 lebih guru dalam pelatihan MMAS di 11 kota, dan dengan 73.000 siswa dan guru dalam SBSB di 162 sekolah, 102 kota di 22 provinsi dalam rentang masa 4 tahun (2002-2003), merupakan kenangan luar biasa indah bagi saya bersama kawan-kawan sastrawan. Kami belum pernah mengalami kedahsyatan pengalaman pertemuan seperti ini yang tak ada presedennya dalam sejarah pendidikan bangsa Indonesia. Kami menghayati makna dialog ini, dan merasa betul, bahwa:

tanpa kalian yang selama ini kami lalaikan,
penyebaran sastra untuk bangsa,
akan tetap terasing, terkendala dan percuma.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih
atas entusiasme kalian pada sastra.

Di latar belakang sana, sama-samar terbayang sosok lima juta siswa seumur kalian yang belum tersentuh program ini. Kami sedih, karena tak mungkin rasanya kami bertemu langsung dengan mereka, seperti kami berjumpa kalian.

Bapak dan Ibu Guru, mari kita tugal bibit dengan rasa kasih sayang di persemaian seluas ini, dengan penuh kesabaran dalam cuaca masa kini, menahankan pegal di tulang punggung, dengan terus menerus mengingat bahwa kita tidak menyebar benih sayur-mayur yang 3-4 bulan bisa dipanen, tapi membenamkan bibit kayu jati yang lama, bertahun-tahun masa tumbuh dan besarnya.

Saya mengimpikan kita dikaruniai Tuhan rimba jati yang luas, jauh mata memandangnya, subur dan rimbun dedaunannya. Tumbuhkanlah bagi kami rimba itu, ya Tuhan, melalui cucuran sifat rahman dan kemurahan, serta seluas-luas kemungkinan.

Amin.***

Lampiran Satu

Buku Sastra Wajib Baca di SMU 13 Negara

NO	ASAL SEKOLAH	BUKUWAJIB	NAMA SMU / KOTA	TAHUN
1	SMU Thailand Selatan	5 judul	Narathiwat	1986-1991
2	SMU Malaysia	6 judul	Kuala Kangsar	1976-1980
3	SMU Singapura	6 judul	Stamford College	1982-1983
4	SMU Brunei	7 judul	SM Melayu I	1966-1969
5	SMU Rusia Sovyet	12 judul	Uva	1980-an
6	SMU Kanada	13 judul	Canterbury	1992-1994
7	SMU Jepang	15 judul	Urawa	1969-1972
8	SMU Int'l, Swiss	15 judul	Jenewa	1991-1994
9	SMU Jerman Barat	22 judul	Wanne-Eickel	1966-1975
10	SMU Perancis	30 judul	Pontoise	1967-1970
11	SMU Belanda	30 judul	Middleburg	1970-1973
12	SMU Amerika Serikat	32 judul	Forest Hills	1987-1989
13	AMS Hindia Belanda-A	25 judul	Yogyakarta	1969-1942
14	AMS Hindia Belanda-B	15 judul	Malang	1929-1932
15	SMU Indonesia	0 judul	Di Mana Saja	1943-2003

Catatan: Angka di atas hanya berlaku untuk SMU responden (bukan nasional), dan pada tahun-tahun dia bersekolah di situ (bukan permanen). Tapi sebagai pemotretan sesaat, angka perbandingan di atas cukup layak untuk direnungkan bersama. Apabila buku sastra tak disebut di kurikulum, dibaca cuma ringkasannya, dan siswa tak menulis mengenainya, tidak ada di perpustakaan sekolah, dan tidak diujikan, dianggap nol. *Angka nol buku untuk SMU Indonesia sudah berlaku 60 tahun lamanya*, dengan kekecualian luarbiasa sedikit pada beberapa SMU saja.

Lampiran Dua

Enam Gerakan Sastra *Horison*, 1996-2004

Bertujuan membantu meningkatkan
budaya membaca buku,
kemampuan mengarang, dan
apresiasi satra.

Dengan sasaran
dunia pendidikan.

Keenam gerakan itu adalah :

NO	KEGIATAN	SASARAN	PENDANAAN
1	Sisipan *Kakilangit*	Siswa dan Guru	Majalah Sastra Horison
2	Pelatihan MMAS	Guru	Depdiknas
3	Kegiatan SBSB	Siswa dan Guru	The Ford Foundation
4	Kegiatan SBMM	Mahasiswa	The Ford Foundation
5	LMKS dan LMCP	Guru	Depdiknas
6	SSSI	Siswa	The Ford Foundation

Lampiran Tiga

Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya, 2000-2003

SBSB	Prov	Kota	SMU	Siswa & Guru	Sastrawan	Waktu
2000	4	21	30	16.000	43	21 Februari – 22 April
2001	10	39	52	27.000	60	2 April – 6 November
2002	3	22	41	15.000	39	22 April – 29 Agustus
2003	5	27	39	15.000	37	19 Maret – 8 September
Total	22	109	162	73.000	73	21/2/2002 – 8/9/2003

Propinsi (22) yang diliputL Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTB, NTT, Sulawesi

Lampiran Empat

Sastrawan Bicara, Mahasiswa Membaca, 2000-2002

NO	UNIVERSITAS	SASTRAWAN TAMU	WAKTU
1	Universitas Indonesia	6	APRIL-NOV 2000
2	Universitas Negeri Jakarta	6	APRIL-NOV 2000
		6	MARET-NOV 2001
3	Universitas Pendidikan Indonesia	6	MARET-NOV 2001
4	Universitas Negeri Semarang	6	MARET-NOV 2001
5	Universitas Negeri Yogyakarta	6	MARET-NOV 2001
6	Universitas Negeri Malang	2	MARET-NOV 2001
		4	MARET-OKT 2002
7	Universitas Negeri Padang	2	MARET-NOV 2001
		4	MARET-OKT 2002
8	Universitas Mataram	4	MARET-OKT 2002
9	Universitas Negeri Surabaya	4	MARET-OKT 2002

Enam satrawan tamu datang ke Fakultas Sastra / Fakultas Bahasa dan Seni selama 2 semester, di 9 Universitas. Novel / kumpulan puisi sastrawan sebanyak 25 eksemplar dibagikan kepada 25 mahasiswa yang wajib membacanya selama sebulan dan hadir dalam diskusi aktif dengan sastrawan tamu. Sastrawan tamu tersebut Abdul Hadi WM, Ahmad Tohari, Ajip Rosidi, Asrul Sani, Danarto, Hamid Jabbar, Nano Riantiarno, Nh. Dini, Putu Wijaya, Ramadhan KH, Rendra, Suminto A. Satuti, Sunaryo Basuki, Sutardhi Calzoum Bachri, Taufiq Ismail, Toeti Heraty, Wisran Hadi dan Zawawi Imron.

Lampiran Lima

Sanggar Sastra Siswa Indonesia, 2002

NO	KOTA	PEMBIMBING
1	Padang	Yusrizal KW
2	Palembang	Purhendi
3	Bandar Lampung	Iswadi Pratama
4	Serang	Toto ST Radik
5	Bandung	Erwan Juhara
6	Tasikmalaya	Acep Zamzam Noor
7	Cirebon	A. Syubbanuddin Alwy
8	Semarang	S. Prasetyo Utomo
9	Yogyakarta	Joni Ariadinata
10	Gresik	HU Mardiluhung
11	Sumenep	Hamzah Arsa
12	Tabanan	I Gusti Putu Bawa Samargantang

Lampiran 6

Antologi Sastra
Diterbitkan *Horison* untuk Perpustakaan Sekolah

Dari fansuri ke Handayani
4 abad sastra Indonesia
tebal 668 halaman
karya 147 sastrawan (79 penyair, 41 cerpenis, 21 novelis, 6 dramawan)
tiras 1.000 eksemplar, terbit Maret 2001
dihadiahkan kepada guru-guru peserta pelatihan MMAS dan perpustakaan sekolah tuan rumah SBSB (SMU, SMK, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren)
Penerbitan ditaja Ford Foundation

Horison Sastra Indonesia
perluasan dari *Fansuri ke Handayani*
4 jilid, karya 249 sastrawan, tebal 2.560 halaman, tiras 20.000 eksemplar, terbit Januari 2002.
Jilid 1 *Kitab Puisi*
(110 penyair, 526 halaman, tiras 5.000 eksemplar)
Jilid 2 *Kitab Cerpen*
(71 cerpenis, 720 halaman, tiras 5.000 eksemplar)
Jilid 3 *Nukilan Novel*
(41 novelis, 472 halaman, tiras 5.000 eksemplar)
Jilid 4 *Kitab Drama*
(27 penulis drama, 472 halaman, tiras 5.000 eksemplar)
Dihadiahkan kepada 4.500 perpustakaan SMUN dan sederajat
Penerbitan ditaja Ford Foundation

Kakilangit Sastra Pelajar
himpunan tulisan siswa terbaik disisipan *Kakilangit*, 2000-2001
tebal 310 halaman, tiras 5.000 eksemplar, terbit Januari 2002
174 puisi, 10 cerita pendek, 2 esai
karya siswa dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua
dihadiahkan kepada siswa pengarang dan 4.500 perpustakaan SMUN dan sederajat
Penerbitan ditaja Ford Foundation

REINTERPRETASI DAN REPOSISI TERHADAP ADAT DAN TRADISI "KASUS MELAYU ISLAM BERAJA DI SERDANG"

oleh:
Tuanku Luckman Sinar Basarsyah-II, SH

Di pesisir timur Sumatera menghadap Selat Melaka dari watas Aceh sampai ke watas Provinsi Riau terdapat 6 kerajaan maritim Melayu yang besar yaitu: Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Siak dan Pelalawan.

Dengan kekuatan senjata modern, Belanda dapat menaklukan kerajaan-kerajaan Melayu itu ditahun 1865, meskipun terdapat perlawanan bersenjata secara bergerilya, tetapi tidak kompak karena politik "devide et impera" Belanda. Terhadap kerajaan-kerajaan yang dirasanya Raja dan rakyatnya ekonomis yang potensial, maka Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perjanjian yang disebut "Politik Kontrak" di tahun 1907. Pasal-pasal yang penting adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Kerajaan itu berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda
2. Bahwa Raja tidak boleh megadakan hubungan dengan pemerintah asing
3. Bahwa urusan luar negeri, pertahanan, keizinan exploitasi tanah dan pertambangan, urusan keuangan berada di tangan Pemerintah Hindia Belanda
4. Bahwa Raja boleh mengadili kaulanya (orang Melayu, Karo dan Batak Timur) di dalam Mahkamah (Kerapatan), berdasarkan hukum Adat dan KUHP tetapi hukuman buang dan hukuman mati harus dengan izin Gubernur Jendral.
5. Semua hasil dari kerajaan itu 50% untuk Pemerintah Hindia Belanda dan sisanya untuk pembangunan di wilayah kerajaan itu
6. Urusan **adat dan agama** tetap berada di tangan kuasa Raja

Sumatera Timur menjadi kaya raya dan menghasilkan 1/3 devisa seluruh Indonesia. Raja memerintah didampingi oleh 4 Orang Besar yang mewakili rakyat. Sejak berdirinya Kerajaan Serdang di tahun 1723 M. Raja berkuasa atas 3 unsur yaitu:

1. sebagai kepala pemerintahan kerajaan
2. sebagai khalifatullah fi'l ard (Pemimpin Agama Islam)
3. sebagai kepala adat

Wilayah-wilayah kerajaan ini di Indonesia (Langkat, Deli, Sedang, Asahan, Siang, Pelalawan, Yogya, Solo, Pakualam, Pontianak, Kutai, Ternate, Tidore, Bacau, dan lain-lain kesemuanya 16 buah) disebut "**Zelfbestuurd Gebieden**" dan di luar itu wilayah yang dikuasai oleh Hindia Belanda disebut "**Gouvernement Gebieden**" seperti Tapanuli, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, dan Irian.

Raja Serdang menjalankan hukum kepada rakyatnya berdasarkan hukum syariah Islam mazhab syafii dan hukum adar, sesuai dengan pepatah "**Adat Melayu Bersendikan Hukum Syariah, Hukum Syariah Bersendikan Kitabullah**".

Raja menjalankan keadilan (kebenaran menurut Hukum Islam) dan menjadi pelindung rakyat. Sebaliknya rakyat mendukung Raja dengan "TAAT DAN SETIA". Peraturan Hukum Adat berdasarkan:

- Adat sebenar adat (sesuai dengan Hukum Alam)
- Adat yang diadatkan (berdasrkan konsensus Raja dan Orang Besar)
- Adat yang teradat (lahir dari resam dan kebiasaan masyarakat)
- ADAT ISTIADAT (Seremoni yang berlaku di Istanayang jika Raja berganti mungkin saja ini berobah pula

Ketentuan menurut hukum Islam dilaksanakan berdasarakan kuasa Raja kepada "Majelis ryar'i Kerajaan Serdang" yang terdiri dari para ulama dan pakar agama Islam. Ketentuan keadilan menurut hukum adat dipagari oleh Orang Besar Empat yang mempunyai kekuasaan menjatuhkan dan mengangkat Raja. Institusi Orang Besar Empat berdasarkan fenomena alam yang kokoh (binatang berkaki 4; adanya 4 penjuru alam dan asas tungku 4 sejarangan dan asas kekeluargaan di Serdang, yaitu: suami, istri, anak beru (menantu) dan Puang (mertua).

Menurut Prof. DR. Van Vollenhoven dan Prof. DR. Ter Haar, yaitu para bapak Hukum Adat Nuasantaraa, bahwa perilaku **kebiasaan** yang baik dituruti oleh masyarakat (zeden en gewoonten) dan itu merupakan **adat**. Pelanggaran terhadap adat yang diterima secara konsensus itu, berarti melanggar **Hukum Adat** dan dapat dikenakan **sanksi Sosial** (misalnya dikucilkan, dikecam) atau **sanksi pidana** (misalnya hukuman denda adat,

dibuang daari wilayah ataupun jadi **durhaka** terhadap kerajaan bisa dihukum mati).

Oleh sebab itu, relasi timbal balik antara Raja dan rakyat itu merupakan suatu "kontrak sosial" sehingga diformulasikan di dalam beberapa Pepatah Adat Melayu, seperti:

- "Tiada Raja, Tiada Adat"
- "Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah"
- "Biar mati anak daripada mati adat. Mati anaka gembar sekampung, mati adat gempar sebangsa"

Semua keputusan Raja haruslah dengan persetujuan Dewan Orang Besar dan segala sesuatu berdasarkan "Bulat air karena pembetung, bulat manusia karena mufakat".

Oleh karena Raja Sedang mempunyai 3 unsur kekuasaan itu, maka pemberontakan dianggap sebagai durhaka yaitu menggoncangkan keseimbangan harmoni masyarakat yang mengakibatkan disintegrasi masyarakat. Maka hukuman terhadap durhaka ialah hukuman mati. Tetapi, bukanlah pemerintahan berdasarkan hukuman adat itu bisa menjadi beku. Ia juga terpengaruh di dalam perjalanan zaman oleh perobahan. Hal ini tercantum di dalam Pepatah Adat "Sekali Air Bah, Sekali Tepian Berobah". Tetapi setiap perobahan itu tidak boleh lepas dari jati diri Melayu, yaitu:

"Seorang Melayu itu ialah beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat-istiadat Melayu " (Adat bersendikan Hukum Syara', syara' bersendikan Kitabullah).

Konsep "Raja adil, raja disembah, raja zalim raja disanggah", dapat kita temui pula di dalam hikayat-hikayat lama. Jika Raja itu zalim dilukiskan "Maka negeri itu sunyi sepi ditinggalkan rakyatnya, ibarat disambar oleh garuda...". Raja yang zalim itu sudah kehilangan daulat (pamornya).

Sebaliknya suatu kerajaan di mana Raja menjalankan keadilan dan bijaksana dilukiskan oleh Hikayat: "... maka negeri itu pun makmur sejahteralah. Ramailah saudagar datang ke bandar itu. Padi pun menguning dan rakyat banyak bersuka cita!".

Adapun menurut syarat Raja di Serdang itu harus adil, yaitu:

1. selalu ingat kepada Allah SWT dan melaksanakan Hukum Syariah
2. meneguhi sekalian janjinya kepada Wazir (Orang Besar) dan rakyat
3. jangan percaya apa yang datangnya dari musuh begitu saja

4. membeli kesayangan rakyat/wazir dan hulubalang
5. pemurah dan membalas jasa mereka itu dengan tertib
6. jangan Raja duudk dengan orang yang jahat budinya, orang yang suka memuji-muji
7. memeriksa dan menghukum dengan tertib sesuai qanun kerajaan
8. memegang adat pusaka yang qanun
9. adil, pengasih, arif bersusun, dan
10. bijak menilik zaman yang berobah seperti kata adat **sekali air bah, sekali tepian berubah**.

Baginda juga menasihatkan kepada putera-pueranya bagaimana seharusnya sifat seorang Raja yang baik yaitu sekurang-kurangnya mahir atas 8 perkara, yaitu:

1. tuah hati
2. bermurah manis
3. berlidah fasih
4. bertangan murah
5. menghukum yang adil
6. bersifat mengasihi hamba rakyat
7. menegakkan hukum dengan tegas
8. berjiwa berani

Adapun syarat-syarat untuk Orang Besar dan Kepala Luhak, Baginda menetapkan hal berikut.

1. Mereka adalah kayu besar di tengah padang tempat berteduh di hari hujan, tempat bernaung di hari panas, uratnya boleh tempat duduk, batangnya boleh tempat bersandar
2. Mereka kaya bukan karena emas tetapi karena mempertahankan adat pusaka undang yang kanun sejak dahulu kala
3. Janganlah mereka memerahkan rupa di muka rapat, menggertak menghantam tanah, menyingsing lengan baju, menjunjung barang yang berat.
4. Mereka tetap berdiri di pintu adat, alim ulama berdiri di pintu agama, pegawai berdiri di pintu sudah dan hulubalang berdiri di pintu mati
5. Kata Raja melimpahkan, Kata Orang Besar memperselesaikan, kata Alim Ulama kata hakekat, kata Hulubalang kata

mengeras, kata orang banyak kata bercampur, adat diatas tumbuh dan pusaka diatasnya, adat sepanjang jalan cupak sepanjang betung

6. Jika Negeri hendak selamat pagarlah dengan syara' dan adat, antara Orang Besar dengan Datuk, antara Bentara dengan Bentara, antara Hulubalang dengan Laskar, antara rakyat dengan rakyat, semua seia bersatu hati
7. Rumah sekata tengganai, kampung sekata tua, luhak sekata penghulu, berpucuk bak jala, berumpun bak manau, ke atas sepujuk ke bawah seurat, seRaja sedaulat, sehutang sepiutang, terjemur sama kering, terendam sama basah, maka jauhlah segala silang sengketa

Karena wilayah Kerajaan Sedang dan Wilayah Residensi Sumatera Timur itu menjadi aman dan makmur, maka berduyun-duyunlah sekalian bangsa di dunia dan etnis-etnis dari wilayah kekuasaan Gouvernement Gabidien (dari Tapanuli, Sumatera Barat, Jawa dan lain-lain), untuk menjadi buruh perkebunan, kerani di Pemerintahan Belanda dan perusahaan asing). Mereka sudah menjadi mayoritas, tetapi tidak berhak memiliki Tanah Adat di dalam wilayah kerajaan. Mereka tunduk kepada Hukum yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda karena mereka kaula (rakyat) Gubernemen Belanda.

Zaman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17-08-1945 s.d. 03-03-1946)

Ketika Jepang menyerah kalah, Indonesia (Soekarno-Hatta) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Karena communication yang buruk maka berita itu lambat ke Sumatera Timur. Barulah pada bulan Oktober 1945 diresmikan Gubernur Sumatetra R.I. di Medan, tetapi kekuasaan militer Jepang masih aktif disuruh olh *Allied Command*, mereka menjaga keamanan sampai nanti *Allied Forces* mendarat untuk membawa mereka pulang ke Jepang. Baru pada tangal 10 Oktober 1945 itu mendarat di Sumatera Timur (Belawan-Medan) Allied Forces dari Britsh Indian 26th Division dan diikuti oleh sedikit tentara Belanda. Sementara itu, bekas tentara bantuan Jepang bangsa Indonesia dan para pemuda revolusioner ramai membentuk Laskar bersenjata atas nama partai politik di samping Tentara Republik Indonesia sendiri. Hampir semua senjata diambil dari

tentara Jepang yang dengan senang menyerahkannya atau diselami di dasar laut yang dangkal yang dibuang oleh tentara Jepang itu. Disamping itu senjata diperoleh dari selundupan (smuggling) dari Singapura dan Malaya. Gubernur Sumatera R.I. lalu membentuk "Residen", "Controller" (Bupati) meniru masa Belanda dahulu. Maka terjadilah pelayanan umum (civil service) yang bersaingan dengan pelayanan umum (civil service) kerajaan Melayu. "Orang Pendatang" dan orang Komunis mulai menguasai partai politik dam Laskar Bersenjata dan Pelayanan Umum R.I. dan yang paling kuat persenjataan dan organisasinya ialah Laskar Pesindo dan Laskar Buruh yang dikuasai orang Komunis.

Pada akhir tahun 1945 hanyalah Sultan Siak dan Sultan Serdang yang secara aktip mengirim telegram kepada Presiden Sukarno bahwa kerajaan Melayu itu mendukung Pemerintahan R.I., tetapi Raja-Raja yang lain masih ragu-ragu. Pada tanggal 3 Februari 1946, Geburnur Sumatera memanggil seluruh Raja-Raja/sultan Melayu di Medan untuk menanyakan sikap mereka. Seluruh Raja-Raja/sultan Melayu membuat statement mendukung pemerintah R.I., dan segera akan membuat state council yang demokratik hasil utusan dari rakyat dan political parties. Tetapi secara sembunyi kaum komunis sudah mempersiapkan plan untuk menghapuskan kerajaan dan teken over pemerintahan kerajaan. Mereka membuat propaganda di surat kabar, radio dan pamflet (propaganda leaflets) serta nyanyian revolusioner "Darah Rakyat" dan issue fitnah palsu bahwa Raja-Raja Melayu itu sudah bekerjasama dengan Belanda dan mereka adalah feodal yang memeras dan menindak rakyat.

Meskipun sudah terlambat, beberapa Raja-Raja membentuk kesatuan bersenjata yang pro kerajaan, seperti "Partai Anak Deli Islam" oleh Sultan Deli di Sunggal. Sultan Asahan mempersenjatai pasukan Tentara Republik Indonesia di Tanjung Balai untuk menjaga Kesultanan. Sultan Sedang segera menyuruh keluarga bangsawan Melayu agar memasuki dan memimpin Tentara Republik Indonesia di Serdang serta menjadi pro Sultan, serta memasuki partai-partai politik Islam dan Nasionalis. Sultan Langkat mendapat senjata dari Jepang untuk Polisi Kerajaan Langkat, yang menjaga istana-istana Sultan Langkat.

Zaman Revolusi Sosial (3 Maret 1946)

Melihat situasi politik yang sudah meninggi suhunya ini, tiba-tiba Gubernur R.I. Sumatera berangkat mengadakan tour ke Provinsi Lampung di Selatan. Wakil Gubernur, Dr. Amir, membiarkan partai-partai politik kiri bebas bergerak dan membentuk "Flok's Blok". Pada tanggal 3 Maret 1946 pada jam 12 tengah malam secara serentak Flok's Front (People's Front) yang dipimpin orang-orang Komunis/kiri dikepalai oleh Presindo menyerbu istana dan kantor kerajaan Melayu dan diumumkan bahwa kerajaan Melayu telah dihapuskan oleh rakyat Indonesia. Mulailah rumah dan istana-istana diserang, dirampok hartanya, dan Raja/Sultan beserta Orang Besar dan para bangsawan serta pegawai kerajaan ditangkap dan sebagian dibunuh di tengah hujan atau dibenamkan di laut. Sultan Deli di Medan minta perlindungan British Indian Forces dan Istana Maimoon terkepung menjadi benteng dan keluarga Sultan berenang ke hutan bersembunyi dan malam hari minta perlindungan batalion Jepang di Tanjung Balai. Baginda lalu minta dibawa ke pusat Pemerintahan R.I. di Siantar dan lalu diinterner.

Pasukan Sultan Deli di Sunggal dapat dikalahkan oleh Pesindo. Istana dan rumah-rumah orang bangsawan Melayu dirampok dan dibakar, sehingga sebagian penghuninya berlindung di istana Maimoon yang dijaga oleh satu unit British Indian Troop. Istana Maimoon itu pun dikepung dan siang malam ditembaki tetapi tidak ada yang hancur dan tidak ada penghuni yang tewas. Sultan Deli kemudian mengungsi dengan keluarganya ke Perak (Malaya). Istana Sultan Langkat baik yang di Tanjung Pura (Darul Aman) maupun yang di kota Binjei diserbu dan isinya dirampok. Para bangsawan Langkat ditangkap dan sebagian besar dibunuh dengan kejam termasuk Pujangga Besar Tengku Amir Hamzah.

Puteri-puteri Sultan Langkat di depan matanya diperkosa (raped) oleh ketua Pengganas Pesindo, Komunis Marwan. Tengku-tengku di Asahan yang laki-laki semua dibunuh termasuk isteri Tengku Musa dan anaknya. Di Kesultanan Serdang, karena Sultan Sulaiman Shariful Alamshah (lahir 1866) sejak dahulu terkenal anti-kolonialism Belanda, dan banyak keluarga Kesultanan yang duduk di dalam partai politik dan di Tentara R.I., maka People's Front hanya dapat mengerahkan rakyat (kebanyakan rakyat pendatang) untuk berbaris demonstrasi meminta agar Kerajaan Serdang menyerahkan kekuasaan

pemerintahan kepada R.I.

Hal ini disetujui Raja dengan menyerahkan semua kekuasaan pemerintahan Kerajaan Serdang lalu diserahkan kepada Tentara Republik Indonesia, yang diterima komandan Batalion III, yaitu Kapten Tengku Nurdin, kemanakan dari Sultan Serdang. Sementara itu, di mana-mana istana dan rumah kaum bangsawan Melayu dirampok dan terjadi pembunuhan terhadap kaum bangsawan secara masal. Kaum bangsawan Melayu dari daerah-daerah mengungsi ke Istana Kota Galuh Serdang dan dikawal oleh Tentara Republik Indonesia. Satu bulan kemudian Menteri Amir Syarifuddin (salah seorang exponen Komunis) tiba di Serdang dari Jawa dan menghasut partai-partai dan laskar-laskar rakyat kenapa membiarkan "feodal" Sultan dan bangsawan Serdang di istananya. Dengan akal jahatnya Partai Komunis Indonesia berhasil memindahkan Kapten Tengku Nurdin dari Batalion III naik pangkat menjadi Komandan Resimen di Tanah Karo dengan pangkat Mayor. Tidak berapa lama kemudian semua kaum bangsawan termasuk perempuan dan anak-anak ditangkap dan dibawa ke perkampungan (concentration camp) di Simalungun dan Tanah Karo. Sultan Serdang dengan Permaisuri dan beberapa orang pembantu dipindahkan ke Istana Permaisuri dan Istana besar dirampok semua harta yang ada di situ dan lalu dijadikan headquater mereka. Pada tanggal 13 Oktober 1946, Sultan Sulaiman mangkat karena sakit dan usia tua dan dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di sebelah Mesjid Raya Perbaungan. Ketika Tentara Belanda mengadakan aksi militer tetrhadap Republik Indonesia, pasukan marinir Belanda mendarat di Pantai Cermin dan merebut ibukota Serdang (Perbaungan) dan seluruh rekan dan kompleks istana dibumihanguskan (*scorceharth policy* seperti yang dilakukan Uni Sovyet di Stalingrad pada Perang DuniaII).

Zaman Periode 1947 – Orde Lama

Ketika tentara Belanda mengungsi, Residen Sumatera Timur kembali (Juli 1947) dan masyarakat Melayu bersama etnis Karo dan Simalungun mendirikan "Negara Sumatera Timur" (NST) dan menjadi bahagian dari Republik Indonesia Serikat. Disebutkan di dalam pernyataan bahwa kerajaan-kerajaan Melayu akan dihidupkan kembali apabila suara "rakyat"

menghendakinya. Kaum komunis dan nasionalis mendesak agar RIS dibubarkan dan Presiden Soekarno memenuhi keninginan itu kemudian RIS dibubarkan dan kembali diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang unitaristic. Di dalam masa di mana kaum komunis dan Orang Pendatang yang anti-Raja berkuasa tidaklah mungkin lagi mendirikan Kerajaan Melayu Islam. Pada masa ini, tanah adat Melayu dirampas oleh petani komunis dan disingkirkan. Mereka dinista dan dicacimaki sebagai "bodoh" dan "pemalas" dan berada di dalam kemiskinan dan tidak mendapat bantuan Negara dan di negerinya sendiri dianggap sebagai *second class citizens*. Di dalam zaman ini 2 generasi orang Melayu hampir kehilangan identitas mereka. Mereka takut mengaku Melayu, takut memakai baju teluk belanga dan menambah gelar "marga" Batak di depan namanya supaya boleh masuk sekolah atau diterima di kantor pemerintahan. Mereka menghilangkan gelar "Tengku" atau "Wan" takut dicaci sebagai "feodal".

Zaman ini adalah masa kegelapan buat adat-budaya Melayu.

Zaman Orde Baru Dan Reformasi

Pada 30 September 1965 terjadilah kudeta (coup d'etat) Partai Komunis Indonesia yang secara segera dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata RI pimpinan Jendral Suharto. Sebahagian besar exponen PKI di Sumatera Timur yang di tahun 1946 membunuh dan merampuk kaum bangsawan Melayu, akhirnya giliran ditangkap dan dibunuh rakyat.

Mulailah timbul kesadaran dari masyarakat Melayu harus bersatu-padu dan menegakkan adat-budaya mereka kembali di tanah kelahiran mereka. Pada Pemuka masyarakat Melayu di Sumatera Timur dilindungi oleh Panglima Komando Wilayah Sumatera, Letnan Jendral Ahmad Tahir, mengumpulkan dan menyatukan sebanyak 17 organisasi massa Melayu dan membentuk payung organisasi bernama **"MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA" (MABMI)** di Medan pada tahun 1971.

Perjuangan MABMI itu tidaklah mudah, karena selama 2 generasi yang lalu, mereka kurang mengenal identias Melayu. Oleh sebab itu, gerakan MABMI melalui massa rakyat, haruslah dilakukan setapak demi setapak secara bertahap sebagai berikut:

Tahap I:
MABMI mempopulerkan di mana-mana dan juga di kalangan bangsa Indonesia identitas lagu dan tarian melayu, yang karena indah menjadi populer dan digemari masyarakat ramai.

Tahap II:
MABMI mempopulerkan adat istiadat perkawinan Melayu dan teluk belanga dan kebaya Melayu dan Sastra Melayu Lama (berpantun).

Tahap III:
MABMI mengadakan penerangan ke segenap pelosok daerah tentang kepahlawanan Melayu di masa lampau dengan menerbitkan buku-buku, ceramah di radio, televisi, dan media massa lainnya.

Tahap IV:
MABMI mempopulerkan definisi Melayu: "Orang Melayu beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat-istiadat Melayu". Adat Melayu bersendikan hukum Syara'q dan Syara'q bersendikan Kitabullah.

Tahap V:
MABMI memperjuangkan pengembalian Hak Tanah Adat Melayu yang diduduki oleh perusahaan Negara dan Orang Pendatang, paling tidak diberikan kompensasi. MABMI memperjuangkan agar orang Melayu duduk juga di dalam Civil Service ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tahap VI:
Jika menuntut Hak Ada Tanah dan Hak-Budaya Melayu haruslah ada "Kepala Adat/Sultan/Raja" di setiap bekas kerajaan karena berdasarkan "Kesatuan Hukum Adat" (territorial adat law) setiap negeri Melayu.

> **"Negeri beraja, luhak berdatok, kampung berpenghulu".**

Berdasarkan hal itu lalu di setiap bekas Kerajaan Melayu MABMI menyokong terbentuknya Lembaga Kerapatan Orang-Orang Besar (territorial chefs) yang diambil dari keturunan laki-laki dari

bekas Orang Besar (Datok/Kajeruan) di zaman kerajaan masih ada dahulu (1946).

Tahap VII:
Kerajaan Adat yang terdiri dari para Orang Besar lalu bersidang dan mengangkat (tabalkan) seorang **kepala adat/sultan** diambil dari keturunan anak laki-laki dari Sultan yang terakhir (Maret 1946).
Ini didasarkan kepada Pepatah Adat Melayu dan dasar Hukum Kerajaan Melayu yaitu:

- " **TIADA RAJA, TIADA ADAT**"
- Raja Melayu mempunyai 3 fungsi, yaitu:
  Kepala Pemerintahan (government) – Kepala Agama Islam (Khalifatullah Fi'l Ard) dan Kepala Adat-Istiadat.
  Bidang Pemerintahan dan bidang Kepala Agama Islam sudah diambil alih oleh Negara Republik Indonesia, tetapi bidang kekuasaan selaku Kepala Adat-Istiadat tetap ada kepada Sultan selagi masih ada rakyat/masyarakat yang mendukung adat istiadat itu.

Tahap VIII:
Karena berada di suatu negara yang berdasarkan "Demokrasi" dan dalam suasana keterbukaan bebas (Reformasi) sekarang di Indonesia, penegakan institusi beRaja itu haruslah mendapat simpati dari masyarakat adat pendukungnya terlebih lagi dari generasi muda yang tidak pernah mengalami zaman Kerajaan itu dahulu.
Oleh sebab itulah, ketika Kesultanan Serdang akan dipulihkan diadakan dahulu pertemuan dialog terbuka dengan pemuka masyarakat di mana diadakan tanya-jawab yang simpatik.

Ternyata masyarakat adat Melayu (terutama dari generasi muda) sangat antusias menyambut hal itu, bahkan mereka sendiri menjadi panitia (comittee) untuk melaksanakan upacara penobatan Sultan. Masyarakat Melayu ternyata sudah muak/bosan dengan suasana korupsi, caci-maki, brutal, kekerasan, penindasan hak asasi, sikap kasar, pornografi, narkotika, dan lain-lain, yang menurut penuturan ayah mereka dahulu dilarang oleh adat dan Raja. Di zaman dahulu dikatengahkan sopan santun, lemah lembut dalam kata dan tindakan serta kerukunan gotong royong masyarakat. Masyarakat kini sadar bahwa

propaganda kaum komunis tentang "kekejaman feodalis Raja-Raja", ternyata palsu karena ketika orang komunis/anti Raja berkuasa mereka lebih menindas rakyat lagi.

Bahwa institusi adat BeRaja pada bangsa Indonesia sudah lahir selaku hasil ciptaan bangsa kita sendiri sejak Ratusan tahun dan telah diuji sebagai suatu sistem yang terbaik disesuaikan dengan fenomena alam dan watak kita, karena buat orang Melayu "Alam ini menjadi Guru". Sistem BeRaja dengan institusi feodalis hanya tumbuh sejak abad ke-8 Masehi di Eropah. Raja Melayu yang Islam tunduk kepada ketentuan Hukum Islam yang benar dan adil serta membuat keputusan itu sesuai musyawarah mufakat dengan Orang-Orang Besar (adat/territorial chiefs) yang mewakili suara masyarakat. Kesultanan Deli telah Exist. Begitu juga Kesultanan Asahan.

Kesultanan Serdang telah pulih sejak masa Reformasi (2000-2002) dengan dikukuhkannya Kepala Adat Langkat pada tahun 2003. Pada bulan Agustus 2003 yang lalu Pemerintah Provinsi Riau telah membangun berdirinya kembali Istana Sultan Pelalawan (Kampar). Dalam tahun 2002 Bupati Langkat telah mendirikan Balairung Adat Langkat. Fenomena seperti ini juga terjadi di bekas Kerajaan Kutai di Kalimantan dan di Sumatera Barat. Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Utara mendukung dan mengharapkan sebagai partner semua kepala adat/sultan yang baru itu.

KESIMPULAN

Kebangkitan kembali institusi "BeRaja" di alam globalisasi di Sumatera Timur khususnya adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

I. Masyarakat Melayu menderita karena tipu daya orang pendatang dan Orang Komunis sehingga lepasnya hegemoni dalam pemerintahan, dalam hak tanah adat dan dalam institusi adat-budaya mereka;
II. Mereka melihat bahwa Raja dan keluarga bangsawan lainnya juga turut menderita bersama-sama dengan mereka dan terhina;
III. Bahwa di dalam suasana globalisasi dengan keterbukaan dan kebebasan kini perlu ada institusi adat BeRaja yang Islami

untuk dapat membendung pengaruh gempuran budaya negatip yang individualistik/capitalistik dan pornografis dari Barat sehingga kepribadian Melayu Islam tidak hilang;

IV. Kesadaran generasai muda Melayu yang telah membaca kegemilangan masa lampau berhasrat menuju masa depan yang cemerlang bersama institusi adat mereka menjadi Tuan Rumah di negeri sendiri;

V. Bahwa kemakmuran dan aman damai yang ditunjukkan institusi Melayu Islam BeRaja di Malaysia dan Brunei menjadi simbol inspirasi masyarakat Melayu di sini.

VI. Bahwa dalam alam globalisasi dan demokratisasi peranan adat akan memainkan unsur penting menegakkan jatidiri bangsa Indonesia sesuai watak perilaku mereka dan alamnya yang menjadi guru. Apakah akan terjadi "*Nicely blended transformation*" dalam budaya Indonesia yang akan datang?

DAFTAR LITERATUR

Milner, A.C.
1982 Kerajaan : Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule, Tucson : University of Arizona Press.

Prof. DR. B.
tt Ter Haar, Adatrechtbundels Nedelandsch-Indie. Beginselen en stelsel van get Adatrech.

Prof. DR. C. Van Vollenhovenm,
tt "Het Adatrecht van Nedelandsch-Indie".

Panuti H.M. Sudjiman
1983 Adat Raja-Raja Melayu", U.I. Press.

G. J. Resink
1987 Raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia, Jembatan Jakarta.

Tengku Luckman Sinar, SH.
1971 Sari Sedjarah Serdang, MABMI Medan.
1995 Pantun dan Pepatah Melayu, Medan.
2001 Jatidiri Melayu", Medan.
2002 "Kebudayaan Melayu Sumatera Timur", (USU Press, Medan 2002).

Tuanku Luckman Sinar Basarsyah-II,SH
2003 Peranan Adat dalam Pembangunan", Majalah FORKALA, Medan Agustus.
2003 Kronik Mahkota Kesultanan Serdang, Penerbit Yandira, Agung, Medan.

WHM. Schadee
1998 Geschiedenis van Sumatra's Oostkust", I dan II (1919) Indonesia, Jakarta.

Tengku Nurdin
1998 Bara Juang Nyala di Dada, Yayasan Penerbit Biografi Indonesia, Jakarta.

DR. Anthony A. Ried
tt "The Blood of the People".

DR. SL. Van der Wall,
tt "Officieele Bescheiden Betreffende de Nederlandsch-Indonesische Betrekkingen 1945-1950" ("Terugkeer Naar Ned. Indie", p.588, Vol.I)

Rajendra Singh
tt "Post-war Occupation Force" (Medan Area).

Majalah Tempo
24-09-1988 tentang keterlibatan PESINDO dengan PKI.

Tengku Yusuf Aziddin
1948 "Revokutie Antie-Sociaal", Tanjung Balai, 08-07-1948.

Hj. Jumaat bin Dato' Hj. M. Noor.,
2002 Sekalung Budi, Seuntai Bahasa Desan Bahasa dan Pustaka Malaysia – K. Lumpur.

Prof. DR. Datuk Abd. Latif Abubakar (ed.)
2001 Adat Melayu Serumpun", Univ. Malaya Press K.L..

A. Aziz Deraman cs,
tt "Kamus Peribahasa", Selangor Darul Ehsan.

John Anderson
1826 Mission to the Eastcoast of Sumatra", Edinburgh

MULTIKULTURAL DAN REKONSILIASI MENGHINDARI KONFLIK GENERASI KETIGA*

Oleh: **Usman Pelly**
Universitas Negeri Medan (Unimed)

Sejarah panjang perjuangan masyarakat pluralis di dunia pada penghujung abad XX akhirnya memproklamirkan diri : *"We are all multiculturalist now !"* (Glazer 1977). Multilkulturalisme adalah sebuah ideology dan pengakuan terhadap keragaman (pluralitas) dalam kesederajatan, untuk menegakkan demokrasi, keadilan, HAM dan kesejahteraan masyarakat (Rex 1985; Reed 1991; Jary 1991; Fay 1996; Banks and banks 1997). Secara konseptual, model budaya multikultural ini, telah dikemukakan oleh *"founding father"* (pendiri republik) Indonesia dalam mendesain pengembangan budaya Indonesia dimasa depan, sebagaimana terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 (asli), yang berbunyi : "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah" (Suparlan 2002).

Oleh karena itu, seharusnya dalam membangun masyarakat dan kebudayaannya tidak ada dominasi kelompok masyarakat atau budaya tertentu terhadap yang lain. Dalam suasana keragaman (pluralitas), kesederajatan dan keadilan, puncak-puncak budaya daerah yang dirajut dan dirangkai, itulah yang akan menjadi cikal bakal budaya nasional. Akan tetapi apa yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan di republik ini adalah dominasi kelompok masyarakat budaya tertentu kepada yang lain. Sementara itu, secara politis dan ekonomis terjadi proses marginalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap secara potensial akan menjadi ancaman terhadap kekuasaan rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Keadaan itu telah menyebabkan konflik bergenerasi antar kelompok masyarakat (konflik horizontal) dan konflik antar masyarakat/ pemerintah daerah dan pusat (konflik vertical) dan generasi

---

* Makalah dipersiapkan untuk : Kongres Kebudayaan V dalam thema "Pluralistas dan Rekonsiliasi", Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bukit Tinggi, 21-23 Okt 2003

dengan pelaku dan intensitas yang berbeda.

Makalah ini akan melihat bagaimana masyarakat multikultural dapat dijadikan sebuah kerangka pengelolaan *(a framework for managing plural society)* antar kelompok ertnis, agama, antar masyarakat dan pemerintah, dan antar pemerintah daerah dan pusat, agar konflik generasi ketiga tidak terjadi di Indonesia. Otonomi daerah yang sekarang sedang berjalan, dari satu sisi akan dapat dijadikan landasan structural mengembangkan masyarakat multikultural yang sehat. Pada tataran itu, diharapkan proses rekonsiliasi dapat dikembangkan untuk mencegah munculnya konflik generasi ketiga. Akan tetapi apabila otonomi daerah ini tidak berhasil, maka konflik generasi ketiga tidak dapat dihindarkan. Berbeda dengan konflik generasi pertama dan kedua, konflik generasi ketiga akan menggunakan struktur otonomi daerah di tingkat provinsi yang semakin homogen (dari segi agama dan budaya) sebagai senjata ke arah "balkanisasi" republik ini.

1. Konflik Generasi Pertama dan Kedua

Dua konflik yang terjadi di Nusantara berselang rata-rata satu generasi di bawah dua periode (rezim orde lama dan orde baru) telah berlangsung sebagai berikut :

(1) Konflik generasi pertama : era Orde Lama, di bawah pemerintahan rezim Soekarno (1945 – 1965) :

Berbagai pergolakan daerah muncul dalam bentuk konflik bersenjata seperti : Jawa Barat (DI/TII Karto Suwiryo), Sulawesi Selatan (DI/TII Kahar Muzakar), Aceh (DI/TII Daud Barureuh), Maluku (RMS), Sumatera Utara dan Sumatera Barat (PRRI Syafruddin Prawiranegara-Mohd. Natsir) dan Sulawesi Utara (Permesta V, Samuel) Konflik pusat dan daerah ini diselesaikan dengan kekuatan militer.

(2) Konflik generasi kedua : era Orde Baru, dibawah pemerintahan rezim Soeharto (1967-1996) :

Selama 30 tahun pemerintahan Soeharto, telah terjadi berbagai penindasan dan adudomba *(devided and ruled)* kelompok-kelompok etnik tertentu dengan berbagai cara. Reaksi politik represif selama 30 tahun itu sebagian besar muncul pada akhir dan era kejatuhan rezim Soeharto dan bangkitnya gerakan Reformasi. Berbagai peristiwa konflik kelihatannya merupakan konflik horizontal (antar kelompok etnik dan agama), tetapi

sebagian besar pada hakekatnya adalah konflik vertikal (antar kelompok tertentu dengan pemerintah yang berkuasa). Peristiwa tersebut antara lain : Pembakaran Pasar Glodok (Peristiwa Mei Kelabu) di Jakarta, yang menjadi sasaran adalah kelompok etnis. Keturunan Tionghoa (sebelumnya telah terjadi di Medan kemudian di Bandung, Solo, dan Makasar). Peristiwa Ambon-Maluku (Pertarungan antara BBM / Bugis-Buton-Makasar dan Ambon Islam melawan Ambon Kristen). Peristiwa Sambas dan Palangkaraya (Kalimantan) (Pertarungan antara Dayak, Melayu dan Tionghoa melawan Madura), Peristiwa Poso (pertarungan antara kelompok Islam dan Kristen yang disertai oleh unsur-unsur dari luar), Peristiwa Sumbawa (NTT) perkelahian antara orang Sumbawa dan Bali, peristiwa Aceh (pertarungan antara orang Aceh dan transmigrasi Jawa). Adapun peristiwa Aceh pasca Presiden Soeharto (GAM) dapat dianggap peristiwa babak kedua usaha orang Aceh memisahkan diri dari NKRI, yang dianggap sebagai gerakan separatisme bersenjata.

Dewasa ini konflik generasi kedua sedang dijinakkan dengan pemberian otonomi daerah. Akan tetapi otonomi daerah ini sampai sekarang tidak menghasilkan demokratisasi dan efisiensi birokrasi daerah (Jaweng 2003), dan pemerintah pusat menurut Prof. Ryaas Rasyid (2003), tidak ikhlas melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya. Lahirlah UU Otonomi Daerah No. 22/1999 itu pun merupakan suatu keterpaksaan demi meredam gejolak bangkitnya era reformasi. Dalam prakteknya, otonomi daerah hanya sekedar mem-*"by-pass"* kekuasaan gubernur di tingkat provinsi dan memekarkan *"hot-line"* antara bupati atau walikota dengan pemerintah pusat. Pejabat kabupaten dan kota berbondong-bondong ke pusat menghadap dan mengharapkan tambahan dana atau "rezeki" lain. Tambahan rezeki ini disebut oleh pejabat-pejabat pusat sebagai "perekat wawasan negara kesatuan". Pusat tetap merupakan pemilik kuasa *(power)* yang tidak tertandingi. Otonomi daerah yang terkesan sebagai "otonomi setengah hati" ini telah memarakkan korupsi "besar-besaran", baik di tingkat pusat dan daerah. Dewasa ini aktor korupsi itu tidak hanya terpusat di lembaga eksekutif pusat atau daerah saja, tetapi telah meluas ke lembaga legislatif dan yudikatif. Sementara itu pasca era Soeharto ini, masih menyisakan konflik generasi kedua yang berkepanjangan, seperti di Aceh (Darurat Militer), Maluku, Papua dan Poso.

2. Menuju Masyarakat Multicultural yang Sederajat dan Berkeadilan

Masyarakat pasca Orde Baru seyogyanya telah menata kehidupan baru dengan bangunan masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural tidak hanya mengakui pluralitas kelompok etnik dan budayanya sebagai setumpuk keanekaan, tetapi berusaha merangkai dan merajut keberagaman itu dalam kesederajatan dam keadilan dalam kesejahteraan, sehingga merupakan sebuah permadani mosaik yang indah. Masyarakat Indonesia yang pluralis itu sejak kemerdekaan telah bertekad untuk hidup bersama dalam sebuah "nation state" (negara bangsa) Negara bangsa yang bernama Indonesia itu bukanlah ciptaan atau kepunyaan sebuah kelompok etnik majoritas tertentu yang selalu merasa berhak mendominasi kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Ambisi politik pemerintahan pusat yang di dominasi oleh kelompok tertentu pada dua era pemerintahan (Orde Lama dan Orde Baru) telah menuai konflik dua generasi di Indonesia. Pada generasi pertama pergolakan daerah pertama bangkit di Jawa Barat dan disusul oleh Sulawesi Selatan, sebagai aksi protes terhadap kebijakan dan ketidakadilan dalam penentuan kepemimpinan nasional. Konflik kemudian disusul oleh daerah-daerah pinggiran nusantara. Masyarakat Aceh, yang selama revolusi pisik di juluki sebagai "daerah modal" Republik , merasa dikhianati, karena sesudah kemerdekaan ditanggalkan status provinsinya dan dipaksa bergabung dengan provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat dan Sumatera Utara merasa disisihkan dalam kepemimpinan nasional dan tidak menyetujui peranan PKI dikembalikan, Sulawesi Utara merasa tidak dihiraukan, Maluku merasa disisihkan dan tidak dihiraukan, adalah contoh-contoh betapa reaksi daerah terhadap pemerintah pusat pada era Bung Karno yang berusaha menguasai secara monolitik.

Sebenarnyalah, menurut paradigma *"indic cosmology"* Jawa (Geertz, 1998) kalau seorang Raja ingin memperbesar kekuasaan di pinggiran nusantara itu, seperti Aceh, Sulawesi Utara, Maluku atau papua. Oleh karena itu, konflik generasi pertama sangat jelas merupakan "konflik vertical" yaitu konflik antara masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat. Konflik ini berhasil dipadamkan dengan kekuatan militer dan negoisasi yang dipaksakan, sehingga Bung Karno dapat secara leluasa

menegakkan kekuasaan absolut.

Pada Era Orde Baru Soeharto, untuk mempermudah menguasai nusantara secara lebih etis, rezim ini menggunakan kebijakan kolonial "devided and ruled" (pecah dan kuasai), terutama daerah-daerah di luar Pulau Jawa, pemerintah telah melakukan *"bufferages system"* (sistim penyangga) (Pelly 2001, 2003). Sistim penyangga ini merupakan semacam *"social engeneering"* (rekasaya social) dalam rangka pembangunan piramida social suatu kelompok masyarakat di daerah. Golongan menengah atau masyarakat papan menengahnya diusahakan agar didominasi oleh kelompok etnik yang dianggap dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat (biasanya adalah kelompok etnik migran di daerah itu), sedang kelompok-kelompok etnik asli di daerah itu dibiarkan tetap berada dilapisan papan bawah, terutama kelompok-kelompok etnik yang pernah membangkang atau tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini pemerintah pusat akan aman dan leluasa melakukan kontrol dan menguras kekayaan alam daerah itu..

Dengan kekuasaan politik dan tekanan militer (ABRI), lapisan menengah ini dapat diciptakan seperti di Sumbawa golongan menengah yang rencanakan adalah orang Bali, di Kalimantan Barat dan Tengah orang Madura, di Aceh transmigran Jawa, di Ambon/Maluku BBM (Bugis, Buton dan Makasar), dan Ambon Islam, di Sumatera Utara dan DKI Jakarta, WNI Keturunan Tionghoa. Atau pemerintah Orde Baru dapat tetap menghidupkan ketegangan antar agama seperti di Poso dan Ambon. Transmigrasi, juga dijadikan alat untuk mengembangkan kelas menengah baru, dan kelak akan berfungsi sebagai "koloni-koloni" pemerintah pusat di daerah tertentu. Seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam kasus Aceh dan papua, Jakarta telah berhasil mendominasi populasi Lampung dan Kalimantan Timur dengan mendatangkan tranmigran Jawa. Hal ini diakui oleh Siswono Hudohusono, yang menjadi Menteri Transmigrasi pada periode rezim Soeharto, bahwa salah satu tujuan transmigrasi di zaman Soeharto adalah dalam rangka "kolonisasi" Jawa terhadap penduduk asli setempat (Newsweek, 2000). Oleh karena itu, proyek transmigrasi sesudah jatuhnya Soeharto dihentikan.

Sesudah era Soeharto dan bangkitnya era reformasi di mana kekuasaan tangan besi Soeharto berakhir, maka ledakan konflik

terjadi di mana-mana. Dari segi antropologis konflik yang terjadi seperti di Aceh, Kalimantan, Sumatera Utara, Jakarta, Sumbawa, Poso, Maluku dan Timika (Papua), adalah akses politik *"bufferages"* dan kolonisasi rezim Soeharto. Konflik yang ditanam di zaman Soeharto dan meledaknya pada era kejatuhannya, pada hakekatnya adalah konflik vertical (konflik antara kelompok masyarakat etnik tertentu dengan pemerintah pusat-Jakarta). Orang-orang Madura di Kalimantan Barat atau orang Bali di Sumbawa, orang Jawa di Aceh dan keturunan Tionghoa telah dijadikan instrumen (alat) politik *"bufferages"* rezim Soeharto.

Apa yang menyebabkan rangkaian mosaik masyarakat multikultural Indonesia itu terkoyak dan bolong disana sini, adalah karena dampak konflik di dua generasi tersebut. Konflik generasi kedua di Poso, Ambon, Timika (Papua), Sambas dan Aceh masih tersisa sampai sekarang ini telah menjadi beban pemerintahan Megawati. Lebih dari setengah abad masyarakat Indonesia berusaha merajut mosaik budaya multikulturalisme, tetapi kedua rezim Orde Lama dan Orde Baru, karena ambisi politik dan keserakahan untuk menguras kekayaan alam daerah-daerah telah merusak dan mencabik-cabiknya rangkaian mosaik itu.

3. Multikulturalisme dan Otonomi Daerah

Sebagai sebuah ideology dan wahana, multikulturalisme bertujuan untuk meningkatkan derajat dan kemanusiaan masyarakatnya, maka budaya multicultural seperti yang dicita-citakan oleh *"founding father"* (1945) harus dilihat dalam perspektif fungsinya dalam masyarakat (Suparlan 2002). Berbagai aspek kebudayaan nasional seperti aspek politik, ekonomi dan organisasi social kemasyarakatan bukanlah hasil dominasi satu kelompok etnik tertentu terhadap kelompok budaya lainnya seperti yang diinginkan oleh rezim Orde Baru. Setiap budaya kelompok etnik atau agama dapat memperkaya budayanya dengan puncak-puncak kebudayaan lainnya yang ada di nusantara secara sukarela (voluntary innovation).

Sungguhpun orang Jawa misalnya, menganggap budayanya *"adiluhung"* (sangat tinggi), tetapi tidak ada hak mereka untuk memaksakan sikap etnosentrik itu kepada orang lain. Dalam masyarakat multikulturalis, disamping pengakuan terhadap pluralitas, keanekaan budaya kelompok-kelompok etnik, tetapi juga ada pengakuan kesederajatan antar kelompok dan

budayanya itu. Dan hal ini sangat penting dalam usaha merajut kebudayaan nasional yang mosaik itu. Sayangnya, kriteria kesederajatan ini telah hilang dikorup oleh rezim Orde Lama dan Orde Baru. Karena itu sikap merendahkan, meminggirkan, atau menjadikan sekelompok masyarakat etnik tertentu seperti orang Aceh, orang Dayak atau Papua untuk menerima posisi sebagai kelompok orang yang *"kalah abadi"* (under-dog), sangat bertentangan dengan ideology multikulturalisme. Oleh karena itu pula orang-orang yang merasa telah disingkirkan atau dikalahkan di zaman Orde Baru ini bangkit, mendobrak tatanan yang ada dan berusaha agar tatanan baru yang adil dibangun kembali (Pelly 1998).

Sebagai sebuah ideology *(way of life)*, multikulturalisme harus terserap secara operasional ke dalam semua pranata kehidupan, terutama dalam interaksi bersama di berbagai struktur kehidupan. Implimentasi multikulturalisme ini seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak terutama dari pemerintah daerah dan pusat, karena mereka berfungsi sebagai manager masyarakat yang bertanggung jawab untuk tidak terulangnya lagi konflik pada generasi ketiga yang akan datang. Penerapan multikulturalisme sangat penting diprioritaskan terutama dalam struktur kehidupan ekonomi (persamaan akses terhadap semua sumber ekonomi), dalam struktur sosial (menghormati martabat semua orang termasuk dari kelompok etnik yang dianggap sangat minoritas), penegakkan HAM, politik pemerintahan dan dalam bidang pendidikan.

Dalam kehidupan politik, dengan adanya otonomi daerah masyarakat multicultural akan memiliki wadah untuk mengembangkan diri, terutama dalam kehidupan demokrasi yang sehat, penegakkan HAM dan kesederajatan dihadapan hukum serta kekuasaan. Akan tetapi, sebagaimana diutarakan dimuka otonomi yang sekarang sedang berjalan adalah "otonomi setengah hati", berbagai kelemahan masih menjadi kendala dalam usaha untuk mengembangkan masyarakat dan budaya multicultural. Kelemahan otonomi daerah terletak setidaknya pada tiga pokok persoalan yang cukup mendasar, yakni sebagai berikut :

(1) Desentralisasi kekuasaan (dalam UU No. 22/99) tidak simentris (berat sebelah) dengan desentralisasi keuangan (dalam UU No. 34/2000), sehingga terjadi ketimpangan.

Umpamanya tentang pajak retribusi, pemerintah kabupaten/ kota hanya kebahagian jenis pajak kurus yang tidak banyak membantu peningkatan PAD mereka. Begitu juga dengan dana perimbangan, melalui UU No. 25 dan PP No. 104/2000, pusat dengan cerdik telah memainkan psikologi angka presentase bagi hasil pajak negara yang tidak signifikan (seperti PBB) dibuat besar untuk jatah daerah, sedangkan bagi hasil pajak gemuk (PPh perorangan) dan sumber daya strategis (seperti migas) untuk daerah sangat kecil. Banyak mandat atau kekuasaan yang diberikan kepada daerah otonomi tidak terbiayai *(unfounded mandate)*, kemudian mandat tersebut menjadi beban daerah.

(2) Secara keseluruhan UU No. 22/1999 hanya mengatur "Pemerintah Daerah" dan bukan mengatur "Otonomi Daerah" . Pemerintah daerah merupakan sebahagian dari otonomi daerah, sehingga tidak ada pengaturan partisipasi warga dalam segala aktifitas lokal dan pusat. Menurut Robert E. Jaweng (2003), hal ini berakibat serius "Transfer kewenangan macet ditangan *lokal dan elite*, menurutnya, mandat "mengatur sendiri kebijakan", menjadi "sendirian mengatur ". Dan amanah "mengurus pelayanan masyarakat" menjadi "mengurus diri sendiri", dan atau "ingin dilayani masyarakat". Kelemahan ini menyebabkan sampai sekarang kita tidak menggapai target utama dari otonomi daerah itu, yaitu demokrasi politik dan efisiensi birokrasi di daerah.

(3) Lemahnya perwakilan daerah di pusat. Dalam UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR/DPRD, dan DPD yang disyahkan pada bulan Juli 2003 yang lalu, menunjukkan betapa sedikitnya jumlah anggota DPD dan kecilnya perannya dalam percaturan nasional. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya representasi masyarakat lokal yang memiliki otonomi itu sangat diabaikan.

Dalam kapasitas dan kualitas otonomi daerah seperti sekarang ini sangat sulit bagi masyarakat untuk mengimplimentasikan ide multikulturalisme baik dalam hubungan perorangan maupun dalam kelembagaan. Apalagi dalam kaitan hubungan masyarakat lokal dengan pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat.

4. Konflik Generasi ketiga

Seperti dinyatakan dalam pengantar makalah ini berbeda dengan konflik generasi pertama dan kedua, pada konflik generasi ketiga para aktornya telah "berdomisili" pada wilayah-wilayah nusantara yang berstatus otonomi. Sungguhpun daerah otonomi tidak ditekankan pada provinsi, tetapi pada tingkat kabupaten, tetapi baik pemekaran provinsi maupun kabupaten sangat didasarkan pada *"homogeneous"* unsur-unsur primodial masyarakat daerah itu ketimbang ekonomi. Seperti provinsi-provinsi yang lahir setelah UU No. 22/1999, Maluku Utara (majoritas Islam) memisahkan diri dari Maluku Selatan (majoritas Kristen), Gorontalo (majoritas Islam) memisahkan diri dari Sulawesi Utara (majoritas Kristen), atau Banten (majoritas kelompok etnik Banten), memisahkan diri dengan Jawa Barat (majoritas kelompok etnik Sunda) dan Tapanuli (majoritas Batak-Kristen) sekarang ingin memisahkan diri dari Sumatera Timur (majoritas Islam), menunjukkan bahwa provinsi-provinsi makin lama makin homogen dari segi budaya dan agama.

Keadaan homogenitas ini akan membangunkan *"link"* (hubungan yang terkait erat) antara identitas diri (etnik dan agama) dengan politik (Jacobson 2003). Mobilisasi politik dimasa yang akan datang di provinsi-provinsi itu akan menggunakan semangat dan sentimen identitas diri (loyalitas primodial) sebagai ideologi politik provinsi, terutama dalam menghadapi pemerintah pusat (Jakarta). Situasi konflik pada generasi ketiga akan lebih berbahaya dibandingkan dengan konflik pada generasi sebelumnya.

6. Kesimpulan

Apabila kebijakan strategis untuk mengisi dan memperbaiki ketimpangan Otonomi Daerah terutama di bidang ekonomi dan politik tidak dapat dilakukan, maka proses ke arah implikasi multikulturalisme dan rekonsiliasi (rujuk nasional) sangat sulit untuk dilakukan. Bahwa republik ini bukan lagi sebuah *"given"* yang berada pada tataran motologi, tetapi dia sebuah realita yang harus diperjuangkan dan diberi makna bersama. Adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan mawas diri dan penuh waspada.

Bahkan apabila tidak terjadi perobahan pada UU No. 22/1999 dan UU lainnya yang mengatur Otonomi Daerah serta kebijakan

pemerintah pusat dalam mendorong multikulturalisme, maka konflik yang tersisa (Aceh, Maluku, Poso, dan Papua) serta konflik yang akan muncul, seluruhnya akan dialamatkan kepada pemerintah pusat. Apa yang terjadi adalah munculnya generasi ketiga di Indonesia yang mengarah pada "balkanisasi".

PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

Oleh: **Utusan Provinsi Bengkulu**

A. Pendahuluan

Tentunya kita sepakat bahwa istilah melestarikan mencakup, antara lain, pengertian memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan. Dengan demikian, pelestarian berarti proses serta upaya-upaya aktif dan sadar bertujuan dari sekelompok masyarakat untuk memelihara, menjaga dan mempertahankan, serta membina, dan mengembangkan suatu hal (benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide).

Adapun cakupan pengertian yang terkandung dalam istilah kesenian tradisional pada hakikatnya cukup luas. Kesenian tradisional dapat merangkum, antara lain, unsur-unsur seni sastra, seni rupa, gerak dan tari, seni suara, serta musik. Dalam *seni dendang* di Provinsi Bengkulu terangkum seni musik dan seni suara. Juga *tari adat* dalam rangkaian *bimbang* tercakup seni musik, gerak, serta seni suara dan susastra. Selanjutnya, fakta historis dan aktual memperlihatkan kepada kita bahwa *kesenian tradisional* berkaitan secara timbal balik serta merupakan bagian dari aktivitas dan pola hidup masyarakat pendukungnya. Tidak jarang kesenian tradisional berhubungan *ritus/upacara tradisional* dan dengan demikian bertalian dengan kebudayaan masyarakatnya. Kesenian dapat dipandang sebagai refleksi kebudayaan masyarakatnya.

Ambil satu contoh yang disebut *bekayekan* (pada masyarakat Pasemah) atau *kayiak beterang* (pada masyarakat Serawai) atau *min cupik may blowa* (pada masyarakat Rejang) di Provinsi Bengkulu, atau kesenian tradisional Bengkulu lainnya, seperti tari pencak pedang dan tadutan. Bekayekan atau kayiak beterang atau min cupik may biowa merupakan upacara tradisional yang bersumber pada pandangan masyarakatnya tentang 'anak', tentang hakikat dan perjalanan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, upcara tradisional merangkum seni susastra, berupa syair-syair atau doa-doa yang diucapkan sang dukun sebagai pemimpin upacara; serta seni tari karena si anak

yang dikayek harus menari. Dalam tari pencak pedang ada unsur seni tari dan seni musik; jurus-jurus dalam pencak pedang adalah seni gerak (mempertahankan dan menyerang) dalam iringan musik serunai dan gendang. Pelaksanaan tari pencak pedang bertalian dengan pesta adat atau upacara sakral lainnya. Dalam ritus tradisional *nyialang* terdapat unsur seni susastra, berupa *kidun* atau *dunday*, semacam syair yang dilantunkan pawang dan orang-orang yang terlibat dalam mengambil madu lebah pada pohon sialang. Demikian juga dengan kesenian *tadutan* (pada masyarakat Serawai dan Pasemah). Tadutan memanfaatkan unsur susastra dan seni suara secara optimal. Tadutan merupakan sarana dakwah, silaturahmi, dan rasa syukur. Unsur seni susastra dimanfaatkan secara optimal karena ide-ide tentang tauhid dan fikih dikemas dalam komposisi bahasa (daerah) yang indah, penuh kias dan halus. Unsur seni suara dimanfaatkan karena teks-teks tadutan dilantunkan oleh seorang *pendulu* (pemimpin) yang kemudian diikuti oleh pengiringnya.

Beberapa ilustrasi yang sederhana sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan adanya tautan berbagai unsur seni dalam pelaksanaan atau pertunjukan kesenian tradisional. Selain itu, koteks penyelenggaraan kesenian tradisional memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara kesenian itu sendiri dengan pranata kebudayaan masyarakatnya. Konteks penyelenggaraan kesenian tradisional lazimnya tertentu: waktu, tempat, pelibat, peralatan, serta tujuan yang tertentu dan dalam kerangka kebudayaan pendukungnya. Bekayekan terkait dengan pranata domestik, pranata sosial, dan religi, sementara tari adat dalam rangkaian bimbang lebih terkait dengan pranata sosial (kinship atau kekerabatan dan organisasi sosial).

Dapatlah dikatakan bahwa kesenian tradisional merupakan teras atau inti kebudayaan masyarakat pendukungnya. Kesenian tradisional dalam banyak hal mewadahi kebudayaan masyarakatnya, yaitu pandangan, sikap dan pola perilaku anggota masyarakat itu tentang dirinya sendiri, kelompoknya, lingkungannya, serta tentang hakikat dan tujuan hidupnya. Perubahan kebudayaan dalam arti perubahan pandangan, sikap dan pola perilaku masyarakat biasanya dapat dilihat dari berubahnya (misalnya surutnya) apresiasi masyarakat yang bersangkutan terhadap kesenian tradisionalnya.

B. Muatan Kesenian Tradisional

Jika kita cermati secara saksama, muatan atau kandungan kesenian tradisional pada dasarnya sangat luas dan dalam. Pemahaman yang mendalam terhadap totalitas, latar belakang, dan konteks kesenian tradisional akan mengantarkan kita kepada pemahaman akan maknanya secara mendalam pula. Kesenian, dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai gerak semata, atau bunyi yang berirama semata, atau rupa dan ungkapan-ungkapan semata. Muatan kesenian tradisional bukan hanya yang terlihat atau yang terdengar, melainkan juga yang melatarbelakangi dan yang menjadi tujuan atau maksudnya, berupa ide-ide yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam tari adat dalam rangkaian bimbang misalnya, terkandung muatan kinship (kekerabatan) dan organisasi sosial. Sebab, penari bujang dan penari gadis dalam tari muda-mudi dalam rangkaian tari adat diisyaratkan yang tidak sekerabat atau yang berbeda marga. Ide ini bertalian dengan konsekuensi dan tujuan tari muda-mudi dalam rangkaian tari adat, yaitu sebagai medium komunikasi bujang dan gadis untuk mencari, mendapatkan dan menjalin hubungan dengan calon pasangan hidup mereka. *Rejung* yang dilantunkan bujang dan gadis dalam tari muda-mudi penuh kias dan mencerminkan kehalusan serta kesantunan dalam berkomunikasi. Menyindir atau menyatakan keraguan secara halus dan santun, tercermin dalam pilihan kata atau ungkapan dalam bait-bait rejung.

Dalam pertunjukan *nandai* atau *guritan*, yang biasanya diselenggarakan dalam suatu bagian rumah tradisional yang disebut 'luan' hanya laki-laki dewasa yang boleh duduk satu ruang dengan *tukang nandai*, sementara perempuan dewasa mendengarkan dari ruang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tata ruang rumah tradisional bertalian dengan fungsi dan status sosial warga masyarakat itu. Teks-teks nandai atau guritan yang pada umumnya menguraikan lingkungan hidup (life cycle) mensyaratkan hanya laki-laki dan perempuan dewasa yang boleh mendengarkan nandai atau guritan. Hal ini bertalian dengan kecukupan dan kelayakan psikologis pendengar terhadap isi atau kandungan teks nandai atau guritan serta maksud dan tujuan penyajiannya. Masalah-masalah hakikat hidup, asal mula hidup, tujuan hidup, rangkaian kehidupan yang

harus dilalui dan dijalani di dunia fana, serta masalah-masalah hidup sesudah mati, masalah-masalah yang gaib hubungannya dengan hakikat manusia, merupakan masalah-masalah yang baru bisa dikonsumsi oleh mereka yang telah dewasa.

Berbeda dengan kesenian lisan seperti dongeng pada umumnya, yang memang diperuntukan bagi anak-anak dengan muatan yang berbeda dongeng dapat dituturkan kapan ada kesempatan dan ada tempat yang memadai; sore hari setelah pekerjaan rumah tangga selesai, menjelang tidur di pondok waktu senggang antara pekerjaan berladang. Tema-tema dongeng juga berbeda dari tema-tema teks-teks lisan seperti nandai atau guritan.

Tidak jarang konteks dan pelaksanaan kesenian tradisional mengisyaratkan adanya tautan dengan masalah-masalah pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Contoh sederhana, pada masyarakat Bengkulu adalah 'nyilalang'. Aturan atau konvensi pelaksanaan ritus tradisional nyialang mengungkapkan dan mengajarkan secara simbolik ide-ide konservatif dan keberlanjutan; manusia dan lingkungan alam hidup secara berdampingan dan eksploatasi lingkungan alam secara berlebihan adalah tabu.

Pendek kata, dari kesenian tradisional kita dapat menimba dan memahami berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya. Masalah-masalah seperti hubungan antarindividu dalam kelompoknya, hubungan manusia dengan lingkungan alam dan yang gaib, tentang martabat dan harkat manusia, tentang perjuangan hidup, tentang organisasi sosial, kesantunan, dan kehalusan, tentang retorika berkomunikasi, tersedia dalam berbagai jenis dan bentuk kesenian tradisional.

Fakta yang kita hadapi sekarang adalah terjadinya penyusutan apresiasi dan daya dukung terhadap kesenian tradisional. Terbukanya isolasi dan komunikasi dengan dunia luar serta mobilitas penduduk yang semakin tinggi antara lain menjadi sebab penyusutan tingkat apresiasi dan daya dukung masyarakat yang bersangkutan terhadap kesenian tradisional mereka. Berbagai jenis kesenian dari masyarakat luar memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat tradisional kita. Secara alamiah manusia tertarik kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang lain dari yang dimilikinya. Beberapa kasus menarik yang terjadi di Bengkulu adalah maraknya organ tunggal, layar tancap,

atau band dalam pelaksanaan bimbang pernikahan, sementara tari adat mulai ditinggalkan. Berdasarkan survei yang kami lakukan, faktor mahalnya biaya untuk pelaksanaan bimbang adat menjadi sebab mulai ditinggalkannya tari adat. Demikian juga masuknya teknologi TV, VCD, komik asing (terjemahan) turut mendorong menyusutnya apresiasi masyarakat terhadap dongeng atau pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional lainnya. Fakta-fakta serupa di atas tidak dapat dihindari akan terus terjadi. Perubahan-perubahan terus berlangsung dan melanda masyarakat kebudayaan tradisional. Perubahan dalam arti menyusutnya intensitas pelaksanaan kesenian tradisional berarti perubahan dalam tatanan kebudayaan masyarakat pendukungnya.

Selain hal-hal di atas, kami mencatat bahwa penyusutan sikap positif, apresiasi dan daya dukung masyarakat terhadap kesenian tradisional adalah juga karena sifatnya yang simbolik. Sifat ini menyebabkan nilai-nilai yang dikandung kesenian tradisional menjadi sangat terselubung, sulit ditangkap sebelum diterjemahkan atau diinterpretasi. Latar belakang kultural kesenian tradisional yang mistis (cf. van Peursen, 1992) menjadi kendala transformasi nilai atau kandungan kesenian tradisional. Sering hal ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa yang tradisional tidak rasional. Suatu upaya reinterprestasi terhadap kesenian tradisional menjadi mendesak dilakukan sehingga nilai atau kandungan isinya bisa dicerna, dipahami dan diapresiasi oleh khalayak luas.

Jika kondisi ini terjadi, akan muncul sikap positif dan daya dukung yang maksimum terhadap kesenian tradisional. Dengan demikian, pemertahanan terhadap kesenian tradisional akan terjadi. Perubahan pada kesenian tradisional yang berarti perubahan atau penyusutan sikap positif, apresiasi dan daya dukung atas nilai-nilai yang terkandung pada kesenian tradisional akan terhindar. Di lain pihak, pengembangan kesenian tradisional dimungkinkan adanya. Pada tataran *performance* modifikasi, perubahan, pengayaan sangat dimungkinkan.

C. Bengkulu: Potensi Kesenian Tradisional dan kebijakanPemeliharaan serta pengembangannya

Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1.997.887 Km^2 dihuni

oleh berbagai etnik, seperti rejang, Lembak, Pasemah, Serawai, Melayu, Enggano, dan Kaur, di samping etnis pendatang dalam jumlah cukup besar seperti Jawa dan Sunda. Masing-masing etnis tersebut memiliki dan mengembangkan kesenian tradisional mereka. Di antara kesenian tradisional tiap etnis tersebut, ada yang masih produktif, tetapi ada juga yang terancam punah. Dalam konstek ini Bengkulu memilik potensi kesenian tradisional yang cukup beraneka (lihata lampiran)

Setakat ini tercatat sejumlah sanggar atau organisai kesenian di tiga kebupaten dan satu kota, seperti dalam tabel yang berikut.

Organisasi Kesenian se-Provinsi Bengkulu

No.	Jenis Organisasi	Kota Bengkulu		Kab.Bengkulu Utara		Kab.Bengkulu Selatan		Kab. Rejang Lebong		Jumlah	
		TR	TTR	TR	TTR	TR	TTR	TR	TTR		
1.	Seni Tari	31	3417		46	18	58 79		12	145	150
2.	Seni Musik	22	14	8	26	12	16	100	-	145	58
3.	Seni Rupa	7	3	-	- -		3	5	-	10	8
4.	Seni Teater	-	4	1	7 1		2	10	2	12	6
	Seni Satra	4	18	-	-	2	-	2	-	8	18
	Syarafal Anam	43	16	9	36	59	14 28		-	130	68
	Pedalangan	-	-	5	11	-	-	25	-	30	11
	Jumlah	116	89	40	120	92	93	252	14	500	323

Ket. TR : Terdaftar
TTR : Tidak Terdaftar

Fakta di atas tentunya cukup menggembirakan. Paling tidak secara kuantitatif adanya organisasi kesenia tersebut upaya-upaya pemerintahan dan pengembangan kesenian tradisional di Provinsi Bengkulu dapat berlangsung.

Namun, jika fakta tersebut dihadapkan pada kenyataan adanya arus global yang dapat menjadi ancaman bagi punahnya kesenian tradisional di satu pihak, dan pentingnya mentransformasi nilai bangsa serta pengembangan ketahanan

budaya di lain pihak maka fakta banyaknya organisasi kesenian belum cukup memberikan jaminan bagi upaya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional dalam arti yang luas.

Upaya-upaya masyarakat menjadi pelaku aktif dalam rangka pemertahanan kesenian tardisional menjadi sangat strategis. Gagasan in dirasa tidak mudah dan tidak sederhana. Banyak faktor yang menjadi kendala tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjadi pelaku pemeliharaan Kesenian tradisional mereka, Faktor ekonomi salah satunya. Selain itu fakto psikologis, yang tradisional dianggap identik dengan yang kuno yang ketinggalan, kurang berprestasi Sementara yang berbau modern yang datangnya dri luar dianggap lebih prestisius/ Faktor politik merupakan kendala lainnya bagi tumbuhnya kemampuan dan daya dukung masyarakat terhadap pelestarian kesenian tradisional. Institusi atau lembaga tradisional tidak berfungsi sejak beberapa dekade yang lalu. Dan ketika gagasan serta kebijakan untuk menghidupkan kembali lembaga atau institusi tradisional melalui Otonomi Daerah, pengetahuan masyarakat tentang kesenian dan kebudayaan daerah dan kemampuan mereka untuk kembali memanajemen dan menyelenggarakan kehidupan dengan basis kebudayaan daerah mereka telah menjadi sangat minim. Pendukung kesenian tradisional umumnya telah berusia lanjut yang secara fisik tidak lagi dapat mendukung secara maksimal upaya transformasi pengetahuan dan keterampilan berkesenian tradisional.

Kami mamandang bahwa untuk mencapai cita-cita menjadikan masyarakat sebagai pelaku aktif proses pelestarian kesenian tradisional diperlukan sinergi berbagai pihak seperti perguruan tinggi, Dinas diknas Dinas Pariwisata, BMA, bahkan LSM. Perguruan Tinggi memegang peranan penting sehubungan dengan kegiatan penggalian melalui riset tentang kesenian dan kebudayaan daerah. Korpus data kebudayaan daerah dari hasil penggalian dan riset dimaksud menjadi signifikan terutama bagi penyiapan data dasar kebudayaan dan kesenian tradisional. Selain Perguruan Tinggi Dinas Diknas, Dinas Pariwisata, BMA dan LSM merupakan lembaga-lembaga yang secara fungsional memiliki akses masuk ke dalam masyarakat institusi ini akan menjadi sangat efektif sepanjang ada dukungan dari pemerintah (pusat dan daerah).

Sejalan dengan gagasan di atas upaya-upaya konkret yang tengah dan akan terus kami lakukan misalnya, seperti yang berikut:

a. Memperluas kesempatan masyarakat menikmati kesenian tradisional sihingga tumbuh sikap positif dan apresiasi yang tinggi terhadap kesenian tradisional serta dapat memahami nilai yang dikandungnya untuk kepentingan pengembangan jati diri dan ketahanan budaya.

b. Membina dan mengembangkan kreativitas kesenian serta mendorong tumbuhnya daya cipta seniman dan budayawan dan pelaku seni lainnya, seperti pertukaran seni budaya antar daerah pertemuan antar seniman dan budayawan, festival serta pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah.

c. Menggali dan membina kesenian tradisional dan budaya daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.

d. Melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana fisik gedung olah seni dan taman budaya beserta peralatan.

e. Mendorong dan membantu upaya-upaya pengembangan SDM yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional.

f. Mengadakan/mengikuti festival atau pagelaran kesenia yang dilaksanakan di dalam dan luar Provinsi Bengkulu sebagai upaya memotivasi kreativitas seni.

g. Mengangkat kesenian tradisional yang telah menjadi major event nasional seperti Festival Tabot serta lain-lain kesenian tradisional yang potensial.

h. Dalam rangka memperkaya khasanah budaya daerah dan menghormati etnik lain di Bengkulu diperlukan pelestarian pembinaan, pengembangan tarian adat kebudayaan kesenian Bengkulu dapat berlangsung sebagaimana lazimnya. Saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Penutup

Pada dasarnya keberadaan kesenian tradisional tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu tetapi menjadi

tanggung jawab yang tak terpisahkan dari semua pihak dan proses pelestarian kesenian tradisional membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan mulai dari pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak termasuk masyarakat lokal serta kesiapan kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkannya.

Penelitian untuk mendapatkan basis data yang cukup dan akurat sangat penting dan mendesak dilakukan. Diseninasi dan sosialisasi penelitian dalam bentuk yang lebih komunikatif lebih informatif kepada khalayak luas juga sangat penting. Daya dukung sumber daya manusia keterlibatan institusi seperti BMS, LSM Dinas Diknas dan Dinas Pariwisata secara sinergis akan sangat signifikan.

Bengkulu, 14 Oktober 2003
Tim Penyusun Makalah
1. Sarwit Sawono, M.Hum.
2. Drs. Alcara Zamora
3. Drs Firmansyah

Pustaka Acuan

Ateni.
2000 Upacara Tradisional Bekayekan pada MasyarakatPasemah. FKIP Universitas Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu :
tt *Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu*

Dishareti Laretna T.A :
tt *Pelestarian Pusara Bengkulu Utara Daya masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan*

Herdadi Paisal :

2001 *Kayiak Beterang pada Masyarakat Serawai di Kecamatan Talo Bengkulu Selatan FKIP Universitas Bengkulu*

Herdenson :

tt Nandai Batebah pad Masyarakat Semidang Aals di Bengkulu Selatan FIKP Universitas Bengkulu Ketetapan Musyawarah Lengkap Kel. Badan Nusyawarah Adat Bengkulu

Merzanudin :

tt Rejung dalam Pertunjukan Tari Adat dalam Bimbang Masyarakat Alas di Bengkulu Selatan FIKP Universitas Bengkulu

Sarwono sarwit

tt Perambak dan Rasan Kulo Pada Masyarakat Serawi Museum Neger Bengkulu

Suminar Panji :

2002 Integrasi dan Disintegrasi dalam Prospektif kearifan Lokal Lembaga Penelitian FIKP Universitas Bengkulu

Tarmizi Ajulon

tt Seni Rejang Sebagai Satra Lisan dalam Kultur Masyarakat Dusun Muara Puyung Kecamatan Segimin Bengkulu Selatan

Van Perusan CA. :

1992 Strategi Kebudayaan Terjemahan Dick Hartoko Yogyakrta Yayasan Kanisius

Lampiran : 1 Beberapa Kesenian Tradisional yang terdapat di Provinsi Bengkulu

PELAKSANAAN PENGAJARAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROPINSI JAMBI

Oleh: **Utusan Provinsi Jambi**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktip mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri. Keperibadian. Kecerdasan, ahlak dan budi mulia, seta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan diselenggaraka sebagai suatuproses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Sekolah adalah merupakan salah suatu wahana yang efektif untuk mentranformasi nilai-nilai budaya. Budaya dalam kontek ini adalah budaya daerah yang merupakan pilar-pilar budaya nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah. Dengan demikan budaya daerah tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional yang merupakan alat pemersatu bangsa.

Dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kalangan masyarakat telah terjadi pergeseran nilai budaya lokal yang semestinya nilai-nilai budaya lokal merupakan modal atau pijakan dalam pembangunan.

Tergesernya nilai-nilai budaya lokal disebabkan derasnya arus teknologi dan informasi dan rentannya daya tahan masyarakat akan arus tersbut sehingga terkesan bahwa budaya lokal kurang dianggap penting dalam kehidupan. Hal inipun terjadi pada proses pembelajaran di sekolah.

Masyarakat dan pemerintah dalam hal ini pemerintah yang merupakan fasilitator menyadari adanya pergeseran nilai budaya likal seperti yang dijelaskan di atas.

Dari itulah muncul pemikiran untuk menggali dan melestarikan kembali nilai-nilai budaya lokal melalui jalur sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

2. **Dasar Pelaksanaan**

a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 069/1993 tanggal 25 Pebruari 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar 20% Materi muatan Lokal.

b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi jambi nomor: 246/I 10/G/Mz/1994 Tentang mata Pelajaran Muatan Lokal Pada Tingkat Pendidikan Dasar di Propinsi Jambi

c. Undang-undan nomor : 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2002

d. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Republik Indonesia.

3.Ruang Lingkup

Lingkup mata pelajaran lokal disetiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. lingkup pendidikan masyarakat. Pendidikan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada.

Untuk Propinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jambi nomor : 246/I 10/G/Mz/1994 ditentukan mata pelajaran muatan lokal yang akan dilaksanakan adalah :

a. Ikra
b. Budaya/Kebudayaan Daerah
c. Pertanian
d. Pariwisata

4. **Tujuan**

Tujuan pelaksanaan pembelajaran materi muatan lokal adalah sebagai berikut:

a. Memberi peluang untuk mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap
perlu untuk kebutuhan daerah yang bersangkutan

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal, memahami, membudayakan serta akrab dengan lingkungan kehidupan dalam mempelajari nilai-nilai agama, budaya, pertanian dan potensi alam lainnya.

5. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan penentuan mata pelajaran muatan lokal

a. Dilaksanakan disekolah sesuai dengan lingkungan budaya dan alam serta masyarakat.

Untuk itu langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Sekolah mendata, menganalisa potensi kebutuhan daerah kemudian dijadikan acuan menentukan pilihan materi pelajaran muatan lokal.
2) Setelah sekolah menganalisa dan menentukan mata pelajaran muatan lokal dipilih untuk setiap tingkat dan jenjang kelas yang akan diajarkan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan Propinsi untuk disahkan atau ditetapkan.
3) Buku acuan kurikulum. GBPP Dibuat dinas Pendidikan Propinsi
4) Penyusunan kurikulum muatan lokal dengan berbasis kebutuhan masyarakat dilaksanakan bersama-sama dan mendapat masukan-masukan dari masyarakat serta stoke holder lainnya

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal:

1) Tingkat SD sebanyak 2.307. meliputi sekolah Negeri dan Swasta
2) Tingkat SMP sebanyak 316, meliputisekolah Negeri dan Swasta

Proses belajar mengajar muatan lokal pada SD dan SMP di Propinsi Jambi sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan guru kelas untuk tingkat SD dan guru mata pelajaran untuk tingkat SMP serta memanfaatkan buku-buku yang menunjang pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi maupun Dinas Pendidikan kabupaten/Kota. Namun tingkat intensitas dalam pelaksanaannya antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda.

6. **Hambatan**, masalah yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi.

a. hambatan dan masalah

1) Guru khusus muatan lokal masih sangat terbatas (belum cukup)
2) Materi pelajaran belum terolah dengan baik sehingga buku panduan mata pelajaran muatan lokal belum tersusun secara sistematis
3) Hasil belajar murid dan minat pengajar guru masihrendah
4) Pemaknaan maksud dan tujuan muatan lokal pada setiap sekolah belum satu bahasa
5) Buku standarisasi penilaian yang belum lengkap
6) Koordinasi antara pihak sekolah dengan nara sumber lainnya dalam pengajaran muatan lokal belum terjalin dengan baik
7) Tahapan atau urutan-urutan kurikulum muatan lokal belum mengacu pada perkembangan psikologi anak
8) Pandangan yang sempit dari pihak sekolah yang seolah-olah hanya guru yang boleh mengajar di sekolah sehingga Kepala Sekolah tidak punya keberanian untuk mencari nara sumber dari luarlingkungan sekolah.
9) Lingkungan, baik lingkungan budaya atau lingkungan alam belum dijadikan sarana untuk kegiatan belajar mengajar
10) Adanya ketidak seimbangan perlakuan terhadap kurikulum muatan lokal dengan kurikulum muatan nasional
11) Mata pelajaran muatan lokal terjebak oleh budaya pisik dan belum menyentuh nilai-nilai filosofis dan pemahaman terhadap nilai budaya tersbut

b. Solusi dan rekomendasi

1) Perlu peningkatan kemampuan dan pemahaman guru tentang nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu alat perekat bangsa melalui pendidikan khusus atau pelatihan
2) Perlu upaya penggalian nilai-nilai budaya lokal sebagai acuan penyusunan kurikulum muatan lokal
3) Perlu adanya penilaian dan pembahasan kurikulum muatan lokal bersama dengan budayawan. Ahli psikologi, ahli pendidikan dengan pemerintah daerah
4) Penyusunan kurikulum muatan lokal penekananya lebihkepada penanaman jati diri bangsa yang menyesuaikan dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal dan nasional dengan sistem pembelajaran social

5) Perlu adanya penekananbahwa kurikulum muatan lokal menjadi isu penting untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa dan alat pemersatu bangsa.
6) Perlu adanya pemilihan yang keras antara kurikulum muatan lokal dengan kurikulum muatan nasional dengan merekomendasikan agar kurikulum muatan nasional pada jenjang pendidikan dasar cukup menekankan pada materi tiga kemampuan dasar yaitu membaca, menulis dan berhitung
7) Perluperlakuan yang sama saat penyelenggaraan ujian akhir sekolah antara mata pelajaran muatan lokal dengan mata pelajaran muatan nasional.
8) Baik kurikulum muatan lokal maupun kurikulum muatan nasional perlu mengkonsentrasikan pada budaya membaca dan menulis sehingga kreativitas siswa dapat teraktualisasikan pada bentuk lisan maupun tulisan.
9) Alat peraga pembelajaran yang berbau pabrikan pada jenjang pendidikan dasar harus dihindari, direkomendasikan guru wajib menggunakan alat pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga lingkungan dapat dijadikan sebagai wahana sumber belajar.
10) Dalam penyusunan kurikulum muatan lokal direkomendasikan agar menyentuh ketiga ranah yaitu ranah pengetahuan, ranah nilai dan ranah sikap sehingga mata pelajaran muatanlokal tidak terjebak pada budaya pisik semata tetafi harus mencapai budaya filosofis
11) Perlu ada perubahan paradigma pembelajaran muatan lokal dari schooling ke learning artinya pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas tetapi belajar terjadi di kelas di rumah dan di masyarakat.

7. Kesimpulan

a. Pelajaran muatan lokal pada muatan pendidikan dasar di Propinsi Jambi sudah berjalan, namun masih menemui hambatan-hambatan dilapangan. Untuk itu perlu usaha dari pihak pemerintah atau sekolah antara lain

1) Sosialisasi manfaat dan tujuan mata pelajaran muatan lokal perlu ditingkatkan pada masyarakat
2) Perlu pelatihan untuk peningkatan profesional guru

3) Perlu penyediaan buku dan penunjang belajarlainnya yang memadai

b. Perlu ada kajian ulang terhadap kurikulum muatan lokal yang dilakukan secara bersama stake holder pendidikan sehingga betul-betul mengenal, memahami, membudayakan serta akrab dengan lingkungannya dalam mempelajari nilai-nilai agama, budaya, pertanian dan potensi alam lainnya

c. Diperlukan persamaan presepsi akan pemaknaan pembelajaran muatan lokal sehingga tercapai maksud dan tujuan pembelajaran muatan lokal yang utamanya yang berkaitan dengan budaya daerah yang pada gilirannya akan tertanam jati diri bangsa pada diri peserta didik.

DIMENSI BUDAYA DALAM SITUASI KONFLIK

Oleh: **DR. Piet Tanamal**
Utusan Provinsi Maluku

Konflik Maluku merupakan pengalaman peristiwa tragis yang kena dan menggoncang seluruh potensi kehidupan kemanusiaan yang paling dalam. Aspek-aspek kehidupan yang indah, martabat ciptaan mulia dibuat paling terhina. Sosok buatan tangan al-Chalik ditembak, di parang, ditombak, dipanah dan diperlakukan seenak selera, melepaskan nafsu angkara dendam tak punya rasa belas kasihan. Menyiksa, membakar, membunuh dan perlakuan-perlakuan kejam lainnya, itulah perbuatan-perbuatan orang-orang beragama. Mereka yang dengan mulut menyebut dan memuji-muji Allah pencipta, justru merekalah yang menghancurkan ciptaan Tuhan itu sendiri dengan gaya dan caranya. Itu sebuah ironi di tengah sejarah dunia yang semakin beradab, modern dan berpengetahuan. Apa sebetulnya wujud dasar budaya Maluku ini, kekuatan dan kelemahannya, struktur dan tabiat aslinya, serta faktor-faktor perekat lainnya yang ikut menyebabkan Maluku terjerumus ke dalam malapetaka sebegitu tragis?. Selanjutnya, untuk mengenal dan mengukur "Dimensi budaya dalam situasi konflik" Maluku ini, maka melalui makalah ini kami akan menempuh cara pendekatan periodisasi sejarah budaya Maluku dengan pembagian:

- Periode Pra-Konflik
- Periode Konflik
- Periode Pasca Konflik
- Periode arah kebudayaan kedepan

I. Periode Pra-Konflik

Adalah sangat penting mengungkap Maluku periode pra-konflik dasar tumpu proses perkembangan budaya dan peradaban masyarakat. Tentu saja periode yang panjang dan sarat dengan tonggak-tonggak peristiwa sejarah yang beraneka itu, tidak dapat diungkap semuanya dalam ruang terbatas lembar-lembar kertas tulisan ini. Namun, kami berusaha mengemukakan hal-hal yang kami anggap tepat dan penting sebagai cara pendekatan guna membantu memahami dimensi budaya Maluku. kekuatan dan

kelemahannya menghadapi perubahan-perubahan sejarah dari dunia yang terus menjadi modern.

Pada galibnya dimensi budaya yang dominan di Maluku adalah: dimensi kekeluargaan dan kekerabatan, kemanusiaan, religiositas dan kebutuhan khas insani dalam alam bumian (pendidikan, sosial ekonomi dll. yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan).

1. Dimensi Kekeluargaan dan Kekerabatan

Jauh sebelum terjadi perjumpaan dengan berbagai bangsa di Maluku, leluhur kami telah mengambil peranan pelaku kebudayaan. Mereka ditantang dengan pengalaman alamiah yang beraneka ragaman. Hidup tidak bebas dari peristiwa-peristiwa yang menakutkan, kalaupun ada waktu-waktu yang mengantarkan keadaan damai dan suka cita. Mereka butuhkan kehidupan yang tidak terus diganggu atau dihadang dalam perjalanan mencapai bahagia dan damai sejahtera. Mereka bayangkan ada kekuatan tertentu yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa mengerikan sampai pada kematian. Mereka menyebut kuasa di balik segala kejadian ini ialah Upu, Upulero.

Alam kodrati dan tantangannya menjadi pemicu mempersiapkan kerangka bagi mereka mengembangkan ekspresi yang menjawab berbagai kekuatan yang dihadapi manusia semakin menyadari potensi dirinya, dan menyadari pula kebersamaannya dalam lingkung Hena (Negeri) dan menyebar pada Uli (lingkar dari beberapa Hena yang mempunyai ikatan kekeluargaan) serta meluas pada batas-batas pulau dan daerah, Pada karakter komunitas inilah Maluku sebagai masyarakat kepulauan dapat berkesinambungan dengan berbagai karya budaya sambil berlangsung secara kumulatif dengan warisan-warisan yang penuh makna dan nilai.

Dalam masyarakat adat Maluku, hubungan-hubungan sosial antar sesama itu ditertibkan melalui aturan-aturan adat dengan sanksi-sanksi bagi pelanggar. Jadi dalam aturan-aturan adat itu masyarakat dibina menjaga ikatan persaudaraan dan untuk mencapai partisipasi antarsesama, kerja sama dan saling membantu, menghargai, dan saling memberi hormat serta mengindahkan seseorang pada tempatnya, mana yang tua dan mana yang muda.

Pada konteks ini baiklah kita berusaha memahami secara

terperinci apa yang saya sebut dengan "Budaya-Komunikatif-Basudara". Dari sini kita boleh lebih secara mendalam mengenal dimensi kekeluargaan dan kekerabatan itu dengan muatan-muatannya yang terdiri dari: Familia, Ain Ni Ain, Pela atau Teabel, Gandong, Masohi, Badati. Secara singkat dan padat dapat dihadapkan masing-masing muatan termaksud di atas sebagai berikut:

(a) Familia: merupakan ikatan kekeluargaan yang luas, mulai dari rumah-tangga yang terpencar melalui perkawinan yang membentuk keluarga-keluarga kecil dan tersebar sehingga mempunyai hubungan yang luas. Kesatuan ini juga mulai dari mata rumah yang merupakan pula satu Soa yang kemudian menjadi dasar pembentukan anggota-anggota Saniri Negeri dengan kepalanya seorang Raja, yang merupakan pemimpin dalam sebuah hubungan kekeluargaan karena ikatan darah termasuk pada hubungan perkawainan, tetapi juga ada ikatannya dengan pemerintahan negeri, termasuk juga dalam ikatan Uli yakni kesatuan beberapa negeri yang punya ikatan genealogis yang juga menjadi satu familia dari kesatuan pemerintahan adat Uli itu.

Seorang perempuan yang kawin dengan lelaki lain sebagai suami, ia juga di terima ke dalam ikatan familia suami melalui upacara adat (sosohuru) di rumah sang suami di hadiri oleh lingkungan famili suami dan isteri. Seorang warga dari negeri lain yang beralih tempat diam ke negeri lain, ia juga akan diterima dengan upacara adat oleh pimpinan negeri tersebut. Semua keluarga yang sama fam di negeri-negeri Kristen dan Islam seperti Wattiimena, Manuputty, Mahulette, Putuhena dsb. adalah satu familia. Demikian juga di Kei ikatan seperti itu disebut dengan istilah Ain Ni Ain, satu dalam satu, yang memperlihatkan begitu dekat dan kuat.

(b) Pela: adalah ikatan kekerabatan antara dua atau lebih negeri, yang disebabkan oleh bantuan yang satu kepada yang lain (negeri) karena peristiwa bahaya atau untuk membangun sarana penting, seperti gedung pendidikan, mesjid atau gereja, baileu. Ada batas-batas aturan yang dikenakan pada negeri-negeri berpela ini: seperti tidak boleh kawin, jujur dan ikhlas yang satu terhadap yang lain, terbuka untuk memberi dan mengambil buah

pohon seperti kelapa, karena kebutuhan. Seperti ini pula berlaku ketentuan Teabel (Pelaj) di Kei.

Kalau dalam upacara bikin-panas-pela, diisi pula dengan acara khusus, seperti makan patita dengan disajikan khusus makanan daerah, yang semuanya mengingatkan dan membuat hidup kembali persekutuan pela ini. Tiap dilakukan panas-pela itu dimaksudkan mengulang mengangkat peristiwa pertama ke hari ini, yang berarti mengingat dan mempererat ikatan pela itu. Panas pela ini dihadiri oleh kepala adat dari negeri-negeri berpela itu (Raja), tua-tua adat, anggota-anggota Saniri Negeri, pimpinan agama, tokoh-tokoh seperti kepala mongare dan jujaro, para guru bersama rakyat yang datang dari negeri-negeri berpela itu.

Upacara adat panas pela ini dilakukan di Baileu dengan mengulang janji dan sumpah serta minum bersama dari satu gelas minuman sopi (dulunya di gelas itu biasanya dimasukkan setetes darah pada sopi di gelas itu) sebagai tanda materai yang kuat pada ikatan pela itu dengan sanksi keras kepada yang melanggar atau merusak hubungan pela ini.

Bentuk dan sifat ikatan pela ini, dikenal dengan pela tuni, pela batu karang, pela darah ini semua pela keras, sehingga apabila dilanggar, akan di timpa bahaya. Sedang pela tampa-sirih, terjadi sebagai tanda terima kasih karena membantu dengan menyajikan makanan dan mengedarkan tempat-sirih untuk orang makan sirih pinang.

(c) Gandong: itulah hubungan saudara-saudara sekandungan, yang pada masa lampau terpisah seorang dari yang lain dari kampung halaman mereka. Di antara mereka, kemudian ada yang menganut agama Islam dan ada beragama Kristen. Lama-lama mereka diketahui ada di rantau orang, lalu saling mengadakan hubungan dan kemudian pula berhimpun bersama untuk mendudukan kembali posisi persaudaraan orang-orang satu kandung itu, yang sampai sekarang tetap hidup dan berperanan, yang selanjutnya dapat juga dilihat dalam ikatan Hena dan Uli.

(d) Masohi: suatu sistem sosial yang mengikat kesesamaan hidup antarmanusia yang satu dengan yang lain untuk saling membantu meringankan beban hidup bersama. Kebutuhan sebuah keluarga untuk mendapat bantuan tenaga guna

meringankan bebannya, seperti membuat rumah, memetik hasil cengkih dari pohon, atau membuat sero penangkap ikan. Tenaga-tenaga yang membantu ini tidak dibatasi pada rumpum persaudaraan, tetapi siapa saja tanpa kenal batas-batas apa pun yang diminta bantuan itu.

Sekarang sudah terbentuk di negeri-negeri kelompok-kelompok kecil sebanyak tujuh sampai sepuluh orang guna saling membantu menyelesaikan secara bergiliran dengan menanggung sendiri dan membawa makanan ketempat kegiatan, seperti membantu memetik cengkih, kelapa atau objek kegiatan yang berjarak jauh dari negeri. Sifat rasa penanggungan bersama itu tetap tinggi sampai pada soal kematianpun ada kelompok masohinya dengan perkumpulan Muhabet (orang-orang yang berbelas kasih sayang).

(e) Badati: suatu sistem sosial yang sifat geraknya antarkeluarga asal usul terdekat. Bila anak dari keluarga yang berasal usul terdekat hendak menikah biasanya kepala-kepala keluarga yang berasal usul itu diundang untuk membicarakan bantuan yang hendak disumbangkan. Biasanya anggota keluarga dekat itu memberikan sumbangan guna meringankan beban saudaranya itu, yang mempunyai hajat tersebut. Entah berupa uang atau bahan-bahan berupa hasil kebun atau bantuan dulang berbentuk kue dan lain-lain kebutuhan pesta nikah.

Badati itu adalah perwujudan partisipasi antar keluarga terdekat dengan keluarga yang punya hajat yang membutuhkan bantuan uang atau bahan-bahan material lainnya untuk tidak mengurangkan gengsi pesta tsb. Bedanya badati dari masohi ialah bahwa badati itu terbatas pada hubungan persaudaraan terdekat, sedangkan masohi tidak kenal batasan, tetapi siapa saja yang bersedia untuk ambil bagian aktif dalam masohi.

Demikian itulah beberapa pola dan sistem yang menunjuk pada dimensi budaya kekeluargaan dan kekerabatan yang bila di telaah hampir dari segala sisi ternyata mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap ikatan hidup persaudaraan di Maluku. Dengan perkataan lain itulah "Budaya-Komunikatif-Basudara" dengan muatan-muatannya yang menyatakan betapa kuatnya dasar-dasar perekat antarorang-orang Maluku yang hidup di antara masyarakat beragama Islam dan Kristen.

2. Dimensi kemanusiaan.

Dari "Budaya-Komunikatif-Basudara" pada dimensi kekeluargaan dan kekerabatan, jelas terlihat bagaimana mulianya manusia dan penghormatan yang diberikan kepada makhluk ciptaan Tuhan ini. Dalam sistem dan struktur budaya, Maluku termasuk tatanan masyarakat yang berdasarkan keturunan bapak (Patriarchate). Walaupun demikian, kedua ciptaan yang bebeda gender ini mendapat posisi yang sama di mata masyarakat sejak jaman kuno. Malah dalam pergaulan umum, perempuan diberi tempat sederajat laki-laki. Dalam rumah tangga perempuan dalam falsafah Maluku disebut "Mahkota" rumah tangga atau "Mahkota" suami. Bahwa ada yang lain dari ini, di sebut sebagai "budaya-kampungan" dalam arti tak terdidik, tra tau adat (Ambon) dan bertabiat keterasingan budaya asli. Tabiat dalam falsafah budaya Maluku adalah menyangkut sosok dan perilaku seseorang yang memperlihatkan budaya yang terukur pada orang lain untuk dinilai beradab atau biadab, baik atau jahat.

Individu itu bebas, tetapi mendapat maknanya dalam lingkungan kekeluargaan. Dalam masyarakat adat, manusia individu itu mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan. Dapat dimengerti keadaan ini kalau diperhatikan banyak negeri masih terdapat rumah-tua yang besar, disebut rumah besar peninggalan leluhur dengan banyak kamar. Malah rumah tua itu dipandang sakral. Rumah tua itu juga sekaligus memberikan kekuatan kepada penghuninya untuk mempertahankan kehidupan manusia dari ancaman.

3. Dimensi religiositas

Sejak leluhur religius mempunyai peranan atas kehidupan manusia sehingga manusia juga yang mencari jalan dan cara melindungi dirinya dari bahaya kekuatan alamiah. Pendekatan religiositas manusia primitif dengan rasio terbatasnya membuat sikap merendah membaktikan hidup pada upu melalui upacara-upacara yang bersifat pasrah dan berusaha menjinakannya dengan praktik mempersembahkan korban. Mereka percaya akan dibantu dan diselamatkan oleh Upu. Bentuk atau objek kepercayaan orang tidak menjadi persoalan bagi orang lain. Justru masing-masing dengan kebebasan dan tanggung jawabnya manusia itu sendirilah yang akan memilih dan bertanggung jawab atas keputusan pribadinya. Sikap religiositas

mereka sangat sederhana dan tidak merepotkan atau mengganggu tertib sosial.

Berlainan dari agama-agama baru yang datang dari barat dan timur tengah dengan tujuan terbesar untuk menguasai rempah-rempah Maluku agama lantas dipakai sekadar pelicin guna mencapai hegemoni di bidang perdagangan dan politik. Dengan slogan misi dan mencari jiwa untuk diselamatkan dari kekafiran, semangat dagang dan politik yang mencari keuntungan menodai misi yang indah itu. Demi agama dan misinya, kebebasan orang dipermainkan, tapi menyangka semua itu diperkenankan Allah. Sejarah gelap agama-agama yang telah merusak peradaban manusia dan kebudayaan dunia hendaknya memperingatkan generasi-generasi baru untuk tidak lagi mengulang menyengsarakan umat manusia yang sedang terus membangun sekarang dan ke depan.

Berbagai bentuk konflik yang terjadi di Indonesia sejak dekade akhir tutup abad 20 dan menjalani permulaan abad 21 ini, sudah sangat berstempel jelek bagi bangsa dan negara. Kebudayaan kita yang selalu dibanggakan dan dipuja-puja, indah, lembut dan manusiawi sebagai tak ada taranya di dunia, hanya sebagai isapan jempol yang bertolak belakang dengan realita sehari-hari yang dapat dilihat, dirasa dan dialami sendiri. Agama sebagai kecolongan dengan misi dan wacana serta unggulan-unggulan etika, moral dengan pengajaran dan doktrinnya. Budaya kekerasan jadi hakim sendiri yang mungkin disebabkan oleh ketidakgesitan dan kehilangan kepercayaan rakyat atas lembaga-lembaga hukum dan peradilan dengan aparat-aparat pelaksanaannya, semua keadaan itu telah menjadi trauma sosial dan psikologi di antara warga negara yang disebut "orang beragama" ini.

Agama-agama akan terus merosot identitasnya, apabila kekerasan dan pelakuan yang tidak manusiawi terus dipertontonkan dengan cara-cara hidup warga yang sekaligus adalah "orang beragama"

Reorientasi pengajaran teologi dan pembinaan terhadap umat sudah sangat perlu ditekuni dan diperbaharui. Dimensi budaya keagamaan sudah perlu secepatnya mendapat koreksi dan perbaikan ke arah menghadapi proses perubahan dan tawaran masyarakat modern yang besar dinamikanya itu.

4. Dimensi budaya menyangkut kebutuhan khas insani seperti sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dll.

Ini sebagai hal vital yang mengena dengan hajat hidup manusia. Pada tatanan kehidupan ini terjadi kegiatan-kegiatan dan fungsi–fungsi yang harus dijalankan manusia, supaya dapat mencapai sesuatu yang berharga baginya sehingga kemanusiaannya menjadi lebih nyata. Ini pula yang merupakan kegiatan kebudayaan, untuk menciptakan dari berbagai imajinasi dan ide yang menantang, kreasi-kreasi baru yang mempesona. Itulah manusia pelaku kebudayaan.

Manusialah yang memikul tanggung jawab untuk membangun ekonomi rakyat yang adil dan merata, begitu juga di bidang pendidikan hingga muncul nanti generasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, profesionalisme yang tinggi ilmu, berwatak mengabdi dan senantiasa siap sedia menyongsong setiap perubahan secara kritis dan reflektif, serta selalu menjunjung kehormatan ilmu dengan kerendahan hati yang dinamis mengasyikan; demikian pula menguatkan budaya kesehatan bersih, tertib dan disiplin serta menekan segala bentuk dan rangsangan hawa nafsu pada segala aspek yang bertujuan membangun (sadar/tidak sadar) popularitas kepribadian kosong, memalukan dan malah terhina.

Posisi Maluku yang ingin pembaharuan dan proses masa depan yang gemilang, menantang semua tokoh pimpinan di segala bidang untuk senantiasa mawas diri dalam konteks menjadi manusia sehat jasmani-rohani manusia yang selalu sadar tentang kebersihan dan penyucian hidup supaya dapat bebas bergaul dengan sesama yang dapat terhindar dari jangkitan wabah kotor dan bebas pula bergaul dengan Tuhan yang Maha Kudus melalui fungsi dan panggilan sehari-hari.

Ekstraksi dari periode yang begitu panjang penuh dengan makna dan nilai luhur budaya Maluku ternyata masih populer dan tahan banting dari gerakan perubahan-perubahan sejarah dan kebudayaan. Tetapi persoalannya ialah penghayatan pada nilai etika dan moral yang masih tetap pas terhadap masyarakat modern sekarang ini belum dapat diterapkan guna mengimbangi polusi jaman dengan budaya brutal ini.

Budaya-Komunikatif-Basudara dengan unsur-unsur muatannya yang begitu dominan dengan dimensi kekeluargaan dan kekerabatan yang sebegitu menarik dan kental dengan sifat

persaudaraan, kasih keramahtamahan dan humoritas. Lantas apa yang menjadi faktor (faktor-faktor) sebab timbulnya konflik berdarah, tragis dan di luar rasa perikemanusiaan yang sarat kekejaman itu?

II. Periode Konflik dan Pasca Konflik

Sekitar empat tahun sejak 19 Januari 1999 pecahnya konflik berdarah, tidak sedikit penderitaan yang dialami oleh segenap rakyat Maluku. Kehilangan jiwa beribuan orang, belum terhitung yang cacat dan invalid; ribuan rumah dan berlimpah harta kekayaan musnah dan berpindah tangan; dalam situasi konflik dan rusuh terdapat juga tangan-tangan siluman yang bermain mencari keuntungan dengan kepentingan politik yang memecah belah.

Bidang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah umum, Sekolah Tinggi dan Universitas, ada yang mengalami kehancuran dibakar dan dibom. Siswa-siswa dan mahasiswa putus sekolah dan berhenti studi. Semua mereka mengalami kondisi degradasi baik fisik maupun mental dan intelek.. Proses belajar mengajar ikut terbengkalai dan malah putus. Konsekuensinya bahwa persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan masyarakat modern akan menemukan stagnasi keterlambatan ataupun merosot di bawah standar minimal.

Pada bidang sosial ekonomi, tiga Ratus ribu lebih pengungsi kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya; hidup dengan menanti bantuan pemerintah, lembaga-lembaga sosial , LSM, dan uluran tangan dermawan, di dalam dan dari luar negeri. Di antara mereka sudah banyak yang kembali ke rumahnya setelah dibangun oleh pihak pemerintah. Semua fasilitas dan bantuan dari pemerintah menurut rencana akan berakhir pada 31 Desember 2003.

Pertanyaan umum sederhana dan tidak perlu menjadi tabu untuk dijawab ialah: 'apa" dan "bagaimana" konflik massal ini terjadi, yang dimulai dengan persoalan dua orang rakyat jelata yang bisa dengan mudah diselesaikan, tetapi tiba-tiba terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan? Biasanya orang sebut dengan "konflik sosial" juga orang sebut "Konflik antar orang-orang beragama" Islam-Kristen.

Semua ini tidaklah menjawab keinginan duduknya persoalan.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum dan keadilan termasuk Penguasa Darurat Sipil di kala itu juga tidak jelas bagi masyarakat luas. Namun, demi kecintaan orang pada kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan umum semua ingin memaafkan dan melupakan serta bersedia untuk kembali bersama ke titik mula-mula, Ambon manise dan Maluku seperti sedia kala bersatu.

Dari analisis yang dibuat, dapatlah dikatakan bahwa konflik ini terjadi sebagai tanda dari kelemahan tumpuan berpijaknya rakyat, pembinaan sosial budaya dan keteledoran unsur-unsur pemerintahan dan politik. Undang-undang No. 5, tahun 1979 pada jaman orde baru telah memporak poranda kekhasan adat istiadat dan struktur masyarakat negeri dengan pemerintahan dari bawah, Samiri Negeri, Raja, Kepala Soa , Marinyu dan Kewang sebagai aparatur dari rakyat dan untuk rakyat, di modifisikasi dan dipaksakan dari atas karena kepentingan-kepentingan politik dan kebijakan-kebijakan yang berbelit dengan pola-pola yang asing bagi Maluku. Akar masyarakat otohton Maluku ditekan dan membingungkan rakyat di negeri-negeri. Nilai-nilai budaya negeri menjadi desa yang sebetulnya bukanlah budaya Maluku. Raja diganti dengan Kepala Desa, demikian pula marinyu dan kewang sebagai pengawal kemurnian informasi dan lingkungan hidup yang di percayakan rakyat, dirubah sesuai dengan kehendak dan logika *top-down conception* yang dilegitimasi hukum. Tentu saja bertentangan dengan konsepsi bottom-up kontrol rakyat itulah, kelemahan undang-undang pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sehingga menyebabkan kerugian dan pelecehan budaya. Berbagai dimensi kebaikan budaya setempat kurang dihargai sehingga menimbulkan kesalahpahaman politik.

Selain dari itu, terjadi pula penyimpangan hak dan kewajiban serta penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan kesewenang-wenangan atas hak-hak ayat dan posisi kedaulatan rakyat serta sumber kekayaan, kemakmuran dan kedamaian menajdi porak-poranda Dasar orisinil *grass-roots* yang bertumpu pada porsi yang fundamental dan essensial diganti dengan kekuatan atau kelompok yang sering mengstigmatisasi identitas diri sebagai grass-roots.

Dimensi budaya yang berakar pada tumpuannya yang orisinil menjadi goyah, lemah dan mendorong pelaku dan pemegang saham setia pada tabiat asli budaya mengalami posisi dilematik.

Sementara itu perlu pula dicatat hal ikhwal dalam kehidupan sosial budaya yang ikut melemahkan ketahanan budaya jati diri karena tidak mampu menentukan pilihan pribadi, dan keadaan seperti ini menyebabkan terjadi instabilitas dalam hal-hal menyangkut gejolak psikologi. Dalam hal ini dapat dicatat bahwa karakter unjuk rasa massal yang membonceng aspirasi dan kepentingan politik kelompok tertentu yang tak sopan dan tak bermoral, telah ikut merusak perangai budaya berkepribadian kekeluargaan dan kekerabatan. Bukan tidak mungkin ada sebegitu banyak orang dari generasi muda yang hanya bersimpati ikut-ikutan dalam demo-demo massal, tetapi telah tenggelam ke dalam pengaruh psikologi massa sehingga merosot kepribadian yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan memikul beban pecah kepribadian (split personality).

Konteks konflik sendiri telah menggoyahkan banyak orang untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun setiap kali pengaruh budaya komunikatif basudara itu pada dimensi kekeluargaan dan kekerabatan nampak menggerakkan dan menstimulasi mengambil prakarsa menyentuh banyak pihak. Kontak-kontak antar pribadi mulai dibuat. Demikian juga antar komponen dalam hubungan pela, gandong dan famili, juga harus disebut acara-acara pertemuan yang diprakarsai oleh kelompok "Baku Dapa" yang diselenggarakan di luar daerah Maluku untuk kalangan Islam dan Kristen, cukup mempunyai andil. Demikian juga melalui Bapak Jusuf Kala MENKOKESRA dengan Malino II yang mempertemukan orang dari berbagai komunitas Islam dan Kristen dan pemimpin-pemimpinnya masing-masing (pemimpin agama-agama, dari kalangan kepala–kepala adat, pemuda-pemudi dan tokoh-tokoh lainnya) di mana kesepakatan yang diambil bersama memberi kesempatan-kesempatan baru bagi proses membangun konsepsi ke arah menciptakan situasi kondusif, aman, dan damai.

Perkembangan selanjutnya terjadi inisiatif-inisiatif di berbagai kalangan dengan mengadakan percakapan-percakapan antarLatu Pati; antarpela dengan acara adat yang mengikat dan mengingat pada janji yang kuat dari pela; kalangan anak sekolah pada lingkar SD, SLTP, dan SMU, bahkan sampai pada lingkungan mahasiswa dan universitas, serta badan-badan dan lembaga-lembaga eksekutif dan legislative, kota sampai negeri-

negeri di Maluku dan Jakarta dsb. Semuanya telah memberikan andilnya yang besar hingga terciptanya situasi yang kondusif dan yang besar hingga terciptanya situasi yang kondusif dan pada tanggal 15 September 2003 dicabutnya, keadaan darurat sipil dan diberlakukan kembali Tertib sipil di seluruh Maluku. Kini dua komunitas, Islam-Kristen, sudah berbaur dalam segala kesempatam, terbuka dan gembira, dari generasi tua sampai pada generasi muda dan anak.

Ada sebuah keunikan dalam budaya Maluku, sejak dulu kala sampai sekarang. Ini terdapat pada setiap lingkar budaya yang terbatas dan luas; antara Wemale dan Alune, Patasiwa dan Patalima dsb. Selalu saja ada sifat tegang dalam setiap perjumpaan dan setiap kebersamaan. Keunikan yang saya maksudkan bukanlah "ketegangan yang menghancurkan tetapi justru ketegangan yang mengasyikan". Di sinilah terletak karakteristik kebudayaan yang selalu dalam proses "tantang jawab". Konflik yang dapat dikendalikan pada waktu yang terukur ini ialah karena hakikat kekeluargaan dalam "Budaya-Komuikatif-Basudara" ini mempunyai spirit kesesamaan yang saling menguntungkan.

Rahasia mengasyikan dalam ketegangan menunjukan bahwa kebudayaan itu di dalam merealisasikan nialai-nilainya, tidaklah mungkin dengan fungsi akal dan intelek saja, tetapi juga dengan sikap rohani yang visioner. Hal ini penting demi perkembangan masa depan kebudayaan yang sehat. Sementara itu perlu juga di ingat bahwa kebudayaan tak dapat dipahami secara statis, justru dalam perubahan-perubahan cepat kebudayaan (rapid cultural change) yang terjadi sekarang ini. Kita hendaknya senantiasa mengikuti proses perkembangan dalam peredaran jaman. Konflik yang terjadi di antara kita dan pada beberapa daerah di Indonesia ini sudah harus menjadi pelajaran dan studi yang berharga bagi menata setiap kali realita sosial budaya, serta memperhatikan faktor-faktor pergesekan yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran yang menyangkut unsur-unsur perekat kebudayaan. Sebab tampak pula bahwa konflik yang berkepanjangan justru kelalaian kita mengrekonstruksi setiap unsur dan faktor yang ikut bereaksi terhadap nilai dan struktur asli kebudayaan kita.

Para ahli dan fungsionaris pada bidang kebudayaan ini mempunyai tugas penting untuk terus menganalisis dan

meletakkan posisi dari unsur-unsur kebudayaan yang mengalami keadaan stagnasi atau yang stabil, di dalam kesatuan kebudayaan guna menentukan program-program kegiatan serta memantapkan ketahanan budaya antarnegeri, kota, dan kabupaten.

III. Periode Arah Kebudayaan ke Depan

Pengalaman hidup dalam situasi konflik telah banyak memberikan pelajaran yang mulia bagi perjalanan hidup ke depan. Sekali sudah terseret ke dalam kancah dan pelukan nafsu angkara konflik, diharapkan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang bebas, damai dan berperikemanusiaan dari generasi ke generasi. Pluralisme dari aneka warna suku dan latar belakang genealogis, namun pada dasarnya corak kebudayaan kita mengarah pada merealisasikan tujuan mulia bangsa yang bersatu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam struktur baru politik dengan desentralisasi dan otonomi daerah apabila semua pihak begitu arif dan bijaksana, tidak akan jatuh pada bahaya egoisme, tetapi justru memperkuat stabilisasi budaya nasional, maka dapat diharapkan pula kelancaran pembangunan di segala sektor kehidupan. Pengalaman pada daerah-daerah konflik yang lampau, bukanlah sekadar rumour belaka bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur mengeruhkan keadaan. Tentu kita semua mengharapkan bahwa dengan melihat dan merasakan bengisnya akibat pada manusia dan rakyat Indonesia di daerah-daerah konflik itu akan membuat semua orang menjadi berubah perangai dari berperilaku jahat dan tak manusiawi itu kepada kebenaran, keadilan dan takut pada murka Allah yang akan berlaku.

Dibutuhkan untuk memberi spirit baru yang menghimbau dan menggerakkan pemangku-pemangku budaya daerah guna mengarahkan masa depan kebudayaan kita penuh dengan kreasi-kreasi baru yang menopang perbuatan-perbuatan kasih, suka cita, kedamaian, dan kekeluargaan yang suci.

Usaha mengembangkan ungkapan-ungkapan filosofis yang menyangkut pandangan hidup mengenai budaya kekeluargaan, kekerabatan, dan kemanusiaan yang masih banyak tercecer di antara masyarakat negeri –negeri dan yang belum di studi dan dikembangkan dalam masyarakat luas.

Diharapkan bahwa perhatian atas pengembangan program

dan kegiatan bidang kebudayaan ini difasilitasi secara utuh dan komprehensif. Sarana pelatihan, museum dan perangkat-perangkat lainnya yang membantu pada bidang ini supaya dibenahi, diefektifkan secara terarah dan efesien. Demikian juga sarana-sarana kepariwisataan yang tidak berfungsi dan hancur karena kerusuhan supaya di rehabilitasi, diefektifkan dan dibangun sesuai dengan kebutuhan menyeluruh bagi perkembangan daerah menyangkut berbagai kepentingan di Maluku.

DIMENSI BUDAYA DALAM SITUASI KONFLIK DI ACEH[1]

Oleh: **Abdul Djunaidi**[2]
Utusan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Pendahuluan

Dalam situasi konflik apa pun ada kecenderungan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat menjadi ketkutan, sensitif, dan curiga baik kepada sesamanya maupun kepada orang lain di luar kelompok primernya dalam rangkaian hubungan mereka bersikap dan bertindak. Pada umumnya orang-orang merasa tidak leluasa untuk berinteraksi bersemuka *(face-to-face interaction)* atau berkomunikasi (sekalipun dengan menggunakan teknologi internet, telepon, dan lain-lain) dengan sesama anggota kelompok atau lapisan lain di dalam atau di luar lingkungannya karena berbagai hal di atas. Dalam suatu wilayah organisasi negara yang sah, ketidakleluasaan seperti itu boleh jadi karena ada pihak lain, suatu institusi, yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban (secara baik-baik atau secara paksa demi keutuhan nasional) untuk menetralisasi keadaan konflik menjadi harmonis kembali (bersatu dalam satu budaya nasional). Aparat institusi tersebut dituntut untuk menemukan pelaku-pelaku (aktor sosial-politik) yang patut diduga sebagai penggerak utama yang menimbulkan konflik terbuka dan membawa kerugian bagi persatuan (konsesus) dalam organisasi masyarakat bersangkutan.

Dalam negara seperti Indonesia yang multietnis, kemungkinan konflik selalu terbuka. Peristiwa itu, antara lain terjadi karena negara didirikan atas suatu kesadaran politik, yang tidak semata-mata karena merasa diri sebagai etnis terjajah, tetapi yang lebih utama adalah karena ada persamaan visi

---

[1] Naskah ini ditulis sebagai pengantar diskusi dalam Kongres Kebudayaan V yang diselenggarakan di Bukit Tinggi pada tanggal 20-23 Oktober 2003. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Saleh Sjafei, dosen Universitas Syiah Kuala, yang sekarang sedang menyelesaikan program doktor sosiotogi pada Universitas Indonesia, yang telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan baru untuk menyempumakan tulisan ini

[2] Penulis adalah doktor linguistik, star pengajar pada Universitas Syiah Kuala, dan Kepala Balai Bahasa Prov. NAD

tentang masa depan untuk hidup bersama dan sejahtera bersama. Hidup bersama sebagai sebuah bangsa didorong oleh suatu pengalaman yang amat memilukan bahwa menjadi orang terjajah sungguh tidak menggembirakan. Para pemimpin kelompok etnis pada waktu itu yang tergabung dalam berbagai *jong* merasa bahwa usaha untuk melepaskan diri dari penjajah tidak dapat dilakukan dengan berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama. Untuk itu, diperlukan sebuah kesamaan perjuangan *(platform)* agar mereka dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tuan rumah yang tidak saja terlepas dari penjajah asing tetapi juga terlepas dari penjajah-penjajah yang .justru merupakan bangsa sendiri.

Di pihak lain, sejahtera bersama adalah sasaran akhir pendirian negara. Sejahtera bersama merupakan tujuan negara sehingga sebuah negara yang tidak dapat menyejahterakan para warga negara merupakan suatu malapetaka, suatu sumber konflik. Konflik ini akan menghasilkan dua akibat. Akibat pertama adalah disintegrasi. Peristiwa ini dapat menimpa negara-negara yang multietnis seperti Indonesia. Apa yang telah terjadi di Timor Timur merupakan salah satu bukti dari kekalahan Indonesia, apa pun alasan yang dikemukakan di balik peristiwa itu. Beberapa daerah yang bahkan kini mulai menyuarakan rasa ketidakadilan setelah 58 tahun hidup bersama tidak dapat semata-mata dilihat sebagai suatu tindakan subversif, suatu makar kepada pemerintah yang sah. Justru suara itu menjadi pertanda bahwa mereka mulai menggugat visi sejahtera bersama. Keinginan membangun sebuah bangsa baru berdasarkan kelompok etnis yang lebih kecil merupakan harapan baru manakala mereka merasa bahwa telah terjadi ketidakcocokan yang tidak dapat ditawar lagi antara mereka dengan negara. Akibat kedua adalah pergantian pemerintahan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada negara-negara yang dibangun atas satu etnis tertentu, misalnya Israel. Jika terjadi konflik di negara seperti ini, yang berubah adalah sistem pemerintahan atau pemerintahnya, bukan suatu disintegrasi, Bagi Indonesia, kalau hanya terjadi pergantian rezim, upaya mengatasi konflik sudah cukup bagus, tetapi bagaimana kalau terjadi disintegrasi? Memang benar bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Akan tetapi, apakah bangsa itu, etniskah?

Konflik yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Poso,

Ambon, dan Papua, adalah akibat dari kesenjangan persamaan, keadilan, penegakan hukum, dan kepemimpinan nasional (Kompas 26 Agustus 2003:35). Di Aceh, misalnya, konflik timbul terutama karena ada rasa ketidakadilan. Menurut orang Aceh, provinsi mereka memiliki kandungan alam yang melimpah, tetapi hasil kandungan itu hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati oleh mereka. Sebagian besar justru pemerintah tetapi lambat laun, menjadi sentimen etnis dengan orang Jawa karena anggapan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah Jawa.

Konflik sering timbul dari hal-hal yang sederhana, yang sepele. Di Ambon, misalnya pertikaian berdarah hanya bermula dari sebuah peristiwa kecil, yaitu pemalakan sopir angkutan umum. Akan tetapi, hal yang kecil itu kemudian berkembang menjadi isu-isu sensitif lain, yang melibatkan multietnis. Ini berarti bahwa ada kemungkinan jauh sebelum itu telah terdapat bibit-bibit permusuhan pada antaretnis, tetapi baru seperti api dalam sekam. Ia menjadi terbakar karena ada yang menyulutnya.

2. Nasionalisme

Apakah nasionalisme masih cukup ampuh untuk mempersatukan keragaman masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya berbeda dalam bingkai sebuah negara bangsa? Pertanyaan ini kiranya perlu diajukan mengingat bahwa perubahan global telah memberikan ancaman serius bagi nasionalisme.

Pertama adalah sentimen etnis. Etnis memiliki daya kekuatan mengikat yang bersifat primordial berupa ikatan darah dan kekerabatan, bahasa, serta budaya yang sarna. Ikatan etnis dapat menimbulkan suatu solidaritas yang kuat dan sentimen etnis. Peristiwa di Yugoslavia dan Cekoslovakia, misalnya, dengan mudah dapat menghancurkan wawasan kebangsaan.

Di Indonesia bagaimanapun kemerdekaan adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara terburu-buru. Kemerdekaan itu lebih didasarkan atas keinginan memiliki sebuah negara berdaulat. Penjajahan yang telah memakan waktu lebih dari tiga setengah abad telah menimbulkan trauma berkepanjangan, yang tidak saja pada bangsa asing tetapi juga pada bangsa sendiri. Untuk mengatasi trauma ini, merdeka adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh dengan segera. Bahwa setelah merdeka ternyata kemudian timbul masalah-masalah sosial, ekonomi, dan

politik sebagai akibat dari banyaknya pulau dan banyaknya etnis sarna sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Peristiwa Timor Timur sebagaimana dikemukakan di atas merupakan suatu kekalahan politik, suatu tamparan, bahwa Indonesia tidak mampu menjaga keutuhan wilayah negara.

Kedua adalah agama. Di Indonesia nasionalisme tidak hanya dapat dilihat, etnis menjadi spirit untuk mencari hidup bersama dalam suatu komunitas tertentu, Akan tetapi, pluralitas etnis di Indonesia juga disatukan oleh unsur agama, yang , kemudian diformulasikan dalam sila pertama Pancasila. Agama menjadi inspirasi kesetiakawanan tanpa memandang ia berasal dari agama mana. Hal itu dengan jelas terbukti bahwa meskipun Islam adalah agama terbesar di Indonesia, usaha untuk menempatkan kata-kata Islam dalam sila pertama tadi tidak pernah mendapat legitimasi. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu agama merupakan salah satu perekat bangsa, Perkembangan sejarah memperlihatkan bahwa hampir-hampir tidak ada konflik di seluruh kepulauan Indonesia ketika para agamawan mempersatukan aneka kelompok etnis dalam sebuah wadah agama yang sama.

Akan tetapi, yang terjadi pada saat ini ternyata telah berlainan. Agama tidak menjadi barang yang ampuh untuk melegitimasi semangat kebangsaan. Peristiwa di Aceh memperlihatkan bahwa agama tidak cukup kuat untuk menjadi tameng nasionalisme. Padahal, semua orang tahu bahwa Aceh adalah Serambi Mekkah, yang berarti menjadi pintu utama Islam. Adat, hukum, kanun, dan resam di sana selalu bersendikan kepada agama Islam. Pemerintah bahkan telah memberikan perlakuan khusus kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam.

Ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sebuah bentuk nasionalisme yang sangat kuat untuk melahirkan loyalitas kepada bangsa dan negara. Nasionalisme ini tidak menonjolkan persamaan nasib, tetapi yang lebih utama adalah menciptakan suatu keadilan, suatu kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Jika Aceh yang mengandung kekayaan alam yang berlimpah ruah tetapi tidak mampu membuat rakyat mereka sejahtera, maka menjadi sia-sia untuk mengharapkan loyalitas mereka kepada bangsa dan negara. Apa yang terjadi di Aceh Utara, misalnya, dengan ladang gas dan pupuk yang begitu besar, tetapi di belakang pabrik-pabrik itu tinggal masyarakat dengan

perumahan yang kumuh, mata pencaharian yang tidak menentu, harga barang yang selangit, maka berbicara tentang nasionalisme kepada mereka, berbicara kepada mereka bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hanya menjadi bahan tertawaan.

Bukan hanya di Aceh Utara, bahkan di seluruh Aceh, janji-janji pemerintah telah dianggap sebagai angin lalu, Pemasokan gula pun melalui pelabuhan Sabang, yang dikatakan telah menjadi bebas, untuk komoditas orang Aceh masih juga dicekal. Ini baru satu hal yang sederhana, belum lagi yang rumit-rumit. Padahal, dalam banyak kesempatan, pemerintah selalu mengatakan bahwa apapun akan diberikan kepada Aceh asal mereka tidak meminta merdeka. Orang Aceh lalu menuntut, yang dimaksud dengan "apa pun" itu lalu apa?

3. Simbol Budaya

Indonesia adalah negara yang didirikan bukan atas dasar persamaan budaya.Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut kebudayaan, Indonesia adalah sebuah bangsa yang cukup rapuh. Tidak cukup banyak perekat yang dapat digunakan untuk mempersatukan etnis-etnis di negeri ini. Bahwa ada sumpah pada tahun 1928, sumpah pemuda, tetapi sumpah itu hanya berisi ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tidak ada satu budaya. Jika pada saat ini kita berusaha membangun sebuah simbol budaya, yang kemudian kita beri nama kebudayaan Indonesia, maka usaha itu merupakan sebuah harapan, sebuah perjalanan panjang, yang memang bukan tidak bisa dilakukan.

Kebudayaan adalah sesuatu yang dapat diciptakan, direkayasa, Rekayasa budaya diperlukan agar etnis Indonesia dapat berhubungan satu sarna lain dengan harmonis, Untuk maksud itu, Jepang adalah salah satu negara yang dapat ditiru karena mereka telah cukup berhasil mengembangkan kebudayaan mereka. Mereka telah mulai melakukan usaha membuka diri pada masa Restorasi Meiji, Usaha itu, yang pada awalnya bagi sebagian orang sangat menganggu jati diri mereka, pada saat ini telah membuat Jepang memiliki kebudayaan tunggal. Mereka dapat menyaring dan menyerap semua yang masuk dalam bidang apa pun tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai orang Jepang. Harus diakui bahwa memang hal ini dapat

mereka lakukan dengan mudah karena Jepang adalah negara yang tidak multietnis. Mereka hanya memiliki minoritas suku Ainu dan, sedikit warga negara keturunan Korea.

Indonesia adalah negara multietnis sehingga merekayasa sebuah kebudayaan Indonesia menjadi tidak mudah. Jika kita mengirimkan duta seni, misalnya *seudati* ke luar negeri, kita masih dapat mengatakan bahwa itu adalah kesenian Indonesia. Akan tetapi, ketika kembali ke Indonesia, *seudati* adalah tarian orang Aceh, terlepas dari siapa pun yang menjadi penarinya. Jika ada sebuah usaha untuk menciptakan sebuah tarian Indonesia dengan mengambil unsur-unsur tari dari etnis lain, hal itu malah akan dikatakan sebagai sebuah pencurian, pelacuran, plagiator. Kalau begitu, tidak dapatkah kebudayaan Indonesia itu direkayasa?

Baiklah, sebelum pertanyaan di atas dijawab, ada baiknya diberikan gambaran terlebih dahulu tentang peran dan fungsi bahasa sebagai salah satu perangkat kebudayaan. Kedua topik ini perlu dijelaskan karena pada akhirnya harus diakui bahwa bahasa (Indonesia) merupakan salah satu kebudayaan .

Indonesia yang paling kokoh, yang menjadi perekat etnis-etnis di Indonesia. Bahasa merupakan harapan untuk menetralisasi atau menemukan alternatif yang dapat meminimalisasi tindakan yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan, banyak pihak dalam situasi konflik di Aceh. Hanya masalahnya adalah bahwa konflik di Aceh lebih cenderung masuk ke dalam kategori politik, tetapi itu tidak berarti bahwa secara sosial bahasa tidak memberikan pengaruh bagi naik turunnya derajat konflik tersebut. Tulisan ini tidak berpretensi untuk memberikan solusi pada masalah itu, tetapi untuk menggambarkan bahwa bahasa sebagai salah satu aspek budaya dapat memberikan kontribusi pada semangat kekompakan secara sosial dan kultural.

Masyarakat Aceh pada saat ini sedang berada dalam suatu situasi, suatu periode perubahan sosial, yang tidak menggembirakan dalam berbagai dimensi. Kondisi sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik sedang mengalami ketegangan. Meskipun demikian, dimensi budaya dapat memberikan sedikit harapan untuk mengurangi konflik yang berkepanjangan di wilayah itu. Sebagai masyarakat atau daerah yang hampir seluruhnya menganut agama Islam semestinya nilai budaya atau

bahasa menjadi lebih tinggi dan oleh karena itu lebih memungkinkan untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik. Para pemuka agama yang memiliki Integritas dan kompetensi dalam bidang bahasa, paling tidak. memiliki kekuasaan (karena bahasa adalah kekuasaan) tertentu dalam masyarakat, dapat diikutsertakan dalam meredakan derajat konflik yang ada.

Dalam situasi atau kondisi apa pun dimensi budaya dalam suatu *setting* sosial akan menampilkan sejumlah atribut dan bahasa adalah salah satu contoh atribut budaya yang demikian itu. Ciri-ciri budaya seperti itu telah memungkinkan orang-orang untuk memperlihatkan identitas sosialnya. Identitas sosial mengacu pada definisi-diri *(seif-definition)* seseorang dalam hubungannya denaan orana lain. Oleh karena itu, ada kecenderungan bahwa dengan budaya (budi bahasa) tertentu orang-orang juga dapat memperlihatkan dari lapisan atau kelompok mana mereka itu berasal. Seseorang yang datang dari kelompok pertikaian,(prokonflik), misalnya, ada kemungkinan akan menunjukkan tata krama berbahasa yang berbeda dari kelompok lain yang cenderung kompromi (antikonflik). Hal itu tergantung juga pada objek atau substansi apa yang menyebabkan suatu peristiwa konflik menjadi terbuka sedemikian rupa sehingga dengan peristiwa itu terbawa konsekuensi laten yang tidak diharapkan bagi negara atau masyarakat luas. Ada beberapa hal yang memperlihatkan bahwa bahasa sangat terkait dengan budaya. *Pertama*, bahasa itu sendiri adalah bagian dari budaya. Sebagian besar perilaku atau tindakan manusia dilingkari DIsh bahasa sehingga bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya. Upacara, ritual, nyanyian, ceritera, mantera, kutukan, dca, dan hukum, semuanya itu adalah sejumlah tindakan atau peristiwa so~ial yang menggunakan atau melibatkan bahasa. Keseluruhan arena budaya seperti sosialisasi, pendidikan, tukar menukar (barter), dan negosiasi juga seluruhnya tercakup dalam bahasa. Peristiwa atau konflik yang terjadi di Aceh sekarang adalah salah satu konflik budaya yang berkaitan dengan bahasa juga. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya bagian dari budaya tetapi ia 'juga merupakan unsur utama dan krusial. Dengan demikian, siapa saja yang berupaya untuk masuk ke dalam dan memahami suatu budaya tertentu haruslah menguasai bahasa dalam budaya itu.

Hanya dengan penguasaan bahasa seperti itu memungkinkan orang tersebut berpartisipasi dalam dan mengalami suatu kebudayaan. Perubahan bahasa *(language shift)*, atau hilangnya suatu bahasa yang secara dekat berkaitan dengan budaya adalah pertanda perubahan kebudayaan dalam pengertian yang luas.

Kedua, bahasa adalah suatu indeks kebudayaan. Dengan perkataan lain, bahasa dapat berperan sebagai petunjuk dalam memahami suatu budaya tertentu, dan itu merupakan suatu produk-ikutan *(by-product) pada* tataran yang lebih abstrak-terhadap perannya sebagai bagian dari budaya. Dengan bahasa, orang-orang dapat menemukan cara-cara berpikir atau cara mengorganisasikan pengalaman hidup mereka dalam budaya bersangkutan. Tentu saja, bahasa juga memberikan berbagai istilah leksikal untuk sejumlah benda budaya, nilai-nilai, dan perilaku yang diakui dalam budaya tersebut. Namun, di luar itu bahasa juga rujukan *(referents)* tersebut pada umumnya dikelompokkan. Warna-warna, gejala, penyakit, hubungan kekerabatan, makanan, tanaman, bagian badan *(body parts)*dan spesis hewan, misalnya, merupakan tipologi-tipologi yang terikat-budaya *(culture-bound typologies)*. Demikan pula, kualitas-kualitas mereka yang sistematis, yang diakui secara budaya, ditemukan melalui bahasa-bahasa yang terkait dengan budaya bersangkutan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pengguna bahasa tertentu dipaksakan untuk hanya mengenali kategori-kategori yang disandikan dalam bahasa ibunya.

Ketiga, bahasa dapat dijadikan sebagai simbol budaya. Dalam kaitan ini, bahasa adalah sistem simbol manusia yang paling lengkap. Tidak dapat dimungkiri bahwa ada bahasa tertentu yang menjadi simbol dari sebuah etnokultur. Ini tidak hanya kasus suatu bagian mewakili keseluruhan, tetapi juga suatu kasus dari bagian menjadi sebuah simbol yang bersatu untuk atau menentang keseluruhan dan, dalam beberapa kasus, menjadi suatu penyebab dalam untuk dirinya. Gerakan-gerakan bahasa dan konflik-konflik bahasa memanfaatkan bahasa sebagai simbol-simbol untuk memobilisasi masyarakat untuk bertahan (atau menyerang) dan membantu perkembangan (atau berupaya menolak) budaya-budaya yang berhubungan dengan mereka.

Selama beberapa dasawarsa di bawah kekuasaan Orde Baru, misalnya, masyarakat Indonesia yang heterogen dalam

banyak aspek (suku, agama, daerah, dan lain-lain) mengalami proses homogenisasi, penyeragaman dalam budaya (cara berpikir, adat, bahasa, dan seni) untuk menghindari konflik (disintegrasi) dan menjunjung tinggi konsensus dan kesepakatan (integrasi) berdasarkan keputusan politik yang dirancang oleh penguasa dari atas *(top-down decision making)*. Penyeragaman itu bagaimanapun tidak selalu tidak baik, tidak selalu merugikan masyarakat dalam suatu negara modern. penyeragaman sering pula memberikan kemudahan dan keuntungan bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Sebuah organisasi sosial, seperti birokrasi, sering memerlukan upaya-upaya penyeragaman, sentralistis, untuk kepentingan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Pada waktu Orde Baru melakukan pembangunan (modernisasi) dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi itu, hal itu dilakukan untuk mencapai taraf kemajuan tertentu berdasarkan pendekatan modernisasi. Setiap strategi kebudayaan atau bentuk konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan *(manifest)* dan yang tidak diharapkan *(latent)*. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terstruktur menjadi satu, sebagaimana diimpikan oleh pendiri bangsa, hendak dicapai oleh rezim Orde Baru dengan cara mengorbankan sebagian kekayaan budaya untuk jangka waktu tertentu.

Namun, upaya menjadi seragam itu kadang-kadang telah mengabaikan keberagaman. Usaha pemberian otonomi khusus, yang bahkan di Aceh menjadi lebih istimewa lagi, mungkin merupakan salah satu usaha menemukan kembali keberagaman. Sayang, yang terjadi kemudian adalah bahwa otonomi justru lebih memperlihatkan kesegaraman daripada keberagaman. Untuk menjadi pemimpin, harus putra daerah dan bahkan ada lagi daerah yang mempersyaratkan bahwa menjadi anggota terhormat (anggota dewan) harus lulus uji kepatutan dan kelayakan terhadap bahasa daerah. Hal terakhir ini pada satu sisi menguntungkan bagi upaya melestarikan bahasa tersebut tetapi pada sisi lain ini adalah sebuah sindrom otonomi yang salah kaprah.

Sebagai bagian dari budaya yang lebih besar, bahasa dapat berperan sebagai pengungkap nilai-nilai dan norma-norma hidup bersama dalam masyarakat dan sekaligus juga sebagai alat

komunikasi antaranggota masyarakat itu. Peran pertama memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang muncul dalam pola tindakan orang-orang dalam berbahasa dapat membantu memberikan gambaran atau corak individu atau kelompok dalam suatu masyarakat negara. Peran kedua menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi sarana *(tools)* individual (warga negara) dan kelompok (etnis) untuk kebutuhan interaksi dan komunikasi di antara mereka dalam negara bersangkutan.

Dalam situasi konflik di Aceh bahasa (lokal dan nasional) agaknya dapat menghubungkan konflik dengan resolusinya. Peran media massa cetak dan elektronik menjadi sangat besar dalam menyampaikan pesan dan informasi, baik berkaitan secara langsung dengan substansi konflik maupun secara tidak langsung dengan para pihak atau kelompok operasional yang bertikai. Media massa itu memiliki kekuasaan dan kompetensi untuk menggunakan bahasa tertentu yang memungkinkan kedua pihak melakukan sesuatu, baik untuk meningkatkan intensitas konflik maupun menurunkan kekerasan konflik. Semakin keras dan emosional bahasa yang dipakai dalam proses komunikasi pesan oleh individu atau insitusi yang diwakili individu, semakin mungkin pula konflik itu meningkatkan derajat pertikaian antarkelompok. Dalam hubungan ini, para pemuka masyarakat dan intelektual menjadi sangat penting untuk merancang suatu strategi budaya yang bernuansa bahasa religius, cendekia, yang memperlihatkan keefektifan pesan konsensus.

Konflik sosial dapat dipahami qalam dua dimensi. Yang pertama, konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial, sedangkan yang kedua, konflik adalah suatu pertikaian terbuka *(manifestconflic;t)* , seperti perang, fevolusi, pemogokan, dan gerakan perlawanan. Jika dilihat dari dimensi pertama, konflik merupakan salah satu bentuk dasar dari interaksi sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. la memiliki jalinan yang sangat erat dengan pelbagai proses yang mempersatukan para anggotanya dalam kehidupan sosial. Konflik bukan hanya sekadar lawan dari persatuan. Konflik dan persatuan dapat dilihat sebagai bentuk lain dari sosiasi *(sociation)*, yang berarti yang satu tidak lebih penting atau lebih mutlak daripada yang lain. Konflik dan kompromi (konsensus) keduanya biasa saja dan merupakan interaksi yang bersifat timbal-balik. Namun, jika dipandang dari dimensi kedua, konflik

sosial sudah memiliki implikasi pada konflik politik yang bernuansa perlawanan atau perebutan kekuasaan. Konflik di Aceh cenderung berkaitan dengan keduanya, yang boleh jadi berawal pada konflik sosial dan berakhir pada konflik yang bernuansa politis.

Betapa pun, dalam ilmu-ilmu sosial, kebudayaan merupakan salah satu fokus teoretis yang mendasar. Secara umum budaya tersebut dapat dimengerti sebagai kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Warisan sosial itu juga mengandung karakter normatif, yakni para individu dari suatu komunitas terikat oleh kebersamaan dan rasa memiliki terhadap kebudayaan mereka. Hal itu terungkap dalam kesamaan persepsi tentang dunia sekitarnya dalam wujud simbol-simbol tertentu yang didukung oleh seperangkat aturan sanksi. Pada saat itu kesamaan tadi telah menjadi kebiasaan karena tala cara seperti itu telah dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dalam kelompoknya. Dalam ilmu-ilmu sosial konsep budaya tersebut dipahami dalam berbagai makna yang bervariasi dan sebagian di antaranya bersumber pada keragaman model yang mencoba menjelaskan hubungan antara masyarakat, kebudayaan, dan individu.

Salah satu simbol budaya yang menjadi kebudayaan Indonesia adalah, bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasaIndonesia berakar dari bahasa Melayu, tetapi laju perkembangan bahasa Indonesia sebagaimana kita saksikan pada saat ini sarna sekali telah berbeda dart induknya, bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah rekayasa kebudayaan Indonesia karena menampung tidak semata-mata bahasa-bahasa daerah tetapi juga bahasa dunia lain, bahkan yang lebih utama daripada itu adalah bahasa Indonesia menjadi sebuah pusaka yang diterima tanpa ada pertumpahan darah meskipun pada waktu itu, tahun 1928, penutur bahasa etnis terbanyak adalah bahasa Jawa. Boleh saja jika sebagian orang mengatakan bahwa penerimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah memiliki sejarah panjang di bumi Nusantara ini sebagai sebuah *lingua franca*, tetapi yang lebih utama lagi sebetulnya adalah karena tidak terjadi suatu persaingan bahasa. Persaingan bahasa bukan saja tidak terjadi dengan bahasa kolonial, bahasa Belanda, meskipun bahasa itu

sejak tahun 1907 telah diajarkan di sekolah dasar untuk orang bumiputera, tetapi juga dengan bahasa-bahasa daerah yang cukup banyak di Indonesia. Untuk itu, penghargaan patut diberikan kepada para pemuda itu yang demi semangat persatuan telah menyingkirkan solidaritas kedaerahan. Usaha mereka untuk kemudian memberi nama bahasa Indonesia adalah juga suatu upaya untuk menghilangkan rasa kesukuan yang akan tidak mungkin akan menjangkiti etnis Melayu tempat bahasa itu digunakan.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol perekat bangsa. Ia menjadi sebuah bahasa persatuan, bahasa nasional. Label nasional ini menjadi pertanda bahwa bahasa Indonesia adalah milik seluruh etnis Indonesia, di mana pun ia berada. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai kelompok etnis yang berbeda latar belakang sosial budayanya, serta alat perhubungan antarbudaya dan antar daerah.

Bahasa Indonesia, sebagai sebuah simbol perekat bangsa, juga menjadi bahasa negara. Dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa media massa, pendukung sastra Indpnesia, serta pemerkaya bahasa dan sastra daerah.

Persamaan budaya pada antaretnis di Indonesia tidak semata-mata merupakan suatu rekayasa. Perilaku kehidupan sehari-hari orang Indonesia juga dengan nyata memperlihatkan suatu persamaan budaya. Keramahtamahan, memuliakan tamu, tidak suka dipegang kepala, dan banyak lagi ciri lain adalah menjadi pertanda bahwa Indonesia ini satu. Di samping itu, jika mau dikaji lebih jauh, misalnya ke alam sastra, dongeng-dongeng di Indonesia, katakanlah durhaka kepada orang tua, memiliki ciri yang hampir sarna pada setiap daerah. Inilah sebetulnya yang harus dikembangkan ke depan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memang benar-benar *bhinneka tunggal ika.* Cerita seperti Malin Kundang di Minang, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Amat Rhang Manyang di Aceh jelas-jelas dibangun dari unsur-unsur yang memperlihatkan kesamaan budaya antaretnis

di Indonesia. Demikian pula, perjuangan mengusir penjajah, melawan kebatilan dan kemungkaran, yang terjadi merata di seluruh tanah air merupakan simbol-simbol yang dapat merekat persatuan. Jika ini tidak lagi dipandang sebagai milik etnis tertentu tetapi milik bangsa, ia merupakan perekat yang cukup kuat untuk mencegah disintegrasi. Untuk maksud itu, diperlukan di sini suatu keterbukaan, terbuka yang tidak saja untuk menerima keberagaman etnis, tetapi juga terbuka untuk menerima pengaruh yang di luar etnis.

Penutup

Keberagaman budaya merupakan rahmat Tuhan karena dari keberagaman ini pula rasa saling menghargai dapat tumbuh dengan subur karena selalu saja ada yang memberi dan ada pula yang menerima. Konflik tidak akan terjadi apabila setiap orang dapat menerima kehadiran orang lain dengan tangan terbuka. Tidak ada kecurigaan karena ada perbedaan. Dalam konflik di Aceh, misalnya, perbedaan kepentingan jangan dilihat sebagai sebuah perlawanan, sebuah gerakan separatis, yang kemudian harus dihancurkan dengan senjata. Pendekatan budaya justru lebih diperlukan untuk mengakhiri konflik tersebut. Pendekatan budaya, yang diiringi dengan semangat nasionalisme, akan melahirkan suatu kesamaan pandangan, kesamaan nasib, dan keinginan untuk selalu hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

BUDAYA MELAYU SEBAGAI FAKTOR INTEGRATIF

Oleh: **Utusan Propinsi Nusa Tenggara Barat**

I. POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Menghadapi perubahan drastis yang terjadi secara mendasar seyogyanya penentu kebijakan selain dituntut mempunyai kecerdasan individual yang lebih penting lagi adalah kecerdasan sosial.
2. Rekayasa kontrak-kontrak sosial budaya haruslah menggunakan pendekatan budaya.
3. Institusi/pranata lokal yang diseragamkan kedalam wilayah administratif pemerintah ternyata menimbulkan kesan bahwa orang lebih mengenal "kebudayaan daerah" yang seakan-akan bertingkat-tingkat menurut pola daerah administrasi (Dati I, Dati II, dan lain-lain) Ketimbang "Kebudayaan asli dan lama".
4. Buah reformasi berupa suasana : demokratis, bebas dan terbuka telah dimaknai secara berlebihan dalam upaya pemenuhan akan identitas individu ataupun golongan sehingga berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan yang tidak mustahil dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
5. Kearifan lokal terabaikan sehingga cukup banyak terjadi marjinalisasi kelompok masyarakat/etnik tertentu yang pada akhirnya menimbulkan disintegrasi.

II. PENGARUH BUDAYA MELAYU DI NTB DAN POTENSINYA SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN

AI RAMENA BENRANG TA
TUMUNG MO KEMANG KAMATE
BUKAL BAKOLAR KEDAWA
BUA KURENA PANG NINTA
ADA KEMANG KURASATE
GUGIR KUPILI KENYAWA

Dua bait lisan tradisional etnik Sumbawa (salah satu dari 3 etnik mayoritas di NTB yang disebut LAWAS masih hidup dan berkembang saat ini apalagi pada event-event tertentu sering

diadakan lomba RABALAS LAWAS (berbalas pantun) antara muda-mudi.

Begitu pula yang ada pada etnik lainnya, yaitu : etnik Sasak (disebut LELAKAQ) dan etnik Mbojo (Bima) yang disebut PATU. Komedi Stambul dikenal di Lombok dengan istilah Komedi Rudat.

Kecuali adanya pengaruh Bali/Jawa dibeberapa kawasn di Lombok, rata-rata seni pertunjukan yang ada bernafaskan Islam. Di Lombok ada Zikir, Zaman, Rudat, Cilokaq; Di Sumbawa ada Ratib Rebana Ode/Rea, Langko/Sakeco, sedangkan di Bima ada Dompu ada Hadrah dan Rawa Mbojo. Pemekaran kebudayaan Melayu memang telah menjadi salah satu faktor pengikat masyarakat indonesia yang majemuk. Tersebar luasnya berbagai Kesenian Melayu menjadi lebih mudah dan praktis antara lain, oleh penggunaan bahasa Melayu di wilayahnya yang sangat luas di Nusantara ini. Faktor agama islam menjadi dasar yang kuat bagi Kebudayaan Melayu untuk dengan mudah mengalir kemana-mana dan diterima masyarakat dan diluar lingkungannya.

Demikian pula yang telah terjadi di NTB, setelah mengetahui kenyataan tersebut masih tersisa sebuah peryataan, mampukah budaya melayu (atau pengaruhnya) di NTB menjadi faktor perekat integrasi bangsa?.

Untuk menjawab peryataan tersebut perlu kita kaji beberapa bentuk kearifan lokal yang masih layak dikaji untuk mendapat acuandalam memahami dampak sekaligus perubahan sosial yang terjadi.

Lawas Sumbawa yang terdiri 2 bait sebagai pembuka bagian II tulisan ini mempunyai makna (nilai dasar) sebagai berikut:

Bila kita mencintai sesuatu (dalam hal lawas tersebut sesuatu itu : bunga = bahasa Sumbawa KEMANG) kalau sesuatu itu rusak,gugur atau mendapat kesulitan kalau perlu kita bela dengan NYAWA !, begitu pula dengan Republik ini. Jangan biarkan dia rusak becerai-berai. Kita harus bela mati-matian.

Suku Sasak mengenal sebuah ungkapan tradisional sebagai berikut :

BARENG ANYONG JARI SEJUKUNG

Yang artinya :

Kalau kita sudah satu perahu biarlah hancur-hancuran dan harus sehidup semati.

Etnik Mbojo mengingatkan para pemimpin/elit-elit poitik lewat sebuah ungkapan tradisional :

AI NA KANIILMU MBIA OO
MA ESE DI HNTA
MA AW DI TONDA

"Jangan pake ilmu belah bambu yang diatas diangkat (angkat) yang dibawah diinjak-injak.

Peringatan yang keras dari kawasan Bima/Dompu ini sebenarnya berupa lampu merah bagi segenap pembuat kebijakan. Marjinalisasi rakyat yang sudah memang terpinggirkan akan menimbulkan kesenjangan baru yang menganga lebar-lebar menelan semua bentuk kesrakahan kekuasaan lalu bagaimana petuah etnik Mbojo agar pemimpin disegani rakyat dan konflik dapat dikelola dengan baik ?. Mereka mempunyai nasehat yang baku terhadap siapapun yang merantau : MAJA LABO DAHU.

Artinya : Malu dan takut

Malu kepada manusia (karena selalu membuat pekerjaan tercela) dan takut kepada Tuhan.

Yang paling penting masyarakat Bima/Dompu punya pesan pamungkas bagi siapapun yang jadi pemimpin dimanapun dan kapanpun : NGGAHI RAWI PAHU

Yaitu SATU KATA DENGAN PERBU ATAN Barang yang sangat langka saat ini !

Aspek-aspek kearipan lokal memang tersebar dalam kehidupan sehari-hari (*daur hidup*) upacara-upacara, arsitektur dan terutama sesekali ungkapan tradisional ataupun sastra lisan. Dalam kaitannya dengan tulisan ini lebih banyak dibicarakan ungkapan dan sastra lisan.

Bagaimana etnik-etnik mayoritas di NTB mengimplementasikan kekuatan-kekuatan yang dikandung oleh kearifan-kearifan tersebut.

Memang pengaruh pengkotak-kotakan etnik dalam wilayah administratif menyebabkan terjadinya perbedaan motto dalam satu etnik karena berlainan wilayah administratif.

Misalnya : Bima dan Dompu merupakan satu etnik yaitu **Mbojo.** Tapi mottonya berbeda.

Bima	: MAJA LABO DAHU
Dompu	: NGGAHI RAWI PAHU
Sumbawa	: SABALONG SAMALEWA

Lombok Timur : PATUH KARYA
Lombok Tengah : TATAS TUHU TRASNA
Lombok Barat : PATUT PATUH PATJU

Memang menerapkan motto-motto "daerah" tersebut masih sekedar wacana. Belum pernah ada semacam peneltian seberapa jauh pengaruh tulisan-tulisan tersebut kepada perubahan perilaku masyarakat pendukung wilayah administratif tersebut. Barang kali hasil paling nyata dapat dilihat ialah bahwa para pemimpin daerah merasa bangga karena sudah mempunyai motto setara dengan kabupaten lain di Indonesia. Kalau kita simak mulai dasar motto-motto tersebut akan mulai berkisar kepada petuah-petuah kehidupan yang harus dipatuhi kalau ingin selamat dunia akhirat.

Sumbawa misalnya: SABALONG SAMALEWA
Artinya : Perbaiki dengan konsep keseimbangan (harmon/ balance)

Lombok Timur: PATUH KARYA
Artinya : Konsisten patuh dalam bekerja (tentang Etos Kerja).

Lombok Tengah: TATAS TUHU TRASNA
Artinya : Trampil (Cerdas)-sungguh-sungguh-Cinta (Kesejahtraan).

Lombok Barat: PATUT PATUH PATJU
Artinya : terpuji (taat)-sungguh-sungguh dalam bekerja, dll.

Untuk lebih dapat memahami seberapa jauh rakyat NTB (dalam pengaruh budaya Melayu) yang dimiliki petatah-petitih, ungkapan-ungkapan tradisional dan kesenian dalam nafas islam, menghadapi krisis. Kita simak hal-hal sebagai berikut:

Di Sumbawa ada pesan moral lewat seuntai lawas yang mengusung dengan jelas konsep pemeliharaan atau respons terhadap krisis.
Pesan tersebut berbunyi :

"LAMIN TUTU SAYANG KEMANG
JOLO PUIN LEMA TUNGKA MA LEMA
BELO MO NYUMPING

Artinya : Bila kamu betul-betul mencintai sekuntum bunga Kalau pohonnya condong, HARUS SEGERA di topang agar kita abadi menyumping

Jadi kita diingatkan untuk segera menyelesaikan masalah haruslah dikurangi kebiasaan kita mendiskusikan beberapa derajat condongnya pohon bunga tersebut, angin jenis apakah yang menerpanya, dan lain sebagainya, tanpa usaha segera menopangnya (ingat drama "ADUH" karya Putu Wijaya)

Apa sebabnya harus segera diselesaikan. Agar tidak jadi krisis kepercayaan dikalangan masyarakat.

Konsep SALING dalam budaya Sumbawa sangat kental bertujuan menyelesaikan konflik :

- SALING SADU = SALING PERCAYA
- SALING SATINGI = SALING MENGHORMATI
- SALING SATOLONG = SALING MENGINGATKAN
- SALING SAKIKI = SALING MENGERTI DALAM KEPRIHATINAN
- SALING BEME = SALING MEMBIMBING
- SALING PENDI = SALING MENGASIHANI

Kita tidak begitu mengetahui apakah karena konsep tersebut betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Sumbawa merupakan wilayah teraman di NTB.
(Kerusuhan terjadi dalam rentang waktu 23 tahun yaitu : 17 November 1980 dan baru-baru ini kerusuhan 25 september 2003, yang ditayangkan secara luas oleh media elktronik).Masih banyak lagi khasanah budaya lokal yang layak direvitalisasi tapi "pemaksaan"selama bertahun-tahun agar selalu berkiblat kepada "budaya nasional" yang antara ada dan tiada menyebabkan seperti yang dinyatakan oleh Almarhum Umar Kayam "Akan banyak kekhasan etnik itu hilang, akan banyak wajah tradisi musnah".

Hal itu sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi republik ini seperti hilangnya species hutan tropis, ketika habitatnya dibabat demi pembangunan !.

Bila bagian-bagian dari identitas kita hilang satu-persatu nanti akan tiba saatnya kita kehilangan semua dan tidak lagi mengenal diri sendiri.

Seperti Orang sasak mengatakan : MARAK MANUK BEKESENA
Yang artinya : Seperti ayam di depan cermin

Dia mencatok-catok bayangan yang ada di cermin (disangka musuh) karena dia tidak lagi mengenal bayangan tersebut adalah dia sendiri !.

III. KESIMPULAN/SARAN

1. Bagaimanapun, pengaruh budaya Melayu sudah lama ada di NTB dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam kurun waktu yang lama serta merupakan keutuhan bangsa.
2. Semua kearifanlokal dalam segala bentuk/jenisnya hanya akan merupakan Wacana bila masyarakat/pemerintah tidak punya kemauan politik yang Jelas dalam implementasinya. Kalau perlu ada legistimasi dalam bentuk perda
3. Sosialisasi kearifan lokal tersebut haruslah dengan melibatkan secaraoptimal media yang ada dengan cara-cara yang komunikatif, sederhana dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Yayasan kelola

1999 **Direktorat Organisasi Seni Budaya Indonesia**.

Komisi Bersama Proyek Pelayaran Budaya Kawasan Timur Indonesia

1994 Dokumentasi Induk pelayaran Budaya Kawasan Timur Indonesia, Kelimutu Flores.

Leo Kleden

2000 **Mencari Wajah Indonesia dalam Pergeseran Paradigma Kebudayaan**. Seminar seni pertunjukan Indonesia Seri I STSI Surakarta.

Mus Biawan

2000 **Kekuasaan itu dimulai Ketika Cinta Bau bensin**. Seminar Seni Pertunjukan indonesia Seri I STSI Surakarta.

Mus Biawan

2003 **Kearifan Lokal kekuatan yang terabaikan**. Dialog Budaya PAB X Mataram

Tim Perumus Pra Kongres Kebudayaan V

2003 **Rumusan Prakongres Kebudayaan V Denpasar**

KEBUDAYAAN MELAYU SEBAGAI FAKTOR INTEGRASI BANGSA**

Oleh: **Tim Provinsi Riau**

I

Pembahasan topik ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia selama jangka waktu panjang ataupun jangka selama puluhan terakhir terutama tahun sejak 1928 bahwa kebudayaan Melayu telah memberikan sumbangan kepada perwujudan dan pembentukan jati diri/identitas bangsa Indonesia.

Kebenaran penyataan itu perlu dibahas pada kongres ini mengingat bangsa Indonesia semakin mengkhawatirkan sebagai bangsa yang satu akan terus berlanjut atau dapat tetap dipertahankan?

Bagaimana kebudayaan Melayu terutama di Riau dulu, kini, dan masa depan perlu dikaji supaya bangsa ini dapat tetap menghargai keberadaan berbagai masyarkat dan, suku bangsa, daerah, sebagai bangsa yang majemuk, namun menjadi **Taman Sari Yang Indah** yang telah memberikan kesenangan, kebahagiaan, kesetiakawanan, kebersamaan, kekuatan, dan kesejajaran dengan masyarakat lainnya di tanah air atau di sejagat belahan dunia ini.

Metode historis dengan bantuan pendekatan ilmu sosial dalam kajian akan digunakan supaya pembahasan lebih komprehensif dan sejalan dengan pengertian budaya dalam arti daya cipta, rasa, karsa, dan karya manusia untuk keperluan kehidupan manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Budaya dimaksudkan segala aspek kehidupan manusia yang sekurang-kurangnya meliputi sistem sosial, sistem budaya dan kebudayaan fisik (lihat Koentjaraningrat, 1985 dan 1987, Harysa, 1985).

Berbagai sumber dan karya tulis (baik berbentuk prasasti, manuskrip, maupun buku dsb) serta hasil pengamatan dari kenyataan dalam masyarakat kini tentang kebudayaan Melayu akan dijadikan sumber rujukan untuk memperoleh kondisi dan

---

** Makalah pada Kongres Kebudayaan di Bukittinggi, 18-23 Oktober 2003

potensi kebudayaan Melayu itu.

Dari kondisi dan potensi kebudayaan Melayu masa dulu akan dapat diperoleh bukti-bukti nyata tentang kebolehan kebudayaan Melayu sebagai faktor integratif bagi terbentuk dan kelangsungan bangsa Indonesia yang ***Bhinneka Tunggal Ika*** – atau masyarakat ***majemuk*** ini? Bagaimana unsur-unsur budayanya seperti bahasa Melayu apakah menjadi faktor penentu bagi lahirnya jati diri bangsa yang tersebar di belahan bumi lebih dikenal dengan Nusantara dan sekarang Indonesia? Dari manakah dimulai kajian itu apakah kajiannya dapat diawali dari sejak nenek moyang bermastautin di kepulauan Nusantara diteruskan berkembangnya Kedatuan Sriwijaya (7 abad), diteruskan dengan Keprabuan Mojopahit, dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan penganjur agama Islam, Aceh, Mataram, Malaka, Johor-Riau, Johor-Riau-Lingga-Pahang, kerajaan di Ternate-Tidore, Goa-Tello, Bugis-Makassar, kerajaan di Maluku lainnya, sampai Indonesia merdeka dan diteruskan sampai kini dan bagaimana perspektifnya ke depan? Kajian itu perlu dibatasi ruang lingkupnya supaya memudahkan dan sejalan dengan kondisi kini dan keperluan masa depan tentunya?

Batasan kajian itu meliputi masalah-masalah yang mencakup : sekilas kondisi-potensi masa lalu, kini, dan perspektif ke depan, analisis tentang unsur dari sistem budaya-sistem sosial dan fisik Melayu dan dikaitkan dengan keperluannya memelihara dan memperkukuh jati diri bangsa sebagai faktor penentu integrasi bangsa dan negara kesatuan RI.

Dalam bagian selanjutnya akan dikupas secara ringkas bagian-bagian tersebut, untuk memberikan gambaran tentang kaitan budaya Melayu sebagai faktor integrasi bangsa.

II

Kondisi dan potensi budaya Melayu sebagai bagian dari budaya nasional telah memberi petunjuk bahwa budaya tersebut mempunyai peranan dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai pemberi identitas bahwa salah satu unsur budayanya yaitu: Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan.
Seperti dikukuhkan pada Sumpah Pemuda 1928, serta seterusnya ditetapkan dalam UUD Negara RI bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

Untuk melukiskan kebudayaan Melayu menurut pendekatan

sejarah dapat dirujuk makalah Suwardi Ms, pada 22-28 Juni 2002, antara lain mengatakan bahwa Orang Melayu sebagai pendatang ke Nusantara adalah 3000-15000 S.M., dan 500 SM. Dikenal dengan Melayu Tua dan Melayu Baru dengan budaya bahasanya sebagai identitas yang tersebar dari timur ke barat; Pulau Pas sampai ke Madagaskar; dari utara ke selatan Formosa sampai ke Selandia Baru.

Dari persebaran itu mereka menetap di Nusantara dan salah satunya di kepulauan di kawasan Selat Malaka, yaitu di pulau-pulau Riau, pesisir dan pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan dan pada masanya telah mengembangkan bahasa Melayu kuno di kerajaan Sriwijaya abad 7-14 M. Bukti-buktinya dapat dipelajari dari prasasti, berita asing: Cina, Arab dan Portugis, Belanda dan sebagainya. Seterusnya dilanjutkan abad ke 13 M – 1928, dan pada 1945 dikukuhkan sebagai bahasa negara.

Perkembangan budaya dapat diketahui dari sumber tertulis sebagaimana tertuang dalam hikayat, syair, berbentuk manuskrip yang dapat dipelajari seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Joohor, Syair Perang Siak, Hikayat Hang Tuah, dan sebagainya.

Dari sumber-sumber itu dapat dikaji dari adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya. Masyarakat mengenal tingkatan adat. Tingkatan itu adat sebenar adat, adat yang teradat dan adat yang diadatkan. Dari nilai dapat pula diklasifikasikan: norma, nilai, hukum dan ketentuan khusus (lihat Koentjaraningratt, 1987).

Dalam sistem sosial ini sebagai contoh bahwa masyarakat Melayu mengenal sistem kekerabatan yang diatur oleh ketentuan adat. Sistem kekerabatan itu dapat diklasifikasikan Melayu kepulauan, Melayu Pesisir, dan daratan. Adatnya dikenal adat Raja-Raja (ketemanggungan) dan adat datuk-datuk – bersuku-suku (Adat Parpatih), dan menganut garis keturunan patrilinal dan matrilinal. Ketentuan adat telah melahirkan suatu masyarakatnya yang tertib, aman, dan damai. Masyarakatnya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Masyarakatnya mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dalam masyarakat diambil keputusan seperti ungkapan bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Sopan santun menurut budi bahasa, mereka suka merendah-rendah, mengutamakan harkat dan martabat, marwah, dsb.

Masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam masyarakat

Melayu terutama kebudayaan Barat, maka kebudayaan Melayu diperkaya sepanjang memenuhi ketentuan dari kebudayaan Melayu itu. Namun, ada dari unsur kebudayaan Barat sangat bertentangan dengan jati diri mereka seperti agama yang dianut tidak sesuai maka mereka mengadakan perjuangan-perjuangan karena nilai-nilai hakiki yang dimiliki telah dirusak, dan mereka kehilangan kemerdekaan. Proses berikutnya menghasilkan kembali setelah diperoleh kemerdekaan dari kekuasaan Belanda, dan kembali dikukuhkan budaya itu sejak 17-08-1945. Sebaliknya, kebudayaan Melayu, khususnya bahasa Melayu merupakan kebudayaan daerah di Riau. Mengingat Orang Riau sebagai bagian bangsa Indonesia maka selama puluhan tahun masyarakat Riau tidak memperoleh kesempatan berperan serta lagi bahkan menjadi masyarakat yang terpinggirkan. Kondisi itu menimbulkan perjuangan membentuk provinsi otonom dan berhasil sejak 1957. Namun, kondisi sentralistik yang sangat kuat mengkibatkan masyarakat Riau tetap menjadi masyarakat tersisih.

Era reformasi yang berkembang memberikan peluang kepada daerah terutama sejak diterapkannya UU tentang otonomi. Dari sejak penerapan UU itu, daerah Riau sudah kembali kepada jati diri sebagai pendukung budaya Melayu untuk menjadikan budaya Melayu itu sebagai roh pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti tertuang pada Perda yang akan disebutkan berikut nanti.

Menurut Stephanus Djawanai (2002), bahasa Melayu digunakan secara cukup luas sebagai lingua franca demi ke niaga dan perdagangan dan bahkan demi syiar agama (dari Pasari, ke Minangkabau, ke Jawa, ke Sulawesi, Halmahera, kepala burung Papua), dan pada masa awal kemerdekaan menjadi alat pemersatu dan pembentuk kesadaran berbangsa, maka setelah proklamasi ia dijelmakan, ditransformasikan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kebangsaan dan alat perekat kebangsan Indonesia, dan telah dapat membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa modern".

Kenyataan pula bahwa penulis bahasa dan sastra Melayu, dan khususnya Melayu Riau yaitu Raja Ali Haji telah berucap dalam karya terkenalnya Gurindam XII pasal ke lima bahwa:

"jika hendak mengenal orang yang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa"

Singkatnya **budi bahasa menunjukkan bangsa**

Pada sisi lain bahwa kebudayaan pada intinya berakar pada sistem nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakatnya.

Kebudayaan Melayu memiliki berbagai nilai-nilai (lihat Tenas dkk, 2002) seperti nilai keterbukaan, kemajemukan, persebatian, tenggang rasa, kegotong-royongan, senasib-sepenanggungan, malu, bertanggung jawab, adil dan benar, berani dan tabah, arif dan bijaksana, musyawarah dan mufakat, memanfaatkan waktu, berpandangan jauh ke depan, rajin dan tekun, nilai amanah, ilmu pengetahuan takwa kepada Tuhan, dll.

Dari nilai-nilai itu, yang terkait dengan topik ini ialah nilai persebatian, atau persatuan dan kesatuan yang menjadi asas kerukunan hidup antarsesama anggota masyarakat tanpa memandang asal-usulnya. Ungkapan yang sering didengar ialah: bersatu kita teguh bercerai kita rubuh, ke bukit sama mendaki dan ke lurah sama menurun, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, dsb. Selain itu, nilai senasib sepenanggungan. Nilai ini mengutamakan kebersamaan, rasa kasih-mengasihi, saling bertenggang rasa. Terkenal ungkapan: setikar sebantal tidur, sepiring-sepinggan makan, seanak sekemanakan, senenek dan semamak, seadat dan sepusaka atau dikatakan: makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan, dsb.

Dari nilai-nilai itu dapat dibuktikan bahwa budaya Melayu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kondisi ini terlihat pula telah terjalin hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara berbagai etnik di Indonesia/ Nusantara yang memperkuat satu sama lain, seperti abad 10 M telah terjalin perkawinan antara dara Melayu dengan gadis Mataram yang melahirkan Candi Prambanan di sekitar Yogyakarta. Pada abad 13 M telah pula terjadi pernikahan antara putri Melayu dengan bangsawan Singosari dan perkawinan itu melahirkan seorang pemimpin Mojopahit dan seterusnya menjadi Raja Minangkabau, yaitu Adityawarman.

Pada abad ke 18 M telah pula terjadi perkawinan antara keturunan bangsawan Bugis-Makassar yaitu keturunan Daeng Rilakka: Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Perani, Daeng Kemasik, dan Menambun. Di antaranya telah dibuat sumpah setia Melayu dan Bugis dan hasilnya melahirkan putra-putri Melayu yang sangat berjasa dalam pembakuan bahasa Melayu yaitu Raja Ali Haji bin Raja Ahmad yang menghasilkan puluhan

karya bermutu dalam kebahasaan dan kesastraan.

Berkat karyanya itu pula bahasa Melayu mampu menjadi bahasa tulis dengan berbagai aspek bahasa tatabahasa, kamus, dan sastra yang bermutu seperti Gurindam XII tersebut di atas.

Raja Ali Haji dengan pengarang-pengarang lain dari Penyengat Riau telah berhimpun dalam satu organisasi pengarang Melayu disebut Rusydiah Club sekitar tahun 1892 M.

Melalui organisasi ini, para pengarang Riau telah memberikan pemikirannya untuk keperluan memperkuat persatuan, dan tujuannya mengangkat pemikiran pula tentang marwah, harkat dan martabat Melayu sebagai kelompok yang telah mengalami penjajahan dan mereka kehilangan kemerdekaan. Kenyataan ini telah dipelopori oleh Khalid Hitam yang berangkat ke Jepang tahun 1913 M untuk mengadakan pendekatan dalam usaha memberikan pengertian agar Jepang mau dan mampu membantu Melayu menghadapi Belanda supaya Melayu memiliki kemerdekaan (lihat Sejarah Riau, 1977).

Dari kenyataan itu, dapat pula disaksikan potensi budaya Melayu yang cukup besar guna memperkuat persatuan dan kesatuan (integrasi) bangsa Indonesia. Apabila potensi itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, maka gejala-gejala disintegrasi yang mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini tentu dapat diredam dan sekurang-kurangnya dapat diminimalkan.

Pada masa kini Budaya Melayu justru semakin mengjkhawatirkan kita pula karena makin berkembangnya berbagai stereotipe yang sangat merugikan dan bahkan memberikan dampak negatif yang merugikan kepada pendukung budaya Melayu itu.

Mengingat kondisi itu pula, masyarakat peduli dan pemerintah telah menetapkan suatu peraturan daerah yang terkenal dengan Perda Provinsi Riau No. 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2001-2005. Menurut Perda tersebut ditetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah.

Visi itu ialah: **"Terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakatt yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara tahun 2020"**.

Misi ialah:

1. Mewujudkan masyarkat Riau yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah guna membentuk karakter, moral, dan etika masyarakat yang agamis.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kehidupan demokratis, guna tercipta masyarakat madani.
4. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi, politik, dan budaya agar tercipta dan terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pembinaan industri, perdagangan dan jasa yang maju didukung oleh agroindustri dan agribisnis.
6. Dst
7. Dst
8. Membina dan mengembangkan kebudayaan Melayu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan jati diri sehingga tercipta masyarakat Melayu yang maju, mandiri dan mampu bersaing.
9. Dst

Arah dan kebijakan serta strategi yang akan ditempuh meliputi:

Arah pembangunan antara lain Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan sebagai berikut

a) Kesenjangan antardaerah, antarkota dan desa, antargolongan masyarakat dalam hal pendapatan.
b) Kesenjangan antarpusat dan daerah dalam hal pembagian pendapatan
c) Isu-isu internasional seperti globalisasi, kerjasama ekonomi subregional perdagangan bebas, lingkungan, dan sejenisnya
d) Kesenjangan pembangunan antarsektor
e) Kesenjangan fisik dan nonfisik

Pelaksanaan dari visi, misi, strategi itu diarahkan kepada lima pilar pembangunan yaitu:

1. Iman dan Taqwa;
2. Sumber Daya Manusia;

3. Perekonomian Kerakyatan;
4. Olahraga dan Kesehatan;
5. Seni Dan Budaya.

Pelaksanaan dari visi, misi, arah dan kebijakan dan strategi serta lima pilar itu secara umum telah mulai kelihatan yaitu ditetapkannya Master Plan Pembangunan Riau. Dengan demikian, bahwa di Riau masalah budaya mendapat tempat yang seimbang dengan perekonomian. Mengingat sosialisasi konsep-konsep itu belum menyeluruh maka hasilnya masih mengalami berbagai hambatan dan kelemahan.

Kondisi kini di Riau tentang pembangunan budaya semakin menggembirakan tetapi perlu penajaman program supaya hasilnya sesuai dengan visi, misi, serta ketentuan lain yang telah ditetapkan itu.

III

Dengan bertolak dari bagian II di atas perlu dikaji kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi Kebudayaan Melayu, baik untuk kepentingan daerah, nasional maupun global.

Kekuatan kebudayaan Melayu dalam membentengi rakyat, masyarakat, bangsa dan negara dapat dikaji dari peranan bahasa dan nilai-kebudayaan Melayu secara komprehensif yang telah mampu menjaga keutuhan masyarakat majemuk dan dapat berproses sebagai masyarakat dinamis, menuju masyarakat maju. Pemda Riau telah menetapkan peran kebudayaan Melayu untuk ke depan dalam Perda Provinsi Riau.

Kelemahan budaya Melayu bahwa generasi muda dan generasi penerus kurang memahaminya dan menghati serta mengaplikasikannya sehingga lahir streotip masyarakat Melayu yang menimbulkan dilema untuk peningkatan produktivitas dan pembinaan lebih lanjut.

Peluang dalam pembinaan cukup besar karena adanya berbagai kajian dan pertemuan baik lokal, nasional, maupun internasional sehingga akan memberikan kesempatan pengembangan dan pemanfaatannya dalam pergaulan global. Di antaranya telah disepakati adanya badan-badan, lembaga formal dan nonformal yang bergiat untuk keperluan menumbuh-kembangkan kebudayaan Melayu. Ancaman yang menuntut

kewaspadaan ialah orang Melayu semakin terpinggir dan marginal dalam persaingan lokal, nasional dan internasional.

IV

Dengan memperhatikan analisis swot di atas kiranya secara nasional, lokal dan global menuntut berbagai upaya nyata. Upaya-upaya itu diantaranya ialah:

1. Aplikasi visi, misi nasional dan daerah senantiasa menjadi milik anggota masyarakat secara luas.
2. Dilakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkelanjutan ke tengah-tengah masyarakat tentang konsepsi kebudayaan Melayu itu.
3. Kalangan peminat, pakar, dan praktisi senantiasa bekerja sama dalam menentukan prioritas dan memberikan masukan untuk keperluan kemajuan kebudayaan Melayu.
4. Dunia pendidikan supaya melahirkan kurikulum berdasarkan kompetensi untuk pewarisan kebudayaan itu kepada generasi penerus dan kebudayaan yang komprehensif dapat dijadikan dasar dalam proses pembelajaran.
5. Sumber-sumber dan peninggalan kebudayaan Melayu perlu dipelihara dan diselamatkan dan dapatt dijadikan objek sebagai media perkenalan dan penyebaran secara nasional, dan internasional.
6. Upaya-upaya praktis lainnya perlu digali dan dilaksanakan guna tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Melayu itu.

V

1. Kebudayaan Melayu telah membuktikan keberadaannya dalam merekat kesadaran nasional dalam negara kesatuan RI .
2. Mengingat kebudayaan itu mempunyai dinamika, maka keberadaan kebudayaan Melayu dalam arti luas senantiasa memberikan jati diri secara nasional dan internasional, terutama bahasanya memerlukan kepedulian secara berkelanjutan dalam pembinaannya.
3. Kebudayaan lokal dan nasional perlu terus dibina dan dikembangkan supaya proses integrasi tidak mengalami penurunan yang semakin mengkhawatirkan karena adanya gejala-gejala disintegrasi bangsa.
4. Pencantuman kebudayan nasional dalam visi, misi, strategi nasional dan daerah perlu ditindaklanjuti dalam propenas dan propeda.

Saran yang dapat diajukan antara lain ialah:

1. Para penyelenggara negara diharapkan mampu mengerti bahwa kebudayaan bukan sub ordinat pembangunan tetapi sebagai ordinat.
2. Pemahaman kebudayaan sebagai ordinat itu perlu dituangkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan negara.
3. Dunia pendidikan dapat mengangkat dan mengaplikasikan kebudayaan Melayu itu dalam proses pembelajaran.
4. Ungkapan di mana bumi dipijak dan di mana langit dijunjung agar dapat menjadi kenyataan dalam penyelenggaraan negara supaya integrasi nasional semakin kukuh
5. Pembinaan kebudayaan perlu mendapat porsi pembiayaan yang wajar.
6. Mereka yang ahli dan berprofesi dalam kebudayaan diberi peluang dalam berkarya secara leluasa
7. Budaya Melayu dapat membentengi dalam keterjangkitan penyakit masyarakat, dan untuk itu perlu dimanfaatkan secara optimal.

Bahan Rujukan

Affandi, Raja Mohammad

1974 *Tokoh-Tokoh Melayu yang Agung dalam Sejarah*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

Ali Akbar, Dt. Pangeran

1996 *Kemittraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar Riau*, Bangkinang.

Alatas, SH,

1988 *Mitor Pribumi Malas, Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonialisme*, LP3ES, Jakarta.

Abu Hassan Sham

1980 *Diskusi Peristiwa-Peristiwa dari Hikayat Hang Tuah*, Sarjana Enterprise, Kuala Lumpur.

Budisantoso, Prof. Dr. ed. Dkk

1986 *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, Pemda Tk. I Riau, Pekanbaru.

Bakker, J.W.M.Sj.
1989 *Filsafat Kebudayaan sebuah Pengantar*, Penerbit Kanisius, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta.

Diamond Larry dan Planttner F. Marc
1994 *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, Penerbit ITB

Hamzah Yunus
2001 *Naskah-Naskah Kuno Riau*, Penerbit Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Pulau Penyengat dengan Yayasan Sosial Chevron dan Texaco Indonesia.

Hanafi Nollah, Lokman M.Zen, penyunting
1995 *Kebudayaan Melayu di Ambang Abad Baru*, Jembatan Persuratan Melayu, UKM, KL.

Husin Ali, S.
1985 *Rakyat Melayu, Nasib dan Masa Depannya*, Penerbit Inti Sarana Aksara, Malaysia

Koentjaraningrat
1987 *Kebudayaan, Mentaliras dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta

Lembaga Adat Daerah Riau
1991 *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Proyek IDKD Provinsi Riau, Pekanbaru.
1991 *Adat Istiadat Dian Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan*, Pekanbaru.

Liaw Yock Fang
1976 *Undang-Undang Melaka, The Law of Malaka*, The Haque-Martinus Nijhoff, Singapore.

Lukman Sinar, Tengku Basyarsyah II, SH (Sultan Negeri Sedang) dan Wan Syaifuddin, MA,
1987 *Kebudayaan Melayu Sumatra Timur*, USU, Medan

Matheson, Virginia, ed.
1982 *Tuhfat Al-Nafis*, Raja Haji dan Raja Ali Haji, Penerbit Fajar Bakti, SDN.BHD, Kuala Lumpur

Mohd. Taib Osman
1983 *Bunga Rampai Kebudayaan Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kem, Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

Mohammad Yusoff Hashim
1992 *Hikayat Siak*, dirawikan oleh Tengku Said, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kem. Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
1992 *Pensejarahan Melayu*, Kajian tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kem. Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur

Muchtar Lutfi, Drs. (ed), dkk.
1977 *Sejarah Riau*, Tim Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau, Pemda Dati I Riau.

Netscher, E., Terj. Wan Ghalib, dkk.
1870 *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602-1865*, Bruining & Wijt, Batavia

Pemda Provinsi Riau,
2001 Perda No. 36 tahun tentang *Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau*, 2001-2005.

Raja Rulis, dkk, BA
2000 *Pedoman Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, Badan Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi, Teluk Kuantan

Rahim Syam dan Norhale
1985 *Mendekati Kebudayaan Melayu*, Fajar Bahakti SDN, BHD, Petaling Jaya, Malaysia

Samad Ahmad, A.
1986 *Sulatussalatin (Sejarah Melayu)*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kem. Pel. Malaysia, Kuala Lumpur

Sartono Kartodirdjo
1987 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900, dari Emporium sampai Imperium*, Jilid 1, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta

Sharifah Maznah Syed Omar
1995 *Mitos dan Kelas Penguasa Melayu*, Alih Bahasa Dr. Mohammad Diah, M.ed. P2 KBM UNRI, kerjasama UNRI Press, Pekanbaru

Schnitger, F.M.
1991 *The Forgotten Kingdoms in Sumatra*, Singapore

Soekmono, R.DR.
Tt *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, 1, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sumijati AS dkk, editor,
2002 *Intergasi, Moral Bangsa dan Perubahan*, Unit Pengkajian dan Pengembangan Fbud UGM, Sineergi Press,.

Suwardi Ms, Prof,
1991 *Budaya Melayu dalam Perjalannya Menuju Masa Depan*, Puslit UNRI, Pekanbaru.
1996 *Kendala Orang Melayu Menghadapi Globalisasi*, Makalah pada Symposium Melayu Dunia, 23-26 September 1996 di Selangor Malaysia
1998 *Rekonstruksi Kontroversi Kepemimpinan Provinsi Riau dari Putra Daerah (Suatu Tinjauan Refleksi dan Perspektif Sejarah)*, Makalah Seminar Sehari, 11 Juli 1998
2000 *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
2001 *Adat dan Tradisi Masyarakat Melayu : Jati Diri Menuju Masyarakat Madani (Masa Lampau, Kini, dan Masa Depan)*, Laporan Penelitian Lemlit Unri, Pekanbaru.
2002 *Keb. Melayu: Kondisi, Potensi, Peranan dalam Menuju Indonesia Baru*, Makalah pada Lat II HMI, Pekanbaru, 22-28 Juni 2002.

Wee, Vivienne
1985 *Melayu : Hierarchies of Being in Riau*, Thesis Degree PhD, Australian National University

Biodata Singkat

Nama:		Suwardi Mohammad Samin
Tempat Tgl Lahir	:	Sentajo, Kuantan Singingi, 23 Juli 1939
Alamat	:	Jl. Ali Kelana No. 3 Pekanbaru, Telp. 0761-22941
Pendidikan Terakhir	:	Sarjana Pendidikan Sejarah IKIP Bandung Jabatan
Struktural Terakhir	:	Pembantu Rektor IV Unri 1995-1997
Fungsional	:	Guru Besar FKIP Unri 1987-2009
Organisasi Profesi	:	Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Cabang Riau, 1975-2005
Karya Ilmiah	:	Sejarah Riau, 1977 Raja Haji Marhum Telok Ketapang Malaka, 1982/83 Suman Hs, 1983/84 Sejarah Perlawanan Menentang Kolonialisme dan Imperialisme Belanda di Riau, 1984; Sejarah Perjuangan Sultan Syarif Kasim II, 1997 Budaya Melayu dalam Perjanannya Menuju Masa Depan, 1991 Dll.

Makalah mengenai sejarah dan budaya di pertemuan lokal, nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah
2001 "1:1iJ "penggunaan dan', Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: KebijakanNegara dalam Pemecahan Konflik Etnis", Makalah dalam *Simposium dan Lokakarya Internasional II: Globalisasi dan Kebudayaan Lokal*. Padang, Sumatera Barat, 18-21 Juli 2001.

Alwi, H. dan Sugono, D. (ed.).
2000 *Politik Bahasa.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Damono, S.Dj.
2001 "Catatan Kecil tentang Kebudayaan dan Keutuhan Bangsa", dalam Sedyawati (peny.): 122-33.

Deutsch, K.W.
1966 *Nationalism and Social Communication.* Cambridge: The MIT Press. Johnson, D.P. (ed.). 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Diindonesiakan oleh Robert M.I. Lawang. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat
1993 *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional,* Jakarta: Universitas Indonesia.

Kuper, A. dan Kuper, J. (ed.).
1996 *The Social Science Encyclopedia.* London: Routledge.

Schellenberg, J.A.
1996 *Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice.* Albany: State University of New York Press.

Sedyawati, E. (pe'ny.).
2001 *Permasalahan Integrasi dan Disintegrasi Bangsa.* Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Simatupang, M.
2001 "Penyelamatan Bangsa dari Bahaya Disintegrasi", dalam Sedyawati (peny.): 26-54,

"LAWATAN SEJARAH" DAN INTEGRASI BANGSA

Oleh: **Susanto Zuhdi**[1]

Sebuah bangsa dapat dicitrakan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sejarah dan budayanya. Maka muncullah ungkapan "bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah (tentu juga budayanya)". Akan tetapi benarkah bangsa Indonesia telah menghargai sejarah dan budayanya sendiri? Bangsa ini terbukti sedikit sekali mempunyai perhatian dan apalagi memelihara sumber, situs, dan bangunan bersejarah. Di sana sini bahkan didengar banyaknya benda-benda bersejarah yang hilang (dicuri) atau dirusak. Bukankah peninggalan sejarah merupakan "jembatan" antara masa lampau dengan masa kini? Sementara itu ditengarai bangsa ini mudah melupakan yang "baik-baik", tetapi mudah mengingat yang "buruk-buruk". Sedangkan para elite penguasa menggunakan sejarah dalam arti historiografi sebagai alat legitimasi kekuasaannya. Tampaknya sejarah telah dipakai secara lebih praktis "hanya" untuk kepentingan kelompok atau golongan untuk memperkuat posisi politiknya masing-masing. Lalu masih hidupkah nasionalisme pada bangsa ini.

Di mana pula nilai-nilai budaya malu, tenggang rasa, gotong royong masih ada. Atau sudah menguap entah ke mana. Jangan lupa bahwa Kabinet sekarang ini diberi nama "Gotong Royong". Padahal nilai-nilai tersebut sangat diperlukana ketika bangsa ini menghadapi berbagai krisis yang berpangkal pada krisis moral.. Tantangan berat bangsa ini ke luar adalah menghapus citra sarang teroris dan ke dalam sebagai tempat berkecamuknya konflik antaranak bangsa sendiri yang telah menelan korban jiwa dan harta yang sangat besar. Dapatkah nilai-nilai sejarah (perjuangan bangsa) diberi makna baru untuk membangun Indonesia kini dan masa depan.

Menjadi Indonesia

---

[1] Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Asisten Deputi Sejarah Nasional pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sesungguhnya masa lampau dari penduduk di kepulauan ini telah memperlihatkan bukti-bukti sejarah yang merupakan faktor-faktor melandasi terbentuknya keindonesiaan. Sepanjang sejarah Indonesia menunjukkan faktor integratif dan disintegratif. Memang konsep kebangsaan dalam terminologi "Indonesia" baru muncul awal abad ke-20. Akan tetapi kerangka dan akar-akarnya dapat dilacak dalam abad-abad sebelumnya. Aspek-aspek geo-historis memperlihatkan kemungkinan bagi lahirnya bangsa Indonesia.

Meskipun "Indonesia" adalah konsep politik, tetapi ia bermakna historis-sosiologis. Tampak adanya proses-proses integratif dari bagian-bagian yang dahulu merupakan Hindia Belanda, kemudian menyatakan dirinya sebagai bangsa merdeka. Jadi keindonesiaan adalah proses yang diperjuangkan, baik ketika dalam penjajahan dulu dan ketika di alam merdeka sekarang. Semangat dan nilai para pejuang bangsa dapat dilihat melalui bukti-bukti sejarah yang disebut sebagai simpul-simpul ingatan kolektif bangsa. Konsekuensi dari perlawanan, mereka dibuang atau diasingkan dan banyak yang hingga akhir hayatnya.

Makalah ini berusaha menempatkan permasalahan bangsa dalam kerangka penjelasan nasionalisme kontemporer, dan menawarkan konsep program "Lawatan sejarah" sebagai upaya merajut kembali simpul-simpul perekat bangsa sebagai upaya membangun kembali keindonesiaan. Melawat dalam KBBI (1995) berarti mengunjungi negeri lain dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. "Lawatan Sejarah" adalah suatu kegiatan berkunjung ke masa lampau (*journey into the past*) ke tempat-tempat bersejarah (*a trip to historical sites*) yang memiliki ciri dan makna keindonesiaan.

Disintegrasi Bangsa dan Tantangan Indonesia Baru

Menurut Prof. Taufik Abdullah ada empat masalah yang ditinggalkan Soeharto selaku presiden yang menyatakan dirinya mundur pada 21 Mei 1998. Pertama, soal kepresidenan; kedua, pemerintah yang goyah; ketiga, bangsa yang terluka, dan keempat, negara yang terancam disintegrasi. Soal kepresidenan tidak bermasalah besar karena para penggatinya bermunculan tetapi bermasalah pada soal-soal seterusnya. Pemerintahan yang goyah memperlihatkan konflik kepentingan elite baik di pusat maupun di daerah. Mereka memperebutkan kursi dan jabatan tetapi kecil sekali untuk

kepentingan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kini tidak ada lagi kesetiaan elite kepada massanya. Terdengar banyaknya penyimpangan anggaran di daerah-daerah yang ditengarai untuk kepentingan segelintir elite saja.

Bagaimana gejala seperti ini dapat dijelaskan, padahal bangsa sedang mengalami keterpurukan. Datangnya reformasi menjadikan katup-katup pengaman jebol dan segala aspirasi menyeruak ke atas. Ketika gejala tersebut tidak tertangani dalam mekanisme organisasi dan manajemen yang rasional dan mengutamakan kebersamaan, maka yang muncul adalah primordialisme. Begitulah ketika UU no 22/1999 tentang otonomi daerah, meskipun di satu pihak positif tetapi juga banyak memperlihatkan dampak negatif. Terjemahan otonomi daerah yang terlalu kaku pada kepentingan daerah menjadi bersifat "kedaerahan". Lalu di mana letak negara kesatuan sebagai bingkai yang mempertautkan keindonesiaan.

Jika keindonesiaan dilihat dalam perspektif nasionalisme, maka pada masa lampau perwujudannya terlalu dituntut dari warga negara untuk sepenuhnya tunduk kepada pengertian konstruksi yang dibangun oleh negara. Negara bahkan tidak saja telah menguasai kesetiaan setiap individu tetapi juga kesadaran sejarahnya. Keterlukaan bangsa bukan hanya soal kebanyakan anggotanya tidak memperoleh kebutuhan fisiknya tetapi juga kebutuhan mengemukakan aspirasinya. Kecemburuan yang terjadi pada masyarakat menimbulkan konflik sosial merupakan ancaman disintegrasi sosial. Oleh karena diketahui bahwa yang menyebabkan kecemburuan adalah praktik pembangunan yang tidak merata, maka sasarannya adalah pemerintah yang nota bene harus mewujudkan cita-cita negara. Sehingga tidak heran jika pemenuhan mereka lalu diwujudkan ke dalam bentuk pengingkaran terhadap negara. Disinilah lahir keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dua wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman keutuhan NKRI adalah Aceh dan Papua. Sejarah kontemporer kedua wilayah itu memang sejarah kegetiran.

Bagi rakyat Aceh, masa lampau mereka adalah perjuangan panjang membebaskan penjajahan dan yang kemudian setia kepada RI, tetapi ironisnya tidak dibalas dengan kemauan membangun bumi Indonesia paling barat itu. Siapa yang dapat menyangkal sumbangan rakyat Aceh terhadap perjuangan

kebangsaan dan kemerdekaan RI. Siapa yang tidak kenal sejumlah pemikir Islam yang telah meninggikan tamaddun di Nusantara (Asia Tenggara ketika itu). Siapa yang tak tahu besarnya sumbangan rakyat Aceh terhadap Republik pada awal masa kemerdekaan. Mengapa Aceh terus bergolak dan berkonflik. Ada apa dengan Aceh? Tampaknya adanya kekecewaan yang dalam orang Aceh terhadap perkembangan terutama pada periode kontemporer sesudah kemerdekaan, pada tahun 1950-an yang hingga kini belum terpecahkan secara tuntas. Dalam kondisi seperti ini muncul semacam perbandingan masa kini dengan masa lampau. Tidak sedikit terdengar keinginan untuk "kembali" ke masa lampau itu. Apakah ini merupakan jawaban atas permasalahan yang menumpuk di hari ini.

Hingga kini sudah banyak wacana maupun pemikiran yang telah dituangkan ke dalam program kegiatan untuk mengatasi permasalahan Aceh. Namun demikian permasalahan itu terlalu kompleks dan nyaris tak terpetakan sehingga tidak mudah diatasi. Pendekatan keamanan melalui Operasi Terpadu sampai pada bulan kelima ini, memang telah memperlihatkan kemajuan berarti. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala pada aspek-aspek lain. Pelaksanaan otonomi daerah khusus NAD juga belum menunjukkan hasil positif. Padahal menggali potensi untuk membangun infrasktur, termasuk membuka isolasi sejumlah daerah yang masih "tertinggal" merupakan satu di antara faktor kunci bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pemberian bantuan dana kesejahteraan sosial juga masih belum menjangkau luas, baik karena akibat konflik dan yang di pelosok.

Pemekaran wilayah provinsi Papua ditengarai lebih karena sarat dimuati kepentingan elite politik (pusat maupun daerah) daripada memikirkan kepentingan rakyat. Sejarah kontemporer Irian Jaya, adalah masa lampau yang mengingatkan akan pahit dan getirnya pengalaman hidup mereka. Lebih banyak yang diambil dari bumi Papua daripada manfaat yang diterima penduduk tempatan yang memang belum mampu terlibat banyak dalam "pembangunan" dengan tuntutan teknologi maju.

Dengan ketidakmampuannya itulah mereka tak dapat turut menikmati hasil alam. Penduduk hanya berperan sebagai penonton. Maka tidak mengherankan pula jika melalui sejarah mereka menyatakan bukan bagian dari Indonesia. Sebenarnya tidak sulit untuk menunjukkan akan adanya keterkaitan itu dan

bukan suatu yang dicari-cari. Artinya bukan merupakan sikap yang anakronistik jika sejarah masa lampau digunakan sebagai cara pandang proses keindonesiaan. Bahwa wilayah ini masuk ke dalam pemerintahan Hindia Belanda, sudah merupakan adanya keterkaitan Papua kini dengan masa lampau Indonesia. Boven Digul sebagai tempat pengasingan atau pembuangan para pejuang bangsa menunjukkan hal itu. Interaksi antara pejuang bangsa juga terjadi di antara mereka dan juga dengan orang Papua.

Adalah ketika Konferensi Malino tahun 1946, soal Irian sudah dibicarakan dalam kaitan Negara Indonesia Timur. Patut diterima dengan sikap wajar bahwa jika berbicara tentang negara federal jangan keluar dari konteks zamannya. Artinya jangan bersikap anakronistik. Sebuah wacana negera federal soal yang biasa saja. Nanti juga terlihat dalam perkembangan bahwa ada makna lain (konotatif) ketika NKRI memang merupakan kesepakatan bersama.

Kasiepo mempertahankan agar Papua tidak terpisahkan dari RI di Malino itu. Dalam waktu yang bersamaan Sam Ratulangi, gubernur Sulawesi, menolak keinginan NICA yang hendak mengembalikan pemerintahan Hindia Belanda di bagian timur kepulauan. Sam Ratulangi dengan anggota Pusat Keselematan Rakyat, sebagai akibat perlawanannya ditangkap, Mula-mula pada 5 April 1946, ia bersama dengan Lanto Daeng Pasewang, Pondaag, Latumahina, Inchi Mohammad Saleh Daeng Tompo, dan Tobing, di penjara "*Hoge Pad*" di Makassar dan pada bulan Juni 1946 dibuang ke Serui (Papua). Mereka dibebaskan pada 23 Maret 1948 dan dibawa ke Yogyakarta (Gde Agung, 1985:91-92).

Dalam masa pengasingannya, Sam Ratulangi dkk mendirikan sekolah bagi penduduk setempat. Mereka dikenal oleh masyakarat Serui sebagai "Bapak-Bapak Merdeka". Dalam masa itu pula muncul ketokohan Silas Papare yang kemudian menjadi seorang pejuangan kemerdekaan Irian (Masykuri 1987).

Konsep Nasionalisme Perlu Ditinjau Ulang

Dampak negatif pelaksanaan UU tentang Otonomi Daerah berupa sikap eksklusifisme kedaerahan yang melahirkan kecendrungan persaingan tidak sehat antarkabupaten dan provinsi menjadi ancaman integrasi bangsa. Kecenderungan

antarkabupaten yang tajam dilatarbelakangi notivasi mengejar pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kemandirian daerah seperti diungkapkan Koorwil APKASI Jawa tengah (Harian, *Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 2003). Mengenai konflik kepentingan mengenai kepemilikan wilayah seperti terjadi antara Riau dan Jambi dalam memperebutkan Pulau Berhala. Dalam konteks ini tepat membicarakan nasionalisme dengan tafsir dan makna baru. Konsep nasionalisme harus dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang. Bangsa menurut pengertian Benedict Anderson adalah "sebuah komunitas yang dibayangkan". Ia mengatakan:

> "bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh dibenak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka" (Anderson, terj. 2001:8).

Bayangkan bagaimana konsep nasion atau bangsa itu dapat diterapkan untuk penduduk yang tersebar di kepulauan yang banyak seperti Indonesia. Pengertian nasionalisme memang tidak mudah diterangkan karena menurut Brown, ia berkaitan dengan dua penjelasan yakni sebagai kategori praktik dan analisis. Brown mengemukakan tiga konsep tentang nasionalisme. Pertama mengenai ideologi, kesetiaan emosional (*emotional loyalty*), dan kepentingan (*interest*) Ketiga spektrum itu memiliki kecenderungan kuat saling tarik menarik dari sudut orientasinya masing-masing. Ketiganya dapat dijelaskan melalui 3 pendekatan: kontruktivis, primordialis, dan situasionalis.

Dalam pendekatan konstruktivis, nasionalisme merupakan ideologi yang bermuatan psikologis dan bernuansa mitos politis. Menurut pandangan ini, nasionalisme adalah identitas nasional yang dibangun dengan dasar kerangka institusional dan dirumuskan secara sederhana dan simplistis untuk mendiagnosa masalah-masalah kontemporer. Mungkin dapat diajukan contoh disini bahwa pernah muncul istilah "Kebangkitan Nasional Kedua" untuk memberi makna dalam peringatan setiap

tanggal 20 Mei pada masa pemerinathan B.J. Habibie. Gejala seperti ini mungkin termasuk upaya disengaja untuk menguatkan nasionalisme Indonesia. Biasanya ungkapan-ungkapannya sloganistis.

Dalam pendekatan primordialis, nasionalisme dilandasi pada sebuah masyarakat organik dan alamiah. Cerminannya adalah kekuatan emosional yang etnosentrik, misalnya dengan mengatakan bahwa mereka atau bangsa itu merasa berasal dari nenek moyang yang sama (*common ancestry*). Demikian pula mitos yang berkembang mengenai asal-usul yang sama (*myths of common origin*). Jika tarikan ke nasionalisme konstruktif yang ideologis sifatnya psikologis dan mitos politis, maka tarikan ke primordialis bersifat instinktif. Pendekatan situasionalis menerankan bahwa identitas etnik dan identitas kebangsaan merupakan sumber daya yang diolah oleh kelompok individu dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.

Dalam konteks perubahan yang melaihrkan tantangan dan peluang, masyarakat memiliki sejumlah pilihan dan jawaban untuk mengatasi situasi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini dapat menjelaskan maslaha-masalah yang ditimbulkan dari situasi-situasi ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. Situasi itu dapat menimbulkan gerakan etnik dan nasionalis untuk mempertahankan identitasnya. Pendekatan primordialis dapat menerangkan mengapa nasionalisme diterjemahkan sebagai identitas yang kental atau padat. Sedangkan pendekatan situsionalis menerangkan bahwa nasionalisme sebagai suatu identitas yang cair. Ini dapat dimengerti karena pada sudut primordialis, nasionalisme diikat dengan kesetiaan emosional. Sedangkan pada sudut situsionalis pengertian nasionalis didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat situsional. Tarik-menarik antara sudut pandang konstruktivis dan situasionalis terlihat pada yang pertama bersifat ideologis (kepercayaan yang dianggap benar sehingga harus diperjuangkan) dengan sudut situsionalis didasarkan pada rasionalitas.

Munculnya gejala disintegrasi sosial dan disintegrasi nasional boleh jadi karena selama ini mampatnya aspirasi lokal atau daerah ke permukaan. Nasionalisme negara terlalu kuat menekan kepada nasionalisme yang bersifat primordialis yang pada prinsipnya memang hidup. Demikian pula nasionalisme negara

kurang memperhatikan perkembangan di dalam masyarakat yang karena munculnya berbagai kepentingan tidak tertampung di dalam perwujudan nasionalisme negara.

Konflik yang bermuatan kesukubangsaan memang bukan monopoli di indonesia saja. Ketegangan itu lazim juga terjadi di Asia tenggara mulai dari yang permanen seperti di Burma (Myanmar) sampai yang ekspresinya tenang seperti di Singapura. Menurut Brown munculnya kesadaran kesukubangsaan dipengaruhi atau berkaitan dengan struktur kekuasaan. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh sebuah kekuasaan berakibat pada masyarakat sukubangsa yang merasa dirugikan atau dizalimi. Dalam konteks itu kesukubangsaan menjadi kendaraan untuk mengejar kepentingan-kepentingan baik dalam aspek ekonomi dan politik (Brown 1994:xi-xii).

Pelaksanaan UU otonomi daerah memberi peluang besar bagi daerah untuk mengelola potensinya untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dua gejala yang mencolok kini: yaitu elite yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan kedua terlalu kuatnya semangat kedaerahan.

"Lawatan Sejarah" Sebagai Sumber Motivasi

Sejarah tentu tidak hanya dimengerti sebagai masa lampau saja. Dengan sejarah tidak menjadikan kita terbelenggu apalagi menyimpan "dendam-dendam" yang se waktu-waktu muncul. Memang sejarah bangsa ini terus diwarnai konflik yang melibatkan sesama anak bangsa. Melawat ke masa lampau perjalanan masyarakat-bangsa ini justru berarti mengingatkan apa yang dapat kita hindarkan dan mana yang dapat kita pupuk terus sebagai sumber motivasi membangun kebersamaan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks belajar kembali sejarah, kebersamaan justru yang prioritas dibangun melalui komitmen dan tindakan nyata. Dalam bahasa politik, kebersamaan adalah persatuan seperti juga telah menjadi modal perjuangan bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan asing.

Dalam konteks inilah jaringan keindonesiaan dapat kita buat petanya melalui tempat-tempat pengasingan para pejuang di berbagai daerah. Sejarah perjuangan mereka dapat dilacak pada situs-situs, bangunan bersejarah, dan lingkungan masyarakat tempatan. Masyarakat melalui sejarah lisan atau tradisi lisan masih menyimpan kenangan tentang para pejuang yang

diasingkan ke daerahnya. Situs-situs sejarah itu meriupakan diaspora menarik karena menunjukkan kemana mereka diasingkan. Tempat-tempat itu dalam hal ini hendak diidentifikasi sebagai simpul-simpul yang mempertautkan sejarah antar daerah yang memberi sumbangan pada terbentuknya keindonesiaan.

Sebagai langkah awal dapat diidentifikasi sejumlah simpul dimaksud seperti berikut. Bahwa pengasingan hingga wafat dan dimakamkannya Cut Nyak Dien di Sumedang pada tahun 1908 sudah banyak diketahui. Selain itu ada juga pengasingan pejuang wanita dari Aceh lainnya, Pocut Meurah Intan pada tahun 1907 hingga wafat dan dimakamkan di Blora pada 1937. Pejuang dari Minangkabau yang diasingkan ke Sukabumi pada 1936, adalah Haji Karim Amraullah. Sedangkan Tuanku Imam Bonjol satu abad sebelumnya pada tahun 1837, pertama diasingkan ke Cianjur, Ambon dan wafat dimakamkan di Manado. Pernah muncul silang pendapat bahwa yang diasingkan itu bukan Imam Bonjol yang "asli".

Pangeran Diponegoro setelah perang usai pada tahun 1830 diasingkan mulau-mula ke Manado kemudian ke Makassar hingga wafat dan dimakamkan di sana 1855. Pejuang dari Kalimantan Selatan, Pangeran Hidayatullah diasingkan Belanda pada tahun 1862 ke Cianjur hingga wafatnya. Seementara itu dari Kalimantan Barat, Gusti Ahmad adalah putra Panembahan Sanggau yang dianggap membahayakan Belanda sehingga dibuang ke Purwakarta hingga wafatnya pada tahun 1895. Dari bagian utara Sulawesi, pejuang bernama Raja Jacob Ponto, keturunan Raja Siau, di kepulauan Sangir, ditahngkap Belanda dan kemudian dibuang ke Kuningan Jawa Barat pada 1889. Dari Sulawesi Selatan, pejuang Bugis yang diasingkan ke Bandung pada 1905, adalah La Pawawoi Karaeng Segeri.

Para pejuang dalam masa pergerakan nasional banyak dicatat dalam perjalanan pengasingan mereka ke luar daerahnya. Oleh karena aktivitas dalam Sarikat Islam (SI) pada tahun 1919-1920 tiga dari uleebalang Aceh yaitu Teuku Chik Muhammad Said dari Negeri Cunda (perbatasan dengan Lhok Seumawe), Teuku Abdul Latif dari Geudong, dan Teuku Ri Bujang dari Negeri Nisam dibuang oleh pemerintah Belanda masing-masing ke: Irian Barat, Sumatera Barat, dan ke Timor (Alfian 1999:208). Pejuang dari timur yang pernah diasing ke

Sabang adalah dokter Jonas Andreas Latumeten. Setelah dipulangkan dari Negeri Belanda karena aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia, Latumeten pada tahun 1924 hingga 1929 diasingkan di Sabang (BKSNT Ambon, 2002).

Dalam perjalanan biografinya, Sukarno setelah diadili pada tahun 1930 dipenjara di Banceu dan Sukamiskin (Bandung) lalu dibuang ke Ende, Flores pada 1935 dan ke Bengkulu 1937. Pada saat Yogyakarta diduduki tentara agresi Belanda Desember 1949, ia bersama Haji Agus Salim dan Syahrir ditawan ke Prapat. Ia kemudian dipindahkan ke Bangka. Sementara itu Hatta, Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri dibuang ke Digul lalu ke Banda Neira pada 1935. Hatta dan Syahrir pada akhir zaman Belanda diasingkan lagi ke Sukabumi (Februari-Maret 1942). dr Cipto mangunkusumo beserta keluarga telah lebih dahulu berada di kota ini setelah diasingkan di Neira. Masih banyak lagi tempat-tempat pengasingan atau pembuangan para pejuang bangsa pada masa penjajahan Belanda yang perlu diidentifikasi.

Adalah merupakan konsekuensi yang diterima para pejuang bangsa pada masa penjajahan Belanda untuk diasingkan dengan dasar hukum (*Exorbitant Rechten*). Yang penting dan menarik dicatat adalah bahwa pengertian "diasingkan" tidak berari mereka terasing dalam kehidupan masyarakat tempatan. Sekedar contoh dapat dikemukakan misalnya, Cut Nyak Dien meskipun dalam kondisi tuna netra masih sempat memberi pelajaran mengaji pada penduduk sekitar Sumedang. Sam Ratulangi mendirikan sekolah di Serui. Di tempat-tempat "baru" itu justru mereka merasa sebagai "kampung-kampung halaman" baru yang kemudian bernama Indonesia. Kini tinggal lagi bagaimana kita bekerja keras membangun kembali Indonesia kita yang sedang menghadapi permasalahan pelik ini.

Mengunjungi secara langsung situs-situs bersejarah memang sangat baik, tetapi konsep "Lawatan Sejarah" dapat juga dituangkan ke dalam sebuah peta yang dapat membantu kita memahami sebuah perjalanan keindonesiaan melalui rajutan simpul-simpul perjuangan bangsa. Memang belajar sejarah tidak cukup hanya dengan buku teks, apalagi yang miskin ilustrasi. "Lawatan Sejarah" itu sendiri dapat berimplikasi pada perjalanan-perjalanan wisata Nusantara, yang tahun ini dicanangkan sebagai Gebyar Wisata Nusantara. Sungguh jika dikemas dengan baik "Lawatan Sejarah" bukan hanya berimplikasi pada kepariwisataan tetapi juga merupakan perjalanan yang dapat merekatkan simpul-simpul keindonesiaan.

Kepustakaan

Anderson, Benedict
2002 *Komunitas Terbayang*, terj. 2002.

Alfian, Teukun Ibrahim
1999 *Wajah Aceh Dalam Lintas Sejarah*, Banda Aceh, 1999:208

Brown, David
1994 *The State and Ethnic Politics in South-East Asia.* London: Routledge.
2000 *Contemporary Nationalism Civic, Ethnocultural & Multicultural Politics*. London and New York, Routledge.

BKSNT Ambon
2002 *Serial Tokoh dan Pajuang di daerah Maluku*.

Masykuri
1987 *Sam Ratulangi dan Perjuangannya*, Jakarta, Proyek IDSN

KEMANDIRIAN EKONOMI : MENGHAPUS SISTEM EKONOMI SUBORDINASI MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT *)

Oleh: **Sri-Edi Swasono**

Pendahuluan

Saat ini kemandirian ekonomi nasional telah menjadi tuntuan riil. Ketergantungan pada keterdiktean oleh luar-negeri digugat sebagai penyelewengan mendasar dari cita-cita kemerdekaan nasional, sekaligus memperpuruk martabat, prestise dan harga diri bangsa. *Platform* nasional tentang pinjaman luar-negeri yang harus bersifat "sementara" dan "pelengkap" tidak ditaati lagi.[1][1]

Sejak awal kemerdekaan, kemandirian sejati telah tegas digariskan sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasi, mewujudkan *onafhangkelijkheid*, melepaskan diri dari ketergantungan. Selanjutnya pada awal Orde Baru, yang

---

*) Makalah ini diajukan pada Kongres Budaya V, Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

[1][1] Mereka yang mengingkari gugatan ini kiranya terperangkap oleh sindrom "*ideology fatigue*", menjadi *coquettish* dan latah dalam menyongsong de-ideologisasi, lihat Sri-Edi Swasono, *Merubah Pakem : Mewaspadai Pasar-Bebas*, dari artikel 1988 (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2001), hlm. 26.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pada tahun 1970, sebagai Staf Khusus Ketua Bappenas, penulis bertugas untuk memimpin pengumpulan data sebagai persiapan awal penyusunan Repelita II. Kebetulan pada periode berkutnya saya menjadi anggota Pokja GBHN pada SýDewan Pertahanan Keamanan Nasional, sebagai lembaga tunggal yang bertugas menyusun naskah resmi GBHN. Ada keterkaitan khusus antara Repelita II dan GBHN 1973 yang menyangkut pinjaman luar-negeri. Pimpinan Bappenas dan Pimpinan Dewan Pertahanan Nasional berpegang pada satu *platform* nasional yang ditetapkan oleh Kepala Negara, yaitu bahwa "pinjaman luar-negeri" merupakan "pelengkap dan bersifat sementara". Di balik *platform* itu terpelihara suatu paham politik nasional, yaitu bahwa di dalam pembangunan nasional ini yang kita bangun adalah *rakyat, bangsa* dan *negara* (lihat Lampiran IV). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah derivat dari paham politik nasional ini, artinya pembangunan ekonomi berkedudukan sebagai pendukung integral terhadap pembangunan rakyat, bangsa dna negara. Dari sini berkembang pemikiran strategis yang membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan sekedar "pembangunan di Indonesia". *Platform* ini kadang-kadang melembaga ke seluruh birokrasi, dan karena *platform* ini ditegaskan oleh GNýBHN, maka *platform* ini juga tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat. (Namun entah mengapa, kadang-kadang di dalam GBHN 1988 *platform* ini dilepas, tidak lagi kita temukan arahan bahwa pinjaman luar-negeri merupakan pelengkap dan bersifat sementara. Memang sejak tahun 1988 kita mengenak maraknya semangat liberalisasi dan deregulasi. *Platform* ini hilang dari GBHN bukan tanpa skenario).

mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, telah muncul ide mengenai perlunya kita memperoleh pinjaman dari luar-negeri untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan itu muncul pula gagasan tentang bagaimana kita harus berhati-hati terhadap pinjaman luar-negeri. Misalnya di dalam penggarisan *Tracee Baru* di awal Orde Baru (1966) yang digagas oleh Universitas Indonesia yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh dari Fakultas Ekonomi, sempat dikemukakan tentang syarat-syarat untuk menerima pinjaman luar-negeri, yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan altruisme) tidak mengikat dan digunakan untuk pembiayaan projek-projek pembangunan ekonomi yang masing-masing mammampu mengembalikan sendiri hutang dan bunganya. *Tracee Baru* yang digelar dan dipelopori orang-orang FEUI masih tegas-tegas mempertahankan Deklarasi Ekonomi (sebagai acuan politik) yang intinya adalah politik ekonomi "berdikari" atau "mandiri".

Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial

Secara sadar sejak Indonesia merdeka dan menetapkan UUD 1945 secara tegas pula digariskan kebijaksanaan nasional untuk melakukan "transformasi ekonomi" dan "transformasi sosial".

Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ekonomi berhakikat "merubah sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang kemokratis". Para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi itu. Oleh karenanya ditetapkan Aturan Peralihan (Ayat II) UUD 1945 yang berbunyi : "*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*". Dengan demikian maka berlakulah "dualisme" di dalam sistem ekonomi nasional. Sistem pertama berdasarkan paham demokrasi ekonomi yang secara imperatif sesuai Pasal 33 UUD 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar "kebersamaan dan asas kekeluargaan", *mutualism* dan *brotherhood*) ; dan sistem kedua berdasar paham individualisme atau "asas perorangan" mengikuti ketentuan *Wetboek van Kophandel* (KUHD) sesuai Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

Mengingat berlakunya sistem kedua (yang berdasar pada "asas perorangan") sesuai dengan aturan yang bersifat "temporer" itu, maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional "asas perorangan" (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnyalah bersifat temporer pula. Dalam kaitan tugas transformasi ekonomi ini maka Negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar "usaha bersama dan asas kekeluargaan", kadang-kadang menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada "asas perorangan", dengan kata klain, transformasi ekonomi berarti secara bertahap kita mem-Pasal 33-kan KUHD.

Ada alasan hukum, yaitu dipertahankan berlakunya asas perorangan sesuai ketentuan Aturan Peralihan (Ayat II) UUD 1945, yang mengakibatkan kita mudah bersambung dan terdikte oleh kekuatan ekonomi dari luar yang berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme, yang saat ini dengan deras dibawa oleh gelombang globalisasi. Sementara itu sistem ekonomi pasar-bebas (berdasar *market fundamentalism*) adalah sistem yang memelihara dan mempertahankan tuntutan kultur ekonomi kapitalisme dahsyat yang eksploitatori dan predatori.

Dalam pada itu keterdiktean, ketertundukan, ketakmandirian dan ketergantungan ekonomi terus berkelanjutan dengan tetap langgengnya budaya ekonomi subordinasi, yang mempertahankan hegemoni ekonomi dan menumbuhkan dependensi baru.

Hubungan ekonomi subordinasi tuan-hamba, *taoka-koelie* atau juragan-buruh (suatu *economic slavery system* sebagaimana berlaku pada zaman usaha VOC dan *culturstelsel*) secara imperatif perlu kita ubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu hubungan ekonomi yang partisipatori-emansipatori. Inilah transformasi social yang harus kita lakukan.

Transformasi sosial ini tidak mudah terlaksana. Transformasi sosial ternyata harus menempuh suatu proses budaya melalui pertentangan kepentingan sosial-ekonomi, dari yang keras terbuka hingga ke yang subtil, berhadapan dengan budaya feodalistik (patronisasi) dan servilisme (keinlanderan) yang tidak mendukungnya. Dalam kaitan dengan peracaturan ekonomi antara negara hubungan ekonomi subordinasi sangat

diwarnai oleh persistensinya *inferiority complex* bangsa ini, suatu budaya hidup yang tidak cerdas, penuh rasa minder, ketertundukan dan kekaguman kepada yang serba Barat dan asing. Dengan makin melunturnya nasionalme, maka hubungan ekonomi subordinasi ini hidup kembali dan sekaligus makin memperpuruk bangsa Indonesia.

Apakah keterpurukan seperti yang disinggung di atas berarti pula bangsa ini telah megingkari "nasionalisme" sebagai kekuatan dahsyat dan penggerak utama perkembangan ekonomi nasional, sebagaimana ditegaskan sebagai suatu kenyataan riil oleh Joan Robinson, Leah Greenfeld, Ian Lustic dst ? [2][2] Nasionalisme baru tetap menolak dependensi, namun mendorong interpendensi global, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

Strukturalisme Ekonomi : Paradigma Baru

Keterpurukan Indonesia tidak terlepas dari peran kelompok *meanstream* (*market fundamentalists*) yang saat ini mendominasi pemikiran kaum ekonom Indonesia, padahal basis teori neoklasikal yang melandasi pemikiran mereka saat ini terperangkap ke dalam konservativisme dan konvensionalisme ekonomi. Yang boleh dibilang makin obsolit dan ortodoks.

Konservativisme dan ortodoksi ilmu ekonomi *mainstream* telah dengan keras menentang oleh kaum strukturalis yang telah membuktikan asumsi ekonomi neonatal-klasikal yang berdasar

---

[2][2] Mengenai nasionalisme dapat saya kutipkan: "....*The very nature of economics is rooted in nationalism ....The aspirations of the developing countries are more for national independence and national self-respect than for bread to eat...The hard-headed Classicals were in favor of Free Trade because it was good for Great Britain, not because it was good for the World...*", lihat Joan Robinson, *Economic Philosophy*, Chicago: Aldine Publishing, 1962; "....*Today, it is claimed, we live in the period of late capitalism, and possibly in the postundustrial society, yet nationalism .... Is not gone, nor does it show any signs of being gon esoon ... Nationalism first appreared in England, becoming the preponderant vision of society there.... The sustained by nationalism ....*", lihat Leah Greenfeld, *The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2001; "*...It has been a commonplace to view nationalism as the greatest, the most powerful single force in the modern world...*", lihat Ian S. Lustick, *Hegemony and The Riddle of Nationalism*, Logos 1.3 – Summer 2002, hlm. 18.

self-interest tidak lagi valid, bahkan telah membentukkan akhlak ekonomi yang makin jauh dari hakikat ilmu ekonomi sebagai *a moral science*. Dari asumsi itu telah terjadi suatu *self-fulfilling prophesy* yang menjadi *homeo-economicus*, meninggalkan moralitasnya sebagai *homoethicus*. Ilmu ekonomi akhirnya berada dalam suatu berantakan (*turmoil*).[3][3] Fundamentalisme pasar mempergiat keterjerumusan ini.[4][4]

Tantangan kita adalah tantangan budaya, yaitu merombak paradigma obsolit dalam pemikiran ekonomi untuk membentuk suatu *mindset* ekonomi baru yang menjamin kemandirian.

Pandangan strukturalistik yang diungkapkan oleh John Kenneth Galbraith,[5][5] kiranya baik untuk mengawali titik-tolak tentan gkelemahan ekonomi pasar. Galbraith menyatakan bahwa internasionalisasi modal, produksi dan perdagangan yang lepas sebagai wujud utama dari globalisasi, akan menimbulkan

---

[3][3] Lester C. Thurow, Gurubesar Ekonomi pada MIT menegaskan : "....*economics is in the state of turmoil...the economics of the textbooks and of the graduate schools not only still teach price-auction model but it is moving toward narrower and narrower interpretations ... the mathematical sophistication ibtensifies as an understanding of the real world diminishes.... Economics cannot do without simplifying assumptions, but the trick is to use the right assumption at the right time, and this judgement has to come from emprical analyses including those employed by historians, psychologists, sociologists and political scientists...*" lihat Lester C. Thurow, *The Dengerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), hlm. 236-237.

[4][4] Robert Heilbroner salah satu tokoh besar Amerika Serikat dalam ilmu ekonomi dan Lester C. Thurow secara konsisten menegaskan mengenai *the defect of the market* sebagai berikut: "...*the market is an insufficient intrument for provisioning society, even rich societies .... The market is assiduous servant of the wealthy, but indifferent servant of the poor .... Market system promote amorality, it is not just an economic failure, but it is a moral failure...*", lihat Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow, *Economics Explained* (New York: Simon Schuster, edisi baru, 1994), hlm. 255-256; sementara itu George Soros mengatakan: "....*But market fundamentalism has become so powerful that any political forces that dare to resist it are branded as sentimental, illogical, and naïve. .... Yet the truth is that market fundamentalism is itself naïve and illogical. Even if we put aside the bigger moral and ethical questions and concentrate solely on the economic arena, the ideology of market fundamentalism is profoundly and irredeemably falwed. To put the matter simply, market forces, if thet are given complete authority even in the purely economic and financial arenas, produce chaos and could ulmimately lead to the downfall of the global capitalist system. This is the most important practical implication of my argument in this book....*"; lihat George Soros, *the Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998), hlm. xxii.

[5][5] Lihat John Kenneth Galbraith, *The Culture of Contentment* (Boston : Houghton Miffin, 1992).

pemberdayaan ekonomi dan politik (*empowerment*) bagi kalangan aktor ekonomi yang mampu atas korban *the underclass,* yaitu golongan kelas bawah yang hidup dalam ekonomi rakyat.

Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi. Kaum strukturalis mengungkapkan dan mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang berkaitan pemusatan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Kepedulian akademik-ilmiah pemikir strukturalis meliputi pula masalah ketimpangan dalam kelembagaan, partisipasi dan emansipasi sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan struktural dan masalah ketergantungan serta subordinasi sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap *inherent* dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, maka dapatlah dipahami bahwa strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.[6][6]

Kelompok ekonomi "moneteris" kebanyakan beranjak dari pemikiran neoklasikal (*market fundamentalism*), sedangkan kelompok ekonomi "sektor riil" lebih dekat dan memahami pemikiran, tetapi tidak selalu rukun dengan, kaum strukturalis.

Selanjutnya kaum strukturalis, yang mengoreksi kelemahan mendasar dari mekanisme pasar dan persaingan-bebas, dengan makin bergeloranya globalissi dengan kapitalisme globalnya, makin gencar pula menunjukkan kebenaran analitik dan bukti-bukti empirik, betapa globalisasi perlu benar-benar diwaspadai. Kaum strukturalis mulai menggunakan istilah-istilah

---

[6][6] Lihat Leah Greenfeld, *theSpirit of Capitalism: ...., op. cit.*, hlm. 4.

keras untuk menyentak *mindset* neoklasikal, seperti "*global capitalism*", "*turbo capitalism*", "*new imperialism*", "*cowboy capitalism*", *Old West capitalism*", *the dangerous currents*", "*the winner-take-all market*", "*the zero-sum society*", "*winner-take-all-society*", dst. Jan Tinbergen mengatakan kepada saya (1992) bahwa lobang *ozone* makin besar karena keluan "*the gready capitalism*". Dalam *platform* Club of Rome, lebih lanjut Tinbergen mengatakan bahwa "*the limits to growth*" dalam 20 tahun menjadi "*beyond the limits*".[7][7] Karena kerasukan kapitalisme global.

Kaum strukturalis tidak saja menunjukkan kelemahan (parsialitas) ekonomi neoklasikal, tetapi juga mengoreksi dan bahkan menolak sebagian asumsi-asumsi dasarnya (seperti dikemukakan di atas). Kegagalan pasar dan ketidakmampuan pasar dalam mewujudkan *the invisible hand* adalah yang salah satunya, tidak terselesaikannya *miro-macro rift* [8][8] adalah yang lainnya sehingga efisiensi ekonomi yang dikembangkan berdasar tataran mikro tidak klop, bahkan bisa bertentangan dengan efisiensi ekonomi pada tataran makro.

Ekonomi neoklasikal berdasar mekanisme persaingan pasar-bebas terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural untuk terlaksananya transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang bermakna. Oleh karena itu strukturalisme berorientasi pada strukturalisasi dan restrukturalisasi ekonomi disertai intercensi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar. Kelemahan mekanisme pasar-bebas dalam perwujudan demokrasi ekonomi adalah (istilah

---

[7][7] Lihat Meadows, Donella H., *et.al.*, *The Limits to Growth* (New York : Universe Books, 1972), Duapuluh tahun kemudian, sebagai kelanjutan dan evaluasinya, ternyata *'limits'* itu telah dilampaui, lihat Meadows, Donella H., *et.al.*, *Beyond The Limits*, Forward by Jan Tinbergen (Vermont: Chelsea Green, 1992).

[8][8] Heilbroner dan Thurow menyebutkannya sebagai "*micro-macro ills*", Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow, *Economics Explained*, *op. cit*, hlm. 256. Dalam ruang kelas akan bisa snagat menarik membicarakan asumsi *constans returns to scale vs increasing returns to scale* dan transformasinya dari tataran mikro ke tataran makro. Para pengajar dianjurkan untuk membaca "*the new growth economics*" sebagaimana dikemukakan oleh Samuelson yang berkaitan dengan *capital deepening, increasing returns to scale, ezternal scale economics,* lihat Paul A. Samuelson (*eds.*), *Frontiers of Development Economics* (Washington DC : IBRD/Oxford University Press, 2001), hlm. 492-505.

[9][9] Lihat beberapa artikel dalam Sri-Edi Swasono, *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat* (Jakarta: UI-Press, 1992); lihat pula Sri-Edi Swasono, "*Dari Lengser ke Lengser, ...*", *op. cit.*

saya) mungkin sekadar mampu menghasilkan "nilai-tambah ekonomi" tetapi tidak menjamin dapat menyumbangkan "nilai-tambah sosio-kultural" (menjangkau makna partisipasi dan emansipasi kemartabatan), [9][9] dan pula timpangnya struktur kekuasaan ekonomi, telah menjadi tema-tema utama dalam pemikiran ekonomi strukturalis.

Strukturalisme peduli akan harkat manusia dalam lingkup moralitas ekonomi. Strukturalisme menolak *homo economicus* yang melahirkan akhlak *homo homini lupus*, menolak ekploitasi, pelumpulah (*disempowerment*) dan pemiskinan (*improverishment*) sosial-ekonomi. Apabila ekonomi neoklasikal berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), maka ekonomi strukturalis lebih mengutamakan masalah redistribusi dan lapangan kerja (*employment*). Boleh dibilang, sebagai upaya mengubah *mindset* atau pakem ekonomika, awal dari strukturalisme terutama adalah pemikiran ke arah "*it is employment that will take care of growth*". [10][10]

Bagi Indonesia, [11][11] pemikiran-pemikiran strategis, cermat dan mendalam mengenai ketimpangan-ketimpangan struktural harus tetap dikembangkan. Hanya dengan demikian maka kebijakan restrukturalisasi untuk mengatasi ketimpangan struktural dapat didesain. Saya menawarkan beberapa butir kebijakan restrukturalisasi ekonomi dalam artian reformasi makro yang meliputi berbagai sektor, bidang dan dimensi a.l. seperti berikut : (1) Restrukturalisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi: Pemilikan dan penguasaan aset oleh rakyat harus makin merata dna dapat mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi pemilikan dan penguasaan aset pada sekelompok kecil aktor-aktor ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan *pemilikan* bukan sekadar meningkatkan *pendapatan* masyarakat secara merata.

---

[10][10] Dikatakan Mahbub Ulumul Qur'an Haq "...*we were toguh to take care of GNP as this will take care of poverty/ let us reverse this and take care of the poverty....*" (yang dimaksud melalui *employment, pen.*) *as this will take care of GNP*", lihat Mahbub Ulumul Qur'an Haq, "*Employment and Income Distribution in the 1970's: A New Perspective*", *Development Digest*, Oktober 1971, hlm. 7. Lihat pula Sri-Edi Swasono, "Prospek dan Perkembangan Perekonomian Rakyat/UKM: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Pasar", *mimeo*, Diklatpim, LAN, Denpasar, 21-22 Maret 2002.

[11][11] Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi* (Yogyakarta: UGM-PUSTEP, 2003), hlm. 36-38.

Restrukturisasi ini diarahkan untuk membentukkan "*Triple-Co*", yaitu *co-ownership, co-dertermination* dan *co-responsibility* sebagai implementasi demokratisasi ekonomi di dalam badan-badan usaha ekonomi (lihat Bagan II). Dalam restrukturisasi ini hendaknya dihindarkan suatu perampasan seperti (*"savage acquisition", "cannibal redistribution"* atau *"wild take-over"*). (2) restrukturisasi alokatif : Menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari lembaga-lembaga non-bank. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank harus tetap memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen reformasi dan agen restrukturisasi ke arah tercapainya keseimbangan struktural yang lebih baik. (3) Restrukturisasi spasial (*spatial*): Restrukturisasi ini diperlukan antara lain untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan, dan seterusnya. (4) Restrukturisasi sektoral: Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor formal-moderen dan sektor informal-tradisional, antara sektor-sektor yang *grassroots-based* dan yang *nongrassroots based,* menuju kukuhnya perekonomian rakyat (dengan wadah koperasi) sebagai sokoguru perekonomian nasional. (5) Restrukturisasi perpajakan : Selain berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak adalah sarana redistribusi. Pada dasarnya pajak harus progresif untuk mempersempit kesenjangan. Khususnya terhadap kekayaan dan pemilikan barang mewah harus dikenakan pajak kekayaan secara progresif. Sebaliknya terhadap kelompok miskin yang memerlukan pemberdayaan diberikan subsidi atau proteksi. Pajak merupakan insentif untuk kegiatan produktif dan disinsentif terhadap konsumsi mewah. (6) Restrukturisasi strategis: Restrukturisasi ini untuk memperkukuh kemandirian ekonomi, mengurangi dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal yang seimbang dan diperlukan untuk memperkukuh fundamental ekonomi. Dengan restrukturisasi strategis ini perekonomian nasional diarahkan untuk berakar di dalam-negeri dan menjadi *people-centered* dan *resources-based*. (7) Restrukturisasi pola-pikir atau reorientasi budaya : GBHN telah mendorong reaorientasu semacam ini,

yakni antara lain reorientasi ke arah lebih banyak membuka akses akan hak-hak rakyat dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi. (8) Restrukturisasi sosial-politik dan sosial-budaya: Restrukturisasi ekonomi ini tidak akan sepenuhnya bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi di bidang sosial-politik dan sosial-budaya. Restrukturisasi sosial-politik menyangkut demokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi sosial-budaya menyangkut upaya megubah *midset*, melakukan *unlearning* terhadap pakem-pakem usang, khususnya restrukturisasi dan demokratisasi pendidikan rakyat.[12][12]

Sementara itu Sritua Arief salah satu tokoh strukturalis utama Indonesia mengecam ilmu ekonomi neoklasikal yang

---

[12][12] Lihat Sri-Edi Swasono, *Pembangunan Berwawasan Sejarah: Kedaulatan Rakyat Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 26-43.

[13][13] Dalam kata sambutan pada buku Sri-Edi Swasono, Sritua Arief mengatakan : "*....Saya dan Saudara Sri-Edi menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar-bebas dalam ruang lingkup internasional yang tidak adil. Pasar harus diintervensi, justru perlu ada avisible hand untuk mengatur pasar demi kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat. Itulah sebabnya kami menolak internasionalisasi modal, produksi, dan perdagangan secara bebas. Ini akan merunyamkan ekonomi rakyat bangsa kita ....*", lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose....*, *op. cit.*, hlm. xii.

(1)Kelompok pengagum dan pemuja globalisasi yang melihat globalisasi semata-mata dari segi-segi positif-imperatifnya, bahwa globalisasi adalah tuntutan sejarah yang tidak terelakkan, suatu *inevitability*, suatu realitas dan bukan lagi suatu pilihan. Para akademisi ekonomi yang berorientasi pada *market fundamentalism* (Smithian) pada umumnya masuk kelompok ini, yang tentunya pula menerima dengan mudah paham liberalisme dan kapitalisme. Bagi mereka globalisasi adalah suatu *progress* dan *opportunities*. (2) Kelompok yang kritis dan lebih objektif dalam menyimak dan menimbang makna globalisasi. Globalisasi diungkapkan sebagai fenomena global yang telah banyak mengakibatkan banyak sekali kekecewaan, bahkan kebrutalan sosial-ekonmomi dan sosial-kultural, tanpa peduli terhadap nilai-nilai tradisional, yang kesemuanya mengakibatkan penderitaan yang luas, sehingga globlaisasi harus direformasi secara radikal (Stiglitz, Huntington). Globalisasi mendorong persaingan secara berlebih yang menjuruskan kepada konflik perdagangan bahkan mungkin perang-dagang dunia (*wolrd trade war*) (Krugman). Globalisasi tidak berpihak kepada kaum miskin bahkan acapkali merupakan proses dehumanisasi. Kelompok ini merupakan kelompok korektif, namun bukan penentang. Dalam kelompok ini termasuk mereka yang masih menyangsikan apakah globalisasi bisa terwujud benar-benar, pakah suatu *global economy* bisa terbentuk tanpa adanya (dalam kenyataan atau perkiraan) suatu *global society* (Soros, Thurow); bukanlah keserakahan kapitalisme global yang mengiringi globalisasi akan selalu condong membentukkan suatu *discriminatory fragmented*

menjadi roh globalisasi, dengan menegaskan bahwa ia menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar-bebas dalam ruang lingkup internasional yang tidak adil dan bahwa pasar harus diintervensi.[13][13]

Saya sendiri telah memberikan gambaran betapa kita harus mewaspadai globalisasi meskipun kita tidak harus menolaknya, saya kemukakan paling tidak ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan berbeda mengenai globalisasi yang harus kita perhatikan dengan cermat: (1) Kelompok Pengagum; (2) Kelompok kritis dan obyektif; (3) Kelompok yang menolak. Saya sendiri cenderung untuk memihak kelompok ketiga dalam arti mewaspadai dan bersikap sangat hati-hati terhadap kelompok pertama dan kedua. Bahaya globalisasi akan saya sajikan pada lampiran (lihat Lampiran I).

Orientasi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat

Berkali-kali Mubyarto dan saya mengingatkan bahwa pengajaran ilmu ekonomi di kampus-kampus telah "keliru". Saya telah menegaskan tentang keterperosokan kita ke dalam perangklap teoretikal-parsial dan yang menerima begitu saja asumsi dasar neoklasikal yang mengacu pada pola pemikiran ekonomi Barat yang sempit dan mengandung berbagai ortodoksi, yang akan saya sajikan pada lampiran (lihat lampiran II).

Di paragraph depan saya telah kemukakan mengenai Pasal 33 UUD 1945 dan tugas pelaksanaan cita-cita transformasi ekonomi dan transfortasi sosial. Proses transfortasi ini tidak akan bisa dilakukan apabila beberpa butir perintang tidak terlebih dulu kita atasi, antara lain: (1) Asas

---

global society ? (3) Kelompok yang menolak globalisasi, yang pada hakikatnya adalah wujud baru dari imperialisme (Petras & Va,etmeyer, J.W. Smith, Huntington). Globalisasi merupakan proyek politik kaum imperialis global dengan *global governance*-nya yang nampak terang-terangan ataupun terselubung. Kelompok ini menempatkan naisonalisme ekonomi sebagai suatu kekuatan tangguh untuk memajukan dan menjaga kesinambungan kehidupan ekonomi masyarakat berdasar kenyataan riil tentang hidup dinamisnya pluralisme global (Robinson, Greenfeld). Kelompok ini melihat globalisasi sebagai sosok *intruder* yang melakukan dolarisasi dan Amerikanisasi, menolak ide *global uniformity* dan mempertahankan *global pluralism* serta *national uniqueness*. Untuk itu bicara mengenai perlunya suatu aksi kolektif yang terkoordinasi untuk memobilisasi kekuatan oposisi dan menolak globalisasi yang berinsting dasar predatori ini. Kelompok ini menolak dominasi ataupun subordinasi ekonomi, mengutamakan koekistensi damai antarbangsa dan memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *a new internationalism of equals* (Petras & Veltmeyer). lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose ..., op.cit.*, hlm. 123-125.

perorangan dengan paradigma individualisme dan liberalisme yang mengautamakan kepentingan individu (*self- interest economics* yang berpedoman *free-competition* dan *market fundamentalism;* (2) Asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasar paham kerakyatan (demokrasi ekonomi), di mana kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentngan orang-perorang (tanpa mengabaikan hak orang perorang); (3) Negara melepaskan diri dari tugasnya sebagai *agent of development* dan *agent of reformation* dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan structural (percaya pada *the invisible hand* yang dalam kenyataan telah kembali menjadi *the incapable* atau *the dirty hand*); (4) Mewaspadai globalisasi dengan ide pasar-bebas dan *boderless world*-nya;

Untuk itu marilah kita mulai menegaskan lebih dahulu, siapa yang disebut "rakyat"?

Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemooh yang biasanya melanjutkan bertanya, "bukankah seorang konglomerat juga rakyat? Tentu ia bagian dari rakyat! Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat.

"Rakyat" adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. rakyat adalah "*the common people*", rakyat adalah "orang banyak". Pengertian rakyat berkaitan dengan "kepentingan publik", yang berbeda dengan "kepentingan orang-perorang". pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. ada yang disebut "*publik interest*" atau "*publik wants*", yang berbeda dengan "*private interest*" dan "*private wants*". Sudah lama pula orang mempertentangkan antara "*publik needs*" (yang berdeimensi domain publik) dan "*individual privacy*". Ini analog dengan pengertian bahwa "preferensi sosial" berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari "preferensi individual". Istilah "rakyat" memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat 'publik" itu.

Mereka yang tidak mampu mengerti "paham kebersamaan" (*mutualism/ mutuality*) dan "asas kekeluargaan" (*brotherhood/broderschap/ukhuah*) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah "rakyat" itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium "*vox populi vox dei*",di mana rakyat lebih dekat dengan arti

"masyarakat" atau "ummat", bukan dalam arti "penduduk" yang 210 juta. rakyat atau "*the people*" adalah jamak, tidak tunggal.

Seperti dikemukakan di atas, kerakyatan dalam sistem ekonomi masih mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi nasional kita berlaku demokrasi ekonomi, yang tidak mengehendaki "otokrasi ekonomi", sebagaimana pula demokrasi politikmenolak "otokrasi politik".

Konsep pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya sangat jelas bagi yang masih berkeinginan mengetahuinya serta bersedia melepas pola-pikir lama yang terbukti "*bias*", dengan melakukan *unlearning* secara wajar menuju pemikiran reformatif. Titik tolaknya adalah "mengabdi rakyat", bukan "mengabsi ilmu" semata-mata. Ilmu harus bisa ditawar dengan misi,. Ilmu yang kita kuasai kita kembangkan dan kita abadikan kepada rakyat dan kepentingannya.

Pemihakan (altruisme) saja pada ekonomi rakyat tidaklah cukup, kita harus meyakini pula bahwa ekonomi rakyat memiliki kekuatan sebagai strategi pembangunan.

Memang ekonomi rakyat penting untuk mendapat perhatian khusus dari kita. Bukankah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda perekonomian besar (ekonomi konglomerasi) ekonomi rakyat ternyata tetap bertahan? Bukankah kita harus bersukur bahwa dengan terpuruknya ekonomi besar, ekonomi rakyatlah yang ternyata memberi penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Untuk itu saya ingin mengatakan: "untunglah ada ekonomi rakyat". Dengan demikian itu kehidupan ekonomi rakyat tetap tersangga dan terjamin.

Ekonomi rakyat adalah riil dan kongrit. Kita bisa bersilang pendapat mengenai definisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, yaitu bahwa kita memilikipertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dst.

yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesing di atasnya. ini semua memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan yang sangat luas kepada masyarakat. Membangun ekonomi rakyat adalah membangun usaha-usaha rakyat yang riil seperti tersebut di atas.

Apabila kita mengingat betapa besarnya BLBI dan Obligasi Rekap yang dikeluarkan Pemerintah kepada para konglomerat hitam, betapa tidak adilnya MSAA yang menjadi sumber hukum bagi pengampunan hutang (keputusan memberikan R&D bagi para penyamun BLBI), memang kita cenderung untuk terpaku pada pola-pikir "perlunya pemihakan" mulai diberikan kepada ekonomi rakyat. Namun pemihakan (altruisme) saja kepada ekonomi rakyat memiliki kekuatan sebagai *strategi pembangunan*.

Makna sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatif-emansipatif berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan aka terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konrit menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investai ekonomi nasional, merupakan *human investment* (bukan pemborosan atau *inefficiency*) dan mendorong tumbuhnya kellas menengah yang berbasis *grassrots*. (3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri.(*self empowering*), sehingga rakyat mampu meraih "nilai-tambah ekonomi" dan sekaligus "nilai-tambah sosial" (nilai tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akn merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan sibordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan ekonoim dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuiakan kemampuan rakyat sebagai yang sesak napas dan langka

modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri pada ekonomi luar-negeri, akan menekan sebanyak muyngkin ketergantungan akan *impoert-components* dan meningkatkan *domestic-contents* industri dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkukuh pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri (ekspor). (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan brebagai dalih ekonomi dan politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan (*implementable*) tanpa mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. (13) Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas dan pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Satu dekade yang lalu ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (*development Strategies reconsidered,* Overseas Development Council, 1987; dan yang mutahir *The Frontiers of Development Economics,* Meier & Striglitz, 2001) mengakui betapa perlu ada *shift of paradigm* dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca mengenai *social market economy.* (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan *di* Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, tidak terlepas dari pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) dalam kenyataan, ekonomi rakyat telah menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekoonmian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga

saat ini. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Gerakan Koperasi Internasional (ICA), ILO dan Setjen PBB justru justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi untuk memajukan *grasroots economy* di seluruh dunia didorong maju berkat tiga prestasi utamanya yang telah dibuktikan, yaitu dalam (1) memberantas kemiskinan; (2) menciptakan lapangan kerja secara subtsantif; dan (3) memperkukuh integrasi sosial (yang artinya memperkukuh solidaritas sosial).

Dunia saat ini mulai banyak bicara mengenai *wolrd siladarity* dan *culturaltrap*, malahan menjadi mudah kagum terhadap ide liberalisme dan privatisasi, serta terbawa arus pemikiran mentah kapitalisme global. Dalam hal ini saya ingin memperingatkan, agar kita menolak privatisasi dan mengutamakan "*go-public*" demi pemilikan merata oleh rakyat. Mengapa kita tidak berpikir besar demi kemuliaan rakyat, mengapa Indosat dijual ke asing, padahal Indosat bisa dimiliki oleh para pelanggan ponsel yang pasti mampu membelinya. Mengapa Semen Gresik hendak di jual ke asing pula, padahal baik para *developers* dalam-negeri maupun para pemilik toko material dalam-negeri mampu membeli saham Semen Gresik; Pemda-pemda pun bisa diatur dan dibantu untuk mampu memiliki Semen Gresik (daripada uang dihamburkan untuk membiayai *Release & Discharge* bagi para pengusaha hitam). Mengapa pula BCA dan lain-lain bank dijual ke asing, padahal bisa dibeli oleh para nasabah. Tentu kita bertanya mengapa Indofood tahu-tahu sebagian sahamnya telah dimiliki asing, padahal seharusnya dijual kepada rakyat (para konsumen dalam-negeri) yang dengan setia telah membesarkan dan menjadi pelanggan Indofood. Inilah peran Pemerintah yang yang harus melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam dimensi perkoperasian, karena dengan demikian itu *pemilik* Indosat, Semen Gresik, BCA, Indofood adalah para *pelanggannya* sendiri. Bukankah ciri utama koperasi adalah bahwa *pemilik* adalah sekaligus *pelanggan*? Macam inilah yang kita cita-citakan sebagai transformasi ekonomi dan transformasi sosial, sebagai peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat dalam kehidupan sosial-ekonomi. Inilah konsep *triple-Co* yang saya ajukan di atas, di mana pemilikan aset nasional tidak terkonsentrasi pada

sekelompok kecil masyarakat, tetapi merata dalam wujud *co-ownership, codermination* dan *co-responsibility* yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya, meningkatkan pemilikan (*wealth*) dan partisipasi rakyat serta mengangkat harkat martabatnya, dari martabat sebagai kuli atau buruh menjadi mitra usaha.

Penutup

Kita telah menghadapi tidak saja *debt-trap* tetapi *culture-trap*. Kita tidak mudah melakukan transportasi ekonomi dan transformasi sosial dalam rangka merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional karena kita terbelenggu oleh peraturan hukum ex-kolonial dan pola pikir individualistic, serta lengah mewujudkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam kehidupan ekonomi. Padahal individualisme dalam wujud *self-interest* telah mendapat tentangan, baik secara moral maupun teoretikal di dalam perkembangan ilmu ekonomi. Padahal fundamentalisme pasar mendapat banyak kecaman pula, tidak saja dari segi teknis dan teoretikal. Pasar mengemban berbagai ketidakmampuan untuk mendukung kepentingan ekonomi masyarakat, cita-cita pemerataan dan keadilan. Mekanisme pasar banyak membuktikan kegagalan-kegagalannya (*market failures*) terutama dalam menjaga kepentingan mereka yang lemah daya belinya, sehingga pasar-bebas dengan persaingan-bebas yang mengiringinya telah memojokkan pihak yang lemah (*the under class*) menumbuhkan *disempowerment* dan *empoverishment*). Globalisasi yang beriringan dengan pasar-bebas dan persaingan-bebas adalah kemasan baru dari kegiatan *homo economicus* multinasional, dengan insting dasarnya yang predatori dan hegemonik, dan mengemban paham *homo homini lupus* dalam wajah indahnya yang canggih.

Persaingan (*competition*) dan kerjasama (*cooperation*) adalah kekuatan kembar yang menggerakkan dunia. Ilmu ekonomi neoklasikal menjadi ilmu parsial (terkapsul) karena mengabaikan kerjasama ke dalam *theory building and academic teaching*. Kehidupan lebih banyak ditandai dengan kedamaian, tidak selalu diisi dengan perang. Ilmu ekonomi pasar-bebas dengan persaingan bebas menciptakan *restless society*, padahal dengan kerjasama akan lebih terjamin terbentuknya *peacful society*. Krugman, Thurow dan Soros mulai mengecam obsesi persaingan yang dapat menumbuhkan perang dagang global.

Lampiran I

Saya ingin mengulanginya lagi kelemahan-kelemahan pengajaran di kampus-kampus kita sekaligus sebagai upaya memberikan ringkasan suatu ekspose ekonomika yang mengabaikan tuntutan moral yang menjadi dasar ilmu ekonomi itu sendiri:

Pertama, pengajaran ilmu ekonomi saat ini belum mampu melepaskan diri dari pemikiran neoklasikal, yang tidak saja bretitik-tolak dari paham *self-interest*, yaitu maksimisasi *gain* dan minimisasi *sacrifice* sesuai perilaku *homo economicus,* tetapi juga masih terus-menerus cenderung mengabaikan implikasi asumtif mono-utilitas terhadap kenyataan bi-utilitas atau multi-utilitas yang mengandung unsur-unsur moralitas yang lebih kompeleks. Antara *Moral Sentiments* dan *Wealth of Nations* memang ada mengandung inkonsistensi sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai "*das smith Problem*". Amitai Etzioni (dan pula Amartya Sen) memberikan pencerahannya perihal ini dalam kaitan dimensi moral ilmu ekonomi.

Kedua, pengajaran ilmu ekonomi, sebagai kelanjutan dari pemikiran neoklasikal, menyandarkan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya. Kompetisi-bebas atau persaingan-bebas, tanpa memperhatikan apakah asumsi-asumsi dasar yang menyertainya ralistik atau tidak, baik dalam kerangka empirik ataupun moralitas ekonominya, telah membentukkan suatu *mindset* atau "budaya ekonomi" berkat dibiarkan berlakunya semacam *self-fulfilling presumption* secara berkepanjangan.

Kompetitivisme merupakan dunia laga bagi *homo economicus,* mendorong semangat berebut dan bertarung adu kekuatan, yang telah terbukti tak henti-hentinya membentukkan suatu "*restless society*" ataupun "*stressfull society*". Kompetitivisme tetap berhadapan dengan koperativisme. Kooperativisme, yang oleh dunia kampus kita belum memperoleh tempat semestinya merupakan dunia kerjasama bagi *homo ethicus,* yang berpedoman pada suatu hubungan ekonomi berdasar morralitas dan etika ekonomi (sebagaimana oleh Lunati diuraikan dan ssaya gambarkan pada Bagan II).

Ketiga, pengajaran ekonomi di kampus-kampus sejak semula telah kita awali dengan paham *market fundamentalism.* pasar adalah mekanisme permintaan dan penawaran yang

diasumsikan mampu melakukan self-regulating melalui an invisible hand sebagaimana dianut oleh kaum Smithian. namun tidak banyak diajarkan menganai kegagalan-kegagalan pasar (market failures) dalam pengjaran ilmu eekonomi. pasar dalam kenyataannnya tidak cukup mampu melayani kepentingan masyarakat. pasar mengabdi kepada yang kaya, tetapi mengabdikan yang miskin, sehingga pada dasarnya pasar telah mengabdikan nilai-nilai morral dan kehidupan ekonomi sebagaimana digambarkan dalam berbagai versi oleh Galbraith, Heil-broner, Thurow, J.W Smith, Amartya Sen, Stiglitz, Petras & Veltmeyerdan oleh hampir semua tokoh srukturalis, bahkan akhir-akhir ini tak terkecuali oleh Soros dan Krugman.

Di samping itu, kurang pula dibeberkan kepada para mahasiswa kita tentang *the deficiencies* dan *the defects of the market mechanism*. seperti telah saya kemukakan, adanya *the invisible hand* dalam kenyataan sulit ditampilkan secara riil, yang ada adalah *the imperfect hand* yang berlaku bagi mereka yang miskin dengan sedikit tenaga beli, ataupun *the dirty hand* sebagaimana dioperasionalisasikan oleh *the predacious homo economicus* yang berkecukupan dengan tenaga beli. Masalah ini tidak banyak disinggung secara eksplisist di ruang-ruang kelas. Lebih berbahaya lagi adalah bahwa kampus-kampus kita terjangkit oleh sikap kagum terhadap pasar-bebas. Pasar ternobatkan sebagai berdaulat dan diwajarkan menggusur kedaulatan rakyat. Dengan demikian kampus kurang peka akan wujud dan sifat globalisasi serakah yang bersosok pasar-bebas, tempat bersembunyinya turbo-kapitalisme global.

Singkatnya, *presumption* bahwa pasar adalah *omniscient* dan *omnipotent* telah bertengger di kampus-kampus, tanpa mereka sadari bahwa pasar tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, di mana kaum strukturalis pada awalnya bangkit atas alasan ini.

Keempat, telah diakui adanya apa yang disebut *micro-macro ills* (atau *micro-macro rifts*) di mana ilmu ekonomi mikro dan makro tidak selalu mudah saling sambung, akibatnya banyak terjadi ketidakcocokan dalam mentransformasikan kepentingan orang-seorang ke arah kepentingan publik. Kepentingan orang-seorang pada tataran mikro bertumpu pada *self-interest*, yang berkelanjutan dengan *Smithian invisible hand, free market, free competition* pada tataran makronya dipresentasikan tanpa friksi

sebagai mekanisme resource allocation yang efisien, yang breujung pada kecemerlangan *Pareto efficiency* yang mengagumkan. Namun tidak tampak diajarkan dalam pengajaran ilmu ekonomi apa yang diasumsikan sebagai tanpa friksi oleh kaum neoklasikal itu; demikian pula belum sepenuhnya terjawab bagaimana "*box diagram*" (Bowley/Edgewort) dapat didinamisasi untuk merestrukturisasi ketimpangan struktural dengan tetap menyandarkan pada mekanisme pasar-bebas.

Kelima, pengajaran ilmu ekonomi kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme. Bahkan sekarang, dengan dipersepsikannya secara populer bahwa sosialisme telah "kalah" dan kapitalisme "telah menang" tanpa suatu pendalaman (*scrutiny*) menurut pendapat saya, sebagaimana saya kemukakan di atas, merupakan kasus Stiglitz vs Petras & Veltmeyer. Dengan demikian ini maka pengajaran ilmu ekonomi makin menjadi sempit dan terkapsul oleh kompetitivisme neoklasikal. Dengan demikian pula sebagai akibatnya faktor-faktor nonekonomi, terutama iedologi nasional, kelembagaan dan lingkungan spesifik, yang sebenarnya merupakan kandungan dasar (*basic contents*) dari setiap sistem ekonomi, hanya diacu sebagai faktor-faktor *ad-hoc,* ibaratnya sebagai pengetahuan umum, yang tidak diperlakukan sebagai bagian integral dari suatu sistem ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu pengajaran ilmu ekonomi tetap saja dalam posisi *satus-quo* atau berjalan *"as usual"*.

Keenam, pengajaran ilmu ekonomi sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara *prinsip-prinsip ekonomi* dan *hukum-hukum ekonomi* (yang lebih bresifat teknis dan bebas-nilai) dengan *pemikiran* dan *paham ekonomi* (yang tidak bebas-nilai). Padahal buku teks ilmu ekonomi yang kita gunakan masih reasal dari Barat, khususnya Amerika Serikat, yang tidak bebas-nilai. Oleh karena itu boleh dibilang bahwa untuk setiap bab atau bahkan paragrap para pengajar harus kreatif dan inovatif, mampu memodifikasi, mengoreksi, mengadaptasi—tidak hanya mengadopsi, susbtansi buku-buku teks. Sikap kreatif dan inovatif ini diperlukan manakala nilai-nilai ekonomi bertumpu pada asas perorangan (individualism) bretubrukan dengan yang bertumpu pada asas kekeluargaan atau kebersamaan (*mutualism/collectivism*), manakala *private*

wants bertentangan dengan *public needs* atau sebaliknya, demikian pula manakala berbeda dalam konteksnya antara negara satu dengan negara lain, antara negara maju dengan negara berkembang, antara Timur dengan Barat.

Ketujuh, lebih mencemaskan lagi adalah pelajaran ilmu ekonomi di sekolah-sekolah menengah kita, yang tidak saja sepenuhnya menjiplak kekeliruan yang terjadi di kampus-kampus (mengajarkan neoklasikal dan memperkenalkan akhlak *homo economicus* tanpa memperkenalkan moralitas ekonomi klasikal Indonesia. Dalam pengajaran ilmu ekonomi yang diajarkan itu dari konteks Indonesia dan kekhususannya, baik konteks ideologi, sosial, kultural, institusional, agama maupun konteks histori dan geografi Indonesia. Dalam pengajaran ilmu ekonomi kita mengingkari pluralisme Indonesia yang mengundang pendekatan multidimensional. Tuntutan-tuntutan khusus bagi Indonesia sebagai "negara kepulauan" dalam menggalang kesatuan dan konsolidasi ekonomi nasional, keberkahan geografis (baik struktur dan letak) dan kekayaan alam melimpah, yang keseluruhannya sangat berbeda dengan cara pandang ekonomi kontinental, telah begitu saja diabaikan dalam pengjaran ilmu ekonomi. Akibatnya, anak didik akan menjadi anggota masyarakat yang lengah, terkucil dari kenyataan Indonesia, yang akan berakibat kurang dimilikinya kepedualian pada kekuatan ekonomi nasional dan ekoonmi rakyat.

Kedelapan, sebenarnya sudah lama kita menyadari kelemahan kita dalam pengajaran ilmu ekonomi. Pengajaran ilmu ekonomi banyak mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif, sehingga anak didik kita banyak kehilangan pemahaman mengenai realita dan kenyataan empirik, akibatnya hanya akan berkemampuan canggung dalam menghasilkan penyelesaian masalah. Keduanya, baik metode pengjaran induktif maupun deduktif, penting bagi keparipurnaan lulusan kita. Lebih parah lagi kasus-kasus empirik yang sangat terbatas dari buku teks banyak berorientasi pada kasus-kaussu mancanegara, khususnya Amerika dengan *social* dan *institusional settings* yang sama sekali berbeda. Hal ini mengingatkan kepada saya mengenai lelucon intelektual yang terjadi pada tahun 1812 tentang musibah kelaparan di Gujarat. Gubernur Bombay pada waktu itu menolak ususaln agar mengirimkan bahan makanan ke daerah yang dilanda kelaparan,

agar masalah itu diselesaikan oleh mekanisme pasar sesuai dengan apa yang ia baca di buku Adam Smith, *Wealth of nations* tentang beroperasinya *the invisible hand*. Ini bukan saja merupakan masalah teori ataupun asumsi di balik teori, tetapi adalah juga keamburadulan antara pola pikir deduktif vs induktif dan sekaligus kecanggungan intelektual dalam memperhitungkan *institusional setting* dan tuntutan empirikal (lihat catatan kaki 4). barang kali hal semacam ini telah pula terjadi di Indonesia.

Kesembilan, di ruang-ruang kelas globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia, mengatasi erbagai *barriers* transaksi ekonomi dan membuka isolasi atau eksklusivisme kegiatan ekonomi, terutama modal, teknologi, keahlian dan informasi merupakan salah satu wujudnya, membentuk dunia sebagai *a networkede-economy*. *The electronic herd* menjadi salah satu penggerak utamanya. dari sini dibentukkan suatu opini bahwa dunia tanpa batas-batas (*borderless world*) menjadi suatu yang diperlukan untuk berhasilnya globalisasi ekonomi. Globalisasi yang menjangkau bidang-bidang politik sosial-budaya, agama dan teknologi, baik sebagai penyebab maupun akibat dari globalisasi ekonomi, terkait satu sama lain antarkawasan-kawasan di seluruh jagad. Lalu dikukuhkan dengan *opinion building* tentang berakhirnya negara-negara bangsa (*the end of nation states*). Kampus-kampus kita sempat mengagumi pandangan ini, bahkan sempat dikemukakan antara lain oleh tokoh akademisi di Universitas Indonesia bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk menjadi "katak dalam tempurung", untuk berkesempatan maju sebagai warga dunia yang terhormat.

Bagi saya ini merupakan suatu absurditas *in optima forma*. Karya Nobel *laureate* seperti Stiglitz pum, yang secara khusus menguraikan mengenai *globalization and its discontents* secara panjang lebar, tidak menyentak para pengagum globalisasi dari kelengahan akademis-kulturalnya ini.

Lampiran II
John Robinson (1962)

"..... Suatu sebab yang dapat menjelaskan mengapa kehidupan modern telah menjadi demikian tidak nyamannya adalah karena kita telah menjadi sadar-diri tentang hal-hal yang sebelumnya telah dianggap sebagai semestinya. Semula orang

mempercayai apa yang dipercayainya karena mereka mengira hal tersebut memang demikian halnya, ataupun karena dianggap benar oleh mereka yang dianggap dapat berpikir secara benar .... kita mulai mempertanyakan: mengapa saya mempercayai apa yang sya percayai sebagai benar .... Kebenaran tidak lagi menjadi benar. Kejahatan tidak lagi menjadi sesuatu yang jahat ... 'Semua tergantung pada apa sebenarnya yang dimaksudkan'. Tetapi kalau demikian halnya maka kehidupan akan menjadi mustahil—untuk itu kita harus menemukan suatu jalan keluar ... ".

M. Teresa Lunati (1997)

".... '*Homo economicus*' atau 'manusia ekonomi' adalh agen individual yang berada di pusat teori ekonomi neoklasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri-sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis). Ia egois, rasional, berupaya untuk mencapai utilitas secara maksimum. Ia betindak secara independen dan nonkooperatif, sebagai atom sosial yang terisolasi tanpa mempunyai naluri akan masyarakat sekitarnya, dan perilakunya dimotivasi semata-mata oleh kepentingan-diri pribadi secara sempit. *Economic man* atau manusia ekonomibersifat materialitstik tanpa emosi sama sekali dan merupakan manusia yang membuat perhitungan dengan kepala dingin: ia seorang 'egois yang rasional' ... '*Homo economicus*' modern secara bengis bersikap rasional, ia tamak dan oportunistik; ia tak dapat dipercaya dan ia tidak mempercayai orang lain, ia tidak mampu memberi komitmen dan akan selalu berupaya untuk mendapat manfaat gratis; ia menganggap keegosisannya serta segala sifat dan perilakunya sebagai wajar...". Sebaliknya: ".... '*Homo ethicus*' sama sekali berbeda dan bahkan merupakan kebalikan dari *homo economicus*. Ia seorang altruistik dan individu yang kooperatif, jujur dan cenderung brebicara tentang kebenaran, ia dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Ia memperoleh kepuasan moral dan emosional dari menghormati kewajibannya kepada orang lain, ia mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat atas tercapainya tujuan-tujuan sosial. ia merupakan seorang '*tem-player*' alamiah, ia dapat secara efektif mengkoordinasi tindakannya dengan tindakan orang lain dan bekerja demi manfaat bersama dengan orang

lain. Ia menganggap resiproritas merupakan sesuatu yang wajar, meskipun bukan sebagai laasan penting agar ia mendapat mandaat secara gratis atau berperilaku dalam suatu kepentingan kolektif ...".

Amartya Sen (1990)

"...seberapa tepatkah asumsi maksimisasi kepentingan-pribadi merupakan penggambaran dari perilaku manusia yang sebenarnya? apakah yang dinamakan *'economic man'*, yang mengejar kepentingan diri-pribadinya, memberikan suatu perkiraan yang paling mendekati perilaku manusia, paling tidak di bidang ekoonmi? Hal ini memang merupakan asumsi standar dalam ilmu ekonomi ... pernyataan bahwa teori kepentingan diri-pribadi 'akan menang' biasanya didasarkan pada suatu pemikiran teoretis secara khusus dari pada atas dasar pembuktian empiris... permasalahan yang paling mendasar sebenarnya adalah apakah ada berbagai pluralitas motivasi yang beragam, atau apakah hanya terdapat kepentingan diri-pribadi semata yang mendorong manusia dalam berperilaku ...".

Joan Robinson (1962)

"... Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan ... Para penganut mazhab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia...".

Leah Greenfeld (2001)

"... Meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme... tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menghilang ... Nasionalisme pertama kali muncul di Inggris dan telah sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya ... ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekoonmian modern ternyata tidak berlangsung secara berkesinambungan; pertumbuhan hanya akan berkesinambungan justru jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme ...".

Umer Chapra (2002)

"... Keterkutukan ilmu ekonomi konvensional (yang dimaksudkan adalah aliran neoklasik: *penulis*) atas pertimbangan nilai serta diberikannya tekanan yang berlebihan pada peningkatan harta dan pencapaian kepuasan atas kebutuhan secara maksimal serta pengabdian pada kepentingan diri-pribadi, merupakan suatu penyimpangan yang jelas dari filsafat dasar sebagaian besar agama ... Agama-agama ini umumnya berpendirian bahwa kemakmuran materiil, meskipun persaingan sangat perlu, persaingan tidak cukup memadai untuk dapat mengendalikan kepentingan individu dan dapat menjamin terpeliharanya kepentingan sosial, ataupun dapat menghindari setiap bentuk perbuatan salah dan ketidakadilan...".

George Soros (1998)

".... tetapi fundamentalisme pasar telah menjadi demikian kuatnya sehingga kekuatan politik manapun yang berani menentangnya akan dicap sebagai sentimental, tidak logis dan naif .... Namun sebenarnya fundamentalisme pasar itu sendirilah yang naif dan tidak logis. Andaikata kita mengenyampingkan masalah-masalah yang lebih luas yang menyangkut moralitas dan etika serta memfokuskan diri hanya pada bidang ekoonmi, maka ideologi fundamentalisme pasa pun masih mengandung kelemahan yang sangat mendalam dan yang tak dapat diperbaiki lagi. Pendek kata, apabila kekuatan pasar dibiarkan bebas secara penuh, meskipun di bidnag murni ekonomi dan keuangan murni, maka kekuatan pasar ini akan menghasilkan kekacauan dan pada akhirnya menuju pad hancurnya tatanan kapitalisme global. Hal ini merupakan implikasi yang paling jelas dari argumentasi saya di dalam buku ini ... "

Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow (1994)

"... Mekanisme pasar adalah suatu instrumen yang tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang telah makmur ... mekanisme pasar merupakan pelayanan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tak perduli pada yang miskin... mekanisme pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral, hal mana tidka hanya merupakan suatu kegagalan ekoonmi tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral ...".

Lester C. Thurow (1983)

" ... Ilmu ekonomi sedang berada dalam keadaan yang kacau ... ilmu ekonominya buku teks dan yang diajarkan di berbagai sekolah pascasarjana tidak saja masih mengajarkan model harga-lelangan tetapi telah menuju pada penafsiran yang semakin sempit ... kecanggihan pendekatan matematis semakin meninggi tetkala pemahaman tentang dunia realitas menurun ... ilmu ekonomi memang tak akan ada tanpa adanya penyederhanaan asumsi, namun triknya yang penting adalah dapat menggunakan asumsi yang tepat pada waktu yang tepat, dan kemampuan menilai ketepatan ini harus timbul dari analisis-analisis empirik termasuk yang dipergunakan oleh para ahli sejarah, para psikolog, ahli ilmu sosial dan para ilmu politik ...".

Lester C. Thurow (2000)

"... Perlu dijaga keseimbangan antara persaingan dan kerjasa-sama ... Di lain pihak, dalam sistem kapitalisme para pihak yang menang tidak perlu bermusyawarah dengan para pihak yang kalah di dalam aparat perencanaan. Pihak yang menang dengan bengis akan meminggirkan para pihak yang kalah di dalam pasar ... Sejarah telah memberi suatu pelajajaran yang jelas. Pendulum dapat mengayun terlalu jauh ke salah satu arah ...".

George Soros (1998)

"....Terdapat suatu anggapan yang telah meluas bahwa demokrasi dan kapitalisme berjalan bresamaan. Dalam kenyataan, hubungannya sangat kompleks. Kapitalisme membutuhkan demokrasi sebagai kekuatan pengimbang karena sistem kapitalisme itu sendiri tidak mempunyai kecenderungan untuk mencapai ekuilibrium. Para pemilik modal berupaya untuk memaksimumkan laba mereka. Apabil acara-cara mereka dibiarkan secara lepas, maka mereka akan terus berupaya untuk mengakumulasi modal sampai suatu tingkat ketika tercapai ketidakseimbangan. marx dan Engels, 150 tahun yang lalu, telah membuat sutu kajian yang sangat baik tentang sistem kapitalis, yang menurut pendapat saya dalam beberapa segi lebih baik daripada teori ekuilibrium yang dikemukakan kaum ekonom klasik. Pemecahan yang mereka usulkan, yaitu komunisme, ternyata lebih buruk daripada penyakitnya sendiri. Tetapi sebab utama mengapa ramalan mereka yang suram tidak menjadi kenyataan

adalah karena adanya langkah-langkah intervensionis politik sebagai penyeimbang di berbagai negara demokratis. Sayangnya, kita sekali lagi berada dalam bahaya untuk mengambil kesimpulan yang salah dari pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah. Kali ini bahayanya bukan datang dari komunisme tetapi dari fundamentalisme pasar. Komunisme telah menghapuskan mekanisme pasar dan memberlakukan pengendalian kolektif atas semua aktivitas ekoonmi. Fundamentalisme pasar berupaya menghapuskan keputusan kolektif dan memaksakan supremasi nilai-nilai pasar terhadap seluruh nilai-nilai politik dan sosial. Kedua ektrem ini keliru, yang kita perlukan adalah suatu keseimbangan yang tepat antara politik dan pasar, antara membuat aturan dan breperelaku menurut aturan...".

Goerge W. Bush (2002)

"....Konsep 'pasar-bebas' muncul sebagai suatu prinsip moral bahkan sejak sebelum menjadi sebuah tiang ilmu ekonomi. Apabila anda bisa membuat sesuatu yang pihak-pihak lain menghargainya, anda harus dapat menjualnya kepada mereka. Apabila pihak-pihak lain membuat sesuatu yang anda menghargainya, maka anda harus dapat membelinya. Ini adalah kebebasan yang sebenarnya, untuk seseorang—atau suatu negara—dalam mencapai penghidupan...". (Bagian dari American Defence and Security Strategy).

James Petras dan Henry Veltmeyer (2001)

"....Dinamika globalisasi di Asia, negara-negara bekas Uni Soviet, Afrika dan Amerika Latin sedang menimbulkan banyak kesengsaraan hidup, tetapi juga telah menciptakan suatu kesempatan historis untuk dapat mencapai sesuatu yang melebihi kapitalisme. Akan merupakan suatu kegagalan keberanian yang besar berpuas dengan mencapai sesuatu yang lebih rendah daripada suatu masyarakat sosialis 'baru', yaitu suatu bangsa baru sebagai suatu bagian dari keseluruhan yang integral, suatu budaya barunya kaum partisipan dan bukan kaum penonton, suatu internasionalisme baru dari semua pihak yang berkedudukan setara...".

Lester C. Thurow (2000)

"...Belajar untuk mengetahui bagaimana caranya membuat perkonomian global baru ini beroperasi akan memerlukan waktu yang tidak sedikit, disertai hal-hal tak terduga dan berbagai kekeliruan sepanjang jalannya. Namun transisi dari lingkup nasional ke lingkup global akan jauh lebih bregejolak daripada transisi dari lokal ke nasional yang siap belajar bagaimana caranya untuk mengelola prosesnya. Di lain pihak, tidak ada pemerintah global dapat belajar bagaimana caranya untuk mengelola prosesnya. Di lain pihak, tidak ada pemerintah gloal dapat belajar bagaimana caranya untuk mengelola perekoonmian global... Parlemen Amerika sangat tidak menyukai istilah '*super national*': tak ada pihak manapun yang akan mendirikan suatu pemerintah global dalam waktu dekat ini – terlepas apakah keberadaan pemerintahan global itu memang dibutuhkan atau tidak. Karenanya, dunia akan mempunyai suatu perekonomian global tanpa suatu pemerintah global. Implikasinya adalah akan adanya suatu perekonomian global tanpa adanya aturan dan peraturan yang dapat ditegakkan, yang telah disepakati besama, dan juga tak ada aparat penegak hukum yang dapat ditegakkan, yang telah disepakati besma, dan juga tak ada aparat penegak hukum yang dapat dimintai bantuannya apabila ada pihak yang merasa telah diberlakukan secara tidak adil ...".

Jan Tinbergen (1978)

"....Kesederhanaan gaya hidup merupakan tujuan pokok dari pembangunan individu dan masyarakat ...sedangkan persyaratan pokok lainnya adalah adanya solidaritas...".

Albert Tevoedjre (1978)

Singa yang tidak membunuh adalah singa yang tidak mengaum. Ia bagaikan uang, yang mencekik kita tanpa bersuara (peribahasan Tswana).

Gunnar Myrdal (1957)

"... Suatu teori keterbelakangan dan pembangunan yang berguna, itupun kalau pada suatu waktu akan ada teori yang dmeikian, seharusnya didasarkan pada pemikiran yang dirumuskan dari pengetahuan empirik yang sangat luas tentang perubahan sosial yang menyangkut semua aspeknya yang

beragama, yang diperoleh dalam suasana kebebasan yang paling besar dari brebagai nilai tradisional...".

Joseph E. Stiglitz (1994)

"... Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar. Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antara mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang besaing secara berlebihan ... Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri...".

Lester C. Thurrow (2000)

"... Dalam hal kegiatan investasi, maka kapitalisme sangat terarah dan sagat memberi batasan. Hanya kegiatan investasi, yang teruji dapat menciptakan *net present value* negatif harus dihentikan. Pasar-bebas diadakan untuk dapat menegakkan pelaksanaan prinsip-prinsip yang diharuskan oleh teori ekonomi ... Kapitalisme muncul dengan berbagai penyakit genetik yang telah tertanam di dalamnya—yaitu kecenderungan untuk menabung dan beinvestasi dalam jumlah yang terlalu kecil. Untuk dapat mengimbangi kecenderungan genetik ini, suatu bangunan harus dilihat bukan hanya sebagai suatu investasi yang untuk meningkatkan konsumsi di masa depan tetapi sebagai suatu tujuan akhir tersendiri...".

J.W. Smith (2001)

"... Rasa kasih sayang antar sesama manusia, pertimbangan arif manusia dan bahkan mungkin kelangsungan hidup umat manusia, menghaurskan tatanan perdagangan dunia direstruktur, dari suatu bentuk 'imperialisme korporasi' saat ini, yang penuh dengan kekerasan, kemiskinan serta kehancuran lingkungan hidup, menjadi suatu bentuk 'kapitalisme kooperatif' yang memeprdulikan nasib sesama manusia, dengan kekerasan

dan kemiskinan pada tingkat yang minimum dan pembangunan kembali sistem ekologi yang demikian pentingnya bagi kelangsungan hidup di dunia ini. Mengutip kata-kata John Maynard Keynes, 'Pada akhirnya, umat manusia akan terbebaskan dari kecintaannya yang berkelebihan dan tidak wajar akan uang untuk dapat menjawab suatu pertanyaan yang menyangkut eksistensi manusia—yaitu bagaimana manusia dapat hidup secara bijaksana, rukun dan baik."

Manfred B. Steger (2002)
"... dalam globalisasi... masyarakat di berbagai belahan dunia terkena pengaruh besar dari perubahan transformasi struktur sosial dan lingkungan kultur. Globalisasi kiranya telah memberikan kekayaan dan kesempatan besar bagi sekelompok kecil masyarakat, sementara itu memerosokkan sangat banyak orang ke dalam keterhinaan sebagai orang miskin dan tanpa harapan apa-apa...".

Lampiran III
Lampiran_III_Edi_Swasono.pdf

Lampiran IV

PLATFORM NASIONAL
(LAN, Denpasar, 25 Juni 2001)

Oleh: Sri-Edi Swasono

PLATFORM NASIONAL –I
Manifesto Politik : Indonesia Merdeka dan Bersatu (menjunjung tinggi *National Sovereignty and Terrritorial Integrity*).
Manifesto Budaya: Bhinneka Tungal Ika – Pluralisme adalah aset nasional, Pancasila sebagai "asas besama" (bukan "asas tunggal") merupakan pemersatu bagi pluralise.

PLATFORM NASIONAL -II
Persatuan Indonesia dan keberdaulatan Indonesia merupakan tuntutan politik dominan dan final.

PLATFORM NASIONAL -III
Arti kemerdekaan: bredaulat dalam politik, bedikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya (Bung Karno)

PLATFORM NASIONAL -IV
Kepentingan nasional adalah utama, tanpa mengabaikan tanggungjawab global (politik luar negeri "bebas aktif"-Bung Hatta)

PLATFORM NASIONAL -V
Yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara.
Pembangunan ekonomi adalah **derivat** untuk mendukung pembangunan rakyat. bangsa dan negara.
Pengembangan ekonomi rakyat memberi makna substantif terhadap platform ini.

PLATFORM NASIONAL -VI
Hubungan ekonomi nasional berdasar kebersamaan (*mutuality*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*, bukan *kinship*) yang partisipatif dan emansipatif (Bung Hatta) sebagai upaya transforsmasi sosial dan transformasi ekoonmi menuju tercapainya kesejahteraan sosial.

PLATFORM NASIONAL -VII
Kita harus ikut mendisain ujud globalisasi (sebagai subyek, bukan obyek).
Kita harus tetap mewaspadai globalisasi, jangan sampai kepentingan naisonal terdominasi oleh kepentingan global.

PLATFORM NASIONAL -VIII
Untuk melaksanakan Otonomi Daerah dalam NKRI, kita harus tetap memiliki (tidak merongrong) Pemerintah Pusat yang kuat, Pemerintah Pusat adalah milik Daerah-Daerah, yang kita tolak bukan Pemerintah Pusat (Pemerintahan Nasional), yang kita tolak adalah Sentralisasi Pusat.

PLATFORM NASIONAL -IX
Yang kita tuju adalah "Pembangunan Indonesia" bukan "Pembangunan di Indonesia".

PLATFORM NASIONAL -X

Hutang luar negeri bersifat pelengkap dan sementara (Bung Hatta). Investasi asing berdasar *Mutual benefit*, bukan predominasi (*tidak overheersen*) (Bung Karno dan Bung Hatta).

PLATFORM NASIONAL -XI

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan rakyat untuk digunakan sebesar-besarn kemakmuran rakyat, dari generasi ke generasi.

RUMITNYA PENCARIAN "DIRI" KULTURAL
KETIKA MAKIN SULIT MENEMUKAN GURU BANGSA
Oleh: **Mudji Sutrisno, SJ**

Ketika diri dirumuskan oleh Descartes sebagai sang actor, pelaku yang dengan "cogito"-nya menentukan laku-nya, di situ sebjektivitas dipusatkan pada rassionalitasnya, kesadarannya. Inilah dasar peradaban pencerahan yang menempatkan manusia sebagai pelaku otonom untuk memaknai, memberi arti lewat kesadaran rasionalitas.

Dalamperkembangannya, posisi sentral manusia dinobatkan sebagai "agency" (baca actor/pelaku pemakna hidupnya). Bersama dengan rasionalisme yang terus memuncak pada idealisme, si manusia actor ini dengan distansi rasionalnya membuat relasi-relasi dengan realitas sebagai rajuan subjek mengarap objek. Yanglain atau 'alterity' (alter = yang lain atau 'the other') diperlukan sebagai objek. Realitas adalah objek yang dianalisis oleh pikiran manusia. Realitas adalah 'yang lain' yang mau dikuasai, dikategorikan, dipetakan hingga berada dibawah kontrol budi rasional manusia.

Berpikir, menyadari relitas sama dengan menaruh yang lain dalam dan sebagai objek kesadaran (cagito) manusia. Puncak praxis rasionalitas "know how" ini diwujudi dalam teknokrasi, praktek penggunaan rasionalitas untuk mengolah, menguasai alam hingga berdampak ekologis, banjir dan malapetaka karena otonomi penguasaan.

Ketika Freud "menemukan" psikoanalisa dimana penentu otonomi manusia bukan padakesadarannya tetapi justru ketidaksadarannya digugat baliklah manusia sebagai subjek pelakuan atau actor dalam hidupnya. Subjektivitas dalam diri manusia sebagai agen atau agency dikritisi justru karena ia tidak 100% otonom lantaran sebagian dirinya ditentukan oleh super ego-nya (tradisi baik buruk; norma salah benar yang dihunjamkan dan dikonstruksikan sebelum kesadarannya tumbuh dewasa) dan sebagian lain ditentukan serta dikonstruksi oleh naluri insting libido untuk terus hidup. Jadi, perumusan diri manusia sebagai subjek oleh otonomi kesadarannya dalam dirinya, tepat pada struktur kepribadiannya, menurut Freud idak otonom lagi karena dikontruksi oleh super ego dan id (naluri kelangsungan hidup).

Kemudian dengan pikiran Mark untuk analisis strtural kesosialan manusia, lagi-lagi otonomi subjektivitas sebagai aktor diguncang. Mengapa? Karena manusia tidak otonom dan bukan subjek rasional mereka kehendak kalau ia terlahir miskin karena dikonstruksi oleh relasi ekonomis modal dan tanpa alat kerja.ia juga tidak "happy" diri ketika hasil kerjaan tidak ia nikmati tetapi menjadi milik orang lain kala ia terlahir sebagai buruh murahan (buru yang diupah murah?) atau petani tanpa tanah. Konstruksi material ekonomis dan social-lah yang menentukan siapa diri manusia dalam perumusannya. Kondisi miskin material, takbermodal, tak berakses kekuasaan dan relasi ekonomis membuatnya tidak menjadi diri otonom bahkan heteronom secara social dan structural.

Bekat dua pemikir tersebut: Freud dan Mark, pembentukan proses menjadi diri seseorang di abad ke-20 ini dikritisi sebagai bukan melulu individu otonom pemakna hidup tetapi ia dibentuk oleh konstruksi relasi-relasi social ekonomisnya tidak otonom lagi.

Ketika Friedrich Nietzsche menampilkan pikirannya terutama dalam hubungan manusia dengan bahasa; wacana dan ideologi; di sana diri subjek disadari baru sebagai hasil bentukan bahasa dan wacana lebih dari pencipta bahasa. Sederhananya: manusia lahir ia sudah dikondisikan dan dibentuk oleh tradisi atau bahasa ibu untuk mempelajarinya agar eksis, agar tampil dan bisa berwacana. Bagaimana bila bentukan bahasa ini merupakan "bahasa bekas penjajah"? Bagaimana pula bila pikran penjajah yang menaruh terjajah secara bahasa selalu sebagai budak, objek sehingga di batinkan pula selera penjajah mengenai kecantika yang putih; wajah citra indo; lalu penanaman baik dan buruk lewat bahasa? Lalu lewat symbol dan tanda-tanda apa dampak-dampak wajah cultural pada proses perumusan diriterjajah secara individual, secara kolektif sebagaibangsa?

Pokok-pokok pertanyaan tajam di atas menjadi lanjutan studi mendalam postkolonialisme mengenai diri dan identitasnya sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme. Namun sebenarnya ada 3 sebab utama yang menjadi sumber mengapa otonomi diri individu rasional proyek pencerahan diruntuhkan oleh peran bahasa dan system tanda dan makna yang mengkontruksi diri manusia.

Yang pertama adalah jasa Louis Althusser mengenai teori kontruksi dibentuknya diri oleh bangunan ideologi sebagai system makna yang menerangkan kenyataan dan membuat realitas bisa dipahami. Althusser menunjukan bahwa pemberi dan penentu makna yang mengajari masyarakat untuk berelasi social adalah kelas penguasa yang memiliki kekuasaan hegemoni tafsir makna dan tafsir hubungan antar anggota. Tafsir hegemoni ini disemburkan dalam anggota masyarakat lewat media masa, saluran penerangan hingga menjadi kesadaran masyarakat yang ideologis semu palsu.

Mengapa? Masyarakat mengira itu adalah kesadarannya padahal (sebenarnya)kesadaran palsu hasil manipulasi ideologis kelas pemilik tafsiran dan hegemoni arti. Kesadaran palsu ideologis ini di langgengkan lewat lembaga-lembaga pendidikan, birokrasi, aparat keamanan, propaganda media masa yang membentuk terus menerus kesadaran warga hingga sama dengan kesadaran penguasa pemilik tafsir makna. Ini sebabnya kesadaran seolah-olah demokratis padahal sama dan palsu. (Kesadaran palsu ini) bisa awet abadi karena pusat pikiran alternative dalam mengkonstruksi sendiri makna dibungkam.

Sumber kedua adalah pengembangan psikoanalisa Freud dengan penemuan ketidaksadaran penentu diri manusia oleh Jacques Lacan yang dikombinasikan dengan analisis structural mengenai bahasa. Apa artinya? Melanjutkan Ferdinand de saussure soal strukturalisme bahasa dan meramunya dengan ketidaksadaran Freud, Jacques lacan mau menujukan bahwa manusia sebagai 'diri' sekreatif apa pun ia adalah pencipta arti dalam bahasa atau karya seni. Ia tidak hanya subjek perajut makna kata dan makna estetika, tetapi pada saat yang sama, ia distrukturkan oleh sistem tanda atau kode bahasa yang ada. Artinya, manusia di konstruksi oleh kode bahasa dan ia harus patuh mengikuti kode tanda ini bila mau berkomunikasi dalam wacana dengan sesamanya.

Dengan kata lain, diri manusia dihadapkan pada kode-kode bahasa yang merupakan konsesus-konsesus dan konvensi bersama masyarakat pengguna bahasa mengenai makna kata, nuansa bahasa yang dalam system tanda dirumuskanmenjadi semiotika. Kemudian, dalam perkembangan wacana yang dinamis, kode tanda bahasa yang diaksarakan dan menjadi

simbol-simbol ikon yang lebih luas dari cakupan bahasa sementara ini disepakati sebagai teks. Disinilah letak pentingnya memahami dan menangkap kode bahasa dan artinya dari teks melalui dialog-dialog bukan hirarkis atau dikotomis 2 posisi (baca: oposisi biner) tetapi antar teks (*intertextuality*).

Untuk memahami kode bahasa dalam menangkap makna teks itulah ilmu menafsirkan teks yaitu hermeneutika diluaskan dari teks eksegese (menafsir teks-teks kitab suci) menjadi hermeneutika tekstual antar teks berkat jasa Dilthey dan tokoh Gadamer—yang berutang budi pada Martin Heidegger lantaran bahasa eksistensi meng-ada manusia sebagai Desain dalam ruang dan waktu harus diperbarui agar manusia menjadi sang pendengar sabda dan sang pencipta bahasa.

Hermeneutika teks dalam kontes diri manusia dengan relasi sosialnya, dan dalam relasi berbahasa dan berelasi system tunda itulah dirumuskan "siapa aku/diri ini dan siapa diri yang lain atau 'the other' (alterity) itu"?

Bila tafsirnya "telah menyempit" pada identitas diri secara relasi politis yang muncul hanyalah keramaian wacana-wacana politik identitas dalam pidator retorik tanpa studi penafsiran-penafsiran teks yang mendalam apalagi antar teks.

Namun,kode bahasa yang digunakan secara kreatif untuk bersastra tekstual secara tetulis bisa amat memperjuangkan pemulihan diri manusia merdeka, igaliter Indonesia melawan seluruh konstruksi-konstruksi kultur yang menjajah, feudal dan memperbudak. Contoh yang paling dahsyatnya adalah bahasa Indonesia sastrawi yang amat canggih diolah, dieksplorasi oleh Pramoedya Ananta Toer dalam teks novel-novel caliber dunia terutama tetralogi pulau Buru-nya.

Ekspresi kreatif kode bahasa dan konfensi egaliter bahasa Indonesia Pram secara tajam dan dahsyat menggunakan perlawanannya terhadap strategi dan feudal serta faternalistiknya budaya jawa yang memperbudak Nusantara ditambah hujaman kolonialisme sampai menjadi bangsa yang kerdil. Justru bahasa Indonesia pramoedya secara tajam mengungkapkan kemampuannya untuk memakai medium sastra atau teks sastra sebagai perlawanan terhadap kultur (baca: konstruksi kultur) yang menindas agar kemerdekaan diri dan kemerdekaan bangsalah yang dimenangkan.

Sumber ketiga yang menentukan perumusan diri manusia sebagai bentukan (konstruksi) system pengetahuan dan system budaya pada konteks (kondisi) histories sudahdimulai dari wacana (diskursus) yang dipelopori oleh tulisan-tulisan Michel Foucault.

Sama seperti yang terjadi dalam kode bahasa yang membentuk siapa diri manusia, Foucault meneliti dalam arkeologi pengetahuan bahwa subyektivitas diri dikonstruksi oleh aturan main system pengetahuan yang sudah nilai dengan wacana. Manusia bukan pencipta makna atau arti bahasa dalam wacana. Tetapi keberadaannya distruktur oleh system pengetahuan tertentu yang terungkap dala wacana. Diri manusia dikonstruksi oleh relasi kekuasaan dalam wacana sejak pemegang tafsir wacana menentukan ia gila atau sehat dalam masyarakatnya. Sistem pengetahuan mengenai siapa sakit, siapa kriminal, siapa sehat dan siapa gila di tentukan dalam wacana itu. Bahkan mereka yang bewenang menenukan makna wacana, penguasa, menentukan pla apa itu kebenaran dan control subyektifitas diri manusia. Dalam bingkai piiran inilah wacana egaliter hanya terjadi ketika relasi kuasa sederajat dalam bersama-sama memaknai dan berposisi egaliter untukmelekukan diskursus tersebut.

Apa konsekuensinya bagi perumusan diri manusia? Apa pula dampak relasional dengan "the other" atau yang lain? Pertama, upaya-upaya kltural untuk merumuskan identitas diri manusia dan hubungannya dengan sesamanya harus ditaruh proyek dinamika kerjanya pada lintas disiplin ilmu. Tanpa itu diri akan atau diobjekan atau direduksi menjadi 'yang lain' yang dijadikan objek. Semisal proyek cultural kelndonesiaan dari jati diri warga-warganya yang majemuk kultur makna kelndonesiaan harus ditafsir antara teks dengan meneliti, mendalami antar tekstual kebhinekaan yang saling memperkaya. Setiap politik penyeragaman hanya akan mematikan keindonesiaan dalam pembekuan teks yang sekaratdan layu.

Kedua, perumusan diri manusia dalam harkatnya harus amat disadari selalu sudah dijebak dan dikontruksi oleh adu kalah menang bentukan kontruksi kekuasaan (politik). Dan pada saat yang sama diri manusia dan sesamanya dalam kontruksi misalnya hidup bersama dalam bernegara akan ditentukan pembentukannya oleh konstruksi-konsruksi ekonomi, capital. Ketidakmampuan menciptakan egalitarianisme dalam keadilan

ekonomis maupun keadilan politis yaitu demokratisasi akan membuat siapa kuat ekonomis dan politis akan menindak yang kalah ekonomis dan poltis.

Konsekuensi yang ketiga, setiap ikhtiar merumuskan siapa manusia dan sesamanya mesti menjadi proyek cultural seluruh teks dan antar teks yang berarti misalnya, seni, harus ditafsir dinamikanya bukan dari konsepsi rasionalnya tetapi dari praxis perayaan dan penghayatan untuk dan dalam memulihkan si manusia, lingkungan dan sesamanya manusia.

Apakah keindonesiaan yang sedang krisis kebanggaan ini harus dicari solusinya dengan menafsirkan cultural antar teks? Bisakah proses ini dirajut bila kemauan kita untuk mempercayai perlunya kita berubah menjadi lebih baik, lebih beradab masih terkeping-keping oleh "distrust"?

FILANTROPI SENI, SOSIALISASI, DAN PENDIDIKAN KESENIAN

Oleh: **Eka Budianta**

Menjadikan Indonesia bangsa yang murah hati, adalah cita-cita saya sejak kecil. Pada suatu hari ketika umur saya 10 tahun, datang seorang kaya dari kota, untuk bermain layang-layang di tanah lapang desa kami. Layang-layangnya sangat besar dan bagus. Benangnya gelasan pabrik, mahal juga nampaknya. Setelah bosan bermain, ia berkata pada saya, "Panggil teman-temanmu, perebutkan layang-layang ini. Kamu yang mengatur." Lalu ia pergi.

Saya memegang layang-layang bagus itu, berteriak-teriak memanggil teman sekampung, agar siap berebut bila nanti saya lepaskan. Benar. Setelah orang berkumpul, benang saya putus, dan layang-layang itu limbung dibawa angin. Sekitar 15 anak berebut mendapatkannya. Mereka berlari, membawa galah, saling mendorong, saling menaik, berkelahi ... dan robeklah layang-layang yang indah itu.

Beberapa orang menyalahkan saya. Mengapa tidak membawa pulang sendiri saja? "Bukankah layang-layang itu sudah di tanganmu?" tanya mereka. Pengalaman itu terulang kembali ketika saya menerima Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Drs. H. Omar Abdalla (alm) untuk menjadi Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan, mulai 1 Juli 1994. Ada uang sedikit di atas Rp 1 milyar; dan beberapa ratus lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang siap membelanjakannya di bidang pelestarian lingkungan. Saya harus membagi-baginya, dan kalau bisa tidak jadi habis, melainkan bertambah banyak.

"Uang itu tidak boleh robek seperti layang-layang yang saudara lepaskan," kata Tanri Abeng, penerus Omar Abdalla, yang mendengarkan kisah itu dalam presentasi perkenalan saya di Merchantile Club, Jakarta. Di sanalah rahasia filantropi. Semakin banyak diberikan, harus semakin berkembang. Semakin banyak berbagi, semakin menjadi kaya. Dan itulah juga yang saya alami di masa kecil. Setelah saya laporkan bahwa layang-layang itu sobek, si orang kaya justru mengirimkan 12 layang-layang baru, dengan benang gelasan yang warna-

warni, untuk diperebutkan sekali lagi, dengan cara yang lebih berbudaya.

Filantropi Seni Tradisional

Di Pulau Jawa, dan mungkin juga di pulau-pulau lain maupun daratan benua Asia selatan dan tenggara, kesenian tradisional sedikit banyak tergantung pada kocek orang-kaya. Kalau mereka punya hajat, rakyat akan ditraktir pertunjukan wayang semalam suntuk. Bila dalang, sinden dan para penabuh gamelannya hebat, penonton penuh berjubel. Jalanan ditutup, para pedagang asongan berkumpul, ratusan, bahkan ribuan orang datang menontonnya. Mereka tertawa terbahak-bahak bila pertunjukan lucu, ikut merasa tegang pada saat adegan perang, dan terharu bila memang menyedihkan.

Para pengamat filsafat dan kebudayaan berkata, pertunjukan wayang itu memberi nafkah batin dan mengisi kebutuhan spiritual masyarakat. Parapenonton itu, termasuk saya, melahap berbagai ajaran, moralitas, etika, dan pelajaran budi-pekerti yang diselipkan dalam berbagai humor, dialog serius, maupun tembang-tembang yang adakalanya berbau porno juga. Saya sangat suka. Begitu juga ratusan, ribuan, bahkan kini mungkin berjuta-juta penggemar wayang di seluruh persada Asia Selatan, Timur, Tenggara, maupun di pojok-pojok tertentu dunia.

Masalahnya, apakah audiens pertunjukan wayang itu membayar? Ribuan orang yang mengerumuni Balairung Universitas Gajah Mada, ketika digelar wayang kulit semalam suntuk, juga tidak dikenakan bayaran. Satu dua orang sponsor sudah cukup mampu melunasi honorarium dalang termasyur Ki Manteb Sudarsono, Anom Suroto, maupun pesinden kondang Waljinah. Cukup banyak mantan menteri, pensiunan direktur perkebunan, atau konglomerat tersembunyi. Mau apa? Masih perlukah dikenakan karcis untuk nonton randai, tanjidor, lenong, tarling, wayang golek, dan beribu macam produk kesenian lain di kampung-kampung?

Atau, haruskah untuk selamanya masyarakat berdesak-desak memenuhi tanah lapang untuk nonton Inul Daratista bergoyang gratis, karena pemesannya telah membayar penyanyi ndangdut itu hingga Rp 10 juta untuk setiap lagu? Jangan-jangan kita telah ditakdirkan untuk selalu tergantung pada donor, pengayom, maesenas, orang-kaya, atau apapun namanya untuk

dapat nonton ludruk, ketoprak, gandrung, bahkan sekadar bioskop layar tancap yang pengeras suaranya meraung-raung sampai ke dusun tetangga.

Maaf, saya juga pernah "menanggapnya" untuk merayakan Malam Kemerdekaan, 17 Agustus 2001 di pekarangan kami. Taripnya sekitar Rp 1 juta untuk 5 hingga 7 judul film, yang bisa diputar sambung menyambung sampai ayam berkokok dan fajar menyingsing. Lakonnya boleh pilih dari film nasional, silat Mandarin atau India. Biasanya kombinasi dari 3 genre itu, diselang-seling agar orang betah, tidak mengantuk, bertahan sampai pagi. Seperti dalam pertunjukan wayang kulit, pemilik hajat seolah diwajibkan menghidangkan teh manis, kopi susu, wedang ronde, bahkan mie rebus, nasi goreng, kambing guling, 1001 macam kudapan sampai pagi. Aduh, menyesal sekali!

Betul juga pernyataan Toeti Heraty, bahwa filantropi macam ini bisa membuat masyarakat makin tergantung dan parasiter. Tontonan dan foya-foya macam itu tidak mendidik sama sekali. Bahkan kalau ada yang mengecamnya "merusak moral spiritual," sulit membantahnya. Begitu pula jangan-jangan dengan seni tradisional seperti wayang kulit, yang semakin lama semakin jarang dan semakin mahal biayanya.

Pada bulan Agustus 1954, ketika ibu dan ayah saya menikah, pertunjukan wayang purwa semalam suntuk cukup dibiayai dengan tujuh kuintal gabah, hasil panen kakek dan nenek kami. Tetapi pada Maret 2000, ketika ayah dan ibu mengulanginya untuk pernikahan adik bungsu kami, biayanya setara 10 ton beras, tidak terlunasi dengan 30 kali pensiun bulanan pegawai negeri.

Pembuka Mata Mancanegara

Jelaslah sudah, pagelaran seni tradisional semakin mahal untuk ditanggung keluarga dan pribadi. Harus ada lembaga atau korporat yang mau jadi sponsor. Itulah yang kita rasakan tatkala Ford Foundation menanggap pagelaran Wayang Listrik di Jakarta, 12 Oktober 2003 yang baru lalu. Untuk merayakan pengabdiannya 50 tahun di Indonesia, yayasan dari Amerika Serikat itu mempertunjukkan betapa "masih kaya" sisa-sisa seni-budaya tradisional Indonesia. Lebih dari 250 seniman adat diperkenalkan lagi pada masyarakat, yang kini berjubel di mal, pusat belanja dan plaza.

Wahai bangsa Indonesia, inilah kekayaan anda. Kekayaan kita, warisan dunia! Kira-kira begitulah yang terngiang dalam hati setiap orang bila menyadari betapa filantropi dari masyarakat internasional lebih berdaya-guna, daripada kedermawanan bangsa sendiri. Padahal, ada yang bilang, "Every culture depends on philanthropy and nonprofit organizations to provide essential elements of a civil society." Kebudayaan mana pun tergantung pada filantropi. Juga peranan lembaga-lembaga nirlaba yang menyediakan unsur-unsur penting dalam masyarakat madani.

Lembaga nirlaba itu bisa keluarga, bisa rukun tetangga, rukun warga, bisa juga yayasan-yayasan dan macam-macam perkumpulan suka-rela yang masih suka bergotong-royong di tanah tumpah darah ini. Kita harus catat, kedermawanan dalam bidang agama, dan bila terjadi bencana bisa meledak besar sekali. Hanya dengan modal tong kosong, didirikan di tengah jalan, sekelompok remaja mesjid bisa menggalang amal-jariah untuk membangun rumah ibadah yang indah. Tetapi coba cegat lalu-lintas dan minta mereka membangun gedung kesenian, rumah sekolah, atau stadion olahraga, jangan-jangan malah kena cuci-maki.

Filantropi untuk ikut bersama membangun jalan dan jembatan, mungkin masih dapat diterima dan didukung sana-sini. Almarhum kakek saya, pernah memberi contoh membangun jembatan desa bersama teman-temannya pada awal 1950-an. Jembatan itu demikian kukuh dan bagusnya, seolah-olah telah membebaskan kami dari kewajiban ikut kerja bakti selamanya. Membangun masjid oke, membangun gereja, pura, kuil, dan viharajuga oke. Banyak sekali uang ditumpahkan untuk kegiatan agama. Seolah-olah manusia memang ditakdirkan bekerja keras sampai mati, agar bisa jadi kaya dan mampu menunaikan tugas-tugas agamanya. Tetapi, untuk seni-budaya? Tunggu dulu.

Membahas filantropi di lapangan kesenian pada hakikatnya adalah menghitung anggaran kita masing-masing untuk merawat kebudayaan, selain agama. Selama belum ada kepastian agama termasuk budaya, atau memang perlu dibedakan, (sebab keduanya sering merasa saling diganggu, mengganggu dan terganggu), seyogyanya kita memasang pos anggaran tersendiri.

Filantropi beragama sudah diatur dan berjalan bagus sekali melalui berbagai amal, zakat, infaq, sadaqah, persepuluhan, dan

macam-macam iuran bin sumbangan lainnya. Sedangkan filantropi seni budaya meliputi uang receh untuk pengamen, beli bunga, beli buku, lukisan, batik dan tenun ikat, bibit pohon, hiasan rumah, masakan tradisional, sumbangan pesta manten, ulangtahun dan ziarah, pulang kampung di waktu lebaran, serta ikut "nanggap" Inul yang sering dikecam kalangan agama, meskipun untuk khitanan!

Sosialisasi dan Pendidikan Filantropi

Di lapangan pendidikan, filantropi juga sudah berjalan melalui adanya beasiswa, anak-asuh, orangtua asuh, pembentukan dewan sekolah dan voluntarisme mengajar. Bahkan di kalangan suku anak dalam dan talang-mamak pun, muncul relawan-relawan yang mengajar anak-anak membaca di hutan. Pendek kata, potensi, embriyo, cikal-baka maupun model-model filantropi macam-macam telah ada di dalam masyarakat Indonesia. Kala tidak menyatu dalam ajaran agama, ada kalanya sudah inheren dalam adat-istiadat, kehidupan sosio-kultural dan ekonomi kita. Sebagai contoh yang sering ditampilkan adalah kedermawanan di bidang olahraga, termasuk memberi hadiah uang pada juara bulu tangkis dan sepak bola.

Konsultasi Filantropi Nasional yang diadakan Yayasan Kehati bersama Ford Foundation, pada 13 Oktober 2003 baru membahas delapan jenis filantropi. Filantropi untuk penanggulangan konflik dan bencana, untuk lingkungan hidup, untuk kesehatan, untuk seni-budaya, untuk perekonomian mikro,

Untuk kepemerintahan yang baik, untuk pendidikan, dan filantropi untuk demokratisasi. Masih banyak jenis filantropi lain yang belum dibicarakan tapi sudah sering terdengar dan amat berkembang. Di antaranya adalah filantropi diaspora, kegemaran menyumbang untuk kampung halaman, seperti yang populer dilakukan untuk Sumatera Barat dengan Gebu Minang, gerakan seribu untuk Minang.

Di banyak negara maju, studi, pengembangan dan kampanye filantropi diadakan melalui bermacam lembaga, terutama di perguruan tinggi. Cukup banyak universitas mempunyai jurusan bahkan "school" tersendiri. Contoh yang paling saya kenal adalah Indiana University, School of Philanthropy. Saya termasuk lulusan terbaik, pada saat mereka mengadakan kursus penggalangan dana, bekerjasama dengan

Atheneo University di Manila, Filipina, 1997. Hadiahnya boneka Donald Bebek, yang diyakini cerewet tapi amat rajin, pandai mengumpulkan, menyimpan dan membagi telur-telur emasnya.

Secara besar-besaran pendidikan filantropi juga dikembangkan untuk perempuan dan anak-anak. Sebagai contoh, bisa disebut Center of Family Philanthrophy dan Women's Philanthrophy Institute. Kenyataannya, budi pekerti dan pikiran anak adalah modal utama untuk membangun masa depan. Tambaha lagi, dalam banyak kebudayaan, perempuan merupakan motor dalam berbagai upaya penggalangan dana. Maih inga kegiatan Ibu Peduli membagi-bagikan susu? Atau perempuan-perempuan Amerika menyelamatkan berbagai warisan nasional? Sejarah pengumpulan bermacam biaya, baik untuk partai politik, pameran perdagangan, untuk perdamaian maupun perang, sejak amanya Srikandi kulit merah, Pochahontas, selalu tergantung pada peran perempuan.

Tetapi yang kini mendesak dan sangat penting adalah pendidikan filantropi untuk anak-anak. Sedini mungkin anak-anak Indonesia perlu dilatih untuk hidup murah hati, pemaaf, pemerhati, pelindung dan pengayom bagi alam maupun sesamanya. Tentu mereka harus diajar menguasai teknologi dan ilmu-ilmu ekonomi sampai menjadi sehat, bahagia, pintar dan kaya-raya. Tetapi bila mereka sudah pintar dan kaya-raya, untuk apakah semua kehebatannnya? Filantropi. Jawabnya jelas sekali, mereka harus mengembalikan, mendarma-baktikan kekayaannya untuk kebudayaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan tentu boleh juga untuk agama yang menjajikan kapling di surga.

Berbagai modul dan buku untuk mendidik manusia menjadi murah hati telah diterbitkan. Saya yakin, kurikulum dan buku ajar untuk menanamkan kedermawanan juga dapat disusun dan disosialisasikan. Pada umur 10 tahun saya berhasil mendapatkan layang-layang, kelereng, bola sepak, dan macam-macam mainan lain untuk dimanfaatkan teman-teman. Seusai menjabat direktur Dana Mitra Lingkungan pun, saya meninggalkan saldo lebih dari Rp 4 milyar. Sayangnya rupiah sedang terpuruk habis, sehingga nilainya kurang dari 400 ribu dolar (1998).

Padahal, santunan yang disalurkan lebih dari Rp 1,5 milyar, sama dengan modal awal yang dipercayakan 4 tahun sebelumnya, bernilai 600 ribu dolar! Sungguh betul, semakin

banyak kita memberi, semakin banyak pula masuknya dukungan. Hanya gonjang-ganjing ekonomi yang membuat kita khawatir perbuatan baik pun bisa turun nilainya. Hukum alam jelas tidak demikian, kebaikan yang dipupuk akan semakin menjadi besar. Seperti kini terbukti dengan berkembangnya filantropi media massa.

Bertrilyun-trilyun rupiah terkumpul melalui televisi, radio, surat kabar dan internet untuk bermacam keperluan manusia dan lingkungannya. Tinggal bagaimana mengutamakan prinsip imanen, yaitu kembalinya kemuliaan dan keluhuran budi ke bumi, setelah dipanjatkan, dinaikkan dan diperjuangkan, dibela dan diangkat setinggi-tingginya. Sudah waktunya pusat-pusat studi dan pengembangan filantropi dibuka dan diperkuat di kalangan perguruan tinggi Indonesia. Sekarang, sudah saatnya para guru, budayawan, wartawan, seniman, melatih publik khususnya anak-didik untuk mencintai peradaban dengan cara yang paling nyata, yaitu dengan memberikan waktu, uang, tenaga, pikiran dan hatinya.

Filantropi Untuk Multi Kultural

Jangan pernah lupa, manusia juga dicatat karena apa yang telah mereka berikan. Persis seperti badak memberikan cula, cacing meninggalkan tanah gembur, burung memberikan kicau, dan bunga-bunga mewariskan harumnya. Kedermawanan adalah kunci untuk mengembangkan budaya memberi itu. Filantropi menolong manusia pada saat menderita terkena bencana, maupun ketika bersenang-senang dan berpesta. Sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Filantropi memperpanjang umur, sebab selalu memberi harapan. Ia bermula dari cinta, dan bergerak ke arah cinta yang lebih besar.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling mencintai seni-budaya Indonesia?

Dalam banyak contoh, kita harus mengakui peran dan jasa-jasa masyarakat internasional. Ketika candi Borobudur rusak, pemugarannya sangat dibantu Organisasi Kebudayaan PBB, Unesco. Kita juga ditolong oleh Smithsonian untuk merekam produk-produk seni lisan. Juga untuk melestarikan bermacam kesenian tradisional di Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Irian. Apakah itu berarti bangsa Indonesia belum cukup filantropis untuk menyelamatkan seni tradisi dan adat istiadatnya sendiri?

Semoga tidak demikian. Dengan bantuan Ford Foundation, Yayasan Kelola berhasil menghimpun dan mempublikasi 3800 lembaga seni-budaya di seluruh Indonesia. "Direktori Seni dan Budaya Indonesia 2000" boleh dijadikan bukti adanya potensi yang luar biasa dalam industri kesenian. Beragam kegiatan seni budaya berlangsung di seluruh pelosok negeri ini, baik dalam lembaga formal maupun informal. Hampir semua dilakukan secara swadaya, dengan dedikasi dan dinamika yang sangat tinggi. Artinya, banyak lembaga yang dibentuk dengan penuh antusias, berambisi besar tetapi mudah bubar, pindah tempat, tidak berkegiatan, tidak berlanjut.

Untuk mengantisipasi hal ini, kembali kita disadarkan pada pentingnya modal dasar kebudayaan, yaitu hati dan pikiran generasi penerus. Maju mundurnya setiap kebudayaan sepenuhnya tergantung pada anak-cucu bangsa yang bersangkutan. Bila mereka menganggap penting, menyukai, dan memetik manfaat seni-budaya pendahulu, dengan senang hati dan penuh semangat pasti akan meneruskan, dan mengembangkan.

Dengan maraknya semangat anti globalisasi dan perlawanan terhadap otoritas politik maupun budaya, dewasa ini, rumusan untuk mengutamakan seni-seni budaya tertentu (apalagi penyeragaman) semakin tidak mungkin, dan tidak perlu. Dunia dihadapkan pada musim kebangkitan seni-budaya lokal, sekaligus sebagai respons atas ketakutan hilang lenyapnya berbagai adat-istiadat, bahasa dan budaya-budaya tempatan. Trend ke arah berkembangnya multikulturalisme menggejala di semua tempat dan di berbagai tingkatan.

Tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan dan menyumbangkan produk seni budaya itu pun sangat berbeda-beda. Namun rasanya tetap ada satu hal yang menyatukan, yakni kebutuhan untuk mendapat toleransi, keailan, dan dukungan moral maupun finansial. Di sanalah pendidikan filantropi dapat muncul sebaai jawaban. Kita memerlukan generasi penerus yang murah hati, dermawan, sanggup memberi dan menerima bermacam kekayaan jamannya.

Di masa lalu, ayah-ibu dan kakek-nenek kita sudah dipuaskan oleh cita-cita "Ingin menjadi dokter, ingsinyur, pilot, ekonom, sarjana hukum," dan seterusnya. Semoga di masa selanjutnya kita akan melihat anak-cucu bangsa justru puas dan

bangga bila dapat menjadi filantropis, yang bersedia menolong, membantu pihak-pihak yang diidolakan sebagai musuhnya. Untuk lebih jelasnya, bahkan anak-anak kecil di Amerika Serikat pun berlatih tetap mencintai, membantu dan memberikan dukungannya pada masyarakat yang dituduh pemerintahnya telah melahirkan teroris, diluluh-lantakkan seperti Irak dan Afghanistan.

Filantropisme telah memberi jawaban tatkala sebuah masyarakat dilanda banjir, gempa bumi, kerusuhan sosial, maupun dalam berjuang untuk mengatasi problem ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kini kalau kita serius hendak menjadi bangsa yang berbudaya, langka pertamanya tidak lain adalah mencintai, dan murah hati terhadap perkembangan seni-dan budaya sendiri yang nauzubilah aneka-ragamnya ini.

Pada akhirnya, kita pasti melihat bahwa kebutuhan manusia untuk beramal-jariah, berderma, bersikap murah hati, lebih penting dari pada tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Sudah terlalu sering kita melihat orang kelaparan harus memberikan makanan kepada mereka yang dirasakan lebih memerlukan, karena bila terlambat sebentar saja, yang tidak ditolong akan mati. Demikian pula semangat saling membantu di kalangan bangsa multi-kultur dengan adat-istiadat dan produk seni-budaya, yang rata-rata masih compang-camping, tetapi sangat dihormati dan dibanggakan.

Sebagai penutup, saya ingin menyapaikan rasa hormat kepada sastrawan Ajip Rosidi, yang melalui hadiah Rancage, misalnya telah membuktikan, bahwa dalam keadaan bagai manapun kita dapat menghargai karya seni-budaya lokal, yang acap kali justru tidak kita mengerti sama sekali. Menghargai, menerima, ikut memiliki dan membesarkan seni-budaya yang berbeda-beda adalah syarat pertama untuk memperkuat pendidikan filatropi di lapangan seni dan kebudayaan. Yang kedua, hati gembira, siap memberi hadiah kepada siapa saja. Persis seperti yang saya rasakan di masa kecil dulu, ketika melepaskan layang-layang bagus untuk diperebutkan.

Tetapi untuk menghidari kerusakan, perlu syarat ke tiga, yaitu kesepakatan dan mekanisme yang jelas baik dari pemberi, penerima, maupun pihak lain yang menyediakan fasilitas berupa undang-undang, peraturan dan sistim pemantauan. Selamat

menjadi bangsa yang berbudaya, teratur, rukun dan murah hati, Indonesia. ***

Eka Budianta, sastrawan, industriwan, Direktur Yayasan Sahabat Aqua, penulis buku kumpulan esei , "Humanisme Bisnis" dan "Moral Industri", juga kumpulan puisi "Rumahku Dunia" dan kumpulan cerpen "Taman Seberang".

NEGARA, BANGSA DAN MASYARAKAT
DALAM PENDEKATAN KEBUDAYAAN

oleh : **Taufik Abdullah**

Salah satu hal yang menarik dari Kongres Kebudayaan 1991, yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, ialah betapa beragamnya pemahaman dan pengertian tentang "kebudayaan". Dari sudut kajian ilmiah keragaman selalu menarik karena keragaman ini bisa mempertanjam pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Tetapi tidak pula kurang menariknya ialah keragamanan pemahaman tentang kebudayaan memungkinkan kita untuk mendapatkan semaca peta pemikiran tentang kebudayaan di kalangan para budayawan, ilmuwan, dan pemikir. Bukankah sesungguhnya keragaman pandangan memperlihatkan kekayaan pemikiran dan wawasan? Tambah menarik lagi ialah kenyataan bahwa keragaman pemahaman itu terjadi di saat Orde Baru sedang berada di masa kejayaannya. Dan , jika saja hanya satu saja hal yang paling menonjol dari Orde Baru dalam sejarah pemikiran kontemporer Indonesia maka yang satu itu ialah usahanya untuk "menyamakan persepsi" dalam segala hal. Bukankah untuk keperluan ini Orde Baru merasa perlu memperkenalkan konsep "azas tunggal", melaksanakan P-4, dan mendirikan badan yang khusus menangani pelaksanaan P-4 ini—dari tingkat pusat sampai kabupaten. Namun begitu keragaman rupanya tak terelakkan juga.

Para pengelola P-4 mungkin jengkel juga dengan keragaman ini, seakan-akan usaha mereka tak ada arti apa-apa. Tetapi jikapun mereka sempat jengkel, sudah jelas kejengkelan itu tak lebih daripada letupan semangat otoririter belaka. Jadi tak perlu digubris benar. Dalam konteks yang lain keragaman pemahaman itu ternyata bisa juga menjengkelkan. Dalam konteks pemikiran yang bercorak developmentalisme teknokratis gaya Orde Baru keragaman ini sangat menjengkelkan. Bukan karena apa-apa, hanya saja keragaman pemahaman ini terasa sebagai hambatan dalam usaha untuk membuat perencanaan yang rapi dan yang bisa diwujudkan dalam proyek pembangunan. Soalnya ialah kalau pemahaman saja sudah berbeda-beda tentu bisa pula

diperkirakan bahwa masalah yang diajukan berlainan pula dan usul pemecahan pun tidak akan pula sama. Jadi memang repot juga. Kalau begitu apa program yang sebaiknya harus dilakukan pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan? Jadi meskipun ditopang oleh niat yang baik, tetapi kalau tidak tahu pasti yang diinginkan oleh para budayawan, gagasan baru seperti apa yang perlu direncanakan untuk dilaksanakan? Karena itu masuk akal juga kalau BAPPENAS , dengan landasan niat baik ini,merasa perlu meminta jasa baik sekelompok ahli untuk mencernakan pemikiran yang dicetuskan dalam Kongres Kebudayaan itu ke dalam program yang bisa direncanakan. Dengan beginilah beberapa gagasan dari Kongres dapat juga menyelinap ke dalam Pelita.Maka begitulah pada tahap perencanaan masalahnya pun telah selesai.

Tetapi sebagai problem, kebudayaan masih menuntut pemecahan dan kejelasan lebih lanjut. Wacana dan perdebatan tentang masalah kebudayaan tidak akan pernah berakhir selagi dinamika masyarakat masih berjalan. Hal ini bisa dipahami juga sebab memang sejak kebudayaan mulai dijadikan sebagai objek studi dan fokus wacana dan tidak hanya dirasakan dan direnungkan sebagai suasana yang dihayati, pengertian dan definisi "kebudayaan" telah merupakan perdebatan. Di tahun 1950-an, umpamanya, dua orang ahli antropologi Amerika yang sangat terkenal (Kroeber dan Kluckhohn) mengumpulkan definisi-definisi kebudayan yang pernah diajukan oleh para ahli. Ketika itu saja jumlahnya telah lebih dari seratus buah definesi yang terkumpul.. Bayangkanlah berapa banyaknya definisi tentang kebudayaan yang terdapat sekarang, ketika ilmu pengetahuan telah semakin berkembang dan berbagai disiplin keilmuan yang telah dianggap baku telah pula mengalami goncangan dalam kemantapan teori. Masalahnya semakin bertambah rumit juga karena ternyata kebudayaan bukan saja sesuatu yang biasa dirumuskan –" inilah yang dimaksud dengan kebudayaan itu"— meskipun selalu diperdebatkan, tetapi juga biasa juga dipakai sebagai titik tolak akademis dalam usaha untuk memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tetapi biar sajalah perdebatan tentang makna dan definisi kebudayaan itu terus diperdebatkan, masalah yang tak kurang pentingnya untuk dibahas ialah problem yang mungkin timbul ketika kebudayaan dipakai sebagai landasan berfikir atau,

mungkin lebih tepat, sebagai pendekatan dalam usaha untuk memahami sistem dan perilaku politik kenegaraan. Namun sebelum memasuki masalah ini barangkali tidak ada salahnya— meskipun, terus terang saja, agak membosankan, bahkan bisa juga terasa sok akademis— kalau sebagai ancang-ancang dibicarakan juga selayang pandang persoalan umum kebudayaan sebagai sesuatu yang "ingin diketahui" dan sebagai pendekatan akademis atau ideologis. Siapa tahu uraian singkat ini bisa juga lebih memperjelas masalahnya.

Kalau saja kita memahami kebudayaan dengan memakaikan pendekatan antropologis, seperti yang pertama kali diperkenalkan Tylor, yang dalam tradisi kebahasaan yang dipengaruhi bahasa Jawa biasa dicernakan dalam konsep kebudayaan sebagai "cipta, rasa, karsa, dan karya", maka berarti semua aspek kehidupan adalah unsur-unsur dari kebudayaan. Dengan memakaikan pendekatan Tylor, yang cukup berpengaruh ini, kita diajak untuk berkenalan dengan suatu suasana dan struktur yang menguasai kehidupan sosial itu terdiri atas tujuh *culture universals* , seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, agama, organisasi, dan sebagainya. Semua aspek kehidupan adalah kebudayaan. Jadi, kalau begitu soalnya, seperti halnya dengan pujangga, maka ilmuwan adalah budayawan, demikian pula halnya dengan politikus, dan tentu saja para konglomerat, bahkan juga petani biasa. Mereka semua adalah budayawan. Bukankah semuanya terlibat dalam aktivitas dan suasana kebudayaan? Hanya saja besar kemungkinan masyarakat akan memberi hirarki dalam aktivitas ini. Mereka yang dianggap berhasil dalam lapangannya atau yang dijadikan contoh dalam lapangan kehidupan sosial adalah budayawan sedangkan yang lain, yang mayoritas, tak lebih daripada pemeluk budaya saja.. Tetapi sudahlah, bukankah ini hanya pengandaian saja?

Seandainya kita memahami kebudayaan dengan memakaikan teori nilai, seperti yang diperkenalkan Spranger, yang sering dikutib oleh Sutan Takdir Alisyahbana, kita juga tergelincir pada hal yang sama— semua aspek kehidupan manusia adalah pantulan dari nilai kebudayaan. Dengan memakaikan teori nilai dari Spranger ini maka secara teoretis bisa dikatakan bahwa bentuk dari suatu kebudayaan ditentukan oleh corak konfigurasi dari nilai-nilai utama, seperti nilai kekuasaan, nilai estetika, nilai rasionalitas, dan sebagainya.

Konfigurasi dari nilai-nilai terkuat akan menentukan corak kebudayaan. Dengan pendekatan inilah, umpamanya, Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa konfigurasi nilai dominan yang membentuk masyarakat Indonesia terdiri atas nilai kekuasaan dan estetika dan sedangkan nilai-nilai lain tidak mempunyai kedudukan yang begitu kuat. Karena itulah ia, sebagai seorang pejuang kebudayaan, berusaha mengubah corak konfigurasi seperti yang digambarkannya itu. Ia ingin membawa Indonesia ke dunia modern yang dikuasai oleh konfigurasi nilai ekonomi dan rasionalitas/ ilmu pengetahuan yang kuat. Sepintas lalu bisa juga dikatakan bahwa dalam soal konsistensi dalam pemikiran hanyalah Sukarno yang akan bisa menyaingi Sutan Takdir Alisyahbana. Apapaun yang terjadi di sekitar dirinya dan terhadap dirinya keduanya tetap mereka yang lama, ketika mereka mulai merumuskan pemikiran mereka. Tetapi memang kedua mereka memikirkan hal yang berbeda-beda, mempunyai pendekatan yang berlainan dan visi sejarah yang tidak pula sama.

Pendekatan akademis terhadap kebudayaan sebagai sesuatu yang serba-menyeluruh ini mempunyai jasa etnografis yang sangat besar. Dengan pemahaman ini segala hal mengenai kehidupan suatu masyarakat akan bisa diketahui secara memadai. Tanpa sumbangan pemahaman kebudayaan yang etnografis ini barangkali kehidupan masyarakat-masyarakat etnis tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari *the body of knowledge* tentang negeri kita ini. Hanya saja kecenderungan akademis masa kini cenderung meninggalkan pemahaman yang serba menyeluruh ini. Bukan karena salah, tetapi pendekatan ini dianggap kurang strategis dalam usaha untuk memahami dinamika dan struktur masyarakat. Apapun mungkin definisi dan pengertian yang diberikan terhadap kebudayaan atau *culture*, kecenderungan yang paling umum ialah membatasi pengertiannya secara strategis. Kebudayaan pun diperlakukan sebagai salah satu dimensi dari kehidupan sosial saja, meskipun, umum juga dianggap, sebagai aspek kehidupan yang bisa mengadakan penetrasi jauh ke dalam aspek-aspek lain.

Salah satu pendekatan yang secara konseptual memisahkan kebudayaan dari aspek kehidupan sosial yang lain ialah memahaminya sebagai jaringan sistem makna, *system of meaning*. Dengan bertolak dari pemahaman ini maka kitapun

berhadapan dengan dunia simbol—semua unsur bisa berbicara tentang dirinya dan sekali gus "mengatakan sesuatu tentang sesuatu" yang melampaui dirinya. Tarian bukanlah hanya masalah tangan, kaki dan bahkan mungkin seluruh anggota tubuh yang digerak-gerakkan, tetapi mengatakan sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar gerak yang enak dilihat dan yang estetik itu. Meja bukanlah hanya meja yang bisa dipakai untuk meletakkan buku dan bend-benda lain, tetapi sekali gus adalah pula sebuah pelambang yang mengatakan corak kesadaran fungsional dan estetis dari masyarakat yang menghasilkannya.. Bukankah tidak semua masyarakat mengenal meja dan bukankah pula kehadirannya bermula dari zaman tertentu pula? Dengan begini pula kita, umpamanya, bisa juga mempelajari arsitektur Minangkabau. Tanpa disengaja, barangkali, kita bisa terbawa bukan saja pada aspek-aspek teknologis pertukangan, tetapi tentang makna *gonjong*, yang seperti tanduk kerbau, ukiran, dan sebagainya. Dengan begitu saja kita telah memasuki "dunia kebudayaan" tradisional Minangkabau yang hampir-hampir menyeluruh— mulai dari sistem kekerabatan sampai ekonomi dan politik, dan sebagainya.

Kalau telah begini halnya maka bisalah dipahami jika kebudayaan, apapun mungkin aspeknya, bukanlah hanya objek yang bisa dipelajari, dinikmati, dilihat dan sebagainya. Kebudayaan bisa juga dipakai sebagai alat untuk memahami berbagai corak perilaku sosial dan pribadi dalam menjalani berbagai aspek kehidupan. Perilaku ekonomi, umpamanya, tidak hanya bisa dipelajari pada tindak tanduk pelakunya, tetapi juga dari sudut pemahaman sang pelaku tentang perilakunya itu. Bagaimanakah sang pelaku memberi makna terhadap perilakunya itu? Mengapakah sang pelaku terus bekerja dan menambah penghasilan pada hal apa yang telah dipunyai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya? Apakah makna kerja? Apakah kekayaan memberi sesuatu yang lebih dari sekadar harta yang lebih dari kebutuhan? Atau, jika dibalik, sistem makna seperti apakah yang menyebabkan sang pelaku membuat pilihan perilaku seperti yang dijalankannya itu? Dengan pendekatan yang begini kita bisa berharap untuk memahami pandangan sang pelaku terhadap struktur sosial -ekonomi yang menjadi wadah dari tindakannya. Tidaklah pula aneh kalau peneliti yang melakukan pendekatan ini sanggup juga memperkirakan

perkembangan selanjutnya dari masyarakat yang ditelitinya. Kalau demikian halnya dengan pendekatan terhadap perilaku ekonomi—suatu pendekatan yang sangat populer dalam teori "modernisasi"—maka demikian pulalah halnya dengan politik. Dengan memakaikan pendekatan kebudayaan sang peneliti ingin memahami perilaku politik dan memperkirakan kecenderungan politik selanjutnya.

Pendekatan kebudayaan, *cultural approach,* terhadap politik berawal dari kegelisahan akademis akan keterbatasan ilmu politik dan sejarah dalam memberikan penjelasan "mengapa begitu harus *begitu*, bukannya *begini*" dalam perilaku politik dan bahkan juga sistem politik. Perilaku politik itu kadang-kadang tampak seakan-akan tidak memantulkan logika politik, ketika struktur dan perilaku memperlihatkan kesejajaran yang rasional. Perilaku politik yang diamati secara empirik itu terasa seperti telah menyalahi asumsi-asumsi teoretis tentang dinamika politik yang rasional. Bukankah semestinya, secara teoretis, tindakan politik "ini" yang harus dibuat, tetapi mengapa yang "itu" yang dilaksanakan? Bagaimanakah hal ini bisa diterangkan kalau hal-hal yang empirik telah gagal menjelaskannya? Apakah ada sistem rasionalitas tertentu dalam kehidupan politik sehingga bisa membedakannya dengan kehidupan ekonomi, misalnya? Jika masalah ini dikenakan pada kasus Indonesia kita pun berkenalan dengan berbagai konsep kultural yang telah pernah dilakukan. Dalam konteks usaha untuk menjelaskan berbagai kecenderungan politik inilah, umpamanya, Clifford Geertz memperkenalkan konsep "aliran" (perbedaan orientasi kultural dalam komunitas lokal—*cultural cleavages*— yang tersalur ke dalam perbedaan orientasi politik) atau pandangan Ben Anderson tentang "*Javanese concept of power*, yang katanya berbeda jauh dengan pemahaman Barat.. Dengan pendekatan kebudayaan pula Herb Feith membuat dua konstruksi kebudayaan politik yang terlibat dalam persaingan politik di tahun 1950-an, "*Islamic entrepreneurial*" dan "*Javanese aristocratic*" *political culture*, pada hal ia sebenarnya bertolak dari pendekatan sejarah kontemporer dan ilmu politik. Dengan mudah tentu bisa diketahui juga bahwa Feith, seperti juga halnya dengan Geertz, memakaikan pendekatan *ideal type*, yang diperkenalkan Max Weber, dalam konstruksinya ini. Realitas yang kompleks itu dibagi atas prototype yang dibuat dalam bentuknya yang paling ekstrim.

Dalam *ideal type* tidak ada tempat bagi sifat yang kabur-kabur atau yang disebut *borderline cases*. Tidaklah terlalu sukar untuk menebak bahwa konstruksi kebudaaan politik yang diperkenalkan Feith ini sangat dipengaruhi oleh hasil Pemilu 1955 ,ketika PNI, NU, PKI tampil sebagai tiga besar di wilayah etnis Jawa, sedangkan Masyumi praktis "menguasai" hampir seluruh daerah luar Jawa Tengah dan Timur. Partai Islam "modernis" ini tampil sebagai pemenang di 12 dari 15 daerah pemilihan. Dalam memahami makna hasil Pemilu ini Feith tampak-tampaknya telah mendapat keuntungan dari studi van Leur, yang juga dipengaruhi Max Weber. Van Leur membedakan secara *ideal type* kerajaan agraris, yang "sinkretis" dan maritim, yang "Islam". Tetapi sayangnya Feith tidak melanjutkan kisah dua "kebudayaan politik" sampai pada kesimpulan akhir, karena di tengah jalan ia telah menemukan konsep sosiologis untuk menerangkan perilaku para "elite politik" Indonesia di tahun 1950-an itu. Dari konstruksi sosiologis ini iapun mengatakan tentang adanya dua kelompok pemimpin politik—lagi-lagi dengan pendekatan *ideal type*— yaitu *administrators/ problem solvers* dan *solidarity makers*. Dengan dikotomi ini terasa juga bahwa Feith secara tidak langsung ingin mengajak kita untuk menyesali mengapa golongan yang kedua yang akhirnya tampil sebagai pemenang. Tetapi jika analisanya tepat, maka secara sentimental kita mungkin lebih menyesalkan mengapa keduanya tak bisa bersatu selama-lamanya. Soalnya ialah prototype dari *problem solvers* adalah Bung Hatta, sedangkan *solidarity maker* kelas wahid adalah Bung Karno.

Maka ketika Demokrasi Terpimpin berdiri dan mengakhiri periode Demokrasi Parlementer, apakah sesungguhnya yang terjadi? Dengan memakaikan pendekatan kebudayaan ini maka kesimpulannya sudah jelas. Kebudayaan politik " aristokratis Jawa" telah tampil sebagai pemenang. "Aliran" dari *cleavage*, "priyayi" dan"abangan" (kedua konsep ini, di samping "santri", diperkenalkan oleh Geertz juga) telah semakin dominan. (Bukankah Masyumi dibubarkan dan N.U. dijinakkkan dalama "Nasakom"?). Kalau telah begini keadaannya tentulah pemahaman politik Indonesia sebaiknya bertolak dari "konsep Jawa tentang kekuasaan", sebagaimana yang diperkenalkan Ben Anderson. Maka kekuasaan itu harus dianggap sesuatu yang utuh, yang tak bisa dibagi-bagi, sebab ia datang seiring dengan

kejatuhan *wahyu cakraningrat*, hanya yang terpilih yang bisa berkuasa. Kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, katanya, bersifat, " *intangible, mysterious, and devine energy which animates universe*". Dan jika berada di tangan seseorang, maka kekuasaan itu mutlak.

Kredibilitas dari pendekatan ini bisa saja dipertinggi kalau saja zaman kolonial secara konseptual tidak diperlakukan sebagai bagian dari kontinuitas sejarah, tetapi sebagai *penyimpangan* sejarah. Munculnya Demokrasi Terpimpin, seperti kata Benda, bisa dianggap sebagai kembalinya Indonesia (maksudnya "Jawa") pada jalur sejarahnya yang otentik. Kalau memang demikian halnya, mestikah diherankan kalau para ilmuwan asing yang memakaikan pendekatan kultural mengatakan bahwa Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin adalah "Neo-Mataram"? Dan sistem demokrasi terpimpin pun tak lebih daripada nama yang diberikan kepada sistem kenegaraan yang sesungguhnya bercorak patrimonial. Apapun yang mau dikatakan tentang patrimonialisme, yang bertolak dari hegemoni penguasa yang dominan, yang pasti sistem ini sama sekali jauh dari konsep "kedaulatan rakyat". Hal ini tidak berubah ketika Orde Baru telah lahir, bahkan sifat ke-Mataram-annya pun dianggap semakin kental. Begitulah dalam analisa dengan pendekatan kebudayaan ini Indonesia telah tergelincir pada proses pen-Jawa-an. Bukankah Jawa yang selalu dianggap sebagai *inner-Indonesia* sedangkan yang lain hanyalah *the Outer-Islands?*

Kredibilitas dari pendekatan kebudayaan terhadap politik tentu bisa diperdebatkan. Perbedaan pendekatan, bahkan perdebatan, dalam usaha untuk menggambarkan dan menerangkan gejala dan peristiwa sosial-politik dan sebagainya adalah hal yang lumrah. Sebagai sasaran penelitian dan pengamatan, masyarakat selalu merupakan subjek wacana, *discourse*, yang tanpa henti. Dalam hal inipun bisa terjadi persaingan dalam penguasaan wacana. Bukankah penguasaan wacana dapat diartikan sebagai pengakuan akan keabsyahan dari "kebenaran" yang diungkapkan? Masalah ini akan terus berlanjut—sewaktu-waktu wacana yang telah memegang hegemoni pun akan menghadapi gugatan, yang kadang-kadang bahkan menggerogoti nilai keabsyahannya. Masalah yang berat barulah muncul kalau pendekatan kebudayaan tidak hanya dipakai untuk

menerangkan dan memahami masyarakat lain, yang asing, dan tak ada kaitan l;angsung dengan kita, sesuatu objek yang boleh dikatakan "*out there*", tetapi pada diri, masyarakat, atau negara sendiri. Kalau hal ini yang terjadi maka sistem kenegaraan dan perilaku politik tentu saja secara eksplisit dianggap dan bahkan diperlakukan sebagai pantulan dari kebudayaan sendiri. Hanya dengan melakukan pendekatan kebudayaan terhadap negara nasional, yang telah dibayangkan sebagai negara modern, kita dengan mudah dapat tergelincir pada sikap akademis yang ahistoris atau bahkan anti-sejarah. Maka pengingkaran terhadap keabsyahan kebenaran yang dipancarkan oleh pengalaman masa lalu pun tak terelakkan. Dengan begini kitapun tergelincir ke dalam sikap determinisme kultural yang meninabobokkan—semuanya bisa diterangkan dengan satu ungkapan, " Memang begitulah kebudayaan kita". Bukankah semua "*sudah dari sononya begitu?*" Masalahnya selesai dan sempurna pulalah penipuan terhadap diri sendiri.

Wacana yang melihat dan memahami negara dari perspektif kultural inilah yang membawa kita untuk berkenalan dengan semboyan-semboyan seperti "persatuan dan kesatuan", " warisan nenek moyang kita yang luhur", dan tentu saja " kepribadian nasional" dan "jati diri bangsa", dan sebagainya. Berdasarkan semboyan yang sesungguhnya ahistoris ini pulalah sistem dan perilaku politik negara dijalankan. Maka dalam proses pemikiran selanjutnya kitapun telah menyamaratakan atau, lebih tepat, memberi makna yang sama terhadap konsep-konsep "bangsa", "masyarakat", dan "negara". Maka begitulah, bukan saja keragaman sejarah dan kebudayaan ditiadakan secara konseptual, kitapun membenarkan dengan begitu saja sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan pemaksaan keseragaman tatanan sosial. Akhirnya kitapun terbawa pada pemberian dukungan bagi kelahiran sebuah negara yang serakah, yang menguasainya semuanya. Tanpa disadari kitapun telah mengingkari landasan idiil dari kelahiran negara ini. Beginilah halnya yang tumbuh sejak lahirnya Demokrasi Terpimpin dan semakin canggih keadaannya setelah kekuasaan Orde Baru semakin kokoh. Jadi mestikah diherankan kalau sekarang sisa-sisa dari kecenderungan itu masih berlanjut?

Secara formal kelahiran Demokrasi Terpimpin didorong oleh

keinginan untuk menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, tetapi secara ideologis kehadiran regim ini didukung oleh argumen akan keharusan Indonesia untuk mendapatkan kembali élan revolusi yang telah hilang dan mewujudkan "kepribadian nasional" dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan Orde Baru, yang lahir dari tumpukan tragedi nasional yang sangat dahsyat, tidak ingin melanjutkan tradisi konflik yang dipantulkan oleh semangat revolusi yang dihidup-hidupkan oleh Demokrasi Terpimpin. Orde Baru menjadikan "pembangunan nasional" sebagai landasan legitimasi, tetapi dalam helaan nafas yang sama menekankan kembali ide yang sama, meskipun memakai istilah yang berbeda, "jati diri bangsa". Apakah makna dari "kepribadian nasional" dan "jati diri bangsa" itu ? Apakah ini yang merupakan "warisan nenek moyang yang luhur" ? Mungkin, tetapi nenek moyang yang mana?

Dengan dua-tiga slogan ideologis yang diwujudkan dalam serentetan keputusan politik kedua regim itu telah meniadakan kenyataan sejarah yang sederhana bahwa "Indonesia", sebagai kesatuan sosial dan politik adalah hasil renungan dan pemikiran yang diperjuangkan, bukan sesuatu yang diwarisi dari nenek moyang. Bagaimanakah "bangsa-bangsa" tradisional yang berada di wilayah kepulauan Indonesia, yang dulu dalam peta dunia disebut "Hindia Timur", bisa menemukan harkat diri mereka yang sesungguhnya dalam berhadapan dengan hegemoni kolonial? Dengan dua-tiga slogan politik terhapuslah dalam kenyataan politik, jika bukan dan, memang tak pernah, dalam wacana, bahwa terciptanya suatu suasana alternatif yang mengatasi kesatuan-kesatuan bangsa tradisional itu bukan saja sesungguhnya kemenangan dari suatu visi yang diperjuangkan tetapi juga harkat diri dalam melawan sistem hegemoni kolonial dan, konon juga, feodal.

Bisa saja kedua regim ini tampil dengan gaya yang sangat berbeda-beda— yang satu lebih sibuk dengan usaha menegakkan harga diri bangsa, sedangkan yang lain berusaha mengejar ketertinggalan dalam ekonomi—dan bahkan mempunyai paradigma politik yang sangat berlainan—yang satu bertolak dari paradigma konflik, sedangkan yang lain memakai paradigma konsensus—tetapi keduanya memahami dan memperlakukan negara dari sudut kebudayaan. Negara tidak saja

dilihat sebagai kesatuan dan organisasi politik yang diatur menurut ketentuan hukum yang bersifat imperatif tetapi juga sebagai kesatuan nilai-nilai yang normatif dan relatif. Maka begitulah jika pada tahap pertama negara tidak lebih dari pada kelanjutan saja dari bangsa —jadi sebagai sebuah prinsip, yang dibimbing oleh (dengan memakaikan pendekatan Renan, yang dikutib Bung Karno dan tokoh pergerakan kebangsaan yang lain) *'le desir de vivre ensemble"* yang membedakan diri yang lain— sedangkan pada tahap selanjutnya pengertian masyarakat – sebagai dunia nilai dan norma— dengan begitu saja dilebur ke dalam negara. Jadi, di satu pihak, negara adalah negara, yang merupakan kesatuan politik yang diatur oleh hukum dan undang-undang, tetapi di pihak lain, negara adalah pula kelanjutan bangsa, sebagai kesatuan nilai dalam berhadapan dengan bangsa lain, dan sekali gus adalah pula masyarakat, dunia nilai dan norma normatif.

Maka apakah yang kita temukan? Dengan sifatnya yang dualistik ini negara pun dengan sekehendak hatinya bisa mengendalikan bangsa dan masyarakat. Dengan semboyan *the rediscovery of our revolution* negara pun menentukan bahwa tugas bangsa adalah untuk "menghancurkan", "membangun", "me-retool", *herordening* maka dalam prosesnya negara menjalankan *Umwertung aller Werte"*- atau bahasa Inggris *Revaluation of all values"*, sebagaimana ucapan Nietszche yang terkenal menyebutkannya. Dalam suasana ini kitapun dibuai oleh gaya bahasa yang bersifat hiperbol yang tak pula jarang dihiasi oleh *violent words*. Sedangkan dalam realitas politik pun kita terlibat dalam politik "konfrontasi". Rakyatpun dipompa dengan semangat pantang menyerah.*No retreat* dan *Ever onward* adalah dua ungkapan Inggris yang selalu di ulang-ulang, mulai dari lapangan olah raga sampai politik luar negeri yang konfrontatif. Apalah artinya terpencil dalam pergaulan internasional kalau kita masih dianggap sebagai "bangsa tempe". Dalam suasana inilah akhirnya tragedi besar, yang sampai kini masih menghantui rasa kemanusiaan, terjadi. Dan kitapun masih hidup di bawah bayangan dendam sejarah yang entah kapan akan membuyar.

Pelajaran penting pun tampaknya telah didapatkan. Suasana serba-konflik memberi kemungkinan bagi terjadinya situasi dan peristiwa yang sangat mengerikan. "Revolusi yang dibayangkan"

akhirnya bukan hanya memakan "anak-anaknya" tetapi bahkan juga menjadikan penciptanya sendiri sebagai mangsa. Maka Orde Baru pun berdiri. Setelah sebentar mengalami secercah kehangatan dalam kehidupan demokratis, masa kelabu yang panjang dalam suasana otoriter pun harus kita dijalani. Kembali negara menjadikan dirinya sebagai personifikasi bangsa dan meniadakan peranan masyarakat. Orde Baru pun mengajarkan bahwa revolusi, yang menjungkar balikkan nilai, adalah kesalahan yang akhirnya akan membawa malapetaka. Kata "revolusi" pun hilang dari peredaran wacana politik dan "pembangunan" menjadi slogan yang utama. Tetapi tak kurang pentingnya ialah keyakinan bahwa perbedaan internal—terlepas daripada semboyan ***bhinneka tunggal ika***—adalah sebuah kutuk yang harus ditiadakan. Kata "ideologi" pun ditinggalkan dan harus diganti dengan "program". Demikianlah jadinya, jumlah partai pun disederhanakan menjadi dua saja, sedangkan Golkar, meskipun partai, tetapi tidak boleh disebut partai. Dan kemudian siapapun tentu ingat juga "asas tunggal" pun diharuskan. Semua organisasi sosial, entah yang sejak semula bergerak dalam politik, ataukah, pendidikan, agama, olahraga, atau apa saja, harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Kitapun jadinya bertanya-tanya dalam hati tentang siapakah yang menjadi penentu tentang ke-pancasila-an itu? Apakah yang sesungguhnya yang diinginkan negara? Rupanya pengalaman yang didapatkan dari suasana *Umwertung aller Werte* telah meyakinkan penguasa Orde Baru bahwa perbedaan dan ketidakstabilan nilai dengan mudah bisa menyebabkan terjadinya krisis yang berlanjut. Karena itulah proses *the revaluation of all values* harus dihentikan, tetapi tidak dihentikan sebagaimana Bung Hatta pernah menganjurkan agar pada waktunya "revolusi harus dibendung". Lebih daripada itu, Orde Baru memperlakukan perbedaan sebagai kutukan yang harus dihindari. Kita pun dibawa ke dalam suasana serba-konsensus yang berada di bawah sebuah sistem hegemoni, dengan bimbingan hasrat akan terwujudnya "penyeragaman nilai" atau *the homogenization of all values*". Dalam suasana ini segala perbedaan atau yang disebut SARA haruslah dianggap sebagai *deviation*, penyimpangan, bukannya realitas sosial-ekonomis yang harus dikelola secara bijaksana dan arif. Konon Indonesia adalah tanah pusaka kita semua, maka mestikah diherankan

kalau mobilitas geografis, entah lewat transmigrasi ataupun bukan, adalah kewajaran yang biasa saja, bukannya sesuatu yang harus diperlakukan berdasarkan suatu strategi sosial yang diperhitungkan dengan bijaksana. Tetapi apakah yang terjadi, ketika pemerintah yang kuat itu goyah dan negara serakah mengalami krisis? Tiba-tiba kita dipaksa untuk menyadari bahwa keragaman tak bisa hanya dikaburkan sebagai "persatuan dan kesatuan" dengan begitu saja. Kitapun dipaksa juga menyadari bahwa ada perbedaan antara pendatang dan penduduk setempat yang harus diselesaikan, bukan dengan simbol politik, tetapi dengan kebijaksanaan sosial. Alangkah pahit terasa ketika kejatuhan Suharto serta merta memperlihatkan betapa parahnya luka yang telah menimpa kehidupan bangsa dan betapa goyahnya otoritas pemerintahan serta betapa kerasnya ancaman kekuatan disintegratif terhadap eksistensi negara.

Meskipun berbeda tekanan kebijaksanaan politik dan, terutama, dalam tingkat keberhasilan, pada hal yang paling fundamental Orde Baru bia dianggap sebagai anak yang syah dari Demokrasi Terpimpin. Para penguasa dari kedua regim ini bukan saja mempunyai hak untuk memerintah, tetapi juga menempatkan diri mereka sebagai pemikir dan penghasil pemikiran. Keduanya adalah negara serakah yang ingin menguasai semuanya— politik, ekonomi, sistem sosial, ingatan kolektif bangsa, dan tak kurang pentingnya, kesadaran pribadi.Dalam suasana pemikiran seperti inilah Demokrasi Terpimpin mengadakan indoktrinasi tentang Manipol-USDEK dan suasana seperti inilah pulalah yang menyebabkan Orde Baru mengharuskan para pejabat, pegawai, pelajar , mahasiswa, dan golongan masyarakat lain untuk mengikuti kursus P-4. Bahkan sebuah badan resmi yang mempunyai cabang sampai ke daerah tingkat II pun didirikan untuk mengurus P-4 ini.

Apapun mungkin keterangannya— entah efisiensi militer, entah politik anti-konflik. ataupun mungkin juga keberhasilan dalam mempertahankan masa pemerintahan yang jauh lebih panjang—barangkali tidak perlu lagi dibuktikan bahwa Orde Baru lebih berhasil dari Demokrasi Terpimpin, jika saja keberhasilan harus diukur berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing regim itu. Terlepas pula dari segala penilaian moral dan ideologis yang akan diberikan, tidak pula bisa dibantah bahwa Orde Baru telah berhasil mengubah geografi Indonesia.

Pertumbuhan kota, kelancaran sistem perhubungan dan komunikasi, dan sebagainya telah menyebabkan Indonesia dan sebagainya telah menyebabkan Indonesia secara fisik mengalami perubahan yang penting. Meskipun demikian tinjauan sejarah yang lebih jauh bisa juga mengatakan bahwa periode sejak 5 Juli, 1959, ketika Dekrit Presiden dikeluarkan untuk kembali ke UUD 1945, sampai dengan tanggal 21 Mei, 1998 , ketika Presiden Soeharto melakukan *lengser keprabon*, merupakan sebuah fase panjang yang berbeda dari fase-fase yang lain. Dalam periode sejarah yang panjang inilah bangsa dan negara kita mengalami hal-hal cukup fundamental. Pertama, proses ke arah sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan terjadi. Presiden bukan saja pemegang puncak kekuasaan tetapi juga sekali gus adalah pemikir -utama. Ia mungkin bukan "filosof-penguasa", sebagaimana yang pernah dibayangkan oleh Plato, sekian ratus tahun sebelum Masehi, sebagai penguasa yang ideal, tetapi penguasa yang menampilkan diri sebagai filosof / pemikir dalam sistem kekuasaan yang dipelihara dan dijaga rapi. Dari sang Presidenlah gagasan tentang hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan datang dan diharapkan. Sebagai "mandataris MPR", Presiden menentukan kebijaksanaan kenegaraan dan ia pula yang meletakkan landasan pemikiran tentang kenegaraan. Dalam menjalankan peranannya sebagai "sumber inspirasi bangsa", Sukarno mungkin terlalu terpukau dengan gelar-gelar kebesaran, sedangkan Soeharto lebih suka bermain di belakang layar, tetapi segala corak ofensif ideologis berasal dari Presiden sebaga "lembaga tertinggi" pemikir. Otobiografi kedua kepala negara ini dengan sangat jelas memperlihatkan *claim* penguasa dan pemikir ini.

Kedua, negara yang berwajah ganda— sebagai sebuah sistem kekuasaan dan sebagai wilayah nilai dan norma— semakin lama semakin kuat, sedangkan masyarakat semakin tak berdaya. Dalam perjalanan waktu ketergantungan masyarakat kepada negara semakin kuat. Usaha alternatif untuk mengatasi kemesotan ini dengan membentuk LSM, sebagai unsur *civil society*, yang tumbuh pesat di masa Orde Baru, segera pula mengalami hambatan, kaena negara segera pula mengadakan usaha ko-optasi. Baik dengan gaya ko-optasi ataupun pemaksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku keharusan azas tunggal yang diperlakukan kemungkinan

terjadinya birokratisasi kepemimpinan pun tak pula terelakkan. Pergerakan wanita adalah salah satu contoh yang jelas. Dengan ko-optasi ini maka Dharma Wanita , yang terkait dengan Korpri, menjadi organisasi yang dominan.

Ketiga, ketika semboyan "persatuan dan kesatuan" diwujudkan dalam realitas politik maka yang terjadi bukan saja sentralisasi administrasi pemerintah yang semakin kuat, tetapi juga uniformitas sistem pemerintahan desa dari Sabang sampai Merauke. Bahwa pemaksaan uniformitas ini berarti mengingkari keragaman komunitas-komunitas etnis, bahkan juga UUD 1945, yang antara lain menegaskan dalam penjelasannya bahwa sistem masyarakat lama, seperti "marga" di Sumatra Selatan dan "nagari" di Minangkabau akan dipertahankan, tidak perlu jadi perhatian. Sebab yang penting rupanya uniformitas dianggap bisa mempermudah urusan pemerintahan. Indonesia yang pernah disebut para wartawan asing sebagai "syorga para antropolog, tetapi impian buruk bagi para administrator" dengan sebuah undang-undang infin diubah menjadi Indonesia yang merupakan "syorga bagi para administrator", tetapi pasti menjadi " sebuah kebosanan bagi antropolog". Tetapi lebih parah lagi uniformitas ini berarti tak kurang daripada kehancuran komunitas desa yang organic.

Apakah yang terjadi kalau seandainya negara yang telah semakin kuat itu tiba-tiba mengalami krisis? Maka kitapun dengan mudah bisa melihat betapa masyarakat telah kehilangan *self-defense mechanism*-nya. Masyarakat tak berdaya lagi mengatasi masalah yang muncul yang bisa mengancam keberadaan dirinya. Kemampuannya telah menipis, karena tatanan sosial mereka yang organik telah dihisap oleh negera yang ingin mewujudkan sebuah bangsa dan masyarakat yang bersifat uniform, yang merupakan kesatuan. Selagi negara masih kuat dan belum mengalami krisis wibawa, mungkin semua masalah masih bisa diatasi oleh negara yang berwajah ganda itu, tetapi ketika negara sedang mengalami krisis wibawa, sedangkan masyarakat telah kehilangan daya, maka konflik yang beranjang-panjng pun tak terelakkan.

Tujuan utama dari P-4 tidaklah mendidik "warga negara yang baik", tetapi, sebagaimana yang dirumuskan secara resmi, ialah menciptakan " manusia Indonesia seutuhnya". Dalam kaitan itulah para peserta P-4 diajarkan agar mereka mentaati dan

menjalankan 36 butir budi luhur dan perilaku "manusia Pancasila". Sedemikian luhur kesemua budi pekerti yang diajarkan itu sehingga tidaklah terlalu sukar untuk menduga bahwa "manusia Indonesia seutuhnya" itu hanya sedikit saja kurang dari Nabi. Tetapi terlepas dari pemahaman etika yang tidak realistis ini konsep "manusia seutuhnya" bertolak dari pengakuan akademis dan keyakinan filosofis bahwa kesadaran manusia adalah sumber perilaku, bukan hasilnya. Dengan pemahaman ini maka persetankanlah analisa Freud tentang peranan "ketidaksadaran" dalam penentuan pilihan perilaku dan biarkan sajalah Karl Marx yang membalikkannya—"bukan kesadaran yang membentuk eksistensi manusia", tetapi sebaliknya.

Kecenderungan Hegelian dalam pemikiran Orde Baru adalah sikap yang sah saja, seperti juga keabsyahan akademis dan filosofis yang bisa diberikan kepada Freud dan Karl Marx. Bukankah masalah kesadaran dan ketidaksadaran dalam perilaku dan masalah kesadaran dan eksistensi adalah problem yang tak habis-habis diperdebatkan. Tetapi lebih daripada itu konsep "manusia seutuhnya" juga memperlihatkan kecenderungan individualisme Cartesian, seakan-akan manusia berada dan terkurung dalam kesendiriannya. Bukankah yang "utuh" yang bisa hidup dalam kesendirian. Maka bayangkanlah bagaimana jadinya kalau "keutuhan manusia" itu adalah sesungguhnya hasil bentukan negara. Tetapi masalahnya belum selesai sampai di sini. Dalam otobiografi-nya Presiden Soeharto mengatakan bahwa manusia itu bersifat ganda—ia adalah dirinya, tetapi ia adalah pula bagan dari masyarakatnya. Pancasila pun harus dilihat sebagai bersifat ganda pula. Pancasila adalah landasan hidup "bernegara dan berbangsa", tetapi adalah pula, seperti katanya, pandangan hidup, *Weltanschauung*, sebagai "manusia Inonesia".

Dengan landasan pemikiran seperti ini tidaklah sulit untuk memahami adanya usaha negara yang konsisen untuk melakukan penetrasi ke dalam jaringan kehidupan sosial dan kesadaran pribadi. Dalam uasana pemikiran ini pulalah negara mengadakan interpelasi terhadap eksistensi individu—ia dijadikan sebagaimana negara ingin menentukannya. Apakah seseorang itu Pancasila-is atau bukan dan sebagainya adalah hasil dari penilaian negara. Pandangan seseorang bisa didengar atau dijadikan tak lebih daripada *asbun* (asal bunyi) atau bahkan

didiamkan dan dikenakan pidana sosial adalah urusana negara—setidaknya demikianlah halnya jika konsekwensi logis dari cara berfikir tentang "manusia utuh" gaya Orde Baru dilanjutkan. Negara yang berwajah ganda, yang di satu pihak, secara konstitusional mempunyai hukum yang bersifat imperatif dan pasti , tetapi di pihak lain, sebagai kenyataan kultural yang diwarisi, mempunyai nilai –nilai yang normatif dan relatif, bisa berbuat apa saja. Negara bisa merelatifkan kepastian hukum atau menjadikan nilai relatif sebagai keharusan imperatif yang harus berlaku.

Maka bisalah dipahami kalau kejatuhan Orde Baru bukan saja memperlihatkan betapa telah tidak berdayanya masyarakat menghadapi krisis yang menempa dirinya, tetapi juga betapa manusia yang secara konseptual telah diperlakukan sebagai atom-atom yang independen menemukan diri mereka berada dalam krisis saling percaya. Mestikah pula diherankan kalau sekarang kita juga melihat adanya kecenderungan yang aneh—rasa keadilan yang tergugah dengan begitu saja bisa dipakai sebagai pengingkaran kenyataan empirik, bukannya sekadar tekanan kenyataan itu. Mestikah pula diherankan kalau kebenaran semakin bersifat sektarian, tergantung pada golongan mana yang mempercayainya? Maka begaimanakah akan mengelakkan pertanyaan, bahan gugatan, "apakah reformasi berarti penisbian nilai setelah Orde Baru berusaha mengadakan homogenisasi nilai?"

Jika saja pendekatan kebudayaan terhadap negara hanyalah masalah pendekatan akademis, masalahnya selesai ketika verifikasi atas keabsyahannya telah dijalankan. Tetapi ketika pendekatan ini telah dijadikan sebagai acuan dalam penentuan sikap pada negara, bangsa dan masyarakat, kita bukan saja dengan mudah bisa tergelincir pada reifikasi—penyamaan konsep dengan realitas—tetapi juga pengingkaran sejarah yang empirik dan realitas yang sesungguhnya. Apakah akibatnya? Kejatuhan Sukarno berasal dari tragedi kemanusian yang maha dahsyat dan kejatuhan Soeharto segera diikuti oleh berbagai konflik vertikal dan horizontal yang tak habis-habisnya. Betapa mahal harga yang dibayar dengan pemahaman yang semula tak berdosa ini.

Voltaire, filosof Prancis yang sangat berpengaruh menjelang pecahnya revolusi Prancis, adalah "tukang ejek" kelas wahid.

Ejekannya bukan saja sangat bijak, tetapi juga sering sekali bersifat filosofis. Ia pernah berkata—lagi-lagi dengan nada ejekannya—" Satu-satunya yang bisa dipelajari dari sejarah ialah orang tidak pernah belajar dari sejarah". Mungkin ia benar juga, sebab bukankah sekian banyak terjadi kesalahanyang diulang-ulang? Tetapi mudah-mudahan masa depan kita terhindar dari ucapan Voltaire yang nakal ini Sebab jika ia benar, maka ini berarti kita akan kembali membiarkan diri terlarut dalam cengkeraman negara serakah *(greedy state)* yang mempertahankan kehadirannya dengan argumen kebudayaan. Kalau argumen ini telah dipakai kita akan kembali dipasung oleh ketiadaberdayaan intelektual/ Argumen kebudayaan pada dasarnya bersifat anti-wacana. Implisit dalam argumen ini tuduhan "pengkhianat" bagi siapa saja yang menyangsikannya. Karena itulah jika kita kembali tergelincirt pada rayuan definisi kebudayaan tentang negara, maka bersia-siaplah untuk menghela nafas panjang dan seraya mengelus dada berkata " kutuk abadi telah menghinggapi kehidupan bangsa". Kalau demikian halnya biarkanlah pula makam-makam pahlawan — makam dari mereka yang telah berkorban bagi sebuah cita-cita yang luhur—hanya menjadi tempat penampungan orang-orang yang digusur.

LAMPIRAN:

Tabel 1

CUPLIKAN POKOK BAHASAN YANG DIPERDEBATKAN DALAM KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1918 HINGGA 1991

NO.	NAMA/TEMA	POKOK BAHASAN	KONGRES KEBUD. TAHUN	KEGITAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5
1.	Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling	• Perlunya pelajaran sejarah. • Pengembangan kebudayaan Jawa • Penguasaan ilmu pengetahuan Barat	**1918, di Surakarta**	Pergelaran musik, tari Wireng, Wayang Womg (orang) dan mengunjungi Prambanan
2.	Congres van het Java-Instituut	• Pengajaran Sejarah Jawa, Sunda, Madura dan Bali • Pengajaran Kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali	**1919, di Surakarta**	Pergelaran tari dan Wayang kulit.
3.	Congres van het Java-Instituut	• Pendidikan seni musik dan Sejarah pada pendidikan Bumiputra. • Pelestarian dan Pengembangan seni musik • Perbandingan seni musik sekarang dengan masa lalu	**1921, di Bandung**	Pergelaran tari, musik Sunda, tonil Lutung Kasarung, dan Pameran seni ukir
4	Congres van het Java-Instituut	• Sejarah bangunan kuno di Jawa • Nilai yang terkandung dalam bangunan kuno untuk Kebudayaan Jawa masa kini dan akan datang? • Pelestarian dan Pemanfaatan bangunan kuno	**1924, di Yogyakarta**	Pergelaran tari Bedoyo, Wayang Wong, Wayang Ku-lit dan kunjungan ke candi Prambanan dan Kota Gede
5.	Congres van het Java-Instituut	• Musik Hindu-Jawa di Jawa Timur	**1926, di Surabaya**	Pergelaran Wayang

1	2	3	4	5
		• Sejarah dan manfaat bangunan Majapahit. • Seni musik Madura • Seni sastra Madura • Sejarah Madura • Kebudayaan daerah dalam pendidikan		Wong, tari Srimpi, Pasar Tahunan dengan pameran kerajinan, Lomba Perahu, dan kunjungan ke acara Karapan Sapi di Bangkalan dan situs Majapahit
6.	Congres van het Java-Instituut	• Pengajaran sastra, filsafat dan budaya Timur di Perguruan Tinggi • Perguruan Tinggi Sastra, Filsafat dan Budaya Timur • 10 Tahun Java-Instituut	**1929, di Surakarta**	Pergelaran Permainan Rakyat (anak-anak), Klenengan, Wayang Wong, mengunjungi Sriwedari dan Radya Pustaka
7.	Congres van het Java-Instituut	• Bangunan tua di Bali • Kehidupan keluarga masyarakat Bali • Kehidupan sosial masyarakat Bali • Seni kerajinan Bali	**1937, di Bali**	Pergelaran aneka tari , Gong Kebyar, pembacaan lontar, pameran kerajinan dan kunjungan ke pura Kehen, Gunung Kawi, ke Goa Gajah, Kintamani dll.
8.	Kongres Kebudayaan	• Kebudayaan dan pembangunan masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro. • Kebudayaan dan Hukum Masyarakat, oleh Prof. Mr. Djokosoetono. • Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarja Kolopaking. • Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh Prof. Ir. Poerbo-diningrat.	**1948, di Magelang, Jawa Tengah**	Diikuti dengan acara pergelaran musik 'GENTONO' dari Surakarta, Konsert Musik Kepolisian Negara, Tari Minang, Jawa, Bali, tari Nusantara, dan Pencak silat serta pameran kebudayaan dan seni kerajinan.

1	2	3	4	5
		• Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poer-bopranoto. • Kebudayaan dan Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantoro. • Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara, oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat dan Ki Mangoensoedarso. • Seni Suara dan Soal-soalnya, B. Sitompul • Kebudayaan dan Seni Sastra Baru, Anas Ma'ruf • Kebudayaan dan Seni Rupa Indonesia Baru, Basoeki Resobowo • Seni Sandiwara, Abu Hanifah • Mendirikan Akademi Kesenian, Sindoesoewarno • Pembentukan Lembaga Kebudayaan, Armijn Pane • Soal Kementerian Kebudayaan, Abu Hanifah		
9.	Kongres Kebudayaan	• Mengenai Hak Mengarang: - Hak Cipta, Anas Ma'ruf - Hak Pengarang dan Pencipta, Nasrun, AS • Mengenai Perkembangan Kesusasteraan: - Perkembangan Kesusasteraan Bangsa Indonesia, HAMKA - Jalan Perkembangan Sastra Indonesia, AS. Dharta • Mengenai Kritik Seni: - Kritik Seni, Mr. N. Nasrun	**1951, di Bandung**	Pergelaran Drama oleh Ratu Asia, musik Gentono, dan berbagai macam tarian serta pameran kebudayaan.

1	2	3	4	5
		• Mengenai Sensor Film: - Sensur Film dan Peristiwa Film, Rustam St. Palindih. - Sensur Film, Asrul Sani - Film dan Kesusilaan, JB. Moningka • Mengenai Organisasi Kebudayaan: - Organisasi Kebudayaan, Mr. Kuntjoro Purbopranoto - Organisasi Kebudayaan, oleh DE VLETTER - Organisasi Kebudayaan, Moh. Yamin - Organisasi Kebudayaan, Lim Ek Cheang		
10.	Kongres Kebudayaan	• Pendidikan Kebudayaan dalam Masyarakat Sekolah, S. Mangunsarkoro • Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat, Rivai Apin • Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Buruh dan Tani	**1954, di Surakarta**	
11.	Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini dan Esok	• Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, dengan 5 Topik: ○ Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya. ○ Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya ○ Pelestarian dan Pengembangan Kesenian serta Kerajinan Tradisional ○ Aturan-aturan Adat Berkenaan dengan Kekuasaan dan Pemilikan	**1991, di Jakarta**	Pokok bahasan ini dijabarkan ke dalam 19 judul makalah

1	2	3	4	5
		◦ Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa		
		• Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan		Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 25 judul makalah.
		◦ Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional		
		◦ Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional		
		◦ Kesusastraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional		
		◦ Media Massa dan Kebudayaan Nasional		
		◦ Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional		
		◦ Keterkaitan Antara Kebudayaan dan Pembangunan Nasional		
		• Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional		Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 17 judul makalah
		◦ Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional		
		◦ Peranan Seniman dalam Masyarakat		
		◦ Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dalam pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia		
		◦ Daya Cipta Budaya dan Media Massa		
		◦ Generasi Muda dan daya Cipta Budaya		
		◦ Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional		
		• Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat		Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 14 judul makalah
		◦ Kebudayaan dan Ekonomi		
		◦ Kebudayaan dan Ilmu dan Teknonologi		

1	2	3	4	5
		○ Kebudayaan dan Sosial, Politik dan Hukum ○ Kebudayaan dan Pertahanan dan Keamanan ○ Kebudayaan dan Wanita ○ Kebudayaan dan Olah Raga ○ Kebudayaan dan Lingkungan Alam • Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia) ○ Kebudayaan Asing dan Kebudayaan di Indonesia ○ Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri ○ Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia ○ Kerja sama Kebudayaan Antarnegara ○ Penerjemahan Karya-karya Asing di Indonesia.		Pokok Bahasan ini dijabarkan ke dalam 19 judul makalah

Tabel 2

DAFTAR RUMUSAN HASIL KONGRES KEBUDAYAAN 1918-1991 TENTANG KELEMBAGAAN DAN KEPANITIAAN

No.	RUMUSAN HASIL/ REKOMENDASI	KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perlu dibentuk Lembaga penelitian kebudayaan Jawa	1918	Berdiri Java-Instituut, tanggal 4 Agustus 1919	
2.	Perlu didirikan Sekolah Kerajinan	1929	Berdiri Sekolah Kerajinan Tangan (Kunst Ambaacht School) tahun 1939	
3.	Perlu didirikan Jurusan Sastra, Filsafat dan Budaya Timur	1929	Tahun 1940 dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten)[1]	
4.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1948	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, Konservatori	
5.	Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan sendiri	1948	Belum ada realisasinya	
6.	Perlu didirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)	1948	Berdiri tahun 1948	
7.	Perlu dibentuk Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN)	1951	Tahun 1951 berdiri BMKN, LKI ikut bergabung di dalam BMKN.	
8.	Perlu didirikan Balai Penterjemah	1951	Belum ada realisasinya	

[1] Majalah Arkeologi (Saraswati:Esai-esai Arkeologi), No. 9, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1990, hal. 3.

1	2	3	4	5
9.	Perlu didirikan Pendidikan Penterjemah	1951	Di Universitas Nasional Jakarta	
10.	Perlu didirikan Badan Penerbit Buku Kebudayaan	1951	Belum ada realisasinya	
11.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1951	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI.	
12.	Balai Pustaka sebagai Badan Otonom	1951	Th. 1963 menjadi Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, th. 1985 menjadi Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka	
13.	Perlu didirikan Balai Bahasa	1951	Tahun 1947 telah berdiri Balai Bahasa di Bali, 1952 di Yogyakarta dan 1953 di Makassar, kemudian disusul dengan Balai-balai yang lain	Dalam Kongres Bahasa Indonesia 1938 diusulkan Instituut Bahasa Indonesia
14.	Perlu didirikan Museum Kesenian	1951	Galeri Nasional, tahun 1998 dan banyak Museum Seni Rupa (Pribadi)	Di setiap Provinsi telah berdiri Museum Negeri Prov.
15.	Perlu dibentuk Badan Pengarah Film (di daerah-daerah)	1951		
16.	Perlu didirikan Kantor Urusan Film (di bawah Kementerian PP dan K)	1951	Tahun 1951 dibentuk Panitia Sensor Film berada di bawah Dep. PP dan K. Tahun 1964 pindah ke Dep. Penerangan.	
17.	Perlu dibentuk Badan Sensor Film	1951	Tahun 1965 Panitia Sensor Film berubah menjadi Badan Sensor Film	

1	2	3	4	5
			(BSF) dan tahun 1994 berubah lagi menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Tahun 1999 sekretariat LSF pindah ke Depdiknas, dan mulai 2001 di bawah BP BUDPAR.	
18.	Perlu didirikan Gedung-gedung Bioskop	1951	Pihak swasta telah membangun berbagai gedung bioskop di berbagai tempat	
19.	Perlu didirikan Balai Budaya/Gedung-gedung Kesenian	1954	Telah berdiri Taman Budaya di seluruh provinsi	
20.	Perlu dibentuk Panitia Sejarah Nasional	1954	Telah dibentuk Panitia Nasional dan menghasilkan Buku Sejarah Nasional Indonesia (7 jilid) dan sejumlah Kongres Sejarah.	
21.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Film	1954	Belum ada realisasinya	
22.	Perlu didirikan Biro Penterjemah	1954	Belum ada realisasinya	
23.	Perlu dibentuk Panitia Penyelidikan Buku-Buku lama tentang Filsafat	1954	Belum ada realisasinya	
24.	Perlu diselenggarakan Pekan Raya Kebudayaan	1954	Telah diselenggarakan berbagai festival, pameran, pergelaran berbagai macam seni, tingkat nasional dan internasional.	

1	2	3	4	5
25.	Perlu dibentuk Jawatan Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1954	Sebelum berlaku Otonomi Daerah di setiap Kabupaten/Kotam adia berdiri Seksi Kebudayaan dan di tingkat Kecamatan Penilik Kebudayaan.	
26.	Perlu didirikan Lembaga Film dan Perpustakaan Lektur Film	1954		
27.	Perlu dibentuk Panitia Sensor	1954	Dibentuk Badan Sensor Film, sekarang Lembaga Sensor Film	
28.	Perlu didirikan Dewan Pertimbangan Siaran Radio	1954		
29.	Perlu dibentuk Dewan pengawas Pemasukan Lektur dan Film	1954		
30.	Perlu didirikan Pendidikan Tinggi Kesenian	1954	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI	
31.	Perlu didirikan Konservatori Seni Daerah	1954	Telah berdiri di beberapa daerah (Surakarta, Medan, Padang Panjang, Bali)	
32.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Kota	1954	Belum ada realisasinya	
33.	Perlu didirikan Sanggar-sanggar, museum, gedung pertunjukan, balai budaya, Taman-taman Kebudayaan (untuk anak-anak dan rekreasi)	1954	Telah berdiri berbagai sanggar sampai ke desa-desa, telah berdiri museum, taman budaya dan tempat-tempat hiburan dan rekreasi	
34.	Perlu diselenggarakan Pekan Kesenian	1954	Telah diselenggarakan	

1	2	3	4	5
			berbagai macam pameran, pergelaran dan festival seni di berbagai tempat.	
35.	Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya	1991	Telah dirintis Website Kebudayaan	
36.	Perlu dibentuk Unit Misi Kebudayaan/ Pertukaran Budaya	1991	Belum direalisasikan.	
37.	Perlu didirikan Lembaga Penterjemah	1991	Dalam bentuk lembaga Pemerintah belum direalisasikan	Telah berdiri Himpunan Penerjemah Indonesia

BUDAYA DALAM OTONOMI DAERAH[1]

Oleh: **H.S. Dillon**
Sapta Dwikardana[2]

Mukadimah

Sebagai suatu peristiwa budaya, Kongres Kebudayaan V ini diharapkan bukan sekedar formalitas atau temu kangen sesama aktivitas budaya belaka. Dikala bangsa Indonesia tengah kehilangan "roh budaya", bangsa yang kehilangan tata dan tatanan etik, aestetik serta norma kehidupan yang bermartabat, setiap komponen budaya diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penyelamatan bangsa dari kehancuran dan bersama-sama merentang asa untuk menggapai **Indonesia Renaissance**.

Telah menjadi polemik di antara budayawan bahwa konsep kebudayaan nasional yang dimiliki tidak lagi dapat mengakomodasi perkembangan masyarakat Indonesia secara memadai. Penegasan bahwa budaya nasional kita dikonstruksikan dari puncak-puncak kebudayaan daerah telah mendapatkan tantangannya. Adanya pandangan lain yang menegaskan bahwa budaya nasional yang dikenal sebenarnya merupakan cerminan mozaik budaya-budaya daerah yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi ekologi dan interaksi antar- manusia.

Pada realitanya, khasanah budaya di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi bukan saja oleh intervensi kolonialisme dan akulturasi budaya, tetapi juga telah diberikan karakter baru oleh perkembangan radikal dari teknologi informasi dan komunikasi maupun transportasi, membentuk suatu masyarakat informasi dengan budaya virtual yang melintasi batas-batas budaya parochial, suatu bangsa dengan identitas budaya baru yang terbangun oleh dinamika jaringan trans-etnik. Menyadari realitas

---

[1] Disampaikan pada Kongres Kebudayaan V, Bukit Tinggi 20-23 Oktober 2003, Sumatera Barat

[2] H.S. Dillon, Direktur Eksekutif, dalam dialog setara dengan Sapta Dwikarna, Advisor Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahaan di Indonesia

ini, untuk dapat lebih adaptif terhadap perubahan global, sudah saatnya konsep "kebudayaan nasional" dan "konsep kebangsaan" mendapatkan perhatian dan perenungan kembali.

Rezim pemerintah yang sentralistis berupaya untuk menyeragamkan budaya dengan menggunakan budaya nasional sebagai bagian dari strategi pelestarian kekuasannya. Matra budaya telah dijadikan agenda dan alat politik untuk memperkuat kontrol pemerintah terhadap rakyat dan membantu upaya mengakomodasikan hasil ekstraksi sumberdaya alam.

Cara ini berhasil menekan rakyat selama beberapa waktu. Akan tetapi konflik di Aceh, Papua, Ambon, Poso dan daerah lainnya adalah bom waktu yang meledak akibat kekurangfahaman pemerintah terhadap nilai dan norma kebudayaan.

Mekanisme local yang sebelumnya mampu untuk menyelesaikan persoalan di daerah dibawa menjadi urusan pusat dengan menafikan peran norma dan Institusi setempat, Akibatnya, tatkala pusat terpaksa melonggarkan cengkramannya melalui otonomi daerah, ketidakpuasan dan keinginan untuk kembali kepada regionalisme semakin subur.

Berikut ini, secara sepintas, kita membahas potret perubahan politik dan pembaruan tata pemerintah, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, terhadap dinamika kebudayaan di Indonesia.

1. GELOMBANG DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Desentralisasi yang berkembang di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari langkah koreksi terhadap model politik lama –sentralisasi dan konsentrasi. Seperti halnya di berbagai negara Asia lainnya, kemunculan desentralisasi telah menjadi tema utama di negara-negara dengan budaya beragam seperti halnya Bangladesh, India, Filipina, Cina dan Srilanka.

Di Asia, proses devolusi politik dari pusat ke daerah tersebut seringkali terjadi bersamaan dengan proses re-demokratisasi nasional. Gerakan besar menuju devolusi politik ini didorong oleh keragaman etnis serta tuntutan yang tumbuh dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk mendapatkan otonomi politik yang lebih besar.

Di India, sebagai contoh, konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di pusat seringkali diungkapkan sebagai faktor yang memberikan kontribusi pada ketidak- tentraman di wilayah wilayah seperti Punjab, Kashmir dan Assam. Demikian halnya kekuatan yang tumbuh dari gerakan *Jharkand* di Bihar Selatan dapat ditelusuri merupakan sebagian dari penolakan pemerintah negara bagian untuk berbagi kekuasaan dengan penguasa lokal. Perkembangan yang menarik terjadi di India, dari suatu konsensus antar semua partai menyatakan bahwa negara bagian seharusnya diberi mandat untuk membentuk sistem *Panchayati Raj-* suatu sistem yang berfungsi mewakili suatu pengakuan atas kebutuhan pokok desentralisasi politik untuk mengatur tekanan dan kendala-kendala dari keragaman entis, wilayah, dan keagamaan India.

Gerakan Cina dalam arah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa melalui suatu sistem "demokrasi tingkat dasar" pantas mendapatkan perhatian khusus. Seperti halnya liberalisasi perekonomian Cina yang cepat dan resistensinya yang berkelanjutan terhadap demokrasi sistem politik satu partainya, para perancang *"Village Committee Organization Law"* tahun 1987 dan program-program selanjutnya bersama dewan desa yang terpilih secara demokratis merasakan reformasi ini merupakan respon terhadap permintaan arus bawah untuk kontrol yang yang lebih besar terhadap urusan desa. Singkatnya, desa-desa telah menikmati suatu derajat "ruang demokratis" yang sebelumnya tidak terdapat didalam sistem politik Cina.

2. DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Di Indonesia, kebijakan Otonomi Daerah merupakan momentum untuk koreksi atas pendekatan penafian kebudayan, serta sebagai suatu gerakan budayan untuk menegakan kembali harkat dan martabat komunitas. Otonomi memberikan peluang dalam aktualisasi kebudayaan daerah sebagai identitas diri komunitas. Dalam konteks ini, kebudayaan sebagai "*social capital*" menjadi perekat kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi landasan falsafah kenegaraan "Bhineka Tunggal Ika" Indonesia. Dalam aras tata pemerintah daerah, kebudayaan menjadi dasar bagi penumbuhkembangkan kebudayaan tata pemerintah yang baik.

Etnosentrisme versus Otonomi

Namun demikian, setelah lima tahun proses reformasi berjalan, pembangunan di bidang kebudayaan masih kurang mendapat perhatian, meskipun diakui bahwa kebudayaan seharusnya menjadi landasan dan kerangka pembangunan. Hal ini semakin menjadi relevan dikaitkan dengan penerapan UU 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana perwujudan kebudayaan nasional sebagai refleksi dari kebhinekaan akan menjadi tantangan bagi keutuhan nasional.

Otonomi Daerah secara legal-formal dirumuskan sebagai kesadaran bahwa Indonesia dibangun oleh lokalitas, dan ketika kesadaran diambil sebagai politik identitas maka akan memberikan makna positif bagi perkembangan budaya, dimana diciptakan ruang-ruang baru untuk proses kreatif dan mencipta. Pembangunan fisik dan sosial yang begitu pesat di KUTAI Kartanegara merupakan model pertama yang –dalam skala terbatas- telah menunjukan istana dan symbol ritual dayak dan melayu kepada kita semua bahwa otonomi daerah mampu mensinergikan budaya lokal dan kepentingan ekonomi masyarakat ke dalam kerangka pembangunan daerah.

Sebaliknya, ada kekhawatiran baru, persoalan yang timbul dalam otonomi ternyata menyangkut hak ekonomis dan nafkah daerah yang menjadikan persoalan ini direduksi pada politik identitas –yang ditandai dengan semangat "harus orang daerah" sambil mengabaikan profesionalisme. Di sisi lain. Otonomi daerah sering ditafsirkan oleh elit birokrasi daerah sebagai pembebasan untuk mengembangkan budaya baru selaras dengan globalisasi yang konsumtif melalui pembangunan proyek mercusuar yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan kondisi sosial kemasyarakatan. Hal ini tercermin dalam pembangunan kompleks wisata Pulau Kumala yang dimaksudkan sebagai *disneyland* Kalimantan, proyek ini merupakan penghaburan sumberdaya. Ketika persoalan ini menjadi keniscayaan, maka bangsa ini akan kembali terseret ke dalam kesempitan identitas lokal dimulai dengan perlakuan diskriminatif terhadap etnis lain atau orang luar yang menghuni suatu wilauah kebudayaan tertentu.

Telah menjadi fakta hari ini, adanya upaya-upaya membelokkan arah otonomi daerah ke dalam persoalan hak ekonomi sehingga yang muncul kenudian adalah kepentingan

sesaat dari rejim-rejim lokal. Pada titik ini pelaksanaan otonomi daerah yang dikaitkan dengan revitalisasi budaya lokal berkecenderungan menjadi kekuatan sentrifugal menjauh dari penguatan identitas nasional.

Pentingnya Penerapan Otonomi Asli

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah munculnya berbagai upaya revitalisasi tata pemerintahan dan desa yang sesuai dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seperti Wanua di Minahasa/ Banjar di Bali, Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Kuria di Sumatera Utara, dsb. Desa menjadi pusat pengembangan social dan budaya sebagai upaya mengaktualisasikan identitas sosial budaya dan suatu entitas komunitas yang memperkaya sosial budaya nasional, serta menjadi perekat bangsa. Dalam kondisi transisi, desa dapat menjadi pemicu revolusi kebudayaan menuju tatanan nilai dan struktur tata pemerintahan baru atau dikenal dengan Kebangkitan Kembali Indonesia (Indonesian Renaissance). Penghormatan terhadap kearifan lokal, merupakan implementasi pada pengakuan atas ha-hak masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

Salah satu hak masyarakat adat yang acap kali menjadi sumber ketegangan antara negara dan masyarakat adat adalah hak kepemilikan *(property rights)*. Nilai dan kekuatan yuridis yang melekat pada tradisi atau adat istiadat desa tidak bersifat statis melainkan bergerak dinamis sesuai dengan perubahan dan dinamika baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan desa. Membangun tata hukum daerah berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi daerah yang mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, kemudahan, kepastian, kesederhanaan, desentralisasi dan *local accountability* di masa mendatang perlu mendapat perhatian lebih besar dan serius.

Pengembalian Kedaulatan Rakyat dan Pembagian Dividen Demokratisasi

Posisi desa menjadi penting sebagai infrastruktur politik yang dapat melestarikan nilai-nilai demokrasi. Pola pemilihan langsung kepala desa menjadi budaya asli Indonesia, setelah berbagai

upaya birokratisasi kepala desa melalui UU 5/1974 terbukti gagal mereduksi peran politik rakyat. Demokrasi merupakan pilar penopang bagi perwujudan tata pemerintahan yang baik. Upaya untuk menyeimbangkan posisi dan peranan politik hingga tingkat desa. Pemberlakuan desentralisasi (baik pada tingkat daerah maupun desa) tidak dapat dilepaskan dari gagasan perwujudan demokratisasi.

Desentralisasi tanpa demokrasi tidak akan dapat membawa kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian hanyalah penggeseran sistem senralisasi kekuasaan pada penguasa di tingkat pusat ke penguasa tingkat kabupaten, ataupun hidupnya kembali feodalisme yang mengusung sentralisasi. Untuk menindak-lanjuti penyikapan ini perlu perumusan ataupun pengkonsepsian tentang manajemen pemerintahan daerah, termasuk secara spesifik menyangkut manajemen keuangan.

Desa menjadi ukung tombak dalam peningkatan kesejahteraan rakyat menuju kecukupan pangan dan gizi, jangkauan terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan sebagai deviden dari demokratisasi dan pembaruan tata pemerintahan. Pola ini merupakan penghampiran ala Sen yang paling utuh dalam mendefinisikan pembangunan sebagai kemerdekaan yang merupakan hak dasar warga negara.

Pendekatan awal yang paling layak adalah akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik di berbagai tingkat *govermance*. Pembaruan desa seyogyanya mensenyawakan berbagai segi dan pendekatan berikut : (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat desa, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti *micro-financing*, industri mikro dan rumah tangga utnk diarahkan pada penguatan basis ekonomi dan daya saing komunitas, (c) peningkatan kemampuan dan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi, guna meningkatan kesejahteraan mereka. Program peningkatan posisi desa dapat menjadi awal sebuah gerakan nasional untuk mendorong perubahan fundamental ekonomi bangsa.

Otonomi Budaya dan Otoritas Pemerintahan

Mendasarkan pada fakta sejarah di atas adalah penting untuk meletakan wacana tentang desa pada posisi yang penting. Desentralisasi seharusnya tidak terbatas pada tingkat kabupaten/ kota, tetapi seharusnya justru menjangkau tingkat desa. Pemikiran yang demikian harus dipahami sebagai salah satu filosofi dan sekaligus dijadikan landasan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga menindaklanjuti gagasan yang demikian, kebijakan nasional perlu didorong utnuk merealisasikan desa yang kuat.

Berbagai kebijakan dan peraturan-perundangan yang mereduksi keberdayaan desa perlu dihapus secara terencana. Oleh karenanya menjadi penting utnuk dibangun kerangka kebijakan pemerintah kebupaten berbasis budaya dan kearifan lokal untuk menopang kemandirian pemerintahan desa melalui kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, serta perimbangan keuangan yang obyektif. Pembagian kewenangan perlu didasari pemahaman yang jelas terhadap kompetensi desa dan kebutuhan yang muncul, selanjutnya diikuti dengan pengalokasian sumberdaya yang adil dari anggaran daerah yang diserahkan kepada desa berdasarkan kemampuan pengelolaan, kebutuhan dan potensi pembangunan yang berkembang secara dinamis.

Tata pemerintahan daerah seyogyanya diselaraskan dengan budaya lokal, sehingga pemerintah tidak saja mencerminkan keterwakilan politik, tetapi juga khazanah budaya yang sesuai dengan kaidah kemanusiaan dan keadilan.

3. PENUTUP

Kebijakan otonomi daerah seyogianya diikuti oleh proses desentralisasi budaya. Dengan begitu, nilai-nilai tradisi sebagai akar proses kreatif para budayawan akan semakin tumbuh subur. Untuk itu, di daerah-daerah harus dibangun kantung-kantung kebudayaan, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya budaya Indonesia yang benar-benar khas Indonesia. Pergumulan kreativitas yang menempatkan nilai budaya daerah sebagai subyek dan materi pokoknya, diyakini akan berlangsung di daerah-daerah dimana penghayatan terhadap nilai budaya tradisinya masih cukup tinggi, akan mampu

mempercepat terbangunnya daerah- daerah otonom yang menjalankan 'good govermance" berbasis budaya lokal.

Reformasi yang tengah bergulir merupakan euphimisme revolusi kebudayaan, karena secara drastic merubah tatanan yang sentralistis menjadi terdesentralisasi dan mengembalikan tata pemerintahan kepada akar kebudayaan daerah dengan pengutamaan kearifan lokal. Pada gilirannya, tatanan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ideal terbangun oleh keberagaman budaya daerah, budaya politik nasional baru yang yang demokratis, serta penerapan *good govermance* akan menjadi pilar-pilar penting bagi perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Kebudayaan baru ini menjadi landasan bagi kebangkitan kembali Indonesia atau **Indonesian Renaissance**. Saatnya, kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang untuk memperkuat penerapan prinsip *good govermance* pada seluruh matra kehidupan baik sistem dan kelembagaan pemerintahan maupun perilaku warga negara.

ANAK DAN MINAT BUDAYA
DIMANAKAH USAHA DAN TANGGUNG JAWAB KITA?

Oleh: **DR. Murti Bunanta SS,MA.**

Saya bukanlah seorang ahli teori budaya, melainkan seorang praktisi di lapangan yang menaruh perhatian kepada anak-anak dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mereka. Karena itu, makalah ini tidak akan diisi dengan teori-teori budaya yang canggih dan mutahir. Wawasan saya tentang budaya untuk anak adalah dari pengalaman bergaul dan bekerja untuk anak. Pengalamanlah yang menjadi pengetahuan saya dan kesimpulan yang saya ambil didasari dari fakta-fakta lapangan

Memperkenalkan Budaya

Memperkenalkan budaya pada anak-anak dapat melalui banyak cara, yang penting menyenangkan dan dinikmati mereka. Bisa melalui buku (cerita yang dituliskan), bisa melalui cerita (mendongeng), bisa melalui permainan, bisa melalui musik, bisa pula melalui teater (drama), film, animasi, nyanyian, pantun, peribahasa, tata-krama, dan sebagainya. Anak-anak terbuka untuk mengenal budaya apapun, baik dari lingkungannya sendiri maupun dari luar.

Berbicara tentang kebudayaan harus dilihat dan diperbincangkan dari berbagai aspek. Makalah ini hanya mengetengahkan sebuah kasus, yaitu bagaimana cerita rakyat yang sesungguhnya adalah bagian dari kebudayaan dan tradisi Nusantara, dapat kita sosialisasikan, aktualkan, dan dayagunakan untuk memperkenalkan tradisi atau budaya Nusantara pada anak-anak masa kini.

Sayang sekali bahwa seringkali cerita rakyat disalahgunakan dengan dibebani oleh ideologi negara secara sewenang-wenang, ada pula yang "diporakporandakan" semau-maunya dengan alasan agar terlihat modern dan kekinian, yang sebenarnya malahan menjadikan cerita rakyat (budaya) sebagai sampah gagasan yang dikesankan cemerlang. Adapula sementara kaum dewasa yang karena tidak menguasai bidang sastra anak menganjurkan untuk melakukan dekonstruksi cerita rakyat, sehingga hilanglah norma dan nilai budaya yang dapat diwariskan.

Terlalu banyak yang dikatakan dan terlalu sedikit yang dikerjakan untuk anak-anak.

Itulah kondisi bangsa kita. Di Amerika, kepada siapa kita sering kali merujuk "tidak sesuai dengan norma bangsa", cerita rakyat mereka terus digali dan disosialisasikan pada generasi mudanya. Begitu banyak penelitian tentang folklor yang dapat didayagunakan untuk pewarisan budaya kepada anak-anak. Mudah-mudahan presentasi saya untuk Seminar Internasional Tradisi Lisan IV, 2-5 Oktober 2003 di Jakarta baru-baru ini, memberi inspirasi pada banyak peneliti tradisi lisan Indonesia untuk menggali banyak ragam budaya yang dapat digunakan dan dinikmati anak-anak. Kemanakah pantun anak-anak kita, nyanyian, permainan, peribahasa, teka-teki yang berkaitan dengan budaya dan dunia anak-anak. Penelitian dan upaya nyata untuk mempromosikan budaya kepada anak-anak hanya dilakukan oleh segelintir orang saja.

Sekali lagi, di Amerika, 5.000 anggota pendongeng bergabung dalam sebuah wadah bernama *The National Storytelling Association* (MacDonald, 1999: XIII). Banyak dari mereka adalah para peneliti dan folkloris yang bergelar doktor yang tidak segan untuk mendongeng di depan anak-anak dan masyarakat dengan maksud untuk merevitalisasi kebudayaan. Mereka hanya menggunakan materi-materi tradisi (bukan karangan sendiri). Setiap tahun secara teratur diadakan festival mendongeng bersifat nasional dengan nama *Tellabration (Storytelling Magazine*, 2002 : 5). Di Amerika, ada pendidikan untuk *Storytelling* (mendongeng) dengan tingkat pascasarjana. Bahkan di India ada *Saneguruji Storytelling Academy (Storytelling Magazine,* 2002 : 37). Suatu usaha untuk mengantisipasi perubahan zaman yang mau tidak mau menyebabkan materi kebudayaan harus atau perlu mengalami transformasi untuk dapat diterima oleh masyarakat masa kini. Di Thailand, sudah ada upaya untuk membangkitkan kembali bahasa-bahasa yang hampir punah dengan menggunakan sarana mendongeng.

Seperti diketahui, memperkenalkan budaya kepada anak-anak masa kini tidak hanya melalui kegiatan mendongeng, tetapi dapat melalui berbagai cara, yaitu dengan konsep mendongeng dan bermain, mendongeng dengan bermusik, festival mendongeng dengan konsep pementasan teater dari anak untuk anak, membacakan cerita secara maraton dengan meniru

konsep pagelaran wayang, membacakan cerita dengan konsep membaca massal di taman, dan berbagai kemungkinan lain. (lihat makalah Murti Bunanta, 2003 dengan judul *Contemporary Storytelling* Sebagai Sarana Promosi, Sosialisasi, dan Pendayagunaan Tradisi).

Minim Pelaku, Minim Apresiasi

Cobalah kita tengok, berapa orang yang dapat kita sebut telah melakukan usaha-usaha untuk memperkenalkan budaya Nusantara pada anak. Saya merasa pasti, orang-orang ini samasekali tidak bertindak demi "ketahanan budaya dan melawan budaya dari luar". Mereka (kami) hanya ingin berbagi budaya yang mereka (kami) yakini akan membuat bangsa ini kokoh dan dapat menjauhi atau mengurangi konflik antar sukubangsa yang mungkin timbul karena salah pengertian dan ketidakpahaman antara satu dengan lainnya.

Saya akan menyebut di antaranya. Pak Raden yang dengan cerdik telah menciptakan tokoh-tokoh boneka yang memperlihatkan ragam budaya. Selain itu untuk memperkenalkan wayang, Pak Raden bernarasi sambil menggambar cerita dengan menggunakan spidol di atas *white board*. Sayang pertunjukannya mendapatkan banyak intervensi. Made Taro dengan konsepnya *Mendongeng Sambil Bermain* (Bali), ternyata dapat merevitalisasikan bahasa lokal kepada anak-anak. Syukrie Ramzan dengan konsep *Mendongeng Sambil Bermain Musik* dapat membangkitkan budaya lokal dan menembus budaya lain. Kelompok Pencinta Bacaan Anak (non profit independen) yang saya dirikan tahun 1987, telah menyelenggarakan dua tahunan festival Mendongeng sejak sepuluh tahun terakhir. Berbagai konsep telah dicoba dengan hasil dan respon yang baik. Pada Acara Festival Mendongeng V (17-20 Juli 2003), konsep yang dipakai yaitu **dramatisasi cerita rakyat dari anak untuk anak.**

Sujiwo Tejo dan kawan dari EKI (Eksotika Karmawibhangga Indonesia) serta juga Slamet Gundono adalah dua seniman yang telah beberapa kali berkolaborasi dengan Kelompok Pencinta Bacaan Anak untuk menggelar pementasan cerita rakyat berdasarkan cerita rakyat yang saya tulis kembali dan sudah terbit menjadi buku (tahun 2001). Mereka mengadakan modifikasi secara kreatif tanpa merubah struktur dasar cerita. Saya sungguh

beruntung ; ketika saya menyelenggarakan acara Membaca Maraton (tahun 1999), saya mendapat banyak bantuan dari seniman, budayawan, artis, dan juga guru besar yang bersedia menjadi relawan untuk membacakan buku pada ratusan anak-anak.

Buku Sebagai Sarana Penunjang Utama

Buku (cerita) adalah sarana yang utama yang harus diadakan, karena sarana ini dapat digunakan sebagai sumber pertama untuk mengenalkan budaya yang dapat dikerjakan sendiri oleh orang tua dan guru, kaum dewasa pertama yang berhubungan dengan anak. Sayang secara umum, mutu buku cerita rakyat masih harus ditingkatkan dan buku-buku yang mengetengahkan keragaman budaya amat sedikit. Pengarang bangsa ini belum pandai mengungkapkan dan menuliskan masalah ini dengan menarik. Persoalan budaya belum menarik perhatian mereka, selain dari mutu kepengarangan yang memang masih rendah. Komik, komik, dan komik menjadi andalan pengarang Indonesia.

Menuliskan kembali sumber oral menjadi bahan tulisan yang menarik amat tidak mudah. Segudang masalah timbul, belum lagi kalau pengarang tidak pandai menafsirkan makna cerita yang ada (lihat Bunanta, 1998). Tanpa meningkatkan dan memperbanyak buku dan penelitian tentang budaya yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat (anak-anak), maka budaya dan tradisi akan perlahan-lahan menghilang. Budaya akan lestari dan menjadi dinamis kalau dia juga dituliskan yang kemudian dapat dijadikan sumber oral kembali. Parahnya, ada pula yang beranggapan bahwa cerita rakyat atau tradisi sudah ketinggalan zaman dan perlu digantikan dengan yang lebih modern, padahal bangsa lain banyak yang mengambil manfaat dan menggali budaya kita. Buku saya, sebuah kumpulan cerita rakyat Indonesia baru saja terbit di Amerika bulan Oktober ini, dengan judul **Indonesian Folktales**, dikemas dengan sangat mewah untuk ukuran Indonesia. Orang lain menghormati budaya kita dengan mengiklankan buku ini sebagai berikut : *"Build your multicultural collection or expand your repertoire with tales that provide a moving and colorful image of the diversity and richness of the people and lands of Indonesia."*

Festival Anak-Anak

Setelah merdeka 58 tahun pun, di Indonesia, tak ada satu pun institusi pemerintah yang pernah mengadakan acara kebudayaan untuk anak-anak. Kalau pun ada hanya merupakan kasus musiman saja. Tidak pernah ada penyelenggaraan Festival Anak-Anak yang berkesinambungan secara teratur dan bersifat nasional melibatkan seluruh masyarakat (sekolah, organisasi swasta non-profit, sponsor, d.s.b.nya). Kita tidak peduli tentang musik untuk anak, permainan anak, cerita untuk anak, dan semuanya yang bersifat budaya. Lebih sering festival diselenggarakan dengan menempatkan anak sebagai objek konsumen suatu usaha yang bersifat dagang.

Secara mandiri KPBA mencoba mengadakan secara teratur Festival Mendongeng yang diadakan dua tahunan. Pada bulan Juli 2003 telah mencapai Festival Mendongeng ke V dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kalau pada acara festival yang telah lalu, pada umumnya orang dewasa yang mengambil peran utama sebagai orang yang menyampaikan dan memperkenalkan budaya, maka kali ini pada festival ke V, anak menjadi pemeran utama. Anak-anak dari berbagai sekolah dan sanggar diajak untuk mendramatisasikan cerita rakyat. Mereka berasal dari Jakarta, Bali dan Bengkulu.

Sebuah kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa anak adalah **"agen"** yang ampuh dan efektif untuk mengenalkan budaya kepada kelompok sebayanya sendiri (dari anak untuk anak). Mereka dapat mengenal adanya keragaman budaya dan dapat menghormati keragaman tersebut. Selain itu, ternyata mereka bersih dari arogansi kebudayaan lingkungannya (rumah) sendiri. Anak-anak adalah penikmat budaya yang amat toleran. Melalui Festival Anak kita sekaligus "mencerahkan" orang tuanya.

Apa Kata Anak

Beberapa kutipan dari surat anak-anak peserta yang sekaligus juga penonton Festival Mendongeng V membuktikan bahwa mereka adalah peminat budaya yang baik, antusias, dan apresiatif.

Vazalia Ratnasari – SD Kelas III di Jakarta

Manfaat : Banyak sekali

Kesan : Menambah wawasan/senang banyak teman

Harapan : Harus sering-sering acara seperti ini
Berperan sebagai pengawal dan itik
Dari seorang anak anggota sebuah Sanggar
Kesan : Saya dan teman-teman sangat senang
karena kami diundang untuk turut
berpartisipasi dalam acara Festival Mendongeng
Kami dapat bertemu dengan teman-teman sanggar lain
Kami berterima kasih khususnya kepada ibu Murti
sebagai ketua KPBA yang telah mengikut sertakan
kami dalam acara tersebut
Pesan : Semoga acara ini akan terus diadakan agar
anak Indonesia lebih mengenal cerita rakyat
Nusantara dan Mancanegara melalui mendongeng

Selain itu, anak-anak juga mudah menerima berbagai budaya dengan tangan terbuka dan mereka dengan sangat efektif pula menjadi "jembatan" yang menyeberangkan budaya. Mari kita lihat kutipan-kutipan berikut.

Qila, murid SD Kelas II di Bogor
Pada waktu di Jakarta saya meliat
Barosay dan yang lain-lainnya.
Saya juga senang meliatnya, aku
sampe joget-joget di belakang. Saya
senang sekali meliat yang lainnya
Pada waktu itu saya dek-dekkan karena banyak
orang, terus saya artis namanya Maudi Kusnaedi
Ibu Murti saya senang sekali meliat dongeng-dongeng
yang bagus. Kalo saya ke Jakarta lagi saya. Tapi
kalau diundang. Makasih ya dongeng-dongengnya
udah dulu ya makasih.

Nadya, murid SD Kelas II di Bogor
Waktu Festival dongeng
Pada waktu di Jakarta Nadya
Melihat Maudi Kusnadi. Saya juga
Melihat barongsai. Lalu saya
Maju ke depan untuk drama
Waktu saya drama senang sekali
Lalu di foto lalu kita turun dari panggung

Lalu kita melihat pentas Kukuruyuk
Lalu saya melihat ibu Murti
Setelah itu saya makan di luar
Makan KFC Lalu saya pulang

Nabila Meutia Zahra, murid SD di Jakarta
Kesanku selama mengikuti Suwidak Loro (M.B : nama cerita yang dipentaskan)
sangat menyenangkan karena aku bisa berjumpa
dengan teman-teman dari luar kota. Aku bertemu
mereka di Bentara Budaya Jakarta dan juga
bertemu dengan teman-teman dari Bengkulu, tapi
mereka semuanya laki-laki padahal aku
mengharapkan ada perempuan. Pada saat mereka
tampil di panggung aku dan temanku terpukau
sampai kami berteriak

Sayang sekali kalau antusiasme anak-anak dan minat budaya mereka tidak dapat berkembang atau dikembangkan dengan optimal. Ini, karena kita tidak
pernah memikirkan untuk menyelenggarakan sebuah "ruang" untuk anak-anak berekpresi dengan budaya dan bersentuhan serta berinteraksi dengan berbagai budaya.

Lembaga Budaya Untuk Anak dan Sistem Pendidikan

Adakah kita nanti setelah Kongres Kebudayaan V akan mengadakan sebuah Lembaga Budaya untuk anak-anak kita di setiap tempat di bumi Indonesia ini? Ataukah kita hanya berkongres, berdiskusi, bertemu tanpa mengambil upaya nyata? Berapa lama lagi anak-anak Indonesia harus menunggu? Akankah kita biarkan saja anak-anak mengalami konflik etnis berkali-kali dan berulang-ulang? Kutipan-kutipan di atas adalah perasaan anak-anak yang lugu. Mereka amat terbuka untuk toleran dan berdamai dengan siapa saja.

Bangsa ini memerlukan kegiatan budaya untuk anak-anak yang selalu secara teratur diselenggarakan dan memungkinkan anak terekspos dengan budaya, terlepas dari persoalan budaya yang mana. Alangkah indahnya melihat musik kamar dan musik tradisional diajarkan dan diperkenalkan kepada anak-anak oleh sebuah kesempatan yang diciptakan untuk itu. Kita memerlukan sebuah institusi, tempat, gedung, museum, balai budaya, festival

anak, yang tersebar di mana-mana serta mudah dipergunakan untuk siapa saja demi kepentingan mengajarkan budaya pada anak.

Tidakkah kita tahu bahwa anak dengan usia yang amat muda sekali pun (kurang dari satu tahun) dapat menikmati musik gamelan, musik dol, dan musik barongsay? Tidakkah kita ingin memberi kesempatan mereka hidup dengan damai melalui budaya?

Mungkin kita dapat meniru negara Slovakia, yang mempunyai **Bibiana,** sebuah institusi kebudayaan yang dipersembahkan bagi anak-anak di bawah asuhan para profesional, seniman, artis, penulis untuk mengembangkan imaginasi, rasa seni, cara berpikir, dan ketrampilan anak-anak. Museum Anak-Anak, **Zoom,** di Austria mempunyi motto *"all senses come into play"*, yang dengan sendirinya secara teratur juga mengadakan program-program budaya untuk anak-anak.

Amerika, adalah negara yang paling progresif dan terkemuka dalam mendirikan museum dengan konsep "Hands-On", artinya anak-anak pengunjung dapat dan dianjurkan untuk menyentuh dan mengeksplorasi apa yang disuguhkan (paling tidak ada 225 Museum – lihat Cleaver, 1988). Museum seperti ini tidak hanya memamerkan benda-benda sejarah, tetapi justru banyak memberi kesempatan pada anak-anak untuk merasakan pengalaman multikultural. Anak-anak diajak memakai kostum berbagai budaya, belajar menabuh berbagai alat musik dari berbagai suku bangsa, mencoba membuat makanan daerah, bermain dengan beragam mainan tradisional, memakai gaya rambut dari berbagai etnik, mempelajari kata-kata dari berbagai bahasa, menyentuh benda-benda seni dari yang tradisional sampai yang modern.

Singkatnya, semua dan apa saja yang berkaitan dengan budaya anak dan mengembangkan minat budaya pada anak dapat kita laksanakan kalau saja ada tempat dan "ruang" untuk itu. Bahkan ironisnya, bangsa ini juga sama sekali belum memikirkan sistem pendidikan yang memungkinkan anak didik kerap bersentuhan atau sengaja didekatkan dan dilibatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Adakah guru-guru yang terdidik untuk itu?

Catatan Penutup

Berbagai kutipan surat anak-anak menunjukkan bahwa anak Indonesia memerlukan kesempatan menjadi pelaku kebudayaan. Mereka ingin berekspresi dalam kebudayaan, mengenal, dan menikmati kebudayaan apa saja, sekaligus terbuka untuk menerima kebudayaan dan menjadi agen yang mentransmisikan kebudayaan. Tidakkah akan kita ajarkan dan tumbuhkan perdamaian melalui budaya? Di manakah usaha dan tanggung jawab kita untuk masa depan anak-anak kita. Adakah masa depan tanpa budaya. Anak-anak siap untuk berbudaya dan menjadi bangsa yang berbudaya, akan tetapi kita, kaum dewasa, tidak memberikan jalan pada mereka. Jadi, jangan salahkan anak-anak bila mereka lebih banyak mengenal budaya yang datang dari luar (tentu tidak salah), karena kita sendiri yang tidak memikirkan untuk menyelenggarakan dan menyediakan budaya sendiri bagi anak-anak. Padahal mereka sangat ingin dan sungguh terbuka untuk menerima warisan budaya dari kita.

Dengarkanlah suara anak-anak Indonesia. Saya yakin anak dari golongan manapun sesungguhnya dapat mencintai dan bangga akan kebudayaan sendiri bila mereka memang diberi jalan untuk itu. Persoalannya, tak ada upaya kita untuk melakukan usaha nyata guna mewariskan kekayaan budaya kita.

Jakarta, 14 Oktober, 2003

Daftar Pustaka

Bunanta, Murti

1998 *Problematika Penulisan Cerita Rakyat untuk Anak di Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka

2001 *Kancil dan Kura-Kura,* Cerita Rakyat Kalimantan Barat. Jakarta, Kelompok Pencinta Bacaan Anak

2001 *Senggutru*, Cerita Rakyat Jawa. Jakarta, Kelompok Pencinta Bacaan Anak

2001 *Suwidak Loro,* Cerita Rakyat Jawa. Jakarta, Kelompok Pencinta Bacaan Anak

2001 *Si Kecil,* Cerita Rakyat Sulawesi Selatan. Jakarta, Kelompok Pencinta Bacaan anak.

2003 *Indonesian Folktales*. Westport, Libraries Unlimited

Cleaver, Joanne

1988 *Doing Children's Museum*. A Guide to 225 Hands-On Museums, Vermont, Williamson Publishing

Margaret Read MacDonald

1999 *Traditional Storytelling* Today. Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, hlm.XII

Storytelling Magazine

2002 *Storytelling Magazine*, Volume 14. Issue 2, Maret/ April 2002. Hlm. 5 dan hlm. 37

BALI PASCA-BOM:KONFLIK, KEKERASAN, DAN REKONSTRUKSI IDENTITAS BUDAYA SEPUTAR "AJEG BALI"[1]

Oleh: **I Nyoman Darma Putra**
Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali

Pengantar

Ledakan bom di Legian 12 Oktober 2002 merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan Bali, Indonesia, dan masyarakat dunia. Dilihat dari jumlah korban meninggal yang mencapai 202 orang, kerusakan material dan dampak negatif ikutannya terhadap dunia pariwisata serta kehidupan finansial masyarakat Bali, peristiwa ini merupakan serangan teroris kedua terbesar setelah peristiwa WTC 11 September 2001. Namun, yang tidak kalah "mengejutkan" dari ledakan bom itu adalah reaksi spontan yang diberikan masyarakat Bali segera setelah bom meledak. Masyarakat menggalang aksi solidaritas kemanusiaan, menggalakkan kegiatan ritual Hindu, dan doa-doa bersama antar-umat beragama. Sekurang-kurangnya ada tujuh ritual yang dilaksanakan masyarakat setelah bom Bali, dan satu lagi pada puncak peringatan setahun tragedi bom Bali, Minggu 12 Oktober 2003, yang bertajuk Gema Perdamaian (lihat tabel). Tampaknya renungan dan persembahyangan bersama atas tragedi itu tetap dilaksanakan tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada 12 Oktober.

Reaksi spontan dan rekayasa sosial itu terbukti dapat meredam potensi konflik antar-etnik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang telah berbenih dan sesekali pernah mencuat dalam skala relatif kecil tanpa korban pada masa-masa sebelumnya (Vickers 2003). Segera setelah terjadi ledakan, aksi solidaritas kemanusiaan diarahkan untuk membantu para korban. Tidak ada sama sekali tindakan perampasan atau penjarahan, walaupun banyak toko di sekitar lokasi ledakan yang hancur dan isinya potensial untuk dijarah. Masyarakat Kuta khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya yang daerahnya diserang

---

[1]Tulisan ini disajikan dalam Kongres Kebudayaan V Tahun 2003, yang berlangsung 19-23 Oktober 2003, di Bukittinggi, Sumatera Barat.

dengan bom memilih langkah menjaga keamanan daerahnya daripada melakukan tindakan-tindakan pembalasan.

Sempat terjadi kekhawatiran bahwa akan ada konflik, tindak kekerasan, atau gangguan keamanan pasca-bom Bali. Namun, hal itu tidak menjadi kenyataan. Kekhawatiran yang sempat muncul bahwa akan terjadi gangguan keamanan dalam proses ivestigasi dan persidangan tersangka bom Bali setahun setelah ledakan, juga tidak menjadi kenyataan. Ketertiban dan keharmonisan Bali cukup kondusif sejak bom meledak sampai hampir semua pelakunya divonis dalam sidang-sidang di Pengadilan Negeri Denpasar yang sebagian besar berakhir November 2003.

Makalah ini menguraikan pengalaman Bali menghadapi konflik dan kekerasan secara historis dengan penekanan pada peristiwa bom Bali serta strategi budaya masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mempertahankan sikap toleransinya. Fokusnya adalah bagaimana masyarakat Bali mengelola krisis (*crisis management*) dan ketegangan untuk mencegah terjadinya konflik. Pada bagian akhir akan dibahas munculnya slogan "Ajeg Bali" yang menjadi salah satu wacana dominan dalam proses rekonstruksi identitas budaya pasca-bom Bali.

Tinjauan Ringkas Konflik dan Kekerasan hingga Bom Bali

Sejak lama Bali dikenal sebagai daerah yang aman dan damai dengan julukan *the last paradise on earth*. Kondisi daerah yang aman dan damai itu ditunjang oleh karakter manusia Bali yang harmonis, *balance*, dan *non-progressif*. Antropolog Gregory Bateson menyebutkan karakter itu sebagai "steady state" (Schulte Nordholt 1994:113). Walaupun klaim ini ada benarnya, tentu saja salah untuk mengatakan bahwa masyarakat Bali tenang dan tidak pernah terlibat dalam kerusuhan, tidak pernah terlibat dalam konflik atau tindak kekerasan.

Siapa pun mempelajari sejarah Bali pada abad ke-20, atau sebelumnya, akan berhadapan dengan sejarah kekerasan, peperangan antar-raja-raja, atau antara raja dengan penjajah. Citra kekerasan masyarakat Bali juga tercermin dalam novel-novel yang terbit zaman kolonial, seperti *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* (1935) dan *Sukreni Gadis Bali* (1936), keduanya karya novelis I Gusti Nyoman Panji Tisna. Dalam kedua novel itu ada adegan kekerasan dan pembunuhan yang sadis. Kisah

Mahabharata dan Ramayana juga dipenuhi dengan adegan kekerasan. Kedua epos ini memberikan sumbangan besar pada imajinasi masyarakat Bali tentang konflik, perang, dan kekerasan.

Banyak contoh kekerasan yang bisa dijejerkan, seperti perang Puputan Badung (1906), Perang Puputan Klungkung (1908), perang memperebutkan kemerdekaan 1940-an, konflik dan kekerasan awal 1950-an sampai menjelang Pemilu 1955, pemberantasan PKI 1965-66, konflik dan kekerasan awal tahun 1970-an dalam proses mobilisasi massa untuk mendukung Golkar yang dikenal dengan proses Golkarisasi atau kuningisasi (sesuai warna bendera partai ini). Konflik dan kekerasan-kekerasan itu merenggut banyak korban jiwa. Yang paling mengerikan adalah peristiwa pembasmian orang-orang yang dianggap terlibat PKI. Hanya saja konflik dan kekerasan di Bali ini, terutama pembunuhan besar-besaran tahun 1965-66 jarang diungkap para peneliti sehingga menjadi bagian yang gelap, *the dark side of paradise* (Robinson 1995).

Dalam dekade terakhir abad ke-20, konflik dan kekerasan juga terjadi namun skalanya kecil dan latar belakangnya bervariasi namun kadang-kadang ada hubungannya dengan masalah politik yang pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1996, misalnya, di Kecamatan Banjar (Bali Utara) terjadi perkelahian yang merembet menjadi perkelahian antar-banjar yang dipicu oleh pelemparan rumah seorang tokoh PDI (Partai Demokrasi Indonesia, nama baru untuk PNI, yang kini dikenal dengan nama PDI-P) merembes menjadi perkelahian antar-banjar.

Tak kurang dari sepuluh orang meninggal dalam konflik ini. Dalam sejarahnya, daerah Banjar memang tak dipisahkan dengan peperangan, karena pada akhir abad ke-19 penduduk di sana terlibat peperangan maraton melawan kolonial (Rubinstein 1996), begitu juga tahun 1940-an pada zaman perang mempertahankan kemerdekaan, Banjar menjadi tempat peperangan antara pahlawan pro-republik melawan NICA. Konflik antar-banjar di Banjar yang terjadi tahun 1996 dan ikutannya dalam skala kecil tahun-tahun berikutnya bisa diredam aparat keamanan. Mungkin karena tidak melibatkan orang luar atau etnik lain, konflik ini tidak sampai menyebar luas seperti konflik di daerah lain di Indonesia.

Pada Oktober 1998, di Bali juga meletus demonstrasi besar-besaran yang diakibatkan oleh tersinggungnya perasaan umat

karena ucapan Menteri A.M. Saefuddin dari kabinet Presiden Habibie yang diarahkan atau dianggap merendahkan kedudukan Megawati (ketika menjadi calon presiden). Menteri itu dikutip sebagai mengatakan apakah penduduk Indonesia siap memiliki presiden wanita Hindu. Penilaian terhadap Megawati sebagai orang Hindu dikarenakan dia bersembahyang di pura keluarga neneknya di Singaraja, Bali Utara. Pernyataan menteri itu dianggap melecehkan Hindu. Demonstrasi besar-besaran pun meletus di Bali. Mahasiswa dan aktivis sosial lainnya bersatu dalam gerakan yang disebut AUM (Aksi Umat Menggugat).

Dalam protes itulah keluar pernyataan jika Presiden Habibie tidak menindak menterinya yang dianggap melecehkan Hindu, pilihan untuk "Bali Merdeka" harus diambil (Vickers 2000). Walaupun demonstrasi berlangsung besar-besaran dan beberapa lama, tidak ada tindakan kekerasan dan tindakan arnarkhi. Dengan kata lain, demonstrasi berlangsung damai, berbeda dengan demonstrasi Mei 1998 di Jakarta menjelang jatuhnya Presiden Soeharto yang diwarnai tindakan anarkhis, pemerkosaan, dan penjarahaan.

Setahun kemudiannya, 1999, juga pada bulan Oktober, segera setelah Megawati terjegal dalam perebutan kursi Presiden, tindak kekerasan muncul secara spontan dan serentak di Denpasar dan Badung serta daerah lainnya di Bali. Pembakaran kantor-kantor pemerintah, perusakan kantor Golkar, pembakaran ban di jalan-jalan, penebangan pohon yang melumpuhkan lalu-lintas terjadi secara cepat di kota Denpasar. Penjarahan juga terjadi, termasuk di sebuah desa kecil di Bali Barat, tepatnya di rumah milik seorang mantan Gubernur Bali. Jumlah kerugian material luar biasa besarnya, tetapi korban nyawa tidak ada sama sekali. Kerusuhan ini hanya terjadi dalam sehari.

Masyarakat Bali benar-benar kaget dengan hura-hara ini, tetapi pada hari-hari berikutnya, atas peran media terutama radio, ajakan untuk melakukan kegiatan kebersihan dan tidak terpancing provokasi lanjutan, masyarakat Bali bisa menjaga keamanan wilayahnya. Lalu-lintas yang lumpuh, bisa bergerak kembali. Aktivitas pariwisata yang menjadikan keamanan sebagai prasyarat utama bisa dilmulai lagi. Tidak pernah ada investigasi terhadap apa yang disebut dengan 'Black Oktober' atau Kamis

Kelabu Oktober 1999 ini sehingga sulit mengetahui siapa sebetulnya provokator dan pelaku tindak kekerasan saat itu.

Mungkin suatu kebetulan bahwa tindak kekerasan di Bali terjadi bulan Oktober. Selain dua peristiwa di atas, ledakan bom yang meluluhlantakkan Paddy's Bar dan Sari Club juga terjadi bulan Oktober, tepatnya 12 Oktober 2002. Korban yang meninggal dalam serangan ini mencapai 201 orang (angka resmi pemerintah), sebagian besar warga asing terutama Australia (88 orang korban), sedangkan korban orang Indonesia (termasuk Bali) berjumlah 35 orang. Tidak satu pun korban bom Paddy's Bar dan Sari Club berasal dari daerah Legian atau Kuta. Sulit dibayangkan bagaimana amarah masyarakat Legian, Kuta, jika ada warga mereka menjadi korban dalam serangan terorisme itu.

Pada malam ledakan bom itu, masyarakat dan petugas keamanan langsung memberikan bantuan untuk menolong korban. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari dan itu dilaksanakan secara tulus dan penuh semangat oleh para sukarelawan. Setelah ledakan bom, tidak ada jam malam di Bali. Bali tetap aman. Bali tidak menjadi Ambon kedua. Mengapa konflik dan kekerasan bisa terhindar di Bali pasca-bom, akan diuraikan dalam bagian berikut.

Reaksi Spontan dan Rekayasa Sosial

Sehari setelah ledakan bom Bali, tepatnya mulai pk. 07.00 pagi, tokoh masyarakat dan pimpinan dari berbagai agama dan lembaga swadaya masyarakat, seperti tanpa dikomando berkumpul di Kantor Gubernur Bali. Dari pertemuan itu, mereka mengeluarkan imbauan sejuk agar masyarakat menjaga kedamaian, tidak terpancing provokasi. Mereka juga mengutuk pengeboman tetapi meminta masyarakat agar waspada dan menjauhi tindakan anarkhis.

Sementara itu, tayangan ledakan bom dan dampaknya yang begitu besar terus terjadi di Bali TV, diselingi dengan dialog-dialog para tokoh. Hal yang sama juga terjadi di radio-radio. Media massa di Bali waktu itu menyajikan informasi faktual dan ulasan-ulasan menyejukkan sehingga masyarakat mendapat informasi tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Dengan adanya informasi itu, masyarakat tidak bingung, tidak terbakar emosi mereka untuk bertindak yang bukan-bukan. Meskipun horor yang

ditimbulkan ledakan bom di Legian luar biasa, masyarakat Bali menyikapinya dengan sikap tenang dan emosi terkendali.

Mengapa masyarakat Bali tidak marah dan tidak melakukan tindakan kekerasan? Ada beberapa jawaban atas pertanyaan ini.

Pertama, mereka sadar bahwa serangan terorisme di Kuta bukanlah diarahkan untuk orang Bali. Belakangan, sinyalemen ini terbukti, terutama ketika para pelaku bom Bali seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, dan Ali Imron mengatakan bahwa target serangan mereka adalah orang Amerika dan sekutunya. Imam Samudra mengatakan bahwa dirinya tidak memusuhi orang Bali, tetapi orang Amerika.

Kedua, pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati dan jajaran kabinetnya segera datang ke Bali meninjau lokasi ledakan sehingga masyarakat Bali mendapat keyakinan bahwa tindakan terorisme di Kuta sudah ditangani pemerintah. Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu Antiterorisme memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah sangat serius menangani aksi terorisme di Kuta. Semua ini mencegah masyarakat dari kemungkinan bertindak sendiri-sendiri. Selain itu, masyarakat Bali mungkin juga sangat berhati-hati dalam bertindak karena yang mereka hadapi adalah jaringan terorisme yang menjadi musuh negara bahkan dunia internasional.

Ketiga, peran media massa lokal di Bali, seperti *Bali Post* dan *Bali TV*, sangat positif karena selain memberikan informasi faktual dan mengutip pendapat-pendapat yang menyejukkan dan membuat orang sudi melakukan introspeksi. Sehari setelah ledakan, di Bali TV disampaikan ajakan selain mengutuk pelaku pemboman juga mengimbau masyarakat Bali untuk menyampaikan duka cita dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Pengibaran bendera itu tidak saja untuk menunjukkan masyarakat berduka tetapi memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki satu sikap atau bersatu dalam menghadapi tindakan terorisme.

Koran berpengaruh *Bali Post* edisi 16 Oktober, misalnya, menerbitkan dua berita masing-masing "Jaga Bali, Seluruh Umat agar Merapatkan Barisan" dan "**Pasca Tragedi 12 Oktober,** Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Satukan Pandangan (*Bali Post*, 16 Oktor 2002, p 2), yang potensial untuk mencegah munculnya konflik. Berita "**Monumen di Lokasi Ledakan**

Ingatkan Masyarakat Bali selalu Introspeksi" yang muncul di *Bali Post* (18 Oktober , p.2) mengutip Prof. LK Suryani yang mengatakan bahwa "apa yang menimpa Legian Kuta, 12 Oktober lalu juga adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan". Komentar ini mengajak masyarakat untuk merenungi ajaran agama, tidak memprovokasi mereka untuk menyalahkan orang lain, apalagi sampai bertindak semena-mena. Selain itu, kesempatan masyarakat untuk berbicara lewat radio juga membuat kekerasan fisik terhindari karena dengan berkomentar di radio emosi mereka terlampiaskan.

Keempat, solidaritas kemanusiaan merupakan reaksi pertama yang ditunjukkan masyarakat Bali menghadapi tragedi 12 Oktober 2002 juga penting artinya dalam mencegah konflik dan kekerasan. Pada malam ledakan itu, masyarakat sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan kepada korban yang bisa diselamatkan dan membantu proses evakuasi jenazah kroban. Selain itu, bantuan masyarakat juga diarahkan untuk mencegah efek ledakan agar tidak menimbulkan kebakaran yang meluas (Sulistyo 2002:3-4).

Sukarelawan dari warga setempat, kelompok mahasiswa, LSM, dan organisasi sosial seperti Forum Peduli Denpasar (FPD) memberikan bantuan yang luar biasa untuk membantu para korban. Tak kalah juga pentingnya bantuan yang diberikan oleh kelompok Islam Kuta Timur pimpinan Haji Bambang, yang sudah merasa diri sebagai orang Bali karena berpuluh tahun tinggal di Kuta. Kerja sama bahu-membahu dari berbagai kelompok masyarakat ini jelas dapat menutup peluang munculnya prasangka dan rasa curiga.

Kelima, kegiatan Ritual Hindu dan doa-doa bersama yang merupakan rekayasa sosial, juga berperan penting untuk mencegah meletupkan konflik dan tindak kekerasan di Bali. Sejak ledakan bom 12 Oktober sampai dengan 15 November, saat dilaksanakan upacara penyucian secara Hindu, telah dilaksanakan banyak kegiatan doa bersama (lihat tabel 1). Doa-doa juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan doa bersama atau khusus secara masing-masing agama, tidak saja dapat mencegah terjadinya konflik tetapi juga mempertebal keyakinan umat untuk mempercayai bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan hukuman pada mereka yang berbuat jahat.

Dalam artikelnya "After Kuta Bombing: In Search of the Balinese Soul" (2003) , Jean Couteau, sarjana Perancis yang menetap di Bali lebih dari 20 tahun, merumuskan sebagian dari reaksi spontan di atas dalam tiga butir. Ketiga reaksi tersebut adalah gelombang solidaritas kemanusiaan, kecenderungan ke arah ritual, dan politisasi adat yang mengarah pada tindakan-tindakan diskriminatif terhadap penduduk non-Bali (pendatang).

Dua reaksi pertama merupakan akibat langsung dari ledakan bom, sedangkan reaksi ketiga bisa dikatakan bukan reaksi langsung. Tindakan penertiban penduduk pendatang sudah merupakan wacana sejak lama di Bali, hanya saja peristiwa ledakan di Kuta membuat program pemerintah itu dipacu sedemikian rupa sehingga terasa sebagai sebuah diskriminasi terhadap penduduk pendatang (non-Bali). Konsep penertiban penduduk pendatang, terutama yang dilaksanakan pemerintah Kota Denpasar, diarahkan untuk menertibakan semua penduduk, tidak saja non-Bali tetapi juga penduduk Bali non-Denpasar yang

Tabel 1
Kegiatan Ritual Antar-etnik dan Agama Pasca-Bom Bali 2002-2003

No	Kegiatan	Tgl/Tempat	Pelaksana/ Inisiator	Peserta
1	Doa Bersama	Selasa, 15 Oktober, di Depan Kantor Konsul Australia, Denpasar	Forum Pemuda dan Mahasiswa Bali Diterima Wakil Konsul David Chaplin	21 Organisasi termasuk HMI, PMKRI, GMNI, KNPI
2	Doa Bersama	Selasa, 15 Oktober, di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Niti Mandala Renon	DR. Made Mangku, aktivis lingkungan asal Sanur	Ribuan orang dari unsur pariwisata dan umum, berbagai latar belakang agama dan etnis, termasuk Menbudpar Gde Ardika
3	Pemlebeh Pemrayasita Durmanggala (pembersihan lokasi secara niskala)	Jumat, 18 Oktober, di lokasi	Desa Adat Kuta, didukung LSM	Ribuan orang. Walaupun ritual Hindu, masyarakat beragama lain dan orang asing juga berdatangan.
4	Upacara Maha Shanti Puja	Minggu, 20 Oktober, Di Pantai Kuta.	Forum Pemuda dan Mahasiswa Bali	Ratusan umat dari agama Hindu, Buddha, Protestan, Katolik dan Islam
5	Doa perdamaian dunia dari Bali	Senin, 21 Oktober, Di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Niti Mandala Renon	Pemprov Bali didukung Kelompok Media *Bali Post. Bali TV*, dan komponen pariwisata Bali	Ribuan umat dari berbagai bangsa, agama, suku, ras. Hadir juga Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar
6	Doa bersama serangkaian Ubud Festival of Peace and Unity	Minggu 10 November Lapangan Sepak Bola Ubud	Desa Adat Ubud dan LSM	Ribuan warga dari berbagai agama dan etnik.
7	Upacara Pamarisudha Karipubhaya (Pembersihan)	Jumat, 15 November, di lokasi ledakan bom.	Pemprov Bali, Pemkab Badung, Desa Adat Kuta	Ribuan umat. Walaupun acara Hindu, hadir pula umat dari berbagai ama dan etnik lain. Menko Kesra Jusuf Kalla mewakili Presiden Megawati
8	Gema Perdamaian (Sound of Peace).	Minggu, 12 Oktober 2003, di Lapangan Puputan Badung, Denpasar	LSM dan stakeholders Pariwisata Bali seperti Bali Tourism Board, Parasparos, dll.	Sekitar 1500 orang, termasuk beberapa pendeta Budha dari Tibet.

Diolah dari harian *Bali Post*, 2002-2003.

tinggal di wilayah kota Denpasar. Kota-kota besar seperti Jakarta sudah sejak lama melakukan penertiban penduduk tanpa bias etnik dan agama.

Ketika berbicara mengenai peran media, dengan mengutip ulasan *Pantau* terhadap pemberitaan media di Bali mengenai bom, Couteau menggarisbawahi sentralnya peranan *Bali Post* dan koran lain di Bali dalam ikut menjaga ketenangan masyarakat (2003:43). Dari sini bisa dilihat bahwa tercegahnya tindak kekerasan dan anarkhis yang potensial muncul setelah bom Bali adalah akibat sinergis berbagai pihak, mulai dari masyarakat termasuk tokoh dan pemimpin agama, pemerintah, komentator, dan media massa. Yang penting dicatat dalam sinergis itu adalah kuatnya kesadaran masyarakat Bali yang beragama Hindu dalam menghayati dan mengamalkan ajaran *karma phala* (hukum karma) sepert ditunjukan lewat kegiatan sukarelawan.

Dampak Krisis Bom Bali

Selain korban jiwa yang besar, ledakan bom Bali membuat perkeonomian Bali khususnya sektor pariwisata turun drastis, bahkan ke titik nol pada dua bulan setelah bom. Wisatawan eksodus meninggalkan Bali sehingga tingkat hunian hotel yang rata-rata mencapai 80% sebelum bom, menjadi turun di bawah 10%. Peningkatan terjadi sedikit setelah hampir setahun bom lewat, namun hanya mencapai angka 40-50% untuk hotel berbintang. Ancaman pengangguran dan pemutusan hubungan kerja tidak terhindarkan. Pemerintah mengeluarkan inisiatif untuk membantu Bali ke luar dari krisis yang ditimbulkan ledakan bomb Bali. Salah satu program payung untuk menyelamatkan Bali dari ancaman krisis setelah kunjungan wisatawan turun drastis adalah program *recovery* Bali.

Program *recovery* pada dasarnya diarahkan untuk memulihkan perekonomian Bali pada umumnya dan pariwisata pada khususnya. Pertemuan antara pemerintah, swasta, dan LSM di Nusa Dua Bali yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengeluarkan empat program pokok yaitu *rescue, rehabilitation, normalisation,* dan *expansion*. Tiap-tiap program direncanakan dilaksanakan tiga bulan, sehingga keseluruhan program diperkirakan berjalan selama setahun, perkiraan waktu untuk mengembalikan perekonomian Bali pada kondisi normal bahkan berkembang. Sementara wisatawan asing

belum berani datang karena ada *travel warning* dari negara mereka, pemerintah menggalakkan wisatawan domestik ke Bali dengan mengeluarkan kebijakan mendekatkan liburan-liburan awal dan tengah ke akhir minggu atau Sabtu-Minggu (*long weekend*).

Secara keseluruhan, program pemulihan yang dicanangkan pemerintah itu tidak berjalan dengan baik dan jelas. Dana yang dianggarkan dalam tiap kegiatan tidak pernah turun dengan jelas sehingga kegiatan yang direncanakan pun antara ada dan tiada. Sementara itu, kondisi pariwisata Bali bulan-bulan berikutnya setelah bomb semakin parah. Awal tahun 2003, berita-berita pemutusan hubungan kerja lewat berita media massa semakin banyak. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dari sektor pariwisata. Angka PHK pasti sulit diketahui karena pemutusan hubungan atau perumahan karyawan tidak dilakukan secara legal sehingga tidak ada catatan resmi di kantor Dinas Tenaga Kerja. Banyak pula terjadi kesepakatan voluntir antara karyawan dan pengusaha: karyawan beristirahat bekerja karena tidak ada pekerjaan sementara pengusaha berjanji untuk menarik mereka kembali kalau kondisi perekonomian normal (Darma Putra & Hitchcock 2003).

Kondisi pariwisata Bali dan Indonesia pada umumnya sempat membaik bulan Februari-Maret 2003 menyusul pulihnya situasi keamanan, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Serangan Amerika dan sekutunya ke Irak dan wabah SARS kembali membuat dunia pariwisata anjlok keras (lihat tabel 2).

Tabel 2
Kunjungan Langsung Wisatawan ke Bali

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
2001	108,897	99,040	115,997	117,040	111,115
2002	87,027	99,267	113,553	104,960	119,284
2003	60,836	67,469	72,263	53,263	7,858

Sumber: Imigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, Bali

Terjadinya Perang Teluk II dan merebaknya wabah SARS sering dijadikan alasan oleh pemerintah untuk sulitnya mengevaluasi keberhasilan keempat program yang mereka canangkan (*rescue, rehabilitation, normalisation, expansion*).

Krisis pariwisata akibat bom Bali ini menimbulkan kesadaran kuat di kalangan masyarakat Bali untuk menjaga keamanan. Hanya dengan keamanan yang mantap, pariwisata bisa bangkit kembali. Slogan "Bali Aman Turis Datang", "Bali Cinta Damai", "Bali Island of Peace" digemakan terus-menerus. Kesadaran akan pentingnya keamanan inilah yang mendorong masyarakat Bali untuk mencegah timbulnya kerusuhan, mencegah konflik horisontal dan vertikal. Pendek kata, 'keamanan' dan 'kedamaian' merupakan 'kebutuhan' hidup masyrakat Bali.

Wacana Pusat dan Daerah

Di tengah-tengah tidak jelasnya arah pelaksanaan program *recovery* Bali yang dicanangkan pemerintah, sejumlah tokoh di Jakarta dari sektor pemerintah dan swasta mengambil insiatif menggelar program pemulihan yang dijuluki "Bali for the World". Namun, slogan "Bali for the World" yang dicanangkan kelompok swasta dari Pusat menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Bali. Ini terjadi karena tokoh-tokoh yang muncul dalam kepanitian "Bali for the World" dituding sebagai orang-orang yang tidak bersih atau ornag-orang dekat dengan Orde Baru.

Warga Bali yang komplin soal ini melalui radio dan koran menyatakan bahwa mereka ragu akan ketulusan para pendukung program "Bali for the World". Dengan kata lain, "Bali for the World" itu dianggap proyek orang-orang Jakarta mencari uang dari pemerintah dan swasta atas nama Bali, bukan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan Bali. Walaupun dalam struktur kepanitian "Bali for the World" ada sub-panitia pelaksana dari Bali, pengritik tetap menganggap bahwa "Bali for the World" adalah proyek orang Pusat (Aridus 2002; Wedakarna 2002). Kecuali satu-dua orang, kebanyakan orang Bali yang diikutkan namanya sebagai panitia "Bali for the World" tidak tahu menahu tentang kegiatan itu.

Keluhan dari daerah juga diarahkan pada makna slogan "Bali for the World" itu sendiri. Bagi yang tidak setuju, maknanya makna slogan "Bali for the World" identik dengan 'Bali untuk dunia' atau Bali boleh dijual. Slogan seperti itu dianggap langkah mundur

dalam promosi kepariwisataan Bali. Alasannya, masyarakat Bali sudah sejak awal 1970-an tabu menggunakan ungkapan "Bali untuk Pariwisata", sebaliknya memilih dengan sadar slogan "Pariwisata untuk Bali". Slogan "Bali for the World" yang merupakan hasil otak-atik Pusat dianggap sama artinya dengan "Bali untuk Pariwisata". Kritik terhadap slogan ini juga disuarakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali, Prof. Dr. I Gde Pitana dalam berbagai pertemuan dan tanya-jawab dengan pers. Kritik dari wakil pemerintah ini melengkapi reaksi negatif masyarakat Bali terhadap program "Bali for the World".

Keras dan bertubi-tubinya kritik terhadap kepanitiaan dan slogan itu sempat membuat panitia Pusat "Bali for the World" untuk mengubah slogan tersebut, antara lain menjadi "Bali for the Better World". Dalam slogan baru itu ditekankan makna bahwa Bali memiliki peranan besar untuk iktu membuat dunia ini menjadi lebh baik. Namun, karena materi promosi seperti spanduk, logo yang muncul di layar TV, baju kaos, dan media massa lainnya tetap berbunyi "Bali for the World" maka perubahan slogan itu tampak di bibir saja. Sampai program itu berakhir atau diakhiri, istilah "Bali for the World" tetap muncul.

Kritik oleh masyarakat Bali juga diarahkan pada isi kegiatan "Bali for the World". Kandungan program "Bali for the World" dianggap oleh masyarakat Bali tidak ada kaitannya dengan seni budaya Bali. Program "Bali for the World" yang utama antara lain adalah pentas musik kolosal rock di halaman Hotel Kartika Plaza, yang acaranya dihadiri oleh Taufik Kiemas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, dan pejabat serta panitia Pusat lainnya. Kegiatan lainnya, berupa pameran mobil mewah, lomba jet-ski di pantai Benoa, dan pesta rakyat di pantai Kuta serta pentas musik menyambut Malam Tahun Baru 2003 yang dihadiri Presiden Megawati. Pada saat itu Presiden Megawati mencanangkan program Tahun Tanpa Kekerasan. Walaupun dalam program "Bali for the World" atau Bali *recovery* itu ada pertunjukan kesenian rakyat Bali seperti tari kecak, sebagian masyarakat Bali melihat program itu sebagai program oleh dan untuk orang Bali.

Program "Bali for the World" bukannya tidak ada artinya. Pertunjukan musik membuat orang yang semula trauma berkumpul di tempat ramai pasca-bom mulai tampak berani berkumpul. Kuta sesak sekali pada pertunjukan musik dan Malam

Tahun Baru. Orang mulai yakin pelan-pelan bahwa kondisi Kuta mulai aman. Dari segi bisnis, program "Bali for the World" berhasil mendatangkan sejumlah wisatawan domestik, yang berarti bisnis untuk hotel-hotel yang kosong dari turis mancanegara.

Mereka yang tidak setuju dengan program dan isi "Bali for the World" itu berpendapat bahwa hanya orang Balilah yang paling bisa memperbaiki citra Bali. Pernyataan ini lebih sebagai ungkapan politik identitas daripada mencerminkan kenyataan karena ternyata setelah era "Bali for the World" lewat, tidaklah ada program yang dirancang oleh masyarakat dan pemerintah Bali yang terencana dan strategi terfokus untuk memulihkan perekonomian dan pariwisata Bali. Acara Pesta Kesenian Bali yang merupakan acara tahunan setiap Juni-Juli, pada pelaksanaan tahun 2003 tidak pernah dimaksudkan sebagai program strategis untuk *recovery* Bali. Dengan demikian, reaksi negatif terhadap "Bali for the World" bisa dilihat sebagai bentuk protes Daerah terhadap dominasi Pusat. Protes ini tidak saja harus diartikan bawah Bali kurang bisa menerima identitasnya dirumuskan oleh orang lain dalam program "Bali for the World", tetapi sekaligus kuatnya keinginan Bali untuk merumuskan identitasnya sendiri.

Identitas Bali dalam Perjalanan Sejarah

Seperti halnya sejarah masyarakat etnik di mana pun di muka bumi, sejarah masyarakat Bali pun identik dengan sejarah pencarian dan rekonstruksi identitas. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, tak berubah alias statis, tetapi hal yang terus berubah dan dinamis. Identitas bukan pula *singular*, tetapi *plural*. Ada identitas kolektif, ada pula identitas personal. Perubahan identitas ditentukan oleh berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ada politik kepentingan di balik penciptaan atau penonjolan identitas seperti terlihat dalam proses rekonstruksi identitas Bali dalam sejarah.

Secara umum bisa disebutkan bahwa pada zaman kolonial, ketika semangat keindonesiaan belum melahirkan negara bangsa Indonesia, masyarakat Bali lebih sering menyebutkan diri mereka sebagai orang Bali. Hal ini bisa dilihat dari wacana dan tindakan sosial yang mereka lakukan. Tahun 1917, hampir satu dekade setelah organisasi yang kemudian bersifat nasional

Budi Utomo 1908, golongan intelektual Bali mendirikan organisasi yang disebut dengan Setiti Bali (Hiduplah Bali). Organisasi sosial ini bergerak di bidang agama (untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang ajaran dan filsafat Hindu), pendidikan, dan kesejahteraan. Organisasi ini juga memiliki motif politik, yakni untuk mengkonter kehadiran Sarekat Islam yang sebelumnya mendirikan cabang di Singaraja, Bali Utara (Picard 1999:25). Nasionalisme yang diperjuangkan Setiti Bali adalah *ethno-nationalism*. Lewat organisasi ini, mereka menonjolkan identitas mereka sebagai orang Bali, bukan orang Indonesia.

Penonjolan identitas kedaerahan juga tampak pada organisasi sosial lain yang muncul kemudian seperti Bali Adnyana dan Surya Kanta (1920-an) dan Bali Dharma Laksana serta Putri Bali Sadar (1930-an). Cita-cita dan gerakan sosial organisasi ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat Bali. Semangat nasionalisme belum muncul sekuat yang terjadi di Jawa. Hal ini bisa dipahami karena Bali yang kecil berada dalam pengawasan ketat penjajah Belanda. Kolonial waktu itu berusaha keras untuk menjadikan Bali sebagai benteng untuk mencegah meluasnya pengaruh Islam dan nasionalisme ke Bali dan Indonesia Timur (Robinson 1995). Walaupun Budi Utomo masuk ke Bali tahun 1920-an, Parindra (Partai Indonesia Raya) dan Taman Siswa tahun 1930-an, gerakan kurang menonjol di permukaan akibat represifnya kekuasaan Belanda. Wacana dominan seperti itu bisa diikuti dari majalah *Djatajoe* yang diterbitkan oleh Bali Dharma Laksana dalam bahasa Indonesia masih bersifat kedaerahan, lebih banyak membahas nasib Bali daripada nasib bangsa Indonesia (Darma Putra 2003).

Perasaan orang Bali sebagai orang Indonesia dengan identitas nasional yang mulai berbenih tahun 1930-an mulai mengental awal 1940-an, terus sampai pada perjuangan kemerdekaan, dan revolusi nasional sampai tahun 1960-an. Dalam era ini, muncul kesadaran bahwa Bali merupakan bagian dari Indonesia. Partai-partai nasional, seperti PNI, PKI, PSI yang muncul di Pusat, dengan cepat juga berkembang di Bali merupakan bukti proses asimilasinya Bali ke dalam negara bangsa Indonesia. Wacana sosial, politik, budaya yang bisa ditelusuri dalam media massa yang terbit di Bali ketika itu seperti *Suara Indonesia, Damai, Bhakti*, dan Tabloid *Harapan* tidak lagi menyuarakan kepentingan daerah seperti di era tahun 1920-an

dan 1930-an tetapi mengumandangkan semangat nasionalisme. Perhatian besar yang diberikan Presiden Sukarno terhadap Bali antara lain dengan membangun Istana di Tampaksiring dan kemudian pengakuan Hindu sebagai salah satu agama resmi akhir 1950-an, menjadikan orang Bali benar-benar diterima sebagai bagian dari Indonesia. Orang Bali pun bangga menyebutkan identitasnya sebagai orang Indonesia.

Sikap nasionalisme dikobarkan terus pada zaman Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Pada zaman ini, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan kebudayaan daerah sebagai unsur dari kebudayaan nasional seperti tampak pada proyek Taman Mini Indonesia Indah, identitas kedaerahan mulai muncul bersanding dengan identitas nasional. Promosi pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya yang bernafaskan agama Hindu telah melahirkan cara pandang baru bagi masyarakat Bali untuk melihat jati dirinya. Sukses pariwisata Bali menonjolkan pariwisata budaya membuat identitas Bali juga dirumuskan berdasarkan identitas budaya, identitas yang pernah dibangun tahun 1930-an.

Kebijakan rezim Orde Baru yang mengutamakan poembangunan ekonomi, yang di Bali tampak dalam wujud *mass tourism*, dan eksploitasi secara besar-besara dalam waktu relatif cepat, menimbulkan kegelisahan baru. Orang Bali merasa terasing di tanahnya sendiri. Banyak lahan pertanian milik petani berubah fungsi menjadi resort wisata. Pengaruh pariwisata, seperti *hippies* yang mulai muncul pertengahan 1970-an, dan pengaruh lainnya seperti komersialisasi budaya, deskaralisasi, membuat orang Bali semakin kehilangan tanahnya. Ketika Guruh Soekarnoputra menciptakan lagu "Kembalikan Baliku Padaku" awal 1990-an, masyarakat Bali seperti terbantukan mengartikulasikan kepentingan dan identitasnya. Identitas regional semakin mengental di balik kuatnya program pemerintah mempropagandakan identitas nasional.

Setelah Orde Baru jatuh, program otonomi daerah diluncurkan, landasan dan alasan untuk menonjolkan identitas etnik semakin besar. Dalam era inilah, identitas regional seperti pernah tumbuh dalam pra-kemerdekaan muncul lagi. Perbedaannya, kalau di era kolonial kedaerahan diutamakan sebagai konformitas terhadap kekuasaan kolonial, sedangkan zaman era reformasi, identitas kedaerahan menguat sebagai

bagian dari kebijakan negara dalam menjalankan proses demokratisasi-politik lewat otonomi daerah. Sensitivitas etnik dan agama sangat menonjol di Indonesia, demikian juga Bali. Makanya, ketika calon presiden Megawati dipertanyakan keabsahannya menjadi Presiden Indonesia karena bersembahyang di pura (berarti pemeluk Hindu) oleh lawan politiknya AM Saefuddin, orang Bali pun tersinggung. Mereka merasa Hindu telah dilecehkan. Ketika itu, Oktober 1998, demonstrasi pun meletus di Bali yang melontarkan kata-kata "Bali Merdeka". Wacana separatisme ini sangat mengagetkan (karena tidak pernah muncul sebelumnya) dan mengerikan karena mengasumsikan adanya susulan gerakan kekerasan seperti di Timor Timur, Aceh, dan Papua.

Di tengah-tegah kentalnya usaha untuk membangun identitas etnik, kekhawatiran juga muncul di kalangan masyarakat Bali sebagai kelompok minoritas sehingga menguatkan identitas nasional menjadi sebuah urgensi juga. Dalam konteks ini wacana "Bali Merdeka" kurang signifikan dan akhirnya kemudian tenggelam di samudra ketidakmungkinan (Vickers 2000). Sebagai wacana, "Bali Merdeka" dan wacana lain yang mendahuluinya, merupakan arena negosiasi pengakuan politik dan identitas Bali di tingkat nasional.

"Ajeg Bali" dan Rekonstruksi Identitas Budaya

Pasca-bom, masyarakat Bali kembali merekonstruksi identitasnya berdasarkan formula adat, budaya, dan agama seperti tertuang dalam ungkapan "Ajeg Bali". Slogan "Ajeg Bali" merupakan istilah yang paling populer dalam beberapa bulan terakhir ini di Bali. Radio, televisi, koran, seminar, diskusi, pidato pejabat, dan publik setiap hari mendengungkan dan menyelipkan pemakaian kata "Ajeg Bali".

Kapan istilah "ajeg Bali" ini pertama kali muncul, tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas, ungkapan atau slogan ini dicetuskan, dipopulerkan, dikawal, dan digunakan oleh kelompok media *Bali Post* yang pada Mei 2002 mendirikan stasiun TV lokal yang diberi nama *Bali TV*. Visi dan misi TV ini adalah untuk melestarikan adat dan budaya Bali. Gubernur Bali Dewa Made Beratha, dalam pidatonya saat peresmian berdirinya *Bali TV*, 26 Mei 2002, dikutip mengatakan bahwa "misi dan visi Bali TV yang sangat mulia yaitu mengembangkan dan mengajegkan adat dan

budaya Bali ditambah dengan pariwisata Bali". Sejak inilah kira-kira kata-kata "Ajeg Bali" mulai populer, terutama dalam konteks kultural.

Dalam rangka menyambut HUT ke-55 *Bali Post*, 18 Agustus 2003, koran ini menyelenggarakan diskusi bertema "Ajeg Bali". Topik-topik agama, seni, budaya, politik, pariwisata, ekonomi dibahas dalam diskusi-diskusi terpisah sebelum akhirnya diskusi 'pleno' membahas semua topik itu dalam satu kesatuan dalam konteks "Ajeg Bali". Hasil seminar sudah diterbitkan ke dalam buku *Ajeg Bali Sebuah Cita-cita* (2003) dan *Bali Menuju Jagadhita, Aneka Perspektif* (2004), yang menyarankan bahwa 'ajeg Bali' bukanlah konsep stagnan, tetapi cita-cita dan strategi yang terus harus diperjuangkan untuk membuat Bali sejahtera. Kedua buku ini dan satu buku lagi yang berjudul *K. Nadha, Sang Perintis* (2001), dijadikan suvenir untuk tamu-tamu penting yang berkunjung ke kelompok media Bali Post atau dibagikan kepada undangan dalam acara-acara tertentu. Ketiga buku itu sepertinya menjadi buku 'official' tentang sejarah, perjuangan, pemikiran, cita-cita, dan komitmen kepada Bali dan Indonesia dari kelompok media Bali Post.

Publikasi yang tak henti-hentinya tentang istilah :ajeg Bali" mendorong berbagai pihak untuk menafsirkan makna kata itu. Banyak juga yang mempertanyakan arah strategi "Ajeg Bali". Apakah hendak melestarikan kekakuan sistem kasta, apakah akan mendorong masyarakat untuk melakukan banyak ritual tanpa memahamifilsafat Hindu, apakah menjadikan Bali seperti *tempo doeloe*, atau menjadikan Bali sebagai museum. Mereka menganggap bahwa makna "Ajeg Bali" terlalu statis.

Pihak pencetus dan pengawal gagasan "ajeg Bali", dalam hal ini *Bali Post*, tidak mematok penafsiran mati, buktinya dalam diskusi-diskusi banyak pihak yang menyimpulkan bahwa "Ajeg Bali" bukanlah Bali yang stagnan, macet, tetapi yang kuat dan kokoh menghadapi perubahan-perubahan baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dlam buku *Ajeg Bali Sebuah Cita-cita* (2003), Direktur Utama KMB Bali Post, Satria Naradha menepis kekeliruan penafsiran konsep "ajeg Bali". Dia menulis:

Banyak yang berpendapat "Ajeg Bali" adalah mengembalikan Bali seperti jaman dulu. Jelas ini tak mungkin, dan bahkan tak diinginkan. Kami berpandangan Bali yang ajeg adalah Bali yang terbangun secara seimbang (2003:iii)

Bagi pihak *Bali Post*, yang penting dalam pembangunan Bali ke depan adalah komitmen untuk keseimbangan. Keseimbangan itu meliputi pembangunan manusia, lingkungan, budaya dan agama. Dalam hal budaya, misalnya, Bali menghadapi tantangan konsumerisme, komersialisme, dan komoditifikasi. Mewujudkan ajeg Bali tidak bisa dilepaskan dari upaya menghentikan budaya konsumerisme.

Setelah ledakan bom Bali, penggunaan slogan "Ajeg Bali" makin santer sehingga ungkapan yang semula bernuansa kultural menjadi bernuansa kultural dan politik. Hal ini terlihat dari langkah pihak *Bali Post* membuat prasasti "Ajeg Bali" yang ditandatangani oleh para pemimpin di Bali, mulai dari Gubernur Bali, para bupati/ walikota, ketua DPRD, dan Kapolda. Penandatanganan ini bisa dilihat sebagai langkah politik pemimpin Bali untuk melestarikan kebudayaan dan menjaga keamanan Bali. Makna "Ajeg Bali" mulai melebar dari kultural menjadi kultural dan politik. Prasasti yang ditandatangani itu sudah dipasang di salah satu pilar wantilan Gedung Pers Bali K. Nadha.

Perluasan makna "Ajeg Bali" juga terjadi dari konteks lokal ke konteks nasional. Hal ini misalnya terlihat ketika setelah *pangelingsir* (orang yang dituakan) *Bali Post* Ibu Desak Gde Raka Nadha, saat resepsi peringatan HUT ke-55 *Bali Post*, mengaitkan cita-cita "Ajeg Bali" dengan semangat Proklamasi 45, yakni mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dimensi nasional wacana "Ajeg Bali" mulai tampak ketika sejumlah tokoh politik Golkar seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jusuf Kalla, dan Setiawan Djody, berkunjung ke gedung Bali TV serangkaian program konvensi Partai Golkar bulan September 2003. Sebagai salah satu bakal calon Presiden konvesni Partai Golkar, yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ikut menyatakan komitmennya untuk mengajegkan Bali. Dalam lempeng prasasti, beliau menulis "Mari Kita Ajegkan Bali dan Jaga Persatuan dan Kesatuan dengan Semangat Bhineka Tunggal Ika" ("Sri Sultan HB X Nyatakan Komitmennya di Bali", *Bali Post*, 14 September 2003, p.1). Prasasti yang ditandatangani itu berbeda dengan yang ditandatangani para pemimpin Bali.

Selain Sri Sultan, tokoh konvensi Partai Golkar seperti Jusuf Kalla dan Ruslan Abdulgani, juga menandatangani prasasti dengan pesan-pesan nasionalisme. Penandatanganan ini tidak

saja berarti keuntungan *public relation* bagi kelompok media *Bali Post*, tetapi juga mengangkat wacana lokal Bali ke tingkat yang lebih luas. Partai Golkar menggunakan slogan "Ajeg Bali" dalam acara peringatan HUT Partai Golkar di Bali, 25 Oktober 2003. Sebuah spanduk besar bertuliskan "Ajeg Bali Dambaan Golkar" tertulis di lapangan Kapten Japa, tempat peringatan HUT yang menampilkan penyanyi dangdut Inul Daratista digelar. Sampai di sini jelas terlihat bahwa "Ajeg Bali" terus bergulir menjadi komoditas politik.

Pihak *Bali Post* sendiri telah membuktikan perannya untuk mencegah terjadinya konflik dalam proses pemilihan Gubernur Bali Agustus 2003. Pada saat itu, ada dua calon yang muncul, yakni bakal calon kader yang didukung massa PDIP Bali dan non-kader yang mendapat rekomendasi dari DPP. Beberapa minggu menjelang pemilihan, situasi di Bali agak memanas karena kedua pihak tampaknya akan ngotot maju dengan keyakinan masing-masing. Saat itu, masyarakat sudah mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi konflik di Bali, karena itu tidak ada gunanya dan dapat merugikan citra Bali dalam konteks pariwisata. Di sinilah *Bali Post* memainkan peranannya untuk mendamaikan bakal calon gubernur kader dan non-kader dengan menggunakan strategi "Ajeg Bali". Perdamaian tercapai, dan kerusuhan seperti di Semarang menyusul penolakan bakal calon gubernur kader PDIP oleh DPP tidak sampai terjadi di Bali.

Upaya *Bali Post* dengan program "Ajeg Bali"-nya sangat positif karena mampu mencegah konflik, namun di lain pihak ada analisis yang menyebutkan bahwa *Bali Post* terlalu ikut campur dalam proses kompetisi politik yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu. Jika motif ini diabaikan sejenak, akan terlihat bahwa konsep "Ajeg Bali" merupakan kearifan dan kekuatan lokal untuk menjaga daerahnya, sesuatu yang tidak bisa diharapkan banyak dari Pusat.

Bagi orang Bali kebanyakan, konsep "Ajeg Bali" bisa berarti macam-macam. Pertama, merupakan ungkapan untuk menyatakan identitas, terutama identitas etnik dan budaya. Kedua, sebagai strategi untuk menyaring pengaruh budaya luar yang dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai budaya Bali. Ketiga, berarti cita-cita untuk menjadikan Bali tenang, aman, dan damai.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa strategi atau slogan "Ajeg Bali" tidak selalu menjadi prevensi dari konflik yang ada

terutama dalam konteks politik. Buktinya, akhir Oktober 2003, ketika slogan "Ajeg Bali" sedang hangat-hangatnya sebagai wacana dan landasan identitas Bali, konflik dan kekerasan antara pendukung partai PDIP dan Golkar meletus di Tabanan, Buleleng, dan Denpasar. Pengrusakan posko partai terjadi, pembakaran kantor, dan pembunuhan tidak terhindarkan. Minggu, 26 Oktober 2003, menjadi hari berdarah di Buleleng di mana dua orang pendukung partai Golkar meninggal karena diserang massa pendukung PDIP.

Peristiwa ini menjadi isu nasional bahkan mendapat liputan luas secara internasional. Bali yang baru saja sukses menjaga keamanan ketika menjadi tuan rumah KTT ASEAN (awal Oktober) dan kunjungan singkat George Bush (minggu ketiga Oktober), ternyata tidak lama kemudian dilanda konflik internal berlatarbelakang partai. Banyak pihak menganalisis kekerasan di Tabanan dan Buleleng adalah sisa masalah lama pertikaian antara pendukung PNI/PDI/PDI-P dengan Golkar yang sudah meletup sejak awal 1970-an. Dampak positif dari kerusuhan Buleleng adalah mulai sadarnya elit politik, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik lagi, mulai menebalnya kesadaran bahwa bagi Bali kedamaian adalah kebutuhan. Dari sudut pandang pariwisata, kerusuhan Buleleng dan Tabanan sangat dikhawatirkan menurunkan kunjungan wisatawan ke Bali.

Dalam kampanye Pemilu Presiden 5 Juli 2004, para elite politik juga datang ke gedung Bali TV untuk menandatangani prasasti "Ajeg Bali". Presiden Megawati pun, mungkin dalam kapasistas sebagai Capres, berkunjung ke Bali TV 2 Juli 2004 (setelah masa kampanye berakhir 1 Juli), dan menandatangani Presasti Ajeg Bali. Dalam prasasti itu, Megawati menuliskan ajakan "Mari Kita Ajegkan Bali, Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika". Keesokan harinya, koran *Bali Post*, mempublikasikan berita itu di halaman I dengan foto berwarna ukuran besar. Kuat dugaan, selain untuk menyatakan komitmen, para elit politik yang datang ke Bali Tv dan bersedia menandatangani prasasti adalah juga untuk mendapat dukungan media massa, karena kelompok media Bali Post menguasai hampir sepenuhnya kekuatan media massa di Bali (radio, tv, koran).

Sukses dan damainya pelaksanaan Pemilu Legislatif 5 April dan Pemilu Presiden (putaran Pertama) 5 Juli 2004, bisa

dikatakan karena kesadaran politik masyarakat Bali yang tumbuh antara lain berkat 'pupuk semangat' Ajeg Bali. Kesadaran politik itu berkait erat dengan tekad menjaga Bali demi lancarnya industri pariwisata.

Kesimpulan

Seperti terungkap dalam uraian di atas, di era reformasi ini, Bali tidak ubahnya dengan daerah lain yang ikut menikmati euforia politik reformasi dan kompleksitas proses otonomi daerah. Seperti halnya di daerah-daerah lain, di Bali pun meletus tindakan kerusuhan, kekerasan, dan demonstrasi. Perbedaannya, kerusuhan atau konflik di Bali tidak sedahsyat atau segawat di daerah lain. Kerusuhan spontan seperti yang terjadi Oktober 1999 setelah gagalnya Megawati meraih kursi kepresidenan, dengan cepat terredam. Konflik antar-etnik yang dikhawatirkan akan muncul setelah ledakan bom Bali 12 Oktober 2002 dan setelah pengetatan administrasi masuknya para pendatang terutama dari Jawa, juga tidak terbukti. Begitu juga dengan kerusuhan Tabanan dan Buleleng yang sangat cepat mendapat penanganan aparat keamanan sehingga tidak meluas dan berlanjut walau potensi ke arah itu belum lenyap sama sekali.

Faktor penting yang dapat mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik adalah tingginya kesadaran masyarakat Bali bahwa perekonomian daerahnya sangat tergantung pada industri pariwisata. Keamanan dan stabilitas sosial politik merupakan prasyarat utama kelancaran roda pariwisata. Masyarakat Bali tidak mau lagi ada kerusuhan di daerahnya, karena kalau itu terjadi, mereka akan mengalami kerugian. Kesadaran seperti ini juga muncul di Lombok menyusul anjloknya industri pariwisata mereka setelah terjadi kerusuhan tahun 2000 di daerah tersebut. Masyarakat Bali sadar bahwa sedikit saja kekacauan terjadi di daerahnya, berita negatif akan segera menyebar ke seluruh dunia. Berita seperti itu menjadi promosi negatif sektor pariwisata. Sadar akan hal itu, maka masyarakat Bali, terlepas dari latar belakang etnik dan agamanya, memegang teguh paham bahwa "Bali Aman, Turis Datang". Faktor ekononis pragmatis ini didukung oleh faktor nilai sosio-religious.

Walaupun Bali absen dari konflik, bukan berarti ketegangan antar-etnik pribumi dan pendatang, mayoritas dan minoritas tidak ada. Ketegangan itu harus diakui tetap ada, hanya saja tidak

sampai meledak ke permukaan, karena dominannya faktor-faktor pragmatis-ekonomis, tingginya kesadaran bahwa keamanan dan kedamaian adalah kebutuhan.

Belajar dari beberapa kerusuhan terdahulu di Bali dan konflik antar-etnik yang berkepanjangan yang merebut korban jiwa di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Bali lalu menjadikan wacana "Ajeg Bali" sebagai strategi pengelolaan krisis dan mencegah konflik dan kekerasan. Dalam wacana "Ajeg Bali" yang dicetuskan dan "dikawal" oleh kelompok media *Bali Post*, terkandung makna, seperti ditafsirkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Presiden Megawati Soekarnoputri, menjaga Bali sebagai bagian dari usaha untuk menjaga bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam wacana "Ajeg Bali" tidak saja identitas budaya daerah (*regional cultural identity*) Bali yang terakomodasi tetapi juga cita-cita nasional bahkan internasional mengingat keamanan Bali ikut menjadi barometer keamanan Indonesia dan dunia. Pasca-bom Bali, slogan Ajeg Bali menjadi substansi penting dalam *crisis management* di Bali untuk mencegah terjadinya konflik dan anarkisme.

***

Daftar Pustaka

Aridus
2002 "Bali loved by the world", *Bali Post* (on line), 22 December 2002.

Couteau, Jean
2003 "After Kuta Bombing: In Search if the Balinese Soul", *Antropologi Indonesia 70*, pp. 41-59.

Darma Putra, I Nyoman dan Michael Hitchcock
2003 "Tourism and Inter-Ethnic Relations in the Aftermath of the Bali Bombings". Akan terbit.

Darma Putra, I Nyoman
2003 "A Literary Mirror, Balinese Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth Century". Thesis Doktor The University of Queensland.

Darma Putra, I Nyoman (ed)
2004 *Bali Menuju Jagadhita, Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Picard, Michel
1999 "The Discourse of Kebalian: Transcultural Constructions of Balinese Identity", in Raechelle Rubinstein and Linda Connor (eds) *Staying Local in the Global Village, Bali in the Twentieth Century*, pp.15-49 Honolulu: University of Hawaii Press.

Putra, Dwikora
2001 *K. Nadha, Sang Perintis*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Robinson, Geoffrey
1995 *The Dark Side of Paradise, Political Violence in Bali*. Ithaca: Cornell.

Rubenstein, Raechelle
1996 "Allegiance and Alliance: The Banjar War of 1986", in Adrian Vickers (ed.) *Being Modern in Bali, Image and Change*, pp. 39-170. Monograph 43/Yale Southeast Asia Studies.

Satria Naradha, ABG
2003 *Ajeg Bali, Sebuah Cita-cita*. Denpasar: Bali Post.

Schulte Nordholt, Henk. 1994. "The Invented Ancestor, Origin and Descent in Bali", in *Texts from the Island, Ethnologica Bernensia* (4), pp. 245-64.

Sulistyo, Hermawan (ed).
2002 *Bom Bali, Buku Putih tidak Resmi Investoigasi Terror Bom Bali*. Jakarta: Pensil-324.

Vickers, Adrian
2000 "Bali Merdeka? Internal Migration, Tourism and Hindu Revivalism", paper presented at the Society for Balinese Study Conference to Honour Professor Hildred Geertz, Denpasar, 10-13 July.

———
2003 "Being Modern in Bali after Suharto", in Thomas A. Reuter (ed.) *Inequality, Crisis and Social Change in Indonesia: The Muted Worlds of Bali*, pp. 24-43. London: RoutledgeCurzon.

Wedakarna, AA Ngrh Arya M Wedasteraputra Suyasa
2002 Mempertanyakan aksi: Bali for the world. *Bali Post* (on line), 22 December 2002.

ETNOSAINS DAN ETNOTEKNOLOGI WAWASAN BUDAYA UNTUK PEMBERDAYAAN PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ETNIK/LOKAL

Oleh: **Heddy Shri Ahimsa-Putra**

ABSTRAK

Dalam makalah ini penulis memaparkan sebuah paradigma dalam Antropologi Budaya yang dianggap sangat strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan pengetahuan dan teknologi yang ada pada tingkat lokal atau dimiliki oleh suatu sukubangsa tertentu, yakni paradigma Etnosains dan Etnoteknologi.

Pendekatan ini sangat relevan untuk situasi dan kondisi di Indonesia kini. Setelah sekian lama pengetahuan dan teknologi lokal/etnik terabaikan karena kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada pengadopsian teknologi tinggi yang berasal dari negara-negara maju, sekarang merupakan saat yang tepat untuk menengok, mempelajari, mengembangkan dan memberdayakan khasanah pengetahuan dan teknologi lokal/etnik yang telah puluhan bahkan ratusan tahun menjadi tumpuan berbagai sukubangsa di Indonesia untuk melestarikan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Selain uraian mengenai paradigma, makalah ini juga memuat: (1) pandangan penulis tentang cara dan strategi untuk menggali, mengembangkan dan memberdayakan pengetahuan serta teknologi lokal/etnik; (2) peran ilmuwan sosial-budaya dalam proses pemberdayaan tersebut; dan (3) hasil yang mungkin diperoleh dari pemberdayaan ini.

'Every human being knows his own world better than any outsider (including the expert who makes policy)"

"Those who are the objects of policy should have the opportunity to participate not only in specific decisions but in the definitions of the situation on wich these decisions are based. This may be called cognitive participation"

(Peter Berger, "Pyramids of Sacrifice": xii).

I. Pengantar.

Berbagai buku telah di tulis mengenai pembangunan dan kebudayaan ini (lihat Budhisantoso, 1989; Colletta dan Kayam, 1987: Koentjaraningrat, 1974; Masinambow dan Henen, 1994; Nordholt, 1987; Ufford, 1988). Dari berbagai hasil kajian ilmiah ini terlihat bahwa kajian yang betul-betul memusatkan perhatian pada persoalan pengembangan teknologi dan pengetahuan serta kaitannya dengan kebudayaan boleh dikatakan masih sangat sedikit, untuk tidak mengataknnya tidak ada. Sebaliknya, di Barat kajian mengenai masalah pengembangan teknologi dan perubahan kebudayaan sudah banyak sekali dilakukan. Sekedar contoh adalah beberapa buku dari Bernard dan Pelto (1972), Foster (1973), dan Spicer (1952), yang banyak mengulas masalah perubahan teknologi dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan kebudayaan mereka.

Di Indonesia, persoalan pengembangan teknologi yang lebih didasarkan pada kehidupan masyarakat di Indonesia mulai banyak mendapat perhatian pada akhir tahun 1970an, ketika pembangunan yang banyak dilakukan di Indonesia ternyata lebih diwarnai oleh impor teknologi tinggi dari Barat. Hal ini menimbulkan dua dampak yang merugikan, yakni: (1) terabaikannya pengetahuan dan teknologi etnikal/lokal yang selama ini menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dengan lingkungannya; (2) terdesaknya pengetahuan dan teknologi etnik/lokal oleh pengetahuan dan teknologi dari luar; (3) munculnya berbagai masalah sosial-budaya yang mencakup menggelisahkan (lihat misalnya Tjitadjaja, 1989) ketika teknologi tinggi ini masuk menjadi bagian kehidupan masyarakat yang merasa asing dengan teknologi tersebut.

Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, dan tidak sedikit yang mengusulkan dikembangkannya teknologi yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi budaya masyarakat-masyarakat lokal atau suku-suku bangsa yang masih sederhana di Indonesia (lihat Birowo,1979 Kartodirdjo, 1979; Rahardjo,1979). Sayangnya, pemikiran-pemikiran semacam itu kurang mendapat perhatian dan mengalami kendala serius dalam penerapannya, karena tidak dikenalnya paradigma dalam ilmu sosial-budaya yang dapat mendukung pemikiran semacam itu.

II. Etnosains (Ethnoscience) dan Etnoteknologi.

Istilah *ethnoscience* berasal dari kata *ethnos* dari bahasa Yunani yang berarti "bangsa" dan kata *scientia* dari bahasa Latin yang berarti "Pengetahuan" (Werner and Fenton, 1970:537). Etnosains kurang lebih berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau lebih tepat lagi suatu sukubangsa atau kelompok sosial tertentu.

Strutevant (1961:99) mendefinisikannya sebagai"system of knowledge and cognition typical of a given culture". Penekannannya disini adalah pada sistem atau perangkat pengetahuan, yang merupakan pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat, karena berbeda dengan pengetahuan masyarakat yang lain.

Sebagai sebuah paradigma etnosains menggunakan definisi kebudayaan yang berbeda dengan paradigma-paradigma lain dalam antropologi budaya, yaitu definisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Goodenough, yakni bahwa kebudayaan bukanlah fenomena atau gejala material. Kebudayaan "does not consist of things, people, behavior or emotions. It is rather the organisation of these things. It is the froms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating and otherwise interpreting them as such. The things that people say and do, their social arrangement and events are products or by products of their culture as they apply it to the task of perceiving and dealing with their circumstances" (1964:36).

Dengan kata lain kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai ".. whatever it is one has to know or belive in order to operate in a menner acceptible to its members, and do so in any role that they accept for any one of themselves. Culture, being what people have to learn as distinct from their bilogical heritage must consist of the end product of learning: knowledge.."(1964:36)

Definisi lain yang senada dan telah memberikan sumbangan pada munculnya kajian-kajian yang ethoscientific adalah definisi kebudayaan dari Frake, yang merumuskan kebudayaan sebagai "a set of principles for creating dramas, for writing scripts, and of course, for recruiting players and audiences ...Culture is not simply a cognitive map that people acquire, in whole or in part, more or less accurately, and then learn to read. People are not just map-readers; they are map-makers... Culture does not provide a cognitive map, but rather a set of principles for map making and navigation. Different cultures are like diffrent schools

of navigation designed to cope with different terrain and seas" (Frake, 1977 : 6-7, dikutip dari Spradley, 1979: 7).

Dari rumusan-rumusan tentang kebudayaan di atas, kita dapat mengidentifikasi tiga hal yang kemudian menjadi topik-topik kajian dan memunculkan sebuah aliran pemikiran, sebuah paradigma, paradigma etnosains.

Jenis kajian yang pertama memusatkan perhatian pada kebudayaan yang didefinisikan sebagai **"the froms of things that people have in mind, their models for perceiving"**, yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai model-model untuk mengklasifikasi lingkungan atau situasi sosial yang dihadapi. Penelitian etnosains di sini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala materi mana yang dianggap penting oleh warga suatu kebudayaan dan bagaimana mereka mengorganisir berbagai gejala tersebut dalam sistem pengetahuan mereka. Bilamana ini dapat diketahui maka akan terungkap pula berbagai prinsip yang mereka gunakan untuk memahami lingkungan dan situasi yang dihadapi, yang menjadi landasan bagi tingkah-laku mereka (Tyler, 1969:3).

Setiap masyarakat, sukubangsa atau kelompok sosial tertentu pada dasarnya membuat klasifikasi yang berbeda atas lingkungan yang sama. Dengan mengetahui pengkategorisasian berbagai macam gejala dalam lingkungan ini akan dapat diketahui juga 'peta kognitif' dunia dari suatu masyarakat tertentu (Frake, 1962:75). Disisni peneliti berusaha mengungkap struktur-struktur yang digunakan untuk mengklasifikasi lingkungan, baik itu fisik maupun sosial. Dari berbagai studi etnosains tumbuh-tumbuhan, klasifikasi berbagai jenis bintang, kalsifikasi jenis-jenis penyakit, klasifikasi warna dan sebagainya.

Jenis kajian yang kedua mengarahkan perhatian pada **kebudayaan** sebagai **"whatever it is one has to know or belive in order to operate in manner acceptable to its members"** atau hal-hal yang harus diketahui oleh seseorang agar dia dapat mewujudkan perilaku atau melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diterima oleh pendukung kebudayaan tersebut. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah cara-cara, aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, yang membolehkan atau melarang, serta mengarahkan atau menunjukan bagaimana suatu hal-yakni pengembangan teknologi yang sudah dimiliki harus atau sebaliknya dilakukan dalam konteks suatu kebudayaan tertentu. Misalnya saja, cara bersawah yang baik

menurut pandangan orang Jawa, cara membangun sebuah kampung yang tepat menurut pandangan orang Bali, cara membuat perahu yang benar menurut orang Bugis dan sebaginya.

Jenis kajian yang ketiga memusatkan perhatian pada **kebudayaan** sebagai **"a set of principles for creating dramas, for writing scripts, and of course, for recruiting players and audiences"** atau seperangkat prinsip-prinsip untuk menciptakan, membangun peristiwa, untuk mengumpulkan individu-individu atau orang banyak. Penelitian mengenai prinsip-prinsip yang mendasari berbagai macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dengan fokus pada prinsip-prinsip ini memang agak dekat dengan jenis kajian yang kedua di atas, namun tetap berbeda. Prinsip-prinsip yang ditemukan dalam studi ketiga ini pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip yang tidak disadari keberadaanya, atau berada pada tataran nirsadar.

Tiga jenis penelitian di atas merupakan jenis penelitian yang banyak dilakukan dalam Etnosains. Hasil-hasil penelitian semacam ini tampaknya memang teoritis, meskipun demikian tidak sedikit diantaranya yang kemudian sangat besar manfaat praktisnya, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk memasukan unsur-unsur teknologi dan pengetahuan baru ke dalam suatu, masyarakat dengan maksud meningkatkan teknologi dan hasil aktivitas ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Berbagai jenis etnosains yang telah berhasil diteliti dan dideksripsikan oleh para ahli antropologi mencakup antara lain : jenis-jenis tanah, jenis-jenis binatang, jenis-jenis tanaman obat, dan jenis-jenis tumbuhan tertentu.

Dalam filsafat ilmu pengetahuan, istilah "sains" atau ilmu pengetahuan dibedakan dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode tertentu serta mengikuti tata urut tertentu dalam mendapatkannya. Setelah diperoleh, pengetahuan ini harus dapat diuji kebenarnnya oleh orang-orang lain, sehingga "kebenaran" pengetahuan ini tidak akan lagi bersifat subyektif, tetapi inter subyektif. Atas dasar pengertian semacam ini maka **etnosains** dapat kita definisikan sebagai **perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/sukubangsa yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu serta mengikuti**

prosedur tertentu yang merupakan bagian dari "tradisi" mereka, dan "kebenarannya" dapat diuji secara empris.

Dengan makna etnosains seperti itu maka **etnoteknologi (etnotek)** di sini dapat diartikan **sebagai keseluruhan peralatan yang memiliki suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu dalam berhadapan dengan situasi dan lingkungan tertentu**.Etnotek ini dihasilkan dan dikembangkan oleh masyarakat atau kelompok sosial itu sendiri, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang relatif lama. Dalam konteks ini etnosains dan etnotek merupakan sistem pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh suatu masyarakat , sukubangsa, kelompok sosial tertentu, yang umumnya mempunyai ciri-ciri khusus tertentu yang membedakannya dengan sistem pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yang lain.

Dengan menggunakan paradigma Etnosains-Etnotek maka akan dapat dicapai dua hal penting, yang semuanya merupakan pengejawantahan dari pengembangan dan pemberdayaan "kebudayaan" sebagai perangkat pandangan hidup, perangkat pengetahuan, yakni: (1) Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Budaya; (2) Pemberdayaan Pengetahuan dan Teknologi Etnik/Lokal.

III. Wawasan Budaya dan Pengembangan Teknologi.

Berdasarkan atas uraian mengenai paradigma Etnosains di atas, yang dalam antropologi kadang-kadang dikatakan sebagai paradigma Budaya, kita dapat merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi berwawasan budaya" serta strategi-strategi atau siasat-siasat untuk pemberdayaannya di Indonesia. Konsep yang penting di sini adalah: pengembangan, teknologi, berwawasan, budaya dan pemberdayaan. Kita perlu menjelaskannya satu-persatu.

Kata "pengembangan" menyiratkan bahwa apa yang dikembangkan disitu sudah ada atau sudah dimiliki terlebih dahulu. Jika kita mengembangkan sesuatu, hal itu berarti kita menambahkan atau mengubah sesuatu yang sudah kita miliki menjadi sesuatu yang lebih baik dalam hal kualitasnya. Jika ini adalah sebuah teknologi, maka teknologi ini harus sudah terlebih dulu menjadi milik kita. Dalam konteks Indonesia ini dapat berupa teknologi "tradisional". Jadi pengembangan disini adalah segala

upaya untuk mengubah hal yang sudah dimiliki menjadi lebih baik kualitasnya.

Konsep " teknologi" dapat didefinisikan di sini sebagi keseluruhan peralatan yang dimiliki beserta pengetahuan tentang pemakainya, yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ketika manusia ingin memanfaatkan unsur-unsur tertentu dari lingkungan fisiknya. Peralatan fisik saja tanpa pengetahuan mengenai kegunaan dan penggunaanya tidak dapat kita masukkan ke dalam kategori "teknologi" disini. Dia hanya benda, barang.

Istilah "berwawasan" yang artinya memiliki wawasan, memiliki pandangan, dapat dimaknai sebagai perspektif, sudut pandang, atau paradigma. Dengan demikian "berwawasan budaya" berarti menggunakan sudut pandang budaya, paradigma budaya atau kebudayaan. Kejelasan dari wawasan budaya ini baru akan lebih terlihat bilamana kita membandingkannya dengan wawasan yang lain, misalnya wawasan ekonomi, wawasan hukum, wawasan keamanan, dan sebagainya.

Istilah "budaya", yang dalam hal ini tidak dibedakan maknanya dengan "kebudayaan ", diartikan sebagi perangkat pengetahuan yang digunakan manusia untuk memahami lingkungan dan situasi yang dihadapinya, serta dalam digunakan untuk membimbingnya mewujudkan perilaku yang dipandang tepat dalam lingkungan dan situasi tersebut. Perangkat pengetahuan ini diperoleh manusia lewat dan dari proses sosialisasi serta dari pengalamannya berhadapan dengan lingkungannya sehari-hari.

Pengembangan teknologi berwawasan budaya dengan demikian dapat diartikan sebagai segala upaya untuk mengubah peralatan tersebut menjadi lebih baik kualitasnya dengan menggunakan pengetahuan masyarakat (sukubangsa) lokal yang telah ada sebagai dasarnya dan pengetahuan baru dari luar sebagai pendorong proses pengubahan tersebut. Pengetahuan ini mencakup tidak hanya berbagai klasifikasi mengenai unsur-unsur fisik lingkungan, tetapi juga aturan-aturan , norma-norma, nilai-nilai serta berbagai pandangan hidup yang membimbing, mengandalikan serta menentukan perwujudan perilaku serta tindakan terhadap lingkungan. Jadi juga meliputi larangan-larangan, keharusan-keharusan, serta berbagai pandangan

tentang baik dan buruk, yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari.

IV. Pemberdayaan Pengetahuan dan Teknologi Etnik/ Lokal.

Pemberdayaan di sini didefinisikan sebagai segala usaha untuk membuat sesuatu lebih besar fungsi atau sumbangannya terhadap yang lain. Oleh karena itu, pemberdayaan pengetahuan dan teknologi etnik/lokal dapat dimaknai sebagai segala usaha untuk membuat pengetahuan dan teknologi etnik/lokal menjadi lebih berdaya, lebih mampu, lebih banyak memberikan sumbangan dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dan mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.Untuk melakukan pemberdayaan dibutuhkan pengetahuan semacam ini belum dimiliki, maka langkah pertama yang mungkin atau harus dilakukan adalah dengan melaksanakan penelitian-penelitian untuk memperoleh dan menghimpun pengetahuan tersebut.

Penelitian ini perlu dilakukan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang cocok untuk jenis obyek yang diteliti serta sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini metode penelitian Etnosains merupakan metode penelitian yang paling sesuai dengan tujuan pemberdayaan di sisni. Dengan menggunakan paradigma Etnosains dan Etnotek, peneliti akan mencoba memahami teknologi yang ada dari sudut pandang *tineliti* (orang yang diteliti). Sebuah perangkat teknologi pada dasarnya merupakan perwujudan dari perangkat nilai, norma serta pandangan hidup dalam suatu kebudayaan. Penelitian lewat perspektif Etnosains akan memungkinkan peteliti mengungkap nilai dan pandangan hidup ini.

Perangkat teknologi pada dasarnya juga merupakan hasil dari upaya-upaya manusia untuk memanfaatkan unsur-unsur tertentu dari lingkungan fisik yang dihadapinya. Teknologi merupakan hasil interaksi antara pengetahuan tentang lingkungan dengan pengetahuan mengenai unsur-unsur dunia fisik yang dapat di gunakan untuk memanfaatkan lingkungan tersebut. Di sini dimensi-dimensi lingkungan fisik serta teknologi yang dipandang penting oleh penciptanya, pemakaiannya perlu diketahui dengan baik, jika teknologi ini ingin dikembangkan dan diberdayakan lebih lanjut.

Perspektif Etnosains-Etnotek akan sangat membantu peneliti dalam upaya-upaya pemberdayaan ini, sebab melalui perspektif ini peneliti akan dapat mengetahui dimensi-dimensi apa saja dari lingkungan dan teknologi yang dimiliki, yang dianggap penting oleh masyarakat pendukungnya. Pengembangan teknologi dan pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman tentang dimensi-dimensi ini akan dapat membuat teknologi dan pengetahuan yang dikembangkan dari situ tidak akan terlalu asing nantinya, karena di sini telah terjadi "partisipasi kognitif" sebagaimana yang dimaksudkan oleh Berger.

Pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek membutuhkan kerja sama yang erat antara "ilmuan etnik/lokal" dengan ilmuan sosial-budaya dan ilmuan fisik. Dalam hal ini, ahli-ahli antropologi dengan spesialisasi etnosains sangat diperlukan spesialisasi keterlibatnnya, karena mereka inilah yang akan menjadi "jembatan" antara dua jagad pemikiran "modern science and technology". Para ethnoscientists inilah yang harus menerjemahkan etnosains dan etnotek ke dalam bahasa "high scince and technology'. Oleh karena itu, mereka juga memerlukan bantuan dari para ilmuan fisik yang berkecimpung dalam sains dan teknologi modern agar "terjemahan" mereka kemudian dimengerti dan punya makna bagi para ilmuan "modern" tersebut.

Keseluruhan proses dan tahap-tahap pengembangan dan pemberdayaan pengetahuan dan teknologi etnik/lokal dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 1. Tahap-tahap Pengembangan dan Pemberdayaan Pengetahuan dan Teknologi Etnik/lokal

Interaksi manusia dengan Lingkungan

Pengetahuan dan Teknologi Etnik/Lokal

Penelitian, Analisis, Pelukisan
Pengetahuan dan teknologi Etnik/Lokal
(dengan perspektif Etnosains-Etnotek)

"Modernisasi", "Rasionalisasi" (Universalisasi)
Pengetahuan dan Teknologi Etnik/Lokal
(dengan perspektif Etnosains-Etnotek dan Iptek Modern)

Pengembangan Pengetahuan
Dan Teknologi Etnik/lokal
(Masy. Lokal;Ilmuwan Sos-Bud; Ilmuwan Fisik)

Pemberdayaan Pengetahuan
Dan Teknologi Etnik/Lokal
(Ilmuwan Sos-Bud; Ilmuwan Fisik; Pemerintah)

V. Etnosains-Etnotek: "Demokratisasi Sains dan Teknologi"

Uraian tentang paradigma Etnosains di atas memperlihatkan bahwa pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang ada dalam masyarakat yang diteliti. Dia mencoba melihat lingkungan suatu masyarakat atau komunitas lewat kacamata komunitas itu sendiri, serta mencoba menjelaskan berbagai gejala sosial-budaya dengan memperhatikan penafsiran-penafsiran dari para pelakunya.

Pengetahuan mengenai pandangan dan pemikiran ini sangat penting bagi perencana pembangunan ataupun mereka yang ingin mengembangkan teknologi yang telah ada dalam suatu masyarakat, sebab pembangunan dan pengembangan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sikap dan tindakan dalam menanggapi lingkungan. Perubahan semacam ini tidak akan mudah terjadi tanpa adanya perubahan pada perangkat pengetahuan, pandangan atau pemikiran yang merupakan landasan dari sikap dan tindakan tersebut.

Dengan bekal sistem pengetahuan yang ada dalam suatu masyarakat atau etnosains mereka, perencana pembangunan atau pengembang teknologi akan dapat menentukan langkah yang lebih tepat serta cara-cara yang lebih sesuai dengan pandangan masyarakat yang akan dibangun dalam menyusun dan menjalankan program-programnya. Dari etnosains mereka akan dapat diketahui ide-ide baru mana yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan etnosains tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu program pembangunan atau pengembangan teknologi diinginkan keberhasilannya, maka perspektif etnosains

sama sekali tidak dapat ditinggalkan, mengingat fundamentalnya perspektif ini serta kecocokannya dengan etika.

Penggunaan pendekatan Etnosains-Etnotek dalam pengembangan masyarakat akan memungkinkan kita melakukan beberapa hal yang bermanfaat dan lebih baik dari pada apa yang telah dilakukan di masa-masa lalu di Indonesia. Pertama kita akan dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara "demokratis", karena masyarakat pemilik pengetahuan dan teknologi turut berpartisipasi dalam bentuk "partisipasi kognitif". Partisipasi semacam ini lebih penting dari pada partisipasi secara fisik atau keterlibatan secara langsung di lapangan, karena sistem kongnisi merupakan sistem yang menjadi landasan atau pembimbing bagi perilaku-perilaku manusia.

Kedua, kita akan dapat menghasilkan perangkat teknologi baru yang tidak akan sangat asing bagi masyarakat kita. Perangkat teknologi seperti itu dengan sendirinya akan dirasakan lebih akrab, dan karena itu akan lebih cepat diterima oleh masyarakat-masyarakt di Indonesia, dari pada perangkat teknologi tinggi yang seringkali malah melahirkan penyakit, "gagap teknologi" di kalangan sebagian warga negara Indonesia.

Ketiga, pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek berarti juga pelestarian atas salah satu warisan budaya yang paling berharga, karena etnosains dan etnotek merupakan sarana utama manusia untuk bertahan hidup dan melestarikan spesiesnya. Pelestarian etnosains dan etnotek itu sendiri berarti juga pelestarian *cultural diversity* (keragaman budaya) yang sangat penting fungsinya bagi kehidupan manusia.

Keempat, pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek berarti juga pengangkat status pengetahuan dan teknologi berbagai etnik/lokal tersebut pada tataran yang setara dengan 'mode of science and technology" yang dominan dewasa ini, dan ini berarti juga penyetaraan kedudukan dan relasi antara etnosains dan etnotek dengan sains dan teknologi yang "modern" dan "high", yang selama ini timpang.

Kelima, pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek akan mendorong terjadi sinergi, kerjasama yang rapi, erat dan saling menguntungkan di antara tiga golongan sosial yang punya posisi penting dalam masyarakat: "ilmuwan etnik/ lokal"; ilmuwan-sosial-budaya dan ilmuawan fisik. "ilmuwan etnik" memberikan sumbangan berupa informasi etnosains dan

etnotek yang mereka miliki; ilmuan sosial – budaya mendeskripsikan, menganalisis, dan "menerjemahkan"etnosains dan etnotek tersebut ke dalam "bahasa" sains dan teknologi modern bersama dengan ilmuwan fisik; selanjutnya ilmuwan fisik mengembangkan, membuat teknologi baru yang berbasis pada etnosains dan etnotek yang diperoleh.

VI. Penutup

Sebagai penutup makalah ini saya akan meringkas pokok-pokok pikiran dalam uraian di atas, yang sebagian masih bersifat implisit.

1. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat dengan kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan-kebudayaan etnik/lokal menyimpan khasanah pengetahuan dan teknologi (etnosains dan etnotek) yang belum dimanfaatkan, dan selama ini malah terabaikan.
2. Etnosains dan etnotek ini tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga perlu dikembangkan dan diberdayakan, agar dapat dihasilkan sains dan teknologi yang lebih akrab dengan masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi etnosains dan etnoteknologi di Indonesia.
3. Pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek merupakan sebuah proses "demokratisasi sains dan teknologi', penyetaraan hubungan antara sains dan teknologi etnik/lokal dengan sains dan teknologi modern, yang selama ini sangat timpang, dimana etnosains dan etnotek berada dalam posisi yang terabaikan, terpinggirkan.
4. Pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek memerlukan kerjasama yang erat di antara "ilmuwan sosial-budaya dan ilmuwan fisik.
5. Pengembangan dan pemberdayaan etnosains dan etnotek akan memungkinkan dipertahankannya *culturaldiversity* secara sistematis dan berkelanjutan, dan ini akan penting bagi kelestarian manusia sebagai *animal symbolicum.*

Daftar Pustaka.

Adams, R.N.

1974 "Harnessing echnological Development" dalam *Rethinking Modernization : Anthropological Perspectives*, J.J. Poggie, Jr. dan R.N. Lynch (eds.). Westport Conn.: Greenwood Press.

Ahimsa-Putra, H.S.

1986 "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan ", Masyarakat Indonesia Th.XII (2): 103-133.

1989 "Dasar-Dasar Pendekatan Etnosains Dalam Antropologi". Buletin Antropologi 15. Th. V : 16-29.

1994 Etnosains: Antropologi fenomenologis Untuk Pembangunan Yang Lebih Manusiawi. Makalah dalam Diskusi Ilmiah IKA "Potensi dan Ralitas Peran Antropologi Dalam Pembangunan di Indonesia", diselnggarakan di PKBI, Jakarta, pada 26 Nopember 1994.

1997 "Air dan Sungai Ciliwung : Sebuah Kajian Etnoekologi". Prisma 1, Thn. XXVI: 51-72.

1999 Srategies to Transfer Subak Farming System to Non-Balinese Societies" dalam A Study of Subak as An Indigenous Cultural, Social and Technological System To Establish A Culturelly Based Integrated Water Resources Management, Vol.III, S.Susanto (ed). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

2002 Etnoekologi Kali Progo. Makalah dalam diskusi "Kali Progo Masa Depan", diselenggarakan oleh Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), di Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta, 10 September 2002.

2002 Etnosains dan Etnoteknologi: Wawasan Budaya Untuk Pengembangan Teknologi. Makalah dalam seminar "Pembangunan Berwawasan Budaya", diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Jakarta, 17-18 Desember 2002.

2002 Ethnoart : Fenomenologi Seni Untuk Indiginasi Seni dan Ilmu. Makalah dalam Seminar internasional "Indiginasi Seni Pertunjukan dan ilmu Pengetahuan",

diselenggarakan oleh STSI Surakarta, di Surakarta, 20-21 Desember 2002.

2003 Etnosains: Mengungkapkan Pengetahuan Masyarakat Lokal. Makalah ceramah bulanan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, UGM, Yogyakarta, 16 Januari 2003. (109)

Berger, P.L.

1976 Pyramids of Sacrifce. New York. Anchor Press-Doubleday.

Bernard, H.R. and P.J. and P.J. Pelto (eds)

1972 Technology and Social Change, New York: MacMillan.

Birowo, A.T.

1979 "Teknologi Pangan untuk Pembangunan Desa". Prisma 6, Juni, Th.VIII.: 12-25

Bodley, J.H.

1983 *Anthropology and Contemporary Human Problems.* Mountain View, Cal. : Mayfiled.

1988 Tribal Peoples and Development Issues : A Global Overview. Mountain View, Cal, : Mayfiled.

Budhisantoso, S.

1989 "Petani dan Pembangunan". Berita *Antropologi* Th.XIII (46): 47-57.

Cochrane,

1971 Development Anthropology. New York : Oxpord University Press.

Colleta, N.J.

1987 "Pendahuluan" dalam *Kebudayaan* dan *Pembangunan*, N.J. Colleta dan U. Kayam (peny.). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Colleta, N.J. dan U. Kayam (peny.)

1987 Kebudayaan dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Foster, G.M.
1972 Traditional Societies and Technological Change. New York: Harper and Row.

Frake, C.O.
1962 "The Ethnographic Study of Cognitive System" dalam Anyhropology and Human Behavior, T. Gladwin and W.C. Strutevant (eds). Washington: Anthropological Society Washington.
1964 "The Diagnosis of Disease among the Subanun of Mindanao" dalam Language and Culture and Society, D. Hymes (ed.). New York: Harper and Row.

Goodenough, W.H.
1963 "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society, D. Hymes (ed.). New York: Harper and Row.

Kartodirjo, S.
1979 "Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan: Mengembangkan Teknologi Berwajah Manusiawi". Prisma 6, Juni, Th.VII: 3-11.

Kontjaraningrat
1973 Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Lahajir, Y. dan H.S. Ahimsa-Putra
2000 "Etnoekologi Perladangan Berpindah Orang Dayak Tonyooy-Rentenukng di Dataran Tinggi Tunjung, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur". Sosiohumanika13 (2): 245-261.

Long, N.
1977 An Introduction to the Sociology of Rural Development. London: Tavistock.

Masinambow, E.K.M. dan P.Henen (peny.)
1994 Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya. Jakarta:LIPI-RUL.

Perchonock dan O.Werner
1969 "Navaho Systems of Classification: Some Implications for Ethnoscience". Ethnology 8 (3): 229-242.

Rahardjo, M.D.
1979 "Teknologi Tepat Guna bagi Industri Pedesaan". Prisma 6, Juni, Th. VIII.:35-48.

Soedjatmoko
1987 "Nilai-nilai Tradisional dalam Proses Pembangunan" dalam Kebudayaan dan Pembangunan, N.J. Colletta dan U.Kayama (peny.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Spicer, E.H.
1952 Human Problems in Technological Change. New York: Jhon Wiley and Sons.

Spradley, J.P.
1978 The Ethnographic Interviw. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Strutevant, W.C.
1964 "Studies in Ethnoscience" dalam Transcultural Studies in Cognition. A.K. Romney dan R.G.D.D'Andrade (eds.). American Anthropologist

Tjitradjaja, I.
1998 "Dam Relocation: Problems and Responses Dislocated People". Berita Antropologi Th.XII (46): 58-71.

Tjokrowinoto, M.
1987 "Adaptasi Teknologi di Kabupaten Klaten dengan Acuan Khusus pada Industri Logam dan Tenun" dalam Kebudayaan dan Pembangunan, N.J. Colleta dan U. Kayam (peny.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tyler, S.
1969 "Introduction" dalam Cognitive Anthropology, S.A. Tyler (ed.). New York: Holt, Rinerhart and Winston.

Werner, O.
1969 "The Basic Assumptions of Ethnoscience". Semioia 1 (3): 328-338.
1972 "Ethnoscince". Annual Review of Anthropolology 1.

Werner, O. Dan J.Fenton
1969 "Method and Theory in Ethnoscience or Ethnoepistemology" dalam Handbook of Method in Cultural Anthropology, R.Naroll dan R.Cohen (eds.). New York: Natural History Press.

ORANG AWAM, NEGARA DAN MARTABAT (NYAWA) MANUSIA INDONESIA*)

Oleh: **Mestika Zed**
Pusat Kajian Budaya, Sosial dan Ekonomi (PSBE),
FIS, Universitas Negeri Padang

Melalui diskursus macam apa masyarakat menyatakan dirinya secara kolektif jika terjadi tekanan-tekanan dan krisis berkepanjangan, yang mereka sendiri tidak mampu mengatasinya. Bisa jadi bersikap diam atau penghindaran (*avoidance*); atau bias juga bingung dan panic hingga mati suri tak berdaya. Pilihan terakhir adalah melawan atau memberontak mulai dari bersifat spontan dan local sampai kepada gerakan yang terorganisasi, yang dapat melibatkan dan menghanyutkan masyarakat luas. Risalah sederhana ini merupakan upaya mempelajari nasib kaum awam dalam pengelolaan Negara dan kaitannya dengan konsep martabat manusia Indonesia, khususnya penghargaan terhadap nyawa.

Latar Belakang Informasi Secara Garis Besar

-Di tanah air dewasa ini kita menyaksikan serangkaian peristiwa berulang: hilangnya nyawa manusia secara sis-sia. Kehidupan rakyat pedesaan di Poso kembali telah terusik oleh munculnya kembali "gelap" yang menyerang secara membabi buta. Hidup mereka terteror hingga terpaksa mengungsi ketempat lain. Kasus bom Bali, kasus kecelakaan di Situbondo, aksi brutal dan kekerasan di lembaga pendidikan seperti STPDN dan tawuran antar pelajar yang menimbulkan korban nyawa sia-sia. Ini semua seakan-akan sudah merupakan berita harian biasa, yang tak lagi menjadi kepedulian publikpembaca.

-Peristiwa-peristiwa perlawanan rakyat menentang rejim colonial yang menindas telah amat sering terjadi, puluhan kali bahkan ratusan kalisejak zaman abad ke-19 dan itu muncul pada masa setelah Indonesia merdeka. Para pemberontak dan

---

[1] Makalah diajukan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003

simpatisan pada umumnya melihat bahwa para penguasa bukannya melindungi, melainkan mengeksploitasi rakyat. Di Sumatera Barat khususnya, selama abad ke-20 telah terjadi tiga kali pemberontakan : pemberontakan pajak (1908), Pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan PRRI (1958-1961). Ketiga pemberontakan itu, meskipun memiliki latar ideologi dan setting sejarah yang berbeda-beda, ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh kebijakan penguasa yang dianggap tidak adil oleh pelakunya, telah mengorbankan sekian banyak nyawa.

-Pada tahun-tahun belakang ini terdapat banyak sekali risalah yang rinci, baik studi teoritik maupun kajian empiric tentang pemberontakan dengan pelbagi manifestasinya. Hasil kajian itu telah menunjukan pentingnya sejarah untuk memahami bentuk-bentuk perlawanan rakyat sebagai pengungkapan ketidakpuasan kolektif, yang sampai tingkat tertentu menimbulkan korban nyawa sia-sia.

Walaupun harus diaui bahwa gerakan-gerakan perlawanan setelah kemerdekaan, khususnya setelah reformasi sudah sangat beraneka ragam sifat dan coraknya, namun demikian ia dapat dibagi ke dalam kategori besar berikut ini :

1. gerakan-gerakan social keagamaan
2. gerakan-gerakan social yang mempunyai watak politik tingkat tinggi
3. gerakan-gerakan social intelektual

Pembahasan

Inilah saatnya yang genting, tetapi juga amat penting bagi para pemimpin untuk lebih peka membaca suara hati rakyat. Ungkapan tradisional dalam bentuk pepatah-petitih seperti yang lazim di Minangkabau sangat berperan besar dalam menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap situasi yang tengah berkembang. Ungkapan modern dalam kehidupan berbangsa bernegara telah diungkap dengan pemilu. Rakyat telah berbicara lewat pencoblosan gambar-ganbar partai peserta pemilu, yang dibelakangnya berdiri tokoh-tokoh pemimpin dan ideology yang dipertaruhkan. Materi suara rakyat telah ada, yakni hasil pemilu itu sendiri. Dan sekarang tinggal para pemimpin bangsa untuk membacanya. ***

KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA : PENATAAN POLA PIKIR[1]

Oleh: **Meutia Farida Hatta Swasono**

Pendahuluan

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini telah banyak pengalaman yang diperoleh bangsa kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dan disain bagi terbentuknya kebudayaan nasional.

Namun kita juga telah melihat bahwa, khususnya dalam lima tahun terakhir, telah terjadi krisis pemerintahan dan tuntutan reformasi (tanpa platfrom yang jelas) yang menimbulkan berbagai ketidakmenentuan dan kekacauan. Acuan kehidupan bernegara (governance) dan kerukunan sosial (social harmony) menjadi berantakan dan menumbuhkan ketidakpatuhan sosial (sosial disobedience). Dari sinilah berawal tindakan-tindakan anarkis, pelanggaran-pelanggaran moral dan etika, tentu pula tak terkecuali pelanggaran hukum dan meningkatnya kriminalitas.

Di kala hal ini berkepanjangan dan tidak jelas kapan saatnya krisis ini akan berakhir, para pengamat hanya bisa mengatakan bahwa bangsa kita adalah " Saya malu menjadi orang Indonesia" dan bukannya secara heroik menantang dan mengatakan, "Saya siap untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ini"? Mengapa pula wakil-wakil rakyat dan para pemimpin malahan saling tuding sehingga menjadi bahan olok-olok orang banyak? Mengapa pula banyak orang, termasuk kaum intelektual, kemudian menganggap Pancasila harus "disingkirkan" sebagai dasar negara? Kaum intelektual yang sama dimasa lalu adalah penatar gigih, bahkan "manggala" dalam Pelaksanaan Penataran P-4. Pancasila adalah "asas bersama" bagi bangsa ini (bukan "asas tunggal"). Disamping

---

[1] Makalah diajukan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003

itu, makin banyak orang yang kecewa berat terhadap, bahkan menolak, perubahan UUD 1945 (lebih sekedar amandemen) sehingga perannya sebagai pedoman dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diibaratkan sebagai menjadi lumpuh.

Perjalan panjang hampir enam dasawarsa kemerdekaan Indonesia telah memberikan banyak pengalaman kepada warganegara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. *Natioan and character building* sebagai cita-cita membentuk kebudayaan nasional belum dilandasi oleh suatu strategi budaya yang nyata (padahal ini merupakan konsekuensi dari dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan sebagai 'de hoogste politieke beslissing" dan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara)[2].

Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia : Identitas Nasional dan Kesadaran Nasional

Di masa lalu, kebudayaan nasional digambarkan sebagai "puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia". Namun selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia perlu diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di antara seluruh rakyat Indonesia. Termasuk didalamnya adalah nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai dan saling menolong antar sesama warganegara, untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.

Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir *(mindset)* dan sikap mental, memajukan dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama

---

[2] Pancasila dan UUD 1945 telah dipersipakan oleh para pendiri negara kita sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara sarat dengan itikad menjaga, melindungi, mempersatukan dan tidak sekedar cerdas otaknya) dan mampu untuk meraih kemajuan adab, serta dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Manifesto kultural Bhineka Tunggal Ika merupakan tekad untuk membentuk kohesi sosial dan itegrasi sosial, serta menyiratkan landasan mutualisme (kebersamaan, dalam perasaan maupun prilaku) dan kerjasama yang didasarkan atas kepentingan bersama dan perasaan kebersamaan. Dari kebersamaan dapat lebih lanjut berkembang dan tertanam perasaan saling memiliki dan menghargai di antara rakyat Indonesia, serta perasaan bersatu sebagai suatu kesatuan yang mempunyai milik bersama, dan mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama pula.

pembangunan kebudayaan nasional. Singkatnya, kebudayaan nasional adalah sarana bagi kita untuk memberikan jawaban atas pertanyaan : "Siapa kita (apa identitas kita)? Akan kita jadikan seperti apa bangsa kita ? Watak bangsa semacam apa yang kita inginkan? Bagaimana kita harus mengukir wujud masa depan bangsa dan tanah air kita? "

Jawaban terhadap sederet pertanyaan diatas telah dilakukan dalam berbagai wacana mengenai pembangunan kebudayaan nasional dan pengembangan kebudayaan nasional. Namun strategi kebudayaan nasional untuk menjawab wacana tersebut di atas belum banyak dikemukakan dan dirancang selama lebih dari setengah abad usia negara ini, termasuk dalam kongres-kongres kebudayaan yang lalu.

Gagasan kebudayaan Nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa sudah dirancang saat bangsa kita belum merdeka. Hampir dua dekade sesudah Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia telah menanamkan kesadaran tentang identitas Indonesia dalam manifesto Politiknya (1925), yang dikemukakan dalam tiga hakekat, yaitu : (1) kedaulatan rakyat, (2) Kemandirian dan (3) persatuan Indonesia. Gagasan ini kemudian segera direspons dengan semangat tinggi oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Makalah ini akan membatasi dari pada dua hal pokok yang menurut hemat penulis perlu menjadi titik tolak utama dalam 'membentuk " kebudayaan nasional, yaitu: (1) identitas nasional dan (2) kesadaran nasional. Dalam kaitan ini, Bhineka Tunggal Ika adalah suatu manifesto kultural (pernyataan das Sollen) dan sekaligus merupakan suatu titik tolak strategi budaya untuk bersatu sebagi satu bangsa.

Dimasa awal Indonesia merdeka, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia (diantaranya adalah penghormatan terhadap Sang Saka Merah-Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Nasional, pembentukan TKR yang kemudian menjadi TNI, PNS, sistem pemerintahan dan sistem birokrasi nasional). Dipihak lain, kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan akan perlunya memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai perjuangan mencapai peradaban, sebagai upaya melepaskan bangsa dari

subordinasi (ketergantungan, ketertundukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing atau kekuatan asing.
Secara internal manusia atau masyarakat memiliki intuisi dan aspirasi untuk mencari kemajuan, secara internal pengaruh dari luar selalu mendorong masyarakat, yang dinilai statis sekali pun, untuk bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan besar dari lingkungan pada saat ini datang dari media masa, melalui pemberitaan maupun pembentukan opini. Pengaruh internal dan khususnya eksternal ini merupakan faktor strategis bagi terbentuknya suatu kebudayaan nasional. Sistem dan media komunikasi menjadi sarana strategis yang dapat diberi peran strategis pula untuk memupuk identitas nasional dan kesadaran nasional.

Bangsa Indonesia: Pluralistik dan Multikultural

Kita tidak dapat pula mengingkari sifat pluralistik bangsa kita sehingga perlu pula memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan agama yang dianut oleh warganegara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu berseiring, saling melengkapi dan saling menyesuaikan (fleksibel) dalam percaturan hidup sehari-hari.

Dalam konteks itu pula maka ratusan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia itu (sebagaimana tercantum dalam lampiran makalah ini) perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional. Dipihak lain, setiap sukubangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara sukubangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas Negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing sukubangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa.

Banyak wacana mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan

kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik.[3]

Kelangsungan dan berkembangnya kebudayaan lokal perlu dijaga dan dihindarkan dari hambatan. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa, memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, sebagai kaum profesional Indonesia, misi utama kita adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa, menjadikannya suatu sinergi nasional, memperkukuh gerak konvergensi, keanekaragaman.

Oleh karena itu, walupun masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaannya di atas tanah kelahiran leluhurnya, namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh bagian dari bangsa Indonesia, dan tanah leluhurnya termasuk sebagai bagian dari tanah air Indonesia. Dengan demikian, membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, berarti juga membangun bangsa dan tanah air tanpa merasakannya sebagai beban, namun karena ikatan kebersamaan dan saling bekerjasama.

Upaya Membangun Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir

Kita perlu memahami kembali bahwa warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal

---

[3] Lihat kumpulan tulisan dalam Aryo danusiri dan Wasmi Alhaziri, ed. ***Pendidikan Memang Multikultural: beberapa Gagasan***: Jakarta: SET, 2002; dan Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur, Hidup Berbangsa dan Etika Multikultural. Surabaya: Penerbit Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003

17 Agustus 1945. Karena itu diperlukan adanya wawasan dan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita juga harus membuka diri untuk memahami Pancasila, sekaligus bersedia membedakan antara subtansi ideal dan kemuliaannya sebagai dasar peradaban, dengan Pancasila yang pelaksanaannya sengaja dikemas dan *absurd* secara politis demi kepentingan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang telah menyebabkan Pancasila dikambinghitamkan dan dibenci sebagai penyebab timbulnya kediktatoran. Sejak mundurnya Presiden Soeharto, di lingkungan masyarakat awam dan profesional tak jarang terdengar pernyataan kejenuhan, kebencian atau "alergi" terhadap perkataan "Pancasila". Sebaliknya kita harus memahami Pancasila yang lahir dari hasil pikiran para pendiri Republik Indonesia yang kemudian dirangkum oleh Bung Karno pada saat lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945, untuk dijadikan Dasar Negara, sebagai jawaban atas pertanyaan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat: "Apa dasar negara kita nanti?".

Kelima butir Pancasila itu merupakan refleksi buah pikiran yang telah secara tulus ikhlas dipersiapkan secara mendalam oleh para pendiri negara kita menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dimatangkan (dalam wadah Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) untuk menjadi pedoman berperilaku nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan dasar negara itu maka bangsa ini memiliki pegangan dan rujukan, tidak *"ela-elo"* (Sastro Gending di zaman Sultan

---

[4] Lihat tulisan S.E. Swasno yang menggambarkan kekacauan dan porak-porandanya bangsa ini dengan mengacu kepada isi senandung Sastro Gending di zaman Sultan Agung Mataram, "*Elo-elo...*", yang pada dasarnya melukiskan kekacauan jati diri, harga diri, yang berlanjut terus sehingga sekedar menjadi koelie, memperoleh "cap" het zachte volk ter aarde, een koelie onder de volkeren (bangsa paling lemah di muka bumi, kuli dari segala bangsa), dan bangsa inlander (pribumi yang mengandung konotasi klas bawah yang terbelakang) dan kehilangan semangat juang dalam membela harga dirinya (lihat S.E. Swasno, "Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa", makalah diajukan pada Diklatpim diselenggarakan oleh LAN-RI di Jakarta, 2 Mei 2003.

Agung yang menggambarkan porak-porandanya bangsa ini, seakan kehilangan pegangan, jati diri, harga diri dan percaya diri)[4].

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kita baru-baru ini, di mana Pancasila tersurat di dalamnya, nilai tidak sesuai dengan tujuannya melainkan justru merubah makna yang terkandung didalamnya[5]. Oleh karena itu, pada saat generasi penerus dan cendikiawan kita masa kini belum mampu menyusun suatu pedoman acuan lain yang dianggap dapat mengungguli Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga persatuan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan tanah air kita, maka pada saat ini, niat untuk menghapus Pancasila itulah yang harus ditanggalkan dari *mindset* kita. Sebaliknya, distorsi terhadap *mindset* perlu diluruskan dengan cara memahami Pancasila yang sebenarnya.

Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh suatu urgensi untuk menghindarkan bangsa kita dari ketidakadilan yang menyebabkan kekacauan, ketidakrukunan, makin luasnya disintegrasi sosial, serta koyaknya keutuhan negara.

Bukanlah suatu hal yang aneh atau tabu, atau nilai ketinggalan zaman bila kita menoleh kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sudah disiapkan oleh para pendiri negara kita. Reformasi berhakekat "pembaharuan" dan juga "back-to-basics", dalam arti meluruskan yang keliru dan keluar jalur. Kemajuan peradaban tidak terlepas dari proses pembelajaran makna sejarah sebagi acuan untuk membangun masa depan.

Nilai-nilai dalam UUD 1945 menanamkan pentingnya kehidupan yang cerdas, yang diutarakan dalam kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa", yang diartikan sebagai membangun kehidupan yang bermartabat, tidak rendah diri, dan mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Terdistorsinya nilai-nilai ini terlihat dari contoh yang sedang kita saksikan sekarang ini (dan sebagian dari kita mewajarkannya pula), yaitu adanya "pembodohan sosial" di hadapan kita, antara lain dengan diajukannya pandangan bahwa *nation state* tidak relevan lagi di

---

[5] Lihat tulisan A.S.S. Tambunan, UUD 1945 Sudah Diganti Menjadi UUD 2002 Tanpa mandat Khusus Rakyat. Jakarta : Yayasan Kepada Bangsaku, 2002.

dalam globalisasi, dalam dunia yang *borderless*. Paham *borderless world* ini tentu banyak ditentang oleh negara-negara yang lemah, namun didukung oleh negara-negara kuat yang memelihara hegemonisme dan pedratorisme.[6] Pelaku dan korban "pembodohan sosial " ini tak terkecuali pula sebagian dari kaum intelektualkita, yang sama-sama termakan oleh pola pikir atau mindset asing yang dengan sengaja ingin menempatkan bangsa kita pada posisi subordinasi[7].

Strategi Budaya: Mutualisme dan Kerjasama Sinergis

Upaya untuk "membentuk" suatu *mindset* kebersamaan dan kerjasama sinergis bangsa Indonesia dan membangun rasa

---

[6] Untuk paham nasionalisme dan dinamikanya, lihat tulisan Leah Greenfeld, *The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth*, Cambride, Mass,: Harvard University Press, 2001; tulisan Ian S. Lustick, "The Riddle of Nationalism : The Dialectic of Religion and Nationalism in the Middle Est", *Logos,* Vol. One Issue Theree, Summer 2002; tulisan Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, Wonder: Verso, 1983. Mengenai hegemonisme dan predatorisme, lihat tulisan James Retras dan Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked: Imperialism in the 20 th Century, London : Zed Books, 2001.

[7] Kaum intelektual kita tersebut tidak sadar bahwa dalam posisi subordinasi itu, kita tidak bisa memusatkan diri untuk menolong bangsa kita sendiri dari keterpurukan sosial-ekonomi yang sedang dialaminya. Bahkan sebagian diantara kaum intelektual kita cenderung menjadi "corong" bagi intrusi dalam rangka strategi kekuatan asing yang ingin menguasai *(overheersen)* tanah air dan bangsa kita sebagai kecendrungan *(instinct)* hegemonismedan predatorisme, dari dari segi ekonomi, sosial dan budaya, melalui cara-cara yang canggih dan seringkali sangat terselubung. Dengan kata lain, adalah suatu absurditas bahwa *mindset* rendah diri *(minder)* terbentuk di kalangan sejumlah kaum intelektual kita, yang mewajarkan gagasan bahwa tidaklah penting bagi kita untuk menjaga kepentingan nasional, dan yang mewajarkan gagasan bahwa tidaklah penting bagi kita untuk menjaga kepentingan nasional,Kedaulatan nasional dan Integritas teritoria, pada saat mereka menerima doktrin superordinasi nasional, kedaulatan nasional dan integritas teritorial, pada saat mereka menerima doktrin superordinasi tentang *the borderless world* seperti tersebut diatas. Tidaklah berarti bahwa nasionalisme Indonesia harus mengabaikan tanggung jawab global, namun sebaliknya, kita harus menghormati tanggung jawab global dengan tetap mengutamakan dan membela kepentingan nasional kita sendiri. Lihat tulisan James Retras dan Henny Veltmeyer, op. Cit., dan tulisan J.W. Smith *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century*, New York: M.E. Sharpe, 2000.

kekeluargaan (*brotherhood*, bukan *kinship*), perasaan saling memiliki (*shared intrerest* dan common *property*) [8] perlu dikembangkan, baik yang berada di tingkat keluarga, ketetanggaan [9], masyarakat luas hingga ketingkat negara. Demikian pula halnya, orientasi mutualisme dan kerjasama sinergis sebagai jiwa dalam UUD 1945 itu menjadi titik tolak dan landasan bagi penyusunan program-program pembangunan nasional secara luas. Menurut hemat penulis, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Perencanaan pembangunan nasional harus pula memiliki metode dan mekanisme untuk mewujdkan program-program atau pun proyek – proyek yang memfasilitasi terbentuknya prinsip-prinsip mutualis dan kebersamaan sinergis[10]. Beberapa contoh akan dikemukakan dibawah ini.

---

[8]Lihat tulisan M.F.H. Swasono. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1974.

[9]Di tingkat keluarga dan ketetanggaan, prinsip kebersamaan dapat menggalang pertolongan dan perlindungan, dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang kesehatan, pekerjaan, dll. Perawatan sosial, kepedulian dan perlindungan sosial yang menentramkan batin dan mendorong kesehatan mental yang baik dapat digalang dan dikemas dalam landasan kebersamaan ini bagi warga masyarakat yang mengalami penderitaan.

[10] Dalam kaitan dengan mutualisme, dikutipkan pernyataan Sri-Edi Swasono yang menempatkan integritas dan solidaritas nasional dalam masyarakat multietnik bukanlah sebagai suatu hal yang mustahil, sebagai berikut: "Pluralisme Indonesia tergambar dari miliknya tidak kurang dari 470 sukubangsa dan 19 daerah hukum adat (adatrechskringen) yang mula-mula disusun oleh Van Vollenhoven (Ter Haar 1948), mengikuti batasan-batasan Narroll (1964) dan tentang kelompok etnik dan perkembangannya sebagaimana dikemukakan oleh Barth (1969), saya berkesimpulan bahwa multietnik Indonesia mencuat sikap-sikap dan solidaritas kesukuan ("primordialisme"), bukan kearah pengukuhan *("solidity")* identitas suku, tetapi lebih berupa gerak-gerak divergensi yang berkandungan politis, atau berdasar alasan-alasan lain yang nonetnikal. Alasan yang lebih nyata dari divergensi ini adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan bangsa yang lebih berdasar pada wilayah ekonomis dari pada wilayah etnikal (misalnya penentuan batas-batas provinsi dan residensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda lebih merupakan batas-batas etnikal). Koenjtaraningrat (1993) berbeda pendapat dengan Greetz dalam menaggapi "Primordialisme" sebagai hambatan terhadap pembentukan integritasi nasional dan kesatuan nasional. Greetz tidak mengajukan pemecahan terhadap hambatan-hambatan ini kecuali menurut

Di bidang pendidikan nasional, misalnya, penataan pola pikir harus dilakukan dalam sistem pendidikan nasional dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur yang mendorong orientasi persaingan yang berlebihan dan tidak fair, atau bahkan telah menimbulkan semacam permusuhan (dimulai dari sistem ranking, pembedaan jenis dan kualitas sekolah unggulan, hingga persaingan antar sekolah yang berwujud tawuran pelajar dan perbuatan negatif lainnya). Persaingan haruslah sebatas berlomba, bukan ekslusivisme yang mengakibatkan renggangya kerukunan sosial. Penataan pola pikir dalam sistem pendidikan nasional harus menumbuhkan pola kerjasama antar siswa, misalnya melalui praktek-peraktek kegiatan belajar yang diisi "Proyek bersama" siswa dalam pembahasan materi pelajaran, atau pelaksanaan kegiatan seni-budaya dan rekreasi bersama antar sekolah-sekolah, menanamkan kesadaran sebagai "siswa sekolah Indonesia", di manapun tempat bersekolahnya.[11]

Koentjaraningrat, dengan satu kalimat yang tidak simpatik, yaitu: Balkanisasi, fanatisme *Herrenflok* (bangsa adikuasa) dan penekanan oleh negara *leviatan* (negara otoriter). Dari sini dapat dinilai bahwa Koentjaraningrat memiliki kecenderungan menolak proses primadonalisme etnikal dan memiliki preferensi dan rasionalitas normatif kuat terhadap terbentuknya integritas dan solidaritas nasional dalam rangka proses pembentukan budaya nasional. Tentu bagi Bapak Antropologi Indonesia ini, terbentuknya suatu integritas dan solidaritas nasional ini "tertangkap" sebagai layak, dapat diwujudkan dan mampu bertahan. Masalah sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan peranan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya"(lihat S.E. Swasono, "Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa", makalah diajukan pada Diklatpim diselenggarakan oleh LAN-RI di Jakarta, 2 Mei 2003:3).

[11] hal ini, jika dirancang dengan cermat, akan sekaligus membangkitkan kecintaan pada tanah air dan bangsa, yang menjadi landasan utama untuk menumbuhkan persatuan bangsa. Di pihak lain, Kebersamaan dan pola pikir tentang "guru Indonesia", bukan "guru lokal", harus ditumbuhkan antara lain melalui pertukaran dalam kunjungan kerja guru, misalnya guru di daerah pedalaman mendapat kesempatan kunjungan kerja di daerah pantai dan sebaliknya, dalam perjalanan antar pulau di Indonesia. Dengan demikian guru akan memperoleh wawasan dan kualitas mengajar yang lebih baik bagi murid-muridnya dan dapat tampil berwibawa dengan harga diri yang tinggi.

Moderenisasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan.Upaya bertahan hidup (survival) ditentukan oleh pendidikan dan proses pembelajaran yang menyertainya. Dari yang dikemukakan di atas, pendidikan merupakan faktor terpenting untuk proses pembentukan dan pemantapan identitas nasional dan kesadaran nasional serta memformulasikan *mindset* bangsa. Sosialisai dari platform nasional akan memformulasi *mindset* masyarakat. Adalah suatu "kecelakaan" besar bahwa posisi dan peran kebudayaan dalam pembangunan nasional telah direduksi dengan dipindahkannya Direktorat Jenderal Kebudayaan ke luar Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu kini Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata menyandang tugas berat sebagai lembaga yang harus mentransformasikan nilai-nilai budaya ke dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, sehingga kebudayaan tidak tereduksi menjadi sekedar kesenian dan pariwisata. Dengan demikian pendidikan dan kebudayaan dapat tetap utuh untuk berperan dan mampu berdialog dengan peradaban.

Dibidang sosial-budaya, dalam konteks mutualisme dan perasaan saling memiliki, suatu hal yang juga penting sebagai suatu proses alamiah yang telah ikut memberikan isi kepada kesadaran nasional dan identitas nasional adalah ketika kebersamaan memperoleh esensi persaudaraan *("brotherhood")* dan "keluarga luas" *(extended familiy)*, dengan makin meningkatnya perkawinan antar suku bangsa di tengah masyarakat kita. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gudykunst dan Young Yun Kim yang menggambarkan komunikasi yang mencerminkan mutualisme, perasaan bersama dan sinergi (*togetherness*) dalam tulisan mereka, Communicating with Strangers (1997)[12]. Dalam pemahaman prinsip kebersamaan dan kerjasama sinergi ini pula kita dapat

---

[12] hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh William B. Gudykust dan young Yun Kim, " ... Greeting, I am Pleased to see that we are diffrent, may we together become greater than the sum of us ... " sebagai cerminan dari mutualisme dan perasaan bersama (toghetherness) diantara mereka yang berkomunikasi (lihat Gudykunst dan Young Yun Kim, Communicating with Strangers. Boston: McGraw Hill, 1997, hlm.3).

lebih mengamati adanya primordialisme yang memperoleh makna baru di antara masyarakat kita[13].

Dengan orintasi kebersamaan dan kerjasama pula, di bidang perhubungan, perlu digerakan usaha seluruh maskapai penerbangan nasional untuk maju bersama demi kemajuan seluruh bangsa. Penggunaan berbagai jenis pesawat yang mampu menerobos isolasinya, menjangkau pelosok tanah air yang terpencil serta mendekatkan "jarak sosial-politik" dan "jarak psiko-sosiokultural" di dalam jarak *miliage* fisik. Demikian pula dengan pembangunan industri pariwisata di berbagai pelosok tanah air.[14]

Dibidang ekonomi, mutualisme memang dapat lebih nyata dan praktis dilaksanakan. Baru-baru ini kita telah melihat proses mulai tumbuhnya kerjasama antar provinsi yang jauh dari pola

---

[13] Primordialisme sering dilihat dari sudut pandang yang kuarang baik, namun di pihak lain, primordialisme juga bisa berfungsi menjadi sarana untuk preservasi nilai-nilai budaya sukubangsa. Primordialisme dapat berkembang ke tingkat yang lebih luas daripada sekedar primordialisme di lingkungan kelompok. Kita juga dapat melihat Primordialisme pada masyarakat Indonesia yang telah hidup menetap di luar negeri, namun tidak melupakan komunitinya di tanah air dan di lingkungan kelompok. Kita juga dapat melihat primordialisme pada masyarakat Indonesia yang telah hidup menetap di luar negeri, namun tidak melupakan komunitinya di tanah air. Hal yang diperlukan adalah strategi dalam menanamkan prinsip kebersamaan untuk meningkatkan kepedulian mereka dan partisipasi yang lebih aktif bagi kepentingan tanah air, agar dapat menjadi "pembela citra bangsa", bukannya orang yang "malu menjadi orang Indonesia" di kala negara sedang berada dalam keterpurukan.

[14] Orintasi kebersamaan dan kerjasama antara berbagai maskapai penerbangan maupun dengan sarana angkutan darat, laut dan sungai, dalam praktek dapat menumbuhkan jaringan kerjasama yang lebih besar, yang tidak saja akan dapat menunjang perkembangan dunia pariwisata Indonesia, melainkan juga program-program pembangunan nasional lainnya di lokasi-lokasi yang selama ini belum terjangkau oleh program-program pembangunan. Dengan demikian, rakyat kecil di berbagai daerah terpencil di mana pun di seluruh penjuru tanah air dapat tersentuh oleh tangan-tangan pembangunan nasional. Hal ini tidak sajah akan bisa mengurangi perasaan ketidakadilan yang muncul karena tidak merasa menikmati hasil pembangunan, sebaliknya akan mengembalikan rasa persatuan dan solidaritas antar sesama bangsa, yang selama ini terasa hilang dari kalbu anak bangsa (lihat tulisan M.F. Swasono, "Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2002", Perencanaan Pembangunan. Januari-Maret 2003, hlm. 10-15).

pikir persaingan, melainkan dilandasi oleh pola pikir kebersamaan dan mutualitas, sebagaimana yang ditujukan oleh gagasan untuk membentuk gerakan Pembangunan Mina Bahari[15]. Penulis menyaksikan semangat menggebu-gebu dari para camat dan bupati yang mulai merancang program kerja antar daerah yang termasuk dalam jangkauan gerakan pembangunan di teluk Tomini itu. Percikan semangat kebersamaan itu bahkan juga menjangkau komuniti nelayan Bajo yang masih hidup dalam kondisi keterbatasan sosial-ekonomi di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, manfaatnya tidak saja berupa keuntungan ekonomi yang bersifat regional melainkan juga nasional. Selain itu proyek ini juga dapat memberikan kebanggaan daerah dan kebanggan nasional, perluasan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan harkat ekonomi dan sosial rakyat di daerah-daerah, termasuk rakyat kecil, yang bersemangat untuk membangun daerah mereka agar menjadi tuan di negeri sendiri[16].

---

[15] Gerakan pembangunan Mina Bahari (disingkat Gerbang Mina Bahari) ini dicanangkan pada tanggal 11Oktober 2003 oleh Presiden Republik Indonesia di atas KRI Teluk Daltele di teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Dalam jangka pendek, Gerakan Pembangunan Mina Bahari diharapkan dapat memproduksi perikanan hingga 9,5 juta ton pada tahun 2006. Selain itu diharapkan bahwa kerjasama ketiga provinsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar10% dari seluruh ekspor senilai USD 10 Milyar, dengan menyerap kerja 7,4 juta orang (kompas 12 Oktober 2003). Dibalik angka-angka yang tercantum itu, tersirat suatu bentuk kerjasama yang telah mulai dilaksanakan, yang sekaligus memberikan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat sekitar Teluk Tomini.

[16] Gerakan pembangunan Mina Bahari merupakan perwujudan Otorita Teluk Tomini yang melibatkan tiga provinsi, yang meliputi 9 Kabupaten dan dua kota, yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Posos dan Kabupaten Parigi (di Provinsi Sulawsi Tengah), Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo dan Kota Gorontalo; (di Provinsi Gorontalo): dan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bitung dan Kota Bitung (di Sulawesi Utara). Kebersamaan antara ketiga provinsi tercermin dari kerjasama ini, yang apabila tetap dilaksanakan dalam prinsip, kebersamaan dan kerjasama yang mengutamakan dan memahami kepentingan regional dan nasional, akan dapat menunjukan prinsip "menjadi tuan di negeri sendiri", melepaskan diri dari pola pikir ketergantungan yang telah sejak beberapa lama mendistorsi landasan yang dicita-citakan oleh para pendiri negara kita.

Semangat ini telah muali membentukkan suatu kohesi sosial, yang makin luas jangkauannya teritorialnya, dan akan makin luas pula dampaknya terhadap perjalinan persatuan nasional. Di samping itu perlu pula diberikannya peluang yang mendorong kemampuan enterpreneurial[17] dalam masyarakat.

Dibidang hukum, kasus-kasus penggusuran yang tidak memihak rakyat dan merupakan kasus-kasus aliensi dan marginalisasi, pelumpuhan dan pemiskinan terhadap suatu kelompok, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan

---

[17] Bukanlah merupakan tugas yang ringan bagai para ahli antropologi untuk menerima tantangan-tantangan yang sejak lama dituntut oleh para ahli ekonomi dan kalangan bisnis, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan wiraswasta *(entrepreneurial)* bangsa. Hal ini berkenaan dengan pembenrtukan suatu *mindset* untuk menjadi manusia kreatif dan inofatif serta memiliki "seribu akal" dalam kaitannya dengan kecerdasan kehidupan bangsa. Para pengamat enterpreneurship sudah lama mengidentifikasi ciri-ciri manusia Indonesia yang kurang mendukung tumbuhnya enterprenership, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri-Edi Swasono, yang mengacu kepada tulisan-tulisan Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat mengenai ciri-ciri "negatif" orang Indonesia sebagai berikut : " .... Ciri-ciri manusia Indonesia, misalnya masih tidak achievement oriented tetapi status oriented,berorientasi pada masa lalu, menggantungkan diri pada nasib, munafik, feodel, percaya pada tahyul, berwatak lemah (terutama terhadap uang), tidak hemat, (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada (gampang merasa aman), suka sok kuasa (haus kekuasaan), mencampuradukan), mengemban sikap hidup miskin, berlagak ramah (fridly) padahal sebenarnya menghamba (servile), berlagak wajar-diri (low profile) padahal sebenarnya adalah lemah (soft). (Lihat Sri-Edi Swasno, Kemandirian Bangsa, Tantangan Perjuangan dan Enterpreneurship Indonesia. Yogyakarta: Universitas Janabadra, 2003, hlm. 20-21).

Ciri-ciri "negatif" ini berhadapan dengan tuntutan kualifikasi seorang *entrepreneur*, yaitu " .... Memiliki ' tenaga dalam", seperti kreatif, inovatif, dimilikinya originalitas, berani mengambil resiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidak gampang patah semangat (tidak cengeng). Bersemangat tinggi, berdisiplin baja, dan teguh dalam pendirian. Ia mempunyai cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif yang kuat, kalau perlu dengan cerdik menerobos pakem-pakem yang berlaku. Dengan ciri-ciri semacam ini, dengan sendirinya seorang wiraswasta tidak saja berkepribadian dan mempunyai karakter kuat, tetapi juga dengan sendirinya adalah orang pintar bermental unggul (ber –IQ, ber-EQ dan ber-RQ tinggi) dan sehat jasmaninya" (Ibid. Hlm. 23). Keseluruhannya ini merupakan tantangan budaya yang diajukan oleh profesional di bidang ekonomi dan bisnis, yang harus pula memperoleh jawaban dari kita semua dalam Kongres Kebudayaan ini.

amanah Pembukaan UUD 1945 : " ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia'. Penataan pola pikir perlu dilakukan terhadap sistem hukum yang tidak dilandasi oleh keberpihakan dan perlindungan kepada rakyat, sebagai perwujudan dari nilai-nilai dalam Preambul UUD 1945 itu.

Berbagai contoh di atas kiranya juga menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik jika pembangunan daerah tidak dilandasi oleh orientasi pola pikir kerjasama. Kebersamaan dan kerjasama antar Pemda-Pemda di tingkat kabupaten, antar Kabupaten dan Provinsi, juga harus berorientasi pada pola pikir pembangunan seluruh bangsa Indonesia, bukan sekedar membangun rakyat lokal. Sulit diperkirakan tentang akan tercapainya keberhasilan otonomi daerah yang masih dilandasi oleh orientasi pola pikir persaingan (mengabaikan kerjasama) dan orientasi penguasaan (eksklusivisme sumber daya alam dan sumber daya manusia) di antara Provinsi, hanya akan mempercepat jatuhnya bangsa lewat otonomi daerah yang tidak ditunjang oleh sikap mental mutualistik dan kerjasama demi kesatuan bangsa.

Penutup

Sebagai penutup dapat diulangi di sini bahwa dalam penataan *mindset* untuk "membentuk" kebudayaan nasional Indonesia, makalah ini mengambil titik-tolak utama sebagai awal startegis : (1) identitas nasional dan (2) kesadaran nasional.

Pertama, rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan, yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional harus diberdayakan, ditinggalkan potensi dan produktivitas fisikal, mental dan kulturalnya.

Kedua, tanah air Indonesia sebagai aset nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, merupakan tempat bersemayamnya semangat kebhinekaan. Adalah kewajiban politik dan intelektual kita mentransformasikan "kebhinekaan" menjadi "ketunggalikaan" dalam identitas dan kesadaran nasional.

Ketiga, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualitas, kerjasama sinergis saling menghargai dan memiliki (shared interest) dan menghindarkan pola pikir persaingan tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme,

namun secara bersama-sama berlomba meningkatkan daya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial-kultural sebagai bangsa.

Keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan, akan kita jadikan seperti apa bangsa kita?" yang tentu jawabannya adalah "menjadi bangsa yang tangguh dan entrepreneurial menjadi bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nasional Indonesia, berfalsafah dasar Pancasila, bersemangat bebas-aktif mampu menjadi tuan di negeri sendiri, dan mampu berperanan penting dalam percaturan global dan dalam kesetaraan juga mampu dalam menjaga perdamaian dunia'.

Kelima, yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Tanpa segera ditegakannya "dibentuknya" secara tegas identitas nasional, dan kesadaran nasional, bangsa ini akan menghadapi kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA ACUAN

Anderson, Benedict.

1983 *Imagined Communities: Reflection on the Origin and spread of Nationalism,* Wonder: Verso.

Danusiri, Aryo & Wasmi Alhaziri, ed.

2002 Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan Jakarta:SET.

Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur

2003 *Hidup Berbangsa dan etika Multikultural.* Surabaya: Penerbit Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.

Greenfeld, Leah

2001 *The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Gudykunst, William B. dan Young Yun Kim

1997 *Communicating with strangers.* Bosrton: McGraw Hill.

Kompas

2003 "Presiden Canangkan Gerbang Mina Bahari", Hlm. 11 kol. 1-3, 12 Oktober.

Lustick, Ian S
2002 "Hegemony and the Riddle of Nationalism: The Dialectics of Nationalism and Religion in the Middle East", Logos Vol One, Issue Three,Summer, hlm. 18-20.

Retras, James dan Henry Veltmeyer
2001 *Globalization Unmasked: Imperialism in the 20 th Century*.London : Zed Books,2001.

Smith, J.W.
2000 *Economic Democracy* : *The political Struggle of the Twenty-frist Century,* New York: M.E. Sharpe.

Sulastomo
2003 *Reformasi: Antara Harapan dan Realita. Jakarta:* Penerbit Buku Kompas.

Swasono, Meutia F.H.
1974 Generasi Muda Minangkabau di Jakarta: Masalah Identitasnya Sukubangsa. Skripsi Sarjana. Jakarta: Fakultas Sastra UI.

—
1999 "Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi Bhineka Tunggal Ika dalam keranga Persatuan dan Kesatuan Bangsa:, makalah pada seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Syarif Hidayatullah dan Yayasan Haji Karim Cei, Jakarta, 6 Mei.

—
2000 "Reaktualisasi Bhineka Tunggal Ika dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa", makalah diajukan dalam simposium dan lokakarya Internasional dengan tema "Mengawali Abad ke-21 : Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa", diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesia bekerjasama dengan Jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin, di Makassar, 1-5 Agustus 2000.

—
2000 Kebudayaan Nasional sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa", makalah dalam Seminar Sehari tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Bhineka Tunggal Ika, diselenggarakan oleh DPP badan Interaksi Sosial Masyarakat (DPP-BISMA) di Jakarta, 25 November.

—
2002 "Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2002", Perencanaan Pembangunan. Januari-Maret 2003, hlm.10-15.

—
2003 "Merancang Masa Depan Indonesia di Tengah Tantangan Globalisasi dan Demokratisasi", makalah diajukan dalam Seminar Nasional Merancang Masa Depan Indonesia di tengah Tantangan Globalisasi dan Demokratisasi, diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FISIP –UI di Depok, 30-31 Januari.

—
2003 "Membangun Kebudayaan Nasional"' majalah Perencanaan Pembangunan Jiwa Bangsa"' makalah diajukan pada Konvesi Nasional Kesehatan jiwa II di Jakarta, 9-11, Oktober.

Swasono, S.E.
2003 'Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa", makalah diajukan pada Diklatpim diselenggarakan oleh LAN-RI di Jakarta, 2 Mei.

Swasono, S.e.
2003 *Kemandirian Bangsa, Tantangan Perjuangan dan Entrepreneurship Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Janabadra.

Tambunan, A.S.S.
2002 UUD 1945 Sudah Diganti Menjadi UUD 2002 Tanpa Mandat Khusus Rakyat. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku.

Lampiran :
Berbagai Sukubangsa dan Subsukubangsa di Indonesia yang telah Didokumentasi Berdasarkan Propinsi (Data tahun 1995, 27 Propinsi, termasuk Timor Timur)

1. Bali : (4)
Bali, Loloan, nyama Selam, Trunyan.

2. Bengkulu : (9)
Bengkulu, Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko,Pekal, Rejang,Serawai, Suban.

3. D.I. Aceh/NAD: (11)
Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Gayo-Lut, Gayo Luwes, Gayo Serbejadi, Kluet, Simeulu, Singkil, Tamiang.

4. DIY : (1)
Yogyakarta.

5. DKI : (1)
Betawi

6. Irian Jaya: (109)
Aero, Airo Sumaghaghe, Airoran, Ambai, Amberboken, Amungme, Anu, Arfak, Asmat, Auyu, Ayfat, Baso, Baudi, Barik, Bgu, Biak, Borto, Buruai, Citak, Damal, Dani, Dem, Demisa, Demta, Dera, Edopi, Eipomek, Ekagi, Ekari, Amumu, Aritai, Fau, Foau, Gebe, Gresi, Hattam, Humboltdt, Hupla, Inanwatan, Irarutu, Isirawa, Iwur, Jaban, Jair, Kaburi, Kaeti, Kais, Kalabra, Kamberau, Kamoro, Kapauku, Kapaur, Karon, Kasuweri, Kaygir, Kembrano, Kemtuk, Ketengban, Kimaghama, Kimyal, Kokoda, Kmnai, Korowai, Kupol, Kurudu, Kwerba, Kwesten, Lani, Maden, Mairasi, Mandobo, Maniwa, Mansim, Manhuke, Marind Anuim, Maiyakh, Mey bBrat, Mimika, Moire, Mombum, Moni, Mooi, Mosena, Murop,

Muyu, Nduga, Ngnalik, Ngnalum, Nimboran, Palamul, Palata, Pisa, Sailolof, Samaokena, Sapran, Sawung, Sawuy, Sentani, Silimo, Tabati, Tehid, Timorini, Uruwai, Waipam, Waipu, Wamesa, Wanggom, Wano, Waris, Waropen, Wodani, Yahray, Wali, Yapen, Yaqay, Yei.

7. Jambi : (3)
Anak Dalam, Batin, Jambi.

8. Jawa Barat : (3)
Baduy, Banten, Cirebon.

9. Jawa Tengah : (3)
Bagelen, Banyumas, Jawa

10. Jawa Timur : (6)
Bawean, Jawa, Madura, Surabaya, Tengger, Osing.

11. Kalimantan Barat: (71)
Babak, Badat, Barai, Bangau, Bukat, Cempedek, Dalam, Darat, Derok, Desa, Dusun, Embaloh, Empayuh, Engkarong, Ensanang, Entungau, Galik, Gun, Iban, Jangkang, Kalis, Kantuk, Kayan, Kayanatan, Kede, Kendayan, Keramai, Klemantan, Kopak, Koyon, Lara, Limbai, Maloh, Mayu, Mentebak, Menyangka, Menyanya,, Merau, Mualang, Muara, Muduh, Muluk, Ngabang, Ngalampa, Ngamukit, Nganayan, Panu, Pengkedeng, Pompang, Pontianak, Pos, Punti, Randuk, Ribun, Sambas, Sanggau, Sani, Seberung, Sekajang, Selayang, Selimpat, Senangkan, Senunang, Sisang, Sintan, Suhaid, Sungkung, Suruh, Tabuas, Taman, Tingui.

12. Kalimantan Selatan : (10)
Abai, Bakumpai, Banjar, Beaki, Berangas, Bukit, Dusun Deyah, Harakit, Pagatan, Pitap.

13. Kalimantan Tengah : (10)
Bantian, Bawo,Lawangan, Maanyan, Ngaju, Ot Danum, Paku, Punan, Siang, Tamuan.

14. Kalimantan Timur : (29)
Autheng, Baka, Bakung, Basap, Benuaq, Berau, Berusu, Bem, Bulungan, Busang, Dayak, Huang Tering, Jalan, Kenyah, Kulit, Kutai, Long Gelat, Long Paka, Modang, Oheng, Pasir, Penihing, Saq, Seputan, Tidung, Timai, Tou, Tukang, Tunjung.

15. Lampung : (1)
Lampung.

16. Maluku : (43)
Alune, Ambon, Aru, Babar, Bacan, Banda, Buli, Buru, Galela, Gane, Gebe, Halmahera, Haruku, Jailolo, Kei, Kisar, Laloda, Leti, Lumoli, Maba, Makian, Mare, Memalu, Moa, Modole, Morotai, Nuaulu, Pagu, Patani, Pelauw, Rana, Sahu, Sawai, Seram, Tanimbar, Ternate, Tidore, Tobaru, Tobelo, Togutil, Wai Apu, Wai Loa, Weda.

17. Nusa Tenggara Barat : (9)
Bayan, Bima, Dompu, Donggo, Kore, Mata, Mbojo, Sasak, Sumbawa.

18. Nusa Tenggara Timur : (48)
Abui, Alor, Anas, Atanfui, Atoni, Babui, Bajawa, Bakifan, Blagar, Boti, Dawan, Deing, Ende, Faun, Flores, Hanifeto, Helong, Kabola, Karera, Kawel, Kedang, Kemak, Kemang, Kolana, Kramang, Krowen Muhang, Kui, Labala, Lamaholot, Lemma, Lio, Manggarai, Marae, Maung, Mela, Modo, Muhang, Nagekeo, Ngada, Moenleni, Riung, Rongga, Rote, Sabu, Sikka, Sumba, Tetun.

19. Riau : (9)
Akit, Hutan, Kuala, Kubu, Laut, Lingga, Riau, Sakai, Talang Mamak.

20. Sulawesi Selatan : (13)
Abung Bunga Mayang, Bentong, Bugis, Daya, Duri, Luwu, Makassar, Mandar, Massenrengkulu, Selayar, Toala, Toraja, Towala-wala.

21. Sulawesi Tengah : (25)
Bada, Baju, Balaesang, Balantak, Banggai, Bungku, Buol, Dampelas, Dondo, Kaili, Muna, Mekongga, Mori, Napu, Pamona,

Pipikoro, Saluan, Sea-sea, Tajio, To Laki, Toli-Toli, Tomia, Tomini, Wakotobi, Wawoni.

22. Sulawesi Tenggara : (9)
Buton, Cina, To laiwiu, To Landawe, To Mapute, Orang Butung, Orang Lalojo, Orang Muna, Moronene.

23. Sulawesi Utara : (20)
Bantik, Bintauna, Bolaang Itang, Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Borgo, Gorontalo, Kaidipang, Minahasa, Mongondow, Pelhi, Ponosakan, Ratahan, sangir, Talud, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, Toulour.

24. Sumatra Barat ; (2)
Mentawai, Minangkabau.

25. Sumatra Selatan : (29)
Ameng Sewang, Anak dalam, Bangka, Belitung, Enim, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lahat, Lematang, Lintang, Klom, Mapur, Meranjat, Musi, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Organ, Palembang, Pasemah, Pedamaran Pegagan, Rambang Senuling, Ranau, Rawas, Saling, Sekek, Semendo.

26. Sumatra Utara : (14)
Angkolo, Asahan batak, dairi, karo, Langklat, Mandailing, Nias, pakpak, Psisir natal, Slidang, Sumalungun, Toba, Ulu Muara Slipongi.

27. Timor Timur : (2)
Ilimano, Timor Timur.

Sumber :

Melalatoa, M. Junus (1995). Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Geerland, G. (1892). Atlas der Vokerkunde, Gottra, Berhaus, heinich.
Koentjaraningrat (1969). Atlas Etnografi Sedunia, Jakarta: Penerbit Dian Rakjat.
Ter Haar, B. (1948). Adat Law in Indonesia. New York: Institute odf Pasific Relations.

'HORROR-CULTURE': KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN SIMBOLIK DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA [1]

Oleh: **Yasraf A. Piliang**[2]

Abstract

Kekerasan-baik berupa kekerasan fisik (*physical violence*) maupun kekerasan symbol (*symbolic violence*) - merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia kehidupan sosial,politik, ekonomi dan budaya di Indonesia.peralihan-peralihan di dalam rezim politik, misalnya, selalu disertai oleh berbagai bentuk kekerasan,yang menggunakan berbagai metode, cara dan teknik,dan yang telah menimbulkan berbagai derita sosial yang menyakitkan (social suffering).

Pembangunan sendiri-terutama pambangunan ekonomi, tekhnologi dan industri-meskipun mampu menciptakan peningkatan pendapatan dan kesejahtraan, akan tetapi, secara bersamaan hampir tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun simbolik, disebabkan ia sekaligus menciptakan berbagai kesenjangan sosial, yang berakibat pada berbagai derita sosial, seperti: penggusuran, pengusiran, beli paksa,perampasan hak milik, pemerkosaan hak hidup.

Dalam bidang sosial, ancaman, pemaksaan, pungutan liar, pemerasan, intimedasi,terror, penyiksaan, dan pembunuhan merupakan realitas sosial sehari-hari (*everyday life*), yang berlangsung di kantor, di pabrik, di kampus, di rumah, di jalan. Bahkan, di dalam dunia kriminal, kekerasn seakan-akan sudah 'melampaui' dari apa yang dpat dibayangkan akal sehat, dan menjadi semacam patologi psiko-sosial, seperti: mutilasi, membakar pencuri, memakan organ tubuh atau memperkosa mayat.

Dunia sosial, politik dan ekonomi, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari berbagai derita psikis, seperti: rasa takut (horror), kecemasan (ahxiety), rasa terancam (paranoia), keputus-asaan, kegelisahan, rasa tidak aman dan trauma, baik pada tingkat fisik, psikis dan simbolik,. Artinya, pada tingkat ekstensial, ada semacam rasa 'ketidak-amanan antologis' (ontological insecurity) yang bersipat struktural, yang menghambat tercapainya dunia kehidupan sosial, politik, ekonomi yang nyaman untuk didiami.

'Budaya horor' (horror culture) –yaitu menjadikan 'ketakutan' dan 'kekerasan' sebagai 'solusi' untuk setiap masalah-hanya dapat diminimalisir (meskipun tidak dapat dihapus sama sekali) dengan melakukan perubahan yang komprehensif, baik pada tingkat struktural, legal dan mental. Di satu pihak, perlu upaya-upaya kultural untuk membangun rasa cinta, persaudaraan, persamaan dan toleransi. Di pihak lain, perlu ada penegakan hukum (coercion) untuk menciptakan kepatuhan, disiplin dan keteraturan sosial.

Kata kunci: horror, kekerasan fisik, kekerasan simbolik, derita sosial,paranoia.

Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah yang dipenuhi oleh tontonan-tontonan kekerasan, kebrutalan, penjarahan, tawuran, penyiksaan (torture), kekejaman (cruelty), mutilasi, sadisme, genocide, homicide, penculikan, penghilangan paksa, yang telah menciptakan iklim ketakutan, horror dan trauma pada tingkat psikis, 'derita sosial' (social suffering) dan rasa tidak aman (social insecurity) pada tingkat sosial, dan 'ketidak-amanan ontologis' (ontological insecurity) pada tingkat eksistensial.

Apa yang berlangsung adalah proses dehumenisasi dalam sekala luas, baik antar individu, maupun yang melibatkan berbagai elemen kekerasan antar-etnis, antar-agama, antar ras, antar kelompok dan antar kelas. Realitas manusia Indonesia telah mengalami masa-masa kelam yang panjang, yang didalamnya manusia tidak pernah menemukan ruang bagi aktualisasi kemanusiaannya yang konstruktif.Manusia Indonesia justru hidup di dalam berbagai 'sistem ketidak manusiawian' (inhuman system).

Tidak saja manusia yang bertindak tidak manusiawi terhadap manusia -manusia lainnya, akan tetapi juga tidak tak-manusiawi oleh negara dan berbagai system yang membangunnya (system ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, media). Berbagai system tersebut bersipat tidak manusiawi ketika ia terlalu banyak menimbulkan hambatan (constraint) pada perkembangan kemanusiaan yang konstruktif; ketika ia dibangun lewat berbagai strategi dan mekanisme 'kekerasan' dan 'teror' (ancaman, penculikan, perampasan, pencamplokan, beli paksa, dsb.)

'Kekerasan negara' (state violence)-sebagai bagian dari 'politik pembangunan'-telah menelan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri, atas nama pencapaian politis pembangunan, 'kekerasan ekonomi' (economic violence) telah

menciptakan berbagai perampasan hak-hak manusia atas tempat hidup, atas nama prestise dan kebanggaan ekonomi nasional. 'kekerasan politik' (political violence) telah menciptakan iklim ketakutan yang kolosal, atas nama keamanan dan demkrasi.

Ontologi Horor dan
Ketidak-amanan Ontologis.

Kekerasan dan horor, selain dilihat sebagai persoalan sosial-politik, adalah juga persoalan eksistensial atau keber'ada'an. Heidegger menjelaskan, bahwa 'ada' adalah 'ada menuju kematian, (being toward death). Eksistensi yang 'ada' (being) itu berakhir dengan kematian, meskipun setelah kematian, sesungguhnya yang berakhir adalah 'ada bersama yang lain' (being with other), akan tetapi setelah itu masih ada eksistensi, yaitu ' ada untuk yang lain' (being for other).

Akan tetapi, perjalanan eksistensial menuju kematian itu menjadi perjalanan yang tidak nyaman, ketika durasi kehidupan dan temporalitas yang membentuknya dijajah oleh 'ontologi citra kekerasan' (ontology of violent image) yang dibangun oleh manusia sendiri (oleh kelompok suku, agama, dan bangsa), sehingga 'ada' sesungguhnya adalah 'ada menuju kematian dibawah kuasa citra-citra kekerasan dan horor itu".

Apakah itu 'citra kekerasan' yang menjajah manusia kontemporer kita? Citra itu adalah citra tentang 'kejayaan', 'kekuatan','kekayaan', dan 'superioritas' sebuah suku, agama, ras dan bangsa, yang ironisnya,untuk mencapainya diperlukan 'mesin-mesin kekerasan' (violence machine). Di bawah hasrat superioritas yang bersimbiosis dengan kekerasan ini, dunia menjadi sebuah tempat (place), yang sesungguhnya tidak nyaman untuk didiami (dwelling), disebabkan begitu besarnya ancaman dan teror, khususnya ancaman dan teror terhadap 'ada' (being), yaitu terhadap eksistensi manusia yang otenik dan sejati, yang tidak ada di bawah bayang-bayang citra superioritas itu. Eksistensi kini adalah being toward death yang diisi oleh citra paranoia dan horor-sebuah eksistensi kehidupan yang menyesakan menuju kematian.

Akibatnya, rasa aman (security) kini menjadi hal yang langka. Hampir tidak ada tempat, yang didalamnya orang menemukan 'rasa aman' itu, khususnya 'rasa aman ontologis' (ontological

security). Pencurian sudah menjadi panorama harian di jalan-jalan; perampokan menjadi berita harian di bank-bank; pemerasan merupakan kegiatan harian di pasar-pasar; penyiksaan menjadi ritual tahunan di kampus-kampus; tawuran menjadi pemandangan harian di sekolah-sekolah; penculikan merupakan kebiasaan di rumah-rumah; pemerkosaan merupakan tontonan harian di media-media. Pemaksaan hak menjadi rutinitas harian bangsa ini di berbagai ruang-waktu.

Di dalam kondisi hilangnya rasa aman, 'jaminan rasa aman' atau 'perlindungan' (protection) kini menjadi kebutuhan masal, bahkan kini telah menjadi komoditas 'komoditas proteksi'. Terjadi kini lonjakan penjualan 'alat-alat pelindung' dengan konsep design by fear, baik yang bersipat fasif (passive protector), sepeerti teralis rumah, pagar listrik, tembok tinggi, shock maker, rafe protector, atau yang bersifat aktif (active protector), seperti pestol ringan, hand gun, spray gun, powder gun, yang kini di jual dipasar-pasar gelap atau resmi.Terjadi pula peningkatan jasa-jasa pemberi perlindungan atau rasa aman (protection service), baik yang bersifat fisik atau non fisik, seperti jasa Securicor dan asuransi. Bahkan, ada penyewaan anggota TNI tertentu sebagai security perusahaan, yang ironisnya justru mereka malah di minta melakukan kekerasan baru, berupa pembunuhan, penculikan, dan penyandraan.

Di dalam masyarakat juga kita hidup subur kekerasan virtual (ciber violence), yaitu para hacker lokal yang dengan relative leluasa melakukan tindak kriminalitas pencurian, pemalsuan dan perusakan bersekala internasional di dalam internet. Sehingga, Indonesia bersama beberapa negara bekas Eropah Timur pernah menjadi negara yang ditakuti dari segi cyber crime, sehingga ada pemblokiran terhadap alat transaksi global dari Indonesia, seperti kartu kredit.

Berbagai bentuk kekerasan dan peristiwa horor di atas, yang mewarnai kehidupan Negara-negara kita akhir-akhir ini, tidak dapat dipisahkan dari pesan 'citra superioritas' dan 'citra kekerasan' yang dibangun oleh berbagai pihak. Masing-masing pihak ini membangun kekuatan-kekuatan horor (horror power) yang dilengkapi dengan mesin-mesin horor (horror machine) dan menggelae berbagai peristiwa horor (horror action), yang menciptakan citra bangsa sebagai sebuah bangsa horor (horror nation-state).

Sejarah bangsa kita telah menghasilkan berbagai 'citra manusia', yang didalamnya inheren berbagai dimensi dan horor. Era Orde Lama telah menghasilkan manusia Indonesia sebagai 'manusia ideologis' (the ideological man), yaitu manusia yang sarat dengan ide dan slogan-slogan ideologis. Berbagai slogan rakyat sebagai 'pejuang', sebagai 'berdiri di atas kaki sendiri', sebagai 'nasionalis' sebagai bagian dari realitas manusia Orde Lama. Akan tetapi, apakah di balik era sloganisme tersebut, manusia dapat menemukan kemanusiaannya? Orde Lama, pada kenyataannya meredusir dimensi kemanusiaan ke dalam wujud retorika, akan tetapi sesungguhnya ia gagal meningkatkan harkat kemanusiaan itu sendiri, disebabkan kegagalannya dalam memenuhi satu dimensi kemanusiaan, yaitu dimensi ekonomi. Kekerasan berlangsung karena ideology dan kemiskinan.

Era Orde Baru, sebaliknya menghasilkan 'manusia-manusia mekanistik' (the mechanistic men),yaitu manusia-manusia pembangunan yang pikirannya justeru dikosongkan dari ideology-ideologi, kemudian di isi dengan satu-satunya 'ideologi' yaitu ideology 'pembangunan'. Manusia kemudian menjadi komponen dari 'mesin pembangunan', yang didalamnya berlangsung industri alisasi pikiran (industralisation of mind), berupa penyeragaman, standardsasi dan pembatasan-pembatasan terhadap manusia. Di dalamnya berlangsung berbagai bentuk kekerasan dan in-humanitas, seperti penculikan, penyekapan, penangkapan paksa, ketimpangan, marjinalisasi, peminggiran, pemaksaan, represi, subordinasi, jual paksa, penyerobotan hak milik, perampasan hak pribadi menjadi bagian dari mesin pembangunan yang tidak manusiawi.

Sementara,era Reformasi adalah era yang di dalamnya terjadi fragmentasi besar-besaran manusia (fragmented men), sebagai akibat terbukanya pintu demokratisasi dan kebebasan. Akan tetapi, ironisnya, iklim reformasi justru telah menciptakan manusia-manusia yang kini lebih mementingkan dirinya sendiri (selfis man), seperti yang dilukiskan Hobbes, yaitu manusia-manusia yang dapat melakukan apa saja terhadap manusia lain dan Negara, demi untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya sendiri. Manusia-manusia selfis versi Hobbes ini-demi kepentingan hasrat dan kehendak berkuasanya-kemudian mengkekspolitasi manusia-manusia lain sebagai 'manusia komoditi' (man of commodity),seperti ang dilakukan Mark, yaitu

manusia-manusia yang dieksploitasi tenaga,tubuhdan keterampilannya,demi untuk kepentingan ekonomi, politik dan keselamatan pribadi. Inilah manusia-manusia yang tiba-tiba menyukai arak-arakkan, karnavalisme, retorika, pidato, pawai dan demonstrasi, demi mendapatkan imbalan 'upah', yang menjual 'tenaga' dan 'retorikanya' sebagai nilai 'guna' (use value), demi untuk dipertukarkan dengan 'nilai tukar' (ekchange value).

Sebagian manusia lain menjelma menjadi'manusia alam' (man of nature) sebagaimana yang dilukiskan Reusseau, yaitu manusia-manusia yang menginginkan 'komunitas-komunitas kecil', yang di dalamnya mereka beranggapan akan dapat menemukan kebebasan, persamaan, keadilan dan kebahagiaan yang hakiki, yang di dalamnya setiap orang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat dan komunitas mereka yang kecil tersebut. Inilah manusia-manusia Indonesia yang hidup di dalam gagasan-gagasan ideologis separatisme, kemerdekaan, pemisahan wilayah dan otonomi.

Yang berkembang kemudian adalah kecendrungan 'ekslusivisme (exclusivisme), yang didalamnya perbedaan (dfference) dan keanekaragaman (plurality) dibangun diatas dasar fondasi esensialisme sempit, yang anti terhadap perubahan, pembaharuan atau transformasi, sehingga dapat menciptakan pandangan buruk terhadap pihak luar yang mengancam, yang berujung pada berbagai bentuk konflik, permusuhan dan 'peniblisan' pihak lain (demonisation).

Meskipun demikian, exslusivisme merupakan sebuah cara untuk menciptakan semacam Umwelt, yaitu sebuah tempat yang di dalamnya setiap orang merasa mendapatkan rasa aman secara eksistensial, khususnya dari ancaman dominasi, ketidak-adilan, kesewenangan dan kekerasan pihak luar. Otonomi daerah merupakan wujud dari Umwelt, yang di dalamnya diandaikan terdapat 'ruang-ruang keadilan' yang didambakan tersebut. Disebabkan ditemukannya sebuah tempat yang 'aman' tersebut, cenderung menimbulkan sikap hiper-proteksi (hyper protection) terhadap pihak-pihak luar yang dianggap mengancam.

J.F. Lyotard, di dalam Differend: Phrases in Dispute berbicara tentang sebuah situasi konflik (politik, social, budaya) di antara (setidak-tidaknya) dua pihak, yang tidak diterapkan untuk kedua belah pihak, yang disebutnya situasi differend. Inilah situasi 'perselisihan' (dispute), ketika tidak mungkin ditemukan

consensus, yang menggiring pada kondisi interminasi dan ketidak-stabilan.[2] Kondisi dispute ini berpotensi untuk berkembang dalam hubungan geo-politik atau geo-kultur antar-suku, antar-agama, antar-partai, antar-ras, dan antar-daerah.

Horor, Kematian dan Kegilaan.

Citra kejayaan, keadidayaan, superioritas suku, agama, ras menuntut adanya mekanisme 'kekerasan'. 'horor' adalah lukisan dan citra dunia, yang didalamnya manusia menerima eksistensinya sebagai sebuah perjalanan didalam berbagai ancaman kekerasan menuju kematian.

Dalam citra superioritas itu, berbagai tindakan kekerasan, keberutalan dan horor yang terjadi telah menjelma menjadi sebuah tindakan ekstasi penghancuran (ecstasy of destructiveness)-sebuah istilah yang digunakan oleh Erich Fromm di dalam The Anatomy of Human Destructiveness, untuk menjelaskan sebuah proses penghancuran yang diiringi oleh sikap ketidak acuhan, kegembiraan bahkan kepuasan puncak. Penghancuran yang menyenangkan itu muncul ketika manusia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam menjaga eksistensinya (care), yaitu akal sehat (reason), pengendalian diri (selp control) dan cinta (affection), yang menyebabkan kita melepaskan seluruh katup death instincts dan energi penghancuran (destructiveness). Ketika manusia kehilangan semua sifat itu, maka manusia menjadi sosok-sosok yang mampu menjaga eksistensinya (careless).

Heideger di dalam Discourse on Thinking, menyebut manusia yang tidak mampu lagi menggunakan akal sehat ini sebagai manusia yang terjerat dalam 'ketidakberpikiran' (thoughtlessness).Namun, dengan istilah itu, Heideger tidak bermaksud untuk mengatakan, bahwa manusia itu tidak berpikir, akan tetapi berpikir dalam model 'berpikir kalkulatif' (calculative thinking), yaitu berpikir mengenai statistic, di satu pihak: keuntungan, kerugian, laba, modal, produksi; di pihak lain, persaingan, ekspanasi, penguasaan, penyerangan, perebutan, bahkan penghancuran; tanpa mampu lagi menghidupkan model 'berpikir meditatif' (meditative thinking), yaitu berpikir kearah pencarian makna eksistensial yang lebih dalam. [3] inilah cara berpikir 'kapitalistik' dan 'militeristik', yang mendominasi citra bangsa kita, yang di dalamnya inheren sifat-sifat 'agresivitas' dan 'destruktivisme'.

Kekerasan dan agresivitas bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, akan teapi merupakan bagian dari sebuah 'sindrom'. Ia merupakan bagian dari sebuah system, yang memungkinkannya terjadi, seperti: dominasi berlebihan, birokrasi kaku, kelas-kelas sosial, dsb. Agresi merupakan produk sosial dan cultural, yang menanamkan nilai-nilai 'kekerasan' pada masyarakat. Akan tetapi, selain factor sosial-kultural, ada faktor-faktor subyektif lainnya, yang memicu kekerasan. Faktor subyektif yang dimaksud Fromm kecendrungan 'trance'. Kekerasan merupakan sebuah trance. Fromm menyebut kekerasan berlatar-belakang trance ini 'penghancuran bersifat ekstasi' (ecstatic destructiveness) [1] 'Ektasi adalah sebuah kondisi mental atau spiritual yang mencapai keadaan puncak, tatkala jiwa secara tiba-tiba naik menuju tingkat pengalaman yang jauh 'melampaui' kenyataan sehari-hari, sehingga mencapai puncak kemampuan diri dan kebahagiaan yang luar biasa diiringi oleh trance, dan kemudian 'pencerahan' [2] Dalam ekstasi, orang 'tidak lagi menjadi dirinya'. Ia 'menjadi sesuatu yang lain'. Ada satu kekuatan lain yang mengendalikannya. Ia tidak menjadi 'dirinya ketika menikmati kesenangan (ekstasi), termasuk ekstasi penghancuran.

John Gunn, di dalam Violence in Human Society mengatakan, bahwa bencana krisis kemanusiaan di dalam sebuah masyarakat terjadi bila ikatan positif atau perekat (social,cultural, spiritual,)-dalam bentuk cinta, persahabatan, kasih sayang, saling pengertian-telah hancur. Hancurnya ikatan-ikatan itu, akan menggiring masyarakat kearah sifat-sifat kebencian, (hatred) atau kemarahan (anger), yang menggiringnya kearah tindak-tindak kekerasanatau kekejaman. Dalam bahasa yang lebih eksistensial, kekersan berkembang masyarakat idak mampu lagi merawat (care) hidup dan eksistensi. Hidup dibiarkan dalam kondisi ketidak-terawatan (carelessness), sehingga dikuasai oleh citra-citra yang menakutkan.

Secara psikologis, kekejaman yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan 'trauma' pada korban, pada orang yang menyaksikannya, atau bahkan pada pelaku sendiri. Trauma itu akan lebih hebat lagi pengaruhnya, bila kesadisan dan kekejaman terebut terjadi didalam bentuknya yang kolosal dan masal,serta dengan insentitas yang tinggi. Akan tetapi, secara cultural, kekejaman yang terjadi berulang-ulang tersebut-sebagaimana yang dikatakan oleh Julia Kristeva di dalam Power of Horror, justeru dapat menjadi kebiasaan, menjadi

bagian dari sebuah ritual, menjadi bagian dari kebudayaan-budaya kekerasan.[3]

Bahkan, lebih jauh lagi, kekerasan itu dapat menjadi bagian dari sebuah kepahlawanan, sebuah kebanggaan dan sebuah kesenangan (jouissance), yang didalamnya kebencian bercampuraduk dengan kegembiraan. Bukankah campur-aduk kebencian yang mendalam (abomination) dan kesenangan puncak (jouissance) seperti itulah yang kita saksikan di dalam euphoria-kekerasan yang melanda tubuh bangsa kita akhir-akhir ini? Michel Foucault mengatakan di dalam The Use of Pleasure, bahwa kesenangan (pleasure) dapat memerangkap seseorang di dalam sebuah perasaan yang ambigu. Kekerasan kadang-kadang menyebabkan seseorang tenggelam kedalam ekstasi, keriangan-teriakan gila, jeritan ekstasi, pikiran kegembiraan-semuanya merupakan ekspresi dari perasan kesenangan, meskipun kesenangan itu muncul di balik sebuah kekejaman.[4]

Di dalam ekstasi kekerasan, kematian menjadi sesuatu yang banal, sesuatu yang ringan, sesuatu yang murah. Kematian menjadi sebuah strategi yang disebut Baudrillard di dalam Fatal Strategis, sebagai strategi kesia-siaan (banal strategy) [5]-sebuah kematian yang ringan. Kematian boleh jadi merupakan sesuatu yang mahal dan sacral, akan tetapi boleh jadi disebabkan oleh alasan yang banal, ringan, inilah sebuah kematian yang sia-sia (the banal death)_sebuah kematian yang menyakitkan, tetapi oleh sebuah peristiwa yang sangat sederhana dan biasa.[6] 'strategi banal' secara eksistensial adalah menyia-nyiakan eksistensi kedalam pengaruh dan penjajahan citra-citra banal (banal images) itu sendiri. Akan tetapi, didalam dunia yang dijajah oleh ontology citra, segala citra banal (gaya hidup, hiburan, tontonan, hobbi) itu kini menjadi unsure-unsur penting, mengambil alih segala citra bentuk lainnya (kemanusiaan, kesucian, keilahian),dan ia menjadi antologi citra dominan manusia. Pengejaran kearah citra banal itu adalah lukisan perjalanan eksistensial manusia modern (pos-modern) kini, yang di dalamnya perjalanan ada menuju kematian menjadi sebuah perjalanan dalam banalitas (ontology of banality).

Kini, kekerasan dan kematian yang di produksinya itu sendiri yang kini menjadi banal. Kita sampai kepada sebuah benua, yang di dalamnya citra kematian (image of death) menjelma menjadi citra-citra temeh-temeh, enteng, mudah dan 'menghibur'. Kematian sebagaimana dikatakan baudrillard di dalam Symbolic

Excange and Death, kini menjadi bagian dari pertukaran umum (general equivalence).[7]

Di sebabkan cara berpikir umum masyarakat kini adalah cara berpikir kalkulatif, sebagaimana dikatakan Heidegger, maka kematian itu sendiri diekivalensikan dengan kalkulasi keuntungan. Inilah banalitas kematian dalam konteks industri persenjataan global (war machine), yang keberlanjutan industrinya hanya dimungkinkan bila selalu ada 'kebutuhan pemusnahan', artinya selalu ada 'produksi kematian' (production of death). Dalam lukisan dunia seperti in, perjalanan eksistensial manusia menuju kematian menjelma menjadi sebuah perjalanan 'ironi', yaitu 'perjalanan menuju kematian yang dilalui disepanjang jalan yang penuh dengan citra banalitas kematian itu sendiri'. 'Ada' menjadi 'ada menuju kematian' lewat banalitas kematian.

Horosofi dan Simulasi Kekerasan.

Kekerasan dan horror yang beroprasi di atas tubuh bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari peran para 'perancang kekerasan', yang bisa berupa individu, kelompok atau Negara (state). Kekerasan ini menyatu dengan kekuasaan, siapapun yang memiliki kekuasaan itu. Sehingga, kini tidak hanya ada relasi kekuatan pengetahuan (power/knowledge) sebagaimana yang dikatakan Foucault, tetapi juga kekuatan kekerasan (power/violence). Kekerasan kini menjadi bagian yang menyatu dengan proses pencarian dan pelanggengan kekuasaan.

Jean Baudrillard, seorang pemikir perancis di dalam bukunya The Perfect Crime, menjelaskan tentang 'simulakrum kejahatan' (simulacrum of violence), yaitu kekerasan, horor dan teror yang diciptakan,sedemikian rupa, sehingga seolah-olah ia tampak terjadi secara alamiah, padahal direkayasa.12 Kejahatan kemudian berbaur dengan 'rekayasa kejahatan', dan akhirnya batas diantara keduanya menjadi kabur.Teror, kejahatan, dan kerusuhan dengan sengaja diciptakan berdasarkan sekenario-sekenario tertentu. Kejahatan diciptakan sedemikian rupa, sehingga selalu muncul image, bahwa hanya kelompok masyarakat tertentulah yang dianggap berbuat kejahatan terhadap pihak penguasa.

Simulakrum kekerasan adalah kekerasan yang dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah 'drama', yang di dalamnya para pelaku kekerasan adalah 'aktor-aktor sosial', yang melakukan tindakan kekerasan (penjarahan, pembakaran, perkosaan

massal) berdasarkan peran makna masing-masing berdasarkan sebuah narasi (narration), tema, dan sekenario tertentu. Ia adalah sebuah drama sosial, yang di dalamnya tempat, kostum, bahasa, atribut, simbol, lambang yang digunakan di dalamnya disetting, sesuai dengan rencana tertentu. Ia adalah kekerasan yang dikontruksi secara sosial dalam rangka menciptakan sebuah image tertentu tentang seseorang, sebuah golongan, sebuah negara, atau sebuah bangsa. Akan tetapi, sebagaimana simulakrum pada umumnya, citra yang tampil adalah citra yang distortif (distraced image), citra yang penuh prasangka, fitnah terbuka (blackmail), dan disinformasi. Ketika kekerasan dikontruksi menjadi sebuah citra, maka ia akan memproduksi citra untuk dijadikan sebagai stereotif-stereotif sosial (islam sebagai 'teroris', bangsa Indonesia sebagai 'genocide)-social contruction of violence.

Feter L. Berger & Thomas Luckman, di dalam The Construction of Reality, berbicara mengenai sebuah konsep sosiologi tentang realitas. Apa yang kita terima sebagai realitas, sebagai pengetahuan, semuanya dikontruksi secara sosial-artinya, dibentuk oleh masyarakat di mana realitas itu mengambil tempat. Kita hidup di sebuah dunia, di mana pengetahuan dipersentasikan lewat tanda-tanda (sign), yang mempunyai makna (meaning) tertentu bagi kita. Akan tetapi tanda-tanda tersebut bukan ciptaan kita, melainkan telah disediakanoleh elit-elit (produser media) bagi kita sebagai anggota masyarakat untuk dipahami kode-kode (social code) dan maknanya, dan makna-makna tersebut akan 'tercetak' diri kita secara sosial. [13] Deviasi, pelencengan dan pemutarbalikan tanda, kode dan maknanya oleh elit-elit sosial ini, akan mencetak sebuah deviasi dan pelencengan pada tingkat pengetahuan sosial. Deviasi (tanda, citra, kebenaran) itu akhirnya menjadi 'pengetahuan' (knowledge) masyarakat. Simulkaram kekerasan adalah kekerasan yang menutupi 'kebenaran' (truth) sebuah peristiwa kekerasan dengan 'kebenaran palsu' (flase truth). Ia menampakan dirinya seakan-akan asli, padahal palsu; seakan-akan kebenaran, padahal dusta; seakan-akan realitis, padahal rekayasa sosial.

Kekerasan Simbol dan Creative Destruction.

Kekerasan, pada hakikatnya,adalah sebuah ironi, sebuah absurditas. Disatu pihak, berbagai peristiwa kejahatan dikatakan sebagai kejahatan (criminality) dan kekerasan (vilence),

disebabkan di dalamnya terdapat unsur pemaksaan terhadap orang lain; atau pelanggaran atas hak azasi orang lain. Akan tetapi, di pihak lain, berbagai peristiwa kekerasan itu, pada kenyataannya bersifat 'kreatif' (creative destructiveness), disebabkan dalamnya diperlakukan kebaruan, inovasi, kelihayan, informasi,pengetahuan, kecerdikan dan kecerdasan. Akan tetapi kreativitas itu ditunjukan untuk kejahatan dan penghancuran destructive creativity.

Berdasarkan tujuannya, ada dua kategori kreativitas. Pertama, kreativitas konstruktif (constructive creativity), yaitu kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya untuk tujuan yang positif. Kedua, kreativitas destruktif (destructive creatifity), yaitu kreativitas dalam menciptakan hal baru untuk tujuan penghancuran, kekacauan dan permusuhan. Kreativitas destruktif pada tingkatnya yang lebih komplek adalah pengiringan umat manusia ke arah penghancuran dirinya sendiri di masa depan: ancaman senjata nuklir, rusaknya lubang ozon, polusi limbah, perang bintang, terorisme global- a creative self destruction.

Lukisan bangsa kita kini diarahkan kedalam kondisi penghancuran diri sendiri yang kreatif tersebut.Manusia Indonesia-kalau tidak menjadi bagian aktif dari proses penghancuran diri sendiri itu-setidak-tidaknya menjadi 'penonton' dari teater horor yang mengerikan tersebut. Manusia Indonesia kini hidup dalam sebuah dunia yang dikelilingi oleh berbagai bentuk suguhan 'tontonan' realitas kekerasan yang menyakitkan itu: penghancuran, pembantaian, peledakan bom, penjarahan, tawuran, penyiksaan, penculikan, pembakaran manusia)

Kekerasan juga ditampilkan lewat 'citra visual kekerasan' (visual image of violence) melalui berbagai media (televisi, film, video-game,internet), yang didalamnya disajikan ready-made reality berupa tontonan kekerasan, yang ironisnya, justru mempunyai nilai-nilai kretivitas, meskipun yang mengandung unsur-unsur agresivitas dan destruktivisme. Dan, citra media yang bersifat agresif dan destruktif ini menjadi semacam 'monumen budaya', dalam pengertian akan menjadi 'memori budaya' (cultural memory), yang akan membentuk wajah kebudayaan masa depan. Sebab, sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel miller di dalam Material Culture and Mass Consumption, sebuah obyek kebudayaan tidaklah berdiri sendiri, terlepas dari manusia. Ada sebuah proses dialektika obyek/

subyek atau objectification, yang di dalamnya manusia melakukan eksternasilasi (externalisation)-berupa menciptakan kreasi-kreasi. Kemudian, ada proses internalisasi (internalisation)-yaitu proses mengendapkan dan menanamkan makna obyek ciptaan tersebut, yang akan menjadi dasar proses eksternalisasi berikutnya. Bila yang diinternasilasikan itu adalah makna-makna destruktif, maka makna itu dapat menjadi dasar bagi kreasi-kreasi destruktif mereka yang lebih dahsyat di masa mendatang.[8]

Piere Bourdieu, di dalam Outline of a Theory of Practice, menggunakan istilah 'kekerasan simbol' (syimbolic violence) untuk menjelaskan sebuah bentuk kekerasan khusus dalam mekanisme bahasa dan kekuasaan, yaitu sebuah 'bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak',yang tidak dikenal, atau hanya dikenal hanya dengan menyembunyikan mekanisme tempatnya bergantung. Konsep kekerasan simbol menggiring kita kesebuah arah mekanisme sosial, yang di dalamnya relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan [9] Sebuah sistem kekuasaan cendrung untuk melanggengkan posisinya yang dominan dengan cara mendominasi media komunikasi, bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi, serta interpretasi terhadap makna-makna tersebut-inilah dominasi simbol (symbolic domination)[10] Di dalamnya proses dominasi tersebut sebetulnya terjadi sebuah 'pemaksaan simbolik yang sangat halus', orang yang didominasi secara simbolik tersebut tidak menyadari adanya pemaksan, atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang memang seharusnya begitu.

005608.4
B2.1

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta 10110 - Indonesia